



Pemerintah Kabupaten Bulukumba

Peraturan Bupati Bulukumba

Nomor 15 Tahun 2022

Tentang

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

**Pengembangan Daya Tahan Perekonomian
Masyarakat Dengan Peningkatan Produktivitas Sektor
Unggulan Daerah**



Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah
2022



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Srikaya No. 2 Bulukumba Tlp.(0413) 81070

PERNYATAAN TELAH DIREVIU RANCANGAN AKHIR RKPD KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023, Substansi Informasi yang dimuat menjadi tanggung jawab Tim Penyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas terhadap Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2023, apakah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, masih terdapat beberapa hal yang menjadi catatan untuk segera dilakukan perbaikan oleh Tim Penyusun Rancangan Akhir RKPD sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Bupati sehingga Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2023 tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan.

Bulukumba, 27 Mei 2022

Inspektur Daerah



Taufik, SH.,MH

Rangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19630231 199203 1 102



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 517);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2014 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan RKPD Tahun 2023 yang berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 - 2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), program strategis provinsi dan nasional yaitu untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Bulukumba dengan pembangunan provinsi dan nasional yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nyata daerah dalam upaya perbaikan disegala bidang pembangunan.

- 2) Tujuan Penyusunan RKPD Tahun 2023 untuk dijadikan sebagai:
- a. pedoman bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
 - b. acuan dan atau pedoman dalam penyelerasan bagi Pemerintah Desa atau Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Bulukumba dalam mendukung capaian target dan sasaran Pembangunan Daerah; dan
 - c. secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun 2023.

BAB III SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

RKPD Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I PENDAHULUAN
- b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- c. BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
- d. BAB IV SASARAN PRIORITAS DAN PEMBANGUNAN DAERAH
- e. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
- f. BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
- g. BAB VII PENUTUP

BAB IV RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) RKPD Tahun 2023, yaitu Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah.
- (3) Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah yang terdapat dalam Bab III tidak memproyeksikan alokasi Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) sehingga apabila terdapat ketidaksesuaian pagu anggaran antara RKPD dengan APBD Tahun 2023, maka akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
- (4) Sasaran dan Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdapat pada Bab IV.
- (5) Rencana kerja dan pendanaan daerah yang terdapat pada Bab V memuat program dan kegiatan SKPD disertai dengan pagu anggaran yang sifatnya indikatif.

Pasal 5

Dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023:

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2023 sebagai bahan acuan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah bersama DPRD; dan
- b. Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2023 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah bersama DPRD.

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulanan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program dan kegiatan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bulukumba paling lama 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan dimaksud.
- (3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 7

Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, dapat diformulasikan terlebih dahulu dalam Rencana Kegiatan Anggaran Perangkat Daerah dan/atau Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

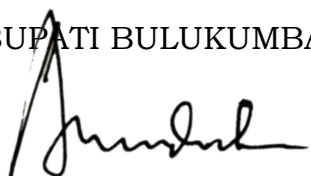
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menelaah kesesuaian antara rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023 hasil pembahasan bersama DPRD.

BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba.
pada tanggal 1 Juli 2022

BUPATI BULUKUMBA,

MUHTAR ALI YUSUF

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 1 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,


MUH. ALI SALENG

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022 NOMOR 15

Daftar Isi

Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	xiv
Daftar Grafik	xv
Daftar Kuadran	xvii
Lampiran – lampiran	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3 Hubungan Antar Dokumen	6
1.4 Maksud Dan Tujuan	7
1.5 Sistematika Dokumen RKPD.....	7
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	9
2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah	9
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	9
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	18
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum.....	54
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah	143
2.1.5 Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021	146
2.2 Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	157
2.2.1 Evaluasi capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)	160
2.3 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ <i>Sustainable Development Goals</i> (TPB/SDGs)	161
2.3.1 Evaluasi Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ <i>Sustainable</i> Development Goals (TPB/SDGs)	181
2.4 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	184
2.5 Permasalahan Pembangunan Daerah.....	196
2.5.1 Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.....	196
2.5.2 Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Daerah (Permasalahan Menurut Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah)	196
2.6 Isu Strategis.....	202
2.6.1 Isu Strategis Global.....	203
2.6.2 Isu Kebijakan Nasional	205
2.6.3 Isu Strategis Daerah.....	206
2.7 Inovasi Daerah.....	208
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	215
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	215
3.1.1 Prospek Dan Tantangan Perekonomian Daerah	216
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	230
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	230
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja	234

3.2.3.	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	239
3.3	Pendanaan Pembangunan Lainnya.....	241
3.3.1	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).....	241
3.3.2	Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)	241
3.3.3	Pembiayaan Utang Daerah.....	242
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	243
4.1	Tujuan Dan Sasaran Pembangunan.....	243
4.2	Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023.....	252
4.2.1	Sinergitas Prioritas Nasional dengan Prioritas Kabupaten Bulukumba	252
4.2.2	Sinergitas Perencanaan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Prioritas Kabupaten Bulukumba	255
4.2.3	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023	256
4.2.4	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023	276
4.3	Dukungan Terhadap Prioritas Provinsi dan Nasional.....	277
4.3.1	Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bulukumba dan Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.....	277
4.3.2	Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bulukumba dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 ..	291
4.4	Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Bulukumba.....	303
4.4.1	Bidang Pemerintahan.....	303
4.4.2	Bidang Ekonomi dan Keuangan	303
4.4.3	Bidang Pembangunan	304
4.4.4	Bidang Kesejahteraan Rakyat.....	305
4.5	Integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i> dengan RKPD Tahun 2021	306
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	320
5.1	Kerangka Pendanaan Tahun 2023	320
5.2	Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	320
5.3	Indikasi Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Bulukumba Tahun 2023	333
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	335
6.1	Indikator Makro Pembangunan	335
6.2	Indikator Kinerja Utama (IKU)	336
6.3	Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	337
6.4	Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)	351
6.5	Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / <i>Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)</i>	354
BAB VII	PENUTUP	364
7.1	Kaidah Pelaksanaan	364
7.2	Kesimpulan.....	365

Daftar Tabel

Tabel II-1 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Bulukumba.....	9
Tabel II-2 Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Bulukumba	12
Tabel II-3 Data Ruas dan Kondisi Kanal dalam Kota Bulukumba Tahun 2021	13
Tabel II-4 Jumlah Kejadian Bencana di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021.....	15
Tabel II-5 Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bulukumba tahun 2017-2021	16
Tabel II-6 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bulukumba, 2021.....	17
Tabel II-7 Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Bulukumba tahun 2017-2021	18
Tabel II-8 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017 – 2022	18
Tabel II-9 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2017 – 2021	19
Tabel II-10 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bulukumba (persen), 2017–2021	21
Tabel II-11 Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	22
Tabel II-12 Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) Kabupaten Bulukumba, Tahun 2017 – 2021	23
Tabel II-13 Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (%) Kabupaten Bulukumba, Tahun 2017 – 2021	24
Tabel II-14 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin (Persen) dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2017 – 2021	24
Tabel II-15 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin (Persen) dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2017 – 2021	26
Tabel II-16 Penduduk Diatas Garis Kemiskinan Kab. Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2017-2021	27
Tabel II-17 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin (Persen) dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2017 – 2021	27
Tabel II-18 Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	29
Tabel II-19 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2017 – 2021	29
Tabel II-20 Perbandingan Gini Rasio Kabupaten Bulukumba dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2017 – 2021	31
Tabel II-21 Perbandingan Capaian IPM Kabupaten Bulukumba.....	34
Tabel II-22 Perbandingan Capaian Rata-Rata lama Sekolah Kabupaten Bulukumba dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2017 – 2021	35
Tabel II-23	37
Tabel II-24 Perbandingan Capaian Umur Harapan Hidup (UHH-Tahun) Kabupaten Bulukumba Sulawesi, Selatan dengan Nasional, 2017-2021	39
Tabel II-25 Perbandingan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Bulukumba	39
Tabel II-26 Perbandingan Pengeluaran Perkapita Masyarakat (Ribu Rp/Orang/Tahun) Kabupaten Bulukumba dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2017 – 2020	42
Tabel II-27 Perbandingan PDRB Perkapita (ADHB dan ADHK) Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional tahun 2017-2021	43
Tabel II-28 Perbandingan pertumbuhan PDRB per kapita ADHB dengan rata-rata capaian wilayah yang setara, Tahun 2017-2021	44
Tabel II-29 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Beberapa Wilayah di Sulawesi Selatan,..	48

Tabel II-30 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bulukumba dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional (Persen), Tahun 2017-2021.....	52
Tabel II-31 Angka Balita Gizi Buruk Tahun 2017 - 2021	53
Tabel II-32 Perkembangan Indikator Sektor Seni Budaya dan Olahraga Kabupaten Bulukumba 2017- 2021	54
Tabel II-33 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Bulukumba, Tahun 2017 - 2021	55
Tabel II-34 Perkembangan APM Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 - 2021	55
Tabel II-35 Perkembangan Angka Putus Sekolah di Kabupaten Bulukumba, Tahun 2017 - 2021	57
Tabel II-36 Perkembangan Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 - 2021	57
Tabel II-37 Rasio Guru-Murid dan Sekolah Kabupaten Bulukumba, Tahun 2017 - 2021	58
Tabel II-38 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	58
Tabel II-39 Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021.....	59
Tabel II-40 Angka Kematian Balita (AKBa) Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	59
Tabel II-41 Angka Kematian Neonatal Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021.....	59
Tabel II-42 Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	60
Tabel II-43 Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021 ..	60
Tabel II-44 Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Per Satuan Penduduk	61
Tabel II-45 Rasio Rumah Sakit dan Rasio Klinik Per Satuan Penduduk	61
Tabel II-46 Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	62
Tabel II-47 Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Kabupaten Bulukumba Tahun 2017- 2021	62
Tabel II-48 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	63
Tabel II-49 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	63
Tabel II-50 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	64
Tabel II-51 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA.....	64
Tabel II-52 Tingkat Prevalensi Tuberkolosis.....	64
Tabel II-53 Tingkat Kematian Karena Tuberkolosis Kabupaten Bulukumba Tahun 2017- 2021	65
Tabel II-54 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	65
Tabel II-55 Angka Kejadian Malaria Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	66
Tabel II-56 Prevalensi HIV/AIDS Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	66
Tabel II-57 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	67
Tabel II-58 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021.	67
Tabel II-59 Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Keluarga Miskin Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	68
Tabel II-60 Cakupan Pelayanan Dasar Masyarakat Miskin Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	68
Tabel II-61 Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik Kabupaten Bulukumba Tahun 2017- 2021	69
Tabel II-62 Proporsi Panjang Jalan Per Satuan Penduduk Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	69
Tabel II-63 Perkembangan Indikator Aspek Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021.....	70
Tabel II-64 Persentase permukiman yang tertata Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	70

Tabel II-65 persentase lingkungan permukiman kumuh.....	70
Tabel II-66 Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau.....	70
Tabel II-67 Persentase rumah tinggal bersanitasi Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	71
Tabel II-68 Persentase penduduk berakses air minum Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	71
Tabel II-69 Persentase areal kawasan kumuh Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021 ..	71
Tabel II-70 Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan.....	71
Tabel II-71 Perkembangan Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 – 2021.....	72
Tabel II-72 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban. Ketentraman dan Keindahan	72
Tabel II-73 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota.....	72
Tabel II-74 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 – 2021 ...	73
Tabel II-75 Persentase Penegakan PERDA) di Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 – 2021	73
Tabel II-76 Sarana Sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi.....	74
Tabel II-77 Jumlah Korban Bencana yang Ditangani	74
Tabel II-78 Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial di	74
Tabel II-79 Perentase PMKS yang tertanganidi Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 – 2021	75
Tabel II-80 Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap daruratdi Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 – 2021.....	75
Tabel II-81 Persentase Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 – 2021	75
Tabel II-82 Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Bulukumba tahun 2021	76
Tabel II-83 Angka sengketa pengusaha-pekerja Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 – 2021	77
Tabel II-84 Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB).....	77
Tabel II-85 Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 – 2021	77
Tabel II-86 Besaran pencari kerja yang terdaftar yang Ditempatkan Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 – 2021.....	77
Tabel II-87 Besaran Pemeriksaan Perusahaan Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 – 2021	78
Tabel II-88 Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 – 2021.....	78
Tabel II-89 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Kompetensi Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 – 2021.....	78
Tabel II-90 Rasio lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 – 2021.....	79
Tabel II-91 Rasio daya serap tenaga kerja Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 – 2021	79
Tabel II-92 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan Kewirausahaan Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 – 2021	79
Tabel II-93 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Masyarakat	80
Tabel II-94 Persentase partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 – 2021	80
Tabel II-95 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 – 2021	80
Tabel II-96 Partisipasi perempuan di lembaga swasta Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 – 2021.....	81
Tabel II-97 Rasio KDRT Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 – 2021.....	81

Tabel II-98 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 – 2021	81
Tabel II-99 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan Terpadu Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 – 2021.....	81
Tabel II-100 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 – 2021	82
Tabel II-101 Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 – 2021.....	83
Tabel II-102 Indikator Urusan Pangan Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	83
Tabel II-103 Ketersediaan Energi dan Ketersediaan Protein Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	84
Tabel II-104 Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	84
Tabel II-105 Pola pangan harapan (PPH) Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021.....	84
Tabel II-106 Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	85
Tabel II-107 Penyelesaian kasus tanah Negara di Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	85
Tabel II-108 Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	85
Tabel II-109 Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	86
Tabel II-110 Hasil Pengukuran IKTL Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	86
Tabel II-111 Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021.....	86
Tabel II-112 Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	87
Tabel II-113 Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021.....	87
Tabel II-114 Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	87
Tabel II-115 Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	88
Tabel II-116 Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	88
Tabel II-117 Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	88
Tabel II-118 Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	88
Tabel II-119 Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	89
Tabel II-120 Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021.....	89
Tabel II-121 Timbulan sampah yang ditangani Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021.....	89
Tabel II-122 Persentase jumlah sampah yang tertangani Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	90

Tabel II-123 TabelOperasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	90
Tabel II-124 Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundang-undangan (sektor industri) Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	90
Tabel II-125 Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	91
Tabel II-126 Proporsi tutupan lahan terhadap luas lahan keseluruhan Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	91
Tabel II-127 Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	91
Tabel II-128 Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	92
Tabel II-129 Perkembangan Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	92
Tabel II-130 Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang Baik Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	93
Tabel II-131 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	93
Tabel II-132 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	94
Tabel II-133 Persentase PKK aktif Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	94
Tabel II-134 Persentase Posyandu aktif Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	95
Tabel II-135 Persentase LSM aktif dan Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	95
Tabel II-136 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	96
Tabel II-137 Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	97
Tabel II-138 Persentase Perangkat Daerah(Dinas/Badan) Yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung Kb Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	97
Tabel II-139 Persentase Perangkat Daerah Dinas/Badan Yang Menyusun Dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Kabupaten Bulukumba 2017-2021	98
Tabel II-140 Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) Yg Mengatur Tentang Pengendalian Kuantitas Dan Kualitas Penduduk Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	98
Tabel II-141 Jumlah Sektor Yg Menyepakati Dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter Dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Program Pembangunan Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	98
Tabel II-142 Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, Dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	99
Tabel II-143 Rata-rata jumlah anak per keluarga Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	99
Tabel II-144 Ratio Akseptor KB Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	99
Tabel II-145 Angka Pemakaian Kontrasepsi/ CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	100
Tabel II-146 Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19)Per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19) Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	100
Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2017 sebesar 3.96 persen meningkat sampai	

tahun 2019 sebesar 4.28 persen namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 4.25 persen dan tahun 2021 meningkat kembali sebesar 4,35.

Selengkapnya dilihat pada tabel berikut Tabel II-147 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Istrinya Dibawah 20 Tahun Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Tabel II-147 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Istrinya Dibawah 20 Tahun Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	100
Tabel II-148 Cakupan PUS Yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	101
Tabel II-149 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	101
Tabel II-150 Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	102
Tabel II-151 Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	102
Tabel II-152 Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja ber- KB Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	102
Tabel II-153 Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia ber- KB Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	103
Tabel II-154 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Di Setiap Kecamatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	103
Tabel II-155 Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	103
Tabel II-156 Cakupan PKB/PLKB Yang Didayagunakan Perangkat Daerah Kb Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Dibidang Pengendalian Penduduk Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	103
Tabel II-157 Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Yang Ber- KB Mandiri Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	104
Tabel II-158 Perkembangan Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	104
Tabel II-159 Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	104
Tabel II-160 Persentase Faskes Dan Jejaringnya Yang Bekerjasama Dengan BPJS Dan Memberikan Pelayanan KB/KR Yang Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	105
Tabel II-161 Cakupan Penyediaan Informasi Data Makro Keluarga Di Setiap Desa Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	105
Tabel II-162 Persentase Remaja Yang Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	105
Tabel II-163 Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	106
Tabel II-164 Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita Dan Anak Yang Memahami Dan Melaksanakan Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	106
Tabel II-165 Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	106
Tabel II-166 Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	107
Tabel II-167 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Kabupaten Bulukumba	107
Tabel II-168 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	107

Tabel II-169 Persentase Layanan Angkutan Darat Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	108
Tabel II-170 Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	108
Tabel II-171 Pemasangan Rambu-Rambu Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	108
Tabel II-172 Jumlah Orang/ Barang Yang Terangkut Angkutan Umum Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	108
Tabel II-173 Rasio Ijin Trayek Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021.....	109
Tabel II-174 Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021.....	109
Tabel II-175 Cakupan Layanan Telekomunikasi Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	109
Tabel II-176 Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021.....	109
Tabel II-177 Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	110
Tabel II-178 Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	110
Tabel II-179 Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunkasi Perangkat Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021.....	110
Tabel II-180 Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	111
Tabel II-181 Persentase Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	111
Tabel II-182 Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021.....	112
Tabel II-183 Jumlah Nilai Investor Berskala Nasional PMA/PMDN Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021.....	112
Tabel II-184 Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	112
Tabel II-185 Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	113
Tabel II-186 Persentase Wirausaha Muda Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021.....	113
Tabel II-187 Cakupan Pembinaan Olahraga Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021....	114
Tabel II-188 Cakupan Pelatih Yang Bersertifikasi Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	115
Tabel II-189 Cakupan Pembinaan Atlet Muda Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	115
Tabel II-190 Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	116
Tabel II-191 Jumlah Prestasi Olahraga Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021.....	117
Tabel II-192 Buku "Kabupaten Dalam Angka" Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	117
Tabel II-193 Buku "PDRB" Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	117
Tabel II-194 Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	118
Tabel II-195 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	118
Tabel II-196 Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi Dan Inventarisasi Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	118
Tabel II-197 Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021.....	119
Tabel II-198 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	119
Tabel II-199 Tabel Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	120

Tabel II-200 Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	120
Tabel II-201 Jumlah Rata-Rata Pengunjung Pepustakaan/Tahun Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	121
Tabel II-202 Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	121
Tabel II-203 Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	122
Tabel II-204 Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	122
Tabel II-205 Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	122
Tabel II-206 Capaian Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	123
Tabel II-207 Produksi Perikanan Tangkap Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	123
Tabel II-208 Produksi Perikanan Tangkap Berdasarkan Jenis Ikan Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	124
Tabel II-209 Produksi Perikanan Budidaya Berdasarkan Jenis Tempat, Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	124
Tabel II-210 Cakupan Bina Kelompok Tani Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021....	124
Tabel II-211 Kunjungan Wisata Kabupaten Bulukumba 2017-2021	125
Tabel II-212 Lama Kunjungan Wisata Kabupaten Bulukumba 2017-2021.....	125
Tabel II-213 PAD Sektor Pariwisata Kabupaten Bulukumba 2017-2021	125
Tabel II-214 Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Terhadap PDRB Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	125
Tabel II-215 Cakupan Bina Kelompok Tani Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021.....	126
Tabel II-216 Jumlah Populasi Ternak Kabupaten Bulukumba 2017-2021.....	126
Tabel II-217 Jumlah Pelanggan listrik Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	127
Tabel II-218 Cakupan Bina Kelompok Perdagangan di Kabupaten Bulukumba 2017-2021	127
Tabel II-219 Jumlah Pasar berdasarkan Kecamatan, Tipe serta Alamat Kabupaten Bulukumba tahun 2020.....	128
Tabel II-220 Produktivitas Sektor Industri di Kabupaten Bulukumba, 2017-2021.....	129
Tabel II-221 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD Yang Telah Ditetapkan dengan PERDA Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	130
Tabel II-222 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	130
Tabel II-223 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	130
Tabel II-224 Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	131
Tabel II-225 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	131
Tabel II-226 Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	131
Tabel II-227 Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	132
Tabel II-228 Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	132
Tabel II-229 Persentase SILPA terhadap APBD Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	133

Tabel II-230 Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	133
Tabel II-231 Persentase belanja pendidikan (20%) Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	134
Tabel II-232 Persentase Belanja Kesehatan (10%) Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	134
Tabel II-233 Penetapan APBD (tepat waktu/tidak) Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	135
Tabel II-234 Bagi hasil kabupaten/kota dan Desa Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	136
Tabel II-235 Persentase PAD terhadap Pendapatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	137
Tabel II-236 Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	138
Tabel II-237 Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	138
Tabel II-238 Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	138
Tabel II-239 Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	139
Tabel II-240 Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	139
Tabel II-241 Persentase tindak lanjut temuan Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	140
Tabel II-242 Persentase pelanggaran Pegawai Kabupaten Bulukumba 2017-2021	140
Tabel II-243 Jumlah temuan BPK Kabupaten Bulukumba 2017-2021	140
Tabel II-244 Persentase implementasi rencana Kelitbangan Kabupaten Bulukumba 2017-2021	140
Tabel II-245 Persentase pemanfaatan hasil Kelitbangan Kabupaten Bulukumba 2017-2021	141
Tabel II-246 Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah Kabupaten Bulukumba 2017-2021	141
Tabel II-247 Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Kabupaten Bulukumba 2017-2021	142
Tabel II-248 Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Bulukumba 2017-2021	142
Tabel II-249 Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda. dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen RPJMD maupun Dokumen RKPD Kabupaten Bulukumba 2017-2021	143
Tabel II-250 Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Kabupaten Bulukumba 2017-2021	143
Tabel II-251 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	145
Tabel II-252 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021	146
Tabel II-253 Capaian Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)	157
Tabel II-254 Capaian Indikator TPB/SDGs Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	163
Tabel II-255 Identifikasi Masalah hambatan dan kendala dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)	181
Tabel II-256 Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD dan APBD	185

Tabel II-257 Konsistensi dan Pelaksanaan Kegiatan RKPD	187
Tabel II-258 Konsistensi dan Pelaksanaan Sub Kegiatan RKPD	189
Tabel II-259 Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2021	190
Tabel II-260 Skala Nilai Peringkat Kinerja	192
Tabel II-261 Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Keuangan Evaluasi Hasil RKPD	192
Tabel II-262 Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten b\$ulukumba	195
Tabel II-263 Daftar Inovasi Kabupaten Bulukumba	208
Tabel III-1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	225
Tabel III-2 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Bulukumba Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2017 - 2021	226
Tabel III-3 Garis Kemiskinan (Rp), Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) dan Peresentase Penduduk Miskin Kabupaten Bulukumba Tahun 2017- 2021	226
Tabel III-4 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional Tahun 2017-2021	227
Tabel III-5 Target Indikator Makro Kabupaten Tahun 2021-2026.....	230
Tabel III-6 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2020-2024	233
Tabel III-7 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2024	238
Tabel III-8 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2024	240
Tabel III-9 Dana Tugas Pembantuan (TP) Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2021.....	241
Tabel IV-1 Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Bulukumba 2021-2026	244
Tabel IV-2 Perumusan Penjelasan Misi RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026	244
Tabel IV-3 Tujuan dan sasaran serta target Pembangunan Kabupaten Bulukumba Tahun 2023	246
Tabel IV-4 Keterkaitan RKPD Kab. Bulukumba Tahun 2023 antara sasaran RPJPD Kab. Bulukumba Tahun 2005-2025 dengan sasaran RPJMD Prov. Sulawesi Selatan 2018-2023 dan RPJMN 2020-2024	249
Tabel IV-5 Prioritas Nasional dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2023	255
Tabel IV-6 Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 .	256
Tabel IV-7 Sasaran Pembangunan Tahun 2023	258
Tabel IV-8 Hubungan Permasalahan Pembangunan Daerah Dan Isu Strategis Terhadap Prioritas Pembangunan Tahun 2023.....	261
Tabel IV-9 Keterkaitan Misi RPJMD dengan Prioritas Pembangunan Daerah untuk Tahun 2023	264
Tabel IV-11 Program Prioritas Pembangunan Tahun 2023	266
Tabel IV-12 Kesesuaian Prioritas Pembangunan Tahun 2023 dengan Sasaran RPJMD untuk Tahun 2023	274
Tabel IV-10 Keterkaitan Prioritas Pembangunan dengan Arah Kebijakan RPJMD untuk Tahun 2023	276
Tabel IV-13 Dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Terhadap Prioritas Provinsi Tahun 2023	278
Tabel IV-14 Dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Terhadap Prioritas Nasional Tahun 2023	292
Tabel IV-15 Matriks Integrasi TPB/SDGs Terhadap Program Prioritas RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2023	308
Tabel V-1 Rincian Rencana Pendanaan Tahun 2023	320

Tabel V-2 Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023	321
Tabel V-3 Rekap pagu Matriks Rencana Kerja dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 Kabupaten Bulukumba.....	333
Tabel V-4 Indikasi Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Bulukumba Tahun 2023	334
Tabel VI-1 Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2024	335
Tabel VI-2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 dan Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2023-2024 Kabupaten Bulukumba	337
Tabel VI-3 Capaian Indikator Kinerja Kunci Tahun 2021 dan Target Indikator Kinerja Kunci Tahun 2023-2024 Kabupaten Bulukumba.....	338
Tabel VI-4 Capaian Indikator SPM Tahun 2021 dan Target Indikator SPM Tahun 2023-2024 Kabupaten Bulukumba.....	351
Tabel VI-5 Penetapan Target Indikator TPB/SDGs Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 ..	355

Daftar Gambar

Gambar I-1 Hubungan Antar Dokumen RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2023.....	6
Gambar II-1 Peta Administratif Kabupaten Bulukumba	9
Gambar II-2 Peta Topografi Bulukumba	10
Gambar II-3 Peta Geologi Bulukumba.....	11
Gambar II-4 Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) di Bulukumba.....	12
Gambar IV-1 Tema RKP Tahun 2023 dan Prioritas Nasional RKP Tahun 2023	253
Gambar IV-2 Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023	254
Gambar IV-3 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023.....	254

Daftar Grafik

Grafik II-1 Ketinggian Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) dan Jarak ke Ibukota Kabupaten menurut Kecamatan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2021	11
Grafik II-2 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Bulukumba Menurut Kecamatan Tahun 2021	16
Grafik II-3 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2021	20
Grafik II-4 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi dengan target daerah dan capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional tahun 2021	21
Grafik II-5 Perbandingan Perubahan Persentase Penduduk Miskin (Persen) dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2017 – 2021	25
Grafik II-6 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin dengan target daerah, dan Capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional	26
Grafik II-7 Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Bulukumba Dengan Rata-Rata Capaian Wilayah Setara, tahun 2020	28
Grafik II-8 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (persen) Kabupaten Bulukumba Dengan Rata-Rata Capaian Wilayah Setara, tahun 2021	30
Grafik II-9 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka dengan target Kabupaten Bulukumba dan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional (Persen), Tahun 2021	31
Grafik II-10 Perbandingan Perubahan Gini Rasio Kabupaten Bulukumba	32
Grafik II-11 Perbandingan Capaian Gini Rasio dengan target Kabupaten Bulukumba dan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2021	33
Grafik II-12 Perbandingan Pertumbuhan IPM Kabupaten Bulukumba dengan Rata-Rata Capaian Wilayah Setara, tahun 2021	34
Grafik II-13 Perbandingan Capaian IPM dengan target Kabupaten Bulukumba dan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2021	35
Grafik II-14 Perbandingan Pertumbuhan RLS Kabupaten Bulukumba dengan Rata-Rata Capaian Wilayah Setara, tahun 2021	36
Grafik II-15 Perbandingan Capaian Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan dengan Nasional, 2017-2021	37
Grafik II-16 Perbandingan Capaian Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Bulukumba, dengan Rata-Rata Wilayah Setara tahun 2021	38
Grafik II-17 Perbandingan Capaian Pertumbuhan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Bulukumba, dengan Rata-Rata Wilayah Setara tahun 2021	40
Grafik II-18 Perbandingan Capaian harapan Lama sekolah (HLS-Tahun) Kabupaten Bulukumba Sulawesi, Selatan dengan Nasional, 2017-2021	41
Grafik II-19 Perbandingan Pertumbuhan Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah/Orang/Tahun) Kabupaten Bulukumba dengan Rata-Rata Capaian Wilayah Setara, Tahun 2021	42
Grafik II-20 Perbandingan Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah/Orang/Tahun) Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan dengan Nasional, 2017-2021	43
Grafik II-21 Perbandingan pertumbuhan PDRB per kapita ADHB dengan rata-rata capaian wilayah yang setara, Tahun 2021	45
Grafik II-22 Perbandingan PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan Capaian Nasional, Tahun 2021	46
Grafik II-23 Perkembangan Laju Inflasi Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan	47
Grafik II-24 Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	48
Grafik II-25 Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Bulukumba, Tahun 2017-2021	49

Grafik II-26 Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Bulukumba, Tahun 2017-2021.....	50
Grafik II-27 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021.....	50
Grafik II-28 Pengeluaran Per Kapita Riil Kabupaten Bulukumba, Tahun 2017-2021.....	51
Grafik II-29 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bulukumba (persen), tahun 2020.....	51
Grafik II-30 Perbandingan TPT Kabupaten Bulukumba dengan beberapa Kabupaten Tetangga, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional (persen), tahun 2021.....	53
Grafik II-31 Rata-rata Nilai Konsumsi/Pengeluaran Per Rumah Tangga Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 – 2020	144
Grafik II-32 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita Kabupaten Bulukumba 2017 – 2021	144
Grafik II-33 Jumlah Tindak Pidana Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 – 2021	145
Grafik II-34 Rasio ketergantungan Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2022	146
Grafik III-1 PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	225
Grafik III-2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab. Bulukumba Tahun 2017-2021 (Persen)	227
Grafik III-3 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab. Bulukumba,.....	228
Grafik III-4 Perbandingan Rasio Gini Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017-2021	228
Grafik III-5 Perbandingan PDRB Per Kapita Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional tahun 2017 – 2021.....	229
Grafik III-6 Inflasi Kabupaten Bulukumba, 2017-2021	230

Daftar Kuadran

Kuadran II-1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021 (Analisis Kuadran Pertumbuhan Ekonomi, 2021 Terhadap Rata-Rata Capaian Wilayah).....	20
Kuadran II-2 Analisis Kuadran Perubahan Angka Kemiskinan Terhadap Rata-rata Capaian Wilayah setara.....	25
Kuadran II-3 Analisis Kuadran Perubahan Indeks Kedalaman Kemiskinan Terhadap Rata-rata Capaian Wilayah setara (2017-2021)	28
Kuadran II-4 Analisis Kuadran Perubahan Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Bulukumba Terhadap Rata-rata Capaian Wilayah setara Tahun 2017 - 2021	30
Kuadran II-5 Analisis Kuadran Perubahan Gini Rasio Kabupaten Bulukumba Terhadap Rata-rata Capaian Wilayah setara Tahun 2017 - 2021	32
Kuadran II-6 Analisis Kuadran Pertumbuhan IPM Kabupaten Bulukumba Terhadap Rata-rata Capaian Wilayah setara Tahun 2017 – 2021	34
Kuadran II-7 Analisis Kuadran Pertumbuhan RLS Kabupaten Bulukumba Terhadap Rata-rata Capaian Wilayah setara Tahun 2017 – 2021	36
Kuadran II-8 Analisis Kuadran Perubahan Nilai UHH Terhadap Rata-rata Capaian Wilayah setara Tahun 2017 – 2021.....	38
Kuadran II-9 Analisis Kuadran Perubahan Nilai HLS Terhadap Rata-rata Capaian Wilayah setara Tahun 2017 - 2021	40
Kuadran II-10 Analisis Kuadran Perubahan Pengeluaran Perkapita Kabupaten Bulukumba Terhadap Rata-rata Capaian Wilayah tahun 2021	42
Kuadran II-11 Analisis Kuadran Pertumbuhan PDRB Perkapita (ADHB) Terhadap Rata-rata Capaian Wilayah	45

Lampiran – lampiran

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 15 TAHUN 2022 TANGGAL 1 JULI 2022
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN 2023

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA

NOMOR : 15 TAHUN 2022

TANGGAL : 1 JULI 2022

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH

DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka melakukan perubahan yang mengandung makna adanya kemajuan/perbaikan, pertumbuhan mencapai kondisi yang lebih baik dibanding keadaan sebelumnya. Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi, dan politik sampai pada perkembangan adanya penyesuaian dengan konservasi lingkungan. Nilai dalam pembangunan adalah optimalisasi sumberdaya dengan tetap menjaga kesinambungan serta kualitas lingkungan yang baik. Perencanaan Pembangunan Daerah secara umum merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Daerah sesuai dengan kewenangannya diwajibkan untuk menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 Tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD kemudian dijabarkan kedalam RKPD untuk setiap tahunnya. Serta dalam penyusunan RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 juga berpedoman pada RKP Nasional 2023 dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.

Sistematika dan tata cara penyusunan RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pada Pasal 16 Ayat (1) ini mengamanatkan bahwa

RKPD disusun dengan tahapan yaitu, persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, Pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

Dalam menyusun RKPD digunakan empat pendekatan perencanaan pembangunan yang meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratis dalam penyusunan RKPD dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari rembug warga, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional. Selain itu, perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilakukan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sedangkan pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2021 serta dinamika dampak sosial dan ekonomi dari Pandemi Global *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Adapun capaian Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 yaitu: Pertumbuhan Ekonomi 4,76 %, Tingkat Kemiskinan 7,43 %, Tingkat Pengangguran Terbuka 3,14 %, Gini Rasio 0,362, Indeks Pembangunan Manusia 69,62 Angka/Nilai dan PDRB Perkapita (ADHB) 36,05 Juta/Rp.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan
4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Hal-hal yang menjadi perhatian dalam menyusun RKPD ini juga mempertimbangkan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, isu-isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD serta sinergitas antar sektor dan antar wilayah serta penjangkaran aspirasi yang mengemuka sebagai hasil Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang) yang secara partisipatif dilakukan mulai dari desa/kelurahan, kecamatan sampai kabupaten.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan Hukum dalam Penyusunan RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
26. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86);

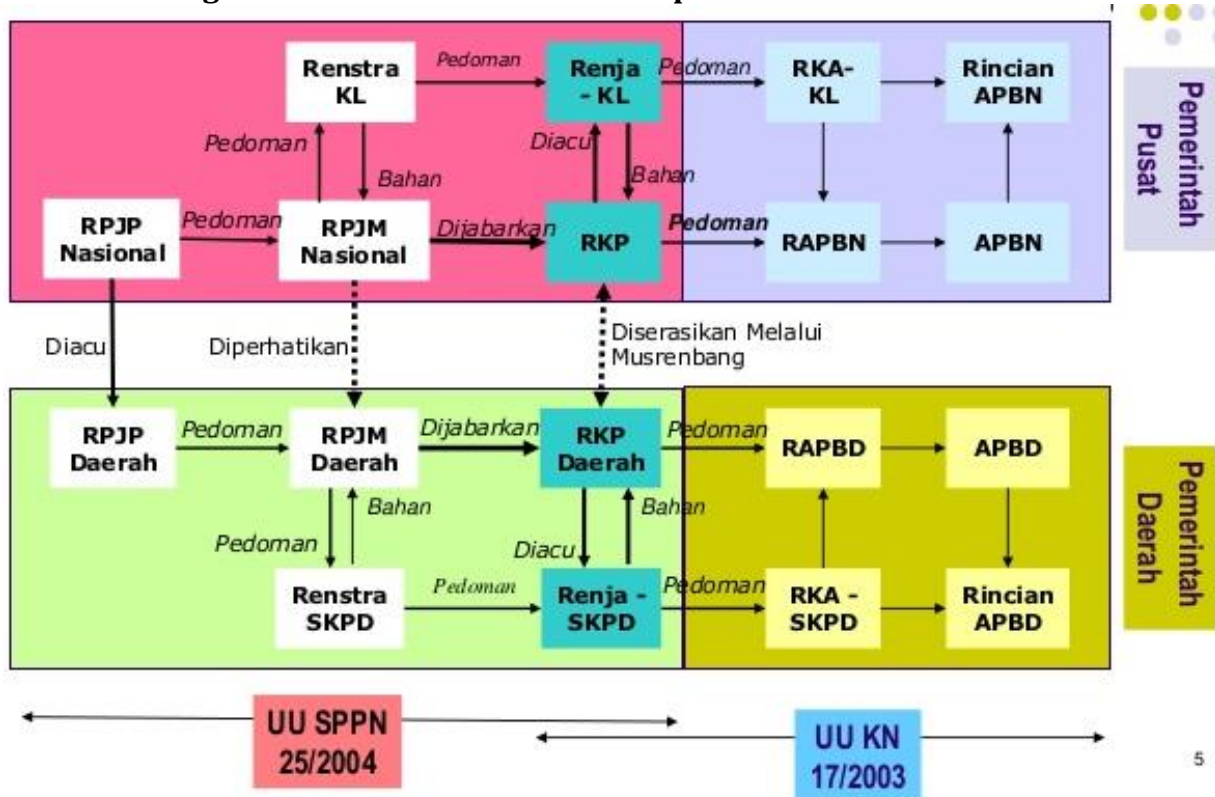
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2022 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 280);
38. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 302);
39. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 22);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 Nomor 7);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 4).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Hubungan RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2023 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai satu kesatuan dari seluruh rangkaian proses perencanaan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dan keterkaitan tersebut dapat dilihat dengan mengukur target kinerja yang ditetapkan pada setiap dokumen perencanaan, serta dengan melihat tingkat konsistensi, kesesuaian tujuan, serta tahapan penyusunan dan pelaksanaan tiap dokumen perencanaan yang dihasilkan oleh pemerintah baik pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah Rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan penjabaran dari RPJMD yang merupakan upaya pemerintah dalam merealisasikan target pembangunan jangka panjang daerah Keterkaitan antar dokumen perencanaan tersebut dapat dilihat pada alur berikut:

Gambar I-1
Hubungan Antar Dokumen RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2023



Sumber : Permendagri No. 86 Tahun 2017, diolah

Perencanaan dan penganggaran daerah merupakan cermin dari efektifitas pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk menunjang keberhasilan desentralisasi fiskal.. Sesuai dengan Pasal 106 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanahkan bahwa Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten dijadikan pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD kabupaten serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara kabupaten, sebagai landasan penyusunan rancangan APBD yang akan dibahas antara Bupati dengan DPRD sebelum ditetapkan menjadi Perda APBD.

1.4 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2023 yaitu:

1. Penjabaran dari Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
2. Pedoman perumusan dan penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah;
3. Pedoman penyelerasan prioritas pembangunan provinsi dengan kabupaten; dan
4. Pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2023 serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023.

Adapun tujuan dari penyusunan RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2023 yaitu:

1. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah;
2. Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2023;
3. Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsive dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
5. Sebagai instrument dalam melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
6. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan provinsi Sulawesi-Selatan.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB ini memuat latar belakang penyusunan dokumen RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan dokumen RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan penyusunan RKPD. Pada Sub Bab Sistematika mengemukakan penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan BAB serta garis besar isi setiap BAB didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pada BAB ini dijelaskan mengenai gambaran umum kondisi daerah, aspek Geografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah dan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Evaluasi pelaksanaan program kegiatan RKPD sampai tahun berjalan, serta permasalahan pembangunan dan penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Pada BAB ini dijelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun lalu dan tahun berjalan, arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pada BAB ini dijelaskan secara eksplisit terkait tema, sasaran dan prioritas pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2023 disinergikan dengan perencanaan tingkat provinsi dan nasional.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Pada BAB ini dijelaskan rincian program dan kegiatan prioritas RKPD tahun rencana, instansi pelaksana/OPD, indikator capaian masing-masing program dan kegiatan serta pagu indikatifnya dalam bentuk matriks program dan rencana kegiatan pembangunan Kabupaten Bulukumba Tahun 2023.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pada BAB ini ditetapkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Pada BAB ini menjelaskan kaidah pelaksanaan dan kesimpulan dokumen yang menjadi harapan berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Kabupaten Bulukumba adalah salah satu Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Bulukumba. Kabupaten Bulukumba memiliki luas wilayah 1.154.58 km².

Adapun dengan batas -batas wilayah Kabupaten Bulukumba sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sinjai
- Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kepulauan Selayar
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng

Gambar II-1

Peta Administratif Kabupaten Bulukumba



Sumber : Perda RTRW Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032

Kabupaten Bulukumba memiliki kecamatan dengan luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Gantarang dan Bulukumpa, yang masing-masing seluas 173.51 km² dan 171.33 km² . Sementara, Kecamatan Ujung Bulu yang merupakan pusat kota memiliki luas wilayah terkecil hanya sekitar 14.44 km². Kabupaten Bulukumba secara administratif terdiri dari 10 kecamatan, 27 kelurahan dan 109 desa. Adapun luas wilayah pada masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel II-1 berikut.

Tabel II-1

Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Bulukumba

No.	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Lingk.	Dusun	Luas Wilayah (km ²)	% Luas Kecamatan Terhadap Luas Kabupaten
1.	Gantarang	3	18	8	82	173,51	15,03
2.	Ujung Bulu	9	0	31	-	14,44	1,25
3.	Ujung Loe	1	12	4	42	144,31	12,50
4.	Bontobahari	4	4	13	13	108,6	9,41
5.	Bontotiro	1	12	5	45	78,34	6,79
6.	Herlang	2	6	10	27	68,79	5,96
7.	Kajang	2	17	11	100	129,06	11,18
8.	Bulukumpa	3	14	7	76	171,33	14,84
9.	Rilau Ale	1	14	5	58	117,53	10,18
10.	Kindang	1	12	4	46	148,67	12,88
Kabupaten Bulukumba		27	109	98	489	1.154,58	100.00

Sumber : Perda RTRW Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032

1. Letak dan Kondisi Geografis

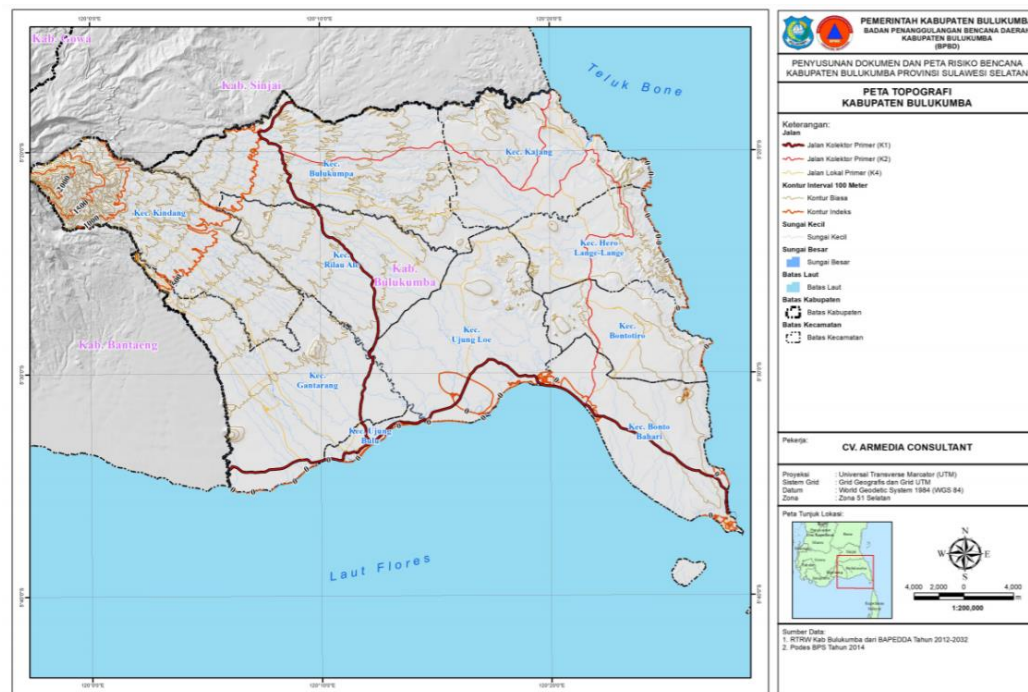
Secara Geografis, Kabupaten Bulukumba berada terletak diantara 05°20′-05°40′ Lintang Selatan (LS) dan 119°58′-120°28′ Bujur Timur (BT) dan secara wilayah, Kabupaten Bulukumba berada pada kondisi empat dimensi, yakni dataran tinggi pada kaki Gunung Bawakaraeng – Lompobattang, dataran rendah, pantai dan laut lepas. Kabupaten Bulukumba terletak di ujung bagian selatan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, terkenal dengan industri perahu phinisi yang banyak memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah.

2. Topografi

Kabupaten Bulukumba memiliki daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 s/d 25 meter di atas permukaan laut meliputi tujuh kecamatan pesisir yaitu: Kecamatan Gantarang, Kecamatan Ujungbulu, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Bonto Bahari Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang dan Kecamatan Herlang. Disamping itu. Kabupaten Bulukumba memiliki Daerah bergelombang dengan ketinggian antara 25 s/d 100 meter dari permukaan laut meliputi bagian dari Kecamatan Gantarang, Kecamatan Kindang, Kecamatan Bonto Bahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang, Kecamatan Herlang, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Rilau Ale. Dan juga terdapat Daerah perbukitan di Kabupaten Bulukumba terbentang mulai dari Barat ke utara dengan ketinggian 100 s/d di atas 500 meter dari permukaan laut meliputi bagian dari Kecamatan Kindang, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Rilau Ale.

Wilayah Kabupaten Bulukumba lebih didominasi dengan keadaan topografi dataran rendah sampai bergelombang. Luas dataran rendah sampai bergelombang dan dataran tinggi hampir berimbang. yaitu jika dataran rendah sampai bergelombang mencapai sekitar 50.28% maka dataran tinggi mencapai 49.72%. Untuk lebih jelasnya topografi di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

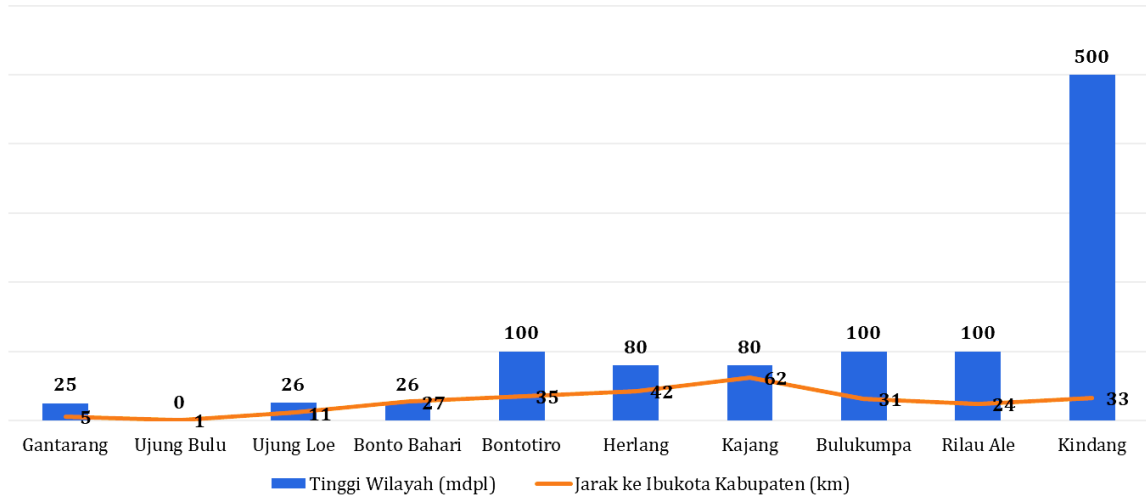
Gambar II-2
Peta Topografi Bulukumba



Sumber : Perda RTRW Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032

Wilayah Kabupaten Bulukumba hampir 95.4 persen berada pada ketinggian 0 sampai dengan 500 meter Di Atas Permukaan Laut (DPL) dengan tingkat kemiringan tanah 0-400. Sementara itu, untuk kecamatan dengan jarak terjauh dari Ibukota Kabupaten adalah Kecamatan Kajang sekitar 62 km. Selengkapnya pada tabel berikut.

Grafik II-1
Ketinggian Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) dan Jarak ke Ibukota Kabupaten menurut Kecamatan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2021

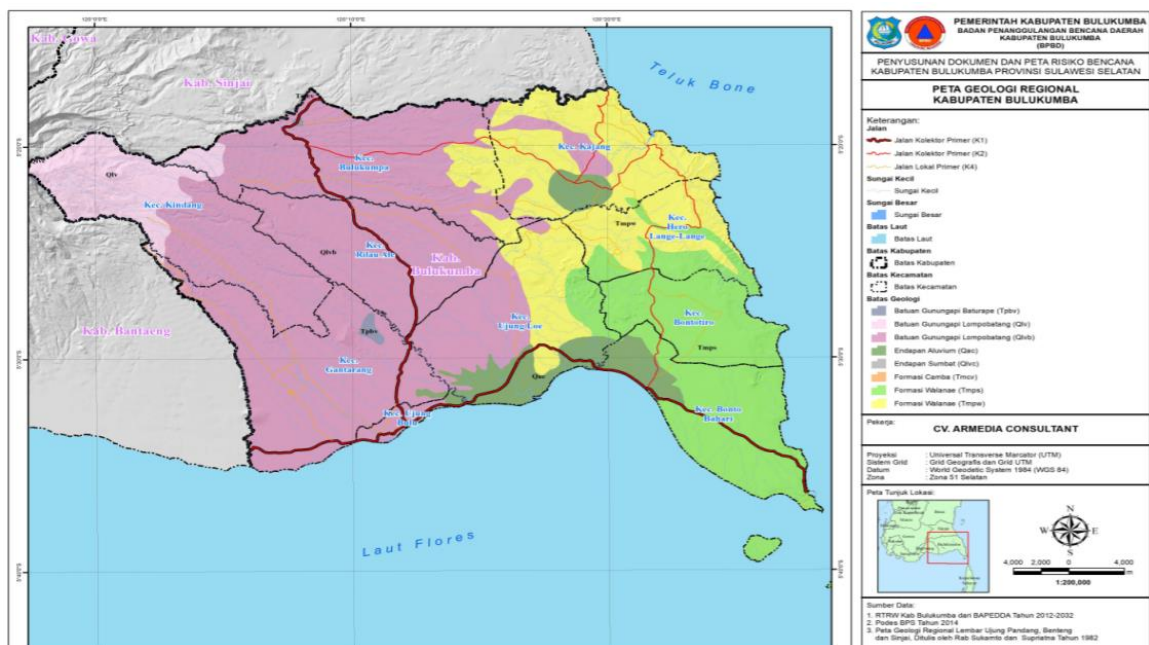


Sumber : Bulukumba dalam Angka tahun 2022

3. Geologi

Keberadaan satuan batuan yang menyusun geomorfologi Bulukumba mempunyai dimensi yang berbeda-beda. Batuan tertua berumur Miosen tengah (Bedrock) berada pada pemekaran dasar laut Teluk Bone sementara batuan termuda berumur Plistosen berada pada sesar Walanae di daratan Bulukumba (Formasi Lompobattang). Hal ini menandakan sistem tektonik yang bekerja tidak selalu sama. Untuk lebih jelasnya geologi di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar II-3
Peta Geologi Bulukumba

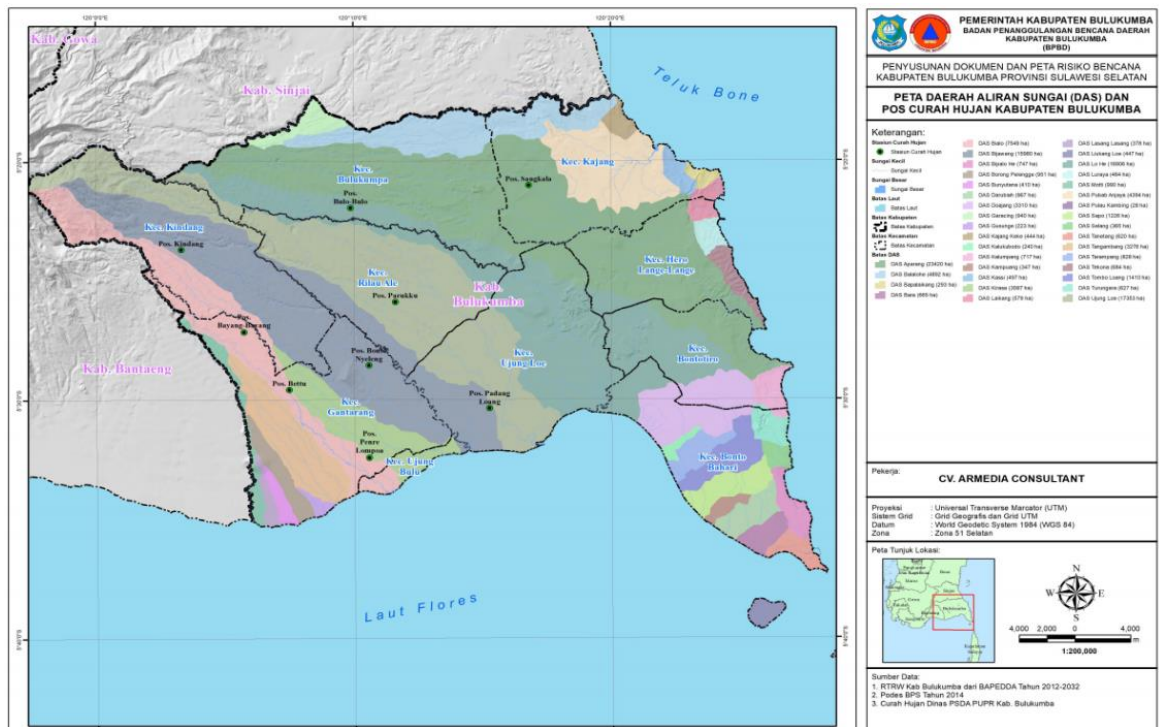


Sumber : Perda RTRW Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032

4. Hidrologi

Sungai di Kabupaten Bulukumba ada 43 aliran yang terdiri dari sungai besar dan sungai kecil. Sungai-sungai ini mencapai panjang 772,5 km dan yang terpanjang adalah sungai Balangbessi yakni 65.30 km, sedangkan yang terpendek adalah sungai Balibo yakni 5 km. Sungai-sungai ini mampu mengairi lahan sawah seluas 23.365 Ha. Untuk lebih jelasnya hidrologi di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada gambar II-4 dan Tabel II-2 dibawah ini.

Gambar II-4
Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) di Bulukumba



Sumber : Perda RTRW Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032

Tabel II-2
Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Bulukumba

No	Nama Sungai	Panjang (Km)	Debit (m /det)	Rawan Longsor Abrasi	Ket
1	Bialo	54.5	14.154	10.23	Sungai Besar
2	Maesa	10.3	0,230	8.30	Sungai Kecil
3	Biangkeke	19.2	1,296	3.84	Sungai Kecil
4	Balibo	5.00	0,070	0.50	Sungai Kecil
5	Borong Loe	11.5	0,096	2.30	Sungai Kecil
6	Laumang	7.00	0,80	1.50	Sungai Kecil
7	Kalamassang	11.5	0,82	1,38	Sungai Kecil
8	Bontosunggu	21	0,92	3,40	Sungai Kecil
9	Bijawang	49.2	7,527	9.84	Sungai Besar
10	Anruling	13.3	0,210	2.30	Sungai Kecil
11	Matilu	10.6	0,310	2.00	Sungai Kecil
12	Bilang Rea	15.5	0,349	1.70	Sungai Kecil
13	Bilang Parusu	12	0,157	1.40	Sungai Kecil
14	Palioi	11	0,885	1.20	Sungai Kecil
15	Kirasa	30.4	1,667	2.52	Sungai Kecil
16	Balikonrong	8.4	1,200	1.70	Sungai Kecil
17	Bintanaja	8	0,606	1.60	Sungai Kecil
18	Tuli	6.5	0,450	0.70	Sungai Kecil
19	Balangtieng	56	13,336	14.50	Sungai Besar
20	Kahaya	9.5	0,700	1.00	Sungai Kecil
21	Oddungen	6.9	0,080	1.38	Sungai Kecil
22	Hisang	12.9	0,790	1.58	Sungai Kecil
23	Latai	6.2	0,650	0.50	Sungai Kecil
24	Pasimbungan	7.5	0,370	1.40	Sungai Kecil
25	Illi	6.5	0,264	0.75	Sungai Kecil
26	Balangtikeke	10	0,869	1.50	Sungai Kecil
27	Sampeang	8	0,600	1.20	Sungai Kecil
28	Topanda	17.8	0,719	2.56	Sungai Kecil
29	Anyorang	56	6,478	6.72	Sungai Besar
30	Kambino	9	0,304	0.70	Sungai Kecil
31	Oro/Ereminya	7	0,56	1.50	Sungai Kecil

No	Nama Sungai	Panjang (Km)	Debit (m /det)	Rawan Longsor Abrasi	Ket
32	Serre	6.5	0,200	0.03	Sungai Kecil
33	Balangbessi	65.3	2,931	2.40	
34	Salo Dua	19	0,434	2.80	Sungai Kecil
35	Pakombong	20.3	1,014	3.06	Sungai Kecil
36	Bikatala	19.7	0,120	2.94	Sungai Kecil
37	Galonggo	17.2	0,567	2.24	Sungai Kecil
38	Ta'getung	7.5	0,500	1.00	Sungai Kecil
39	Lolisang	34.3	0,376	5.80	Sungai Besar
40	Bobo	12.5	0,152	0.50	Sungai Kecil
41	Raowa	18.5	0,144	3.40	Sungai Kecil
42	Jelepeng	20	0,144	2.40	Sungai Kecil
43	Sungai Kanaria	13.5	0,130	2.00	Sungai Kecil
	Total	772,5	64,179	120.27	Sungai Kecil

Sumber : Dinas PUPR (PSDA) Kab. Bulukumba Tahun 2022

Ruas dan kondisi Kanal di Kabupaten Bulukumba terdapat 10 ruas dengan 3 kondisi kanal yang Rusak Berat. Ruas Tepponge-Mayapada-Pertigaan Pasar Lama 869,68 M, Ruas Pertigaan Pasar Lama - Kasimpureng 760,6 M, Ruas M.Noor Lama - M.Noor Baru 861,6 M termasuk dalam kondisi berat. Untuk lebih jelasnya Data ruas dan kondisi kanal dalam kota di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel II-3

Data Ruas dan Kondisi Kanal dalam Kota Bulukumba Tahun 2021

No.	Ruas	Panjang (m)	Kondisi kanal
1	Ruas Taccorong	439	Rusak Ringan
2	Ruas Kanal Polewali	223,8	Rusak Ringan
3	Ruas Jawi Jawi	775	Rusak Ringan
4	Ruas Tepponge-Mayapada-Pertigaan Pasar Lama	869,68	Rusak Berat
5	Ruas Pertigaan Pasar Lama - Kasimpureng	760,16	Rusak Berat
6	Ruas Pettarani	206,81	Rusak Ringan
7	Ruas M.Noor Lama - M.Noor Baru	861,6	Rusak Berat
8	Ruas Kanal Teratai - Pasissirie (Muara Terang-Terang)	794,8	Rusak Ringan
9	Ruas Kanal Ela Ela	408	Rusak Ringan
10	Ruas Kanal Situbaru	146	Rusak Ringan
	Jumlah	5.484.85	

Sumber : Dinas PUPR (PSDA) Kabupaten Bulukumba Tahun 2022

5. Klimatologi

Kabupaten Bulukumba mempunyai suhu rata-rata berkisar antara 23.82 °C – 27.68 °C. Suhu pada kisaran ini sangat cocok untuk pertanian tanaman pangan dan tanaman perkebunan. Berdasarkan analisis Smith – Ferguson (tipe iklim diukur menurut bulan basah dan bulan kering) maka klasifikasi iklim di Kabupaten Bulukumba termasuk iklim lembab atau agak basah.

Pemerintah Kabupaten Bulukumba memiliki 14 (empat belas) stasiun penakar hujan yang tersebar di 10 (sepuluh) Kecamatan. Intensitas curah hujan cukup tinggi di periode pertengahan desember sampai dengan pertengahan bulan maret. Dan sepanjang tahun Kabupaten Bulukumba mendapatkan curah hujan berada di atas 1000 mm/ tahun di seluruh kecamatan. Hampir sebagian besar Daerah dengan curah hujan tertinggi terdapat pada wilayah barat laut dan sebagian bagian selatan sedangkan pada daerah tengah memiliki curah hujan sedang, sedangkan pada sebagian bagian selatan curah hujannya rendah. Curah hujan di Kabupaten Bulukumba sebagai berikut:

- Curah hujan antara 1000 – 1500 mm/tahun, meliputi Kecamatan Gantarang dan Bulukumpa.
- Curah hujan antara 1500 – 2000 mm/tahun, meliputi Kecamatan Ujung Loe, Ujung Bulu, Bonto Tiro, Rilau Ale dan Kajang.
- Curah hujan di atas 2000 mm/tahun meliputi Kecamatan Kindang, dan Kecamatan Bonto bahari.

6. Wilayah Rawan Bencana

Selama tahun 2017- 2021 terjadi beberapa bencana di Kabupaten Bulukumba yang menimbulkan keprihatinan dan kerugian, baik berupa bencana alam maupun musibah social. Sedangkan lokasi yang mengalami bencana tersebar di sepuluh kecamatan telah di rincikan berdasarkan data bencana lima tahun terakhir

Dari Keseluruhan bencana yang terjadi pada tahun 2017- 2021 telah ditempuh Tanggap Darurat korban bencana alam yang menyelenggarakan setelah terjadinya bencana alam (Pasca Bencana). Kegiatan tersebut meliputi kegiatan pemberian bantuan berupa makanan dan pendirian shelter/hunian sementara bagi korban bencana serta rehabilitasi dan Rekonstruksi bangunan dan fasilitas umum.

Solusi yang di tempuh dalam mengatasi bencana terjadi yaitu telah dilayani dan diberikan bantuan berupa bantuan darurat yaitu :

- Makanan siap saji
- Tambahan gizi
- Alat dapur
- Peralatan makanan
- Terpal (Tenda gulung)
- Seragam sekolah
- Kebutuhan makanan baku

Untuk status bencana yang terjadi selama 5 tahun terakhir di wilayah Kabupaten Bulukumba hanya dikategorikan sebagai bencana local dan regional.

Dalam kegiatan penanggulangan bencana bersumber dari APBD Kabupaten Bulukumba tahun Anggaran 2017- 2021 dan Bantuan Pemerintah Pusat/Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017- 2021

Langkah pencegahan Antisipasi daerah dalam menghadapi kemungkinan bencana antara lain :

1. Melaksanakan Posko Siaga Bencana;
2. Mempersiapkan Logistik;
3. Mempersiapkan Shelter (Hunian sementara) untuk masyarakat yang terkena bencana;
4. Mengkordinasikan kepada SKPD yang terkait;

Potensi bencana tewrsebar yang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah Kabupaten Bulukumba berkaitan dengan Tanah, Longsor, Banjir dan Angin Putting Beliung, Mengingat letak Kabupaten Bulukumba yang tepat di kaki gunung lompobattang dn beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) seperti DAS Bialo, DAS Bijawang, DAS Balantieng, DAS Bonto Mate'ne, DAS Annyorang dan DAS Sangkala.

Selain itu kondisi tanah yang labil potensi tanah longsor masih sangat besar di daerah tersebut khususnya diwilayah, Kecamatan Gantarang dan Kecamatan Kindang. Hasil survey juga menunjukkan bahwa kawasan lereng gunung Lompobattang sudah mulai gundul dan berpotensi banjir bandang, karna aliran air dari puncak ke lereng gunung akan semakin besar.

Letak wilayah Kabupaten Bulukumba yang berhadapan langsung dengan Laut Flores menjadikan wilayah Kabupaten Bulukumba sebagai daerah rawan abrasi dan dapat menimbulkan gelombang pasang, khususnya di wilayah, Kec. Ujung bulu tepatnya di Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2023

kelurahan Kalumeme dan Kelurahan Ela-ela. Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Herlang tepatnya di Desa Tanah Beru dan Kecamatan Ujungloe di Kel. Dannuang. Selain Abrasi Wilayah Bulukumba merupakan salah satu wilayah dilintasi oleh sesar aktif, yaitu Sesar walanae membentang dengan arah Barat Laut Hingga Tenggara di wilayah Sulawesi Selatan. Sesar ini memiliki panjang sekitar 130 Kmdan tergolong jenis sesar strike-slip (sesar geser). Berdasarkan data seismisitas di wilayah Bulukumba dan sekitarnya 5 tahun terakhir (data 2016- 2020) telah terjadi sebanyak 82 kejadian dan sebanyak 9 kejadian gempa bumi dirasakan selama 10 tahun terakhir (2009-2020).

Gempa bumidi wilayah Bulukumba dan sekitarnya didominasi oleh Gempabumi dangkal ($H < 60$ km) dengan rentang magnitudo antara M 2.0 hingga M 5.0. peningkatan aktivitas terjadi pada tahun 2018 dimana jumlah gempa bumi menjadi 4-5 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan aktivitas terjadi pada bulan Oktober hingga Desember 2018 pasca terjadinya Gempabumi Palu-Donggala.

Berdasarkan peta rawan tsunami, wilayah bulukumba termasuk kedalam wilayah yang rawan terhadap tsunami. Hal ini dikarenakan secara historis Bulukumba pernah dilanda tsunami. Tsunami tersebut dibangkitkan oleh gempa bumi kuat yang terjadi di Utara Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terjadi pada tahun 1820 dan 1992. Kedua tsunami tersebut membangkitkan tsunami masing-masing setinggi 10 meter dan 25 meter. Tsunami tersebut melanda wilayah Bulukumba yaitu desa Terang terang (Kel. Terang-terang) dan Desa Nipa- Nipa Kampong Nipa).

Tabel II-4
Jumlah Kejadian Bencana di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah									
		Banjir	Tanah Longsor	Petir	Gempa Bumi	Kebakaran	Angin Kencang	Puting Beliung	Abrasi	Kebakaran Lahan	Operasi Penyelamatan dan Pencarian
1	Ujung Bulu	5	-			18	13	-	3	1	6
2	Ujung Loe	4	-			-	9	-	-	-	1
3	Gantarang	5	1			7	17	-	-	1	1
4	Kindang	2	8			4	3	-	-	-	2
5	Bulukumba	4	-			2	-	-	-	-	-
6	Riluau Ale	3	-			-	6	1	-	-	-
7	Kajang	4	1	1		1	2	-	1	-	2
8	Herlang	1	1			2	3	1	3	-	1
9	Bonto Bahari	-	-		5	2	5	-	1	-	3
10	Bonto Tiro	-	1			2	-	-	-	-	1

Sumber : BPBD Kab. Bulukumba, 2022

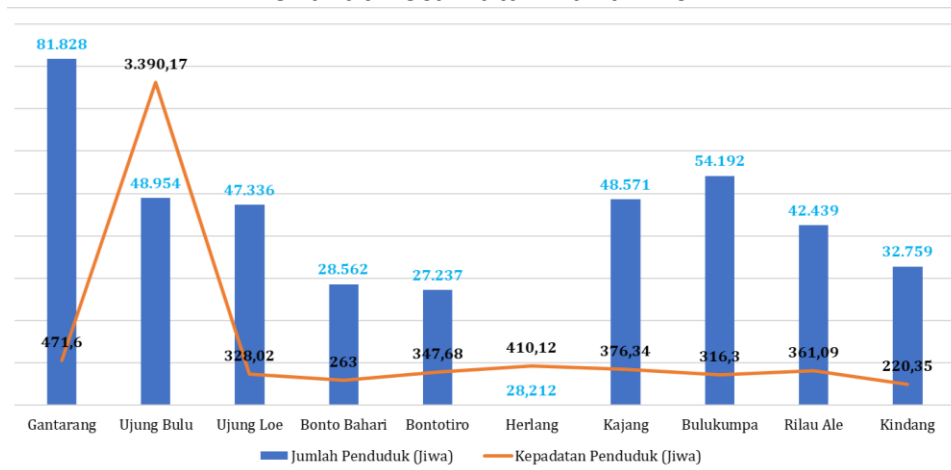
2.1.1.1 Aspek Demografi

Penduduk Kabupaten Bulukumba berdasarkan data BPS penduduk tahun 2021 adalah 445.699 jiwa, yang terdiri atas 217.268 jiwa penduduk laki-laki dan 228.431 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan hasil sensus penduduk tahun 2020, penduduk di Kabupaten Bulukumba mengalami pertumbuhan penduduk sebesar 1,85 persen. Sementara itu besarnya rasio jenis kelamin tahun 2021 penduduk laki-laki terhadap perempuan sebesar 95,11. selengkapnya pada gambar berikut.

1. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk di Kabupaten Bulukumba tahun 2021 mencapai 381,17 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 10 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Ujung Bulu dengan kepadatan sebesar 3.390,17 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Kindang sebesar 220,35 jiwa/Km².

Grafik II-2
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Bulukumba
Menurut Kecamatan Tahun 2021



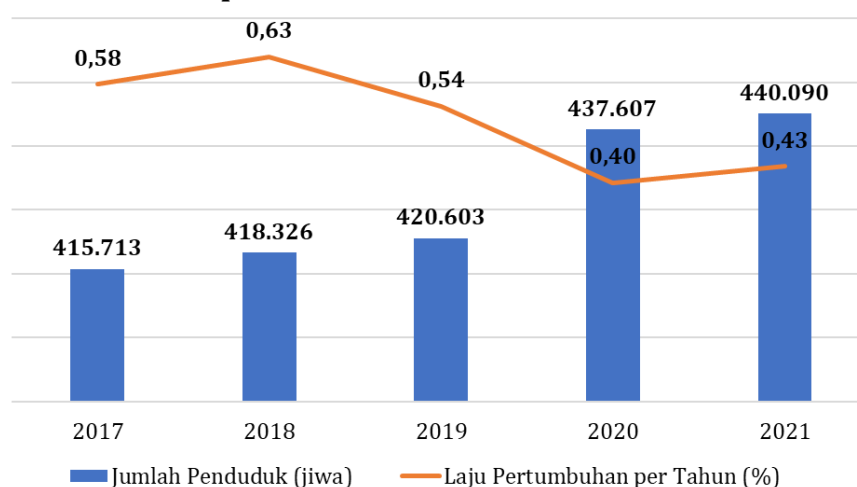
Sumber : BPS Kabupaten Bulukumba. 2022

Sebagaimana Tabel diatas menunjukkan bahwa Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbesar ialah Kecamatan Gantarang, dengan jumlah penduduk sebesar 81.828 jiwa dan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Bontotiro dengan jumlah penduduk sebesar 27.237 jiwa. Komposisi penduduk Kabupaten Bulukumba tahun 2021 jika dilihat dari piramida penduduk menunjukkan jenis ekspansif dimana jumlah penduduk usia muda merupakan jumlah yang dominan.

Sesuai Sesuai dengan data BPS Tahun 2021, Penduduk Kabupaten Bulukumba berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 (Pertengahan tahun/Juni) mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dibandingkan dengan hasil Sensus Penduduk 2020, penduduk Kabupaten Bulukumba mengalami pertumbuhan per tahun sebesar 0,43 persen. Jumlah penduduk tahun 2021 sebanyak 440.090 jiwa yang terdiri atas 214.679 jiwa penduduk laki-laki dan 225.411 jiwa penduduk perempuan. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2021 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 95,24 persen.

Berdasarkan data pada Tabel II.4. pada tahun 2017 jumlah penduduk Kabupaten Bulukumba sebanyak 415.713 jiwa. Jumlah tersebut terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2021 mencapai 440.090 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 4,04 persen pada tahun yang sama. Artinya. selama lima tahun terkahir, jumlah penduduk Kabupaten Bulukumba bertambah sekitar 24.337 jiwa atau 5,54 persen. Selengkapnya pada tabel berikut

Tabel II-5
Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Bulukumba tahun 2017-2021



Sumber : BPS Kabupaten Bulukumba. 2022 (Diolah)

Berdasarkan data di atas juga menunjukkan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bulukumba dari tahun 2017 hingga 2021. Setiap tahunnya, penduduk Kabupaten Bulukumba mengalami pertumbuhan rata-rata diatas 1,3 persen. Jika dirinci menurut kecamatan, pada grafik II.2 memperlihatkan bahwa pada tahun 2021, Kecamatan Ujung loe merupakan kecamatan memiliki laju pertumbuhan penduduk tertinggi, yakni sebesar 0,94 persen. Sementara itu, Kecamatan Ujung Bulu memiliki laju pertumbuhan penduduk yang paling rendah, dengan nilai pertumbuhan sebesar -0,16 persen. Selengkapnya pada grafik berikut.

2. Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Komposisi penduduk menurut kelompok umur dapat menggambarkan tinggi/rendahnya tingkat kelahiran. jumlah penduduk lansia serta dapat mencerminkan angka beban tanggungan. Angka beban tanggungan atau yang sering disebut Dependency Ratio adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia tidak produktif (umur di bawah 15 tahun & 65 tahun ke atas) dengan penduduk usia produktif (umur 15-64 tahun). Dependency ratio dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-6
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Bulukumba, 2021

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
0-4	16.033	15.280	31.313
5-9	16.157	15.470	31.627
10-14	18.494	17.761	36.255
15-19	17.764	17.739	35.503
20-24	17.868	18.204	36.072
25-29	17.255	18.119	35.374
30-34	16.795	17.602	34.397
35-39	16.456	17.774	34.230
40-44	16.477	17.654	34.131
45-49	15.474	16.531	32.005
50-54	13.338	14.578	27.916
55-59	10.147	11.858	22.005
60-64	8.408	9.570	17.978
65-69	6.077	7.039	13.116
70-74	4.122	5.008	9.130
75+	3.814	5.224	9.038
Bulukumba	214.679	225.411	440.090

Sumber : Dinas Penduduk dan Capil (Data Kependudukan Semester I) Kabupaten Bulukumba. 2021

Selanjutnya, untuk mengetahui komposisi penduduk di Kabupaten Bulukumba menurut jenis kelaminnya. Rasio Jenis Kelamin (RJK) tahun 2017- 2021 dapat dilihat pada Tabel II.12. Informasi mengenai Rasio Jenis Kelamin dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-7
Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Bulukumba tahun 2017-2021

Kelompok Umur	2017	2018	2019	2020	2021
0 - 14	102,21	102,13	102,06	104,59	104,48
15 - 65	87,11	87,24	87,31	93,79	93,96
65 +	68,41	68,78	69,15	81,13	81,14
Total	89,57	89,55	89,54	95,22	95,24

Sumber: Bulukumba dalam Angka 2022 (Data Diolah)

Pada tahun 2021, Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Bulukumba sebesar 95,24. Artinya, setiap 100 penduduk perempuan ada sebanyak 95 penduduk laki-laki. Dengan kata lain, penduduk perempuan di Kabupaten Bulukumba lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Jika dilihat menurut kelompok umur, komposisi penduduk usia 0-14 tahun justru menunjukkan perempuan lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Pada Tahun 2021, Rasio Jenis Kelamin untuk penduduk usia 0-14 tahun adalah sebesar 104,48. Sementara itu, untuk penduduk usia 15-16 tahun dan usia 65 tahun keatas komposisinya menunjukkan lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki. Rasio Jenis Kelamin penduduk usia 15-65 tahun sebesar 93,96 pada tahun 2020. Untuk penduduk usia 65 tahun keatas Rasionya sebesar 81,14.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek Kesejahteraan Masyarakat terdiri dari Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Kesejahteraan Sosial, serta Seni Budaya dan Olahraga.

2.1.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Analisis terhadap fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat dilihat dari perkembangan indikator Pertumbuhan Ekonomi, Laju Inflasi Kumulatif, PDRB per kapita, Indeks Gini dan Kemiskinan.

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulukumba pada tahun 2021 naik sebesar 4,76 persen dari tahun 2020 yang hanya mencapai 0,43 persen. Selama kurun waktu tahun 2017 - 2019, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulukumba masih berada di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan, namun capaian tersebut berada di atas rata-rata Nasional. Dan disaat kondisi pandemi *Covid-19* tahun 2020 mengalami kontraksi dinilai 0,43 persen akan tetapi pada 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulukumba justru masih lebih baik dari Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan.

Pertumbuhan ekonomi Nasional dan Provinsi tahun 2021 selama masa pemulihan sejak mewabahnya *Covid-19* tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 3,69 persen dan 4,65 persen, dimana tahun sebelumnya mengalami kontraksi yang cukup tajam dibawah angka nol sebesar -2,07 persen dan -0,70 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulukumba di tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 4,76 persen dari tahun sebelumnya sebesar 0,43 persen. Selengkapnya pada tabel di bawah ini.

Tabel II-8
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017 - 2022

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Kabupaten Bulukumba	%	6,89	5,05	5,49	0,43	4,76
2	Provinsi Sulawesi Selatan	%	7,21	7,06	6,92	-0,70	4,65
3	Nasional	%	5,10	5,20	5,00	-2,10	3,69

Sumber : BPS Kabupaten Bulukumba, Tahun 2022

Kabupaten Bulukumba pada tahun 2021 merupakan salah satu kabupaten yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang positif. Dengan adanya pengucuran dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diberbagai sektor, sebagian besar kabupaten mengalami pertumbuhan positif kecuali Kabupaten Luwu Timur yang mengalami kontraksi sebesar -1,39 persen. Untuk Daerah yang setara dengan Kabupaten Bulukumba, daerah yang mengalami pertumbuhan negatif (kontraksi) adalah Kabupaten Luwu Timur sebesar 1,39 persen sedangkan daerah setara yang pertumbuhan ekonominya tetap bertumbuh positif adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebesar 3,46 persen, Kabupaten Enrekang sebesar 6,36 persen, dan Kota Pare-Pare sebesar 4,41 persen.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulukumba tahun 2017-2021 mengalami tren yang berfluktuasi, namun secara rata-rata mengalami perlambatan pada periode tersebut, dimana dengan kondisi pandemi covid-19 serta adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) memberi kontribusi yang cukup besar akan perlambatan pertumbuhan ekonomi pada hampir seluruh Kabupaten/Kota. Meskipun demikian, pertumbuhan rata-ratanya masih relatif berimbang pada daerah setara, diantaranya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Luwu Timur dan Kota Pare-Pare. Pertumbuhan ekonomi lima tahun terakhir terhadap daerah setara dengan Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-9
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi dengan rata-rata capaian wilayah setara
Tahun 2017 – 2021

Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi					Perubahan Persentase Pertumbuhan Ekonomi	Rata-rata capaian wilayah setara
	2017	2018	2019	2020	2021		
Kabupaten Bulukumba	6,89	5,05	5,49	0,43	4,76	4,33	4,52
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	6,6	4,76	6,41	-1,69	3,46	5,15	3,91
Kabupaten Enrekang	6,84	3,26	5,43	1,25	6,36	5,11	4,63
Kabupaten Luwu Timur	3,07	3,39	1,17	1,46	-1,39	-2,85	1,54
Kota Pare-Pare	6,97	5,58	6,65	-0,08	4,41	4,49	4,71

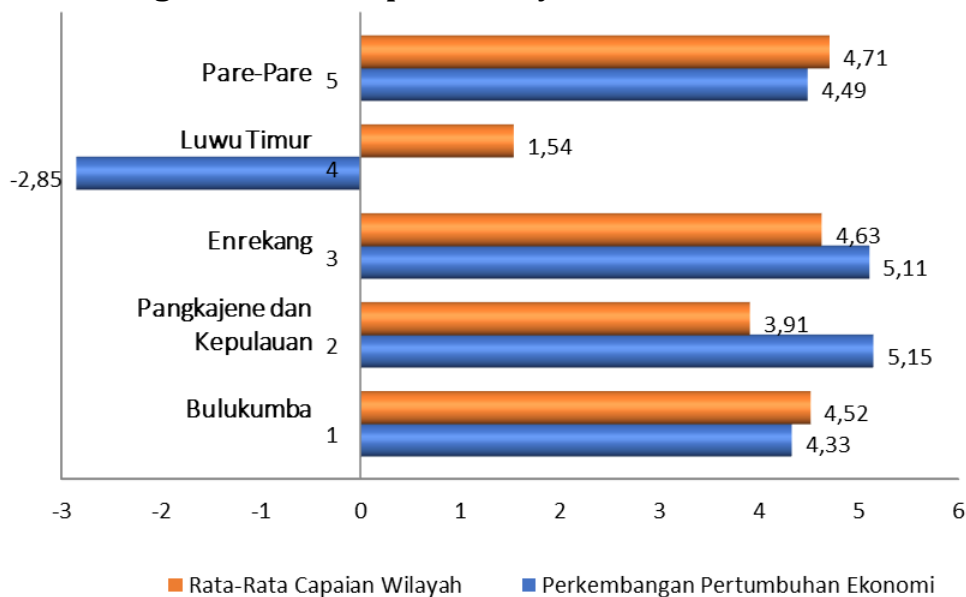
Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022

Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulukumba mengalami pertumbuhan positif sebesar 4,76 persen. Perekonomian Kabupaten Bulukumba berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2021 mencapai Rp. 15,87 triliun dan atas dasar harga konstan 2021 mencapai Rp 9,01 triliun. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang tumbuh 37,38 persen. diikuti Pertambangan dan Penggalian 2,64 persen dan Industri Pengolahan 6,48 persen. Sedangkan Nilai PDRB Sulawesi Selatan atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha pada tahun 2021 mencapai 545,230 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 41 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 504,059 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini disebabkan oleh adanya peningkatan produksi di seluruh lapangan usaha kecuali Lapangan Usaha Penambangan dan penggalian yang mengalami kontraksi.

Berdasarkan harga konstan 2010, PDRB juga mengalami kenaikan dari 328,154 triliun rupiah di tahun 2020 menjadi 343,402 triliun rupiah di tahun 2021. Hal ini menunjukkan selama tahun 2021, Sulawesi Selatan mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 4,65 persen. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi diseluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah pengadaan listrik dan gas sebesar 10,87 persen. Diikuti jasa kesehatan dan jaminan sosial sebesar 7,77 persen, jasa lainnya sebesar 7,56 persen, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor bertumbuh sebesar 6,50 persen

Adapun perbandingan Perkembangan pertumbuhan ekonomi khususnya wilayah yang setara dengan Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada grafik berikut.

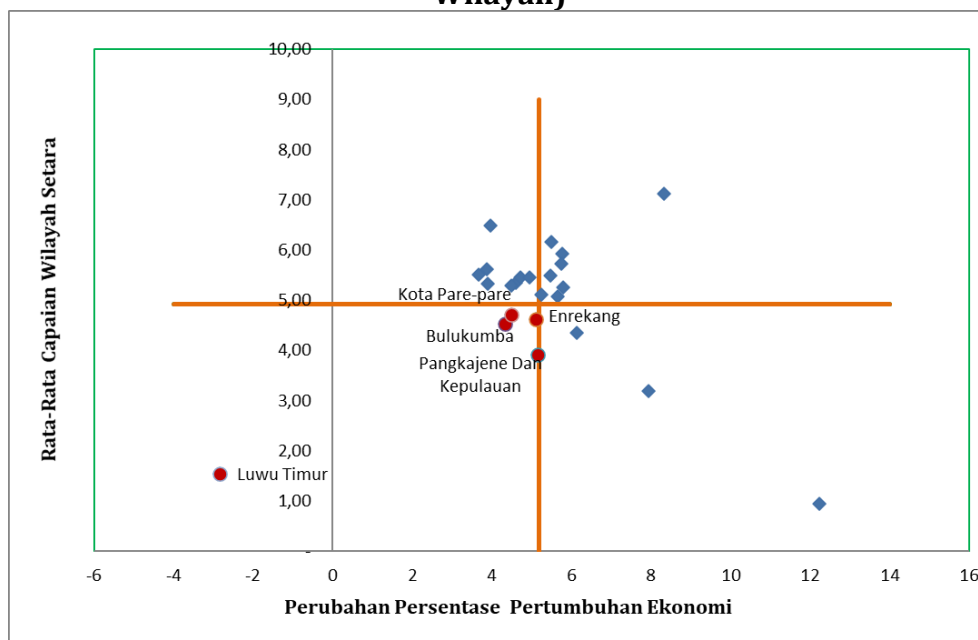
Grafik II-3
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi
dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2021



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022

Adapun perkembangan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 secara Kuadran dapat dilihat pada gambar tabel berikut.

Kuadran II-1
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021
(Analisis Kuadran Pertumbuhan Ekonomi, 2021 Terhadap Rata-Rata Capaian Wilayah)

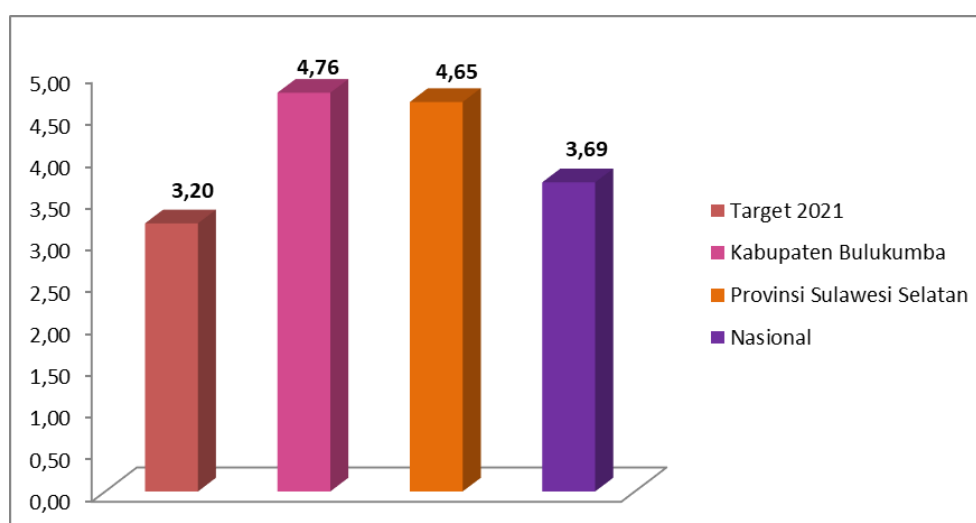


Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022 (diolah)

Pertumbuhan ekonomi tahun 2021 mencapai target. Target Pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang tercantum dalam perubahan RKPD Kabupaten Bulukumba tahun 2021 yaitu sebesar 3,20 persen, dengan capaian yang melampaui target sebesar 4,76 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulukumba tahun 2021 lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 4,65 persen, dan Nasional sebesar 3,69 persen.

Adapun perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulukumba dan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional sebagaimana pada grafik berikut..

Grafik II-4
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi dengan target daerah dan capaian
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional tahun 2021



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022 (diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan PDRB tahun 2021, angka PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 15,86 triliun rupiah dengan kontribusi dari Kategori A (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan) masih menjadi penyumbang terbesar dengan sumbangan sebesar 37,38 persen, diikuti dengan Kategori B (Pertambangan dan Penggalian) sebesar 2,64 persen dan Kategori C (Industri Pengolahan) sebesar 6,48 persen. Pertumbuhan 17 sektor lapangan usaha tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel II-16.

Tabel II-10
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bulukumba (persen), 2017-2021

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020 *	2021 **
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,34	0,06	2,13	-1,12	3,65
B	Pertambangan dan Penggalian	13,04	12,85	3,14	2,09	3,06
C	Industri Pengolahan	3,08	3,96	11,76	-3,6	5,72
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,68	6,95	7,23	3,77	8,91
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,52	6,34	1,72	4,98	0,01
F	Konstruksi	9,32	9,59	3,27	5,11	5,12
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,95	9,73	9,93	-1,25	6,51
H	Transportasi dan Pergudangan	8,94	9,46	9,68	-14,41	5,95
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12,41	16,8	5,23	-1,99	5,88
J	Informasi dan Komunikasi	9,38	9,27	7,66	11,92	4,42
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,06	5,37	9,65	9	7,54
L	Real Estate	12,54	6,88	2,18	1,03	3,28

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020 *	2021 **
M,N	Jasa Perusahaan	9,95	9,88	10,53	-4,26	6,8
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,8	8,4	10,35	-0,43	4,36
P	Jasa Pendidikan	9,55	9,12	3,31	9,27	4,12
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,06	9,66	5,11	6,31	6,39
R,S,T,U	Jasa Lainnya	9,81	13,11	11,92	-1,21	8,81
	Produk Domestik Regional Bruto	6,89	5,05	5,49	0,43	4,76

Sumber : BPS Kabupaten Bulukumba, Tahun 2022

Nilai PDRB Kabupaten Bulukumba pada tahun 2021 berdasarkan harga konstan mengalami kontraksi pada 8 sektor lapangan usaha. Kontraksi ini dipengaruhi oleh menurunnya produksi pada beberapa lapangan usaha. Nilai PDRB Kabupaten Bulukumba Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2021 sebesar 9.013 triliun rupiah, capaian tersebut meningkat dibandingkan tahun 2020 yang nilainya sebesar 8,604 triliun rupiah. sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-11
Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)
Kabupaten Bulukumba, Tahun 2017 - 2021

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020 *	2021 **
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.203,65	3.205,54	3.273,77	3.237,17	3.355,17
B	Pertambangan dan Penggalian	157,74	178	183,59	187,42	193,16
C	Industri Pengolahan	511,17	531,4	593,9	572,55	605,31
D	Pengadaan Listrik dan Gas	13,7	14,65	15,71	16,3	17,75
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,08	3,28	3,33	3,5	3,5
F	Konstruksi	671,64	736,06	760,12	798,97	839,87
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.197,50	1.313,97	1.444,43	1.426,38	1.519,22
H	Transportasi dan Pergudangan	165,81	181,5	199,06	170,37	180,51
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	47,87	55,91	58,83	57,66	61,05
J	Informasi dan Komunikasi	290,11	317,01	341,29	381,98	398,86
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	263,32	277,46	304,23	331,6	356,59
L	Real Estate	360,44	385,26	393,67	397,74	410,78
M,N	Jasa Perusahaan	1,48	1,63	1,8	1,72	1,84
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	469,04	508,42	561,04	558,61	582,95
P	Jasa Pendidikan	232,9	254,14	262,55	286,88	298,7
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	83,7	91,79	97,03	103,15	109,74
R,S,T,U	Jasa Lainnya	57,75	65,32	73,1	72,22	78,58
	Produk Domestik Regional Bruto	7.730,91	8.121,33	8.567,46	8.604,20	9.013,58

Sumber : BPS Kabupaten Bulukumba, Tahun 2022

Tahun 2021 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di Kabupaten Bulukumba mencapai 15.868 trilyun rupiah, nilai tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 14,565 trilyun rupiah. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-12
Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) Kabupaten Bulukumba, Tahun 2017 - 2021

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020 *	2021 **
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.917,88	5.108,85	5.277,24	5.369,18	5.932,13
B	Pertambangan dan Penggalian	322,7	372,53	384,75	401,04	418,58
C	Industri Pengolahan	804,3	858,2	973,45	950,3	1.027,68
D	Pengadaan Listrik dan Gas	13,62	14,92	15,94	16,32	17,55
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,8	4,11	4,33	4,57	4,87
F	Konstruksi	1.141,23	1.343,77	1.447,69	1.543,90	1.690,34
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.888,00	2.165,28	2.443,28	2.463,87	2.684,24
H	Transportasi dan Pergudangan	276,56	307,38	339,97	301,7	338,75
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	82,77	98,28	108,36	106,66	114,06
J	Informasi dan Komunikasi	363,92	407,89	459,68	516,01	550,88
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	402,47	442,49	501,22	547	605,56
L	Real Estate	535,4	594,23	618,54	626,14	648,71
M,N	Jasa Perusahaan	3,78	4,31	4,84	4,76	5,17
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	717,02	802,42	907,92	919,62	969,45
P	Jasa Pendidikan	366,81	411,82	427,43	475,62	506,76
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	143,96	163,52	185,69	204,18	224,47
R,S,T,U	Jasa Lainnya	84,53	98,91	114,26	114,61	129,66
	Produk Domestik Regional Bruto	12.068,70	13.198,90	14.214,60	14.565,49	15.868,86

Sumber : BPS Kabupaten Bulukumba, Tahun 2022

Struktur PDRB Kabupaten Bulukumba menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2021 masih didominasi oleh Lima lapangan usaha yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (37,38 persen); Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (16,92 persen); Konstruksi (10,65 persen); Industri Pengolahan (6,52 persen), serta Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial (6,11 persen).

Tabel II-13
Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (%) Kabupaten Bulukumba, Tahun 2017 – 2021

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020 *	2021 **
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	40,75	38,71	37,13	36,86	37,38
B	Pertambangan dan Penggalian	2,67	2,82	2,71	2,75	2,64
C	Industri Pengolahan	6,66	6,5	6,85	6,52	6,48
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
F	Konstruksi	9,46	10,18	10,18	10,6	10,65
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,64	16,4	17,19	16,92	16,92
H	Transportasi dan Pergudangan	2,29	2,33	2,39	2,07	2,13
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,69	0,74	0,76	0,73	0,72
J	Informasi dan Komunikasi	3,02	3,09	3,23	3,54	3,47
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,33	3,35	3,53	3,76	3,82
L	Real Estate	4,44	4,5	4,35	4,3	4,09
M,N	Jasa Perusahaan	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,94	6,08	6,39	6,31	6,11
P	Jasa Pendidikan	3,04	3,12	3,01	3,27	3,19
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,19	1,24	1,31	1,4	1,41
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,7	0,75	0,8	0,79	0,82
	Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Bulukumba, Tahun 2022

2. Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi perhatian serius dari pemerintah. Salah satu aspek penting dalam mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah penyediaan data kemiskinan yang akurat. Secara umum, pada periode tahun 2017–2021, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, perkecualian pada Tahun 2021. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode tersebut dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak dan adanya pandemi *Covid-19*.

Pada tahun 2021 Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bulukumba sebesar 31.310 jiwa, mengalami peningkatan sebesar 1.310 jiwa jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin tahun 2020 yang jumlahnya sebesar 30.000 Jiwa. Persentase penduduk miskin pada tahun 2021 sebesar 7,43 persen, capaian tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang jumlahnya sebesar 7,10 persen. Pada tahun 2021, Garis Kemiskinan sebesar Rp 369.022 /kapita/bulan.

Tabel II-14
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin (Persen) dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2017 – 2021

Kabupaten/ Kota	Persentase Penduduk Miskin					Perubahan Persentase Penduduk Miskin	Rata-Rata Capaian Wilayah Setara
	2017	2018	2019	2020	2021		
Bulukumba	8,00	7,48	7,26	7,10	7,43	0,33	7,45
Gowa	8,42	7,83	7,53	7,38	7,54	0,16	7,74

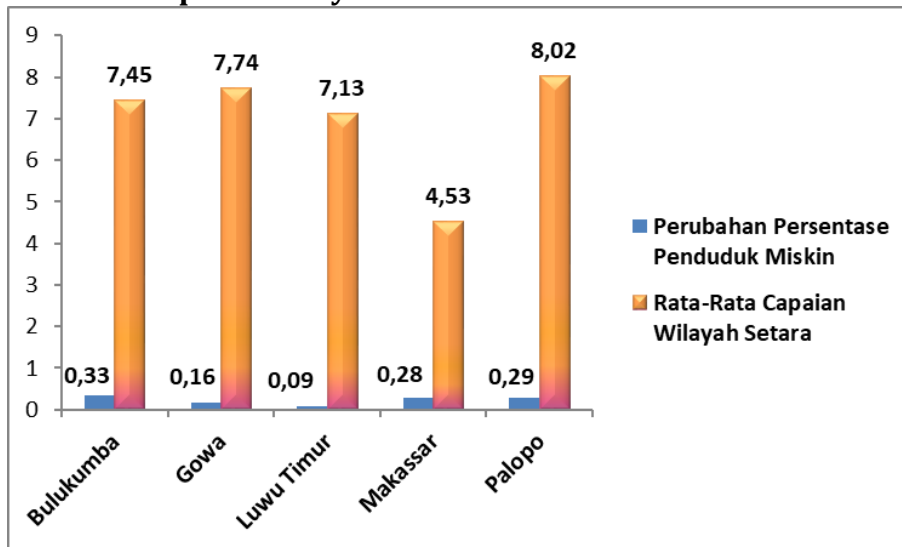
Kabupaten/ Kota	Persentase Penduduk Miskin					Perubahan Persentase Penduduk Miskin	Rata-Rata Capaian Wilayah Setara
	2017	2018	2019	2020	2021		
Luwu Timur	7,66	7,23	6,98	6,85	6,94	0,09	7,13
Makassar	4,59	4,41	4,28	4,54	4,82	0,28	4,53
Palopo	8,78	7,49	7,82	7,85	8,14	0,29	8,02

Sumber : Profil Kemiskinan Kab. Bulukumba (BPS Kab. Bulukumba), Tahun 2021 (diolah)

Jika diperbandingkan persentase penduduk miskin secara rata-rata dalam kurun waktu tahun 2017-2021, persentase kemiskinan tertinggi berada pada Kabupaten Palopo dengan nilai rata-rata sebesar 8,02 persen dan disusul oleh Kabupaten Gowa sebesar 7,74 persen. Adapun rata-rata persentase kemiskinan yang terendah adalah Kota Makassar yaitu sebesar 4,53 persen, demikian pula perubahan persentase penduduk miskin di Sulawesi Selatan dan daerah setaranya dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik II-5

Perbandingan Perubahan Persentase Penduduk Miskin (Persen) dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2017 - 2021

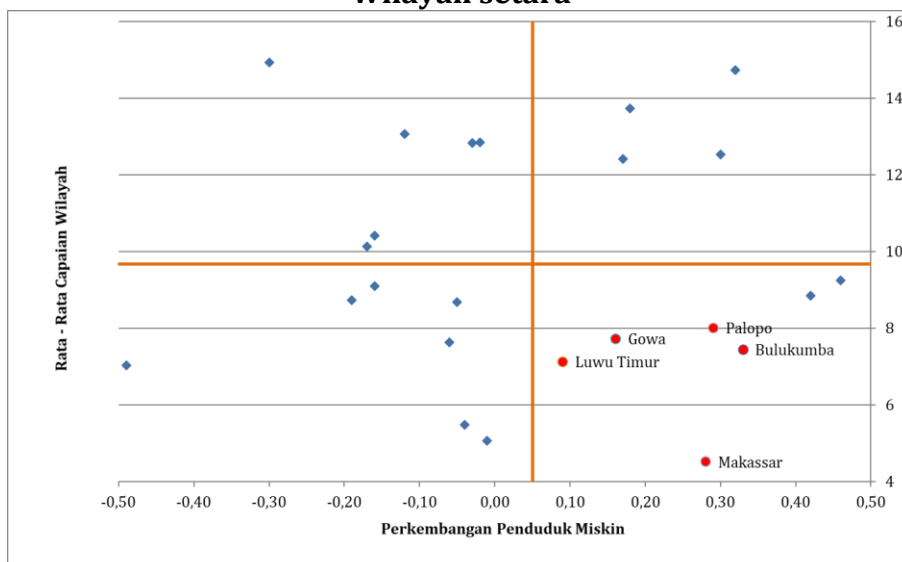


Sumber : Profil Kemiskinan Kab. Bulukumba (BPS Kab. Bulukumba), Tahun 2022 (diolah)

Wilayah setara dapat ditentukan dengan menggunakan analisis kuadran, dimana dilakukan pengelompokan Kabupaten/Kota yang memiliki kemiripan karakteristik dan kondisi kemiskinan, baik itu berdasarkan jumlah penduduk miskin maupun persentase penduduk miskinnya. Selengkapnya pada gambar kuadran berikut.

Kuadran II-2

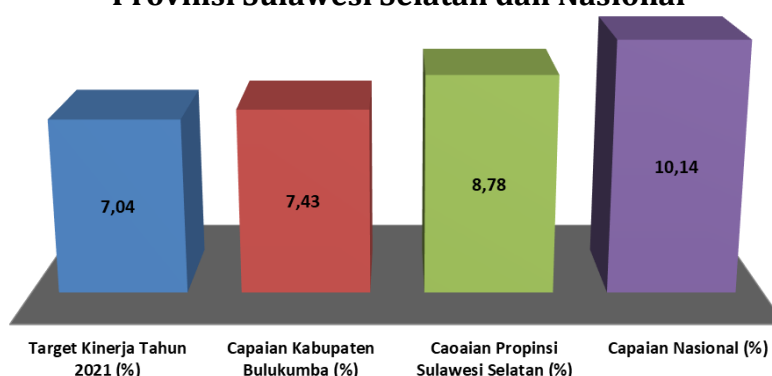
Analisis Kuadran Perubahan Angka Kemiskinan Terhadap Rata-rata Capaian Wilayah setara



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022 (diolah)

Adapun target Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2021 adalah 7,04 persen dengan realisasi mencapai angka 7,43 persen (lebih tinggi daripada angka target), ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Bulukumba mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin dari perhitungan target sebelumnya. Akan tetapi Kabupaten Bulukumba masih lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian persentase penduduk miskin Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional yang mencapai angka 8,78 persen dan 10,14 persen. Secara lengkap perbandingan antara target Kabupaten Bulukumba dengan capaian perkembangan penduduk miskin di Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi selatan dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik II-6
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin dengan target daerah, dan Capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional



Sumber : Profil Kemiskinan (BPS Kab. Bulukumba, Sul-Sel dan Nasional), Tahun 2022

Periode tahun 2017-2021 garis kemiskinan di Kabupaten Bulukumba terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, garis kemiskinan mencapai Rp. 351.180, kemudian meningkat menjadi Rp. 369.022 atau meningkat sebesar Rp17.842,-/kapita/bulan pada tahun 2021. Jika diperbandingkan dengan Garis Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, rata-rata capaian Garis Kemiskinan Kabupaten Bulukumba masih lebih rendah dalam kurun waktu 2017-2021. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-15
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin (Persen) dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2017 - 2021

Wilayah/Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Garis Kemiskinan Kab. Bulukumba	Rp/Kapita/Bulan	284.108	310.753	330.161	351.180	369.022
Garis Kemiskinan Sulawesi Selatan	Rp/Kapita/Bulan	287.788	315.738	341.555	362.031	384.455
Garis Kemiskinan Nasional	Rp/Kapita/Bulan	385.953	408.962	423.231	338.699	486.168

Sumber : Profil Kemiskinan (BPS Kab. Bulukumba, Sul-Sel dan Nasional), Tahun 2022

Ditinjau dari jumlah penduduk diatas garis kemiskinan menunjukkan peningkatan selama periode tahun 2017-2021. Pada tahun 2017 penduduk diatas garis kemiskinan Kabupaten Bulukumba sebesar 92,03 persen, lebih tinggi dari capaian Provinsi Sulawesi Selatan 90,52 persen dan Nasional 89,88 persen. Demikian pula halnya pada tahun 2021, penduduk diatas garis kemiskinan Kabupaten Bulukumba sebesar 92,57 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk diatas garis kemiskinan Sulawesi Selatan sebesar 91,22 persen, dan Nasional yaitu 89,86 persen.

Tabel II-16
Penduduk Diatas Garis Kemiskinan Kab. Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2017-2021

Wilayah	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Penduduk di Atas Garis Kemiskinan						
Kab. Bulukumba	%	92,03	92,52	92,74	92,90	92,57
Prov. Sulawesi Selatan	%	90,52	91,13	91,44	91,04	91,22
Nasional	%	89,88	90,34	90,78	89,81	89,86

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022 (diolah)

Perbandingan penduduk diatas garis kemiskinan Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nasional tersebut, menunjukkan bahwa kinerja penurunan kemiskinan kabupaten Bulukumba lebih baik daripada kinerja penurunan kemiskinan di Sulawesi Selatan dan Nasional.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Pada tahun 2021 Jumlah Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Bulukumba sebesar 1,00, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang nilainya sebesar 0,71 nilai indeks. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan beberapa daerah yang setara dengan Kabupaten Bulukumba selama tahun 2017 - 2021, rata-rata mengalami peningkatan. Selengkapnya pada tabel berikut.

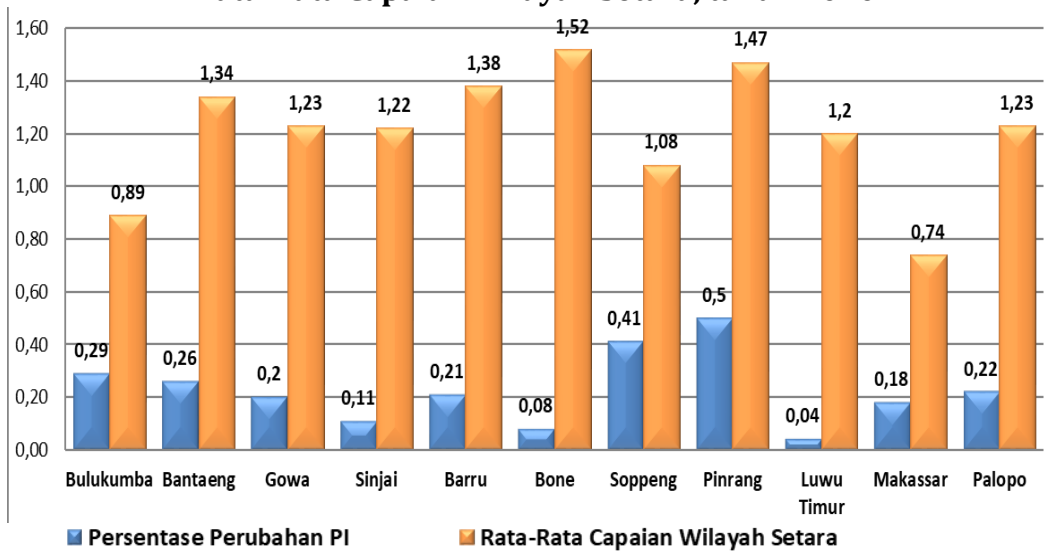
Tabel II-17
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin (Persen) dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2017 - 2021

Kabupaten/ Kota	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)					Perubahan Persentase	Rata-Rata Capaian Wilayah Setara
	2017	2018	2019	2020	2021		
Bulukumba	1,10	1,06	0,60	0,71	1,00	0,29	0,89
Bantaeng	1,43	1,74	1,35	0,97	1,23	0,26	1,34
Gowa	1,42	1,25	0,92	1,18	1,38	0,20	1,23
Sinjai	1,04	1,18	1,08	1,34	1,45	0,11	1,22
Barru	1,43	1,58	1,07	1,31	1,52	0,21	1,38
Bone	1,56	1,44	1,35	1,59	1,67	0,08	1,52
Soppeng	1,25	1,39	0,69	0,83	1,24	0,41	1,08
Pinrang	1,62	1,16	1,54	1,27	1,77	0,50	1,47
Luwu Timur	1,6	1,16	1,11	1,05	1,09	0,04	1,20
Makassar	0,64	1,11	0,60	0,58	0,76	0,18	0,74
Palopo	1,75	1,14	1,15	0,95	1,17	0,22	1,23

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022 (diolah)

Pada tahun 2021 perubahan tertinggi Indeks Kedalaman Kemiskinan dialami oleh Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Soppeng sebesar 0,50 dan 0,41 persen, dan perubahan yang terendah adalah Kabupaten Luwu Timur dengan nilai perubahan sebesar 0,04 Persen, Adapun Perbandingan Pertumbuhan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Bulukumba dengan wilayah setara tahun 2021 dapat dilihat pada grafik berikut.

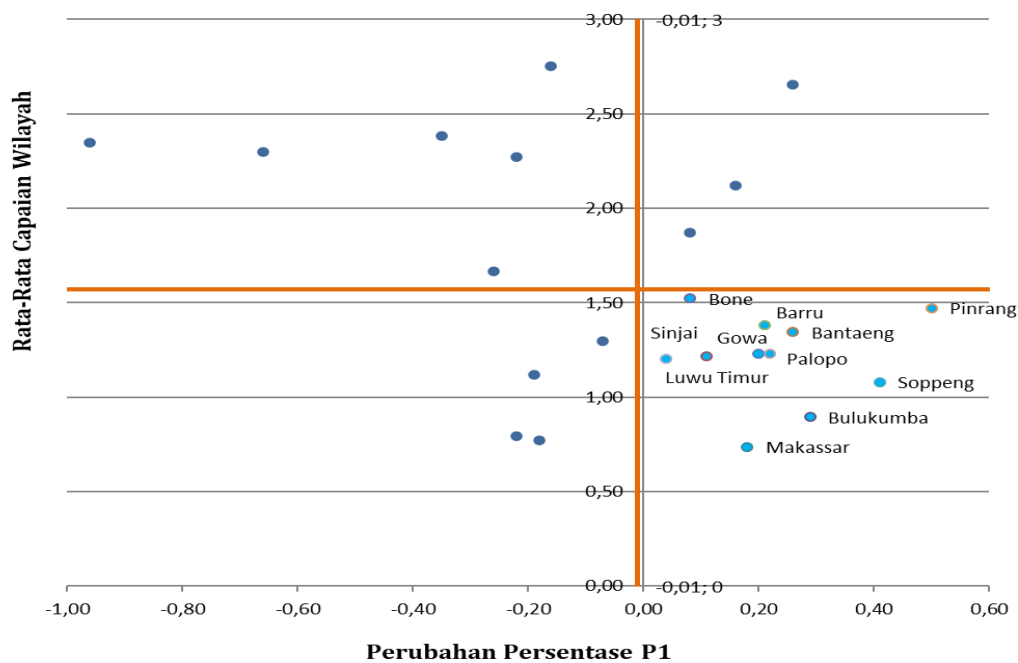
Grafik II-7
Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Bulukumba Dengan Rata-Rata Capaian Wilayah Setara, tahun 2020



Sumber : Profil Kemiskinan Kab. Bulukumba (BPS Kab. Bulukumba), Tahun 2022 (diolah)

Wilayah setara dapat ditentukan dengan menggunakan analisis kuadran, dimana dilakukan pengelompokan Kabupaten/Kota yang memiliki kemiripan karakteristik dan kondisi kemiskinan, baik itu berdasarkan perubahan P1 dan rata-rata capaiannya. Selengkapnya pada gambar kuadran berikut

Kuadran II-3
Analisis Kuadran Perubahan Indeks Kedalaman Kemiskinan Terhadap Rata-rata Capaian Wilayah setara (2017-2021)



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022 (diolah)

Ditinjau dari Indeks Kedalaman Kemiskinan menunjukkan tren yang berfluktuasi selama periode tahun 2017-2021. Pada tahun 2017, Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Bulukumba sebesar 1,10, lebih rendah dari capaian Provinsi Sulawesi Selatan (1,92), akan tetapi masih berada di bawah rata-rata capaian Nasional yaitu 1,79. Demikian pula halnya pada tahun 2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Bulukumba Meningkatkan sebesar 1,00 lebih rendah dibandingkan dengan capaian Indeks Kedalaman Kemiskinan Sulawesi Selatan sebesar 1,39, dan Nasional yaitu 1,67. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-18
Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Kab. Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2017-2021

Wilayah	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kab. Bulukumba	1,10	1,06	0,6	0,71	1,00
Prov. Sulawesi Selatan	1,92	1,68	1,63	1,65	1,39
Nasional	1,79	1,63	1,50	1,75	1,67,

Sumber : Profil Kemiskinan (BPS Kab. Bulukumba, Sul-Sel dan Nasional), Tahun 2021

3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Definisi baku dari penganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, bersedia untuk bekerja, dan sedang mencari pekerjaan. Definisi ini digunakan pada pelaksanaan Sakernas 1986 sampai dengan 2000, sedangkan sejak tahun 2001 definisi pengangguran mengalami penyesuaian/perluasan menjadi sebagai berikut: Penganggur adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, atau mereka yang mempersiapkan usaha, atau mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (sebelumnya dikategorikan sebagai bukan angkatan kerja), dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (sebelumnya dikategorikan sebagai bekerja), dan pada waktu yang bersamaan mereka tak bekerja (jobless). Penganggur dengan konsep/definisi tersebut biasanya disebut sebagai penganggur terbuka (open unemployment).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh lapangan usaha di pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT juga merefleksikan kemampuan ekonomi pasar kerja yang belum bisa menciptakan pekerjaan bagi mereka yang ingin bekerja tapi tidak mendapatkannya. TPT hasil Sakernas Agustus 2021 adalah sebesar 3,14 persen. Pada Agustus 2021 ini, nilai TPT mengalami penurunan yang cukup besar yaitu sebesar 0,28 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2020.

Jumlah Angkatan Kerja pada tahun 2021 sebesar 212.606 Orang, capaian ini mengalami penurunan jika dibandingkan capaian Angkatan Kerja tahun 2020 yaitu sebesar 220.103 orang. Pada tahun 2021 tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Bulukumba sebesar 65,46 persen,

Tingkat pengangguran terbuka untuk daerah wilayah setara dengan kabupaten Bulukumba mengalami tren berfluktuatif. TPT tertinggi adalah Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 4,93 persen dan terendah dialami oleh Kabupaten Toraja Utara hanya sebesar 2,61 persen. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-19
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2017 – 2021

Kabupaten/ Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)					Rata-Rata Capaian Wilayah Setara
	2017	2018	2019	2020	2021	
Bulukumba	3,73	3,42	3,06	3,42	3,14	3,35
Soppeng	2,71	2,36	3,24	4,42	3,92	3,33
Sidenreng Rappang	3,17	4,29	4,35	5,91	4,93	4,53
Toraja Utara	4,24	2,65	2,86	3,17	2,61	3,11

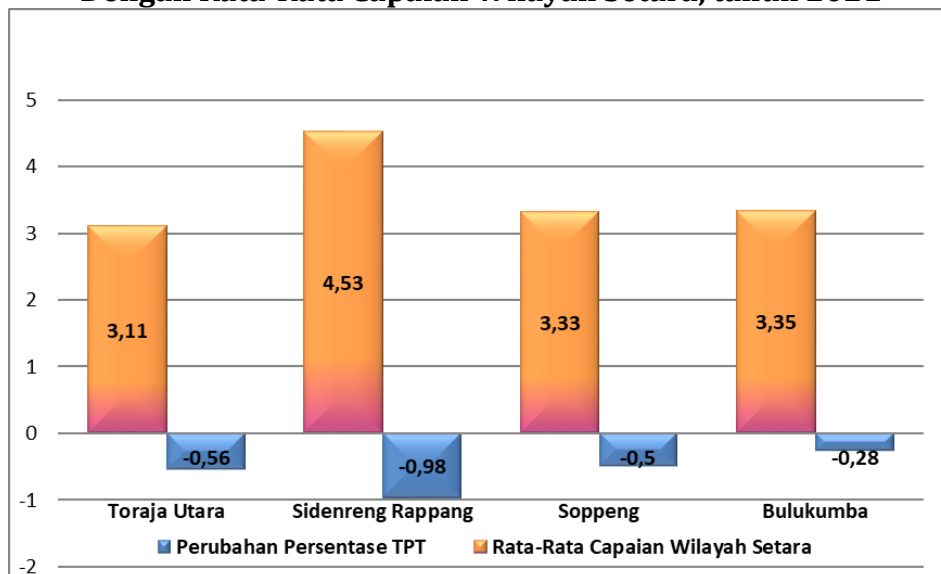
Sumber : Ketenagakerjaan Kab. Bulukumba (BPS Kab. Bulukumba), Tahun 2022

Perubahan TPT tahun 2021 banyak dipengaruhi pandemic Covid-19. Dengan adanya pandemi Covid-19, tidak hanya masalah kesehatan yang timbul, namun semua aspek dalam kehidupan ikut terdampak termasuk perekonomian.

Perekonomian mulai menurun sejak diberlakukannya pembatasan aktivitas. Pada tahun 2020 Tingkat pengangguran Terbuka mengalami peningkatan. Dan di tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,28 persen yakni sebesar 3,14 persen. Hal ini menandakan bahwa terjadi pengurangan pengangguran dari tahun sebelumnya dengan capaian kinerja yang positif.

Dari data TPT untuk 24 Kabupaten/Kota Propinsi Sulawesi Selatan, sebagian besar mengalami penurunan TPT dari tahun 2021. Capaian ini merupakan upaya dari pemerintah pusat dengan adanya beberapa program untuk pemulihan ekonomi mulai dari tingkat kabupaten/kota, propinsi dan pusat dengan mengalokasikan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ke beberapa sektor yang tujuan dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Adapun Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bulukumba dengan wilayah setara tahun 2021 dapat dilihat pada grafik berikut.

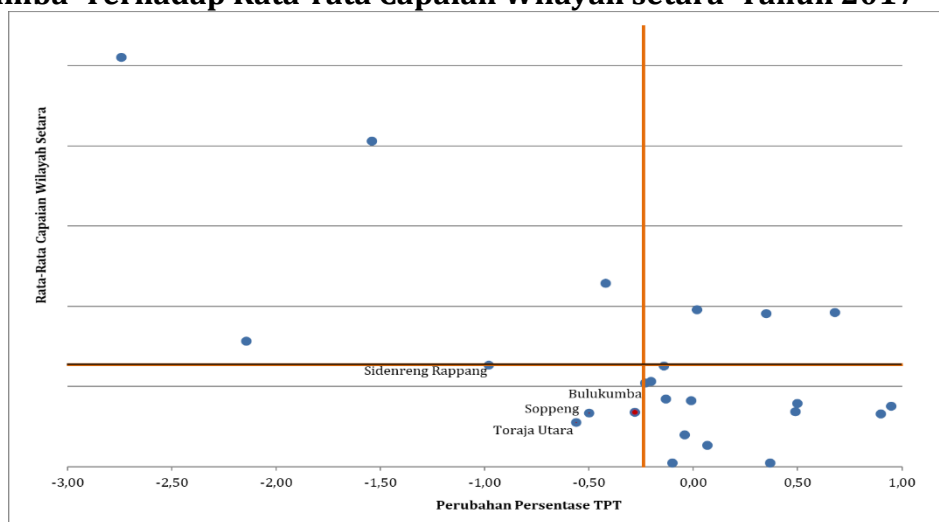
Grafik II-8
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (persen) Kabupaten Bulukumba
Dengan Rata-Rata Capaian Wilayah Setara, tahun 2021



Sumber : Ketenagakerjaan Kab. Bulukumba (BPS Kab. Bulukumba), Tahun 2021

Wilayah setara dapat ditentukan dengan menggunakan analisis kuadran, dimana dilakukan pengelompokan Kabupaten/Kota yang memiliki kemiripan karakteristik dan kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), baik itu berdasarkan perubahan dan rata-rata capaiannya. Selengkapnya pada gambar kuadran berikut.

Kuadran II-4
Analisis Kuadran Perubahan Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten
Bulukumba Terhadap Rata-rata Capaian Wilayah setara Tahun 2017 - 2021

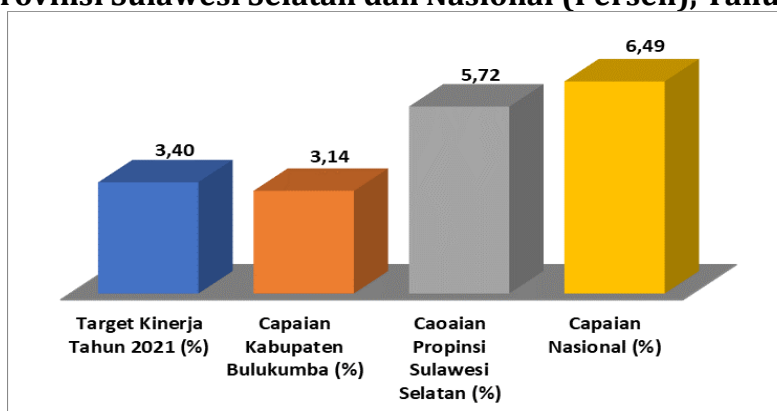


Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022 (diolah)

Capaian Kinerja untuk TPT Kabupaten Bulukumba pada tahun 2021 sebesar 3,14 persen lebih rendah dari target capaian kinerja tahun 2021 sebesar 3,40 persen, ini menandakan bahwa Capaian Kinerja mengalami perubahan yang positif karena ditandai dengan adanya penurunan jumlah pengangguran terbuka dari tahun sebelumnya. Dan perbandingan TPT Kabupaten Bulukumba jauh lebih baik dibanding dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dimana angka pengangguran terbuka mencapai 5,72 persen dan 6,49 persen. Ini menandakan bahwa angka pengangguran terbuka untuk provinsi dan nasional jauh lebih besar dibanding angka pengangguran terbuka di Kabupaten Bulukumba. Selengkapnya pada tabel berikut.

Grafik II-9

Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka dengan target Kabupaten Bulukumba dan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional (Persen), Tahun 2021



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022

4. Gini Rasio

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini ratio di Kabupaten Bulukumba berfluktuasi selama periode tahun 2017-2021. Gini Ratio pada tahun 2017 menjadi 0,324, tahun 2018 kembali naik menjadi 0,388, tahun 2019 nilai Gini Rasio di kabupaten Bulukumba naik hingga mencapai 0,377, kemudian turun di tahun 2020- 2021 menjadi 0,371-0,362.

Tabel II-20

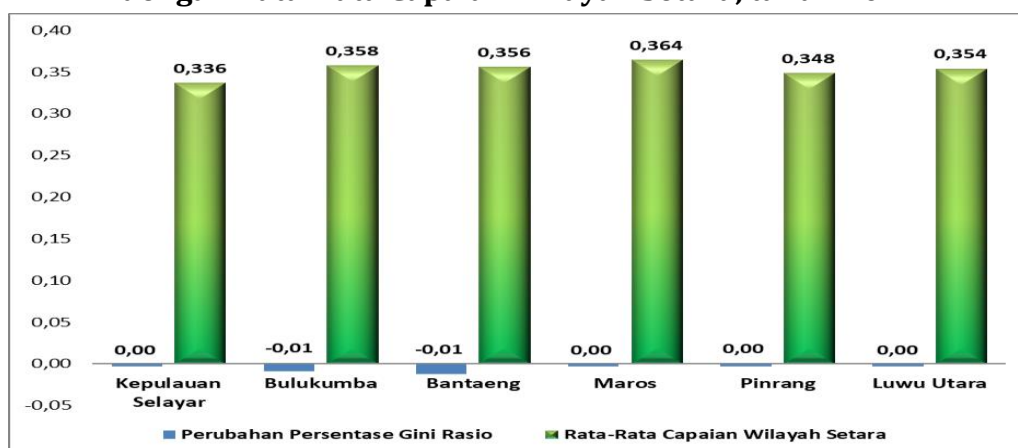
Perbandingan Gini Rasio Kabupaten Bulukumba dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2017 – 2021

Kabupaten/ Kota	Gini Rasio					Rata-Rata Capaian Wilayah Setara
	2017	2018	2019	2020	2021	
Kepulauan Selayar	0,331	0,338	0,301	0,357	0,354	0,336
Bulukumba	0,324	0,354	0,377	0,371	0,362	0,358
Bantaeng	0,422	0,342	0,338	0,344	0,332	0,356
Maros	0,368	0,337	0,382	0,368	0,365	0,364
Pinrang	0,309	0,359	0,336	0,370	0,367	0,348
Luwu Utara	0,358	0,361	0,364	0,344	0,341	0,354

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022 (diolah)

Adapun perubahan Gini Rasio Kabupaten Bulukumba tahun 2021 adalah sebesar 0,362, dan mengalami penurunan jika dibandingkan capaian Gini Rasio tahun 2020 yang nilainya mencapai 0,371 atau mengalami penurunan -0,01point. Adapun perbandingan Pertumbuhan Gini Rasio Kabupaten Bulukumba dengan Rata-Rata Capaian Wilayah Setara secara lengkap rata-rata Capaian Wilayah Setara dapat dilihat pada grafik berikut.

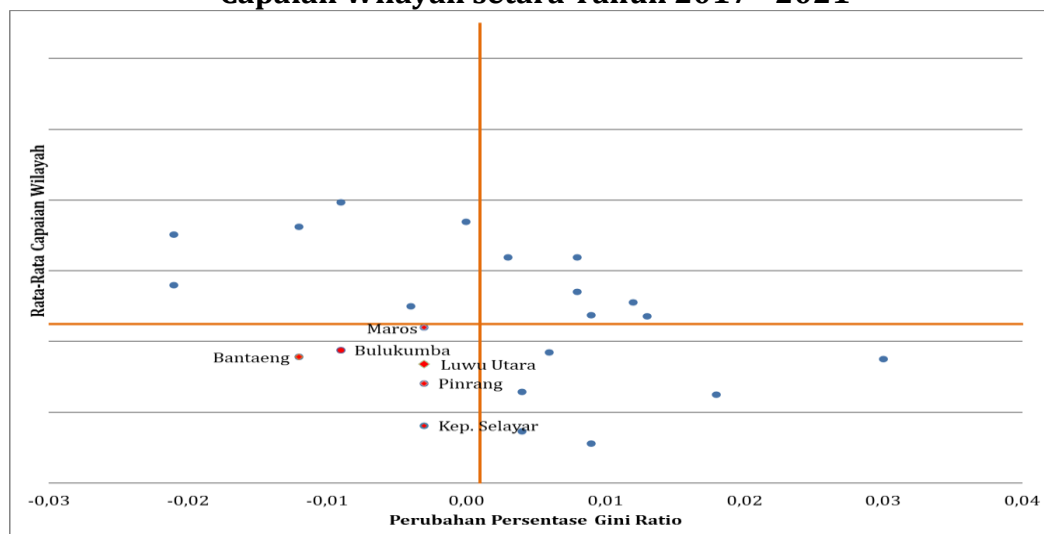
Grafik II-10
Perbandingan Perubahan Gini Rasio Kabupaten Bulukumba
dengan Rata-Rata Capaian Wilayah Setara, tahun 2021



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022 (diolah)

Wilayah setara dapat ditentukan dengan menggunakan analisis kuadran, dimana dilakukan pengelompokan Kabupaten/Kota yang memiliki kemiripan karakteristik dan kondisi Gini Rasio, baik itu berdasarkan perubahan dan rata-rata capaiannya. Selengkapnya pada gambar kuadran berikut.

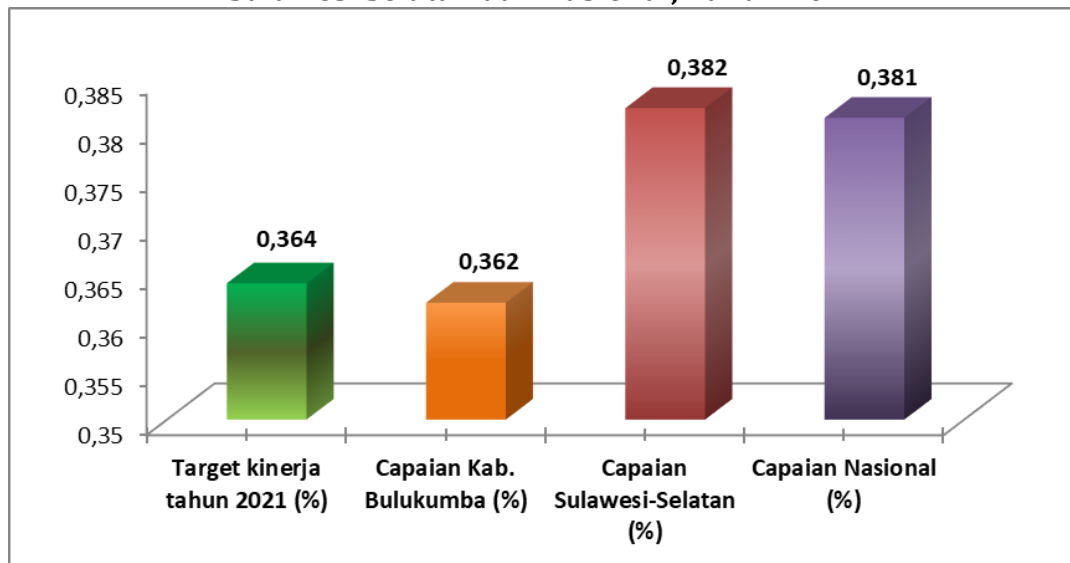
Kuadran II-5
Analisis Kuadran Perubahan Gini Rasio Kabupaten Bulukumba Terhadap Rata-rata
Capaian Wilayah setara Tahun 2017 - 2021



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022 (diolah)

Jika dibandingkan dengan capaian Gini Rasio Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional, terlihat bahwa ketimpangan di Kabupaten Bulukumba lebih rendah. Meskipun secara nasional beberapa tahun terakhir angka *Gini Ratio* mengalami penurunan sampai dengan September 2019. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Indonesia. Namun demikian, akibat adanya pandemi *Covid-19*, Secara lengkap Perbandingan Capaian Gini Rasio Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Capaian Nasional Tahun 2020 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik II-11
Perbandingan Capaian Gini Rasio dengan target Kabupaten Bulukumba dan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2021



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022 (diolah)

5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Konsep pembangunan manusia menjadi sebuah konsep yang terukur untuk mengukur kemajuan suatu negara. Secara umum, Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan metode penghitungan direvisi pada tahun 2010. BPS mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru pada tahun 2014 dan melakukan *backcasting* sejak tahun 2010.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.

IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standardisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Secara umum, pembangunan manusia di Kabupaten Bulukumba terus mengalami kemajuan selama periode 2017 hingga 2021. IPM

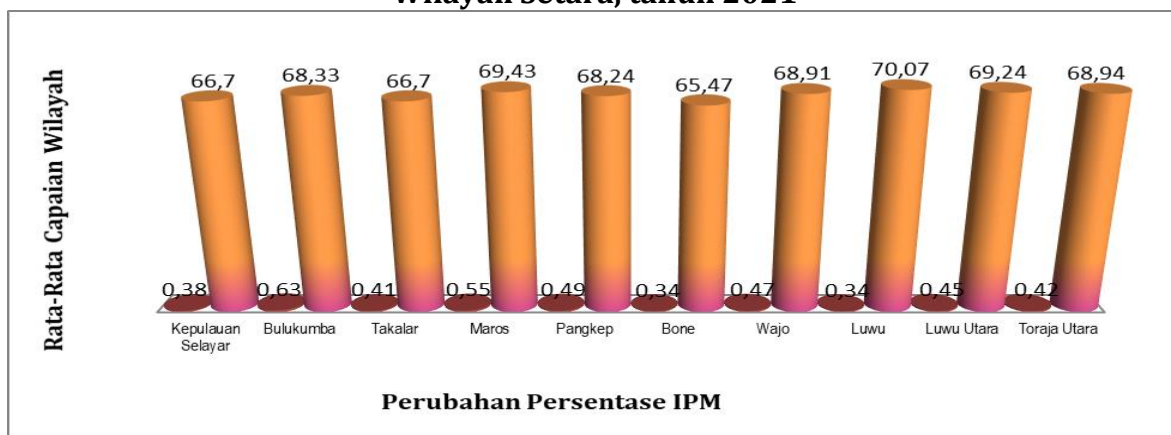
Kabupaten Bulukumba meningkat dari 67,08 pada tahun 2017 menjadi 69,62 pada tahun 2021. Selama periode tersebut, IPM Kabupaten Bulukumba rata-rata tumbuh sebesar 1,02 persen per tahun. Pada periode 2017-2021 IPM Kabupaten Bulukumba. Secara lengkap dapat dilihat pada table berikut.

Tabel II-21
Perbandingan Capaian IPM Kabupaten Bulukumba
dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2017 - 2021

Kabupaten/ Kota	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)					Rata-Rata Capaian Wilayah Setara
	2017	2018	2019	2020	2021	
Kepulauan Selayar	65,39	66,04	66,91	67,38	67,76	66,70
Bulukumba	67,08	67,70	68,28	68,99	69,62	68,33
Bantaeng	67,27	67,76	68,30	68,73	68,99	68,21
Takalar	65,48	66,07	66,94	67,31	67,72	66,70
Gowa	68,33	68,87	69,66	70,14	70,29	69,46
Sinjai	65,8	66,24	67,05	67,50	67,75	66,87
Maros	68,42	68,94	69,50	69,86	70,41	69,43
Barru	69,56	70,05	70,60	71,00	71,13	70,47
Bone	64,16	65,04	65,67	66,06	66,40	65,47
Soppeng	66,67	67,60	68,26	68,67	68,99	68,04

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021 (diolah)

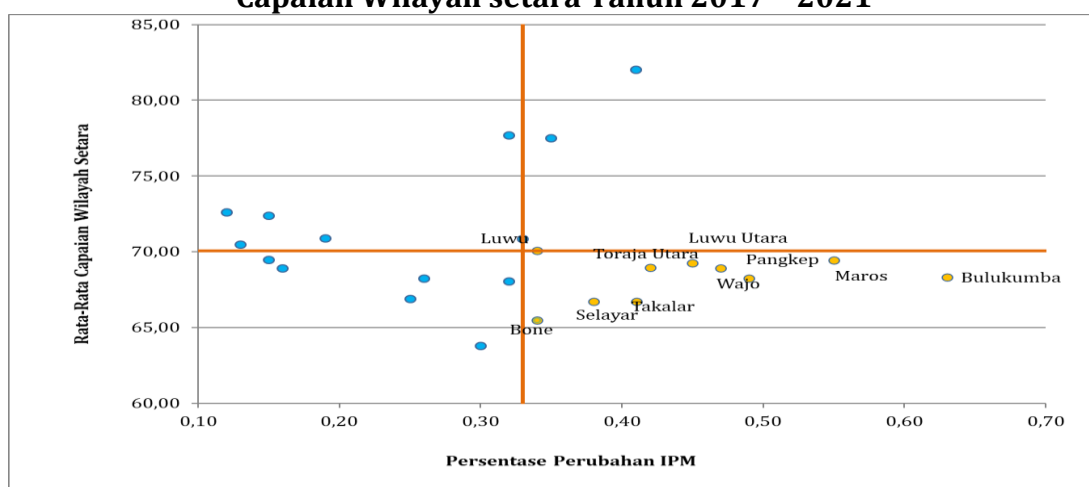
Grafik II-12
Perbandingan Pertumbuhan IPM Kabupaten Bulukumba dengan Rata-Rata Capaian Wilayah Setara, tahun 2021



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021 (diolah)

Wilayah setara dapat ditentukan dengan menggunakan analisis kuadran, dimana dilakukan pengelompokan Kabupaten/Kota yang memiliki kemiripan karakteristik dan kondisi capaian IPM, baik itu berdasarkan nilai pertumbuhan dan rata-rata capaiannya. Selengkapnya pada gambar kuadran berikut.

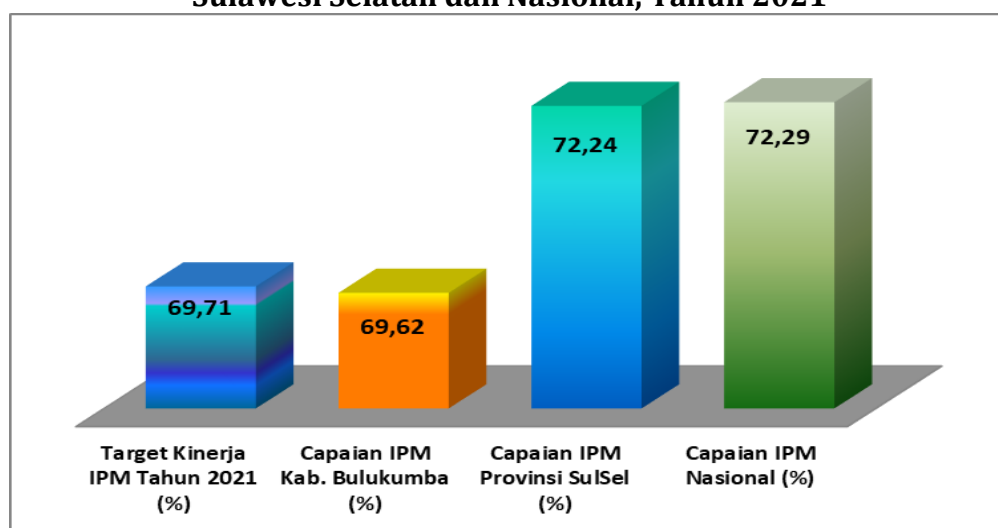
Kuadran II-6
Analisis Kuadran Pertumbuhan IPM Kabupaten Bulukumba Terhadap Rata-rata Capaian Wilayah setara Tahun 2017 - 2021



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021 (diolah)

Adapun target Capaian IPM Kabupaten Bulukumba tahun 2021 adalah 69.71 point, dengan realisasi 69,62 point Adapun capaian Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 72,24 dan capaian IPM nasional yaitu sebesar 72,29 point. Secara lengkap dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik II-13
Perbandingan Capaian IPM dengan target Kabupaten Bulukumba dan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2021



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022 (diolah)

6. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Salah satu aspek dalam pengukuran IPM adalah rata-rata lama sekolah. Lama sekolah yang menggambarkan dimensi pengetahuan. Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2017 hingga 2021. Rata-Rata Lama Sekolah di kabupaten Bulukumba rata-rata tumbuh 2,23 persen per tahun selama periode 2017 hingga 2021. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Kabupaten Bulukumba yang lebih baik. Hingga tahun 2021, secara rata-rata penduduk Kabupaten Bulukumba usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas VIII (SMP kelas II).

Jika dibandingkan dengan daerah setara, Kabupaten Bulukumba pada tahun 2021 menempati urutan kelima dari 7 kabupaten wilayah setara sebesar 7,82 tahun, adapun urutan pertama diraih oleh Kabupaten Toraja Utara dengan nilai RLS sebesar 8,25 tahun dan diikuti dengan Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 8,08 tahun dan Kabupaten Maros sebesar 8,01 tahun. Tahun yang terendah lama sekolah adalah Kabupaten wajo dengan capaian RLS sebesar 7,05 tahun. Perkembangan rata-rata lama sekolah secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut..

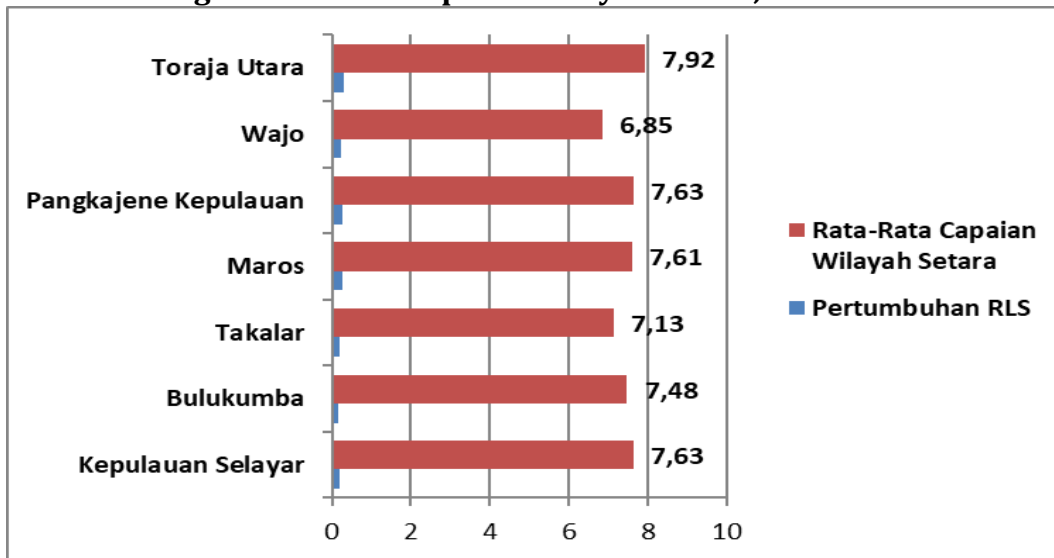
Tabel II-22
Perbandingan Capaian Rata-Rata lama Sekolah Kabupaten Bulukumba dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2017 - 2021

Kabupaten/ Kota	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)					Rata-Rata Capaian Wilayah Setara
	2017	2018	2019	2020	2021	
Kepulauan Selayar	7,18	7,40	7,63	7,88	8,08	7,63
Bulukumba	7,16	7,34	7,43	7,67	7,82	7,48
Takalar	6,77	6,91	7,18	7,29	7,49	7,13
Maros	7,42	7,43	7,46	7,73	8,01	7,61
Pangkajene Kep.	7,48	7,49	7,60	7,66	7,92	7,63
Wajo	6,78	6,79	6,8	6,81	7,05	6,85
Toraja Utara	7,73	7,76	7,92	7,96	8,25	7,92

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022 (diolah)

Pertumbuhan Rata-Rata Lama Sekolah tahun 2021 pada daerah setara dengan Kabupaten Bulukumba untuk urutan tertinggi ditempati oleh Kabupaten Toraja Utara dengan pertumbuhan sebesar 3,64 poin dan Kabupaten Bulukumba dengan posisi RLS terendah dengan nilai 1,96 poin. Secara lengkap perkembangan rata-rata lama sekolah selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik beriku.

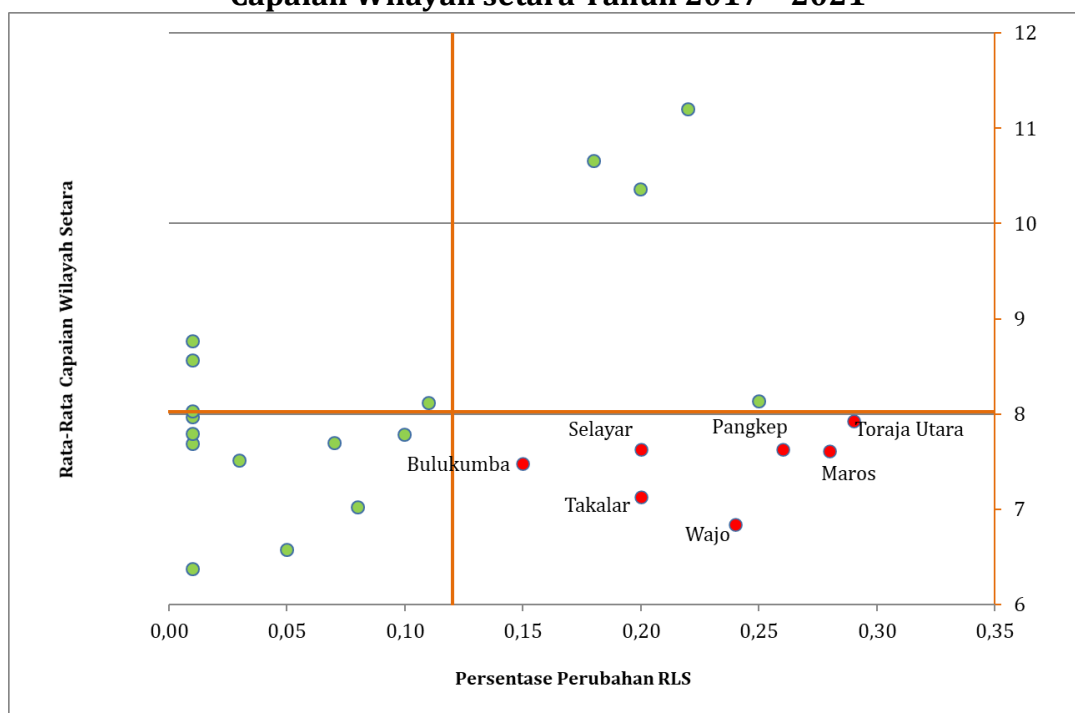
Grafik II-14
Perbandingan Pertumbuhan RLS Kabupaten Bulukumba dengan Rata-Rata Capaian Wilayah Setara, tahun 2021



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022 (diolah)

Wilayah setara dapat ditentukan dengan menggunakan analisis kuadran, dimana dilakukan pengelompokan Kabupaten/Kota yang memiliki kemiripan karakteristik dan kondisi capaian RLS, baik itu berdasarkan nilai perubahan RLS dan rata-rata capaiannya. Selengkapnya pada gambar kuadran berikut.

Kuadran II-7
Analisis Kuadran Pertumbuhan RLS Kabupaten Bulukumba Terhadap Rata-rata Capaian Wilayah setara Tahun 2017 - 2021

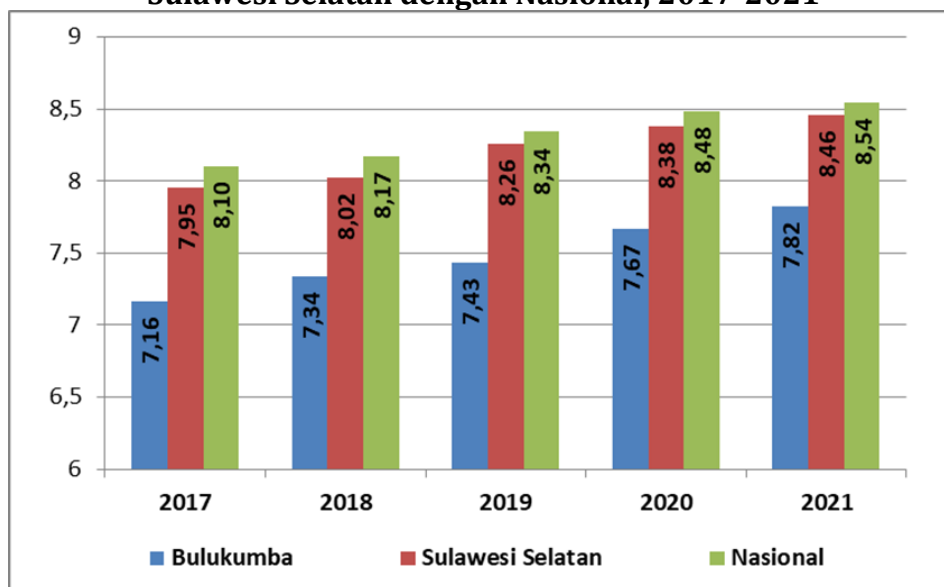


Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022 (diolah)

Perbandingan Capaian Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Bulukumba , Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nasional periode 2017-2021, menyajikan fakta bahwa capaian Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Selatan dan secara Nasional lebih tinggi daripada Capaian RLS Kabupaten Bulukumba. Peningkatan RLS baik di level

Kabupaten, Nasional maupun Provisinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan setiap tahun. Secara lengkap dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik II-15
Perbandingan Capaian Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan dengan Nasional, 2017-2021



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022 (diolah)

7. Umur Harapan Hidup (UHH)

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode tahun 2017 hingga tahun 2021, Kabupaten Bulukumba telah berhasil meningkatkan UHH saat lahir sebesar 1,14 tahun. Selama periode tersebut, secara rata-rata Umur Harapan Hidup tumbuh sebesar 0,42 persen per tahun. Pada tahun 2016, UHH saat lahir di Kabupaten Bulukumba hanya sebesar 66,96 tahun dan pada tahun 2021 telah mencapai 68,10 tahun. Jika diperbandingkan dengan daerah setara Kabupaten Bulukumba, penduduk dengan capaian umur terpanjang tahun 2021 ada di Kabupaten Luwu Utara yaitu 68,67 tahun, sedangkan daerah yang penduduk dengan usia terpendek adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yaitu 66,78 tahun. Perbandingan Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) (Tahun) Sulawesi Selatan dengan Wilayah Setara, 2017-2021 secara lengkap dapat dilihat pada table berikut

Tabel II-23
Perbandingan Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Bulukumba dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2017 - 2021

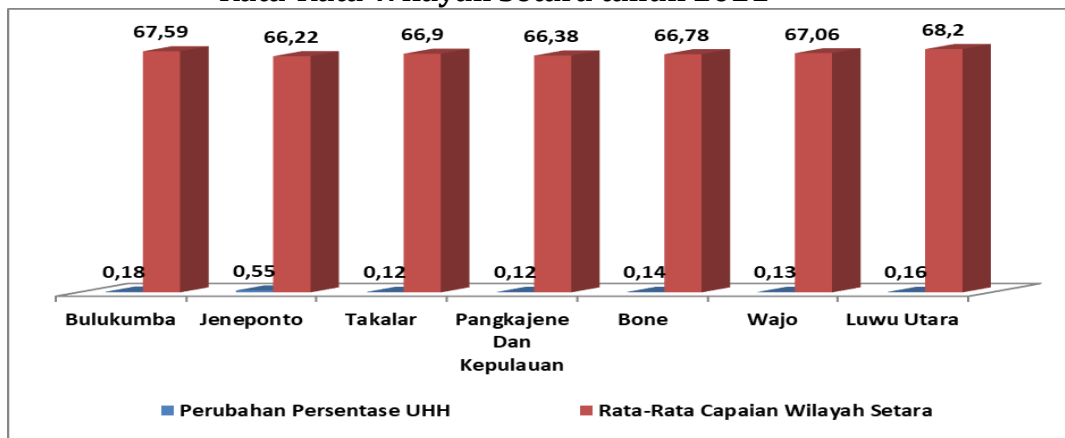
Kabupaten/ Kota	Usia Harapan Hidup (Tahun)					Rata-Rata Capaian Wilayah Setara
	2017	2018	2019	2020	2021	
Bulukumba	66,96	67,27	67,69	67,92	68,10	67,59
Jeneponto	65,65	65,89	66,24	66,39	66,94	66,22
Takalar	66,38	66,64	67,01	67,18	67,30	66,90
Pangkajene Dan Kepulauan	65,86	66,12	66,49	66,66	66,78	66,38
Bone	66,22	66,5	66,88	67,07	67,21	66,78
Wajo	66,52	66,79	67,17	67,35	67,48	67,06
Luwu Utara	67,61	67,9	68,31	68,51	68,67	68,20

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022 (diolah)

Jika memperhatikan Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) selama 5 tahun terakhir (2017-2021), secara rata-rata UHH Kabupaten Bulukumba sebesar 67,59 tahun. Adapun untuk daerah setara dengan Kabupaten Bulukumba, yang memiliki rata-rata UHH tertinggi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2023

dicapai oleh kabupaten Luwu Utara dengan nilai 68,20 Tahun dan yang terendah ditempati oleh Kabupaten Jeneponto yaitu 66,22 tahun. Adapun pertumbuhan tertinggi pada tahun 2021 terjadi di Kabupaten Jeneponto yaitu 0,49 tahun, pertumbuhan terendah dicapai oleh Kabupaten Takalar dengan nilai 0,34 tahun, sedangkan Kabupaten Bulukumba menduduki posisi kedua dengan capaian 0,42 tahun. Secara lengkap dapat dilihat pada grafik berikut

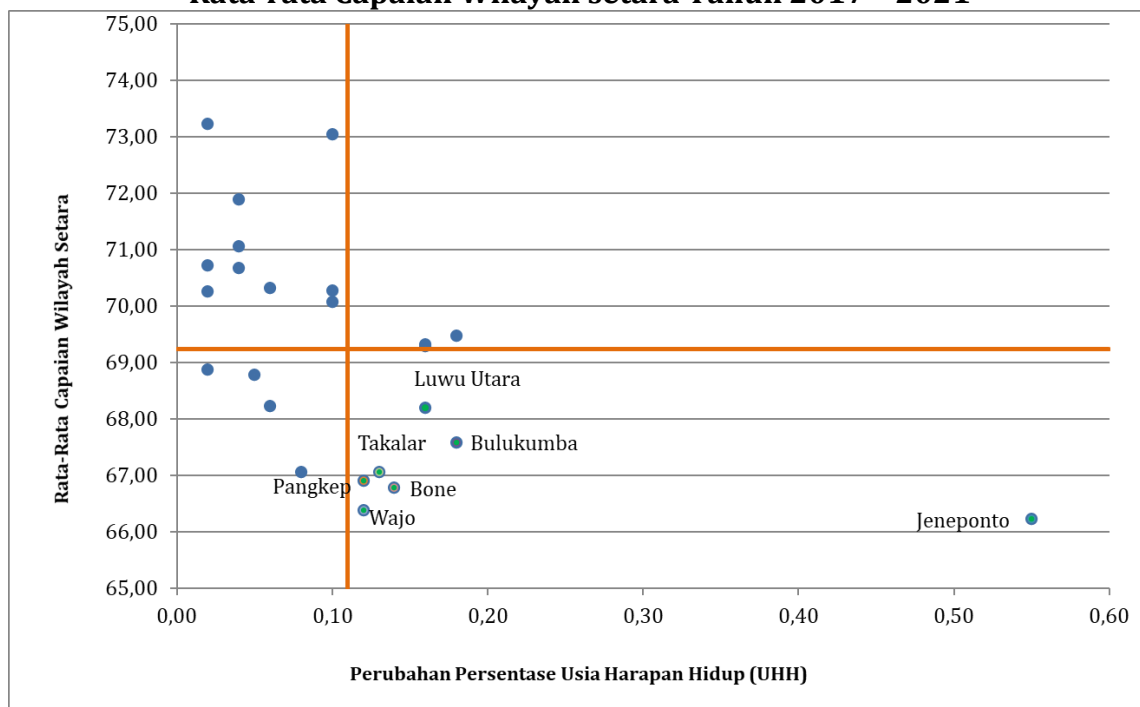
Grafik II-16
Perbandingan Capaian Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Bulukumba, dengan Rata-Rata Wilayah Setara tahun 2021



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022 (diolah)

Wilayah setara dapat ditentukan dengan menggunakan analisis kuadran, dimana dilakukan pengelompokan Kabupaten/Kota yang memiliki kemiripan karakteristik dan kondisi capaian UHH baik itu berdasarkan nilai perubahan UHH, pertumbuhan UHH dan rata-rata capaiannya. Selengkapnya pada gambar kuadran berikut.

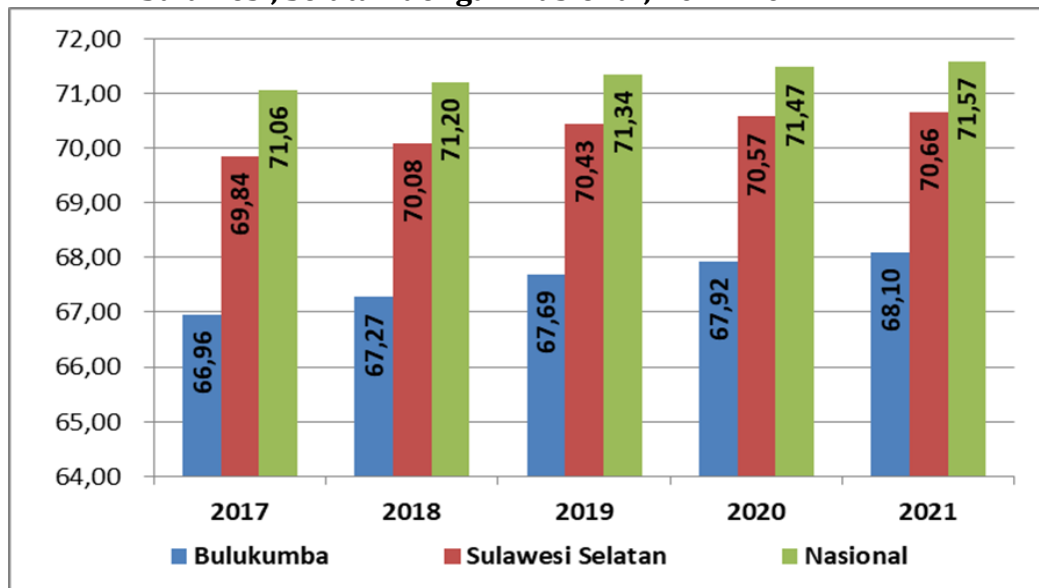
Kuadran II-8
Analisis Kuadran Perubahan Nilai UHH Terhadap Rata-rata Capaian Wilayah setara Tahun 2017 - 2021



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022 (diolah)

Jika memperhatikan capaian Usia Harapan Hidup (UHH) skala Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan secara nasional tahun 2017-2021. Maka capaian UHH Kabupaten Bulukumba masih berada jauh dibandingkan dengan capaian UHH Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Meskipun demikian, Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Bulukumba dari tahun ketahun selalu mengalami peningkatan. Perbandingan Capaian Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH - Tahun) Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nasional tahun 2017-2021 secara lengkap dapat dilihat pada grafik berikut

Tabel II-24
Perbandingan Capaian Umur Harapan Hidup (UHH-Tahun) Kabupaten Bulukumba Sulawesi, Selatan dengan Nasional, 2017-2021



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022 (diolah)

8. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

Selain Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS) juga menjadi penentu IPM. Harapan lama sekolah yang menggambarkan dimensi pengetahuan. Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah. Selama kurun waktu tahun 2017-2021 di Kabupaten Bulukumba kedua indikator ini mengalami pertumbuhan yang positif. Tahun 2017 HLS Kabupaten Bulukumba sebesar 12,65 tahun dan tahun 2021 nilai HLS sebesar 13,41 tahun. Indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan rata peningkatan sebesar 0,85 persen setiap tahunnya.

Meningkatnya Harapan Lama Sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Di tahun 2021, Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Bulukumba telah mencapai 13,41 yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus Diploma I. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Kabupaten Bulukumba yang lebih baik.

Jika diperbandingkan dengan rata-rata capaian wilayah setara Kabupaten Bulukumba tahun 2017-2021, rata-rata capaian HLS tertinggi ditempati oleh Kabupaten Maros dengan nilai RLS sebesar 13,04 tahun, dan Kabupaten yang nilai capaian rata-rata HLS terendah adalah Kabupaten Jeneponto sebesar 11,99 tahun. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-25
Perbandingan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Bulukumba dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2017 - 2021

No.	Kabupaten/ Kota	Harapan Lama Sekolah (HLS)					Rata-Rata Capaian HLS Wilayah Setara
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Bulukumba	12,65	12,79	12,91	13,17	13,41	12,83
2	Jeneponto	11,93	11,95	11,97	11,98	12,10	11,99
3	Maros	12,97	12,99	13,02	13,04	13,16	13,04
4	Bone	12,43	12,67	12,8	12,88	12,98	12,75
5	Soppeng	12,33	12,57	12,73	12,9	13,05	12,72
6	Luwu Utara	12,38	12,39	12,42	12,43	12,57	12,44

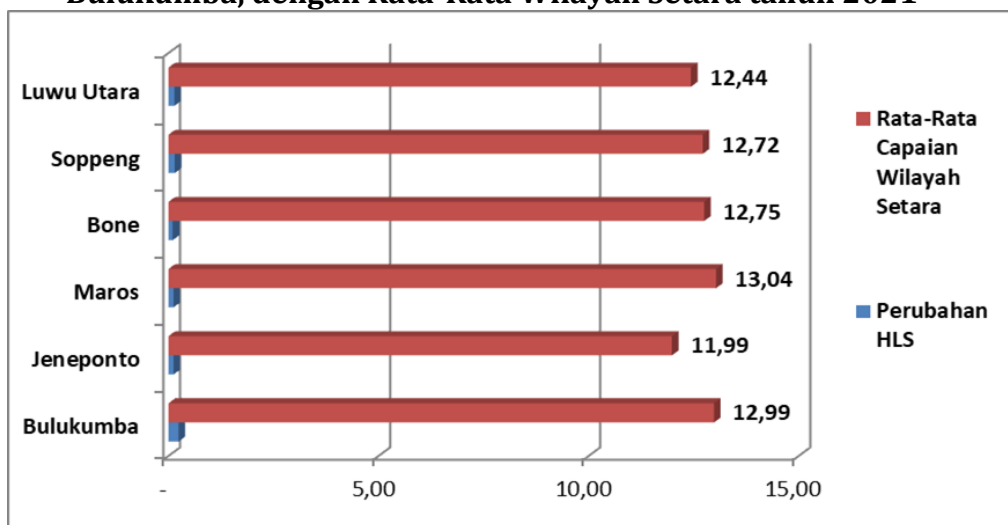
Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022 (diolah)

Dari segi pertumbuhan, Kabupaten Bulukumba adalah daerah yang tertinggi nilai pertumbuhannya di Tahun 2021, yaitu sebesar 1,82 persen, dan daerah setara yang menempati pertumbuhan terendah adalah Kabupaten Bone dengan angka pertumbuhan sebesar 0,78 persen.

Perbandingan Pertumbuhan Harapan Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Bulukumba dengan rata-rata Capaian Wilayah Setara pada Tahun 2017-2021 memperlihatkan bahwa Kabupaten Bulukumba adalah daerah yang menduduki posisi kedua sebesar 12,83 tahun setelah Kabupaten Maros sebesar 13,04 tahun. dan daerah setara yang terendah adalah Kabupaten Jeneponto dengan angka HLS sebesar 11,99 tahun. Secara lengkap dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik II-17

Perbandingan Capaian Pertumbuhan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Bulukumba, dengan Rata-Rata Wilayah Setara tahun 2021

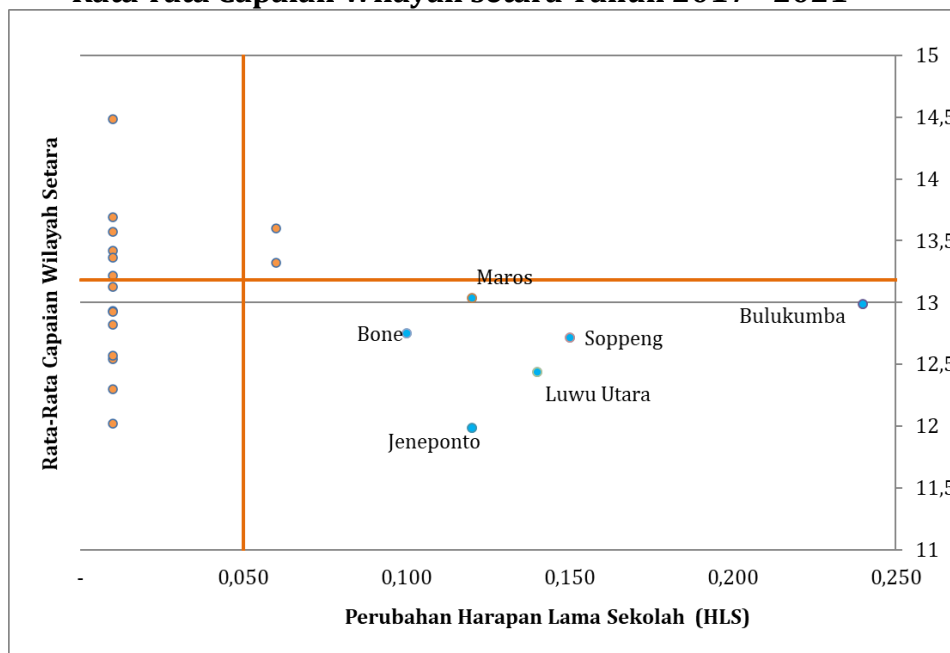


Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021 (diolah)

Wilayah setara dapat ditentukan dengan menggunakan analisis kuadran, dimana dilakukan pengelompokan Kabupaten/Kota yang memiliki kemiripan karakteristik dan kondisi capaian HLS baik itu berdasarkan nilai perubahan HLS, pertumbuhan HLS dan rata-rata capaiannya. Selengkapnya pada gambar kuadran berikut.

Kuadran II-9

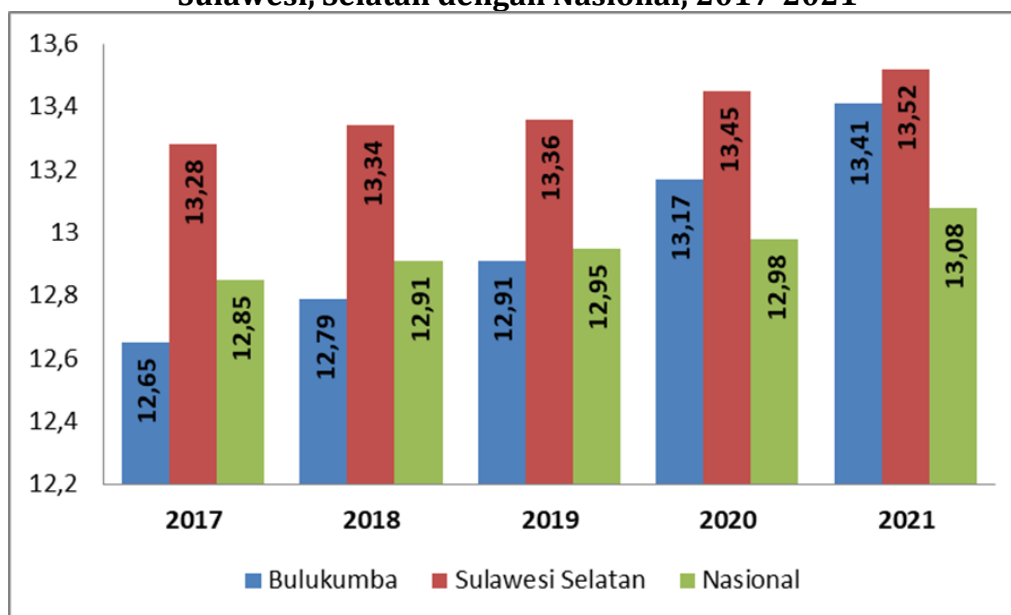
Analisis Kuadran Perubahan Nilai HLS Terhadap Rata-rata Capaian Wilayah setara Tahun 2017 - 2021



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022 (diolah)

Adapun Perbandingan Capaian Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi selatan dengan Nasional tahun 2017-2021. Capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Sulawesi Selatan masih di atas capaian HLS Kabupaten Bulukumba dan Nasional pada kurun waktu tersebut. Sementara itu, jika capaian HLS Kabupaten Bulukumba dibandingkan dengan capaian HLS Nasional, pada kurun waktu 2017-2020, capaian HLS Kabupaten Bulukumba masih berada di bawah capaian HLS Nasional. Namun, pada tahun 2021 capaian HLS Kabupaten Bulukumba 13,41 tahun sudah berada diatas capaian HLS Nasional 13,08 tahun. Adapun secara lengkap dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik II-18
Perbandingan Capaian harapan Lama sekolah (HLS-Tahun) Kabupaten Bulukumba Sulawesi, Selatan dengan Nasional, 2017-2021



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022 (diolah)

9. Pengeluaran Perkapita

Dimensi standar hidup layak merupakan representasi dari kesejahteraan yang diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Dari tahun ke tahun, pengeluaran per kapita yang disesuaikan di Indonesia terus mengalami peningkatan sampai tahun 2020. Pada tahun 2021, pengeluaran per kapita yang disesuaikan masyarakat Indonesia mencapai Rp11,156 juta per tahun, naik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1,28 persen. Adapun pada tahun 2021 untuk semua wilayah setara dengan Kabupaten Bulukumba mengalami peningkatan, Hal ini tentunya menjadi anomali ditengah tekanan pertumbuhan ekonomi hingga kontraksi akibat pandemi *Covid-19*. Pada tahun 2021, pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Bulukumba mencapai 10,632 juta rupiah per tahun, atau bertumbuh sebesar 1,13 persen dibanding tahun 2020 (10,513 juta per tahun). Selama lima tahun terakhir, pengeluaran per kapita disesuaikan kabupaten Bulukumba rata-rata tumbuh sebesar 1,00 persen per tahun. Jika dibandingkan dengan capaian Pengeluaran perkapita wilayah setara tahun 2021, Kabupaten Bulukumba menempati posisi kedua dengan nilai Pengeluaran perkapita yang disesuaikan sebesar 10,435 juta rupiah setelah Kabupaten Enrekang sebesar 10,732 juta rupiah, dan Pengeluaran perkapita terendah adalah Kabupaten Tana Toraja sebesar Rp 7,158 juta rupiah. Perbandingan Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah/Orang/Tahun) Kabupaten Bulukumba dengan Wilayah Setara, secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

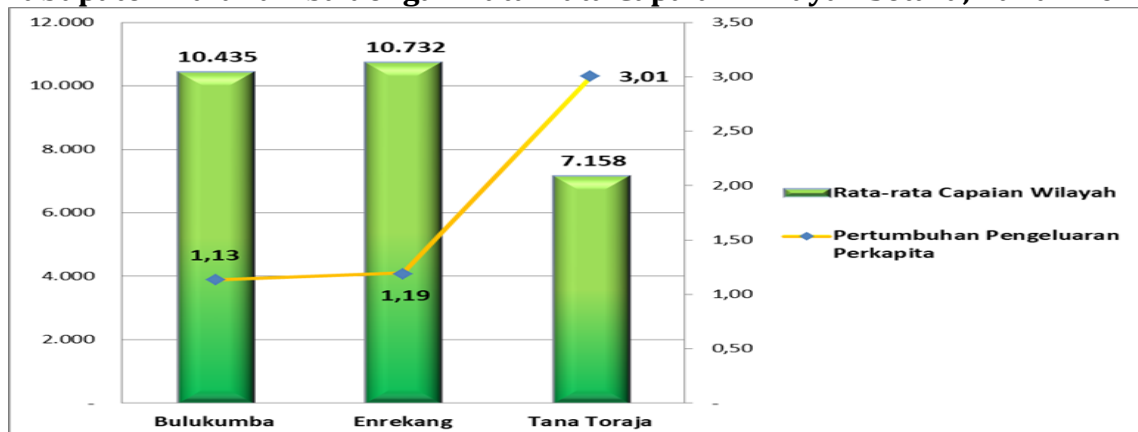
Tabel II-26
Perbandingan Pengeluaran Perkapita Masyarakat (Ribu Rp/Orang/Tahun)
Kabupaten Bulukumba dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2017 - 2020

Kabupaten/ Kota	Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah)					Rata-Rata Capaian Wilayah Setara
	2017	2018	2019	2020	2021	
Bulukumba	10.217	10.331	10.480	10.513	10.632	10.435
Enrekang	10.359	10.683	10.800	10.844	10.973	10.732
Tana Toraja	6.801	7.087	7.253	7.217	7.434	7.158

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022 (diolah)

Adapun rata-rata capaian pengeluaran per kapita disesuaikan hingga pada tahun 2021 untuk kabupaten setara dengan Kabupaten Bulukumba, nilai tertinggi dicapai oleh Kabupaten Enrekang angka Rp 10,732 Juta dan terendah adalah Kabupaten Tana Toraja sebesar Rp 7,158 Juta. Adapun perubahan pengeluaran per kapita disesuaikan tertinggi terjadi di Kabupaten Tana Toraja sebesar 3,01 poin. dan perubahan pengeluaran per kapita disesuaikan terendah terjadi di Kabupaten Bulukumba dengan nilai 1,13 poin. Secara lengkap perbandingan Pertumbuhan Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah/Orang/Tahun) Kabupaten Bulukumba dengan Rata-Rata Capaian Wilayah Setara, tahun 2021 dapat dilihat pada grafik berikut.

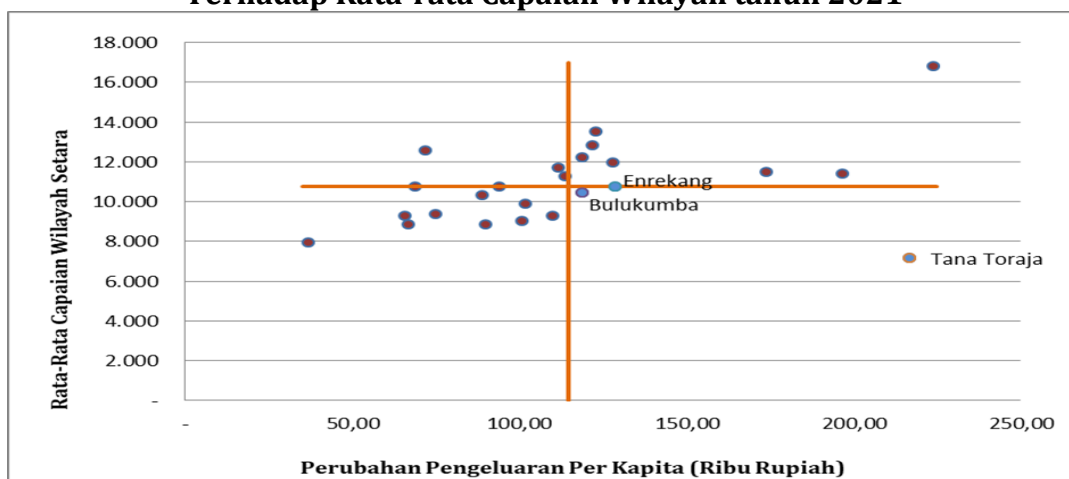
Grafik II-19
Perbandingan Pertumbuhan Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)
Kabupaten Bulukumba dengan Rata-Rata Capaian Wilayah Setara, Tahun 2021



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022 (diolah)

Wilayah setara dapat ditentukan dengan menggunakan analisis kuadran, dimana dilakukan pengelompokan Kabupaten/Kota yang memiliki kemiripan karakteristik dan kondisi capaian pengeluaran per kapita disesuaikan baik itu berdasarkan nilai perubahan, pertumbuhan dan rata-rata capaiannya. Selengkapnya pada gambar kuadran berikut.

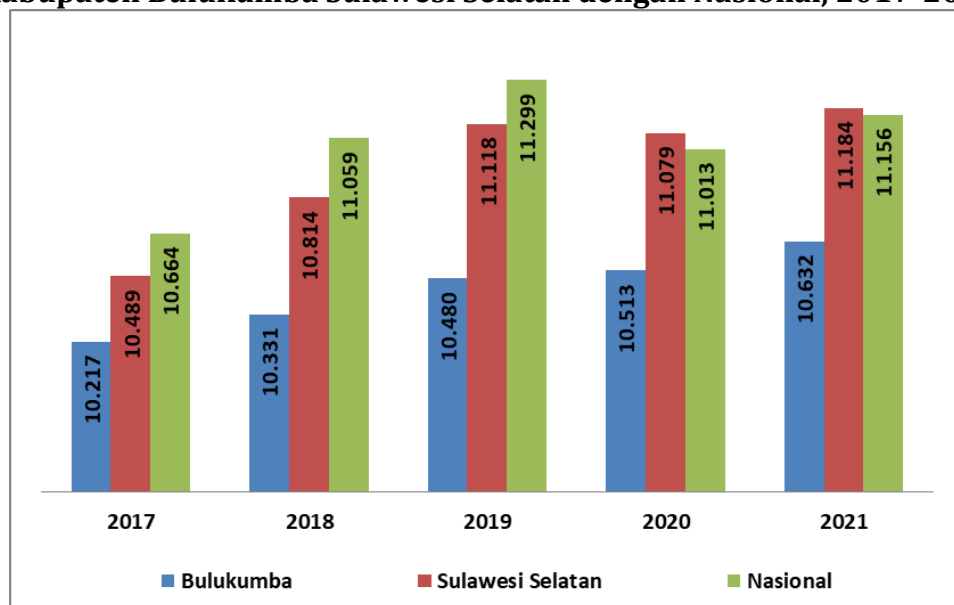
Kuadran II-10
Analisis Kuadran Perubahan Pengeluaran Perkapita Kabupaten Bulukumba
Terhadap Rata-rata Capaian Wilayah tahun 2021



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022 (diolah)

Jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, capaian pengeluaran per kapita disesuaikan Kabupaten Bulukumba tahun 2017-2021 masih lebih rendah dari capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Pada tahun 2021 capaian pengeluaran per kapita disesuaikan Kabupaten Bulukumba sebesar Rp. 10,632 juta, Provinsi Sulawesi selatan sebesar Rp. 11,184 juta, dan Nasional Rp, 11,156 juta. Perbandingan Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah/Orang/Tahun) Sulawesi Selatan dengan Nasional secara lengkap dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik II-20
Perbandingan Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)
Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan dengan Nasional, 2017-2021



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022 (diolah)

10. PDRB Perkapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapitanya, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bulukumba sejak tahun 2017 hingga 2021 selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2017, PDRB per kapita tercatat sebesar 29,03 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga pada tahun 2021 yang tercatat sebesar 36,06 juta rupiah. Jika capaian PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bulukumba tahun 2021 dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 59,66 juta rupiah dan Nasional capaian Nasional sebesar 62,20 juta rupiah, maka nilai PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bulukumba masih jauh tertinggal. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-27
Perbandingan PDRB Perkapita (ADHB dan ADHK) Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
PDRB/PDB Perkapita (ADHB)						
Bulukumba	Juta Rp	29,03	31,55	33,96	33,34	36,06
Sulawesi Selatan	Juta Rp	47,82	52,64	57,18	55,68	59,66
Nasional	Juta Rp	51,89	55,99	59,07	56,90	62,20

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
PDRB/PDB Perkapita (ADHK)						
Bulukumba	Juta Rp	18,59	19,41	20,46	19,69	20,48
Sulawesi Selatan	Juta Rp	33,23	35,25	37,35	36,76	37,57
Nasional	Juta Rp	37,85	39,34	41,02	39,77	40,77

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022

PDRB Perkapita merupakan indikator yang menggambarkan kesejahteraan rakyat. Jika melihat PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) khususnya wilayah yang setara dengan Kabupaten Bulukumba, daerah setara yang memiliki PDRB Perkapita tertinggi adalah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan nilai PDRB ADHB sebesar 49,54 juta rupiah, dan daerah yang memiliki nilai PDRB ADHB terendah adalah Kabupaten Jeneponto yaitu sebesar 27,26 Juta Rupiah. Selengkapnya pada tabel berikut..

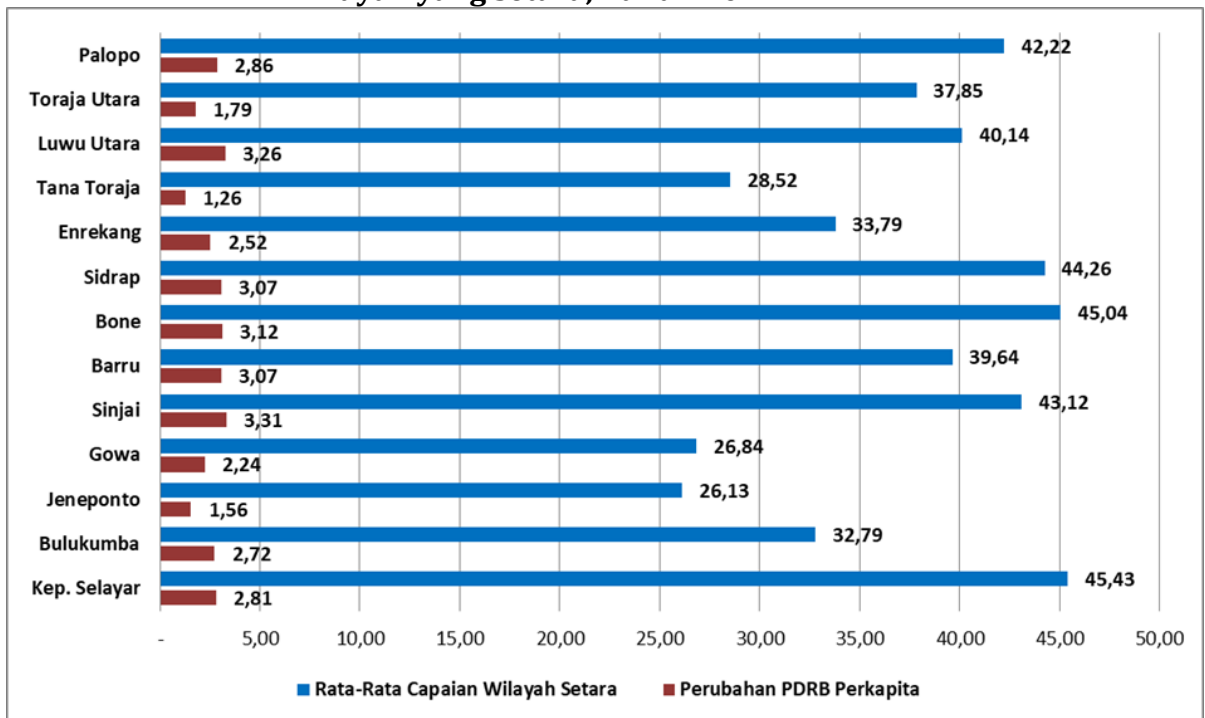
Tabel II-28
Perbandingan pertumbuhan PDRB per kapita ADHB dengan rata-rata capaian wilayah yang setara, Tahun 2017-2021

Kabupaten/ Kota	PDRB per Kapita (Ribu Rupiah)					Rata-Rata Capaian Wilayah Setara
	2017	2018	2019	2020	2021	
Kep. Selayar	39,27	43,62	47,99	46,73	49,54	45,43
Bulukumba	29,03	31,55	33,96	33,34	36,06	32,79
Jeneponto	23,94	26,03	27,74	25,70	27,26	26,13
Gowa	22,98	25,07	27,50	28,20	30,44	26,84
Sinjai	37,89	41,88	45,05	43,74	47,05	43,12
Barru	34,51	38,09	41,80	40,36	43,43	39,64
Bone	39,04	43,87	47,81	45,68	48,80	45,04
Sidrap	40,24	43,25	46,49	44,12	47,19	44,26
Enrekang	31,28	32,81	35,28	33,54	36,06	33,79
Tana Toraja	26,15	29,31	31,66	27,10	28,36	28,52
Luwu Utara	35,02	38,65	41,65	41,07	44,33	40,14
Toraja Utara	33,80	37,84	41,08	37,37	39,16	37,85
Palopo	36,83	40,32	43,79	43,66	46,52	42,22

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022 (diolah)

Adapun perkembangan PDRB Per kapita ADHB pada daerah setara dengan Kabupaten Bulukumba pada tahun 2021, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Kabupaten Sinjai sebesar 3,31 persen, dan pertumbuhan terendah dialami oleh Kabupaten Tana Toraja sebesar 1,26 persen. Adapun pertumbuhan PDRB Per kapita ADHB Kabupaten Bulukumba berada pada angka 2,72 persen. Untuk nilai rata-rata PDRB Perkapita pada daerah setara, Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi daerah yang tertinggi nilai capaiannya, yaitu sebesar 45,43 juta rupiah, dan Kabupaten Jeneponti menjadi daerah yang memiliki capaian terendah dengan nilai rata-rata sebesar 26,13 juta rupiah. Adapun nilai rata-rata PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Bulukumba sebesar 32,79 juta rupiah. Secara lengkap dapat dilihat pada grafik berikut.

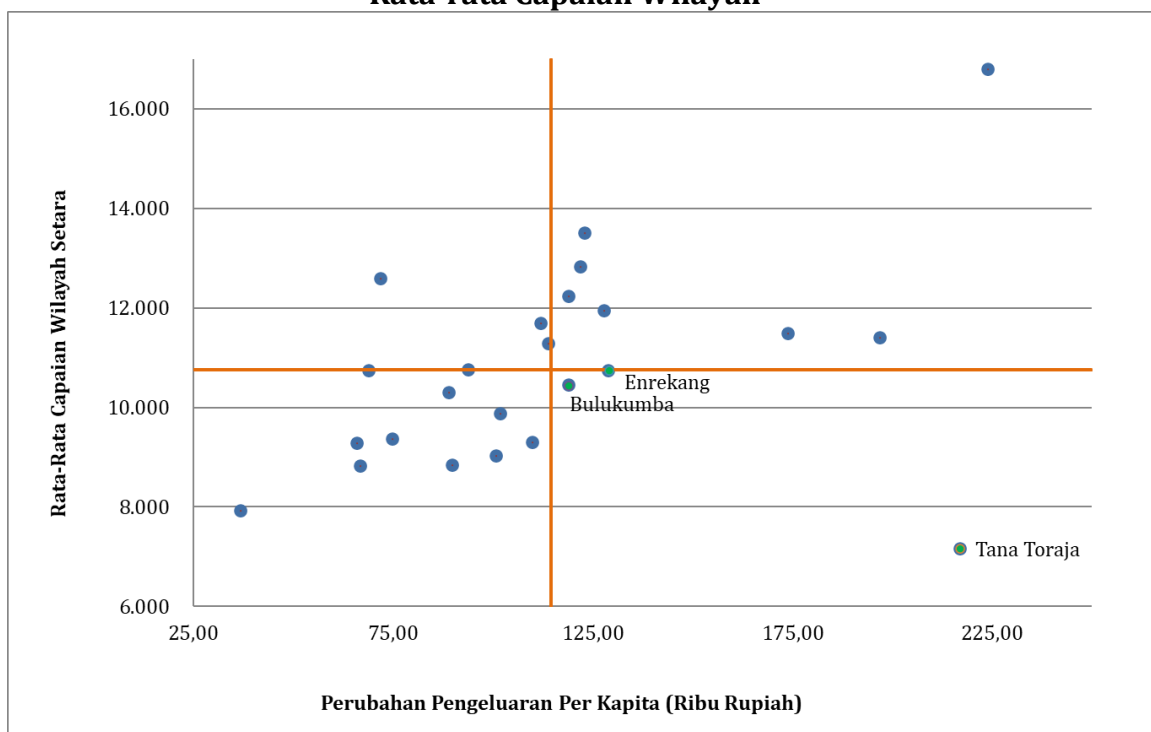
Grafik II-21
Perbandingan pertumbuhan PDRB per kapita ADHB dengan rata-rata capaian wilayah yang setara, Tahun 2021



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022 (diolah)

Gambaran perkembangan PDRB Per kapita ADHB Kabupaten Bulukumba dan daerah setara pada tahun 2021 secara kuadran dapat dilihat pada gambar berikut.

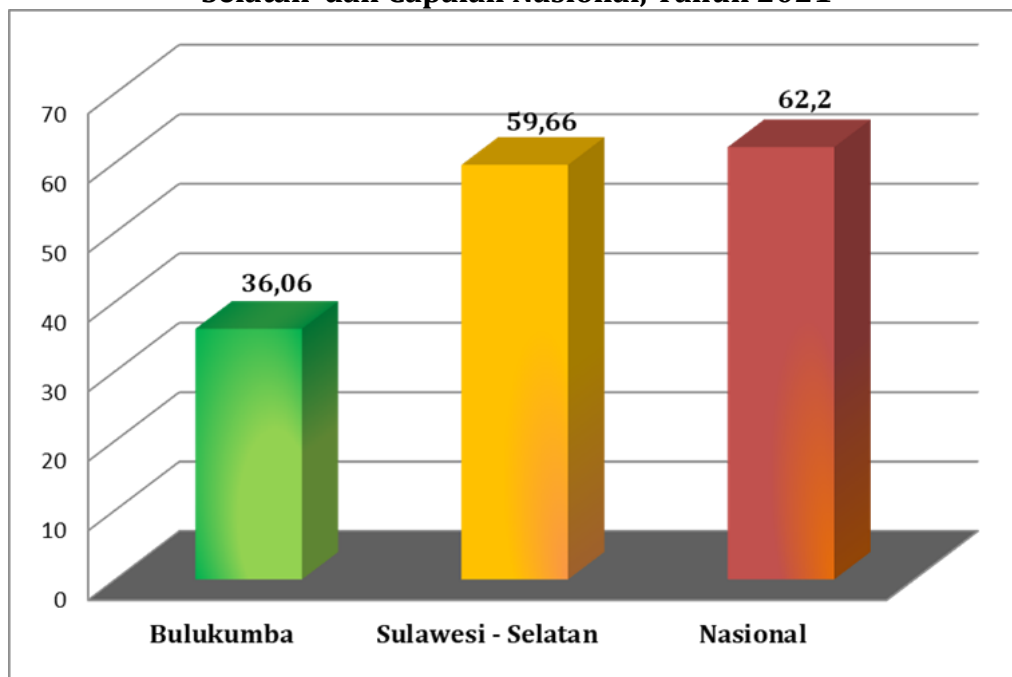
Kuadran II-11
Analisi Kuadran Pertumbuhan PDRB Perkapita (ADHB) Terhadap Rata-rata Capaian Wilayah



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022 (diolah)

Jika dibandingkan capaian PDB Nasional sebesar 62,2 iuta rupiah dan PDRB Perkapita Provinsi Sulawesi Selatan ADHB tahun 2021 59,66 juta rupiah, capaian PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Bulukumba masih jauh lebih rendah yaitu hanya sebesar 36,06 juta rupiah. Namun, dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2017-2021), terjadi tren kenaikan setiap tahunnya. Secara lebih lengkap dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik II-22
Perbandingan PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan Capaian Nasional, Tahun 2021



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022 (diolah)

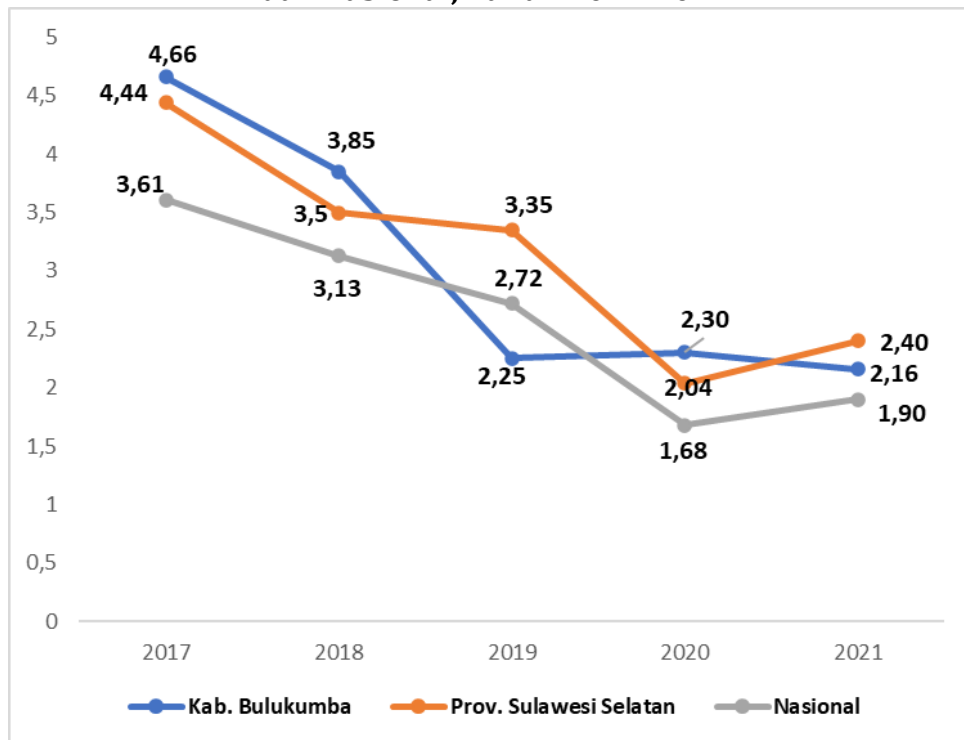
11. Laju Inflasi

Inflasi merupakan gejala ekonomi yang tidak mungkin dihilangkan secara tuntas, namun perlu dikontrol untuk menjaga stabilitas ekonomi. Pengendalian inflasi penting dilakukan agar berdampak positif terhadap perekonomian, dan sebaliknya juga perlu dikendalikan untuk menghindari dampak negatif terhadap perekonomian. Pengendalian tingkat inflasi harus diupayakan tidak menyebabkan kemerosotan perekonomian. Pengendalian inflasi diperlukan karena, inflasi kerap terjadi secara tiba-tiba, sehingga berdampak negatif terhadap perekonomian jika tidak mampu mengatasinya dengan cepat.

Tren inflasi di Kabupaten Bulukumba menunjukkan peningkatan yang signifikan pada tahun 2017 yang diiringi penurunan tingkat inflasi hingga 2019 pada angka 2,25 persen, namun kembali mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 2,30 persen dan ditahun 2021 mengalami penurunan sebesar 2,16 persen. Dari data tersebut menunjukkan penurunan tingkat inflasi. Hal ini sejalan dengan fenomena penurunan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di wilayah kabupaten, sehingga jumlah uang beredar di masyarakat juga semakin berkurang. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 4,66 persen dan termasuk kategori inflasi ringan. Pengendalian inflasi di daerah menjadi penting untuk menjaga stabilitas perekonomian daerah dan juga untuk menjaga daya beli masyarakat, sehingga tidak jatuh pada kemiskinan.

Jika pada tahun 2021 nilai Inflasi Kabupaten Bulukumba diperbandingkan dengan nilai inflasi Nasional, Tingkat Inflasi di Kabupaten Bulukumba masih lebih tinggi dengan nilai 2,16 persen, dibandingkan tingkat inflasi Nasional sebesar 1,90 persen, akan tetapi nilai inflasi Provinsi Sulawesi Selatan lebih tinggi yang mencapai sebesar 2,40 persen.

Grafik II-23
Perkembangan Laju Inflasi Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2017-2021



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022

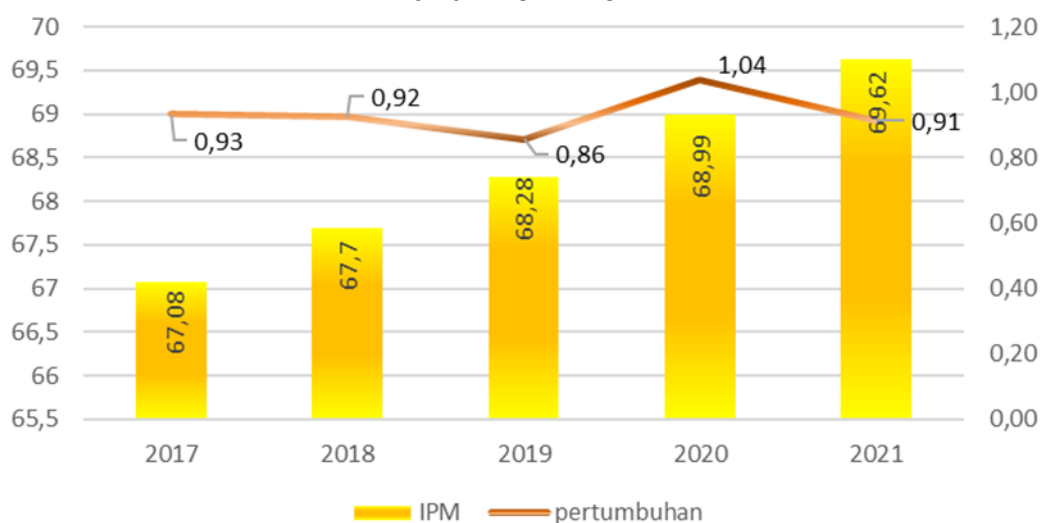
2.2.2 Kesejahteraan Sosial

Analisis terhadap peningkatan kesejahteraan sosial dapat dilihat dari perkembangan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan keberhasilan pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan.

1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Analisis kesejahteraan sosial dapat dilihat dari perkembangan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai akumulasi dari keberhasilan pembangunan pada sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup yang diakui oleh semua negara di seluruh dunia. Nilai IPM dapat diperbandingkan secara nasional dan internasional sebagai ukuran perkembangan pembangunan manusia seutuhnya. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Pengukuran IPM akan menggambarkan perkembangan kualitas hidup manusia dari waktu ke waktu seiring dengan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan. Hakekat pembangunan pada dasarnya meningkatkan kesejahteraan penduduk yang dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar manusia. pendapatan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan non pangan, pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan pembangunan perlu keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan kebulatan yang utuh dalam seluruh kegiatan pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan manusia seutuhnya. Selengkapnya pada gambar berikut.

Grafik II-24
Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kabupaten Bulukumba
Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Kabupaten Bulukumba, 2021

Sejalan dengan komponen-komponen pembentuknya. IPM Kabupaten Bulukumba mengalami pertumbuhan yang positif setiap tahunnya. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir. IPM Kabupaten Bulukumba terus meningkat. Pada tahun 2017 IPM Kabupaten Bulukumba sebesar 67,08 persen. Angka tersebut terus meningkat setiap tahunnya. pada tahun 2021. capaian IPM sebesar 69,62 persen. Berdasarkan kriteria dari UNDP. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-29
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Beberapa Wilayah di Sulawesi Selatan,
Tahun 2019 dan 2020

Kabupaten/Kota	2020		2021	
	IPM	Peringkat	IPM	Peringkat
Selayar	67,38	21	67,76	22
Bulukumba	68,99	15	69,62	16
Bantaeng	68,73	17	68,99	18
Jeneponto	64,26	24	64,56	24
Takalar	67,31	22	67,72	21
Gowa	70,14	10	70,29	10
Sinjai	67,6	20	67,75	20
Makassar	82,25	1	82,66	1
Sulawesi Selatan	71,93		72,24	
Nasional	71,94		72,29	

Sumber: BPS Kabupaten Bulukumba, 2021

Berdasarkan tabel di atas, capaian IPM Kabupaten Bulukumba masih lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian IPM Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2021 IPM Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 72,24, sementara pada tahun yang sama, capaian IPM Kabupaten Bulukumba sebesar 69,62. Capaian IPM Kabupaten Bulukumba menempati peringkat ke 16 dari 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun tahun 2021. Jika dibandingkan dengan kabupaten yang wilayahnya berbatasan langsung, capaian IPM Kabupaten Bulukumba lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten tetangga lainnya.

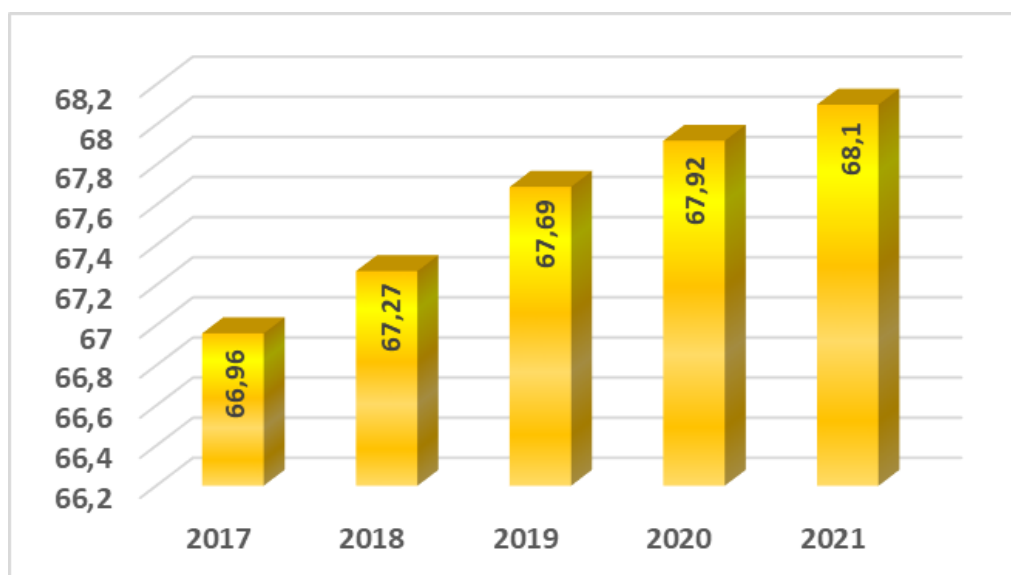
a) Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) atau life expectancy adalah rata-rata estimasi lama tahun yang dapat dilalui oleh seseorang selama hidup. Dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). perhitungan angka harapan hidup dilakukan melalui pendekatan tidak langsung (indirect estimation) yaitu dengan menggunakan pendekatan data Angka Lahir Hidup (ALH) dan Angka Masih Hidup (AMH). Angka harapan hidup menggambarkan kondisi kesehatan manusia. Semakin lama harapan angka harapan hidup

penduduk maka akan semakin baik kondisi pembangunan kesehatan manusia pada daerah tersebut. Beberapa faktor yang menyebabkan membaiknya angka harapan hidup antara lain sistem pelayanan kesehatan yang baik respon yang cepat dalam keadaan darurat, ketersediaan tenaga kesehatan dan menjangkau tenaga kesehatan.

Selama lima tahun terakhir, AHH Kabupaten Bulukumba terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, AHH Kabupaten Bulukumba sebesar 66,96 tahun. Angka tersebut terus meningkat hingga di tahun 2021 AHH sebesar 68,1 tahun. Artinya rata-rata penduduk di Kabupaten Bulukumba mampu bertahan hingga umur 67 tahun. Adanya peningkatan AHH mengindikasikan adanya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Selengkapnya pada gambar berikut.

Grafik II-25
Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Bulukumba, Tahun 2017-2021



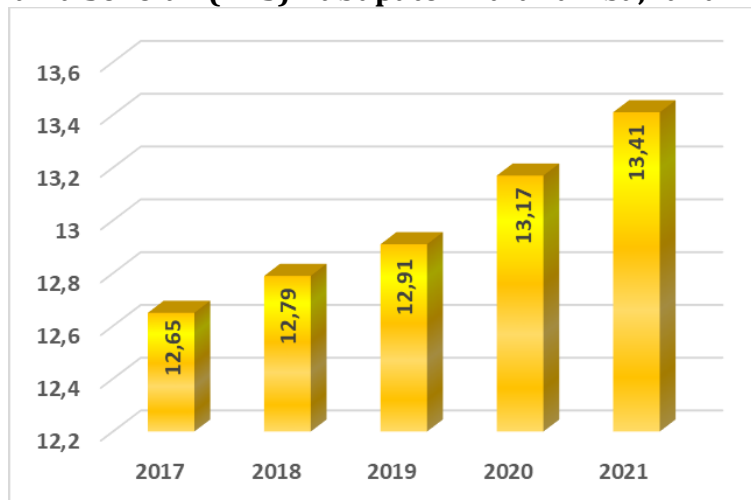
Sumber: Keadaan Ketenaga Kerjaan Kab. Bulukumba Agustus 2021 (BPS Kab. Bulukumba. 2022)

b) Angka Harapan Lama Sekolah

Pengukuran angka harapan lama sekolah (expected years of schooling) dalam perhitungan IPM merupakan gambaran keberhasilan pembangunan manusia pada dimensi pendidikan, termasuk indikator rata-rata lama sekolah. Angka harapan lama sekolah digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan pada berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Angka Harapan Lama Sekolah merupakan angka yang menunjukkan tahun lama sekolah penduduk yang diharapkan akan dijalani oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Dalam perhitungan angka harapan lama sekolah, peluang anak pada umur tertentu akan tetap bersekolah diasumsikan sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah pada umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dalam perhitungan IPM dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, HLS juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Capaian HLS pada tahun 2017 ialah sebesar 12,65 tahun. Capaian HLS terus meningkat setiap tahunnya pada periode 2017-2021, pada tahun 2021 capaian HLS sebesar 13,41 tahun. Artinya, seorang anak berumur 7 tahun keatas diharapkan dapat mengenyam pendidikan formal selama 13,41 tahun, atau minimal hingga semester 2 pada perguruan tinggi. Selengkapnya pada gambar berikut.

Grafik II-26
Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Bulukumba, Tahun 2017-2021



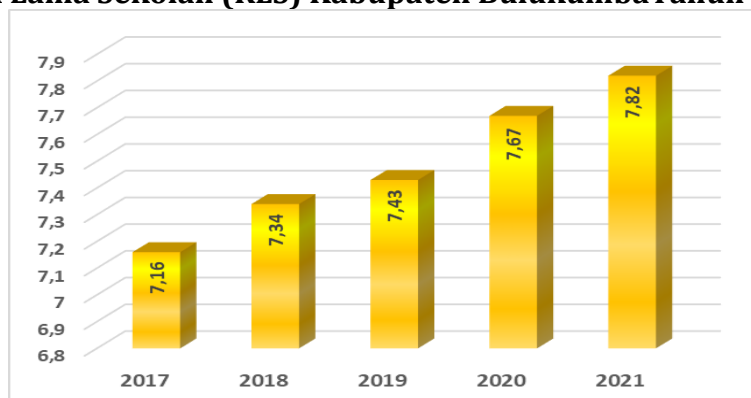
Sumber: Keadaan Ketenaga Kerjaan Kab. Bulukumba Agustus 2021 (BPS Kab. Bulukumba. 2021)

c) Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (mean years of schooling) merupakan gambaran kualitas pembangunan pendidikan dalam pembangunan kualitas hidup manusia. Rata-rata lama sekolah merupakan lama tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Dalam kondisi normal, rata-rata lama sekolah diasumsikan tidak akan menurun. Batas maksimum rata-rata lama sekolah dalam perhitungan IPM adalah 15 tahun.

Grafik II-29 menyajikan perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Bulukumba selama lima tahun terakhir. Selama kurun waktu tersebut, RLS juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 RLS Kabupaten Bulukumba sebesar 7,16 tahun. Angka tersebut terus meningkat hingga pada tahun 2021 sebesar 7,82 tahun. Artinya, penduduk Kabupaten Bulukumba yang berusia 25 tahun ke atas, secara rata-rata hanya menyelesaikan pendidikan sampai jenjang SMP/ sederajat. atau lebih tepatnya kelas 7 SMP/ sederajat. Selengkapnya pada gambar berikut.

Grafik II-27
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021



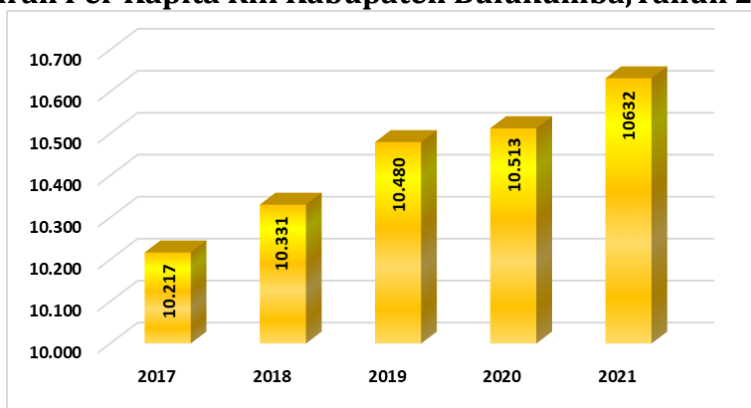
Sumber: Keadaan Ketenaga Kerjaan Kab. Bulukumba Agustus 2021 (BPS Kab. Bulukumba. 2021)

d) Pengeluaran Per Kapita Riil

Pengeluaran perkapita riil dalam perhitungan IPM merupakan rata-rata pengeluaran perkapita konstan atau riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli (purchasing power parity). Pengeluaran per kapita riil merupakan besaran biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi makan dan non makanan semua anggota rumah tangga selama sebulan. Pengeluaran per kapita riil akan menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk dari dimensi ekonomi dalam perhitungan IPM. Standar hidup layak menggambarkan kualitas kehidupan atau tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak dari semakin membaiknya kondisi ekonomi maupun tingkat pemerataannya.

Secara rata-rata pengeluaran tiap penduduk di Kabupaten Bulukumba mencapai 10.43 juta rupiah per tahun. Angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Ratarata pengeluaran per kapita yang disesuaikan pada tahun 2020 masih sebesar 10. juta per tahun. Dari angka pengeluaran perkapita yang disesuaikan tersebut, diperoleh indeks pengeluaran. Indeks pengeluaran juga mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 indeks pengeluaran Kabupaten Bulukumba sebesar 10.513 juta per tahun. Selengkapnya pada gambar berikut.

Grafik II-28
Pengeluaran Per Kapita Riil Kabupaten Bulukumba, Tahun 2017-2021



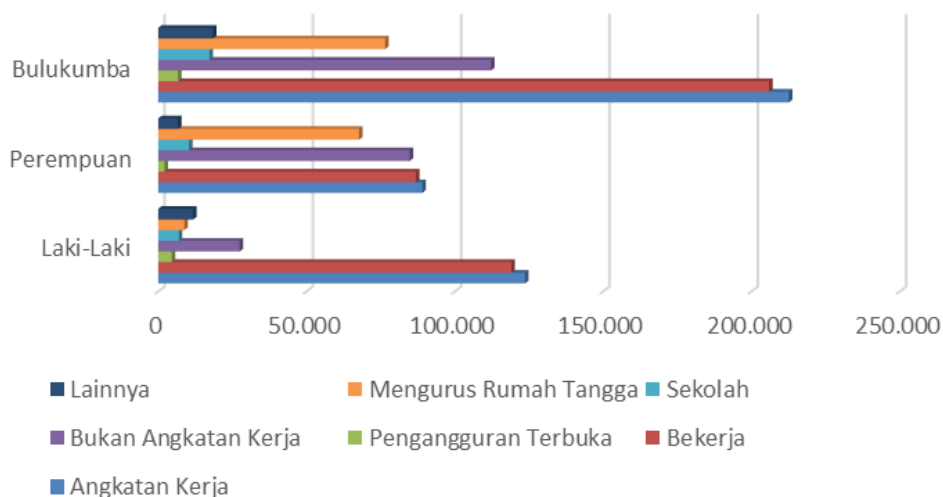
Sumber: Keadaan Ketenaga Kerjaan Kab. Bulukumba Agustus 2021 (BPS Kab. Bulukumba. 2021)

2) Rasio Penduduk Bekerja

a) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari dengan merujuk pada suatu waktu dan periode waktu tertentu. TPAK digunakan untuk mengukur besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah. Semakin besar TPAK semakin baik karena menunjukkan lebih banyak penduduk yang masuk dalam angkatan kerja. Pada tahun 2021 tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Bulukumba sebesar 65,46 persen, artinya dari 100 penduduk yang berusia 15 tahun ke atas terdapat 65 orang diantaranya termasuk dalam angkatan kerja atau sebanyak 65 orang aktif secara ekonomi. Apabila TPAK dibandingkan menurut jenis kelamin, TPAK Perempuan jauh di bawah TPAK laki-laki, yaitu 51,23 persen untuk TPAK Perempuan dan 83,82 persen untuk angkatan kerja laki-laki. Selengkapnya pada gambar berikut.

Grafik II-29
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bulukumba (persen), tahun 2020



Sumber: BPS Kabupaten Bulukumba, 2022

Besar kecilnya TPAK dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain struktur umur, tingkat pendidikan, status perkawinan, dan beberapa faktor lain. Struktur umur mempengaruhi TPAK pada kelompok umur tertentu, status perkawinan mempengaruhi TPAK Perempuan, karena wanita dihadapkan pada pilihan antara bekerja atau mengurus rumah tangga setelah terikat perkawinan. Faktor lain yang mempengaruhi TPAK adalah pendidikan.

b) Pengangguran

Salah satu isu penting dalam bidang ketenagakerjaan adalah masalah pengangguran. Isu ini menjadi fokus perhatian selain kondisi perkembangan angkatan kerja (economically active population) dan struktur ketenagakerjaan. Ditinjau dari sisi ekonomi, pengangguran merupakan hasil dari ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia. Jumlah lapangan kerja yang tersedia memiliki keterbatasan secara jumlah dan kualifikasi bagi pencari kerja.

Pengangguran merupakan akibat dari peningkatan jumlah angkatan kerja yang tidak sehingga banyak angkatan kerja yang tidak terserap dalam lapangan kerja. Faktor yang menyebabkan excess supply tenaga kerja ini antara lain tingkat investasi yang rendah sehingga perusahaan dalam negeri sulit mengembangkan dan meningkatkan usahanya. angkatan kerja yang sedang mencari kerja tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta dunia usaha, tidak ada kecocokan upah dan tidak memiliki kemauan wirausaha.

Pengangguran adalah mereka yang tergolong dalam usia kerja yang pada saat pencacahan tidak bekerja, tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan, tidak bekerja dan sedang mempersiapkan usaha, tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (discouraged workers), serta tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja (future starts).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengukur penduduk usia kerja yang tidak bisa terserap dalam pasar kerja. Naik turunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dapat dijadikan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun dan juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bulukumba berfluktuasi selama beberapa tahun terakhir. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2021 sebesar 3,14 persen dengan total jumlah pengangguran sebanyak 6.674 orang. Pada tahun 2020, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bulukumba sebesar 3,42 persen, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021. Jika diperbandingkan dengan capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan, capaian TPT Kabupaten Bulukumba masih lebih baik pada periode 2017-2021. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) secara total di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2021 adalah 3,14 persen. Dapat dikatakan bahwa sekitar 3-4 dari 100 angkatan kerja yang ada di Bulukumba menganggur.

Tabel II-30

Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bulukumba dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional (Persen), Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Bulukumba	%	3,37	3,42	3,06	3,42	3,14
Sulawesi Selatan	%	5,61	4,94	4,62	6,31	5,72
Nasional	%	5,50	5,30	5,23	7,07	5,67

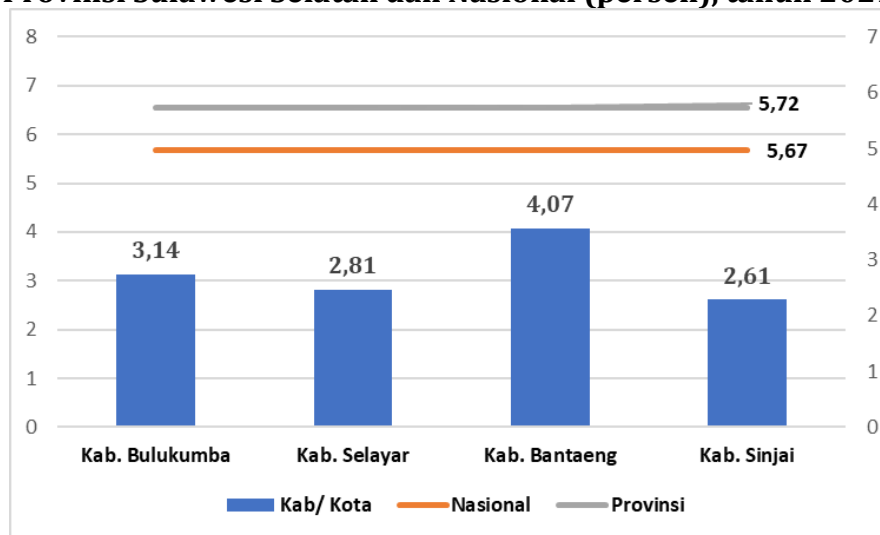
Sumber: BPS Kabupaten Bulukumba, tahun 2022

Pada Tahun 2021, jika diperbandingkan dengan beberapa kabupaten di kawasan selatan Provinsi Sulawesi Selatan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten

Bulukumba masih berada di atas TPT Kabupaten Selayar dengan nilai TPT 2,81 persen dan Kabupaten Sinjai sebesar 2,61 persen, namun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan TPT Kabupaten Bantaeng sebesar 4,07 persen. Seperti pada grafik berikut.

Grafik II-30

Perbandingan TPT Kabupaten Bulukumba dengan beberapa Kabupaten Tetangga, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional (persen), tahun 2021.



Sumber: BPS Prov. Sul-sel, tahun 2022

c) Persentase Balita Gizi Buruk

Gizi buruk adalah suatu kondisi yang ditandai dengan berat badan dan tinggi badan balita jauh di bawah rata-rata. Persentase Gizi Buruk dihitung berdasarkan jumlah balita gizi buruk tahun tertentu dibagi dengan jumlah keseluruhan balita pada tahun tertentu dikalikan seratus. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Bulukumba menunjukkan tren yang berfluktuasi dalam kurun waktu tahun 2017-2021. Pada tahun 2021 jumlah Balita Gizi Buruk sebanyak 7 kasus atau 0,03 persen dari total Balita pada tahun 2021. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-31

Angka Balita Gizi Buruk Tahun 2017 - 2021

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Balita Gizi Buruk (Jiwa)	8	8	9	4	7
Jumlah Balita Jiwa	37.638	42.409	29.886	25.192	25.371
Balita Gizi Buruk (%)	0,021	0,019	0,03	0,015	0,03

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bulukumba, tahun 2021.

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Bulukumba cenderung meningkat dari tahun 2017 sampai dengan 2018 namun pada tahun 2019 terjadi penurunan yang drastis menjadi 0,03 persen begitupun pada tahun 2021 sebesar 0,03 persen.

2.2.3 Seni Budaya dan Olahraga

Perkembangan seni budaya dan olahraga di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat dari hasil-hasil pembangunan yang dapat meningkatkan jumlah kelompok seni dan budaya dan jumlah kelompok olahraga di Kabupaten Bulukumba. Hasil-hasil pembangunan seni dan budaya selama periode 2017-2021, menunjukkan bahwa jumlah kelompok seni dan budaya di Kabupaten Bulukumba mengalami penurunan dari segi volume pelaksanaan kegiatan, hal ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba yang menyatukan penyelenggara

aan seni dan budaya kedalam kegiatan festival phinisi pada tahun 2018, dan kegiatan tersebut telah menjadi agenda tahunan.

Untuk pembangunan di bidang keolahragaan, cakupan pembinaan olahraga secara umum mengalami penurunan yang drastis. Pada tahun 2017 pembinaan yang dilakukan

sebesar 25 persen dan meningkat pada tahun 2018 menjadi 50 persen cakupan pembinaan olahraga. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan pembinaan menjadi 8,33 persen. Keterbatasan sarana dan prasarana olahraga menjadi faktor utama belum optimalnya pembinaan kelompok olahraga dalam masyarakat, faktor lain adalah keterbatasan anggaran dalam pembinaan dan pelaksanaan event olah raga. kn tetapi pada tahun 2021 cakupan pembinaan oahraga meningkat sebesar 75,00 persen. Adapun data perkembangan indikator seni budaya dan olahraga di Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021 selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-32
Perkembangan Indikator Sektor Seni Budaya dan Olahraga
Kabupaten Bulukumba 2017- 2021

Tahun	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	37	3	5	1	1
Cakupan pembinaan olahraga	%	25	50	25	8,33	75,00

Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda dan OlahRaga Kabupaten Bulukumba tahun 2022

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan. baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aspek pelayanan umum terdiri dari fokus urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan serta fungsi penunjang urusan.

2.1.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar daerah Kabupaten Bulukumba. yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial.

A. Urusan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan menjadi prioritas dalam pembangunan daerah sehingga pemerintah minimal harus mengalokasikan dana 20% dari APBD untuk pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Keberhasilan pendidikan dapat dinilai dari indikator Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Putus Sekolah, Angka Kelulusan dan Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV.

1. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tahun 2017-2018 megalami penurunan pada angka 108,09 dan tahun 2019 nilai APK SD/MI kembali naik menjadi 113,1 persen, dan pada tahun 2020 sampai 2021 mengalami penurunan menjadi 106,38. ini diakibatkan oleh masih besarnya partisipasi siswa usia 13 tahun ke-atas yang mengikuti jenjang pendidikan SD/MI.

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021 menunjukkan tren yang berfluktuasi, tahun 2017 APK SMP/MTs mencapai 84,19 persen, namun mengalami penurunan tahun 2018 menjadi 77,99 persen. Tahun 2018 terjadi peningkatan APK SMP/MTs menjadi 87,9 persen, tahun 2019 APK SMP/MTs kembali meningkat menjadi 87,75 persen, dan pada tahun 2020 capaian APK SMP/MTs meningkat menjadi 90,74 persen. Penyebab APK SMP/MTs yang tidak mencapai 100 persen pada tahun

2017-2020 yaitu masih terdapat lulusan SD/MI yang tidak melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan SMP/MTs, Angka Putus Sekolah, akan tetapi pada tahun 2021 kembali menurun sebesar 81,88 Persen .sebaran sekolah SMP/MTs yang tidak merata sehingga sebagian anak kesulitan untuk menjangkau fasilitas pendidikan. Selain itu, permasalahan ekonomi keluarga juga menjadi salah satu faktor penyebab anak usia sekolah tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP/MTs. Kondisi geografis Kabupaten Bulukumba juga menjadi kendala dalam pemerataan pendidikan. Penyebaran sarana pendidikan menjadi penting dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah pada semua jenjang pendidikan. Semakin tinggi jenjang pendidikan, maka semakin kurang merata penyebarannya di Kabupaten Bulukumba, sehingga anak usia sekolah yang ada di daerah terpencil dihadapkan pada keterbatasan akses pendidikan lanjutan. Untuk mengetahui perkembangan APK SD/MI dan APK SMP/MTs di Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021, selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-33
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Bulukumba,
Tahun 2017 - 2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	APK SD	%	108,61	108,09	113,1	112,49	106,38
2	APK SMP	%	77,99	87,9	87,75	90,74	81,88

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulukumba Tahun 2022

2. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka partisipasi murni (APM) merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat partisipasi murni penduduk usia sekolah. Hal ini juga dapat menunjukkan tingkat keberhasilan dari program wajib belajar yang dicanangkan oleh pemerintah, sebab pengukuran APM menggunakan perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk pada usia sekolah yang sesuai dengan masing-masing jenjang pendidikan.

Proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Perhitungan partisipasi murni sejak tahun 2007, tidak hanya menghitung siswa pada sekolah formal, tetapi juga termasuk siswa yang menempuh pendidikan pada pendidikan non formal (Paket A. Paket B. dan Paket C).

Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan SD/MI di Kabupaten Bulukumba mengalami tren yang berfluktuasi selama periode 2017-2021. APM SD/MI pada tahun 2021 sebesar 98,06 persen, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan nilai APM pada tahun tahun 2020 yaitu sebesar 98,32 persen.

Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan SMP/MTs di Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2020 menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2017 APM SMP/MTs Kabupaten Bulukumba sebesar 81,85 persen dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 83,37 persen, akan tetapi mengalami penurunan ditahun 2021 sebesar 74,01 persen. Untuk mengetahui perkembangan capaian APM SD/MI dan APM SMP/MTS dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-34
Perkembangan APM Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 - 2021

No.	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	APM SD/MI	%	99,16	98,75	98,48	98,32	98,06
2.	APM SMP/MTs	%	81,85	82,21	82,36	83,37	74,01

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulukumba Tahun 2022

Data diatas menunjukkan bahwa secara umum, capaian APM pada semua jenjang pendidikan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021 belum terlalu optimal, mengingat

tren capaian indikator yang berfluktuasi. Salah satu faktor utama yang menyebabkan adalah aksesibilitas sekolah yang belum optimal. Selain itu beberapa faktor yang menghambat pencapaian target antara lain sarana dan prasarana pendidikan dan penguatan penerapan regulasi wajib belajar yang belum optimal.

3. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi anak sekolah pada usia jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut untuk 1000 penduduk. APS dihitung untuk menunjukkan tingkat partisipasi pendidikan menurut kelompok umur tertentu. Capaian APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021, capaian APS usia 7-12 tahun menunjukkan tren berfluktuasi, namun secara umum capaiannya sudah berada di atas 98 persen. Tahun 2017 capaian APS 7-12 tahun sebesar 99,16 persen dan meningkat menjadi 106,38 persen pada tahun 2020.

Untuk capaian APS usia 13 - 15 tahun periode tahun 2017-2021 menunjukkan tren yang berfluktuasi dengan rata-rata capaian 90 persen pada periode tersebut. Tahun 2017 capaian APS 13 - 15 tahun sebesar 91,98 persen, tahun 2018 Meningkat menjadi 92,36 persen, tahun 2019 kembali mengalami peningkatan menjadi 93,14 persen, namun mengalami penurunan pada tahun 2020 hingga 2021 menjadi 91,91 dan 81,88 persen.

Sementara itu, capaian APS usia 16 - 18 tahun periode tahun 2017-2021 juga menunjukkan tren yang berfluktuasi, dengan rata-rata capaian sebesar 73,53 persen pada periode tersebut. Tahun 2016 capaian APS 16 - 18 sebesar 70,86 persen, tahun 2017 meningkat menjadi 74,18 persen, tahun 2018 kembali mengalami peningkatan menjadi 74,43 persen, tahun 2019 turun menjadi 74,04 persen, dan tahun 2020 kembali mengalami kenaikan menjadi 74,37 persen. capaian APS 16-18 tahun pada tahun 2020 yang nilainya 74,04 persen, ini berarti dari 100 persen penduduk usia 16-18 tahun, terdapat 79,34 persen yang sudah mengenyam bangku pendidikan.

Pembangunan pendidikan pada dasarnya adalah membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan yang berkualitas. Dengan demikian, pemerintah daerah diperlukan untuk secara berkelanjutan melakukan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.

Untuk mengetahui perkembangan capaian APS usia 7 -12 Tahun, APS usia 13 - 15 Tahun, dan APS usia 16 - 18 Tahun di Kabupaten Bulukumba tahun 2017-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II - 1
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	APS 7 -12 Tahun	%	99,16	98,93	98,77	98,80	106,38
2.	APS 13 - 15 Tahun	%	91,98	92,36	93,14	91,91	81,88
3.	APS 16 - 18 Tahun	%	74,18	74,43	74,04	74,37	99,68

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulukumba Tahun 2022

4. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah merupakan proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu.

Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun. Angka Putus Sekolah (APS) bertujuan untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan. Selain itu, APS berfungsi untuk melihat keterjangkauan dan pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur.

Pada jenjang pendidikan SD/MI tahun 2021 jumlah Angka Putus Sekolah sebesar 0,8 persen dan untuk jenjang pendidikan SMP/MTS berjumlah 1,2 persen. Capaian Angka Putus

Sekolah (APS) Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021 di semua jenjang pendidikan menunjukkan tren yang berfluktuasi, hal ini menunjukkan belum optimalnya intervensi pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba dalam penanganan Angka Putus Sekolah. Hal ini dikarenakan keterbatasan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kualitas pendidikan masih belum optimal. Untuk mengetahui perkembangan capaian APS SD/MI dan APS SMP/MTs, di Kabupaten Bulukumba tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-35
Perkembangan Angka Putus Sekolah di Kabupaten Bulukumba,
Tahun 2017 - 2021

No.	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	APS SD/MI	%	0,07	0,28	0,5	0,03	0.8
2.	APS SMP/MTs	%	0,10	0,66	0,9	0,11	1,2

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulukumba Tahun 2022

5. Angka Kelulusan

Angka Kelulusan (AL) merupakan perbandingan antara jumlah siswa yang lulus dengan siswa pada jenjang terakhir. Pada tahun 2021, Angka Kelulusan di Kabupaten Bulukumba sudah mencapai 100 persen. Hal ini sudah sesuai dengan target yang ingin dicapai dan juga sesuai dengan standar penilaian minimal Dinas Pendidikan. Perkembangan Angka Kelulusan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II - 2
Perkembangan Angka Kelulusan (AL) Kabupaten Bulukumba, Tahun 2017 - 2021

No.	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	AL SD	%	100	100	100	100	100
2.	AL SMP	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulukumba Tahun 2022

6. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Kualitas guru saat ini dipandang sesuatu hal yang sangat penting karena seorang guru memiliki tanggung jawab yang besar, tidak hanya sebagai pendidik, guru juga turut serta dalam menghasilkan lulusan peserta didik yang berkualitas dan bermutu. Olehnya itu, guru diharuskan memiliki sertifikasi pendidikan minimal S1/D-IV.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba tahun 2017-2020, rata-rata capaian guru dengan kualifikasi lulusan S1/D-IV sebesar 88,91 persen. Pada tahun 2020 jumlah guru dengan status sarjana mengalami penurunan drastis sebesar 92,08 persen hal ini dikarenakan adanya pengalihan kewenangan urusan SMA/MA/SMK dari kabupaten menjadi urusan provinsi, serta adanya guru yang pindah tugas. Untuk tahun 2021 jumlah guru lulusan S1 sebesar 70,59 persen, Adapun perkembangan guru yang memenuhi kualifikasi S1/D- dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-36
Perkembangan Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV
Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 - 2021

No.	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	98,00	85,40	98,48	92,08	70,59

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulukumba Tahun 2022

7. Rasio guru/murid sekolah

Rasio guru dan murid sekolah menggambarkan bagaimana beban kerja guru dalam mengajar, melihat mutu pengajaran di kelas. Semakin tinggi nilai rasio ini maka semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid di kelas.

Untuk rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar tahun 2017-2021 menunjukkan tren yang menurun pada kurun waktu tersebut, tahun 2017 nilai rasionya sebesar 1:28 dan mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 1:15,

Sedangkan untuk rasio Guru/Murid SMA mengalami penurunan di tahun 2017-2021, tahun 2017 nilai rasionya sebesar 1:27 dan mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 1:9, Tren penurunan rasio guru terhadap murid pada jenjang pendidikan dasar maupun menengah pada periode tahun 2017-2021 disebabkan oleh karena pada tahun 2017 jumlah tenaga pendidikan/guru yang dihitung adalah hanya Tenaga Pendidikan/Guru yang berstatus ASN diperbandingkan dengan jumlah siswa, sehingga nilainya berada di atas nilai rasio ideal (1:20), sementara pada tahun 2018-2021 jumlah tenaga pendidikan/guru yang dihitung adalah Jumlah Tenaga Pendidikan/Guru yang berstatus ASN dan Guru Honorer yang diperbandingkan dengan jumlah murid jenjang pendidikan dasar dan menengah, sehingga capaiannya mengalami penurunan jauh lebih rendah kecuali Rasio guru/murid sekolah pendidikan Dasar pada tahun 2021 meningkat dikarenakan adanya penetapan dan pengangkatan ASN pada tahun tersebut.

capaian Rasio Guru-Murid dan Sekolah di Kabupaten Bulukumba tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel II-37
Rasio Guru-Murid dan Sekolah Kabupaten Bulukumba, Tahun 2017 - 2021

No.	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Rasio guru/murid sekolah pendidikan Dasar	Rasio	1 : 28	1 : 14	1 : 14	1 : 13	1 : 15
2.	Rasio guru terhadap murid pendidikan Menengah	Rasio	1 : 27	1 : 12	1 : 12	1 : 9	1 : 9

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulukumba Tahun 2022

8. Melek Huruf Penduduk Usia 15 tahun ke Atas

Salah satu indikator penilaian mendasar dari tingkat pendidikan penduduk di suatu daerah adalah dengan melihat angka melek huruf (AMH). Melek huruf sendiri adalah kemampuan membaca dan menulis, dimana seseorang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Sedangkan seseorang hanya dapat membaca dan menulis saja belum dianggap sebagai melek huruf. Indikator ini dapat dijadikan gambaran peningkatan kualitas sumber daya manusia disuatu daerah.

Pada Tahun 2021, Angka Melek Huruf di Kabupaten Bulukumba sebesar 89,9 persen, nilai tersebut menurun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 yang nilainya sebesar 90,3 persen. Pada tahun 2020 masih terdapat sebesar 9,7 persen Penduduk Usia 15 tahun ke atas yang buta huruf, dan kelompok umur yang paling tinggi jumlah buta hurufnya adalah penduduk yang berusia 50 tahun ke atas. Angka Melek Huruf Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021, selengkapnya dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-38
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Angka Melek Huruf (AMH)	%	91,8	92,5	92,9	90,3	89,9

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulukumba Tahun 2022

B. Urusan Kesehatan

1. Angka Kematian Bayi

Infant Mortality Rate atau Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan indikator yang lazim digunakan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat, baik pada tataran

kabupaten, provinsi maupun nasional. Selain itu, program - program kesehatan di Indonesia banyak yang menitik beratkan pada upaya penurunan AKB.

Angka Kematian Bayi merujuk kepada jumlah bayi yang meninggal pada fase antara kelahiran hingga bayi belum mencapai umur 1 tahun per 1000 kelahiran hidup. jumlah kematian bayi menurut laporan Puskesmas di Kabupaten Bulukumba berfluktuasi pada 2017 - 2018 mengalami peningkatan sebesar (10,91 per 1000 KH),sedangkan tahun 2019-2021 mengalami penurunan menjadi (0,29 per 1000 KH). Hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel II-39
Angka Kematian Bayi (AKB)Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Kematian Bayi	Kasus	50	69	64	51	2
Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup	Angka	7,74	10,91	10,05	7,53	0,29

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2022

2. Angka Kematian Balita

Sepanjang tahun 2017-2021, Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup dari tahun 2017 sampai tahun 2021 cenderung mengalami penurunan, Rata-rata kematian Balita disebabkan oleh Diare dan Pneumonia, penyebab ini dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan perilaku hidup sehat masyarakat yang belum optimal serta bagaimana masyarakat dalam mendapatkan pertolongan pada saat anak sakit. Ini juga berkaitan dengan deteksi dini faktor risiko serta tata laksana dalam penanganan balita sakit yang belum kuat. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-40
Angka Kematian Balita (AKBa)Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Kematian Balita	Kasus	55	88	70	54	0
Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup	Angka	8,52	14,06	10,99	7,98	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2022

3. Angka Kematian Neonatal

Sepanjang tahun 2017-2021, angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup dari tahun 2017 sampai tahun 2021 mengalami tren yang fluktuatif, Kematian Neonatal umumnya disebabkan oleh BBLR dan Asfiksia, hal ini berkaitan dengan kualitas kesehatan ibu hamil yang melahirkan bayi BBLR dan kemampuan petugas dalam mendeteksi dan tata laksana awal bayi beresiko serta dukungan sarana prasarana dalam penanganan bayi baru lahir bermasalah. Kondisi bayi baru lahir bermasalah disebabkan oleh kualitas kesehatan ibu pada masa sebelum dan saat hamil yang mempengaruhi kondisi kesehatan bayi baru lahir, dan kualitas kesehatan. ibu hamil ini juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial budaya. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-41
Angka Kematian NeonatalKabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Kematian Neonatal	Kasus	40	72	51	45	50
Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup	Angka	6,19	11,51	8,01	6,65	7,29

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2022

4. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, seperti kecelakaan, terjatuh, dan lain-lain. Penyebab kematian ibu di Kabupaten Bulukumba terutama dikarenakan hipertensi dalam kehamilan dan pendarahan. Berdasarkan dua penyebab kematian tersebut, pengoptimalan program Antenatal Care (ANC) atau disebut juga Kunjungan Pemeriksaan Kehamilan akan berdampak besar dalam mengurangi risiko komplikasi selama kehamilan dan kematian. Sebaran kasus kematian ibu.

Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2017 - 2021 cenderung berfluktuasi, kematian ibu di tahun 2017 kematian ibu meningkat menjadi 92,91 kasus dan pada tahun 2018 kasus kematian ibu meningkat lagi menjadi 110,64 kasus, pada tahun 2019 turun menjadi 47,10 kasus kematian dan pada tahun 2020 terdapat sebanyak 59,08 kasus kematian dan menglmi peningkatn angkat kematian ibu per 100.000 kelahiran sebesar 145,88 kasus. Beberapa faktor penyebab terjadinya kondisi ini diantaranya kondisi fasilitas kesehatan, sarana dan prasarana di beberapa Kecamatan untuk penanganan kegawat daruratan maternal dan neonatal masih belum optimal, distribusi SDM kesehatan yang kompeten untuk kasus kegawat daruratan belum merata ditingkat puskesmas, serta belum optimalnya pelayanan Antenatal Care (ANC) sesuai standar pada semua Kecamatan sehingga deteksi resiko terlambat diketahui. Selengkapny pada tabel berikut.

Tabel II-42
Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Ibu Hamil Yang Meninggal karena Hamil, Bersalin dan Nifas	Orang	6	7	3	4	10
Jumlah Kelahiran Hidup	Orang	6.458	6.327	6.370	6.770	6,855
Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Angka (per 100.00 kelahiran)	92,91	110,64	47,10	59,08	145.88

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2022

5. Rasio Posyandu per satuan balita

Keberadaan Posyandu dinilai dengan strata pratama, madya, purnama dan mandiri sehingga indikator keberhasilan Posyandu diukur dengan strata purnama dan mandiri, dimana jumlah Posyandu Purnama dan Mandiri pada tahun 2021 sebanyak 593 total posyandu yang ada, pada tahun 2017-2021 rasio posyandu per satuan balita, cenderung mengalami peningkatan. Kondisi ini tentunya tidak terlepas dari minat masyarakat untuk menjadi kader posyandu semakin meningkat. Disamping itu bertambahnya posyandu juga dipicu oleh meningkatnya kepercayaan orang tua akibat layanan posyandu yang dianggap baik. Perkembangan rasio posyandu per satuan balita disajikan pada tabel berikut.

Tabel II-43
Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Posyandu	Unit	574	562	581	593	593
Jumlah Balita	Orang	6.458	42.409	29.886	25.192	25.371
Rasio Posyandu per satuan Balita	Per 1.000 Balita	8,89	13.25	19,44	23,54	23.37

6. Rasio Puskesmas dan Pustu Persatuan penduduk

a. Rasio puskesmas per satuan penduduk

Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan terdepan bagi masyarakat, terus ditingkatkan baik dari jumlah maupun kualitas pelayanannya. Pada Tahun 2021 jumlah puskesmas di Kabupaten Bulukumba sebanyak 20 Unit.

b. Rasio pustu per satuan penduduk

Puskesmas Pembantu (pustu) adalah sarana kesehatan yang terdepan di Masyarakat dan merupakan bagian jaringan pelayanan dari Puskesmas yang mengemban tugas memberikan pelayanan kesehatan dasar yang meliputi Promotif, Preventif dan kuratif. Pada tahun 2021 terdapat 61 unit Pustu yang tersebar di 10 Kecamatan dan 136 Desa/Kelurahan.

Rasio ketersediaan puskesmas dan puskesmas pembantu per satuan penduduk, menunjukkan kondisi yang stagnan dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Peningkatan jumlah Puskesmas Pembantu (Pustu) hanya pada tahun 2021 sebanyak 60 Pustu pada tahun 2017, kemudian meningkat lagi menjadi 61 Pustu hingga pada tahun 2021. Angka rasio puskesmas dan puskesmas pembantu per satuan penduduk, dapat dilihat di tabel berikut.

Tabel II-44
Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Per Satuan Penduduk
Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Penduduk	Orang	415.713	418.326	420.603	437.607	445.699
Jumlah Puskesmas	Unit	20	20	20	20	20
Jumlah Puskesmas Pembantu	Unit	60	61	61	61	61
Jumlah Puskesmas dan Puskesmas pembantu (Pustu)	Unit	80	81	81	81	81
Rasio Puskesmas dan Pustu	Per 1000 Penduduk	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2022

c. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Rasio ketersediaan Rumah Sakit per Satuan penduduk menunjukkan kondisi yang stagnan dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Untuk kondisi tahun 2021, Kabupaten Bulukumba memiliki 2 unit Rumah Sakit tipe B dan 17 klinik kesehatan, sehingga kedepannya diperlukan upaya pemerintah daerah untuk membangun rumah sakit tipe C dan D di daerah kecamatan yang jaraknya jauh dari ibukota kabupaten, agar pelayanan kesehatan bagi masyarakat bisa dimaksimalkan. Angka Rasio Rumah Sakit dan Rasio Klinik per Satuan Penduduk, dapat dilihat di tabel berikut.

Tabel II-45
Rasio Rumah Sakit dan Rasio Klinik Per Satuan Penduduk
Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Penduduk	Orang	415.713	418.326	420.603	437.607	445.699
Jumlah Rumah Sakit	Unit	1	1	1	1	2
Jumlah Poliklinik	Unit	15	15	15	16	17
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	Per 1000 Penduduk	0,002	0,002	0,002	0,002	0,005

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Rasio Poliklinik Per Satuan Penduduk	Per 1000 Penduduk	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2022

d. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, yang termasuk tenaga kesehatan dalam kelompok tenaga medis terdiri atas dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis.

Rasio Dokter per satuan penduduk di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2017- 2021 mengalami tren yang meningkat pada kurun waktu tersebut. Pada tahun 2017-2021 jumlah dokter umum dan spesialis mengalami penurunan sebesar 0,099 mendi 0,14 per 1000 penduduk, Perkembangan Rasio Dokter per satuan penduduk di Kabupaten Bulukumba selama tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-46
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Kabupaten Bulukumba
Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Dokter Umum/Spesialis	Orang	41	40	40	34	64
Jumlah Penduduk	Orang	415.713	418.326	420.603	437.607	445.699
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk	Per 1000 Penduduk	0,099	0,096	0,095	0,078	0,14

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2022

e. Rasio Tenaga Medis per satuan Penduduk

Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk di Kabupaten Bulukumba selama tahun 2017-2021 mengalami tren yang berfluktuasi. Pada tahun 2017 dan 2018 jumlah Dokter sebanyak 83 orang (0,188- 0,198), tahun 2019 meningkat menjadi 96 orang (0,198), tahun 2020 kembali menurun menjadi 88 orang (0,209), namun pada tahun 2021 jumlah dokter bertambah menjadi 114 orang (0,256). Perkembangan Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk di Kabupaten Bulukumba selama tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-47
Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk
Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Tenaga Medis	Orang	78	83	96	88	114
Jumlah Penduduk	Orang	415.713	418.326	420.603	437.607	445.699
Rasio Tenaga Medis/Penduduk	Angka Per 1000 Penduduk	0,188	0,198	0,228	0,209	0,256

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2022

f. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan tahun 2017 sebesar 86,67 persen, tahun 2018 cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan turun menjadi 85,45 persen, kemudian tahun 2019 persalinan oleh tenaga kesehatan menurun ke angka 79,51 persen dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 86,35 persen hingga tahun 2021 meningkt sebesar 87,46. Ini diakibatkan karena adanya peran aktif tenaga medis/kesehatan

melakukan sosialisasi terkait keselamatan ibu bersalin dan meningkatnya sarana dan prasarana pada seluruh layanan kesehatan. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-48
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan
Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Orang	6309	6221	5788	6776	6855
Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	Orang	7279	7280	7280	7847	7847
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	%	86,67	85,45	79,51	86,35	87,46

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2022

g. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Penyelenggaraan imunisasi di Indonesia diukur dengan cakupan *UCI (Universal Child Immunization)* yaitu suatu kondisi dimana minimal 80 persen bayi yang berada dalam suatu desa telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap, Pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi pemberian imunisasi dasar (BCG, DPT/HB1-3, Polio 1-4, dan campak) Bentuk pelayanan kesehatan bayi berupa pemberian imunisasi rutin bagi bayi umur 0 – 1 tahun (BCG, DPT, Polio, Campak, HB) yang dilakukan di Posyandu dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-49
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Desa/Kelurahan UCI	Desa/Kel	136	136	136	45	87
Jumlah Seluruh Desa/Kelurahan	Desa/Kel	136	136	136	136	36
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	100	100	33,1	63,97

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2022

Dari Tabel di atas, terlihat bahwa cakupan pemberian imunisasi di Kabupaten Bulukumba Periode 2017-2021 menunjukkan konsistensi capaian sebesar 100 persen antara tahun 2017-2019, namun terjadi penurunan pada tahun 2021. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2020 sampai tahun 2021 merupakan tahun merebaknya wabah pandemi *Covid-19*, dimana dilakukan pembatasan sosial sehingga kegiatan ini hanya mampu menjangkau 87 desa/kelurahan atau hanya sebesar 63,97 persen.

h. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan

Jumlah balita gizi buruk yang ditemukan dan mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu, dari tahun 2017 sampai 2021, menunjukkan tren yang berfluktuasi, dan cakupannya telah mencapai 100 persen. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh berbagai faktor diantaranya meningkatnya surveilans gizi, sehingga kasus-kasus yg terjadi semuanya dapat ditemukan dan dilakukan intervensi penatalaksanaan kasus gizi buruk. Selain itu tersedianya aplikasi by name by address Pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM) sehingga data antropometri balita dan status gizinya tercatat dengan baik, selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II-50
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan
Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Balita Gizi Buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan	Balita	8	7	9	4	7
Jumlah seluruh Balita Gizi Buruk yang ditemukan	Balita	8	7	9	4	7
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2021

i. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Cakupan penemuan dan pengobatan kasus TBC selama 3 tahun (2017-2019) menunjukkan adanya peningkatan yaitu tahun 2017 sebanyak 52,0 persen, tahun 2018 sebanyak 58,4 persen dan tahun 2019 sebanyak 67,4 persen dan tahun 2020 menurun menjadi 39,4 persen dan ditahun 2021 meningkat sebesar 71,3 persen . Hal ini disebabkan karena kurangnya masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan akibat gejala yang di timbulkan bagi penderita penyakit TBC hampir mirip dengan gejala bagi penderita *Covid-19* dan adanya pembatasan layanan kesehatan masyarakat akibat pandemic. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-51
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA
Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati	Jiwa/ Orang	323	338	390	237	385
Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yang sama	Jiwa/ Orang	621	579	579	602	540
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	52,0	58,4	67,4	39,4	71,3

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2022

j. Tingkat Prevalensi Tuberkolosis (Per 100.000 Penduduk)

Prevalensi Kasus TBC untuk semua tipe menunjukkan peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Tahun 2017 dan tahun 2018 meningkat menjadi 637 orang, tahun 2019 kembali mengalami peningkatan penderita sebanyak 651 orang, dan pada tahun 2020 jumlah penderita TBC menurun menjadi 346 orang dan pad tahun 2021 kasusu penderita TBC meningkat sangat drastis sebesar 5400 orang. Peningkatan Prevalensi Kasus TBC disebabkan dengan adanya rekomendasi Kementerian Kesehatan untuk melakukan penyisiran kasus di Rumah Sakit baik Pemerintah maupun Swasta karena masih banyaknya kasus TBC yang ditemukan namun tidak melaporkan. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-52
Tingkat Prevalensi Tuberkolosis
Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Kasus Penderita TBC	Orang	637	637	651	346	5400
Jumlah Penduduk	Orang	415.713	418.326	420.603	437.607	445.699

Tingkat Prevalensi Tuberkulosis	Per 100.000 penduduk	153,23	152,27	154,78	79,07	121.16
---------------------------------	----------------------	--------	--------	--------	-------	--------

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2022

k. Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis

Angka kematian pada Penderita TBC pada tahun 2017 sebanyak 6,0, pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 5,7, tahun 2019 mengalami peningkatan sebanyak 7,4 dan pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi 3,2 per 100.000 penduduk dan pada tahun 2021 kembali meningkat sebesar 6,48. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-53

Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Kematian karena TB	Jiwa	25	24	31	14	35
Jumlah Penduduk	Orang	415.713	418.326	420.603	437.607	445.699
Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis	Per 100.000 Penduduk	6,0	5,7	7,4	3,2	6,48

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2021

Beberapa hal yang menjadi penyebab kematian penderita TBC masih tinggi adalah:

- Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri lebih dini bila ditemukan gejala awal TBC.
- Keterlambatan dalam mengakses fasilitas kesehatan karena stigma yang masih ada di masyarakat.
- Pengobatan yang tidak tuntas sehingga risiko kematian semakin tinggi.
- Penyebab utama kematian bukan karena penyakit TBC tapi adanya penyakit komorbid (penyakit penyerta) lainnya.

l. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di Kabupaten Bulukumba tahun 2017-2021 menunjukkan tren yang fluktuatif secara jumlah, namun bersifat konstan dari segi capaian penanganan selama periode tersebut. Tahun 2017 turun menjadi 110 orang, tahun 2018 jumlahnya naik menjadi 152 orang, tahun 2019 jumlahnya kembali naik menjadi 275 kasus, namun tahun 2020 jumlah penderita penyakit DBD turun menjadi 160 orang dan pada tahun 2021 jumlah penderita mengalami penurunan sebesar 112 orang. Dari segi penanganan penderita penyakit DBD di Kabupaten Bulukumba tahun 2017-2021 capaiannya sebesar 100%

Tabel II-54

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah keseluruhan penderita DBD	Jiwa	110	152	275	160	112
Jumlah penderita DBD yang ditemukan	Jiwa	110	152	275	160	112
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2022

m. Angka kejadian Malaria

Pengendalian penyakit malaria telah menunjukkan pencapaian program yang cukup baik. Hal ini terlihat dari Angka Kejadian Malaria yang diukur dengan Annual Parasite Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2023

Incidence (API) yang menjadi indikator keberhasilan upaya penanggulangan malaria cenderung menurun dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa segala upaya pencegahan dan pengendalian yang dilakukan memiliki nilai signifikan dalam pengendalian malaria.

Pencapaian kondisi tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan diantaranya peningkatan sumber daya manusia baik dalam diagnosis dan tata laksana, serta manajemen program, dan peningkatan kapasitas tenaga laboran dalam pemeriksaan sediaan darah malaria. Selain itu dilakukan juga surveilans migrasi dan penyelidikan epidemiologi kasus positif malaria, penemuan suspek malaria baik secara aktif maupun pasif, pelaksanaan Penyelidikan Epidemiologi (PE) 1-2-5 terhadap semua kasus positif malaria, serta pemberian pengobatan sesuai standar kepada penderita malaria. Angka kejadian malaria di kabupaten Bulukumba tahun 2017 - 2021 menunjukkan tren yang berfluktuasi, namun secara keseluruhan menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya pada tahun 2021 yakni 10 kasus penderita malaria. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-55
Angka Kejadian Malaria Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Penderita Malaria	Orang/kasus	39	43	23	5	10
Jumlah Penduduk	Jiwa	415.713	418.326	420.603	437.607	445.699
Angka Kejadian Malaria	Per 100.000 Penduduk	9,38	10,28	5,47	1,19	0,02

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2022

Meskipun demikian, dalam pelaksanaan di lapangan masih ditemukan berbagai factor yang menghambat diantaranya masih belum maksimalnya keterlibatan lintas sektor dan lintas program dalam hal penemuan kasus, minimnya anggaran pencegahan dan pengendalian malaria, serta tidak adanya regulasi daerah yang dapat mendukung pencegahan dan pengendalian malaria.

n. Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total Populasi

Prevalensi HIV dari total populasi di Kabupaten Bulukumba tahun 2017-2021 menunjukkan tren yang berfluktuasi. Tahun 2017 terdapat 21 orang penderita HIV/AIDS dengan angka prevalensi sebesar 0,005, dan pada tahun 2021 jumlah penderita HIV/AIDS meningkat menjadi 34 orang atau 0,34 dari total populasi penduduk. Sesuai dengan tingkat epidemiologi, Kabupaten Bulukumba adalah epidemiologi terkonsentrasi artinya kasus HIV yang ada tinggi tapi berada di populasi-populasi tertentu, belum sampai ke masyarakat umum. Kendala yang dihadapi diantaranya belum semua Puskesmas dan Rumah Sakit melakukan penemuan kasus HIV dan sistem pencatatan dan pelaporan dengan Aplikasi sistem Informasi HIV AIDS belum digunakan maksimal karena terkendala sarana komputer dan jaringan wifi. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-56
Prevalensi HIV/AIDS Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Penderita HIV/AIDS	Orang	21	42	66	38	34
Jumlah Penduduk	Jiwa	415.713	418.326	420.603	437.607	445.699
Prevalensi HIV/AIDS (Persen) dari Total Populasi per 100.000	%	0,005	0,010	0,016	0,009	0,34

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2022

o. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Pemerintah Pusat melalui Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin sejak tahun 2008 yang merupakan peralihan program Asuransi Miskin (ASKESKIN) dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama dengan Kabupaten Bulukumba melalui Program Jaminan Kesehatan Gratis yang keduanya sekarang telah berintegrasi menjadi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah berupaya untuk menghadapi permasalahan kesehatan bagi masyarakat miskin dengan penjaminan/pembebasan biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan Petunjuk Teknis yang berlaku. Selain itu untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat miskin didukung dengan penganggaran kegiatan-kegiatan operasional untuk meningkatkan penyediaan serta efektivitas berbagai pelayanan kesehatan masyarakat yang bersifat non personal seperti penyuluhan kesehatan, regulasi pelayanan kesehatan dan penyediaan obat, keamanan dan kesehatan makanan, pengawasan terhadap kesehatan dan kebersihan lingkungan pemukiman dan relokasi berbagai sumber daya yang tersedia dengan memprioritaskan daerah miskin dan masyarakat tidak mampu. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-57
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin
Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Masyarakat Miskin yang dilayani (rujukan)	Jiwa	5.836	8.480	9.483	6.010	75,698
Jumlah Penerima PBI KJN	Jiwa	151.790	208.227	187.225	118.100	214.079
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	%	3,84	4,07	5,06	5,09	35,36

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2022

p. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Berdasarkan data di bawah, cakupan kunjungan ibu hamil lengkap (K4) berfluktuasi dari tahun ke tahun dan masih ada disparitas antar Kabupaten/kota yang variasinya cukup besar selain adanya kesenjangan, ditemukan juga ibu hamil yang tidak menerima pelayanan dimana seharusnya diberikan saat kontak dengan tenaga kesehatan (missed opportunity). Selain faktor tersebut adanya pernikahan dini sehingga ibu hamil malu kontak dengan petugas kesehatan dan pada akhirnya terlambat memperoleh pelayanan antenatal lengkap sesuai standar yang seharusnya diperoleh oleh ibu hamil, kondisi geografis yang sulit akses ke fasilitas kesehatan sehingga ibu hamil tidak rutin datang memeriksakan kehamilannya dimana setiap ibu hamil seharusnya mendapatkan pelayanan antenatal oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi sesuai standar minimal 4 kali selama kehamilannya dengan distribusi waktu : 1 kali pada trimester ke-1 (0-12 minggu), 1 kali pada trimester ke-2 (>12-24 minggu), dan 2 kali pada trimester ke-3 (>24 minggu sampai dengan kelahiran). Jika ibu hamil tidak memperoleh pelayanan seperti tersebut di atas padamasa kehamilan, maka tidak dapat dilaporkan sebagai cakupan kunjungan ibu hamillengkap (K4), kunjungan antenatal bisa lebih dari 4 kali sesuai kebutuhan jika ada keluhan, penyakit dan gangguan kehamilan. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-58
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4
Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021

Jumlah Ibu Hamil yang memeriksakan Kandungan (K4)	Orang	6.309	5.943	5.262	6.026	4,497
Jumlah Ibu Hamil	Orang	7.625	7.625	7.265	8.220	8,220
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	%	82,74	77,94	72,43	73,3	92,42

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2021

Secara umum penyebab masih adanya ibu hamil yang tidak memperoleh pelayanan kunjungan ibu hamil lengkap (K4) diantaranya belum semua ibu hamil dan keluarga memahami tentang kehamilan yang sehat dan persalinan yang aman sehingga terlambat kontak dengan petugas kesehatan, kondisi tempat tinggal ibu hamil dan keluarga yang jauh dari fasilitas pelayanan kesehatan (wilayah terpencil, serta adanya ibu hamil yang berpindah tempat sehingga tidak terpantau sampai masa persalinannya).

Meskipun demikian, beberapa faktor yang mendukung peningkatan cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 di Kabupaten Bulukumba diantaranya, adanya regulasi terkait pelayanan Standal Minimal untuk Pelayanan Antenatal Care yang sesuai SOP, kunjungan oleh tenaga kesehatan kepada ibu hamil, adanya keterlibatan dan perhatian tokoh masyarakat dan kader agar setiap ibu hamil memeriksakan diri kepada tenaga kesehatan secara teratur, memperkuat Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Kader dan Masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan, adanya pelaksanaan kelas ibu hamil di Desa dalam upaya untuk peningkatan pengetahuan ibu dan keluarga, serta berjalannya Pemantauan Wilayah Setempat Program Kesehatan Ibu dan Anak

q. Cakupan Pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 Bulan keluarga miskin

Data pemberian makanan Pendamping ASI untuk khusus untuk keluarga miskin, tidak tersedia disebabkan dalam juknis MP-ASI yg dikeluarkan oleh kemenkes, Prioritas pemberian MP-ASI adalah diperuntukkan bagi baduta kategori kurus (BB/TB) <-2 SD sehingga tanpa memandang status kemiskinan semua balita kategori kurus mendapatkan MP-ASI. Begitu pula untuk keluarga miskin bila balitanya memiliki status gizi baik maka tidak diberikan MP-ASI. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-59
Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Keluarga Miskin
Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin	%	82,74	77,94	63,63	45,25	71,31

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2022

r. Cakupan pelayanan dasar masyarakat miskin

Cakupan pelayanan dasar masyarakat miskin di Kabupaten Bulukumba tahun 2017-2021 menunjukkan tren yang berfluktuasi, tahun 2017 nilainya sebesar 68,21 persen, tahun 2019 mningkat menjadi 80,56 persen, dan tahun 2020 capaian tersebut turun lagi menjadi 52,37 persen da di tahun 2021 meningkat m jadi 60,4 persen. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-60
Cakupan Pelayanan Dasar Masyarakat Miskin
Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	%	68,21	93.75	80,56	52,37	60,4

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2022

C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Infrastruktur jalan merupakan instrumen penting untuk mengakselerasikan perwujudan posisi Kabupaten Bulukumba sebagai pilar utama pembangunan di kawasan selatan. Infrastruktur jalan yang berkualitas akan berdampak langsung terhadap efisiensi sektor-sektor lainnya sebagai akibat dari terinduksinya biaya transportasi dan meningkatnya waktu tempuh, yang pada akhirnya akan mendorong akselerasi kesejahteraan masyarakat. Pembangunan jalan dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : Kpts.510/X/2016 tentang Penetapan status Ruas Jalan Kabupaten di Kabupaten Bulukumba, menurut statusnya panjang jalan Kabupaten Bulukumba meningkat dari 1.039,17 Km menjadi 1.211,516 Km. Perubahan Keputusan Bupati terhadap kewenangan jalan berdampak pada persentase kondisi jalan yang menurun pada tahun 2017. Namun pada tahun 2018-2019 panjang jalan dalam kondisi baik meningkat akan tetapi pada tahun 2020 dan 2021 persentase kondisi jalan baik kembali mengalami penurunan disebabkan oleh kondisi penganggaran dan terpenuhinya target kondisi jalan yang baik di tahun 2020 dan 2021, Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-61
Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik
Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Panjang Jalan Kondisi baik	Km	649,98	704,74	848,74	630,57	560,393
Panjang jalan kondisi sedang	Km	561,538	506,77	362,776	556,81	157,954
Panjang jalan Keseluruhan	Km	1.211,516	1.211,516	1.211,516	1.211,516	1.147,72
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	0,537	0,582	0,701	0,520	0,49

Sumber: Dinas PUTR Kabupaten Bulukumba tahun 2022

2. Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk

Pembangunan jalan dilakukan untuk menunjang akses/pergerakan sosial ekonomi masyarakat. Pembangunan jalan didasarkan pada kebutuhan masyarakat, sedangkan perhitungan panjang jalan didasarkan pada SK Menteri, SK Gubernur dan SK Bupati/Walikota. Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Bulukumba dari tahun 2017 sampai tahun 2021 menunjukkan tren yang stagnan selama priode tersebut. Selengkapnya pada tabel berikut:

Tabel II-62
Proporsi Panjang Jalan Per Satuan Penduduk
Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Uraian Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Panjang Jalan Nasional	Km	87,452	87,452	87,452	87,452	87,452
Panjang Jalan Provinsi	Km	83,76	83,76	83,76	83,76	83,76
Panjang Jalan Kab/Kota	Km	1.211,52	1.211,52	1.211,52	1.211,52	1.147,72
Total Panjang Jalan	Km	1382,728	1382,728	1382,728	1382,728	1318,932
Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	Km/jml penduduk	0,0033	0,0033	0,0033	0,0032	0,0052

Sumber: Dinas PUPR Kab. Bulukumba, tahun 2022

3. Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1.5 m)

Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1.5 m) di Kabupaten Bulukumba tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami tren peningkatan pada priode tersebut. Tahun 2016 capaiannya sebesar 70,87 persen, dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 95,49 persen. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan

D. Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman

1. Rasio rumah layak huni

Untuk capaian indikator Rumah Layak Huni merupakan data capaian tahun 2017 sampai tahun 2021, dimana pada tahun 2017- 2018 sebesar 0,246 sedangkan ditahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,245 dan pada tahun 2020 smpi 2021 meningkat sebesar 0,236.

Tabel II-63
Perkembangan Indikator Aspek Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Rasio rumah layak huni		0,246	0,246	0,245	0,236	0,236

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman, & Pertanahan, 2022

2. Persentase permukiman yang tertata

Persentase permukiman yang tertata dimana capaian dari tahun 2017 sampai tahun 2021 selalu mengalami peningkatan dimana pada tahun 2017 sebesar 58.21, mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2021 sebesar 65.00.

Tabel II-64
Persentase permukiman yang tertata Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase permukiman yang tertata	%	58.21	60.20	63.40	65.00	65.00

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman, & Pertanahan, 2022

3. Persentase lingkungan permukiman kumuh

Persentase lingkungan permukiman kumuh kabupaten Bulukumba pada tahun 2017 – 2021 mengalami peningkatan tiap tahun, ini dapat dilihat dari data capaian pada tahun 2017 sebesar 5,00 persen dan pada tahun 2021 sebesar 11,5 persen. Selengkapnya dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-65
persentase lingkungan permukiman kumuh Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
persentase lingkungan permukiman kumuh	%	5.00	7.25	9.5	11.39	11,5

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman, & Pertanahan, 2022

4. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau

Untuk indikator Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau dari tahun 2017 sampaidengan 2021 dimana jumlah permukiman layak huni pada tahun 2017 sebesar 91.65 unit rumah selanjutnya terjadi peningkatan sampai tahun 2021 yaitu 92.42 persen atau. Selengkapnya dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-66
Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	201
Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	%	91,65	92,10	92,33	92,35	92,42

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman, & Pertanahan, 2022

5. Persentase rumah tinggal bersanitasi

Persentase rumah tinggal bersanitasi dari tahun 2017-2021. Pada tahun 2017 rumah tinggal bersanitasi sebesar 75.63 persen sampai tahun 2018 rumah tinggal bersanitasi sebesar 77.18 persen, namun pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 76.26 persen. Selengkapnya dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-67

Persentase rumah tinggal bersanitasi Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	75.63	77.18	76.92	76.12	76.26

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman, & Pertanian, 2022

6. Persentase penduduk berakses air minum

Persentase penduduk berkases air minum dari tahun 2017-2021. Pada tahun 2017 Persentase penduduk berkases air minum Sebesar 82.19. tahun 2018 Persentase penduduk berkases air minum mengalami peningkatan sebesar 87.77 persen, dan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 84.4 persen dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 84,26 persen . Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-68

Persentase penduduk berakses air minum Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase penduduk berakses air minum	%	82.19	87.77	83.52	84.4	84,26

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman, & Pertanian, 2022

7. Persentase areal kawasan kumuh

Persentase areal kawasan kumuh dari tahun 2017-2021. Pada tahun 2017 Persentase areal kawasan kumuh mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 0.15. namun pada tahun 2018 Persentase areal kawasan kumuh mengalami peningkatan sebesar 0.13 persen, dan pada tahun 2019 Persentase areal kawasan kumuh pada tahun mengalami peningkatan sebesar 0.55 persen, pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 0.09 persen dan meningkat ditahun 2021 sebesar 0,11 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-69

Persentase areal kawasan kumuh Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase areal kawasan kumuh	%	0.15	0.13	0.55	0.09	0,11

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman, & Pertanian, 2022

8. Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan

Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan dari tahun 2017-2021. Pada tahun 2017 Rasio bangunan ber IMB persatuan bangunanh sebesar 39,58 persen, sampai tahun 2020 Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan mengalami penurunan sebesar 2.97 . namun pada tahun 2021 Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan mengalami peningkatan sebesar 6.02 persen, Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-70

Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021

Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan	%	39.58	5.58	2.15	2.97	6,02
--	---	-------	------	------	------	------

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman, & Pertanahan Kab. Bulukumba, 2022

E. Urusan Ketetraman. Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas).

Pada tahun 2017 hingga tahun 2021 Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas). Pada tahun 2017 0.39 % namun pada tahun 2018 berkurang menjadi 0.38 % hal ini disebabkan karena ditahun 2018 jumlah penduduk bertambah sedangkan jumlah Linmas tetap, Pada tahun 2019 kembali menurun menjadi 0,32% sampai dengan tahun 2020 Hingga tahun 2021 sebesar 0,31% hal ini disebabkan karena berkurangnya Jumlah Petugas Linmas setelah diadakan peremajaan data Linmas dari 10 Kecamatan.

Tabel II-71
Perkembangan Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 - 2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Persen	0,39	0,38	0,32	0,32	0,31

Sumber: Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Bulukumba. 2022

2. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3

Mulai dilakukan pada tahun 2017 sebesar 10,53 % dan mengalami peningkatan dari tahun ketahun yakni tahun 2017 sebesar 20,55%, tahun 2018 sebesar 82.89%, tahun 2019 sebesar 71,11%, pada tahun 2020 sampai 2021 menjadi 100% ini menunjukkan tingkat penyelesaian pelanggaran K3 semakin baik.

Tabel II-72
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban. Ketentraman dan Keindahan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 - 2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban. Ketentraman dan Keindahan)	Persen	20,55	82,89	71,11	100	100

Sumber: Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Bulukumba. 2022

3. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota

Presentase tingkat capaian pada tahun 2017 sebesar 0,00265%, hal ini dikarenakan jumlah penduduk meningkat sedangkan jumlah mobil pemadam Kebakan sama dengan tahun sebelumnya yaitu 11 Unit. Tahun 2018 sebesar 0,00311% kembali meningkat dikarenakan bertambahnya jumlah mobil pemadam kebakaran menjadi 13 unit. Tahun 2019 sebesar 0,00285% kembali menurun dikarenakan jumlah mobil pemadam kebakaran kembali menurun menjadi 12 unit dan ditahun 2020 sampai 2021 kembali menurun sebesar 0,00284% sampai 0,002269% disebabkan jumlah penduduk mengalami peningkatan sementara jumlah mobil pemadam kebakaran..

Tabel II-73
Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota di Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 - 2021

Keterangan (dalam persen)	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	Persen	0,00265	0,00311	0,00285	0,00284	0,00269

Sumber: Sumber: Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Bulukumba. 2022

4. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Presentase capaian pada tahun 2017 sebesar 62,32%, tahun 2018 sebesar 83,33%, tahun 2019 sebesar 98,90% dan ditahun 2020 sampai 2021 meningkat menjadi 100% hal ini dikarenakan ketepatan waktu tindakan pemadam kebakaran sudah semakin meningkat dengan adanya penempatan Posko Pemadam Kebakaran di 4 Sektor Kecamatan diantaranya : Sektor Dampang mencakup wilayah Gantarang-Kindang, Sektor Tanete mencakup wilayah Bulukumpa-Rilau Ale, Sektor Bonto Bahari mencakup wilayah Bonto Bahari-Bonto Tiro, Sektor Kajang mencakup Wilayah Kajang-Herlang.

Tabel II-74

Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 - 2021

Keterangan (dalam persen)	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	62,32	83,33	98,90	100	100

Sumber: Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Bulukumba. 2022

5. Presentase Penegakan Perda

Presentase tingkat capaian pada tahun 2017 sebesar 42,75 pada tahun 2018 meningkat menjadi 45,85% namun turun pada tahun 2019 menjadi 34,12% kemudian meningkat kembali menjadi 100% ditahun 2020 - 2021. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa pelanggaran peraturan daerah, terutama yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum semakin berkurang selama periode 2017-2021.

Tabel II-75

Persentase Penegakan PERDA) di Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 - 2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Penegakan PERDA	Persen	42,75	45,85	34,12	100	100

Sumber: Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Bulukumba. 2022

F. Urusan Sosial

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba adalah menyelenggarakan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial difokuskan pada penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Jumlah dan jenis PMKS mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.

Data capaian pada indikator RPJMD diperoleh berdasarkan dari jumlah PMKS dan data indikator lain diluar PMKS yang ditangani yang selanjutnya dihitung sesuai dengan formula atau rumus pada masing-masing indikator untuk memperoleh capaian baik dalam satuan Unit, Buah maupun persentase. Dalam penetapan jumlah data tersebut diperoleh dari masing-masing bidang teknis yang menangani sesuai indikator RPJMD yang telah ditentukan. Berikut penjelasan pada masing-masing indikator :

1. Sarana Sosial seperti Panti Sosial

Sarana Sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi , dalam hal ini Panti Asuhan pada tahun 2018 berjumlah 18 Buah, Tahun 2019 sampai 2021 mengalami penurunan jumlah yaitu menjadi 13 unit yang diakibatkan panti sosial tersebut berdasarkan hasil akreditasi oleh Tim dari Kemensos RI dinyatakan tidak terdaftar pada Dinas Sosial karena tidak dapat memenuhi persyaratan untuk terdaftar pada Dinas Sosial.

Tabel II-76
Sarana Sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi
diKabupaten Bulukumba Tahun 2017 - 2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Sarana Sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi	Unit	18	18	13	13	13

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba, 2022

- Faktor pendukung capaian indikator adanya koordinasi dan kerjasama dengan pihak lembaga/panti sosial dalam pengajuan akreditasi dan keterangan terdaftar pada Dinas Sosial.
- Faktor penghambat capaian indikator, Lembaga Kesejahteraan Sosial/Panti Sosial tidak secara rutin melengkapi dokumen pengajuan akreditasi lembaga.

2. Jumlah Korban Bencana yang Ditangani

Untuk Jumlah Korban Bencana yang Ditangani pada tahun 2017 - 2021, mengalami peningkatan yang positif, pada tahun 2017 dan 2018 data capaian sebesar 95.0, dan 100.0 dan pada tahun 2019 - 2021 mencapai 100% karena semua korban bencana dapat dilayani sesuai dengan target yang ditetapkan.

Tabel II-77
Jumlah Korban Bencana yang Ditangani
diKabupaten Bulukumba Tahun 2017 - 2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Orang	1326	147	483	365	60
Populasi korban bencana alam dan sosial daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Orang	1396	147	483	365	60
Persentase		95.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba, 2022

- Faktor pendukung capaian indikator, koordinasi dan kerjasama antar instansi baik pusat dan daerah dalam penyediaan logistik bagi korban bencana.
- Faktor penghambat capaian indikator, masih rendahnya program mitigasi bencana bagi masyarakat.

3. Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial

Sesuai dengan data yang disajikan secara umum berfluktuatif dimana pada Tahun 2018 mencapai 100% dan mengalami penurunan pada Tahun 2020 dan 2021 Sebesar 98.6 mejadi 26.8 Salah satu faktor penurunan capaian dari tahun 2018 diakibatkan karena jumlah PMKS yang memperoleh masih relative lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah PMKS yang ada.

Tabel II-78
Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial di
Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 - 2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah PMKS yang diberikan bantuan	Orang	25,632	38,358	38,773	42,592	48.503
Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan	Orang	26,395	38,358	42,149	43,179	180.686
Persentase		97.1	100.0	92.0	98.6	26.8

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba, 2022

- Faktor pendukung capaian indikator, adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam mendukung pelaksanaan kegiatan.
- Faktor penghambat capaian indikator, jumlah dan jenis PMKS yang tidak di dukung dengan data yang valid dan akurat

4. Perentase PMKS yang tertangani

Perentase PMKS yang tertangani dari tahun 2017-2019 tidak mengalami perubahan yang signifikan dari target yang ditentukan. Pada Tahun 2020 dan 2021 PMKS yang tertangani ada pada 73.57% dan 26.8% lebih rendah dari tahun tahun sebelumnya yang diakibatkan oleh adanya pengurangan anggaran (*refocusing* penanggulangan *Covid-19*) pada program dan kegiatan yang menangani kegiatan tersebut.

Tabel II-79
Perentase PMKS yang tertanganidi Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 - 2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah PMKS yang tertangani	Orang	26,094	38,097	39,713	31,767	48,503
Jumlah PMKS yang ada	Orang	26,395	38,358	42,149	43,179	180,686
Persentase		98.9	99.3	94.2	73.6	26.8

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba, 2022

- Faktor pendukung capaian indikator, adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam mendukung pelaksanaan kegiatan.
- Faktor penghambat capaian indikator, jumlah dan jenis PMKS yang tidak di dukung dengan data yang valid dan akurat.

5. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat

pada akhir capaian RPJMD mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal itu diakibatkan oleh adanya pengurangan anggaran (*refocusing* penanggulangan *Covid-19*) pada program dan kegiatan yang menangani kegiatan tersebut tetapi pada tahun 2021 mengalmi peningkatan sebesar 100%.

Tabel II-80
Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap daruratdi Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 - 2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Orang	1,395	146	480	270	60
Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Orang	1,396	147	483	365	60
Persentase		99.9	99.3	99.4	74.0	100

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba, 2021

- Faktor pendukung capaian indikator, koordinasi dan kerjasama antar instansi baik pusat dan daerah dalam penyediaan logistik bagi korban bencana.
- Faktor penghambat capaian indikator, masih rendahnya program mitigasi bencana bagi masyarakat.

6. Persentase Penyandang Disabilitas

Persentase Penyandang Disabilitas dalam hal ini cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial capaian pada akhir periode RPJMD mencapai 82.07%. Capaian ini mengalami penurunan sebagai akibat dari adanya pengurangan anggaran pada kegiatan tersebut.

Tabel II-81
Persentase Penyandang Disabilitas
di Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 - 2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Orang	1,702	1,837	2,148	2,251	31
Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial	Orang	1,704	1,964	2,160	3,039	33
Persentase		99.9	93.5	99.4	74.1	93.9

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba, 2022

- Faktor pendukung capaian indikator, adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam mendukung pelaksanaan kegiatan.
- Faktor penghambat capaian indikator, jumlah dan jenis PMKS yang tidak di dukung dengan data yang valid dan akurat serta masih terbatasnya jumlah pekerja sosial profesional dalam penanganan disabilitas dan lansia.

2.1.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

Analisis terhadap capaian peningkatan pelayanan dapat dilihat dari perkembangan indikator-indikator pembangunan daerah pada urusan-urusan yang dikelompokkan pada layanan urusan wajib non pelayanan pemerintah daerah diantaranya yaitu Tenaga Kerja; Pangan; Pertanahan; Lingkungan Hidup; Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Perhubungan; Komunikasi dan Informatika; Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah; Penanaman Modal; Kepemudaan dan Olahraga; Statistik; Kebudayaan; Perpustakaan; dan Kearsipan.

A. Urusan Tenaga Kerja

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2021 adalah sebesar 212.606 jiwa, yang terdiri dari 205.932 jiwa penduduk yang berkerja, dan 6.674 jiwa pengangguran terbuka. Selain itu, jumlah bukan angkatan kerja adalah 112.182 jiwa, dengan rincian 17.281 jiwa penduduk yang bersekolah, 76.483 jiwa penduduk yang mengurus rumah tangga, dan 18.418 jiwa lainnya. Untuk tahun 2021 Tingkat Pengangguran di Kabupaten Bulukumba adalah 3,24 persen dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah 63,41 persen. Untuk lebih jelasnya statistik ketenagakerjaan di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Tabel II-82
Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Bulukumba tahun 2021

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
I. Angkatan Kerja	123.603	89.003	212.606
1. Bekerja	119.043	86.889	205.932
2. Pengangguran Terbuka	4.560	2.114	6.674
II. Bukan Angkatan Kerja	27.438	84.744	112.182
1. Sekolah	6.905	10.376	17.281
2. Mengurus Rumah Tangga	8.788	67.695	76.483
3. Lainnya	11.745	6.673	18.418
Jumlah	151.041	173.747	324.788

Sumber: Bulukumba dalam Angka tahun 2022

1. Angka sengketa pengusaha-pekerja per Tahun

Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja merupakan perbandingan antara jumlah sengketa pengusaha pekerja dibagi jumlah Perusahaan. Angka sengketa Pengusaha Pekerja pertahunnya kurun waktu 2017-2018 mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2017sampai 2018 sebesar 4,98 persen, pada tahun 2019 mengalami peningkatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2023

sebesar 19,09 persen, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan secara signifikan menjadi 0,93 persen dan mengalami peningkatan di tahun 2021 sebesar 1,18 persen selengkapnya dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II-83
Angka sengketa pengusaha-pekerja
Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 - 2021

Indikator	satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Angka sengketa pengusaha-pekerja per Tahun	%	4,98	4,98	19,09	0,93	1,18

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba, 2022

2. Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)

Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama, tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 kasus yang terselesaikan sebesar 0,36 persen, mengalami penurunan dan meningkat di tahun 2021 sebesar 0,38 persn. Hal ini disebabkan banyak faktor antara lain pihak pihak memang mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan permasalahan, pihak yang mewakili dalam melakukan perundingan mediasi sangat mempengaruhi pula tingkat keberhasilan penyelesaian, pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan terutama tentang penyelesaian secara Perjanjian Bersama, faktor budaya dan sosial ekonomi perusahaan. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-84
Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)
Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 - 2021

Indikator	satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	0,66	0,66	0,62	0,36	0,38

Sumber: Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba, 2022

3. Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek

Persentase besaran Pekerja/Buruh yang menjadi peserta jamsostek berfluktuasi. Dimana pada tahun 2017 sebesar 0,29 persen sampai dengan tahun 2020 sampai 2021 meningkat menjadi 1 persen. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-85
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek Kabupaten
Bulukumba Tahun 2017 - 2021

Indikator	satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	0,29	0,3	0,94	1	1

Sumber: Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba, 2022

4. Besaran pencari kerja yang terdaftar yang Ditempatkan

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2018 sebesar 0,25 persen, tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 1,38 persen dan tahun 2020 sampai 2021 mengalami penurunan menjadi 1 persen. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-86
Besaran pencari kerja yang terdaftar yang Ditempatkan
Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 - 2021

Indikator	satuan	Tahun
-----------	--------	-------

		2017	2018	2019	2020	2021
Besaran pencari kerja yang terdaftar yang Ditempatkan	%	N/A	0,25	1,38	1	1

Sumber: Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba, 2022

5. Besaran Pemeriksaan Perusahaan

Besaran pemeriksaan di Perusahaan kurun waktu 2017 – 2020 berfluktuatif, dimana pada tahun 2017 sebesar 0,31 persen, naik menjadi 0,64 persen pada tahun 2018, turun sebesar 0,60 persen di tahun 2019 dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 32 persen dan menurun di tahun 2021 sebesar 20 persen. Selengkapnya pada tabel berikut

Tabel II-87
Besaran Pemeriksaan Perusahaan
Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 – 2021

Indikator	satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%	0,31	0,64	0,60	32	20

Sumber: Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba, 2022

6. Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan

Besaran pengujian peralatan di Perusahaan kurun waktu 2017 – 2020 berfluktuatif, dimana pada tahun 2017 sebesar 1 persen, pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 0,028 persen, namun pada tahun 2019 meningkat menjadi 0,826 persen dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 3 persen dan kembali mengalami penurunan di tahun 2021 sebesar 2,00. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-88
Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan
Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 – 2021

Indikator	satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	%	1	0,028	0,826	3,00	2,00

Sumber: Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba, 2022

7. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Kompetensi

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi kurun waktu 2017-2020 mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2017 turun menjadi 0,46 persen, pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 0,68 persen, pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 0,8 dan pada tahun 2020 sampai 2021 mengalami penurunan menjadi 0,52 persen. Pelatihan berbasis kompetensi sangat dibutuhkan dalam kaitan meningkatkan skill tenaga kerja agar dapat bersaing di pasar kerja. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-89
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Kompetensi
Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 – 2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Kompetensi	%	0.64	0.74	0.33	0.53	0,53

Sumber: Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba, 2022

8. Rasio lulusan S1/S2/S3

Data lulusan S1/S2/S3 dan jumlah penduduk berasal dari data statistik (Bulukumba dalam Angka) menunjukkan bahwa lulusan tertinggi yaitu pada tahun 2021 sebesar 718,00 per 10.000 penduduk dan terendah dalam kurun waktu lima tahun terakhir adalah pada tahun 2018 sebesar 439,56 per 10.000 penduduk. Peningkatan terhadap perbandingan tersebut cukup signifikan yakni sekitar 47,92 persen, menunjukkan tingkat kemampuan secara finansial dalam pembiayaan kuliah anak dan semakin tingginya kesadaran akan pentingnya pendidikan yang semakin membaik di masyarakat. Selain itu banyaknya universitas di Kabupaten Bulukumba semakin membuka peluang kelanjutan pendidikan di Kabupaten Bulukumba.

Tabel II-90
Rasio lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 - 2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Rasio lulusan S1/S2/S3		476,62	439,56	739,36	758,83	718,00

Sumber: Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba, 2022

9. Rasio daya serap tenaga kerja

Daya serap tenaga kerja dalam kurun waktu empat tahun paling tinggi pada tahun 2019 sebesar 55,42 persen sedangkan daya serap tenaga kerja terendah pada tahun 2017 sebesar 0,477 persen. Banyaknya lowongan kerja pada sektor perdagangan, wirausaha, pertanian dan lainnya. Menyebabkan peningkatan daya serap tenaga kerja pada tahun 2021 mengalami penurunan karena adanya pandemic Covid-19.

Tabel II-91
Rasio daya serap tenaga kerja Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 - 2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Rasio daya serap tenaga kerja	%	0,477	30,89	55,42	49,68	46,86

Sumber: Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba, 2022

10. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan Kewirausahaan

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan kurun waktu 2017-2021 mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 0,84 persen, pada tahun 2018 juga mengalami peningkatan menjadi 1 persen, pada tahun 2019 menurun menjadi 0,75 persen dan pada tahun 2020 sampai 2021 mengalami kenaikan sebesar 1 persen. Pelatihan berbasis kewirausahaan sangat dibutuhkan dalam memberdayakan UKM, memperluas peluang usaha, meningkatkan produktivitas UKM. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-92
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan Kewirausahaan Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 - 2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan Kewirausahaan	%	0,84	1	0,75	1	1

Sumber: Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba, 2022

11. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Masyarakat

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Masyarakat kurun waktu 2017-2020 mengalami fluktuatif, dimana, pada tahun 2017 sebesar 0,64 persen, pada tahun 2018 juga mengalami peningkatan menjadi 0,74 persen, pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 menurun menjadi 0,53 persen. Pelatihan berbasis

masyarakat sangat dibutuhkan dalam memberdayakan UKM, memperluas peluang usaha, meningkatkan produktivitas UKM. Selengkapnya pada tabel berikut

Tabel II-93
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Masyarakat
Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 - 2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Masyarakat	%	0,64	0,74	0,53	0,53	0,53

Sumber: Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba, 2022

B. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Presentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah.

Pada tahun 2017 jumlah pekerja perempuan turun menjadi 63.183 orang, namun untuk pekerja perempuan di lembaga pemerintah pada tahun yang sama berjumlah 3.677 orang (5,8%). Pada tahun 2018 jumlah pekerja perempuan meningkat sebanyak 69.149 orang sementara pekerja perempuan di lembaga pemerintah berjumlah 3601 (5,2%). Pada tahun 2019 jumlah pekerja perempuan berjumlah 83.583 orang, sementara pekerja perempuan di lembaga pemerintah menurun menjadi 3592 (4,3%) orang dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 jumlah pekerja perempuan meningkat menjadi 92.095 orang sementara jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah sebesar 3670 orang, secara keseluruhan jumlah pekerja perempuan naik dari tahun sebelumnya namun secara persentase menurun dari 4,3% menjadi 4,0%. dan di tahun 2021 persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan menurun sebesar 3,7 %

Tabel II-94
Persentase partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah Kabupaten Bulukumba
Tahun 2017 - 2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah	%	5.8	5.2	4.3	4,0	3,7

Sumber: Dinas PPKB & PPPA, Kabupaten Bulukumba 2022

2. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD

Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD Kabupaten Bulukumba dari tahun 2017 sampai tahun 2021 sebesar 40 total kursi. Pada Pemilu tahun 2019-2021 jumlah keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bulukumba meningkat menjadi 20% atau sebanyak 8 orang dari total 40 kursi DPRD. Berarti ada kenaikan persentase dari 17,50% menjadi 20%. Salah satu penyebab terjadinya peningkatan proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD adalah karena meningkatnya partisipasi yang mendukung keberdayaan perempuan.

Tabel II-95
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR
Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 - 2021

Indikator	satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	17.50	17.50	20,00	20,00	20,00

Sumber: Dinas PPKB & PPPA, Kabupaten Bulukumba 2022

3. Partisipasi perempuan di lembaga swasta.

pada tahun 2017 jumlah pekerja perempuan secara keseluruhan menurun dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 63.183 orang, sementara pekerja perempuan di lembaga swasta berjumlah 5.950 orang. Pada tahun 2018 jumlah pekerja perempuan ialah sebanyak 69.149 orang dan jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta sebanyak 6.554 orang. Kemudian pada tahun 2019 hingga tahun 2020 jumlah pekerja perempuan meningkat 83.583 orang (2019) dan 92.095 orang (2020) sedangkan jumlah partisipasi perempuan di lembaga swasta ialah sebesar 4.999 orang (2019) dan 8.842 orang (2020).

Tabel II-96
Partisipasi perempuan di lembaga swasta
Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 - 2021

Indikator	satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	63,18	69,14	83,58	92,09	92,09

Sumber: Dinas PPKB & PPPA, Kabupaten Bulukumba 2022

4. Rasio KDRT

pada tahun 2017 menjadi 46 kasus, lalu menurun pada tahun 2018 menjadi 37 kasus, tahun 2019 tercatat 83 kasus dan kembali berkurang dengan jumlah banyak hingga hanya tercatat 5 kasus. Sedangkan pada tahun 2021 tidak ditemukan data jumlah KDRT yang tercatat.

Tabel II-97
Rasio KDRT Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 - 2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Rasio KDRT	%	0,033	0,027	0,027	0,003	0,00

Sumber: Dinas PPPA, Kabupaten Bulukumba 2021

5. Partisipasi angkatan kerja perempuan

Tabel II-98
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 - 2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	95,92	96,39	96,38	97,07	97,77

Sumber: Dinas PPKB & PPPA, Kabupaten Bulukumba 2022

6. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan Terpadu

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih didalam unit pelayanan terpadu. Mulai Tahun 2017 sampai dengan 2021 semua kasus terlayani 100 % oleh pelayanan terpadu.

Tabel II-99
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan Terpadu
Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 - 2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan Terpadu	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas PPPA Kabupaten Bulukumba, 2021

7. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit.

Cakupan Perempuan dan Anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan Kesehatan oleh tenaga Kesehatan terlatih di Puskesmas maupun tatalaksana Ktp/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit .Pada tahun 2017, jumlah korban Ktp/A yang terdata datang ke puskesmas mampu tata laksana kasus Ktp/A dan ke RS disuatu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu melonjak drastis dari tahun sebelumnya menjadi 126 orang, namun yang mendapatkan pelayanan Kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas hanya sebanyak 12 orang sehingga persentase menurun dari tahun sebelumnya menjadi hanya 9.52% saja. Adapun jumlah korban Ktp/A yang terdata datang ke puskesmas pada tahun 2018 kembali meningkat menjadi 148 namun jumlah korban yang mendapatkan pelayanan kesehatan oleh tenaga Kesehatan terlatih di puskesmas juga meningkat dari sebelumnya hanya 12 kini menjadi 16 orang sehingga persentase cakupan Perempuan dan Anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan Kesehatan oleh tenaga Kesehatan terlatih di Puskesmas maupun tatalaksana Ktp/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit juga meningkat menjadi 10.81%.Tahun 2019 cakupan Perempuan dan Anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas maupun tatalaksana Ktp/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit kembali menurun yaitu sebanyak 9.38%, hal ini disebabkan karena terjadi penurunan jumlah korban yang terdata di puskesmas (namun masih tetap tinggi) yaitu sebanyak 128 orang serta adanya penurunan jumlah korban yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih dari tahun sebelumnya yang berjumlah 16 di tahun 2018 menurun menjadi 12 orang saja di tahun 2019. Tahun 2020 kembali terjadi penurunan yang cukup signifikan baik dari segi jumlah korban Ktp/A yang terdata di puskesmas atau rumah sakit (sebanyak 46 orang) maupun dari segi jumlah korban yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas atau rumah sakit (sebanyak 10 orang) sehingga persentase cakupan Perempuan dan Anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga Kesehatan terlatih di Puskesmas maupun tata laksana Ktp/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit menjadi meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 21.74% dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sbars 100 persn.

Tabel II-100

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 - 2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	9,52	10,81	9,38	21,74	100

Sumber: Dinas PPKB & PPPA, Kabupaten Bulukumba 2022

8. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

Pada Tahun 2017, persentase cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 96.83%, meskipun jumlah perkara meningkat namun rasio perkara yang diputuskan pengadilan lebih banyak, artinya banyak perkara yang terselesaikan. Pada tahun 2018 jumlah perkara yang disidangkan kembali meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2023

148 perkara dan sebanyak 144 perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undangan sehingga persentase meningkat menjadi 97.30% dari tahun sebelumnya. Tahun 2019 jumlah perkara kekerasan yang disidangkan menurun (sebanyak 128 perkara) dan lebih banyak perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undangan (sebanyak 125 perkara) sehingga persentase meningkat menjadi 97.66. Sedangkan pada tahun 2020 – 2021 persentase cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 100% karena semua perkara yang disidangkan mendapat putusan pengadilan dengan dasar perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak yaitu sebanyak 1 perkara.

Tabel II-101

Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 – 2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	96,83	97,30	97,66	100	100

Sumber: Dinas PPKB & PPPA, Kabupaten Bulukumba 2022

C. Urusan Pangan

1. Ketersediaan pangan utama

Pangan utama berdasarkan konsumsi masyarakat di Kabupaten Bulukumba adalah beras, berdasarkan hasil perhitungan capaian indikator ketersediaan pangan utama, menunjukkan bahwa kondisi ketersediaan pangan utama di Kabupaten Bulukumba masih surplus dengan kondisi pertahun rata-rata diatas 300 %. Faktor utama yang mempengaruhi stabilitas ketersediaan pangan utama adalah keseimbangan antara tingkat produksi pangan dan jumlah penduduk, ini didasarkan pada tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi pada tahun 2017 sebesar 306,75 % dan pada tahun 2018 sampai dengan 2019 mengalami kenaikan 393,10 % dan pada tahun 2020 sampai 2021 mengalami penurunan sebesar 368,95%. Seperti pada tabel berikut.

Tabel II-102

Indikator Urusan Pangan Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Ketersediaan pangan utama		306,75	381,58	393,10	389,13	368,95

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba, 2022

Pada periode 2017-2021 rata-rata pertumbuhan ketersediaan energi sebesar 542,83 Kkal/Kapita/Hari dan Protein sebesar 24,47 Gram/Kapita/Hari. Berdasarkan pengelompokan bahan makanan Kabupaten Bulukumba menunjukkan bahwa Tahun 2019 ketersediaan energi yaitu 8.424,75 Kkal/ Kapita/Hari, sementara tahun 2020 menurun sebanyak 11,88% menjadi 7.423,66 Kkal/Kapita/Hari. Rata-rata Ketersediaan energi selama 5 tahun terakhir adalah 9.458,39 Kkal/Kapita /Hari masih diatas dari nilai standarisasi ketersediaan energi sebesar 2.400 Kkal/ Kapita/Hari.

2. Ketersediaan Energi dan Ketersediaan Protein

Kondisi Ketersediaan energi dan protein perkapita Kabupaten Bulukumba pada tahun 2017 masing - masing sebesar 17.543,60 kkal/kapita/hari dan menurun sebesar menjadi 2.662,51 kkal/kapita/hari dan 69,0 gram/kapita/hari pada tahun 2021 . Seperti pada tabel berikut.

Tabel II-103
Ketersediaan Energi dan Ketersediaan Protein
Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Ketersediaan Energi	kkl/kap/hari	17.657,82	6.904,22	8.424,75	7.423,66	2.662,51
Ketersediaan Protein	gram/kap/hari	1.184,47	228,54	226,01	240,77	69,0

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba, 2022

Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan dipengaruhi oleh banyaknya jumlah komoditi yang dijadikan sampel pengawasan terhadap komoditi unggulan yang ditetapkan Kementerian. Dinas Ketahanan Pangan melakukan pengawasan sejak terbentuknya Dinas Ketahanan Pangan yaitu pada tahun 2017. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)

Persentase pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan tahun 2017 sebesar 45.45 persen dan mencapai 91 persen pada tahun 2019, dan mengalami penurunan ditahun 2021 sebesar 60 persen . Seperti pada tabel berikut . Seperti pada tabel berikut.

Tabel II-104
Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan
Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)		45.45	45.45	91	36	60

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba, 2021

3. Pola pangan harapan (PPH)

Skor Pola pangan Harapan (PPH) diperoleh dari hasil perhitungan survey konsumsi pangan pada 9 kelompok pangan meliputi : padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacang an, gula, sayuran dan buah. Selama Lima tahun terakhir capaiannya fluktuatif disebabkan karena masih rendahnya daya konsumsi pada kelompok pangan tertentu misalnya buah dan sayuran, pangan hewani yang dipengaruhi oleh daya beli dan kesadaran pola konsumsi masyarakat yang masih rendah. Capaian pada tahun 2017 mengalami kenaikan 85,7 namun pada tahun 2018-2019 mengalami penurunan menjadi 80,9 sedangkan pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 87 dan di tahun 2021 meningka sbasar 86,9 persn.

Tabel II-105
Pola pangan harapan (PPH) Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Pola pangan harapan (PPH)		85,7	85	80,9	87	86,9

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba, 2021

D. Urusan Pertanahan

1. Persentase luas lahan yang bersertifikat

Kinerja urusan Pertanahan di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat dari persentase luas lahan bersertifikat. Pemerintah Kabupaten Bulukumba memiliki kepedulian dalam memfasilitasi masyarakat guna memiliki lahan yang memiliki kekuatan hukum. Sejak tahun 2010. Pemerintah Kabupaten Bulukumba sudah memfasilitasi program pemberian sertifikat gratis bagi masyarakat yang tidak mampu.

Keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba dalam mendata aset Pemerintah berupa penerbitan sertifikat tanah melalui pendanaan secara komprehensif adalah langkah konkrit didalam menertibkan aset dan ketersediaan anggaran yang mencukupi sangat berpengaruh besar terhadap keberhasilan program dan kegiatan. Sehingga perlu dilakukan langkah konkrit dengan pelaksanaan kegiatan secara bertahap. Dimana pada tahun 2021 persentase luas lahan bersertifikat milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba sebesar 25,7 %.

Tabel II-106

Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase luas lahan yang bersertifikat	%	21,27	22,26	23,47	24,12	25,7

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba, 2022

2. Penyelesaian kasus tanah negara

Persentase Penyelesaian kasus tanah negara dari tahun 2017-2021. Pada tahun 2017 Penyelesaian kasus tanah negara mengalami peningkatan sebesar 100 persen. namun pada tahun 2018 Penyelesaian kasus tanah negara mengalami penurunan sebesar 40,00 persen, dan pada tahun 2019 Penyelesaian kasus tanah negara pada tahun mengalami peningkatan sebesar 66,67 persen, pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 50,00 persen dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 75,00 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel II-107

Penyelesaian kasus tanah Negara di Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Penyelesaian kasus tanah negara	%	100.00	40.00	66.67	50.00	75.00

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba, 2022

E. Urusan Lingkungan Hidup

1. Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air

Pengukuran indeks kualitas air telah dilakukan / dihitung dari tahun ke tahun dengan menggunakan metode indeks pencemaran (IP). Pengujian kualitas air sungai di Kabupaten Bulukumba dilakukan sebanyak 6 (enam) sungai besar yaitu Sungai Balantieng, Sungai Bijawang, Sungai Anyorang, Sungai Bialo, Sungai Lolisang, dan Sungai Raowa. Hasil pengukuran menunjukkan indeks dari tahun 2017 – 2018 menunjukkan kondisi tercemar berat dengan indeks 1,19 tahun 2017 dan indeks 2,60 tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2019 – 2020 menunjukkan kondisi baik (memenuhi baku mutu) dengan indeks 0,50 tahun 2019 serta 0,63 tahun 2020. Hasil ini tentu saja disimpulkan bahwa pengelolaan kualitas air sungai cukup baik dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Dan pada tahun 2021 kualitas air sungai cukup baik yaitu sebesar 81,36.

Tabel II-108

Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air (IKA)	%	1,19	2,60	81,90	78,23	81,36

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2022

2. Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara

Pengukuran indeks kualitas udara telah dilakukan / dihitung dimulai dari tahun 2018, sedangkan untuk tahun 2017 tidak dilaksanakan pengujian kualitas udara. Pengujian kualitas udara ambien dilakukan pada 4 (empat) titik utama yang dianggap representatif mewakili kondisi udara di Kabupaten Bulukumba. Adapun lokasi pemantauan udara yaitu BTN Ujung Bulu (perumahan), Kantor Bupati (perkantoran), Terminal (Transportasi), serta Pabrik PT.PP Lonsum, Tbk (Industri). Hasil indeks kualitas udara ambien di ke empat titik tersebut menunjukkan bahwa kualitas udara di Kabupaten Bulukumba cukup baik. Tentu ini merupakan hasil yang diharapkan dalam upaya menjaga kualitas lingkungan di Kabupaten Bulukumba khususnya kualitas udara ambien.

Tabel II-109
Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara
Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara (IKU)	%	0	85,46	90,88	88,30	84,64

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2022

3. Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan

Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan pada tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami peningkatan dimana pada tahun 2020 mencapai 23,64 persen. Tetapi pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 23,56 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II-110
Hasil Pengukuran IKTL Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Hasil Pengukuran IKTL	%	22,36	22,63	22,72	23,64	23,56

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2022

4. Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota

Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota. pada tahun 2017 sampai dengan 2019 mengalami peningkatan sebesar 82,35 persen namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 68,62 persen dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 95,93 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II-111

Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota
Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya	%	72,54	72,54	82,35	68,62	95,93

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota						

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2022

5. Terfasilitasi Pendampingan PengakuanMHA

Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA ,sejak 2017 Terbentuk 1 Kelompok Masyarakat Hukum adat Ammatoa Kajang setelah terbitnya perbub Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang

Tabel II-112
Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA
Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Terfasilitasi Pendampingan PengakuanMHA	Kelompok	1	1	1	1	1

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2022

6. Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional

Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional pada tahun 2017 sampai dengan 2021 sebesar 1 Kelompok. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II-113
Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional
Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	Klp	1	1	1	1	1

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2021

7. Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional

Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional pada tahun 2017 sampai dengan 2021 sebesar 1 Kelompok. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II-114
Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan
Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	Klp	1	1	1	1	1

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2022

8. Penetapan hak MHA

Penetapan hak MHA pada tahun 2017 sampai dengan 2021 sebesar 1 Kelompok. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II-115
Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan
Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Penetapan hak MHA	Klp	1	1	1	1	1

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2022

9. Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan

Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan pada tahun 2017 sampai dengan 2021 sebesar 100 Persen. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II-116
Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan
Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	%	100	100	100	100	100

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2022

10. Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana

Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana pada tahun 2017 sampai dengan 2021 sebesar 100 Persen. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II-117
Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana
Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana	%	100	100	100	100	100

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2022

11. Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat pada tahun 2017 sampai dengan 2022 sebesar 1 Kelompok. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II-118
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat
Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Klp	1	1	1	1	1

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2022

12. Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup

Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup pada tahun 2017 Penghargaan Adywiyata Kabupaten 9 Sekolah,Provinsi 1 Sekolah, Nasional 1 Sekolah 2018 Penghargaan Adywiyata Kabupaten 13 sekolah ,Provinsi 8 Sekolah,Nasional 1 sekolah sedangkan 2019 hanya penghargaan tingkat Kabupaten 10 Sekolah dan tahun 2020 tidak ada penilaian karena COVID-19 DAN DITAHUN 2021 sebanyak 2 sekolah

Tabel II-119
Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup
Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Sekolah	Ada	ada	ada	Tidak ada	2

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2022

13. Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerahkabupaten/kota.

Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerahkabupaten/kota. pada tahun 2017 sampai dengan 2021 sebesar 100 Persen. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II-120

Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kotaKabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerahkabupaten/kota.	%	100	100	100	100	100

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2022

14. Timbulan sampah yang ditangani

Jumlah pengurangan Timbulan sampah yang tertangani dari tahun 2017 sampai tahun 2020 berdasarkan data Jakstrada sebagai berikut, pada Tahun 2017 Jumlah timbulan sampah yang tertangani sebesar 2.521,28 Ton dengan persentase 4,18 % dari total timbulan sampah sebesar 60.331 ton. Pada Tahun 2018 Jumlah timbulan Sampah yang tertangani sebesar 10.754,36 Ton dengan persentase 17,83 % dari total timbulan sampah sebanyak 60.331 ton, pada Tahun 2019 jumlah timbulan sampah tertangani sebesar 12.767.36 ton dengan persentase 20,75 % dari total timbulan sampah sebanyak 61,538 ton sedangkan pada Tahun 2020 jumlah timbulan sampah yang tertangani sebanyak 12,957.00 ton dengan persentase 20,64 % dari total timbulan sampah sebanyak 62,769 ton. Dan pada tahun 2021 persentase timbulan sampah yang tertangani sebesar 24,95 persen.

Tabel II-121

Timbulan sampah yang ditangani
Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Timbulan sampah yang ditangani	%	4,18	17,83	20,75	20,64	24,95

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2022

15. Persentase jumlah sampah yang tertangani

Jumlah Penanganan sampah yang tertangani dari tahun 2017 sampai tahun 2020 berdasarkan data Jakstrada sebagai berikut pada tahun 2017 Jumlah sampah yang tertangani sebesar 5.801,07 Ton dengan persentase 9,60 % dari total timbulan sampah sebesar 60.331 ton, pada tahun 2018 Jumlah Sampah yang tertangani sebesar 28,329.11 Ton dengan persentase 46,96% dari total timbulan sampah sebanyak 60.331 ton, pada tahun 2019 jumlah sampah tertangani sebesar 49.275.00 ton dengan persentase 80,07 % dari total timbulan sampah sebanyak 61,538 ton, sedangkan pada tahun 2020 jumlah sampah yang tertangani sebanyak 46,172.50 ton dengan persentase 73,56 % dari total timbulan sampah sebanyak 62,769 ton. Penyebab turunnya penanganan sampah yang tertangani ditahun 2020 disebabkan karena kurangnya sarana dan prasarana dibidang pengangkutan seperti mobil pengangkut sampah dan motor sampah dan adanya proses pengelolaan sampah dari sumber melalui pemilahan di Bank sampah dengan capaian 6,51 %

Tabel II-122
Persentase jumlah sampah yang tertangani
Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	9,41	46,96	80,07	73,56	86,63

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2022

16. Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota

Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota ,Nilai TPA (Program Adipura) \geq 71 Nilai Adipura Tahun 2019 belum keluar sedangkan Adipura Tahun 2020 tidak ada karena COVID- 19 dan pada tahun 2021 Adipura keluar sebesar 26,24 persen.

Tabel II-123
TabelOperasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota
Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	%	82,20	77,03	0	0	26,24

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2022

17. Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundang-undangan (sektor industri)

Pengelolaan Limbah B3 dari industri dan fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) sesuai kewenangan yang diatur dalam PP 22 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah melakukan pengelolaan pada tempat penyimpanan sementara (TPS) Limbah B3 dan pengumpul Limbah B3.Pelaporan pengelolaan limbah B3 disesuaikan dengan peraturan bupati No 81 Tahun 2015 tentang tata cara pelaporan pengelolaan LB3 dan dilakukan secara berkala atau satu kali dalam 3 bulan.

Tabel II-124
Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai
peraturan perundang-undangan (sektor industri)
Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundang-undangan (sektor industri)	Ton/ Kg	0	22,070	36,750	25,130	35

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2022

18. Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001

Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 pada tahun 2017 sampai dengan 2021 sebesar 1 Buah. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II-125
Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001
Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	Buah	1	1	1	1	1

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2022

19. Proporsi tutupan lahan terhadap luas lahan keseluruhan

Proporsi tutupan lahan terhadap luas lahan keseluruhan pada tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami peningkatan sebesar 29,86 Persen. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II-126
Proporsi tutupan lahan terhadap luas lahan keseluruhan
Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Proporsi tutupan lahan terhadap luas lahan keseluruhan	%	22,36	22,63	22,72	23,64	29,86

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba,2022

20. Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan

Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan pada tahun 2017 sampai dengan 2021 sebesar 25 Persen. Dan pada tahun 2021 meningkat sebesar 32,36 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II-127
Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan
Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi	%	25	25	25	25	32,36

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
terhadap luas lahan keseluruhan						

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba,2022

21. Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati

Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk tahun 2017 terdapat satu dokumen keanekaragaman hayati yang priodesasinya selama 5 tahun yang digunakan sebagai dasar bagi pengolahan terpadu keanekaragaman hayati di Kabupaten Bulukumba. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II-128
Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati
Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	Dok	1	0	0	0	0

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2022

F. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat diukur melalui 7 (Tujuh) indikator. yaitu indikator rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk pada tahun 2017 sebesar 0,87% dan hingga akhir 2021 meningkat menjadi 1,64%.

Sementara itu. untuk rasio bayi berakte kelahiran pada tahun 2017 sebesar 0,63. namun pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 0,67. Dan rasio pasangan berakte nikah pada tahun 2017-2021 mengalami peningkatan pada tahun 202 sebesar 31,8, Cakupan penerbitan KTP-el pada tahun 2017 sebesar 95,74 dan pada tahun 2021 menurun menjadi dan cakupan penertiban akte kelahiran ditahun 2017 sebesar 95.74 dan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 102,72. Adapun perkembangan indikator tersebut lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-129
Perkembangan Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di
Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Rasio Penduduk ber KTP per satuan penduduk.	0,87	1	1	1	1,64
Rasio bayi berakte kelahiran.	0,63	0,67	0,71	0,40	90,5
Rasio pasangan berakte nikah.	0,03	0,03	0,05	0,05	31,8
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK.	100	100	100	100	100
Cakupan penerbitan KTP-el	95,74	100	100	99,99	102,72
Cakupan penerbitan akte kelahiran.	63,32	66,83	83,73	49,74	98,89

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba. 2021

G. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat diukur melalui indikator sebagai berikut:

1. Sarana dan Prasarana perkantoran Pemerintahan desa yang baik

Jumlah Desa yang memiliki sarana dan Prasarana perkantoran Pemerintahan desa yang baik pada tahun 2017 adalah 70 Desa dari 109 Desa di Kabupaten Bulukumba atau 64,2

%, ini disebabkan karena masih banyaknya desa yang baru membenahi Desanya baik dari segi pemerintahan desa, sarana prasarana, tata wilayah desa dan perencanaan penganggaran dan pengelolaan keuangan desa, pada tahun 2018 sampai 2019 persentase kenaikannya belum terlalu signifikan ini dibuktikan pada tahun 2018 jumlah kantor pemerintahan desa yang baik 73 Desa atau 66,9 Persen dan pada tahun 2019 jumlah kantor pemerintahan desa yang baik 74 Desa atau 67,8 %, nanti pada tahun 2020 dan 2021 terjadi perkembangan yang sangat signifikan jumlah kantor pemerintahan desa yang baik yaitu 100 desa dari 109 Desa atau 91,74 % dan 100% ini dipengaruhi oleh bebarapa hal pendukung diantaranya kesirusan pemerintah Desa dalam mengembangkan dan menata desanya sesuai dengan potensi desa yang dimiliki serta adanya dukungan anggaran baik yang bersumber dari ADD dan BDD serta tidak kalah pentingnya faktor pendukung yang sangat menentukan adalah pembinaan dan pendampingan dari pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang terus memberikan pembinaan kepada seluruh aparat pemerintahan desa baik dari segi pelaksanaan pemerintahan desa, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa, perencanaan dan penganggaran di desa, penataan kelembagaan desa dan setiap tahunnya diadakan evaluasi perkembangan desa dan Lomba desa dengan tujuan melihat sejauh mana perkembangan desa, pada tahun 2021 seluruh Desa dari 109 desa dikabupaten Bulukumba memiliki sarana dan prasana Kantor desa yang baik yang mendukung dalam proses pelayanan administrasi masyarakat di desa dan jalannya pemerintahan di desa.

Tabel II-130

**Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang Baik
Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang Baik		64,2	66,9	67,8	91,74	100

Sumber :Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulukumba, 2022

2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ada dikabupaten Bulukumba dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 memiliki kontribusi dalam hal kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa sehingga keberadaannya dibutuhkan oleh pemerintah desa dalam pelaksanaan kegiatan di Desa, namun belum Optimalnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang terdapat di 109 desa yang ada dikabupaten Bulukumba, sehingga Pemerintah kabupaten Bulukumba dalam hal ini Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa terus berupaya melakukan pembinaan dan koordinasi kepada Pemerintah Desa agar desa yang belum optimal dan belum jalan lembaga pemberdayaannya agar kiranya di aktifkan kembali guna menunjang program pemerintah Desa.

Tabel II-131

**Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)
Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)		93	93	93	93	93

Sumber :Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulukumba, 2022

3. Kelompok Binaan PKK

Jumlah PKK yang ada di kabupaten Bulukumba dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 terdiri 146 kelompok yang terdiri dari 109 PKK ditingkat Desa, 27 kelompok PKK tingkat kelurahan dan 10 kelompok PKK di tingkat Kecamatan. Keberadaan PKK ditingkat desa/Kelurahan dan Kecamatan memiliki peran yang sangat aktif, baik itu kegiatan yang ada di desa/Kelurahan, Kecamatan maupun kegiatan ditingkat Kabupaten. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan memiliki peran penting dalam proses pembangunan serta pemanfaatan potensi sumber daya alam di desa/kelurahan maupun di kecamatan untuk dikelola semaksimal mungkin dalam peningkatan taraf hidup masyarakat di desa terutama kalangan ibu rumah tangga, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bekerjasama dengan Pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Bulukumba dari tahun 2017 sampai 2021 senantiasa melakukan pembinaan dan pendampingan kepada kelompok Binaan PKK yang ada ditingkat kecamatan, Desa dan Kelurahan agar lebih aktif dan produktif mengambil peran dalam kegiatan pemberdayaan ibu rumah tangga di Desa baik itu dalam hal sosialisasi terkait Pemanfaatan halaman rumah tangga yang produktif, manfaat pemberian ASI eksklusif untuk bayi, Pencegahan Gizi buruk untuk anak balita serta kegiatan lainnya yang berkontribusi dalam hal pembangunan ditingkat Desa/kelurahan.

Tabel II-132

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK		146	146	146	146	146

Sumber :Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulukumba, 2022

4. Persentase PKK Aktif

Persentase PKK aktif dari tahun 2017 sampai dengan 2021 di Kabupaten Bulukumba setiap tahunnya 146 PKK dari Jumlah PKK di kabupaten Bulukumba atau setiap tahunnya mencapai target angka 100 %. Kegiatan PKK baik itu ditingkat Desa/Kelurahan, kecamatan dan kabupaten setiap tahunnya dilaksanakan sebagai wujud peran aktif PKK dalam proses pembangunan dan pemberdayaan perempuan, diharapkan kedepan dalam menunjang Kegiatan PKK ditingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten dibutuhkan dukungan penganggaran yang cukup baik itu yang bersumber dari dana Desa dan APBD kabupaten, dalam hal sosialisasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia kader dan pengurus PKK, kegiatan sosialisasi dan penyediaan sarana dan prasarana penunjang dan penataan kelembagaan.

Tabel II-133

Persentase PKK aktif Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase PKK aktif		100	100	100	100	100

Sumber :Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulukumba, 2022

5. Posyandu Aktif

Persentase Posyandu aktif pada tahun 2017 adalah (99,63%) 544 Posyandu dari jumlah Posyandu 546 posyandu yang tersebar di 10 Kecamatan di kabupaten Bulukumba, yang diklasifikasikan dalam empat tingkatan strata yaitu pratama, Madya, Purnama dan Mandiri, dan pada tahun 2015 samapai 2016 tingkatan posyandu di Bulukumba terdiri dari : Pratama 137 Posyandu, Madya 255 Posyandu, Purnama 151 Posyandu dan mandiri 3 Posyandu, Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam hal ini dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berkoordinasi dengan OPD terkait dalam hal ini dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba untuk terus berusaha dalam peningkatan jumlah posyandu dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2023

peningkatan strata posyandu setiap tahunnya, dan alhamdulillah pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 total jumlah Posyandu di kabupaten Bulukumba mengalami peningkatan dari sebelumnya 546 posyandu menjadi 577 Posyandu, ada penambahan 31 jumlah posyandu dan persentase posyandu aktif mencapai angka 100 %. Adapun klasifikasi tingkatan Posyandu di tahun 2019 sampai 2020 terdiri dari : Pratama 147 Posyandu, Madya 274 Posyandu, Purnama 153 Posyandu dan Mandiri 3 Posyandu. Untuk lebih meningkatkan strata posyandu diperlukan dukungan penganggaran dan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis untuk Peningkatan Kapasitas Sumber daya manusia kader posyandu yang ada ditingkat desa serta sarana dan prasarana penunjang lainnya, ini menjadi tugas dan target kinerja tahun berikutnya agar kiranya strata posyandu atau tingkatan posyandu strata mandiri dapat ditingkat jumlah posyandu yang tersebar di sepuluh Kecamatan di Kabupaten Bulukumba.

Tabel II-134
Persentase Posyandu aktif Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Posyandu aktif		99,63	99,63	99,63	100	100

Sumber :Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulukumba, 2022

6. Program Pemberdayaan Masyarakat

Program pemberdayaan masyarakat desa dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 berjalan dengan baik dimana setiap tahunnya desa melakukan kegiatan baik itu sifatnya pembangunan infrastruktur dan kegiatan yang sifatnya pemberdayaan yang melibatkan masyarakat dan seluruh potensi yang ada didesa tersebut dengan tujuan menggerakkan roda perekonomian didesa sesuai dengan tujuan pengelolaan dana desa, bahwa dana desa tersebut dikelola dan dirasakan sendiri manfaatnya oleh masyarakat yang ada di desa tersebut., Pengelolaan dana Desa diatur dalam beberapa peraturan tentang petunjuk teknis pengelolaan dana Desa diantaranya : Permendagri No.20 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana Desa, PMK No.205/PMK 07/2019 tentang pengelolaan dana Desa, PP No.60 tahun 2014 tentang dana Desa yang bersumber dari APBN dan Perbub No.69 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa. Salah satu kegiatan peningkatan ekonomi di desa dengan dibentuknya Bumdes di 109 Desa dengan tujuan agar usaha ekonomi kecil menengah dan potensi unggulan didesa dapat dimanfaatkan dan dikembangkan melalui wadah Bumdes, namun kendala yang dihadapi dalam program pemberdayaan masyarakat adalah masih kurangnya pengetahuan masyarakat desa terkait dengan peran aktif masyarakat dalam program pemberdayaan, Perlunya peningkatan kapasitas Sumber daya manusia aparat pemerintah desa serta pengelola kegiatan termasuk didalamnya pengurus Bumdes, Perlunya penataan Kelembagaan di desa dengan baik agar menunjang program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh pemerintah desa dan Pemerintah Kabupaten. Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa telah melakukan berbagai upaya pembinaan dan pendampingan termasuk didalamnya melakukan pelatihan dan sosialisasi kepada aparat pemerintah desa, pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat didesa termasuk didalamnya pengelola Bumdes, namun kendala yang kami hadapi adalah kurangnya penganggaran yang bersumber dari APBD kabupaten dalam melaksanakan pembinaan dan pelatihan di 109 Desa di Kabupaten Bulukumba.

Tabel II-135
**Persentase LSM aktif dan Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga
Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase LSM aktif		100	100	100	100	100
Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)		93	93	93	93	93

Sumber :Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulukumba, 2022

H. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Aspek kependudukan merupakan hal paling mendasar dalam pembangunan. Dalam nilai universal, penduduk merupakan pelaku dan sasaran pembangunansekaligus yang menikmati hasil pembangunan. Dalam kaitan peran penduduk tersebut, kualitas mereka perlu ditingkatkan melalui berbagai sumber daya yang melekat, dan pewujudan keluarga kecil yang berkualitas, serta upaya untuk menskenario kuantitas penduduk dan persebaran kependudukan.

Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor yang penting dalam masalah sosial ekonomi umumnya dan masalah penduduk pada khususnya. Karena disamping berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk juga akan berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi suatu daerah atau negara maupun dunia.

1. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah 1) Kelahiran. Kelahiran bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain menikah di usia muda dan tidak melaksanakan program keluarga berencana yang menyebabkan meningkatnya angka kelahiran. Adapun kesertaan KB pada pasangan usia subur menjadi penghambat jumlah kelahiran. 2) Kematian. Kematian juga dapat di pengaruhi beberapa faktor yaitu pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yang menyebabkan angka kematian antara lain, tidak menjaga kesehatan, kurang sarana kesehatan di wilayah tersebut seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Apotik, kemiskinan yang berlebihan yang menyebabkan kurangnya asupan gizi, wilayah berperangan, bencana alam, pola makan tidak teratur dan wabah penyakit. Adapun faktor yang menghambat kematian antara lain menjaga kesehatan, pola makan yang teratur, makan yang bergizi, sedikitnya angka kemiskinan, sarana kesehatan yang lengkap. 3) Migrasi. Penduduk yang datang bisa saja orang yang dari luar wilayah datang ke wilayah kita yang bertujuan untuk menetap, belajar, atau bekerja, hal ini bisa menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk. Sebaliknya penduduk yang pergi ke wilayah lain yang bertujuan untuk menetap, belajar, atau bekerja, dalam jumlah yang banyak, seperti menjadi TKI, bisa menyebabkan menurunnya jumlah penduduk. Beberapa faktor tersebut yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bulukumba Pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 0,60 persen. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar 0,63 persen. Tahun 2019 kembali mengalami penurunan menjadi 0,54 persen namun pada tahun 2020 sampai 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,57 sampai 1,04 persen. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-136

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,60	0,63	0,54	0,57	1,04

Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2022

2. Total Fertility Rate (TFR)

Untuk menunjang keberhasilan pembangunan, juga untuk menangani permasalahan penduduk antara lain meliputi jumlah, komposisi dan distribusi penduduk maka diperlukan adanya upaya pengendalian jumlah penduduk. Pengendalian fertilitas merupakan salah satu cara untuk mengendalikan jumlah penduduk. Dan pengendalian jumlah penduduk lainnya adalah mortalitas (kematian) dan migrasi (perpindahan tempat).

Total Fertility Rate (TFR) merupakan jumlah rata-rata anak yang dilahirkan setiap perempuan, dan merupakan ukuran untuk seluruh perempuan usia 15-49 tahun yang dihitung berdasarkan angka kelahiran menurut kelompok umur. Banyak faktor yang mempengaruhi Angka Kelahiran Total (TFR) yaitu tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan penggunaan alat kontrasepsi, serta tingkat urbanisasi.

Tingkat pendapatan yang semakin tinggi akan semakin besar pengaruhnya terhadap penurunan fertilitas yang terjadi, karena orangtua menginginkan kualitas yang baik untuk anak-anaknya. Demikian juga jika pendidikan dan kesehatan seseorang semakin tinggi akan berpengaruh terhadap penurunan fertilitas, terlebih jika didukung dengan penggunaan alat kontrasepsi untuk mengendalikan kelahiran demi kualitas generasi. Pada tahun 2017 sampai dengan 2021. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 2,320 persen. Tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 2,309 persen. Pada tahun 2019 kembali mengalami peningkatan sebesar 2,320 persen dan tahun 2020 sampai 2021 kembali mengalami penurunan menjadi 2,318 sampai 2,309 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-137

Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Total Fertility Rate (TFR)	%	2,320	2,309	2,320	2,318	2,309

Sumber : Dinas PPKB Kabupaten Bulukumba, 2021

3. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung Kb

Capaian persentase perangkat daerah yang berperan aktif dalam membangun daerah melalui Kampung KB di, tahun 2017 terbentuk 10 Kampung KB dan ditahun 2018 terbentuk 11 kampung KB. Sehingga persentase keterlibatan OPD di Tahun awal pembentukan belum maksimal yang mendukung terkait dengan kampung KB. Namun di tahun 2019 dan tahun 2020 ada peningkatan keterlibatan OPD terkait dengan pembentukan Kampung KB dan pada tahun 2021 mengalami penurunan.

Tabel II-138

Persentase Perangkat Daerah(Dinas/Badan) Yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung Kb Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase perangkat daerah(dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	%	27.78	30.56	61.11	61.11	27,7

Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2022

4. Persentase Perangkat Daerah Dinas/Badan yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk

Persentase Perangkat Daerah Dinas/Badan yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk pada tahun 2017 sampai pada tahun 2021. Pada tahun 2017 sebesar 41,67 persen dan tahun 2018 menurun sampai dengan tahun 2020 menjadi 8,33 persen dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 11,11 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-139

Persentase Perangkat Daerah Dinas/Badan Yang Menyusun Dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Kabupaten Bulukumba 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Perangkat Daerah Dinas/Badan yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	%	41,67	8,33	8,33	8,33	11,11

Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2022

5. Jumlah Kebijakan (Peraturan daerah/peraturan kepala daerah) yg mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk

Jumlah Kebijakan (Peraturan daerah/peraturan kepala daerah) yg mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 masing-masing di tetapkan 1 dokumen. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-140

Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) Yg Mengatur Tentang Pengendalian Kuantitas Dan Kualitas Penduduk Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Kebijakan (Peraturan daerah/peraturan kepala daerah) yg mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Dok	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2022

6. Jumlah Sektor Yg Menyepakati Dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter Dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Program Pembangunan

Jumlah sektor yg menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 ada enam organisasi perangkat daerah yang memanfaatkan data profil. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-141

Jumlah Sektor Yg Menyepakati Dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter Dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Program Pembangunan Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah sektor yg menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan		1. Dinas DUK CAPIL 2. BAPPEDA 3. DIKNAS 4. DINKES 5. BPS 6. DPPKB	1. Dinas DUK CAPIL 2. BAPPEDA 3. DIKNAS 4. DINKES 5. BPS 6. DPPKB	1. Dinas DUK CAPIL 2. BAPPEDA 3. DIKNAS 4. DINKES 5. BPS 6. DPPKB	1. Dinas DUK CAPIL 2. BAPPEDA 3. DIKNAS 4. DINKES 5. BPS 6. DPPKB	1, Dinas DUK CAPIL 2, BAPPEDA 3, DIKNAS 4, DINKES 5, BPS 6, DPPKB

Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2022

7. Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, Dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan

Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 ada tiga organisasi perangkat daerah yang melakukan pendidikan kependudukan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-142

Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, Dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan		1. Disdikbud2 . IBI 3. Panti Asuhan Aisyah	1. Disdikbud2 . IBI 3. Panti Asuhan Aisyah	1. Disdikbud 2. IBI 3. PKBM	1. Disdikbud2 . IBI 3. PKBM	1. Dinas Pendidikan 2, IBI 3, PKBM

Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2022

8. Rata-rata jumlah anak per keluarga

Rata-rata jumlah anak per keluarga pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Pada Tahun 2017 sebesar 22.42 persen, tahun 2018 mengalami peningkatan sebanyak 22.47 persen, tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi 20.39 persen pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 20,25. Selengkapnya dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-143

Rata-rata jumlah anak per keluarga Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Rata-rata jumlah anak per keluarga	%	22,42	22,47	21,46	20,39	20,25

Sumber : Dinas PPKB Kabupaten Bulukumba, 2021

9. Ratio Akseptor KB

Salah satu cara untuk menekan laju pertumbuhan penduduk adalah melalui program KB. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dicanangkan untuk mengetahui tingkat Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Rasio akseptor KB di Kabupaten Bulukumba pada kurun waktu 2017 hingga 2021. Mengalami peningkatan mulai dari tahun 2017 sebesar 8.47 persen sampai dengan tahun 2020 menjadi 13.47 persen dan mengalami penurunan ditahu 2021 sebesar 5,55 persn. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-144

Ratio Akseptor KB Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Ratio Akseptor KB	%	8,47	10,80	12.16	13,47	5,55

Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2022

10. Angka Pemakaian Kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15-49

Angka pemakaian kontrasepsi yang lazim disebut Contraceptive Prevalence Rate (CPR) adalah persentase perempuan usia reproduktif yang menggunakan (atau yang pasangannya menggunakan) suatu metode kontrasepsi pada suatu waktu tertentu. CPR hampir selalu dilaporkan untuk perempuan kawin atau perempuan yang memiliki pasangan seksual. CPR dapat digunakan untuk mengukur pemakaian semua metode kontrasepsi, baik yang tradisional maupun modern. Angka pemakaian kontrasepsi bagi perempuan menikah usia 15 - 49 di Kabupaten Bulukumbaberfluktuatif dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2017 sebesar 79.00 sampai dengan tahun 2018 menjadi 79.19 namun tahun 2019 sampai tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 74,05 persen.

Tabel II-145

Angka Pemakaian Kontrasepsi/ CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Angka Pemakaian Kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	%	79,00	79,19	75,28	74,97	74,05

Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2022

11. Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) Per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19)

Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19)per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 tidak mengalami kenaikan yaitu 89.79 persen. Selengkapnya dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-146

Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19)Per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19) Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19)per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	%	89,79	89,79	89,79	89,79	89,79

Sumber : Dinas PPKB Kabupaten Bulukumba, 2021

12. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Istrinya Dibawah 20 Tahun

Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2017 sebesar 3.96 persen meningkat sampai tahun 2019 sebesar 4.28 persen namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 4.25 persen dan tahun 2021 meningkat kembali sebesar 4,35. Selengkapnya dilihat pada tabel berikut

Tabel II-147

Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Istrinya Dibawah 20 Tahun Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	3,96	4,20	4,28	4,25	4,35

Sumber : Dinas PPKB Kabupaten Bulukumba, 2021

13. Cakupan PUS Yang Ingin Ber- KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)

Bahwa selama ini unmet need menjadi penyumbang cukup besar terhadap belum berpartisipasi PUS dalam Program Kependudukan Keluarga Berencana. Berdasarkan 7persentase capaian unmet need pada tahun 2017 sebesar 16.67 dari total PUS sampai pada tahun 2021 sebanyak 10.78 belum ber KB selebihnya adalah hamil dan ingin anak segera, PUS yang hamil dan ingin anak segera secara normative adalah bukanlah sasaran penyuluh agar mau Ber- KB sehingga PUS dalam kategori IKT dan IKD ini yang harus digarap agar menjadi peserta KB. Fenomena unmet need KB bersifat multidimensial karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti karakteristik demografi sosial ekonomi, sikap dan kualitas pelayanan.

Tabel II-148

Cakupan PUS Yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	16.67	16.58	15.68	11.74	10,78

Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2022

14. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Untuk Indikator Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang Pada Tahun 2017 11,55 , tahun 2018 48,66. Disini kita dapat lihat bahwa setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Adapun penyebab meningkatnya Persentase Punggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang adalah adanya kesadaran masyarakat untuk ber-KB dan menggunakan Alat Kontrasepsi Jangka Panjang untuk menjarangkan kehamilan dan menjaga jarak kelahiran, juga dapat mengurangi resiko kematian ibu dan bayi karena jarak kelahiran yang terlalu dekat.

Sedangkan persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang pada tahun 2019 33.37. Penyebab menurunnya persentase penggunaan MKJP yaitu dropping alokon dari BKKBN Pusat sangat terbatas karena ada masalah internal di BKKBN Pusat terkait pengadaan ALOKON MKJP, sehingga berpengaruh pada penggunaan MKJP.

Dan, untuk tahun 2020 persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang 18,51. disini bisa dilihat bahwa mengalami penurunan yang sangat signifikan disebabkan karena pada bulan maret 2020 wabah Covid-19 melanda Indonesia sehingga pelayanan KB di seluruh Indonesia terbatas dan rata rata faskes tidak bisa melayani pemasangan Alokon MKJP akan tetapi pada tahun 2021 mulai mengalami peningkatan sebesar 20.57.

Tabel II-149

Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	%	11.55	48.66	33.37	18.51	20,57

Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2022

15. Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi

Indikator Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi Tahun 2017 12,90%, Sedangkan persentase keberlangsungan pemakaian kontrasepsi pada tahun 2019 11,96 Penyebab menurunnya keberlangsungan pemakaian kontrasepsi yaitu dropping alokon dari BKKBN Pusat sangat terbatas karena ada masalah internal di BKKBN Pusat terkait pengadaan ALOKON MKJP, sehingga berpengaruh pada penggunaan MKJP.

Sedangkan tahun 2021 kembali mengalami peningkatan dengan persentase 35,05 dikarenakan Dropping Alokon dari BKKBN Pusat sudah stabil sehingga pemakaian kontrasepsi bisa meningkat.

Tabel II-150
Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi
Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	12.90	36.80	11.96	39.94	35,05

Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2022

16. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita

Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2017 Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita sebanyak 41.38 persen sampai pada tahun 2021 terus mengalami peningkatan sebanyak 80.05 persen. Selengkapnya dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-151
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita
Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita	%	41,38	50,76	57,54	80,97	80,05

Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2022

17. Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja ber- KB

Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja ber- KB pada tahun 2017 sampai dengan 2021. Pada tahun 2017 Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja ber- KB sebanyak 39.18 persen sampai pada tahun 2021 terus mengalami peningkatan sebanyak 76.29 persen. Selengkapnya dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-152
Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja ber- KB
Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja ber- KB	%	39,18	46,67	55,74	71,54	76,29

Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2022

18. Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia ber- KB

Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia ber- KB pada tahun 2017 sampai dengan 2021. Pada tahun 2017 Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja ber- KB sebanyak 23.11 persen sampai pada tahun 2021 terus mengalami peningkatan sebanyak 75.31 persen. Selengkapnya dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-153
Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia ber- KB
Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia ber- KB	%	23,11	43,50	47,16	71,88	75,31

Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2022

19. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Di Setiap Kecamatan

Pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan pada tahun 2017 sampai tahun 2021 tidak mengalami peningkatan yaitu 10 persen. Selengkapnya dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-154
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Di Setiap Kecamatan
Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	10	10	10	10	10

Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2022

20. Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa

Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa pada tahun 2017 sampai tahun 2021. Pada tahun 2017 Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa sebanyak 75.60 persen Tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 3.60 persen sampai pada tahun 2019 namun di tahun 2021 mengalami peningkatan sebanyak 4.30 persen. Selengkapnya dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-155
Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa
Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa	%	75,60	3,60	3,60	4,30	4,30

Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2022

21. Cakupan PKB/PLKB Yang Didayagunakan Perangkat Daerah Kb Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Bidang Pengendalian Penduduk

Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 tidak mengalami peningkatan yaitu 100 persen. Selengkapnya dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-156
Cakupan PKB/PLKB Yang Didayagunakan Perangkat Daerah Kb Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Dibidang Pengendalian Penduduk
Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2022

22. Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Yang Ber- KB Mandiri

Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber- KB mandiri pada tahun 2017 sampai pada tahun 2021. Pada tahun 2017 sebanyak 1.09 persen. Tahun 2018 mengalami penurunan samapai pada tahun 2021 yaitu 50,72 persen. Selengkapnya dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-157

Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Yang Ber- KB Mandiri Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber- KB mandiri	%	1,09	0,19	0,16	0,15	50,72

Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2022

23. Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa PPKBD Setiap Desa/ Kelurahan

Rasio petugas pembantu pembina kB Desa PPKBD setiap Desa/ Kelurahan pada tahun 2017 sampai pada tahun 2021. Pada tahun 2017 sampai pada tahun 2021 tidak mengalami peningkatan atau penurunan yaitu 100 persen Selengkapnya dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-158

Perkembangan Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Rasio petugas pembantu pembina kB Desa PPKBD setiap Desa/ Kelurahan	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2022

24. Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat

Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat pada tahun 2017 sampai pada tahun 2021. Pada tahun 2017 sampai pada tahun 2020 tidak mengalami peningkatan atau penurunan yaitu 100 persen aakan tetpi pd thun 2021 mngalami penurunan sebear 83,85 peren .Selengkapnya dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-159

Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	100	100	100	100	85,35

Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2022

25. Persentase Faskes Dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerjasama Dengan BPJS Dan Memberikan Pelayanan KB/KR Yang Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan

Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KB/KR yang sesuai dengan standarisasi pelayanan. Pada tahun 2017 sebanyak 100 persen namun Tahun 2018 mengalami penurunan sampai tahun 2020 yaitu 23.56 persen dan kembali meningkat sebesar 100 persen di tahun 2021. Selengkapnya dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-160

Persentase Faskes Dan Jejaringnya Yang Bekerjasama Dengan BPJS Dan Memberikan Pelayanan KB/KR Yang Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KB/KR yang sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	100	23,56	23,56	23,56	100

Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2022

26. Cakupan Penyediaan Informasi Data Makro Keluarga Di Setiap Desa

Cakupan penyediaan informasi data makro keluarga di setiap desa pada tahun 2017 sampai tahun 2021 tidak mengalami peningkatan atau penurunan yaitu 100 persen. Selengkapnya dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-161

Cakupan Penyediaan Informasi Data Makro Keluarga Di Setiap Desa Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Cakupan penyediaan informasi data makro keluarga di setiap desa	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2022

27. Persentase Remaja Yang Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)

Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) pada tahun 2017 sampai pada tahun 2021. Tahun 2017 sampai tahun 2017 Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) 0.004 persen namun pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 0 persen. Selengkapnya dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-162

Persentase Remaja Yang Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	%	0,004	0	0	0	0

Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2022

28. Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga

Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga pada tahun 2017 sampai pada tahun 2021. Pada tahun 2017 Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga sebanyak 89,16 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 61,85 persen dan meningkat pada tahun 2018 sampai pada tahun 2020 100 persen namun di tahun 2021 kembali mengalami penurunan sebesar 7,60. Selengkapnya dilihat pada tabel berikut

Tabel II-163

Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	61,85	89,16	89,16	100,00	7,60

Sumber : Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Bulukumba, 2022

29. Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita Dan Anak Yang Memahami Dan Melaksanakan Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak pada tahun 2017 Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak sebesar 35,16 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 14,05 persen dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 samapai dengan tahun 2019 sebesar 53,44 persen dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 20,16 persen dan di tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 20,59 persen. selengkapnya dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-164

Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita Dan Anak Yang Memahami Dan Melaksanakan Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	%	14,05	51,08	53,44	20,16	20,59

Sumber : Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Bulukumba, 2022

30. Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita

Rata-rata usia kawin pertama wanita pada tahun 2017 sampai pada tahun 2021 terus mengalami peningkatan, pada tahun 2017 sebanyak 21,00 persen dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 22,14 persen dan kembali menurun di tahun 2020 sampai 2021 sebesar 22,00 peren. Selengkapnya dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-165

Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Rata-rata usia kawin pertama wanita	%	21,00	22,00	22,14	22,00	22,00

Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2022

31. Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD dan APBDes

Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes pada tahun 2017 sampai pada tahun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2023

2021. Pada tahun 2017 0,0057 persen namun pada tahun 2018 capaian indikator mengalami penurunan menjadi 0 persen, pada tahun 2019 meningkat menjadi 0,0057 dan pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi 0 persen, dan pada tahun 2021 sebesar Selengkapnya dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-166

Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	%	0,0057	0	0,0057	0	0,618

Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2022

I. Urusan Perhubungan

1. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Jumlah arus penumpang angkutan Umum pada tahun 2017-2021, pada tahun 2017 sebanyak 31.000 sampai pada tahun 2021 mengalami penurunan sebanyak 17.500 jumlah penumpang ini diakibatkan karena beberapa angkutan yang mengalami kerusakan yang sudah tidak layak apalagi di pengaruhi adanya angkutan seperti TAXI dan banyaknya masyarakat yang mempunyai kendaraan pribadi.

Tabel II-167

Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah arus penumpang angkutan Umum	Unit	31.000	28.500	24.000	17.000	17.500

Sumber :Dinas Perhubungan Kabupaten Bulukmba, 2022

2. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis pada tahun 2017-2021. Pada tahun 2017 jumlah pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis sebanyak 3 unit di antanranya jumlah pelabuhan sebanyak 2 unit yaitu pelabuhan Leppe dan Pelabuhan Bira 1 Terminal Bulukumba.

Tabel II-168

Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Buah	3	3	3	3	3

Sumber :Dinas Perhubungan Kabupaten Bulukmba, 2022

3. Persentase layanan angkutan darat

Persentase layanan angkutan darat tahun 2017 -2021. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 2.61 persen dari tahun sebelumnya sampai pada Tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 0,0035 persen. Ini diakibatkan kurangnya layanan sehingga kendaraan angkutan tidak beroperasi.

Tabel II-169
Persentase Layanan Angkutan Darat
Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase layanan angkutan darat	%	2.61	1.83	1.57	1.18	0,0035

Sumber :Dinas Perhubungan Kabupaten Bulukmba, 2022

4. Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Persentase kepemilikan KIR angkutan umum pada tahun 2017-2021. Pada Tahun 2017 sebesar 41.82 persen. Tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 14.8 persen. Tahun 2019 kembali mengalami peningkatan sebesar 31.06 persen dan pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi 86.8 persen. Dan Ditahun 2021 Pengujian Kendaraan tidak beroperasi, dikarenakan Peralatan untuk uji KIR Kendaraan mengalami kerusakan

Tabel II-170
Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum
Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	41.8	14.8	31.6	86.8	-

Sumber :Dinas Perhubungan Kabupaten Bulukmba, 2022

5. Pemasangan Rambu-rambu

Pemasangan Rambu-rambu pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Pada Tahun 2017 mengalami peningkatan sebanyak 57 buah dan tahun 2018 sampai pada tahun 2020 itu mengalami penurunan 0 Buah. Ini diakibatkan pada tahun 2020 tidak melakukan pemasangan kurangnya anggaran yang dialokasikan pada program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ). Ditahun 2021 tidak ada pemasangan rambu2 disebabkan keterbatasan anggaran yang diberikan

Tabel II-171
Pemasangan Rambu-Rambu Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Pemasangan Rambu-rambu	%	57	1.5	0.5	0	-

Sumber :Dinas Perhubungan Kabupaten Bulukmba, 2022

6. Jumlah Orang/ Barang Yang Terangkut Angkutan Umum

Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum pada tahun 2017 sampai tahun 2021. Pada tahun 2017 Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum sebanyak 25.500 unit sampai pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 14.448 unit. Ini diakibatkan karena banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan.

Tabel II-172
Jumlah Orang/ Barang Yang Terangkut Angkutan Umum
Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Orang	25.500	23.500	20.500	14.500	14.448

Sumber :Dinas Perhubungan Kabupaten Bulukmba, 2022

7. Rasio Ijin Trayek

Rasio ijin trayek pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2017 Rasio ijin trayek sebesar 0.002 Persen. Sampai pada tahun 2021 terus mengalami penurunan sebesar 0.001 Persen. Ini diakibatkan karena jumlah ijin trayek karena semakin banyaknya angkutan yang beroperasi pada tahun 2020.

Tabel II-173

Rasio Ijin Trayek Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Rasio ijin trayek	%	0.002	0.001	0.008	0.005	0,001

Sumber :Dinas Perhubungan Kabupaten Bulukmba, 2022

J. Urusan Komunikasi dan Informatika

1. Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer

Urusan komunikasi dan informatika dapat dilihat dari indikator. Proporsi rumah tangga yang memiliki computer pribadi dari tahun 2017 ketahun 2017 mengalami peningkatan 48% sedangkan ditahun 2018 tidak dilakukan survey karena tidak ada data dari statistik sektoral sedangkan pada tahun 2019 mengalami fluktuatif sedangkan pada tahun 2020 sampai 2021 tidak dilakukan survey karena adanya covid 19 sehingga diadakan pembatasan dan tidak adanya data dari statistik sektoral. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-174

Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer	%	62	Tidak dilakukan survey	60	Tidak dilakukan survei	Tidak dilakukan survei

Sumber : Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Bulukmba, 2022

2. Cakupan Layanan Telekomunikasi

Urusan komunikasi dan informatika dapat dilihat dari indikator Cakupan Layanan Telekomunikasi Cakupan layanan komunikasi dari Tahun 2017 sampai tahun 2021 mengalami peningkatan 67%. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-175

Cakupan Layanan Telekomunikasi Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Cakupan Layanan Telekomunikasi		1.154,58	1.154,58	1.154,58	1.154,58	1.154,58

Sumber : Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Bulukmba, 2022

3. Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon

Urusan komunikasi dan informatika dapat dilihat dari indikator Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon mengalami fluktuatif dari tahun 2017 sampai tahun 2019 sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 tidak dilakukan survey karena adanya covid 19 sehingga diadakan pembatasan. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-176

Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	78	82	82	Tidak dilakukan survei	Tidak dilakukan survei

Sumber : Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Bulukumba, 2022

4. Proporsi rumah tangga dengan akses internet

Urusan komunikasi dan informatika dapat dilihat dari indikator Proporsi rumah tangga dengan akses internet. Proporsi rumah tangga dengan akses internet pada tahun 2017 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 tidak dilakukan survey karena adanya covid 19 sehingga diadakan pembatasan dan tidak adanya data dari statistik sektoral. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-177
Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet
Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Proporsi rumah tangga dengan akses internet		33	39	0	Tidak dilakukan survei	Tidak dilakukan survei

Sumber : Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Bulukumba, 2022

5. Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer Pribadi

Urusan komunikasi dan informatika dapat dilihat dari indikator Proporsi rumah tangga dengan akses internet pada tahun 2017 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2020 tidak dilakukan survey karena adanya covid19 sehingga diadakan pembatasan dan tidak adanya data dari statistik sektoral. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-178
Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi
Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer Pribadi		62	0	60	Tdk dilakukan survey	Tdk dilakukan survey

Sumber : Dinas Kominfo Kabupaten Bulukumba, 2022

6. Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah

Urusan komunikasi dan informatika dapat dilihat dari indikator Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah. persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah dari tahun 2017 sampai 2021 mencapai target. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-179
Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun
-----------	--------	-------

	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Bulukumba, 2022

K. Urusan Koperasi Usaha Kecil Menengah

1. Persentase Koperasi Aktif

Perkembangan persentase koperasi aktif pada tahun 2017-2021 secara umum mengalami peningkatan, yaitu tahun 2017 persentase koperasi aktif Tren peningkatan persentase koperasi aktif ini disebabkan oleh pembinaan, pendampingan serta penyuluhan yang dilakukan serta kesadaran dari para pengurus dan anggota koperasi itu sendiri, dilihat pada Tabel berikut.

Tabel II-180
Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase koperasi aktif	%	72,14	72,28	72,32	72,66	73,01

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bulukumba tahun 2022

2. Perkembangan Persentase Usaha Mikro Dan Kecil

Untuk perkembangan persentase usaha mikro dan kecil pada tahun 2017-2021 secara umum mengalami peningkatan setiap tahunnya, yaitu untuk tahun 2017 jumlah usaha mikro dan kecil sebesar 34.053 usaha dari total jumlah UMKM secara keseluruhan sebanyak 35.595 usaha atau persentase sebesar 95,67 %, dan tahun 2018 jumlah usaha mikro dan kecil sebesar 37.720 usaha dari total jumlah UMKM sebanyak 39.262 usaha atau persentase sebesar 96,07 %, dan tahun 2019 jumlah usaha mikro dan kecil sebanyak 38.120 dari total jumlah UMKM sebanyak 39.662 usaha atau persentase sebesar 96,11%, serta hingga akhir tahun 2020 jumlah usaha mikro dan kecil sebanyak 76.064 dari total jumlah UMKM sebanyak 77.586 usaha atau persentase sebesar 98,04 %. Capaian ini tentu perlu diapresiasi secara positif karena menjadi tanda bahwa perekonomian UKM di Kabupaten Bulukumba cukup hidup dan berkontribusi baik bagi masyarakat.

Secara lengkap indikator urusan koperasi dan usaha kecil menengah di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel II-181
Persentase Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	95,67	96,07	96,11	98,04	98,29

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bulukumba tahun 2022

L. Urusan Penanaman Modal

1. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Urusan penanaman modal diukur melalui indikator. yaitu jumlah investor berskala nasional baik PMA maupun PMDN. Jumlah PMA/PMDN pada tahun 2017 sebanyak 60 Buah, tahun 2018 – 2019 mengalami penurunan Jumlah PMA/PMDN sebanyak 51 Buah, namun pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 58 Buah dan pada tahun 2021 meningkat sebanyak 117 Buah. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-182
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)
Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Buah	60	51	51	58	117

Sumber: Dinas PM,PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba, 2022

2. Jumlah nilai Investor berskala nasional PMA/PMDN

Urusan penanaman modal diukur melalui indikator. Jumlah nilai Investor berskala nasional PMA/PMDN pada tahun 2017 sebesar Rp. 81.600.000.000, pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp. 599.891.842.045, tahun 2019 mengalami penurunan menjadi Rp. 50.200.000.000 dan pada tahun 2020 meningkat sebesar Rp. 1.225.838.905.053. dan pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp. 255.255.237.265 Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-183
Jumlah Nilai Investor Berskala Nasional PMA/PMDN
Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah nilai Investor berskala nasional PMA/PMDN	Rp (juta)	81.600	599.891	50.200	1.225.838	255.255

Sumber: Dinas PM,PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba, 2022

Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)

Urusan penanaman modal diukur melalui indikator. Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) pada tahun 2017 sebesar 99 persen, tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 635 persen, pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar -92 persen, tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 2.342 persen, dan pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar -79 persen. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-184
Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)
Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	%	99	635	-92	2.342	-79

Sumber: Dinas PM,PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba, 2022

M. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Urusan kepemudaan dan olahraga dapat dilihat melalui indikator cakupan pembinaan olahraga, cakupan pelatih yang bersertifikasi, cakupan pembinaan atlet muda, jumlah atlet berprestasi dan persentase Wirausaha Muda. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada deskripsi berikut.

1. Persentase organisasi pemuda yang aktif

Indikator kinerja persentase organisasi pemuda yang aktif diperoleh dengan membagi jumlah organisasi pemuda yang aktif dengan jumlah organisasi pemuda yang terdaftar. Organisasi pemuda yang aktif ini berdasarkan laporan dari komite nasional pemuda Indonesia dan organisasi pemuda lainnya yang mendapatkan pembinaan dari dinas pemuda dan olahraga.

Pada tahun 2017, jumlah organisasi pemuda yang dibina 45 OKP atau 80,36% dari total 56 organisasi pemuda yang terdaftar. Pada tahun 2018, jumlah organisasi pemuda yang dibina 46 OKP atau 82,14% dari total 56 organisasi pemuda yang terdaftar.

Sedangkan pada tahun 2019, jumlah organisasi pemuda yang dibina 47 OKP atau 83,93% dari total 56 organisasi pemuda yang terdaftar. Pada tahun 2020 dan 2021 jumlah organisasi pemuda yang dibina 48 OKP atau 85,71% dan 87,47% dari total 56 organisasi pemuda yang terdaftar.

Dari data di atas dapat di lihat bahwa capaian kinerja setiap tahun selalu mencapai 100% dari target yang telah ditentukan. Hal ini tentunya berkat dukungan anggaran yang cukup memadai pada kegiatan pengembangan dan pembinaan kepemudaan seperti anggaran Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, Anggaran untuk kegiatan Karya Ilmiah Remaja. Namun tentunya perlu intervensi anggaran yang lebih besar untuk peningkatan sumber daya manusia pemuda di Kabupaten Bulukumba.

Tabel II-185
Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif
Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	80.36	80.36	83.93	85.71	87,47

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba, 2022

2. Persentasi Wirausaha Muda Pemula

Kabupaten Bulukumba berdasarkan data amak diperoleh persentasi sebesar 1,59%. Jumlah wirausaha muda yang dilakukan pembinaan dan pelatihan kewirausahaan olah dinas pemuda dan olahraga pada tahun 2017 sebanyak 30 orang, sehingga hanya sekitar 1,99% saja jumlah wirausaha muda yang mendapatkan pelatihan. Sedangkan pada tahun anggaran 2018, jumlah wirausaha muda yang mendapatkan pelatihan berjumlah 30 orang sehingga total wirausaha muda yang mendapat pelatihan sampai dengan tahun 2018 sebanyak 229 atau sekitar 2,99% dari total jumlah wirausaha.

Sedangkan pada tahun anggaran 2019, telah dilakukan pelatihan kewirausahaan bagi pengusaha muda pemula sebanyak 30 orang, sehingga sampai dengan tahun 2019 terdapat wirausaha muda yang mendapatkan pelatihan sebanyak 259 orang atau jika dipersentasikan dengan jumlah total wirausaha sebesar 2,59%. Pada tahun anggaran 2020 terdapat wirausaha muda yang mendapatkan pelatihan dipersentasikan dengan jumlah total wirausaha sebesar 2,59 %dan di tahun 2021 sebesar 2,89%, kegiatan pelatihan kewirausahaan tidak dilakukan dikarenakan adanya refocussing anggaran.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan pelatihan kewirausahaan muda sangat terbatas, dengan peningkatan setiap tahunnya hanya berkisar 30 orang wirausaha muda yang mendapatkan pelatihan.

Tabel II-186
Persentase Wirausaha Muda
Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase wirausaha muda	%	1.99	1.99	2.59	2.59	2.89

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba, 2022

3. Cakupan Pembinaan Olahraga

Cakupan pembinaan merupakan pembagian antara jumlah cabang olahraga yang di bina dengan jumlah cabang olahraga yang terdaftar. Jumlah cabang olahraga yang terdaftar

di Kabupaten Bulukumba sebanyak 24 cabang olahraga. Pada tahun anggaran 2017, jumlah cabang olahraga yang dibina naik menjadi 6 cabang olahraga atau sebesar 25% dari jumlah total cabang olahraga yang terdaftar. Hal ini dikarenakan pada tahun tersebut diselenggarakan persiapan pra pekan olahraga daerah (Pra Porda) di Kabupaten Pinrang, sehingga anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan olahragapun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, jumlah cabang olahraga yang dilakukan pembinaan olah dinas pemuda dan olahraga sebanyak 6 cabang olahraga, sehingga jika dipersentasikan sebanyak 250%. Adapun cabang olahraga di maksud adalah atletik, taekwondo, pencak silat, bola volley, billiard dan karate. Jumlah cabang olahraga yang di bina olah dinas pemuda dan olahraga pada tahun sama dari pada tahun sebelumnya dikarenakan keterbatasan anggaran dan tidak adanya even besar yang diselenggarakan.

Sedangkan pada tahun 2019, jumlah cabang olahraga yang dilakukan pembinaan olah dinas pemuda dan olahraga mengalami kenaikan lagi dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 12 cabang olahraga, sehingga jika dipersentasikan sebanyak 25%. Adapun cabang olahraga yang di bina tersebut adalah atletik, taekwondo, pencak silat, karate, bulutangkis, sepak takraw, billiard, bola volley, futsal, tenis meja, tenis lapangan dan basket. Pada tahun 2020 jumlah cabang olahraga yang dilakukan pembinaan olah dinas pemuda dan olahraga naik 2 kali lipat dari tahun 2019 dikarenakan pada tahun 2018 dilaksanakan pekan olahraga daerah (PORDA) yang dilaksanakan di kabupaten pinrang. Pada ajang 4 tahunan ini, kabupaten Bulukumba berhasil meloloskan 12 cabang olahraga yang selanjutnya dilakukan pembinaan olah dinas pemuda dan olahraga.

Pada tahun 2019, jumlah cabang olahraga yang dilakukan pembinaan olah dinas pemuda dan olahraga sebanyak 6 cabang olahraga, sehingga jika dipersentasikan sebanyak 25%. Adapun cabang olahraga yang di bina tersebut adalah atletik, taekwondo, pencak silat, karate, sepak takraw, billiard, bola volley. Jumlah ini tentunya menurun dari tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan pada tahun tersebut terjadi defisit anggaran pada pemerintah kabupaten Bulukumba sehingga harus dilakukan rasionalisasi anggaran. Hal ini tentunya berdampak pada terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pembinaan cabang-cabang olahraga.

Sedangkan pada tahun anggaran 2021, jumlah cabang olahraga yang dilakukan pembinaan olah dinas pemuda dan olahraga hanya 2 cabang olahraga, sehingga jika dipersentasikan hanya 8,33%. Adapun cabang olahraga yang di bina tersebut adalah atletik dan taekwondo. Jumlah cabang olahraga yang dibina sangat terbatas di karenakan adanya pandemic covid 19 yang menyebabkan banyaknya agenda olahraga yang dibatalkan dan dilakukannya refocussing anggaran.

Tabel II-187

Cakupan Pembinaan Olahraga Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Cakupan pembinaan olahraga	%	25.00%	50.00%	25.00%	8.33%	75%

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba, 2022

4. Cakupan Pelatih Yang Bersertifikat/Lisensi Kepelatihan

Cakupan pelatih yang bersertifikat dimaksud merupakan pembagian antara jumlah pelatih olahraga yang berlisensi dengan jumlah pelatih olahraga yang terdaftar. Jumlah pelatih olahraga yang terdaftar sebanyak 58 orang. Pada tahun 2017, jumlah pelatih olahraga yang berlisensi sebanyak 7 orang atau 12,07% dari total jumlah pelatih yang terdaftar. Sedangkan pada tahun 2018, jumlah pelatih olahraga yang berlisensi sebanyak 12 orang atau 20,69% dari total jumlah pelatih yang terdaftar. Penambahan ini terjadi dikarenakan pada tahun anggaran 2018, dinas pemuda dan olahraga mengalokasikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2023

anggaran untuk pelatihan wasit/pelatih olahraga berlisensi untuk 5 orang. Pada tahun 2019, jumlah pelatih olahraga yang berlisensi sebanyak 15 orang atau 25,86% dari total jumlah pelatih yang terdaftar. Jumlah kenaikan pelatih berlisensi dari tahun sebelumnya sebanyak 3 orang, jumlah ini sangat kecil dibanding kebutuhan, hal ini dikarenakan kurang adanya dana yang mendukung kegiatan tersebut, selain itu adanya rasionalisasi anggaran pemerintah daerah menyebabkan beberapa kegiatan di hapus atau di kurangi volumenya, salah satunya kegiatan pelatihan pelatih olahraga berlisensi.

Sedangkan pada tahun 2020, jumlah pelatih olahraga yang berlisensi tidak mengalami penambahan. Hal ini dikarenakan kurang adanya dana yang mendukung kegiatan tersebut, selain itu adanya pandemic covid 19 yang menyebabkan banyak kegiatan olahraga yang di batalkan untuk menghindari banyak kerumunan, salah satunya pelatihan pelatih berlisensi. Lain dari pada itu, adanya pandemic covid 19 juga menyebabkan harus dilakukannya refocusing anggaran pada dinas pemuda dan olahraga, yang dampaknya terdapat banyak kegiatan yang di hilangkan, salah satunya adalah kegiatan pelatihan pelatih berlisensi. Tetapi pada tahun 2021 menglmi peningkatan sebesar 29,31%

Tabel II-188

Cakupan Pelatih Yang Bersertifikasi Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%	12.07	20.69	25.86	25.86	29.31

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba, 2022

5. Cakupan Pembinaan Atlet Usia Dini

Cakupan pembinaan atlet usia dini dimaksud merupakan pembagian antara jumlah atlet usia dini yang dibina dengan jumlah atlet usia dini yang terdaftar. Atlet usia dini yang di maksud adalah atlet yang status nya masih belajar di sekolah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. Jumlah atlet usia dini yang terdaftar sebanyak 167 orang.

Pada tahun 2017, jumlah atlet usia dini yang di bina sebanyak 20 orang atau 11,98% dari total jumlah atlet usia dini yang terdaftar. Pada tahun 2018, jumlah atlet usia dini yang di bina sebanyak 20 orang, sehingga persentase nya bertambah menjadi 23,95% dari total jumlah atlet usia dini yang terdaftar. Sedangkan pada tahun 2019 jumlah atlet usia dini yang di bina sebanyak 20 orang, sehingga persentase nya bertambah menjadi 35,93% dari total jumlah atlet usia dini yang terdaftar

Sedangkan pada tahun 2020 dan 2021, kegiatan pembinaan atlet usia muda tidak diselenggarakan dikarenakan adanya pandemic covid 19 yang melarang dilakukannya kegiatan yang menimbulkan kerumunan banyak orang dan menjaga jarak/*social distancing*. Hal ini tentu tidak bisa dilakukan pada kegiatan olahraga karena pastinya melibatkan banyak orang. Selain itu adanya pandemic covid 19 menyebabkan hampir semua kegiatan keolahrgaan diberbagai level tingkatan ditiadakan.

Dilihat dari data di atas, persentasi ini sangat kecil dibanding jumlah atlet yg ada dan peningkatannya pun sangat kecil dari tahun ke tahun, hal ini dikarenakan kurang adanya dana yang mendukung kegiatan tersebut. Selain dari pada itu, tidak adanya *talent scouting* dan pemandu bakat menyebabkan sulitnya mencari atlet muda yang berbakat. Selain itu juga adanya pandemic covid 19 menyebabkan harus dilakukannya rasionalisasi dan refocusing anggaran yang tentunya berimbas pada harus di hilangkannya beberapa kegiatan. Faktor anggaran juga yang menjadi salah satu factor kegiatan pembinaan atlet usia dini hanya difokuskan untuk pelatihan dan pembinaan kepada atlet yang betul-betul berbakat dan mempunyai prospek mendapatkan prestasi di tingkat provinsi dan nasional.

Tabel II-189

Cakupan Pembinaan Atlet Muda Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Cakupan pembinaan atlet muda		11.98	23.95	35.93	35.93	45

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba, 2022

6. Jumlah Atlet Berprestasi

Jumlah atlet berprestasi adalah jumlah medali yang di peroleh oleh atlet dari berbagai kejuaraan-kejuaraan yang di ikuti cabang-cabang olahraga yang di bina olah dinas pemuda dan olahraga pada tahun 2017, jumlah prestasi yang diperoleh oleh atlet sebanyak 13 medali yang terdiri dari 5 medali emas, 3 medali perak dan 5 medali perunggu. Dari 13 medali tersebut di peroleh pada 4 cabang olahraga yaitu atletik, taekwondo, billiard dan bola volley pantai. Perolehan ditargetkan mendapatkan 13 medali atau jika di persentasikan mencapai 100% dari target.

Sedangkan pada tahun 2018, jumlah prestasi yang diperoleh oleh atlet sebanyak 26 medali yang terdiri dari 5 medali emas, 7 medali perak dan 14 medali perunggu. Dari 26 medali tersebut di peroleh pada 6 cabang olahraga yaitu atletik, karate, pencak silat, taekwondo, billiard dan bola volley pantai. Perolehan medali ini pada tahun 2018 ditargetkan mendapatkan 15 medali atau jika di persentasikan mencapai 173% dari target.

Pada tahun 2019, jumlah prestasi yang diperoleh oleh atlet sebanyak 31 medali yang terdiri dari 10 medali emas, 11 medali perak dan 20 medali perunggu. Dari 31 medali tersebut di peroleh pada 5 cabang olahraga yaitu atletik, karate, pencak silat, taekwondo dan bola volley pantai. Perolehan medali ini jauh melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2016-2021, dimana di tahun 2019 dinas pemuda dan olahraga ditergetkan mendapatkan 15 medali atau jika di persentasikan mencapai 206% dari target. Hal ini tidak lepas dari fokus nya pembinaan yang dilakukan olah dinas pemuda dan olahraga terhadap atlet yang berbakat dan cabang olahraga yang berpotensi mendulang medali.

Pada tahun 2020, jumlah prestasi yang diperoleh oleh atlet hanya 3 medali yang terdiri dari 1 medali perak dan 2 medali perunggu. Dari 3 medali tersebut di peroleh pada 1 cabang olahraga yaitu atletik. Pada tahun 2020 dinas pemuda dan olahraga ditargetkan mendapatkan 13 medali atau jika di persentasikan hanya mencapai 23,07% dari target. Hal ini terjadi dikarenakan adanya pandemic covid 19 yang menyebabkan banyaknya agenda kejuaraan-kejuaraan olahraga yang dibatalkan pelaksanaannya, selain itu adanya pandemic covid 19 juga menyebabkan dilakukannya rasionalisasi dan refocusing anggaran. Dan pada tahun 2021 terdapat 3 medali dari 11 orang atlet.

Tabel II-190

Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah atlet berprestasi	%	13	26	31	3	11

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba, 2022

7. Jumlah Prestasi Olahraga

Jumlah prestasi olahraga adalah jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali dari berbagai kejuaraan-kejuaraan yang di ikuti cabang-cabang olahraga yang di bina olah dinas pemuda dan olahraga. Pada tahun 2017, jumlah prestasi olahraga yang diperoleh pada 4 cabang olahraga yaitu atletik, taekwondo, billiard dan bola volley pantai. Pada tahun 2017 merupakan masa transisi dari dinas pendidikan pemuda dna olahrtaga menjadi dinas pemuda dan olahraga. Sedangkan pada tahun 2018, jumlah prestasi olahraga yang diperoleh oleh dinas pemuda dan olahraga dari 6 cabang olahraga yaitu atletik, karate, pencak silat, taekwondo, billiard dan bola volley pantai. Pada tahun 2019, jumlah prestasi olahraga yang

diperoleh oleh dinas pemuda dan olahraga di peroleh dari 5 cabang olahraga yaitu atletik, karate, pencak silat, taekwondo dan bola volley pantai. Peningkatan ini terjadi tidak lepas dari adanya dukungan dan sinergitas dalam penyelenggaraan dan pembinaan cabang olahraga.

Pada tahun 2020, jumlah prestasi olahraga yang diperoleh oleh dinas pemuda dan olahraga dari 1 cabang olahraga yaitu atletik. dan di tahun 2021 sebanyak 3 prestasi Jika dilihat dari hasil ini sangat kurang sekali, hal ini terjadi dikarenakan adanya pandemic covid 19 yang menyebabkan banyaknya agenda kejuaraan-kejuaraan olahraga yang dibatalkan pelaksanaan nya.

Tabel II-191
Jumlah Prestasi Olahraga Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah prestasi olahraga	%	4	6	5	1	3

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba, 2022

N. Urusan Statistik

Penyelenggaraan urusan statistik di Kabupaten Bulukumba dapat diukur oleh indikator ketersediaan Buku "Kabupaten Dalam Angka" dan Buku "PDRB". Buku Kabupaten Bulukumba Dalam Angka telah tersedia setiap tahunnya. Adapun yang telah dirilis sampai dengan tahun 2019. Begitu pula dengan buku PDRB Kabupaten Bulukumba. dimana pada tahun 2019 juga telah tersedia. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

1. Buku "Kabupaten Dalam Angka"

Urusan komunikasi dan informatika dapat dilihat dari indikator Buku "kabupaten dalam angka". Buku "kabupaten dalam angka" dari tahun 2017 sampai 2021 mencapai target dengan tersedia buku Kabupaten dalam Angka. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-192
Buku "Kabupaten Dalam Angka" Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Buku "kabupaten dalam angka"		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Kominfo Kabupaten Bulukmba, 2022

2. Buku "PDRB"

Urusan komunikasi dan informatika dapat dilihat dari indikator Buku "PDRB". Buku "PDRB" dari tahun 2017 sampai 2021 mencapai target dengan tersedia Buku "PDRB". Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-193
Buku "PDRB" Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Buku "PDRB"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Kominfo Kabupaten Bulukmba, 2022

O. Urusan Persandian

Kabupaten Bulukumba telah menggunakan persandian dalam mengelola informasi penting daerah. Pada tahun 2017-2021 Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah sudah mencapai 100 persen karena semua sistem komunikasi sudah berbasis digital.

URAIAN	SATUAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah.	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba, 2022

P. Urusan Kebudayaan

1. Penyelenggaraan festival seni dan budaya

Pelayanan pada urusan kebudayaan ditentukan oleh indikator penyelenggaraan festival seni dan budaya. Pada tahun 2017 sebanyak 3 festival seni kebudayaan yang dilaksanakan dan tahun 2019 meningkat menjadi 5 jenis festival seni dan budaya yang sudah menjadi agenda rutin Pemerintah Kabupaten Bulukumba adalah: Festival Pinisi, Songkabala Bantilang, Gowes Hutan Karet, Jelajah Hutan Karet, dan Andingingi. Pada tahun 2021 menurun menjadi 1 kegiatan festival seni budaya yang dapat dilaksanakan karena adanya pandemic Covid-19. Adapun secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-194

Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Buah	3	3	5	1	1

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba tahun 2022

2. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. serta jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu. Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah melakukan pendataan sistem informasi sejarah purbakala Kabupaten Bulukumba dan di data banyak sekali situs sejarah dan purbakala yang bisa didaftarkan untuk mendapatkan sertifikasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Bulukumba dalam mendukung indikator jumlah cagar budaya yang dilestarikan adalah pendataan cagar budaya untuk selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati. Pada tahun 2017 sebanyak 45 benda situs cagar budaya yang dilestarikan dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 58 cagar budaya yang dilestarikan.

Tabel II-195

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Cagar	45	50	57	58	58

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba tahun 2021

3. Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi

Pemerintah kabupaten Bulukumba dalam hal ini dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Bulukumba belum melakukan kegiatan melalui indikator Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi.

Tabel II-196

Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi Dan Inventarisasi Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi		0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba tahun 2022

4. Jumlah cagar budaya yang dikelola secara Terpadu

Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu mulai tahun 2017-2021 sebanyak 2 jumlah cagar budaya yang dikelola yaitu Cagar Budaya Pasanggrihan Tanete di Kecamatan Bulukumpa dan Kompleks Makam Dato Tiro Di Kecamatan Bontotiro.

Tabel II-197

Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah cagar budaya yang dikelola secara Terpadu		2	2	2	2	2

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba tahun 2022

Q. Urusan Perpustakaan

1. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Jumlah kunjungan perpustakaan pada tahun 2017 jumlah pengunjung sebanyak 284.060 orang dan jumlah populasi yang harus dilayani adalah 349.100 orang atau sebesar 81,37% terjadi peningkatan sebesar 0,38% dari tahun sebelumnya, tahun 2018 jumlah pengunjung sebanyak 290.784 orang dan jumlah populasi yang harus dilayani adalah 351.278 orang atau sebesar 82,78% terjadi peningkatan sebesar 1,41% dari tahun sebelumnya, tahun 2019 jumlah pengunjung sebanyak 294.447 orang dan jumlah populasi yang harus dilayani adalah 365.603 orang atau sebesar 80,54%. Dari segi jumlah pengunjung terjadi peningkatan, namun jumlah populasi yang harus dilayani lebih besar dari tahun sebelumnya, sehingga terjadi penurunan persentase jumlah pengunjung sebesar 2,24% dari tahun sebelumnya sedangkan tahun 2020 jumlah pengunjung sebanyak 35.929 orang dan jumlah populasi yang harus dilayani adalah 376.258 orang atau sebesar 9,55% terjadi penurunan sebesar 70,99% dari tahun sebelumnya dan pada tahun 2021 menurun sebesar 0,95%

Tahun 2021 terjadi penurunan jumlah pengunjung perpustakaan disebabkan adanya pembatasan kunjungan dan layanan akibat pandemik *Covid-19*. Hal lain yang menjadi kendala dalam kegiatan layanan perpustakaan adalah:

- Sarana dan prasarana perpustakaan yang kurang memadai dalam memberikan pelayanan, yaitu kondisi gedung yang tidak representative, berpengaruh pada penataan ruang, jauh dibawah standar pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat.
- Jumlah armada yang digunakan dalam memberikan layanan eksternal masih kurang untuk menjangkau seluruh kecamatan di Kabupaten Bulukumba
- Alokasi anggaran pelayanan masih perlu ditingkatkan.

Tabel II-198

Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun		81.36	82.78	80.54	9.55	0,95

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bulukumba, 2022

2. Jumlah Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah

Formulasi yang digunakan untuk menghitung persentase Jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah adalah jumlah judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah dibagi dengan jumlah eksemplar buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah.

Jumlah judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah Tahun 2017 s/d 2021 berfluktuasi, pada tahun 2017 Jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah sebanyak 8.052 dan 17.518 eksemplar atau 45,96%. Jumlah tersebut tidak mengalami peningkatan karena tidak adanya pengadaan buku inventaris di tahun tersebut, tahun 2018 Jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah sebanyak 8.503 judul dan 19.810 eksamplar atau 42,92%. Terdapat penambahan buku sebanyak 451 judul dan 2.292 eksamplar. Jumlah pengadaan buku mengalami penurunan sebesar 3.04% dari tahun sebelumnya, tahun 2019 Jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah sebanyak 8.628 judul dan 20.150 eksamplar atau 42,82%. Terdapat penambahan buku sebanyak 125 judul dan 340 eksemplar. Jumlah pengadaan buku turun sebesar 0,1% dari tahun sebelumnya sedangkan pada tahun 2020 Jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah sebanyak 10.684 judul dan 24.828 eksemplar atau 3.03%. Penambahan buku sebanyak 2.056 judul dan 4.678 eksemplar. Jumlah pengadaan buku meningkat sebanyak 0,21 % dari tahun sebelumnya. dan pada tahun 2021 jumlah buku yang tersedia sebanyak 42,96%

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penambahan jumlah buku adalah Kondisi keuangan daerah /minimnya anggaran daerah yang dialokasikan untuk pengadaan buku setiap tahunnya sehingga diharapkan peningkatan alokasi anggaran untuk kegiatan pengadaan buku perpustakaan.

Tabel II-199

**Tabel Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Buku	45.96	42.92	42.82	43.03	42,96

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bulukumba, 2022

3. Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk

Formulasi yang digunakan untuk menghitung persentase rasio perpustakaan per satuan penduduk adalah jumlah perpustakaan dibagi dengan jumlah penduduk. Pada tahun 2017 Jumlah perpustakaan sebanyak 300 unit dan jumlah penduduk sebanyak 415.713 jiwa. Sehingga rasio perpustakaan per satuan penduduk sebesar 0.72 persen, pada tahun 2018 Jumlah perpustakaan sebanyak 300 unit dan jumlah penduduk sebanyak 418.326 jiwa. Sehingga rasio perpustakaan per satuan penduduk sebesar 0.72 persen, pada tahun 2019 Jumlah perpustakaan sebanyak 300 unit dan jumlah penduduk sebanyak 420.603 jiwa. Sehingga rasio perpustakaan per satuan penduduk sebesar 0.71 persen sedangkan tahun 2020- 2021 Jumlah perpustakaan sebanyak 414 unit dan jumlah penduduk sebanyak 437.607 jiwa. Sehingga rasio perpustakaan per satuan penduduk sebesar 0.95 persen

Jumlah perpustakaan dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 tidak mengalami peningkatan yaitu sebanyak 300 unit perpustakaan. Tahun 2021 terjadi penambahan sebanyak 114 unit perpustakaan desa dan perpustakaan masyarakat.

Kendala yang dialami dalam penambahan jumlah perpustakaan adalah masih terdapat beberapa desa dan kecamatan yang belum membentuk perpustakaan umum di tengah tengah masyarakat.

Tabel II-200

**Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk
Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Rasio	0.72	0.72	0.71	0.95	0,95

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bulukumba, 2022

4. Rata-rata pengunjung perpustakaan pertahun

Jumlah pengunjung perpustakaan mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dan pada Tahun 2021 mengalami penurunan secara drastis yang diakibatkan oleh adanya pembatasan pelayanan akibat *Covid-19*.

Hal lain yang menjadi kendala dalam kegiatan layanan perpustakaan adalah:

- Sarana dan prasarana perpustakaan yang kurang memadai dalam memberikan pelayanan, yaitu kondisi gedung yang tidak representative, berpengaruh pada penataan ruang, jauh dibawah standar pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat.
- Jumlah armada yang digunakan dalam memberikan layanan eksternal masih kurang untuk menjangkau seluruh kecamatan di Kabupaten Bulukumba
- Alokasi anggaran pelayanan masih perlu ditingkatkan.

Tabel II-201

**Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun
Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	Orang	284.060	290.784	294.447	35.925	3.107

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bulukumba, 2022

5. Jumlah koleksi judul buku perpustakaan

Jumlah judul koleksi judul buku perpustakaan mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir.

Hal yang menjadi kendala adalah daya tampung gedung perpustakaan yang terbatas untuk menampung buku dan sarana pendukung lainnya, sehingga buku yang ada kami layankan dalam bentuk layanan *book loan* (Peminjaman buku) ke perpustakaan sekolah, perpustakaan desa dan perpustakaan masyarakat.

Tabel II-202

**Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan
Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul	8.052	8.503	8.628	10.684	10.727

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bulukumba, 2022

6. Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat

Formulasi yang digunakan untuk menghitung jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat adalah: Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat dibagi dengan jumlah pustakawan di Kabupaten Bulukumba.

Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat Tahun 2017 sebanyak 302 orang, dan jumlah pustakawan keseluruhan sebanyak 629 orang atau sebesar 48.01 %. Keadaan ini sama kondisinya sampai Tahun 2021.

Faktor yang menjadi kendala dalam peningkatan jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat adalah kurangnya alokasi anggaran untuk pengembangan Sumber Daya Manusia pengelola perpustakaan, sehingga diharapkan tahun tahun

selanjutnya alokasi anggaran pembinaan SDM dapat ditingkatkan untuk pelaksanaan diklat dan pembinaan kepastakawanan.

Tabel II-203
Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat
Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki Sertifikat	Judul	48.01	42.90	48.01	48.01	48.01

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bulukumba, 2022

R. Urusan Kearsipan

Kinerja pelayanan pada urusan kearsipan tahun 2017-2021 sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1. Peningkatan SDM pengelola kearsipan.

Peningkatan Sumber Daya Manusia pengelola kearsipan dari tahun 2017 – 2020 yaitu jumlah pengelola kearsipan yang dibina, tahun 2017 yaitu 41 OPD, dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 sebanyak 46 OPD terkait sosialisasi dan Bimtek Pola klasifikasi kearsipan mencapai 100%, dan tahun 2020 yaitu 36 OPD dan 10 Kecamatan mengalami penurunan sebesar 0% dan ditahun 2021 nuali meningkat sebesar 2,78% disebabkan karena adanya Covid 19 sehingga aktivitas program dan kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena adanya Sosial Distancing dan Physical Distancing.

Tabel II-204
Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Peningkatan SDM pengelola kearsipan		100.00	100.00	100.00	0	2,78

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bulukumba, 2022

2. Presentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku.

Perangkat Daerah yang mengolah arsip secara baku, tidak semua OPD yang telah dibina menerapkan arsip secara baku karena terkendala pada sarana prasana, gedung dan tenaga dibidang kearsipan, serta rendahnya kesadaran akan pentingnya arsip demi kelangsungan organisasi. Ini dapat dilihat dari data capaian tahun 2017-2020 yang tiap tahun mengalami penurunan, dan pada tahun 2021 mngalami peningkatan sebesar 8,33 %.

Tabel II-205
Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku
Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	10.87	6.52	2.17	0	8,33

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bulukumba, 2022

2.1.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

Analisis terhadap capaian peningkatan pelayanan dapat dilihat dari perkembangan indikator-indikator pembangunan daerah pada urusan-urusan yang dikelompokkan pada urusan pilihan pemerintah daerah diantaranya yaitu Pariwisata, Pertanian, Perdagangan. Perindustrian, serta Kelautan dan Perikanan.

A. Urusan Kelautan dan Perikanan

1. Produksi Perikanan

Produksi perikanan secara umum mengalami fluktuasi dalam produksi perikanan, ini dapat dilihat pada data capaian, untuk tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar yaitu 126 dan tahun 2018 mengalami kenaikan 132 dan di tahun 2019 mengalami penurunan 125 dan di tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 128, dan di tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 118,6 selengkapnya dapat dilihat pada tabel:

Tabel II-206

Capaian Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Capaian Produksi perikanan	%	126	132	125	128	118,6

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba, 2022

Adapun kontribusi produksi dapat dilihat dari sub bidang berikut :

a. Perikanan tangkap

Pada tahun 2021, produksi perikanan tangkap di Kabupaten Bulukumba mencapai 53.830,3 ton. Kontribusi terbesar diperoleh dari Kecamatan Ujung Bulu yang mencapai 11.256 ton, selanjutnya adalah Kecamatan Kajang yang mencapai 10.751 ton. Pada tahun 2021 ini produsen perikanan tangkap terbanyak pada Kecamatan Ujung Bulu karena ujung bulu merupakan Ibu Kota Kabupaten yang menjadi pusat pemasaran perikanan di Kabupaten Bulukumba, meskipun armada – armada perikanan yang bertonase besar lebih banyak di Kecamatan Kajang dan Bontobahari. Peningkatan produksi ini disebabkan oleh peningkatan sarana penangkapan dan semakin membaiknya pola penangkapan ikan yang digunakan oleh Nelayan. Adapun produksi per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-207

Produksi Perikanan Tangkap Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Jenis Perikanan	2017	2018	2019	2020	2021
Penangkapan di laut	50.004,0	53.455,6	52.651,6	53.860,1	53.830,3
Gantarang	6.224	5.913	5.850	5.984	5.988
Ujung Bulu	10.146	11.161	11.056	11.310	11.256
Ujung Loe	2.067	2.212	2.140	2.189	2.190
Bonto Bahari	8.857	9.561	9.480	9.698	9.703
Bonto Tiro	5.047	5.451	5.370	5.493	5.496
Herlang	7.888	8.569	8.252	8.441	8.446
Kajang	9.775	10.589	10.504	10.745	10.751

Sumber : Dinas Perikanan, 2022

Produksi perikanan tangkap dari perairan laut yang didaratkan di Kabupaten Bulukumba secara garis besar terdiri dari kelompok ikan pelagis dan kelompok ikan demersal. Produksi ikan ekonomis penting pada kelompok ikan pelagis didominasi oleh 6 jenis ikan, yakni: Tuna, Cakalang, Tongkol, Layang, Tembang dan lemuru . Sementara, untuk kelompok ikan demersal, produksi ikan yang bernilai ekonomi pentingnya didominasi oleh jenis ikan: Kerapu dan Kakap.

Produksi perikanan pelagis di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2021 didominasi oleh jenis Ikan Tuna, dengan produksi sebesar 9.502 ton, selanjutnya adalah Ikan Layang yang mencapai 5.986 ton ,Kakap 5.529 ton dan Ikan Tongkol mencapai 4.844 ton Jumlah produksi dari jenis ikan pelagis utama yang didaratkan di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel II-208
Produksi Perikanan Tangkap Berdasarkan Jenis Ikan
Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

No	Jenis Ikan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Tuna	2.231	8.349	8.291	8.482	9.502
2	Cakalang	2.639	4.823	4.692	4.800	3.542
3	Tongkol	8.376	10.971	10.942	11.193	4.844
4	Layang	8.192	1.777	1.768	1.809	5.986
5	Kembung	1.775	1.314	1.294	1.324	2.630
6	Tembang	2.976	1.117	1.076	1.100	1.297
7	Lemuru	2.054	536	522	534	1.926
8	Kerapu	1.118	2.459	2.427	2.483	2.694
9	Teri	225	233	219	224	0
10	Paperek	747	545	530	542	0
11	Kakap	1.512	1.633	1.492	1.526	5.529
12	Ikan lainnya	18.160	19.699	19.398	19.843	15.880
Jumlah		50.004,6	53.455,6	52.651,6	53.860,1	53.830,3

Sumber : Dinas Perikanan, 2022

Sementara itu komposisi produksi berdasarkan jenis ikan dapat dilihat pada Grafik berikut :

b. Perikanan Budidaya

Tabel II-209
Produksi Perikanan Budidaya Berdasarkan Jenis Tempat,
Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

T a h u n	Perikanan budidaya			
	Kolam	Tambak	Laut	Minapadi
2017	964	1.036	3.089	61
2018	668	1.308	3.173	62
2019	630	1.308	3.173	60
2020	630	1.308	3.173	60
2021	668	1.308	3.172	62

Sumber : Dinas Perikanan, 2022

2. Cakupan Bina Kelompok Tani Mengalami Penurunan Sebesar

Kategori kelompok yang dibina adalah kelompok yang sudah mendapat bantuan dari Dinas Perikanan Bulukumba, bantuan yang diberikan tersebut bukan hanya berupa bantuan fisik namun juga berupa bantuan non fisik seperti penyelenggaraan pelatihan teknis perikanan seperti Penangkapan ikan dan budidaya perikanan.

Kesulitan dalam meningkatkan persentase binaan kelompok adalah semakin meningkatnya jumlah kelompok tiap tahun sehingga meskipun bantuan yang diberikan ke kelompok masyarakat juga bertambah namun laju penambahan jumlah kelompok perikanan juga cukup besar.

Oleh karena itu, terjadi fluktuasi bahkan cenderung penurunan persentasi cakupan binaan kelompok karena anggaran Dinas dari tahun ke tahun semakin menurun yang berdampak pada semakin kurangnya bantuan yang diserahkan ke kelompok masyarakat sementara jumlah kelompok juga semakin meningkat.

Secara lengkap indikator urusan kelautan dan perikanan di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel II-210
Cakupan Bina Kelompok Tani
Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun
-----------	--------	-------

		2017	2018	2019	2020	2021
Cakupan bina kelompok tani		51,4	56,8	66,7	69,5	64,7

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba, 2022

B. Urusan Pariwisata

1. Kunjungan wisata

Indikator kinerja urusan pariwisata dapat dilihat dari fluktuasi kunjungan wisatawan domestic dan mancanegara, lama kunjungan wisatawan, dan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata. Dari angka kunjungan wisatawan terus mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Total Angka kunjungan wisatawan tahun 2017 sebanyak 203.770 Orang Sedangkan Pada tahun 2018 sampai 2021 mengalami kenaikan sebanyak 266.296 sampai 366.176 Orang.

Tabel II-211

Kunjungan Wisata Kabupaten Bulukumba 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Kunjungan wisata	Orang	203.770	266.296	280.590	301.507	366.176

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba, 2022

2. Lama Kunjungan Wisata

Untuk indikator lama kunjungan wisatawan dari tahun 2017 sampai tahun 2021 tetap yaitu 2-4 hari. Hal ini juga tergantung pada hari-hari libur Panjang yang cukup menarik animo wisatawan untuk menginap di Kawasan wisata.

Tabel II-212

Lama Kunjungan Wisata Kabupaten Bulukumba 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Lama Kunjungan Wisata	Hari	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba, 2022

3. PAD sektor pariwisata

Tabel II-213

PAD Sektor Pariwisata Kabupaten Bulukumba 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
PAD sektor pariwisata	Milyar	1,77	3,07	3,27	3,75	5,96

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba, 2022

C. Urusan Pertanian

1. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan terhadap PDRB

Berdasarkan tabel diatas terlihat, terjadi penurunan nilai kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bulukumba secara terus menerus dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Hal ini disebabkan antara lain; 1) semakin berkurangnya tenaga kerja dibidang pertanian khususnya subsektor tanaman pangan karena meningkatnya penggunaan alsintan, 2) semakin menurunnya penerapan teknologi tepat guna oleh petani, 3) semakin berkembangnya sektor jasa lainnya, 4) terjadinya anomali iklim yang menyebabkan kekeringan dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang sering menggagalkan panen serta, 5) kurangnya dana stimulan bagi petani misalnya Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Tabel II-214

Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Terhadap PDRB Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan perkebunan terhadap PDRB	%	31.03	28.72	26.62	26.31	26.31

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba, 2022

2. Cakupan bina kelompok tani

Indikator Capaian Bina Kelompok Tani selama tahun 2017 menjadi 32,69%, Hal ini disebabkan menurunnya alokasi dana APBD dan APBN sehingga berimplikasi terhadap jumlah kelompok tani penerima bantuan. Tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 61,2 %, tahun 2019 cakupan bina kelompok tani mengalami penurunan sebesar 53,75% dan pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan sebesar 71,18%. Dan paada tahun 2021 menglmi penutrunan sebesar 36,66 persen% Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II-215

Cakupan Bina Kelompok Tani Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Cakupan bina kelompok tani	%	32.69	61.2	53.73	71,18	36,66

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba, 2022

Untuk komoditi peternakan, salah satu komoditas unggulan di Kabupaten Bulukumba adalah sapi potong, ayam ras petelur dan ayam ras pedaging. Pengembangan komoditas sapi potong ini memang diikuti oleh animo masyarakat untuk memelihara sapi cukup tinggi baik yang sifatnya turun temurun, maupun dengan melihat peluang pasar yang prospektif, sehingga pemeliharaan sapi ditingkat masyarakat sangat signifikan dari tahun ke tahun. Demikian halnya dengan dukungan program pemerintah mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah kebijakannya lebih kepada pengembangan sapi potong, dan secara Nasional Kabupaten Bulukumba sudah ditetapkan sebagai salah satu kawasan pengembangan sapi potong berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No 472 Tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi kawasan pertanian nasional. Sedangkan untuk komoditas unggas komersial yaitu ayam ras petelur dan ayam ras pedaging peningkatannya juga sangat signifikan menjadi salah satu usaha peternakan yang diminati oleh masyarakat sebagai salah satu usaha yang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan. Berdasarkan data capaian Ayam Ras Pedaging merupakan jumlah populasi yang paling banyak pada tahun 2017 sebanyak 2.295.000 ekor dan mengalami kenaikan positif hingga pada tahun tahun 2020 mengalami penurunan jumlah menjadi 2.309.930 ekor dan meningkat di tahun 2021 sebanyak 3.694,020 , berbeda dengan Ayam Ras Petelur yang dari tahun 2017 mengalami kenaikan positif hingga pada tahun 2021, pada tahun 2017 jumlah populasi Ayam Ras Petelur sebanyak 310.218 dan tiap tahun mengalami kenaikan hingga pada tahun 2021 menjadi 1.176,858 ekor. Sedangkan untuk komoditas Sapi Potong merupakan jumlah capaian paling kecil yaitu pada tahun 2017 hanya 72.602 dan terus mengalami kenaikan tiap tahun hingga 2021 sebesar 77.658 ekor. Untuk perkembangan populasi dari tiga jenis komoditas unggulan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-216

Jumlah Populasi Ternak Kabupaten Bulukumba 2017-2021

Komoditas	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Sapi Potong	Ekor	72.602	75.993	76.434	76.797	77.658
Ayam Ras Pedaging	Ekor	2.295.000	2.381.401	2.550.438	2.309.930	3.694,020

Ayam Ras Petelur	Ekor	310.218	452.158	463.793	638.724	11.176,858
---------------------	------	---------	---------	---------	---------	------------

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba, 2022

D. Urusan Kehutanan

Pengelolaan hutan pasca penetapan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Pemerintah memiliki kewenangan atas kawasan hutan. mulai dari perencanaan. perizinan. dan implementasi pengelolaan hutan dan pengawasan. Pemerintah mempunyai kewenangan mengontrol proses perencanaan dan pemantauan sumberdaya hutan termasuk pengukuhan kawasan hutan yang secara implementasi berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab pemerintah provinsi. Kewenangan pengurusan kehutanan oleh provinsi meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan. pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan. rehabilitasi dan reklamasi hutan. dan perlindungan hutan dan konservasi alam. Kewenangan kabupaten dalam pengelolaan kawasan hutan meliputi pengelolaan taman hutan raya. penyusunan rencana pengelolaan dan penataan blok (zonasi) serta pemberian perizinan usaha pariwisata alam dan jasa lingkungan serta rehabilitasi di taman hutan raya skala kabupaten/kota. Pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi. Hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan raya skala kabupaten/kota.

E. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

1. Jumlah rumah tangga pengguna listrik

jumlah rumah tangga pengguna listrik dengan capaian tahun 2021 sebesar 125.204 pelanggan dengan adanya Program Listrik Masuk Desa mulai di tahun 2017 yang dibuat Pemerintah Kabupaten Bulukumba bekerjasama dengan PT. PLN Cabang Bulukumba. Melalui program tersebut sebanyak 762 KK yang berada di 482 titik di beberapa kecamatan, dan beberapa desa terpencil/pelosok desa seperti Desa Pattiroang, Kacibo, Parampakku, Bonto Nangka, Kampung Baru, Tokombeng, yang selama ini belum menikmati listrik sekarang ini sudah dapat menikmatinya. Selanjutnya di tahun 2020 ini Kabupaten Bulukumba masuk dalam 5 kabupaten yang mendapatkan program LISA (Listrik Desa) oleh PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Sulselrabar.

Tabel II-217

**Jumlah Pelanggan listrik
Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Pelanggan listrik		102.619	108.402	113.994	119.221	125.204

Sumber : BPS & PLN Kabupaten Bulukumba, 2021

F. Urusan Perdagangan

1. Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal

Persentase cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal, pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 jumlah kelompok pedagang/usaha formal tidak menerima bantuan. Namun pada tahun 2020 jumlah kelompok yang menerima bantuan Coolbox 0,85 persen dan jumlah kelompok yang menerima bantuan Tenda 0,51 Persen sehingga diperoleh capaian sebesar 0,68 persen dan pada tahun 2021 jumlah kelompok pedagang/usaha formal tidak menerima bantuan . Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-218

Cakupan Bina Kelompok Perdagangan di Kabupaten Bulukumba 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	0	0	0	0,68	0

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian koperasi dan UMKM Kabupaten Bulukumba, 2022

2. Jumlah Pasar

Jumlah pasar yang tersebar di semua Kecamatan di Kabupaten Bulukumba sebanyak 43 yang dihitung dari berbagai tipe pasar, tipe A sebanyak 1 Unit, tipe B sebanyak 15 Unit, tipe C sebanyak 26 Unit, dan tipe D sebanyak 1 Unit. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II-219
Jumlah Pasar berdasarkan Kecamatan, Tipe serta Alamat
Kabupaten Bulukumba tahun 2020

No	Uraian	Tipe	Alamat
	UJUNG BULU		
1	Pasar Sentral	A	Caile
2	Pasar Kasuara	C	Tanah Kongkong
3	Pasar Cekkeng	B	Terang-terang
	GANTARANG		
1	Pasar Kalimassang	C	Mariorennu
2	Pasar Ponre	B	Matteko
3	Pasar Gunung Jati	B	Bontomacinna
4	Pasar Mannaungi	C	Gantarang
5	Pasar Dampang	C	Dampang
6	Pasar Bonto Nyeleng	C	Bonto Nyeleng
7	Pasar Borong Tellu	C	Bukit Tinggi
8	Pasar Bangkeng Buki	C	Bengkeng Buki
	KINDANG		
1	Pasar Borong Rappoa	B	Borong Rappoa
2	Pasar Pa'Baeng-Baeng	C	Anrihua
3	Pasar Cilibbo	C	Cilibbo
4	Pasar Tapolloe	C	Benteng Palioi
	UJUNG LOE		
1	Pasar Dannuang	B	Dannuang
2	Pasar Ulu Tedong	B	Gantarang
3	Pasar Allu/Tamatto	C	Tammatto
4	Pasar Seppang	C	Seppang
	HERLANG		
1	Pasar Batu Asang	B	Singa
2	Pasar Gunturu	C	Gunturu
3	Pasar Tanuntung	C	Tanuntung
4	Pasar Kupang	C	Kupang
	KAJANG		
1	Pasar Kassi	C	Kassi
2	Pasar Kalimporo	B	Kalimporo
3	Pasar Maleleng	C	Maleleng
	RILAU ALE		

No	Uraian	Tipe	Alamat
1	Pasar Bontomanai	B	Bontomanai
2	Pasar Palampang	B	Palampang
3	Pasar Balimbing	C	Bonto Mate'ne
4	Pasar Swatani	C	Swatani
5	Pasar Sampeang	B	Desa Bonto Haru
BULUKUMPA			
1	Pasar Tanete	B	Tanete
2	Pasar Balang Riri	C	Bajiminasa
3	Pasar Dinding	D	Jojjolo
4	Pasar Salassae	C	Salassae
BONTO BAHARI			
1	Pasar Tanah Beru	B	Sapolohe
2	Pasar Ara	C	Ara
3	Pasar Bira	C	Bira
BONTO TIRO			
1	Pasar Batang	C	Batang
2	Pasar Hila-Hila	C	Ekatiro
3	Pasar Bonto Tangnga	B	Bonto Tangga
4	Pasar Basokeng	C	Dwitiro
5	Pasar Tamalanrea	B	Tamalanrea

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian koperasi dan UMKM Kabupaten Bulukumba, 2022

G. Urusan Perindustrian

1. Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

Perkembangan kinerja sektor perindustrian dapat diukur melalui indikator cakupan bina kelompok pengrajin. Perkembangan produktivitas sektor industri di Kabupaten Bulukumba dari tahun 2017-2021. Pada tahun 2017 sampai 2018 cakupan bina kelompok pengrajin sebanyak 0 persen dimana tidak ada kelompok yang menerima bantuan, namun pada tahun 2019 sampai dengan 2020 penerima bantuan kelompok sebanyak 2 kelompok dengan persentase 0,14 persen dan ditahun 2021 sebesar 0,10 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-220

Produktivitas Sektor Industri di Kabupaten Bulukumba, 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Cakupan bina kelompok pengrajin	%	0	0	0,14	0,14	0,10

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian koperasi dan UMKM Kabupaten Bulukumba, 2022

2.1.3.4 Fokus Penunjang Urusan

Analisis terhadap capaian peningkatan pelayanan dapat dilihat dari perkembangan indikator-indikator pembangunan daerah pada urusan-urusan yang dikelompokkan pada urusan pilihan pemerintah daerah diantaranya yaitu perencanaan; keuangan; kepegawaian serta pendidikan dan pelatih; dan pengawasan.

A. Urusan Perencanaan

1. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA

Keberhasilan pelayanan pada urusan perencanaan dapat dilihat pada indikator tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA. Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah memiliki dokumen RPJPD sebagaimana yang diatur dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2023

Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bulukumba 2005-2025.

Tabel II-221

Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD Yang Telah Ditetapkan dengan PERDA Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Bulukumba, 2021

2. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021 dan pada periode tahun 2021 – 2026 ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026.

Tabel II-222

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Bulukumba, 2021

Dengan berbedanya tahun perencanaan di Kabupaten Bulukumba dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan dinamika pembangunan yang cukup tinggi sehingga mempengaruhi terhadap penyusunan dokumen perencanaan Jangka Menengah Daerah, namun dengan meningkatkan sistem yang berbasis pada teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kualitas dokumen RPJMD Kabupaten Bulukumba.

3. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA

Pemerintah Kabupaten Bulukumba setiap tahunnya menyusun dokumen perencanaan RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA. Namun karena adanya perbedaan kebijakan pusat (antar Kementerian/ Lembaga terkait penyusunan dokumen perencanaan dan juga kebijakan perencanaan pada tingkat global/nasional (pembangunan berkelanjutan) sehingga memerlukan penyesuaian untuk dokumen perencanaan ditingkat daerah, serta dengan adanya perbedaan kebijakan nasional dengan kebutuhan daerah dinilai cukup mempengaruhi pencapaian target ini. Namun dengan adanya teknologi informasi yang dikembangkan sehingga dalam penyusunan dokumen RKPd Kabupaten Bulukumba dapat konsisten, koheren, transparan, efektif dan efisien.

Tabel II-223

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Bulukumba, 2021

4. Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA

Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah menetapkan peraturan daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 21 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032 dan menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Perencanaan.

Tabel II-224

Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Bulukumba, 2021

5. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD

Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD adalah jumlah program RKPD tahun bersangkutan dibagi dengan jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun bersangkutan. Dari tahun 2017 sampai dengan 2021, konsistensi jumlah program RPJMD dan jumlah program RKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-225

Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD		118,08	117,31	114,62	105,38	120,38

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Bulukumba, 2022

6. Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD

Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD adalah jumlah program RKPD tahunan dibagi jumlah program RPJMD yang harus dilakukan pada tahun berkenaan. Dari tahun 2017 sampai dengan 2021, jumlah program RKPD dan jumlah program APBD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-226

Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD		100,33	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Bulukumba, 2021

7. Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW

Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW di Kabupaten Bulukumba telah menyesuaikan dengan dokumen perencanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Tabel II-227

Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW		100	100	100	100	100

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Bulukumba, 2021

B. Urusan Keuangan

1. Opini BPK terhadap laporan keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba terdiri dari Neraca per 31 desember, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas untuk tahun berakhir dan catatan atas laporan keuangan. Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian yang wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan pengendalian intern yang memadai atas Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Pada kondisi awal tahun 2017 yang bebas dari kesalahan penyajian material baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan sehingga BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat sebagai dasar untuk menyatakan opini. Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2017 sampai dengan 2021 telah menyajikan secara wajar dalam semua hal material, posisi laporan keuangan pemerintah daerah Per 31 desember berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, arus kas, perubahan ekuitas sesuai dengan standard akuntansi pemerintahan. Penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah pada akhir periode tahun 2021 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Tabel II-228

Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP

Sumber: BPKD Kabupaten Bulukumba, 2022

2. Persentase SILPA terhadap APBD

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran, sedangkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) menyebutkan bahwa SILPA merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD Munculnya SILPA terjadi karena serapan anggaran di organisasi perangkat daerah (OPD) yang masih minim, sehingga terdapat realisasi pendapatan yang lebih dari yang dianggarkan. Selain itu, terjadinya SILPA juga karena adanya kegiatan atau program Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2023

pemerintah daerah yang belum terselesaikan serta adanya pembatalan proyek yang hendak dilaksanakan. Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba.

Pada kondisi awal tahun 2017 sebesar Rp8.249.679.255,60 atau 0,55 % (silpa tahun 2017 dibagi total belanja dalam APBD 2017 dikali 100%) dari total realisasi belanja dalam APBD tahun 2017 dan mengalami penurunan dari tahun lalu. Silpa tahun 2018 sebesar Rp18.483.237.488,36 atau 1,32 % (silpa tahun 2018 dibagi total belanja dalam APBD 2018 dikali 100%) dari total realisasi belanja dalam APBD tahun 2018 mengalami kenaikan dari tahun 2017 sebesar 124,00 %. Silpa tahun 2019 sebesar Rp27.150.553.902,82 atau 1,86 % dari silpa tahun 2019 dibagi total belanja dalam APBD 2019 dikali 100%) total realisasi belanja tahun 2019 mengalami kenaikan dari tahun 2018 sebesar 46,89 % dan silpa tahun 2020 sebesar Rp.54.762.010.490,96 atau 3,83% dari (silpa tahun 2020 dibagi total belanja dalam APBD 2020 dikali 100%). silpa tahun 2021 sebesar Rp.54.762.010.490,96 atau 3,83%

Tabel II-229

Persentase SILPA terhadap APBD Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase SILPA terhadap APBD	%	0,55	1,32	1,86	3,83	3,50

Sumber: BPKD Kabupaten Bulukumba, 2022

3. Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana

Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 Persentase program/kegiatan yang masuk dalam APBD terlaksana 100 persen.

Tabel II-230

Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	%	100	100	100	100	100

Sumber: BPKD Kabupaten Bulukumba, 2022

4. Persentase belanja pendidikan (20%)

Berdasarkan amanat Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 49 ayat 1 mengatur dana pendidikan selain gaji pendidikan dan biaya pendidikan kedinasan minimal dialokasikan sebesar 20% dari APBD dan APBN. Pada tahun 2016 realisasi belanja dalam APBD Tahun 2016 sebesar **Rp.1.418.879.167.317,96** sedangkan Urusan Pendidikan pada TA 2016 dianggarkan belanja sebesar Rp585.602.345.596,47 dan terealisasi sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp462.311.585.867,00 atau 32,58 %. dari (total realisasi belanja pendidikan dibagi total realisasi belanja dalam APBD tahun 2016 dikali 100), Realisasi belanja Tahun 2017 sebesar **Rp.1.490.352.730.162** sedangkan untuk urusan pendidikan Tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp 497.728.820.784,71 realisasi sebesar Rp 441.844.055.235 atau 29,65%, dari (total realisasi belanja pendidikan dibagi total realisasi belanja dalam APBD tahun 2017 dikali 100), realisasi belanja dalam APBD Tahun 2018 sebesar **Rp.1.402.274.876.733,31** sedangkan untuk urusan pendidikan tahun 2018 dianggarkan belanja sebesar Rp 470.190.140.479,04 realiasi sebesar Rp 458.440.296.950 atau 32,69 % dari (total realisasi belanja pendidikan dibagi total realisasi belanja dalam APBD tahun 2018 dikali 100),realisasi Belanja Tahun 2019 sebesar **Rp.1.456.915.385.877,28** sedangkan untuk urusan pendidikan Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp 458.214.716.554,44 realisasi sebesar Rp444.935.152.215,85 atau 30,54% dari (total realisasi belanja pendidikan dibagi

total realisasi belanja dalam APBD tahun 2019 dikali 100), dan untuk dikondisi akhir periode realisasi tahun 2020 dalam APBD sebesar **Rp.1.428.511.722.922,59** sedangkan urusan pendidikan tahun 2020 dianggarkan belanja dalam APBD sebesar Rp462.570.740.898 realisasi sebesar Rp457.168.426.752 atau 32,00%. dari (total realisasi belanja pendidikan dibagi total realisasi belanja dalam APBD tahun 2019 dikali 100). dan untuk dikondisi akhir periode realisasi tahun 2021 dalam APBD sebesar **Rp.1.505.415.493.238** sedangkan urusan pendidikan tahun 2021 dianggarkan belanja dalam APBD sebesar Rp197.072.197.232 realisasi sebesar Rp457.168.426.752 atau 21,00 %. dari (total realisasi belanja pendidikan dibagi total realisasi belanja dalam APBD tahun 2019 dikali 100).

Tabel II-231

Persentase belanja pendidikan (20%) Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase belanja pendidikan (20%)	%	29,65	32,69	30,54	32,00	21,00

Sumber: BPKD Kabupaten Bulukumba, 2021

5. Persentase belanja kesehatan (10%)

Berdasarkan Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa besaran anggaran pemerintah Daerah dialokasikan minimal 10% dari total anggaran APBD diluar gaji. Pada tahun 2016 realisasi belanja dalam APBD Tahun 2016 sebesar **Rp 1.418.879.167.317,96** sedangkan belanja pada Urusan Kesehatan pada TA 2016 dianggarkan sebesar 278.170.563.350,40 dan terealisasi sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp251.548.435.393 atau 17,73 %. dari (total realisasi belanja kesehatan dibagi total realisasi belanja dalam APBD tahun 2016 dikali 100), Realisasi belanja Tahun 2017 sebesar **Rp1.490.352.730.162** sedangkan belanja untuk urusan Kesehatan Tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp 283.331.619.230 realisasi sebesar Rp260.436.327.893 atau 17,47%, dari (total realisasi belanja kesehatan dibagi total realisasi belanja dalam APBD tahun 2017 dikali 100), realisasi belanja dalam APBD Tahun 2018 sebesar **Rp 1.402.274.876.733,31** sedangkan belanja pada urusan Kesehatan tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp262.574.862.184,21 realisasi sebesar Rp246.657.141.350,75 atau 17,59 % dari (total realisasi belanja kesehatan dibagi total realisasi belanja dalam APBD tahun 2018 dikali 100),realisasi Belanja Tahun 2019 sebesar **Rp1.456.915.385.877,28** sedangkan belanja pada urusan Kesehatan Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp 277.653.563.465,92 realisasi sebesar Rp281.341.194.863,38 atau 19,31% dari (total realisasi belanja kesehatan dibagi total realisasi belanja dalam APBD tahun 2019 dikali 100), dan untuk dikondisi akhir periode realisasi tahun 2020 dalam APBD sebesar **Rp1.428.511.722.922,59** sedangkan belanja pada urusan Kesehatan tahun 2020 dianggarkan dalam APBD sebesar Rp326.212.379.968 realisasi sebesar Rp 269.164.875.500,02 atau 18,84%. dari (total realisasi belanja kesehatan dibagi total realisasi belanja dalam APBD tahun 2019 dikali 100). dan untuk dikondisi akhir periode realisasi tahun 2021 dalam APBD sebesar **Rp.1.505.415.493.238** sedangkan belanja pada urusan Kesehatan tahun 2020 dianggarkan dalam APBD sebesar Rp197.072.197.232 realisasi sebesar Rp 269.164.875.500,02 atau 18,84%. dari (total realisasi belanja kesehatan dibagi total realisasi belanja dalam APBD tahun 2019 dikali 100).

Tabel II-232

Persentase Belanja Kesehatan (10%) Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021

Persentase belanja kesehatan (10%)	%	17,47	17,59	19,31	18,84	19,04
------------------------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber: BPKD Kabupaten Bulukumba, 2022

6. Penetapan APBD (tepat waktu/tidak)

Otonomi daerah sebagai bentuk pelimpahan sebagian wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (pemda), mengakibatkan pemda memiliki kebebasan untuk mengatur sendiri urusan pemerintahannya. Salah satunya adalah pemda diberikan kewenangan untuk mengatur sendiri urusan keuangannya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU No. 3 Tahun 2004). Pengertian mengenai keuangan daerah telah disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Permendagri No. 3 Tahun 2006) sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebagai Tulisan Hukum – UJDIH BPK RI Perwakilan Riau 2 suatu rencana keuangan tahunan pemda. APBD ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah (Perda), yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemda dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat demi tercapainya tujuan bernegara.¹ Secara garis besar, penyusunan APBD terdiri dari 6 (enam) tahapan, yaitu: 1. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA); 2. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 3. Penyiapan Surat Edaran (SE) Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA SKPD); 4. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD; 5. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranper KDH) mengenai Penjabaran APBD; 6. Evaluasi serta penetapan Ranperda APBD dan Ranper KDH mengenai Penjabaran APBD.²

- Perda APBD Tahun Anggaran ditetapkan dengan nomor 13 Tahun 2015 Tanggal 30 Desember 2015
- Perda APBD Tahun Anggaran 2017 ditetapkan dengan Nomor 15 Tahun 2016 Tanggal 30 Desember 2016
- Perda APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan dengan Nomor 6 Tahun 2017 Tanggal 29 Desember 2017
- Perda APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan dengan Nomor 8 Tahun 2018 Tanggal 27 Desember 2018
- Perda APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dengan Nomor 9 Tahun 2019 Tanggal 30 Desember 2019
- Perda APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dengan Nomor 9 Tahun 2019 Tanggal 30 Desember 2020

Tabel II-233

Penetapan APBD (tepat waktu/tidak) Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021

Penetapan APBD (tepat waktu/tidak)		Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
------------------------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Sumber: BPKD Kabupaten Bulukumba, 2021

7. Bagi hasil kabupaten/kota dan Desa

Bagi hasil pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 bahwa pemerintah kabupaten mengalokasikan 10% dari realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah. Kondisi awal realisasi belanja dalam APBD Tahun 2016 sebesar **Rp1.418.879.167.317,96** sedangkan belanja bagi hasil kabupaten/kota dan desa dianggarkan sebesar Rp5.420.786.539 dan realisasi sebesar Rp3.029.513.328 atau 0,21% dari (total realisasi belanja bagi hasil kabupaten/kota dan desa dibagi total realisasi belanja dalam APBD tahun 2016 dikali 100), Realisasi belanja Tahun 2017 sebesar **Rp1.490.352.730.162** sedangkan belanja bagi hasil kabupaten/kota dan desa dianggarkan sebesar Rp5.640.702.200 dan realisasi sebesar Rp3.199.133.941 atau 0,21% dari (total realisasi belanja bagi hasil kabupaten/kota dan desa dibagi total realisasi belanja dalam APBD tahun 2017 dikali 100), realisasi belanja dalam APBD Tahun 2018 sebesar **Rp 1.402.274.876.733,31** sedangkan belanja bagi hasil kabupaten/kota dan desa dianggarkan sebesar Rp3.589.440.542 dan realisasi sebesar Rp1.582.675.368 atau 0,11% dari (total realisasi belanja bagi hasil kabupaten/kota dan desa dibagi total realisasi belanja dalam APBD tahun 2018 dikali 100),realisasi Belanja Tahun 2019 sebesar **Rp 1.456.915.385.877,28** sedangkan belanja bagi hasil kabupaten/kota dan desa dianggarkan sebesar Rp 6.223.178.546 dan realisasi sebesar Rp 4.699.557.898 atau 0,32% dari (total realisasi belanja bagi hasil kabupaten/kota dan desa dibagi total realisasi belanja dalam APBD tahun 2019 dikali 100), dan untuk dikondisi akhir priode Tahun 2020 Realisasi dalam APBD sebesar **Rp1.428.511.722.922,59** sedangkan belanja bagi hasil kabupaten/kota dan desa dianggarkan sebesar Rp 8.059.007.085 dan realisasi sebesar Rp 3.257.853.281 atau 0,23% dari (total realisasi belanja bagi hasil kabupaten/kota dan desa dibagi total realisasi belanja dalam APBD tahun 2020 dikali 100), dan untuk dikondisi akhir priode Tahun 2021 Realisasi dalam APBD sebesar **1.450.653.482.748** sedangkan belanja bagi hasil kabupaten/kota dan desa dianggarkan sebesar Rp 8.059.007.085 dan realisasi sebesar Rp 3.257.853.281 atau 0,23% dari (total realisasi belanja bagi hasil kabupaten/kota dan desa dibagi total realisasi belanja dalam APBD tahun 2020 dikali 100),

Tabel II-234

Bagi hasil kabupaten/kota dan Desa Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Bagi hasil kabupaten/kota dan Desa		0,21	0,11	0,32	0,23	0,22

Sumber: BPKD Kabupaten Bulukumba, 2021

8. Persentase PAD terhadap Pendapatan

Persentase PAD terhadap pendapatan adalah kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah. Keberhasilan dalam menjalankan perekonomian disuatu daerah tidak terlepas dari peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber terbesar Pendapatan Daerah menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004. Salah satu unsur dari Pendapatan Daerah adalah pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin besar kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Dengan Kontribusi yang semakin meningkat, diharapkan pemerintah Daerah semakin mampu membiayai keuangannya. Gambaran kemandirian keuangan daerah dapat diketahui melalui besarnya kemampuan sumber daya keuangan dalam membiayai pelayanan kepada masyarakat daerah.

Berdasarkan persentase Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah antara periode tahun 2016-2017 mengalami peningkatan yang cukup besar sebesar 14.04 ini disebabkan karena meningkatnya sumber-sumber pendapatan yang dapat dikelola, meningkatnya tingkat hunian hotel dan meningkatnya penerimaan Pajak bumi dan bangunan. Periode tahun 2017-2018 mengalami penurunan yang hanya dapat memberikan kontribusi sebesar 9.65 persen dikarenakan turunnya penerimaan BLUD, adanya salah satu potensi pajak yakni pajak Galian C yang tidak dapat dipungut lagi di Daerah, penerimaan Pajak bumi dan bangunan yang mengalami penurunan karena adanya beberapa obyek pajak yang dobel dan tidak diketahui keberadaannya serta retribusi pelayanan parkir karena tidak dipungutnya parkir pada pasar-pasar kecamatan. Periode 2018-2019 kembali mengalami kenaikan yang dapat memberikan kontribusi sebesar 11.63%. Pada Tahun ini semua kelompok pajak, retribusi dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah mengalami peningkatan penerimaan dari tahun pada tahun 2018. Ini disebabkan karena telah digunakannya alat transaksi pajak (M-Pos) pada beberapa hotel, restoran dan rumah makan walaupun tidak semua pelaku usaha dapat dipasang. Sektor pariwisata juga mengalami kenaikan retribusi tempat rekreasi karena meningkatnya kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri. Pada tahun 2019-2020 kembali mengalami Penurunan yang hanya memberikan kontribusi sebesar 11.39 persen. Ini karena adanya pandemi *Covid-19* yang terjadi pada maret 2020 sampai sekarang. Tahun 2020 penerimaan pajak mengalami penurunan karena adanya aturan pemerintah pembatasan skala besar dimana semua orang dilarang bepergian dan berkerumum yang berdampak pada penutupan beberapa tempat rekreasi yang mengakibatkan menurunnya tingkat hunian hotel yang berdampak pula pada penerimaan para pengusaha restoran dan rumah makan sehingga tidak mampu membayar pajak sesuai yang ditetapkan. Pada tahun 2020 penerimaan PAD hanya sebesar Rp. 168.422.009.341.24 atau sebesar 31.33%. Adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah tentunya berpengaruh pada penerimaan Pendapatan Daerah. Karena PAD merupakan sumber keuangan terbesar bagi Daerah, maka Pemerintah Daerah harus mampu mengembangkan dan meningkatkan sumber-sumber penerimaan PAD, . Pada tahun 2020 penerimaan PAD hanya sebesar Rp. 168.422.009.341.24 atau sebesar 31.33%. Adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah tentunya berpengaruh pada penerimaan Pendapatan Daerah. Karena PAD merupakan sumber keuangan terbesar bagi Daerah, maka Pemerintah Daerah harus mampu mengembangkan dan meningkatkan sumber-sumber penerimaan PAD

Tabel II-235

Persentase PAD terhadap Pendapatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	14,04	9,65	11,63	11,39	14,08

Sumber: Bapenda Kabupaten Bulukumba, 2022

C. Urusan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Keberhasilan kinerja pelayanan pada urusan kepegawaian serta diklat dapat dilihat pada indikator yaitu persentase peningkatan kompetensi sumberdaya aparatur dan persentase jabatan struktural yang terisi berserta indikator pendukung lainnya. Berikut adalah perkembangan indikator urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.

1. Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan Pelatihan

Capaian Indikator Kinerja Tahun 2017-2021 rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan selama kurang lebih dari tiga bulan dan pemenuhan 20 jam pelajaran yang diatur dalam UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN pasal 70 yang ditindak lanjuti dalam PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS atas hak PNS pada Pasal 203 ayat A Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2023

tentang Pengembangan Kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 Jam pelajaran dalam 1 tahun. Pelatihan yang dimaksud adalah pelatihan pejabat struktural (PKA,PKP,PKN) dan Juga pelatihan Dasar CPNS/Pelatihan Prajabatan CPNS yang dianggarkan oleh BKPSDM/difasilitasi oleh BKPSDM Kab Bulukumba. Pelatihan Fungsional yang berhubungan dengan tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan tidak menjadi bagian dari kegiatan BKPSDM. Pada tahun 2017 – 2021 Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan Pelatihan sebanyak 3 bulan.

Tabel II-236

Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan Pelatihan	Bulan	3	3	3	3	3

Sumber : BKPSDM Kabupaten Bulukumba, 2022

2. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

Indikator capain RPJMD Tahun 2017 – 2021 sebelumnya masih menggunakan Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan menggunakan analisis data Jumlah ASN bukan Presentase .Sehingga untuk mengukur target capaian Tahun 2017-2021 dengan menggunakan Permendagri 86 Tahun 2017 dengan menggunakan analisis data Persentase ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal. Pada Tahun 2017 capaian realisasi menurun sebesar 116,13 % dan Capaian Realisasi pada Tahun 2021 Menurun sebesar 74,19 Persen disebabkan karna Anggaran Yang terbatas.

Tabel II-237

Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	116.13	38.71	100	96.77	74,19

Sumber : BKPSDM Kabupaten Bulukumba, 2022

3. Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural

Indikator capain RPJMD Tahun 2017 – 2021 sebelumnya masih menggunakan Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembngunan Daerah Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural pada tahun 2017 sebanyak 116,13% dan pada Tahun 2021 menurun mencapai 14,71%. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya anggaran.

Tabel II-238

Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	15.29	50.59	55.81	47.06	14,71

Sumber : BKPSDM Kabupaten Bulukumba, 2022

4. Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah

Jumlah jabatan pimpinan tinggi lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 sebanyak 40 jabatan yang terdiri atas sekretaris Daerah, 3 (tiga) Asisten, 3 (tiga) Staf Ahli Bupati Sekretaris DPRD, Inspektur Kabupaten, Kasatpol PP dan Damkar, 6 (enam) Kepala Badan, dan 24 (Dua Puluh Empat) Kepala Dinas. Untuk Pengangkatan jabatan pimpinan tinggi tersebut dilakukan melalui proses seleksi terbuka. Dalam Pelaksanaan seleksi Jabatan Tinggi Pratama yang dilakukan belum memenuhi empat elemen sistem MERIT yang terdiri dari Transparansi, Netralitas, Kemampuan Individu dan non Diskriminasi dengan menyeluruh. Namun dalam aspek transparansi terdapat salah satu alat ukur yang sudah terpenuhi oleh seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama yang dilakukan disetiap Instansi yaitu menerbitkan Informasi tentang seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama dan dalam aspek non diskriminasi terdapat alat ukur yang sudah terpenuhi dalam seleksi jabatan tinggi pratama yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh calon tanpa membedakan jenis kelamin, ras, agama dan kemampuan individu melalui tes cat dan wawancara oleh panitia seleksi.

Tabel II-239
Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Jabatan	37	40	40	40	40

Sumber : BKPSDM Kabupaten Bulukumba, 2022

5. Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah

Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah kabupaten Bulukumba pada tahun 2021 yang terdiri dari jabatan administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan pelaksana sebanyak 2.093 pada jabatan administrasi. Setiap jabatan ditetapkan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dimana diatur dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, namun kondisi sekarang standar kompetensi jabatan administrasi masih dalam tahap penyusunan.

Tabel II-240
Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Jabatan	2.452	2.613	2.425	2.297	2.093

Sumber : BKPSDM Kabupaten Bulukumba, 2021

D. Urusan Pengawasan

1. Persentase Tindak Lanjut Temuan

Indikator kinerja pertama untuk bidang urusan pengawasan adalah persentase tindak lanjut temuan. Indikator ini dihitung dengan rumus jumlah temuan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah total temuan dan dikalikan dengan 100%. Pada tahun 2021 tingkat tindak lanjut temuan mulai berkurang sebesar 56,60 persen dari tahun sebelumnya.

Rendahnya penyelesaian tindak lanjut antara lain disebabkan oleh komitmen dan penerapan tata kelola tindak lanjut yang rendah. OPD sebagai auditan banyak yang tidak menjadikan tindak lanjut sebagai prioritas. Selain itu mekanisme *reward and punishment* terhadap OPD yang cepat dan yang lambat menindaklanjuti temuan belum dilakukan. Secara umum persentase tindak lanjut temuan sebagaimana Tabel berikut ini:

Tabel II-241

Persentase tindak lanjut temuan Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase tindak lanjut temuan	%	73.7	61.9	54.2	59.5	56,60

Sumber: Inspektorat Daerah, Kabupaten Bulukumba, 2022

2. Persentase Pelanggaran Pegawai

Indikator ini dihitung dengan cara jumlah ASN yang dikenai sanksi dibagi jumlah total ASN dan dikalikan dengan 100%. Dalam rentang waktu lima tahun sejak tahun 2017 – 2021, jumlah ASN yang dikenai sanksi mengalami fluktuasi diana pada tahun 2017 ampai 2019 mengalami peningkatan sebesar 0,106 menjadi 3,15 persen dan pada tahun 2020 hingga tahun 2021 mengalami penuruna sebesar 0,273 hingg 0,13

Tabel II-242

Persentase pelanggaran Pegawai Kabupaten Bulukumba 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase pelanggaran Pegawai	%	0.106	0.26	0.315	0.273	0,13

Sumber: Inspektorat Daerah, Kabupaten Bulukumba, 2022

3. Jumlah Temuan BPK

Pada 2017 hingga pada Tahun 2020 terus mengalami penurunan. Di Tahun 2021 ada 14 temuan terkait Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan kepatuhan. Trend penurunan jumlah temuan BPK ini tentu saja suatu hal yang harus terus dipertahankan melalui sinergitas yang terjaga dengan seluruh OPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba. Adapun trend penurunan jumlah temuan BPK sebagaimana tergambar pada Tabel berikut:

Tabel II-243

Jumlah temuan BPK Kabupaten Bulukumba 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah temuan BPK	Temuan	22	17	10	9	14

Sumber: Inspektorat Daerah, Kabupaten Bulukumba, 2022

E. Urusan Penelitian dan Pengembangan

1. Persentase implementasi rencana Kelitbangan

Capaian indikator urusan Penelitian dan Pengembangan dapat diketahui dari beberapa indikator. Untuk Indikator Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan, pada tahun 2017, jumlah kajian yang direncanakan mencapai 52.63% (Dari 19 kajian yang direncanakan terealisasi 10 kajian), pada tahun 2018, jumlah kajian yang direncanakan mencapai 58.33% (Dari 24 kajian yang direncanakan terealisasi 14 kajian), pada tahun 2019, jumlah kajian yang direncanakan mencapai 48.28% (Dari 29 kajian yang direncanakan terealisasi 14 kajian), dan pada tahun 2020, jumlah kajian yang direncanakan mencapai 6.06% (Dari 33 kajian yang direncanakan terealisasi 2 kajian).dan pada tahun 2021 jumlah kajian mencapai sebesar 85,71 persen.

Berdasarkan realisasi jumlah kajian setiap tahun dari tahun 2017-2017 berfluktuasi tergantung besarnya pagu anggaran. Data indikator dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II-244

Persentase implementasi rencana Kelitbangan Kabupaten Bulukumba 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021

Persentase implementasi rencana Kelitbangan	%	52.63	58.33	48.28	6.06	85,71
---	---	-------	-------	-------	------	-------

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Bulukumba, 2022

2. Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan

Pada tahun 2017, jumlah kajian yang dimanfaatkan mencapai 26.32% (Dari 19 kajian yang rencana akan dimanfaatkan terealisasi hanya 4 kajian). Karena anggaran pada tahun tersebut kurang memadai dan masih kurang dimanfaatkan sehingga hanya terealisasi 4 kajian, pada tahun 2018, jumlah kajian yang dimanfaatkan mencapai 16.67% (Dari 24 kajian yang rencana akan dimanfaatkan terealisasi hanya 4 kajian). Karena anggaran pada tahun tersebut kurang memadai dan masih kurang dimanfaatkan sehingga hanya terealisasi 4 kajian, pada tahun 2019, jumlah kajian yang dimanfaatkan mencapai 24.14% (Dari 29 kajian yang rencana akan dimanfaatkan terealisasi hanya 7 kajian). Karena anggaran pada tahun tersebut kurang memadai dan masih kurang dimanfaatkan sehingga hanya terealisasi 7 kajian sedangkan pada tahun 2020, jumlah kajian yang dimanfaatkan mencapai 12.12% (Dari 33 kajian yang rencana akan dimanfaatkan terealisasi hanya 4 kajian) dan pada tahun 2021 jumlah kajian yang dimanfaatkan mencapai sebesar 100 persen. Data indikator dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II-245

Persentase pemanfaatan hasil Kelitbangan Kabupaten Bulukumba 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase pemanfaatan hasil Kelitbangan		26.32	16.67	24.14	12.12	100

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Bulukumba, 2022

3. Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah

Pada tahun 2017, jumlah SKPD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah sebanyak 50% (Dari 12 SKPD yang rencananya akan difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah, hanya 6 SKPD terealisasi).

Pada tahun 2018, jumlah SKPD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah sebanyak 42.85% (Dari 14 SKPD yang rencananya akan difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah, hanya 6 SKPD terealisasi), pada tahun 2019, jumlah SKPD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah sebanyak 62.5% (Dari 16 SKPD yang rencananya akan difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah, hanya 10 SKPD terealisasi) sedangkan pada tahun 2020, jumlah SKPD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah sebanyak 11.11% (Dari 18 SKPD yang rencananya akan difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah, hanya 2 SKPD terealisasi). Dan ditahun 2021 jumlah SKPD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah sebesar 70,00 persen Data indikator dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II-246

Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah Kabupaten Bulukumba 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah		50	42.85	62.5	11.11	70.00

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Bulukumba, 2022

4. Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah:

Pada tahun 2017, jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah mencapai 80% (Dari target 25 kebijakan yang rencana diterapkan, hanya 20 kajian yang terealisasi), pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2023

tahun 2018, jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah mencapai 66.67% (Dari target 30 kebijakan yang rencana diterapkan, hanya 20 kajian yang terealisasi), pada tahun 2019, jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah mencapai 83.33% (Dari target 30 kebijakan yang rencana diterapkan, hanya 25 kajian yang terealisasi) sedangkan pada tahun 2020, jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah mencapai 33.33% (Dari target 30 kebijakan yang rencana diterapkan, hanya 10 kajian yang terealisasi) dan pada tahun 2021 jumlah kajian inivasi yang diterpkan di daerah mencapai 33,33 persn. Data indikator dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel II-247
Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah
Kabupaten Bulukumba 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah		80	66.67	83.33	33.33	33,33

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Bulukumba, 2022

F. Sekretariat Dewan

Berikut ini adalah perkembangan indikator Sekretariat Dewan pada unsur penunjang atau pendukung daerah di Kabupaten Bulukumba.

1. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten

Rencana kerja tahunan pada setiap alat kelengkapan DPRD untuk tahun 2017 sampai 2021 oleh sekretariat DPRD secara administrasi tidak di disusun dalam bentuk surat keputusan nanti setelah 2018 sejak berlakunya PP 12 tahun 2018 sekretariat DPRD mulai menyusun rencana kerja alat kelengkapan DPRD dalam bentuk surat keputusan. Untuk capaian 2017-2021 sudah tersedia/ada Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD.

Tabel II-248
Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD
Kabupaten Kabupaten Bulukumba 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba, 2022

2. Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)

Sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang No 12 tahun 2009 tentang pemerintahan daerah, juga undang-undang No 27 tahun 2009 tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD dan Peraturan Pemerintahan No 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota bahwa DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan kedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai tiga fungsi yaitu :

- 1) Fungsi Legislasi
- 2) Fungsi Anggaran
- 3) Fungsi Pengawasan

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi DPRD tersebut maka DPRD memiliki sekretariat DPRD, sebagaimana diamanatkan dalam UU No 32 tahun 2004 dan dipertegas dipertegas dalam Peraturan Pemerintah No 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, bahwa sekretariat DPRD adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelayanan administrasi DPRD. Yang meliputi penyelenggaraan administrasi sekretariat DPRD, penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang dibutuhkan oleh DPRD.

Tabel II-249

Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda. dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen RPJMD maupun Dokumen RKPD Kabupaten Bulukumba 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan. Fungsi Pembentukan Perda. dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba, 2022

3. Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD

Berdasarkan kedudukan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam menunjang tugas-tugas DPRD, Maka Sekretariat DPRD menyusun indikator kinerja yang menggambarkan kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil yang dihubungkan dengan Visi yang di emban, Penetapan indikator kinerja bertujuan memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Visi & Misi Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah.

Sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD menetapkan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan tabel sebagai berikut :

Tabel II-250

Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Kabupaten Bulukumba 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan. pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba, 2022

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

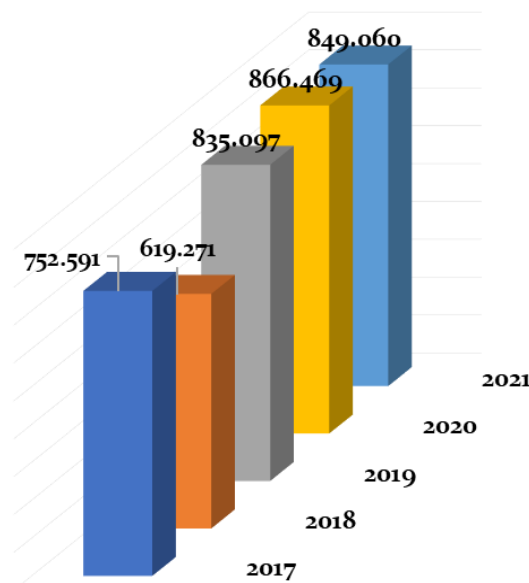
Aspek daya saing daerah terdiri dari Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur. Fokus Iklim Berinvestasi dan Fokus Sumber Daya Manusia.

A. Kemampuan Ekonomi Daerah

1) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga terus mengalami tren peningkatan di Kabupaten Bulukumba pada 2017-2021. Pada tahun 2017 mencapai 725.591, anomali terjadi di tahun 2018 dengan penurunan tingkat konsumsi hanya 619.271. Walaupun demikian tahun 2020 tingkat konsumsi masyarakat kembali meningkat sebesar 866.469. pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan sebesar 849.060 sebagaimana grafik dibawah ini.

Grafik II-31
Rata-rata Nilai Konsumsi/Pengeluaran Per Rumah Tangga
Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 - 2020

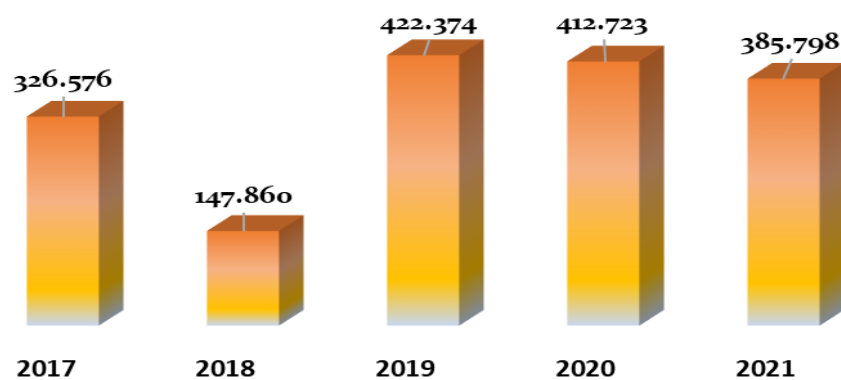


Sumber : BPS Kabupaten Bulukumba, 2022

2) Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita

Konsumsi non pangan Bulukumba juga terus mengalami peningkatan kecuali di tahun 2018 hanya 14.860. Pada tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, konsumsi non pangan mencapai 385.798 dari total konsumsi rumah tangga. Apabila dirata-ratakan pada periode 2017-2021, konsumsi non pangan Bulukumba mencapai 324.348 dari total konsumsi. hal ini menunjukkan bahwa pangan semakin menjadi bukan konsumsi utama masyarakat sebagaimana gambar dibawah ini

Grafik II-32
Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita
Kabupaten Bulukumba 2017 - 2021



Sumber : BPS Kabupaten Bulukumba, 2022

3) Nilai Tukar Petani

Nilai tukar petani merupakan indikator ukuran tingkat kesejahteraan petani. Nilai tukar petani menggambarkan kemampuan petani untuk memenuhi kebutuhan produksi dan kebutuhan hidup dari nilai produksi yang diperoleh. Nilai tukar petani dapat diukur pada

setiap subsektor pertanian. Nilai Tukar Petani menunjukkan tingkat pendapatan petani dibandingkan apa yang mereka keluarkan untuk melakukan usaha tani. Angka 100 merupakan tingkat impas antara pendapatan dan pengeluaran.

Sementara itu, untuk Nilai Tukar Petani (NTP) sepanjang tahun 2021 pada bulan Januari sampai dengan November di Bulukumba berada di atas 100 yang menandakan bahwa yang diterima oleh petani lebih besar jika dibandingkan dengan yang dibayarkan. NTP paling tinggi di bulan November dengan nilai 107,18 % dan paling rendah di bulan Februari sebesar 103,10 %.

B. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1) Ketaatan Terhadap RTRW

Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Bulukumba menargetkan sebanyak 65% ruang dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan tata ruang. dan realisasinya sudah sesuai dengan target. Realisasi ini masih belum optimal menunjukkan adanya pencapaian pada tahun 2019 karena realisasi pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Peruntukan Tata Ruang masih sebesar 80%. Artinya hingga tahun 2019 baru 80% ruang yang sesuai RTRW dan di tahun 2021 sebesar 81 %

Tabel II-251
Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW
Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Peruntukan Tata Ruang		N/A	65	70	80	81

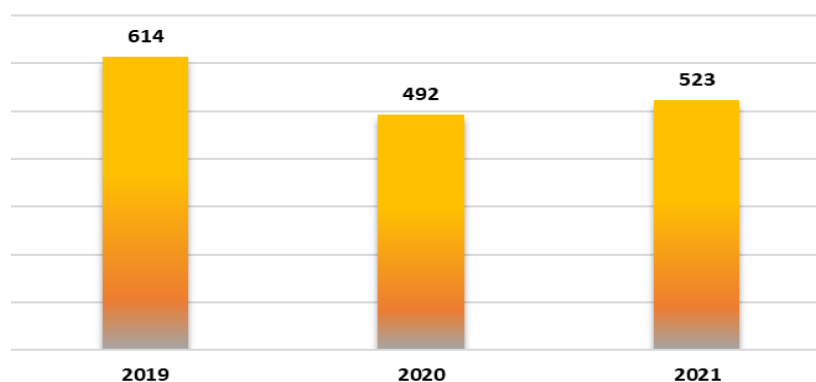
Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Bulukumba, 2022

C. Fokus Iklim Berinvestasi

1) Kriminalitas

Secara umum, fungsi Jumlah Tindak Pidana ini adalah untuk memperoleh gambaran secara makro mengenai situasi dan kondisi keamanan masyarakat terkini serta perkembangannya selama beberapa tahun terakhir. Secara khusus, informasi ini juga ditujukan untuk memperoleh gambaran secara lengkap mengenai karakteristik kejadian kejahatan dan fenomena perkelahian massal yang terjadi di wilayah Indonesia. Berikut ini adalah angka kriminalitas tertangani di Kabupaten Bulukumba dari kurun waktu 2019-2021

Grafik II-33
Jumlah Tindak Pidana Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 – 2021



Sumber: BPS Kabupaten Bulukumba, 2022

D. Fokus Sumberdaya Manusia

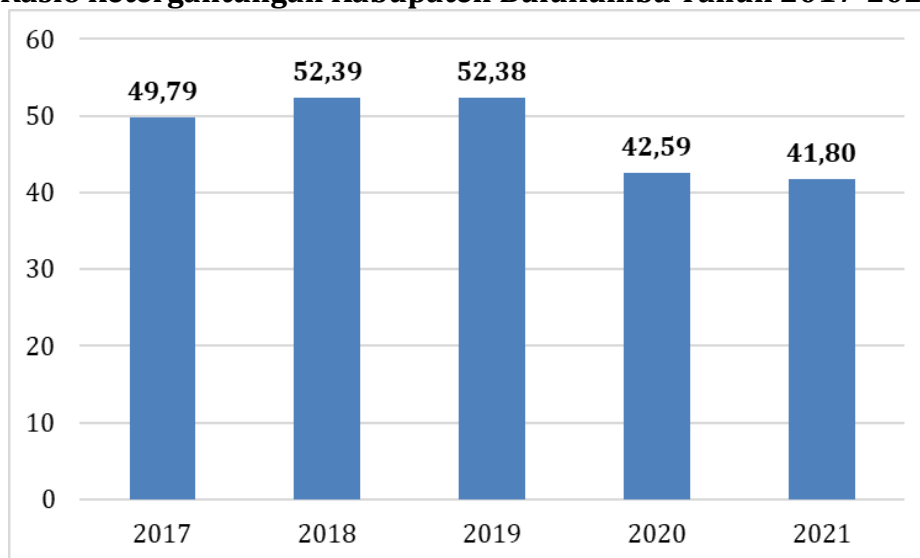
1) Rasio Ketergantungan

Semakin tingginya persentase *dependency ratio*/ rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Angka rasio ketergantungan di Bulukumba mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan jumlah penduduk usia non produktif lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk dengan usia produktif. Langkah ke depan yang perlu dilakukan adalah meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian Bulukumba agar usia produktif dapat membiayai usia non produktif

Dari Rasio Ketergantungan Kabupaten Bulukumba pada tahun 2021 sebesar 41,80 persen, artinya setiap 100 orang yang produktif (berusia kerja) mempunyai tanggungan sebanyak 41 orang (yang belum produktif dan atau tidak produktif lagi).

Grafik II-34
Rasio ketergantungan Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2022



Sumber: Diolah dari data BPS Bulukumba, 2022

2.1.5 Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021

Pengolahan informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis data mencakup kondisi geografis, demografi, potensi sumber daya, ekonomi dan keuangan, dan informasi terkait dengan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Untuk mengetahui capaian indikator kinerja dari setiap aspek/fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dengan melakukan evaluasi terhadap capaian indikator kinerja. Sebagai gambaran pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah tahun 2021 capaian Indikator Kinerja Daerah sesuai amanah Permendagri 86 Tahun 2017 dijabarkan pada tabel berikut ini:

Tabel II-252
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021

No	Uraian	Satuan	Tahun 2021		Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)		
			Capaian	Target			
1	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
1	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi						
1	1	1	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,76	3,2	Melampaui
1	1	2	PDRB ADHK	Rp, Miliar	9.013,58	8.805,34	Melampaui
1	1	3	Laju inflasi	%	2,16	2,69	Melampaui
1	1	4	PDRB Perkapita ADHB	Rp, Juta	36,06	37,43	Belum Tercapai
1	1	5	Indeks Gini	%	0,362	0,366	Melampaui
1	1	6	Persentase Penduduk miskin	%	7,43	6,83	Belum Tercapai

No		Uraian	Satuan	Tahun 2021		Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	
				Capaian	Target		
1	2	Kesejahteraan sosial					
1	2	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	69,62	69,71	Belum Tercapai
1	2	2	Angka Usia Harapan Hidup	angka	68,1	68,37	Belum Tercapai
1	2	3	Angka Harapan Lama Sekolah	angka	13,41	13,47	Belum Tercapai
1	2	4	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	angka	7,82	7,75	Melampaui
1	2	5	Pengeluaran Per Kapita Riil	Rp	10632	10.570	Melampaui
1	2	6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		65,46	68,81	Belum Tercapai
1	2	7	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,14	3,44	Melampaui
1	2	8	Persentase Balita Gizi Buruk	%	0,03	0,02	Melampaui
1	3	Seni Budaya Dan Olahraga					
1	3	1	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya	kali	1	5	Belum Tercapai
1	3	2	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	25	2,89	Melampaui
2	ASPEK PELAYANAN UMUM						
2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
2	1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan					
2	1	1	Angka Partisipasi Kasar (APK)				
			SD	%	106,38	113,7	Belum Tercapai
			SMP	%	81,88	92,57	Belum Tercapai
2	1	2	Angka Partisipasi Murni (APM)				
			SD	%	98,06	98,65	Belum Tercapai
			SMP	%	74,01	84,02	Belum Tercapai
2	1	3	Angka Partisipasi Sekolah (APS)				
			7-12 Tahun	%	106,38	98,87	Melampaui
			14-15 Tahun	%	81,88	92,29	Belum Tercapai
			16-18 Tahun	%	99,68	75,27	Melampaui
2	1	4	Angka Putus Sekolah				
			SD	%	0,8	0	Melampaui
			SMP	%	1,2	0	Melampaui
2	1	5	Angka Kelulusan				
			SD	%	100	100	Sesuai
			SMP	%	100	100	Sesuai
2	1	6	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-Iv	%	7,59	97,95	Belum Tercapai
2	1	7	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar	rasio	1:15	1:11	Belum Tercapai
2	1	8	Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah	rasio	1:09	1:09	Belum Tercapai
2	1	9	Angka Melek Huruf Berumur 15 Tahun Ke Atas	%	89,9	91,61	Belum Tercapai
2	2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan					
2	2	1	Angka Kematian Bayi Kelahiran Hidup		0,29	6,58	Melampaui
2	2	2	Angka Kematian Balita Kelahiran Hidup		0	10,05	Melampaui
2	2	3	Angka Kematian Neonatal Kelahiran Hidup		7,29	2,91	Melampaui
2	2	4	Angka Kematian Ibu		145,88	57,94	Melampaui
2	2	5	Rasio Posyandu Per Satuan Balita		23,37	24,35	Belum Tercapai
2	2	6	Rasio Puskesmas Dan Pustu		0,19	0,19	Sesuai
2	2	7	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk		0,005	0,002	Melampaui
2	2	8	Rasio Poliklinik Per Satuan Penduduk		0,04	0,04	Sesuai
2	2	9	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk		0,14	0,093	Melampaui
2	2	10	Rasio Tenaga Medis/Penduduk		0,256	0,226	Melampaui

No			Uraian	Satuan	Tahun 2021		Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
					Capaian	Target	
2	2	11	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	%	87,46	84,79	Melampaui
2	2	12	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	63,97	100	Belum Tercapai
2	2	13	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan	%	100	100	Sesuai
2	2	14	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit Tbc Bta	%	71,3	47,1	Melampaui
2	2	15	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis	<i>Per 1000 Penduduk</i>	121,16	108,83	Melampaui
2	2	16	Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis	<i>Per 1000 Penduduk</i>	6,48	3,9	Melampaui
2	2	17	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	%	100	100	Sesuai
2	2	18	Angka Kejadian Malaria	<i>Per 1000 Penduduk</i>	0,02	2,68	Melampaui
2	2	19	Prevalensi Hiv/Aids (Persen) Dari Total Populasi	%	0,34	0,011	Melampaui
2	2	20	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	%	35,36	6,58	Melampaui
2	2	21	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	%	54,71	73,99	Belum Tercapai
2	2	22	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping Asi Pada Anak Usia 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin	%	71,31	55,22	Melampaui
2	2	23	Cakupan Pelayanan Dasar Masyarakat Miskin	%	60,4	81,8	Belum Tercapai
2	3		Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang				
2	3	1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	%	86.02	99	Melampaui
2	3	2	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk		0.0052	0,0033	Melampaui
2	3	3	Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 M)	%	0	96,54	Belum Tercapai
2	3	4	Persentase Luas irigasi dalam kondisi baik	%	82,91	79,86	Melampaui
2	3	5	Rasio Jaringan Irigasi		0,93	0,16	Melampaui
2	4		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman				
2	4	1	Rasio Rumah Layak Huni		0,236	0,247	Belum Tercapai
2	4	2	Persentase Permukiman Yang Tertata	%	65	68,67	Belum Tercapai
2	4	3	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	%	11,5	10,98	Belum Tercapai
2	4	4	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	%	92,42	93,39	Belum Tercapai
2	4	5	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	76,26	81,73	Belum Tercapai
2	4	6	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%	84,26	84,82	Belum Tercapai
2	4	7	Persentase Areal Kawasan Kumuh	%	0,11	0	Belum Tercapai
2	4	8	Rasio Bangunan Ber IMB Per Satuan Bangunan		6,02	2,06	Melampaui
2	5		Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat				

No			Uraian	Satuan	Tahun 2021		Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
					Capaian	Target	
2	5	1	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)		0.31	0,32	Melampaui
2	5	2	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)		100	100	Sesuai
2	5	3	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota		0.002269	0,003	Melampaui
2	5	4	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)		100	100	Sesuai
2	5	5	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	Sesuai
2	6		Urusan Pemerintahan Bidang Sosial				
2	6	1	Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo Dan Panti Rehabilitasi	unit	13	13	Belum Tercapai
2	6	2	Perentase Jumlah Korban Bencana Yang Ditangani	%	100	100	Sesuai
2	6	3	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial	%	26.80	97,48	Melampaui
2	6	4	Persentase PMKS Yang Tertangani	%	26.80	76,35	Melampaui
2	6	5	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	%	100	91,49	Melampaui
2	6	6	Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial	%	93.90	84,36	Melampaui
2			Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
2	7		Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja				
2	7	1	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun	%	1.18	0	Belum Tercapai
2	7	2	Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	0.38	0,28	Belum Tercapai
2	7	3	Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	%	1	1,82	Belum Tercapai
2	7	4	Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	%	1	1,75	Belum Tercapai
2	7	5	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%	20	0,25	Melampaui
2	7	6	Besaran Pengujian Peralatan Di Perusahaan	%	2.00	0,08	Melampaui
2	7	7	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	%	0.53	0,71	Melampaui
2	7	8	Rasio Lulusan S1/S2/S3	Per 10,000	718.00	717,48	Melampaui
2	7	9	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja		46.86	69,24	Melampaui
2	7	10	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan		1	0,98	Melampaui
2	7	11	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat		0.53	0,49	Melampaui
2	8		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak				
2	8	1	Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah	%	3,7	4,4	Belum Tercapai
2	8	2	Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan Di DPRD	%	20	22	Belum Tercapai

No			Uraian	Satuan	Tahun 2021		Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
					Capaian	Target	
2	8	3	Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta	%	92,09	82,6	Melampaui
2	8	4	Rasio KDRT		0	0,002	Melampaui
2	8	5	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	97,77	96,81	Melampaui
2	8	6	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu		100	100	Sesuai
2	8	7	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Di Puskesmas Mampu Tatalaksana Ktp/A Dan Ppt/Pkt Di Rumah Sakit		100	44,7724	Melampaui
2	8	8	Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak		100	100	Sesuai
2	9		Urusan Pemerintahan Bidang Pangan				
2	9	1	Ketersediaan Pangan Utama		368,95	422,86	Belum Tercapai
2	9	2	Ketersediaan Energi (Kkl/Kap/Hari)		2.662,51	7.769,84	Belum Tercapai
2	9	3	Ketersediaan Protein (Gram/Kap/Hari)		69	153,87	Belum Tercapai
2	9	4	Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan (%)		60	72,96	Belum Tercapai
2	10		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian				
2	10	1	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	%	25,7	25,4	Melampaui
2	10	2	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	%	75	56,98	Melampaui
2	11		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup				
2	11	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	63.22	63,22	Melampaui
2	11	2	Indeks Kualitas Air	Poin	81.36	61	Melampaui
2	11	3	Indeks Kualitas Udara	Poin	84.64	84,64	Melampaui
2	11	4	Indeks Kualitas Tutup Lahan	Poin	23.56	27,43	Melampaui
2	11	5	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	%	95.93	95,93	Melampaui
2	11	6	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	%	1	1	Sesuai
2	11	7	Terverifikasinya MHA Dan Kearifan Lokal Atau Pengetahuan Tradisional	Kelompok	1	1	Sesuai
2	11	8	Penetapan Hak MHA	Kelompok	1	1	Sesuai
2	11	9	Terfasilitasi Kegiatan Peningkatan Pengetahuan Dan Keterampilan	Kelompok	100	100	Sesuai
2	11	10	Terfasilitasi Penyediaan Sarana/Prasarana	Kelompok	100	100	Sesuai

No	Uraian	Satuan	Tahun 2021		Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)		
			Capaian	Target			
2	11	11	Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Masyarakat	Kelompok	1	1	Sesuai
2	11	12	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	Kelompok	2	Ada	Belum Tercapai
2	11	13	Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin Pplh Dan PUU LH yang Di Terbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya Di Daerah Kabupaten/Kota,	sekolah	100	100	Sesuai
2	11	14	Timbulan Sampah Yang Ditangani	%	24.95	24,95	Melampaui
2	11	15	Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani	%	86.63	86,63	Melampaui
2	11	16	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota	%	26.24	26,24	Melampaui
2	11	17	Jumlah Limbah B3 Yang Terkelola Dan Proporsi Limbah B3 Yang Diolah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan (Sektor Industri)	Ton/Kg	35	35	Melampaui
2	11	18	Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan Sertifikasi SNI ISO 14001	Buah	1	1	Belum Tercapai
2	11	19	Proporsi Tutupan Lahan Terhadap Luas Lahan Keseluruhan	%	29.86	29,86	Melampaui
2	11	20	Proporsi Luas Lahan Kritis Yang Direhabilitasi Terhadap Luas Lahan Keseluruhan	%	32.36	32,36	Melampaui
2	11	21	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	Dok	0	0	Sesuai
2	12		Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil				
2	12	1	Rasio Penduduk ber KTP per satuan penduduk,		1,64	1	Melampaui
2	12	2	Rasio bayi berakta kelahiran,		90,5	0,8	Melampaui
2	12	3	Rasio pasangan berakta nikah,		31,8	0,5	Melampaui
2	12	4	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK		100	100	Sesuai
2	12	5	Cakupan penerbitan KTP-el		102,72	100	Melampaui
2	12	6	Cakupan penerbitan akte kelahiran		98,89	80	Melampaui
2	13		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa				
2	13	1	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik		109	100	Melampaui
2	13	2	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Pkk		146	146	Sesuai
2	13	3	Persentase Lsm Aktif	%	0	100	Belum Tercapai
2	13	4	Persentase Pkk Aktif	%	100	100	Sesuai
2	13	5	Persentase Posyandu Aktif	%	100	100	Sesuai
2	13	6	Jumlah Aparat Desa Yang Ditingkatkan Kapasitasnya		100	100	Sesuai
2	13	7	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)		93	93	Sesuai
2	14		Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana				
2	14	1	Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk (Lpp)	%	1,04	0,55	Melampaui
2	14	2	Total Fertility Rate (Tfr)	%	2,31	2,474	Belum Tercapai

No			Uraian	Satuan	Tahun 2021		Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
					Capaian	Target	
2	14	3	Persentase perangkat daerah(dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	%	27,7	67,83	Belum Tercapai
2	14	4	Persentase Perangkat Daerah Dinas/ Badan Yang Menyusun Dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	11,11	8,33	Melampaui
2	14	5	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah) Yang Mengatur Tentang Pengendalian Kuantitas Dan Kualitas Penduduk	%	1	1	Sesuai
2	14	6	Jumlah Sektor Yang Menyepakati Dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter Dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan Program Pembangunan		1, Dinas DUK CAPIL 2, BAPPEDA 3, DIKNAS 4, DINKES 5, BPS 6, DPPKB	1, Dinas DUK CAPIL 2, BAPPEDA 3, DIKNAS 4, DINKES 5, BPS 6, DPPKB	Sesuai
2	14	7	Jumlah Kerja Sama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, Dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan,		1, Dinas Pendidikan 2, IBI 3, PKBM	1, Dinas Pendidikan 2, IBI 3, PKBM	Sesuai
2	14	8	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	%	20,25	19,4	Melampaui
2	14	9	Ratio Akseptor Kb	%	5,55	15,27	Belum Tercapai
2	14	10	Angka Pemakaian Kontrasepsi/Cpr Bagi Perempuan Menikah Usia 15 - 49	%	74,05	75,5	Belum Tercapai
2	14	11	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19)per 1,000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)		89,79	89,79	Sesuai
2	14	12	Cakupan Pasangan Usia Subur (Pus) Yang Istrinya Dibawah 20 Tahun	%	4,35	4,36	Belum Tercapai
2	14	13	Cakupan Pus Yang Ingin Ber-Kb Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	10,78	13,11	Belum Tercapai
2	14	14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	20,57	35,29	Belum Tercapai
2	14	15	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	%	35,05	40,56	Belum Tercapai
2	14	16	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita	%	80,05	83,06	Belum Tercapai
2	14	17	Cakupan Bina Keluarga Remaja Ber- Kb	%	76,29	69,75	Melampaui
2	14	18	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia Ber- Kb	%	75,31	72,11	Melampaui
2	14	19	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Ppks) Di Setiap Kecamatan	%	10	10	Sesuai
2	14	20	Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa	%	4,3	1,96	Melampaui

No	Uraian	Satuan	Tahun 2021		Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)		
			Capaian	Target			
2	14	21	Cakupan Pkb/Plkb Yang Didaya Gunakan Perangkat Derah Kb Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Bdag Pengendalian Penduduk	%	100	100	Sesuai
2	14	22	Cakupan Pus Peserta Kb Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (Uppks) Yang Ber-Kb Mandiri	%	50,72	0,27	Melampaui
2	14	23	Rasio Petugas Pembantu Pembina Kb Desa (Ppkbd) Setiap Desa/Kelurahan	%	100	100	Sesuai
2	14	24	Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat	%	85,35	100	Belum Tercapai
2	14	25	Persentase Faskes Dan Jejarnya (Seluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerja Sama Dengan Bpjs Dan Memberikan Pelayanan Kb/Kr Yang Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan	%	100	23,56	Melampaui
2	14	26	Cakupan Penyediaan Informasi Data Makro Keluarga Di setiap Desa	%	100	100	Sesuai
2	14	27	Persentase Remaja Yang Terkena Infeksi Menular Sesual (Ims)	%	0	0	Sesuai
2	14	28	Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga	%	7,6	100	Belum Tercapai
2	14	29	Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita Dan Anak Yng Memahami Dan Melaksanakan Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	%	20,59	37,82	Belum Tercapai
2	14	30	Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita	%	22	22,46	Belum Tercapai
2	14	31	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan , Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD Dan APBDes	%	0,618	0,01	Melampaui
2	15		Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan				
2	15	1	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis		3	3	Sesuai
2	15	2	Jumlah arus penumpang angkutan Umum		17.500	15.472	Melampaui
2	15	3	Persentase Layanan Angkutan Darat	%	0	1,31	Belum Tercapai
2	15	4	Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum	%	0	76,1	Belum Tercapai
2	15	5	Pemasangan Rambu-Rambu		0	66,7	Belum Tercapai
2	15	6	Jumlah Orang/ Barang Yang Terangkut Angkutan Umum		12.000	24.600	Belum Tercapai
2	15	7	Rasio Ijin Trayek		0,01	0,006	Melampaui
2	16		Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika				
2	16	1	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer		Tidak Ads Survey	82	Melampaui
2	16	2	Cakupan Layanan Telekomunikasi		Tidak Ads Survey	0,73	Melampaui

No	Uraian	Satuan	Tahun 2021		Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)		
			Capaian	Target			
2	16	3	Persentase Penduduk Yang Menggunakan Hp/Telepon	%	Tidak Ads Survey	83,2	Melampaui
2	16	4	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet		0	51,55	Belum Tercapai
2	16	5	Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi		0	81,79	Belum Tercapai
2	17		Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah				
2	17	1	Persentase koperasi aktif	%	73,01	74,18	Belum Tercapai
2	17	2	Persentase Usaha Mikro Dan Kecil	%	98,29	98,2	Melampaui
2	18		Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal				
2	18	1	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	buah	117	63	Melampaui
2	18	2	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Rp (juta)	244.255	906.912	Belum Tercapai
2	18	3	Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN	%	-79	15	Belum Tercapai
2	19		Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga				
2	19	1	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	%	87,47	87,14	Melampaui
2	19	2	Persentase wirausaha muda		2,89	2,89	Melampaui
2	19	3	Cakupan Pembinaan Olahraga		75	22,87	Melampaui
2	19	4	Cakupan Pelatih Yang Bersertifikat/Lisensi Kepelatihan		29,31	31,38	Belum Tercapai
2	19	5	Cakupan pembinaan atlet muda		45	43,69	Melampaui
2	19	6	Jumlah atlet berprestasi		11	18	Belum Tercapai
2	19	7	Jumlah prestasi olahraga		3	3	Belum Tercapai
2	20		Urusan Pemerintahan Bidang Statistik				
2	20	1	Buku "Kabupaten Dalam Angka"		Ada	Ada	Sesuai
2	20	2	Buku "PDRB"		Ada	Ada	Sesuai
2	21		Urusan Pemerintahan Bidang Persandian				
2	21	1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah,	%	100	100	Sesuai
2	22		Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan				
2	22	1	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya		1	3	Belum Tercapai
2	22	2	Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan		58	58	Sesuai
2	22	3	Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu		2	2	Sesuai
2	23		Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan				
2	23	1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun		0,95	42,97	Belum Tercapai
2	23	2	Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah		42,03	43,12	Belum Tercapai
2	23	3	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk		0,95	1,14	Belum Tercapai
2	23	4	Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun	Orang	3.107	58.584	Belum Tercapai
2	23	5	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Judul	10.727	11.120	Belum Tercapai
2	23	6	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat	%	48.01	52,1	Melampaui
2	24		Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan				
2	24	1	Persentase Peningkatan SDM pengelola kearsipan	%	0	100.00	Belum Tercapai

No	Uraian	Satuan	Tahun 2021		Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)		
			Capaian	Target			
2	24	2	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	%	0	1,12	Belum Tercapai
2 Urusan Pemerintahan Pilihan							
2 25 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan							
2	25	1	Cakupan Produksi perikanan		118.6	128	Melampaui
2	25	2	Perikanan tangkap	ton	53.860.1	55.075,80	Melampaui
2	25	3	Perikanan Budidaya	ton	5.172	5176	Belum Tercapai
2	25	4	Cakupan Bina Kelompok Perikanan		69,5	68,9	Melampaui
2 26 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata							
2	26	1	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	366.176	342.951	Melampaui
2	26	2	Lama Kunjungan Wisata	Hari	2-Apr	4-Feb	Belum Tercapai
2	26	3	PAD Sektor Pariwisata	%	5.96	4,52	Melampaui
2 27 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian							
2	27	1	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan perkebunan terhadap PDRB		26.31	26,05	Melampaui
2	27	2	Cakupan bina kelompok tani		36.66	72,98	Melampaui
2	27	3	Jumlah Populasi Ternak				
			<i>Sapi Potong</i>	<i>Ekor</i>	77.658	78.048	Belum Tercapai
			<i>Ayam Ras Pedaging</i>	<i>Ekor</i>	3.694	2.378.784	Belum Tercapai
			<i>Ayam Ras Petelur</i>	<i>Ekor</i>	1.176,86	664.979	Belum Tercapai
2 28 Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral							
2	28	1	Jumlah rumah tangga pengguna listrik	10 Kecamatan	15.204	100.117	Belum Tercapai
2 29 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan							
2	29	1	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal		0	0,7	Belum Tercapai
2	29	2	Jumlah Pasar	Unit	43	43	Sesuai
2 30 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian							
2	30	1	Cakupan bina kelompok pengrajin		0,1	0,15	Belum Tercapai
2 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan							
2 31 Sekretariat Daerah							
2	31	1	Rasio tempat ibadah persatuan penduduk		2,87	2,82	Melampaui
2 32 Sekretariat DPRD							
2	32	2	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten		Ada	Ada	Sesuai
2	32	3	Tersusun Dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, Dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)		Ada	Ada	Sesuai
2	32	4	Terintegrasi Program-Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda Dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD		Ada	Ada	Sesuai
2 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan							
2 33 Perencanaan							

No	Uraian	Satuan	Tahun 2021		Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)		
			Capaian	Target			
2	33	1	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda/Perkada	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Sesuai
2	33	2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perkada	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Sesuai
2	33	3	Tersedianya Dokumen RTRW Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Sesuai
2	33	4	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	%	100	100	Sesuai
2	33	5	Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD	%	100	100	Sesuai
2	33	6	Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan RTRW	%	100	100	Sesuai
2	34		Keuangan				
2	34	1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan		WTP	WTP	Sesuai
2	34	2	Persentase SILPA Terhadap APBD	%	3.50	3,5	Melampaui
2	34	3	Persentase Program/Kegiatan Yang Tidak Terlaksana	%	0	0	Sesuai
2	34	4	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	%	21.00	21	Melampaui
2	34	5	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	%	19.04	19,04	Melampaui
2	34	6	Penetapan APBD (Tepat Waktu/Tidak)		Tepat Waktu	Tepat Waktu	Sesuai
2	34	7	Bagi Hasil Kabupaten/Kota Dan Desa		0.22	0,22	Melampaui
2	34	8	Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	14,08	11,72	Melampaui
2	35		Kepegawaian				
2	35	1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan Pelatihan	bulan	3	3	Sesuai
2	35	2	Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal	%	74.19	88,71	Melampaui
2	35	3	Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural	%	14.71	69,81	Melampaui
2	36		Pendidikan Dan Pelatihan				
2	36	1	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah	jabatan	40	40	Sesuai
2	36	2	Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah	jabatan	2093	2063	Melampaui
2	37		Penelitian Dan Pengembangan				
2	37	1	Persentase implementasi rencana Kelitbangan	%	85,71	7,69	Melampaui
2	37	2	Persentase pemanfaatan hasil Kelitbangan	%	100	10,58	Melampaui
2	37	3	Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	%	70.00	10,58	Melampaui
2	37	4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	33,33	60,75	Belum Tercapai
2			Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan				
2	38		Inspektorat Daerah				
2	38	1	Persentase tindak lanjut temuan	%	56,6	61,12	Melampaui

No	Uraian	Satuan	Tahun 2021		Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)		
			Capaian	Target			
2	38	2	Persentase pelanggaran Pegawai	%	0,13	0,283	Melampaui
2	38	3	Jumlah temuan BPK	Temuan	14	8	Melampaui
Unsur Pemerintahan Umum							
Kesatuan Bangsa dan Politik							
2	39	1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	0	n/a	Belum Tercapai
2	39	2	Persentase peningkatan penanganan konflik di daerah	%	100	100	Sesuai
2	39	3	Jumlah kegiatan pendidikan politik masyarakat	Kali	5	5	Sesuai
ASPEK DAYA SAING DAERAH							
Kemampuan Ekonomi Daerah							
3	1	1	Rata-rata Nilai Konsumsi Pengeluaran Per Rumah Tangga		89.060	891.033	Belum Tercapai
3	1	2	Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita		385.798	413.397	Belum Tercapai
3	1	3	Nilai Tukar Petani			103,47	Belum Tercapai
Fasilitas Wilayah/Infrastruktur							
3	2	1	Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Peruntukan Tata Ruang	%	81	84	Belum Tercapai
Iklim Berinvestasi							
3	3	1	Angka Kriminalitas yang tertangani			24,69	Belum Tercapai
Sumberdaya Manusia							
3	4	1	Rasio Ketergantungan		41,8	40,88	Melampaui

Sesuai dengan Hasil Analisis Terhadap Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 dari 263 total indikator terdapat 114 indikator melampaui dari target yang telah ditetapkan, dan sebanyak 59 indikator yang telah sesuai dengan target, sedangkan 90 indikator lainnya belum mencapai target yang telah ditetapkan. Banyaknya indikator yang belum tercapai disebabkan karena adanya rekofusing anggaran terkait penanganan covid-19 tahun 2020-2021 dan pemulihan dimasa endemik pada tahun 2022 sehingga telah mengganggu perencanaan yang telah disusun sebelumnya.

2.2 Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Kinerja pemenuhan SPM Kabupaten Bulukumba diukur dari ketercapaian indikator pada masing-masing bidang urusan dan jenis pelayanan pada RPJMD Kabupaten Bulukumba, seperti pada tabel berikut.

Tabel II-253
Capaian Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Di Kabupaten Bulukumba, Tahun 2019-2021

No	Uraian	Satuan	Target Nasional	Capaian SPM		
				2019	2020	2021
1	PENDIDIKAN					
1.1	Pendidikan Dasar					
1	persentase Warga Negara Usia 7- 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	%	100	93,41	95	82,42
1.2	Pendidikan Kesetaraan					
2	Persentase Warga Negara Usia 7- 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	%	100	94,56	94	7,49
1.3	Pendidikan anak usia dini					

No	Uraian	Satuan	Target Nasional	Capaian SPM		
				2019	2020	2021
3	Persentase Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	100	96,27	67	84,76
2	KESEHATAN					
2.1	Pelayanan Kesehatan ibu hamil jumlah					
4	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Standar	%	100	100	73,31	72,51
2.2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin					
5	Persentas ibu hamil yang mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)	%	100	100	85,66	87,12
2.3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir					
6	Persentas bayi baru lahir umur 0 - 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	100	100	79	87,32
2.4	Pelayanan kesehatan balita					
7	Persentas Balita yang berumur 0 – 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	100	50,02	84,71
2.5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar					
8	Persentas anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	100	100	2,14	19,19
2.6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif					
9	Persentas orang berusia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	100	100	4,46	49,94
2.7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut					
10	Persentas orang berusia lebih dari 60 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	100	100	31,41	41,96
2.8	Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi					
11	Persentas orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	100	100	7,88	13,81
2.9	Pelayanan kesehatan pada penderita Diabetes Melitus					
12	Persentas orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	100	100	100	79,08
2.10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat					
13	Persentas orang orang dengan gangguan Jiwa (ODG) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	100	100	63,49	90,07
2.11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis					
14	Persentas orang orang terduga Tuberkulosis (TBC) yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	100	100	100	27,01
2.12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)					
15	Persentas orang orang terduga beresiko Terinfeksi virus HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	100	100	40,63	52,12
3	PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG					
3.1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari					
16	Persentase warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	100	83,53	84,4	84,26
3.2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic					
17	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	%	100	75,96	76,12	76,26
4	PERUMAHAN DA PEMUKIMAN					

No	Uraian	Satuan	Target Nasional	Capaian SPM		
				2019	2020	2021
4.1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;					
18	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.	%	100	100	54	100
4.2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota					
18	Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.	%	100	100	-	-
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
5.1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum					
20	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	%	100	71,11	100	96,9
5.2	Pelayanan informasi rawan bencana					
21	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100
5.3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana					
22	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100
5.4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana					
23	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100
5.5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran					
24	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100
6	SOSIAL					
6.1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar diluar panti					
25	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100	92	89,8	54,55
6.2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti					
26	persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	90	-	90.91
6.3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti					
27	Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	92,8	41,18	67,57
6.4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti					
28	persentase Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	100	86,9	-	100
6.5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota					
29	persentase Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	%	100	100	100	100

Sumber : Sekretariat Daerah, 2022

2.2.1 Evaluasi capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan pencapaian target indikator berdasarkan bidang urusan dapat dijelaskan bahwa :

1. Bidang Urusan Pendidikan

Permasalahan yang dihadapi saat ini dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan adalah :

- Transisi RPJMD revisi yang tidak terlaksana.
- Kurang Maksimalnya Pelaksanaan Koordinasi dalam Pelaksanaan Integritas SPM
- Dari segi pendanaan Pemerintah Pusat sangat mendukung Anggaran untuk pelaksanaan penerapan SPM.

Adapun solusi dari permasalahan tersebut adalah :

- Perubahan RPJMD
- Koordinasi yang berkesinambungan antara Pemerintah Daerah Kabupaten, Provinsi dan Pusat
- Perencanaan Anggaran yang Efektif dan Efisien

2. Bidang Urusan Kesehatan

Target untuk semua indikator adalah 100% namun berdasarkan angka di atas tidak ada indikator yang mencapai target. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :

- Penentuan data sasaran yang merupakan data estimasi yang ditentukan oleh Pusdatin, dimana data tersebut berbeda dan lebih tinggi dari pada data di Kabupaten
- Adanya mutasi pegawai yang terlalu cepat menyebabkan pergantian pengelola program di puskesmas yang telah terlatih
- Pospindu di beberapa desa belum aktif, disebabkan belum lengkapnya pospindu kit
- Buku register penderita di puskesmas belum lengkap.

Adapun solusi dari permasalahan tersebut adalah :

- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap petugas/pengelola program di puskesmas, memotivasi petugas untuk melakukan kunjungan rumah
- Monitoring dan evaluasi sebaiknya dilakukan setiap triwulan untuk mengetahui pencapaian cakupan
- Target beberapa indikator sebaiknya dibagi per triwulan sehingga mudah pencapaiannya.

3. Bidang Pekerjaan Umum

Permasalahan yang dihadapi saat ini dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum adalah :

- Masih minimnya alokasi anggaran
- Sumber daya manusia pelayanan masih belum memenuhi standarisasi pelayanan.
- Kewenangan tidak melekat pada OPD yang bersangkutan sehingga dalam pencapaian target sulit terlaksana dengan baik seperti SPM Bidang Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas perumahan, Permukiman dan Pertanahan dan datanya berada pada OPD tersebut.
- Kurangnya tenaga personil.

Adapun solusi dari permasalahan tersebut adalah :

- Mengusulkan penambahan anggaran untuk dialokasikan dalam pencapaian SPM
- Mengikuti pelatihan-pelatihan/diklat standarisasi/ bimbingan teknis pelayanan dalam pekerjaan.
- Mengusulkan agar diadakan perbaikan struktur organisasi serta kewenangannya.
- Serta mengusulkan tambahan personal/pegawai ke Badan Kepegawaian Daerah.

4. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan yang dihadapi saat ini dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bulukumba adalah :

- Kemampuan sumber daya manusia (SDM) anggota Polisi Pamong Praja dan Damkar yang belum cukup memadai dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Polisi Pamong Praja dan Damkar
- Dukungan anggaran yang belum memadai akibat kemampuan keuangan daerah yang terbatas, sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja belum maksimal
- Disiplin dan Profesionalisme Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar yang masih kurang karena minimnya Diklat profesi dan bimbingan teknis serta sarana dan prasarana pendukung

Adapun solusi dari permasalahan tersebut adalah :

- Perlu bimbingan teknis dalam rangka peningkatan Sumber Daya Aparatur Anggota Satpol PP dan Damkar
- Perlunya tambahan anggaran dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar
- Perlunya diklat terkait tugas dan fungsi Satpol PP dan Damkar dalam menunjang penegakan peraturan daerah .

5. Bidang Sosial

Permasalahan yang dihadapi saat ini dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Kabupaten Bulukumba adalah :

- Tidak tersedianya data akurat khususnya data PMKS dan PSKS
- Manajemen dan Jumlah SDM yang belum memadai
- Masih rendahnya alokasi anggaran pada kegiatan penanganan PMKS

Adapun solusi dari permasalahan tersebut adalah :

- Perlunya alokasi anggaran untuk kegiatan pendataan PMKS
- Peningkatan kualitas SDM dan penempatan SDM sesuai bidang tugasnya
- Perlunya pengalokasian anggaran terkait penanganan PMKS

2.3 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) adalah Pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi- generasi berikutnya. Regulasi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, atau Sustainable Development Goals TPB/SDGs telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

TPB/SDGs yang merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals/MDGs) yang merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu:

- 1) Tanpa Kemiskinan;
- 2) Tanpa Kelaparan;
- 3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
- 4) Pendidikan Berkualitas;
- 5) Kesenjangan Gender;
- 6) Air Bersih dan Sanitasi Layak;
- 7) Energi Bersih dan Terjangkau;
- 8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
- 9) Industri, Inovasi, dan Infrastruktur;
- 10) Berkurangnya Kesenjangan;

- 11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;
- 12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
- 13) Penanganan Perubahan Iklim;
- 14) Ekosistem Lautan;
- 15) Ekosistem Daratan;
- 16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;
- 17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan daerah memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat kabupaten. Target-target SDGs ditingkat kabupaten telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dalam bentuk program, kegiatan, dan indikator yang terukur serta dukungan pembiayaannya. Kabupaten Bulukumba melaksanakan 17 TPB yang terbagi atas 2021.

Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II-254
Capaian Indikator TPB/SDGs
Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja					Perangkat Daerah Penanggungjawab
			2017	2018	2019	2020	2021	
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)								
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun							
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Persen	8	8	7,86	7,1	7,43	Dinas Sosial
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Persen	70,14	77,5	82,9	82,9	80,9	Dinas Kesehatan
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Persen	1,79	5,19	5,29	5,37		Dinas Sosial
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Persen	30	214	203	74,1	61,36	Dinas Sosial
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Rumah Tangga	6229	13817	13696	13696	15011	Dinas Sosial
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Persen	86,7	84,83	79,38	86,4	99,6	Dinas Kesehatan
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Persen	96,19	96,19	96,19	96,19	90,2	Dinas Kesehatan
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Persen	64,63	64,63	64,63	64,63	NA	Dinas PPKB,PPPA
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Persen	89	89,40	90,20	84,40	63,45	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Persen	75,63	89,90	90,80	36,90	57,26	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja					Perangkat Daerah Penanggungjawab
			2017	2018	2019	2020	2021	
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Persen	112,90	107,91	104,81	89,43	88,89	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	Persen	100,01	99,00	98,92	75,47	67,72	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Persen	62,51%	65,32%	0,00%	63,94%	98,89%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Rumah Tangga	40277,0	41176,0	42432,0	49747,0		Sekretariat Daerah Bagian Ekonomi dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Orang	1197	0	1,18	3	3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Lokasi	12,82	23,07	10	10	10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Orang	200	200	345	345	60	Dinas Sosial
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Orang	200	200	345	345		Dinas Sosial
1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB= Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)					Na	Na	Dinas Sosial
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Rp	500.000.000			500.000.000	1,518,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Dokumen	1	1	1	1	1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Persen	21,46	23,82	23,4	23,4	Na	Dinas Sosial
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan	Persen	27,23	25,29	25,46	25,46	Na	Dinas Sosial

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja					Perangkat Daerah Penanggungjawab
			2017	2018	2019	2020	2021	
	perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.							
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan							
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Persen	2,62	3,79	2,00	10,90	4,81	Dinas Kesehatan
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Persen						Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Persen	0%	0%	0%	0%		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Persen	5,61	1,10	1,05	8,27	6,86	Dinas Kesehatan
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Persen	0,58	2,25	3,06	3,06	Na	Dinas Kesehatan
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Persen	15,30	25,3	17,4	2,93	5,15	Dinas Kesehatan
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Persen	28,45	21,17	22,56	16,46	14,86	Dinas Kesehatan
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Persen	87,6	64,3		74	Na	Dinas Kesehatan
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Persen	85,00	80,90	89,00	74,00	86,90	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).						NA	Dinas PM,PSTP & Tenaga Kerja
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia							
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Angka	4	7	3	4	10	Dinas Kesehatan

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja					Perangkat Daerah Penanggungjawab
			2017	2018	2019	2020	2021	
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Persen	86,7	75,5	79,38	86,4	87,46	Dinas Kesehatan
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Persen	86,7	84,83	79,38	85,7	99,6	Dinas Kesehatan
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Angka	9	5	10,99	7,98	0	Dinas Kesehatan
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Angka	6	6	8,01	6,65	7,29	Dinas Kesehatan
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Angka	9	9	10,05	7,53	0,29	Dinas Kesehatan
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Persen	97,72	97,72	97,72	97,72	100	Dinas Kesehatan
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Persen	16	16	0,016	0,009	0,33	Dinas Kesehatan
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Orang	122,54	122,54	122,54	122,54	131,71	Dinas Kesehatan
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Orang	0	0,11	0,11	0,01	0,02	Dinas Kesehatan
3.3.4.(a)	Persentase kecamatan yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Orang	73	138	138	138	92	Dinas Kesehatan
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Persen	1,48	1,58	0,24	0,24	0,4	Dinas Kesehatan
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Persen	89,04	86,1	75,3	7,46	15,01	Dinas Kesehatan
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Persen	8,5	11,2	9,8	0,15	2,19	Dinas Kesehatan
3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.		0	0	2		Na	Dinas Kesehatan
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.						Na	Dinas Kesehatan
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.						Na	Dinas Kesehatan

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja					Perangkat Daerah Penanggungjawab
			2017	2018	2019	2020	2021	
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.				11,96	39,94	35,05	Dinas PPKB,PPPA
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Persen	64,63	64,63	75,28	74,97	78,62	Dinas PPKB,PPPA
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Persen	11,55	48,66	33,37	18,51	17,84	Dinas PPKB,PPPA
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).				89,79	89,79	67,18	Dinas PPKB,PPPA
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	TFR	6224	6224	2,32	2,318	2,309	Dinas PPKB,PPPA
3.8.1	Cakupan pelayanan kesehatan esensial (didefinisikan sebagai rata-rata cakupan intervensi yang dapat dilacak termasuk reproduksi, ibu, bayi baru lahir, dan kesehatan anak, penyakit menular, penyakit tidak menular, kapasitas layanan serta akses untuk penduduk secara umum dan penduduk kurang beruntung).	Persen	77,81	68,62	-	68,62		
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	Persen	16,67	16,58	15,68	11,74	19,1	Dinas Kesehatan
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Penduduk	287930	324287	348767	348767	348767	Dinas Kesehatan
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Persen	70,14	77,5	82,9	71,83	60,3	Dinas Kesehatan
3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.		0	28	0	0	0	Dinas Kesehatan
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Persen	49,98	44,93	44,93	44,93	50,1	Dinas Kesehatan
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Persen	885	885	0,001	0,368	2,530	Dinas Kesehatan

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja					Perangkat Daerah Penanggungjawab
			2017	2018	2019	2020	2021	
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua							
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Persen	90,00	90,00	90,00	90,00	91	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Persen	75,90	80,95	96,75	90,29	100	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Persen	52,97	57,17	58,90	71,43	100	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Persen	125,87	110,78	103,81	112,49	97,29	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Persen	127,78	110,90	102,91	90,74	82,04	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Tahun	12	12	12	7	7	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Persen	95,55	96,75	97,34	31,93	78,51	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Persen	32,00	34,33	16	16	16	Dinas PM,PSTP & Tenaga Kerja
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Persen	112,90	107,91	104,81	104,81	78,37	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Persen	92,51	92,56	92,90	99,53	97,68	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Persen	92,51	92,56	92,90	92,90	90,63	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan	Persen	90,00	90,00	90,00	90,00	92,00	Dinas Pendidikan & Kebudayaan

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja					Perangkat Daerah Penanggungjawab
			2017	2018	2019	2020	2021	
	pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).							
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Persen	65,00	65,00	65,00	46,80	58,75	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan							
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Kebijakan	4	4	4	4	4	Dinas PPKB,PPPA
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Persen	33	38	31	21,74	22	Dinas PPKB,PPPA
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Persen	92	85	71	71	17	Dinas PPKB,PPPA
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Persen	11	13	22	22		Dinas PPKB,PPPA
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Persen	50,00	65,00	56,00	56,00	100,00	Dinas PPKB,PPPA
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Persen	3	3	1	1		Dinas PPKB,PPPA
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.				NA	NA	NA	Dinas PPKB,PPPA
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).				89,79	89,79	67,18	Dinas PPKB,PPPA

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja					Perangkat Daerah Penanggungjawab
			2017	2018	2019	2020	2021	
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Persen	17,50	17,50	20,00	20,00	20,00	Dinas PPKB,PPPA
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Persen	20,0	18,4	18,4	18,4	18,4	Dinas PPKB,PPPA
5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Persen	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas PPKB,PPPA
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Persen	16,67	16,58	15,68	11,74	10,78	Dinas PPKB,PPPA
5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Persen	3,96	4,2	4,28	4,25	4,23	Dinas PPKB,PPPA
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Persen	86,87	91,83	92,46	92,46	0,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan							
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Persen	89	89,40	90,20	88,90	84,61	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	NA				NA	NA	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Persen	89	89,40	90,20	88,90	63,46	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.						85,41	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Persen	75,63	89,90	90,80	36,90	75,35	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja					Perangkat Daerah Penanggungjawab
			2017	2018	2019	2020	2021	
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Persen	136	136	136	136	136	Dinas Kesehatan
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Desa	41	52,20	64,71	136	136	Dinas Kesehatan
6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Desa	0,4	0,79	1,13	1,13	74,71	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
6.3.1	Proporsi limbah cair yang diolah secara aman	%	50	75	19	19	19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.				NA	NA	NA	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Indeks	50	60	65	65	65	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Sungai	10	15	18	2	NA	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.						NA	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.		Ada	Ada	Ada		30,00	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
7	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua							
7.2.1*	Bauran energi terbarukan.				42432	49747		Sekda, Bagian Ekonomi dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral
7.3.1*	Intensitas energi primer.							Sekda, Bagian Ekonomi dan Pengembangan

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja					Perangkat Daerah Penanggungjawab
			2017	2018	2019	2020	2021	
								Energi dan Sumber Daya Mineral
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua							
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Persen	6,89	5,05	5,49	0,43		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Juta	29,03	31,55	33,8	34,43		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Persen	7,05	7,9	8,1	8,1	8,1	Dinas PM,PSTP & Tenaga Kerja
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Persen	50,85	51,73	51,95	0,22	0,22	Dinas PM,PSTP & Tenaga Kerja
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	Persen	44,35	44,47	44,75	44,75	21,68	Dinas PM,PSTP & Tenaga Kerja
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Persen	34,3	55,12	35,26	35,26	35,26	Dinas PM,PSTP & Tenaga Kerja
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	Persen	8,25	7,74	10,68	10,68	29,97	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Rp	Rp 80.000	Rp 86.000	Rp 90.000	Rp 34.143	Rp 34.143	Dinas PM,PSTP & Tenaga Kerja
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Persen	3,73	4,12	4,35	0,03	0,03	Dinas PM,PSTP & Tenaga Kerja
8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	Persen	31,87	31,82	32,08	0,10	0,10	Dinas PM,PSTP & Tenaga Kerja
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Persen	37,95	37,33	38,09	38,09	58,3	Dinas PM,PSTP & Tenaga Kerja

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja					Perangkat Daerah Penanggungjawab	
			2017	2018	2019	2020	2021		
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.							NA	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Orang	3036	3555	2260	293	60		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Orang	200734	262741	278330	278330	326993		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Rp						NA	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.							38	Dinas PM,PSTP & Tenaga Kerja
8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	ATM	0	3	1	1	1		Dinas PM,PSTP & Tenaga Kerja
8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).							2,5	Dinas PM,PSTP & Tenaga Kerja
8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Persen	21,05	21,05	33,61	33,61	29,23		Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi								
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	Dermaga	2	2	2	2	3		Dinas Perhubungan
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Persen	6,61	7,35	7,47	7,47	6,48		Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Persen	1,002	0,74	1,2	5,4	5,72		Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.							Na	Dinas PM,PSTP & Tenaga Kerja
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.							9,9	Dinas Perdagangan, Perindustrian,

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja					Perangkat Daerah Penanggungjawab
			2017	2018	2019	2020	2021	
								Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.							NA Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Persen	9,00	25,00	50,00	50,00	50,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Persen	86,87	91,83	92,46	94,46	0,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	Persen	40,00	42,00	43,00	43,00	43,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara							
10.1.1*	Koefisien Gini.	Koefisien	0,320	0,354	0,377	0,371	Na	Dinas Sosial
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Persen	8,06	7,48	7,26	7,1	7,43	Dinas Sosial
10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	Desa	15	5	0	0	109	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	Desa	50	15	11	11	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.	Desa	94	104	109	109	6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	Desa				74,40%	80,20%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Persen	7,97	8,06	7,86	7,86	Na	Dinas Sosial
10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.						Na	Dinas Sosial
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan							Sekda, Bagian Hukum dan HAM

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja					Perangkat Daerah Penanggungjawab
			2017	2018	2019	2020	2021	
	pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.							
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Persen	1,787	5,194	5,289	5,369	Na	Dinas Sosial
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan							
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Persen	91,0000	92,0900	92,3300	92,3500	92,3500	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.							Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Orang	1197		1,18	3	3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Rp	500.000.000			500.000.000	1,518,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Persen	99,25	90,22	92,45	73,56	86,63	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan							
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Ton	2,557	2,557	2,557	25,13	35	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Ton	60,33	4,8	3,747	62,769	24,95	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja					Perangkat Daerah Penanggungjawab
			2017	2018	2019	2020	2021	
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Perusahaan	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Ton				14,33	14,33	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya							
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Orang	1197		1,18	3	3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
14	Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan							
14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.	Ton	50004,6	53455,6	52651,6	53.860,10	53.830,30	Dinas Perikanan
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Perikanan
14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	Nelayan	1597	838	867	867	867	Dinas Perikanan
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati							
15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Persen	10	5		29,86	29,86	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Persen	0,0035	0,002		32,29	32,29	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan							
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Kasus	7	4	2	7	2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Kematian	0	0	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Kasus				7	3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja					Perangkat Daerah Penanggungjawab
			2017	2018	2019	2020	2021	
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Persen				100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	RT	8	3	1	1	Na	Dinas PPKB,PPPA
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Orang	125	148	128	128	19	Dinas PPKB,PPPA
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Orang	39	29	517	517	19	Dinas PPKB,PPPA
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).				Na	Na	Na	Inspektorat
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Persen	91,79	94,29	90,3	91,51	93,64	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).		WTP (100%)	WTP (100%)	WTP (100%)	WDP (50%)	wtp	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Persen	50	60,02	61,14	61,14	Na	Inspektorat
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Persen	15,22	16,79	90,00	97,16	Na	Sekda, Bagian Pembangunan
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Persen	67,39	54,11	55,15	55,71	68,91	Sekda, Bagian Organisasi dan Tata Laksana
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga			0	0	0		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja					Perangkat Daerah Penanggungjawab
			2017	2018	2019	2020	2021	
	dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).							Pengembangan Daerah
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Persen	17,50	17,50	20,00	20,00	20,00	Dinas PPKB,PPPA
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Persen	20,0	18,4	18,4	15,00	Na	Dinas PPKB,PPPA
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.		65,50	73,40	73,40	75,12	78,59	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.						Na	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Persen	62,51	65,32	65,32	78,00	Na	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	ASN	1,25	1	1	1	1	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.							Setda, Bagian Hukum dan HAM
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan							
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Rp	130.060.914.218	130.060.914.218	1.487.677.783.317	1.478.492.269.014	1.369.367.217.359	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Persen	11,98	0,38	0,37	0,36	NA	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Persen	0,958	0,958	0,958	0,958	NA	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja					Perangkat Daerah Penanggungjawab	
			2017	2018	2019	2020	2021		
17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.							NA	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Persen	9,00	25,00	50,00	50,00	50,00		Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Persen	40,00	42,00	43,00	43,00	50,00		Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).								Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).								Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	Persen	100	80	97,73	100			Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	Persen	100	80	66,67	66,67			Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).		2	80	6	6			Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.								Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja					Perangkat Daerah Penanggungjawab
			2017	2018	2019	2020	2021	
								Pengembangan Daerah
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	Orang	6000	4000	7996	7996		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	Persen	100	100	100	100		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

2.3.1 Evaluasi Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan daerah memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat kabupaten. Target-target SDGs ditingkat kabupaten telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dalam bentuk program, kegiatan, dan indikator yang terukur serta dukungan pembiayaannya. Kabupaten Bulukumba melaksanakan 17 TPB yang terbagi atas 202 indikator yang menjadi kewenangan daerah, adapun hambatan dan kendala dalam pelaksanaan SDGs dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-255
Identifikasi Masalah hambatan dan kendala dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Tahun 2021

No	Aspek	Hambatan dan Kendala	Ket
1	Kemiskinan	Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Bulukumba salah satunya dengan semakin banyaknya bantuan yang berperan membantu pengentasan kemiskinan. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Bulukumba pada bulan maret 2020 sebesar 7,10 % atau menurun dibandingkan bulan maret 2019 sebesar 0,16 % poin. Jumlah penduduk miskin Kab.Bulukumba. Pada bulan maret 2020 sebesar 30 ribu jiwa. Jumlah ini menurun sebesar 0,49 ribu jiwa dibandingkan maret 2019 yang sebesar 30,49 ribu jiwa, namun pada tahun 2021 7,43%. Secara umum selama 5 Tahun terakhir, tingkat kemiskinan di Kabupaten Bulukumba terus mengalami penurunan baik dari sisi persentase penduduk miskin maupun jumlah penduduk namun pada tahun 2021 meningkat diakibat covid-19 .	
2	Sosial	Realisasi capaian pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh adanya penambahan jumlah keluarga penerima manfaat yang memperoleh program perlindungan sosial yang berasal dari Kementrian Sosial RI dalam rangka penanganan dampak Covid- 19.	
3	Bencana	Terjadinya peningkatan korban meninggal, hilang dan terkena dampak diakibatkan kondisi anomali cuaca yang lebih ekstrem.	
4	Kesehatan	Pengaruh sosial budaya masih sangat mempengaruhi pelayanan kesehatan sehingga masih sangat diperlukan upaya peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan masyarakat, intervensi pelacakan untuk kasus kekurangan gizi telah dilakukan secara maksimal dan surveilans gizi melalui E- PPBGM sudah dimonitor secara berkesinambungan, Pembatasan kegiatan sebagai dampak pandemic Covid 19 yang berpengaruh terhadap pencapaian program	
5	Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) diperoleh dari hasil perhitungan survey konsumsi pangan pada 9 kelompok pangan meliputi : padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang- kacang, gula, sayuran dan buah. Selama 5 tahun terakhir capainnya fluktuatif disebabkan karena masih rendahnya daya konsumsi pada kelompok pangan tertentu misalnya buah dan sayuran, pangan hewani yang dipengaruhi oleh daya beli dan kesadaran pola konsumsi masyarakat yang masih rendah.	
6	Keuangan	Harga bahan pangan masih fluktuatif, Masih kurangnya alokasi anggaran terkait gender Alokasi anggaran yang masih rendah pada sektor pengelolaan air bersih dan sanitasi sehat, Refocusing anggaran sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan Terbatasnya anggaran	

No	Aspek	Hambatan dan Kendala	Ket
		<p>pengelolaan lingkungan, Terbatasnya anggaran pengelolaan lingkunganKepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan,berdasarkan hasil pemeriksaan BPK laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2016,2017,2018 dan 2019 telah menyajikan secara wajar dalam semua hal material, posisi laporan keuangan pemerintah daerah per 31 desember berupa laporan Realisasi Anggaran (LRA), perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, arus kas, perubahan ekuitas sesuai dengan standard akuntansi pemerintah. Penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah pada akhir periode tahun 2020 memperoleh opini wajar dengan Pengecualian (WDP). Hal ini disebabkan adanya penyajian laporan yang material yang tidak diyakini kewajarannya oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pada 2021 kembali menjadi WTP.Terbatasnya anggaran dan Pada tahun 2016 Rasio Pajak Daerah Kab.Bulukumba terhadap PDRB memberikan kontribusi 0,327, tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 0,383.Tahun 2018 Nikai tersebut mengalami penurunan menjadi 0,382 selanjutnya pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan menjadi 0,372 dan pada tahun 2020 turun menjadi0,362. Tren penurunan rasio pajak Daerah Kab.Bulukumba terhadap PDRB tahun 2018 sampai tahun 2020 bukanlah penurunan secara nilai karena jumlah pajak daerah yang diterima mengalami peningkatan dari tahun 2016-2019, hanya saja nilai PDRB yang merupakan nilai pembai juga mengalami peningkatan yang signifikan pada kurun waktu tersebut. Sementara itu untuk tahun 2020 dan tahun 2021, penurunan terjadi dikarenakan adanya pandemi Covid 19 yang melanda Indonesia sampai kedaerah</p>	
7	Operasional	<p>PMT yang diberikan kepada Bumil KEK tidak sepenuhnya dikonsumsi oleh ibu hamil, masih ada bayi balita yang tidak mendapat ASI Eksklusif, Capaian ini mengalami penurunan disebabkan jumlah guru sertifikasi yang pensiun cukup banyak dibanding jumlah lulusan baru. Hasil ini juga disebabkan guru yang baru diangkat baik cpns maupun honorer belum bersertifikast pendidik.Belum optimalnya pencapaian kualitas hidup perempuan dan peran perempuan dalam pembangunanPenerapan Reformasi Birokrasi masih berfokus pada pelaksanaan di tingkat Pemerintah Daerah, penerapan pada tingkat Organisasi Perangkat Daerah belum sepenuhnya merata dan belum berjalan optimal. Selain itu , pelaksanaan reformasi birokrasi masih berfokus terhadap pemenuhan dokumen sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan, sehingga pelaksanaan reformasi belum memberikan dampak perubahan yang signifikan.;</p>	
8	Sumber Daya Manusia	<p>Masih rendahnya tingkat kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil; ; Masih terbatasnya kemampuan sebagian besar kader bina keluargaPenempatan tenaga pendidik belum dilakukan secara merata, masih terdapat kesenjangan baik dari sisi jumlah maupun kualitas antara kawasan pedesaan dan perkotaanCakupan Perempuan dan Korban Kekerasan terhadap Perempuan yang mendapat layanan mulai tahun 2017 sampai dengan 2021 semua kasus terlayani 100% oleh pelayanan terpaduMasih kurangnya kualitas SDM sehingga kurang mampu bersaing dalam dunia kerjaRendahnya kulaitas SDM masyarakat didesaBelum sebandingnya jumlah kegiatan yang harus diawasi dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan dengan jumlah tenaga teknis yang melakukan pengawasan dan pengendalian BencanaTerbatasnya SDM dan sarana prasaranaMasih terbatasnya kualitas SDM pengelola Data dan Informasi</p>	
9	Kelembagaan	<p>Belum optimalnya koordinasi antar sektor dalam menurunkan angka kematian ibu, Anak balita dan bayiProporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun. Kekerasan yang terjadi pada tahun 2021 sebesar 19 orang, masih rendahnya kesadaran masyarakat terkait perlindungan terhadap perempuanKurang optimalnya kelembagaan pengelola air bersih dan sanitasi sehatKurangnya kelembagaan pengelolaan lingkunganKurangnya kelembagaan mitigasi bencana</p>	

No	Aspek	Hambatan dan Kendala	Ket
9		Masih rendahnya Angka Partisipasi Sekolah PAUD di karenakan masih minimnya kesadaran serta pengetahuan orangtua terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini sebelum anak disekolahkan ke tingkat pendidikan dasar	
10	Regulasi	Tahun 2017 : RAD (Rencana Aksi Daerah) PUG, Tahun 2018 : 1.SK Bupati No.188.45.463 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pokja Plus, 2. SK Bupati No.188.45.464 Tahun 2016 tentang Pembentukan Forum Partisipasi Publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak, 3. SK Bupati No.188.45.465 tentang pembentukan tim teknis anggaran responsif gender. Tahun 2019 : Perda No.1 Tahun 2019 penyelenggaraan Kabupaten Layak anak dan masih berlangsung pada tahun 2021.Kebijakan belum fokus pemerataan wilayahMasih kurangnya regulasi tata kelola lingkunganMasih kurangnya regulasi mitigasi bencana	
11	Politik	Jumlah kursi di keanggotaan DPRD dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 jumlah kursi yang diduduki perempuan sebanyak 7 kursi dari total kursi 40 dengan presentase sebesar 17,50% dan pada Tahun 2020 dan tahun 2021 mengalami peningkatan kursi perempuan menjadi 8 kursi dengan presentase 20%.Proporsi kursi yang diduduki perempuan DPRD kabupaten bulukumba, jumlah total kursi di keanggotaan DPRD Kabupaten Bulukumba dari Tahun 2015 sampai tahun 2020 sebesar 40 total kursi.Pada tahun 2015 sampai tahun 2018 jumlah kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kab.Bulukumba sebesar 7 Kursi jika dipersentasekan hanya 17,50% namun pada tahun 2019 sampai tahun 2020 dan tahun 2021 jumlah kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kab.Bulukumba meningkat dari 17,50% menjadi 20% salah satu penyebab terjadinya peningkatan proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD adalah karena meningkatnya partisipasi yang mendukung pemberdayaan perempuan.	
12	air Minum layak	Tidak tersedia data karena berdasarkan Rumah tangga sanitasi Kab.Bulukumba masih berada pada level "Layak"	
13	ODF/ sanitasi	Desa/Kelurahan yang ODF dengan kategori akses jamban di Masyarakat	
14	Air Limbah	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat tidak ada peningkatan untuk tahun 2020	
15	Lainya	Pandemi Covid-19 yang menyebabkan tekanan yang cukup berat terhadap perekonomian.	
16	Pertumbuhan ekonomi Desa Tertinggal;	Di Kabupaten Bulukumba tidak terdapat daerah yang masuk dalam kategori daerah tertinggal	
17	Desa Mandiri	alokasi Anggaran untuk tahun 2021, ditetapkan 6 desa di Kab.Bulukumba sebagai desa Mandiri dengan kriteria syarat dipilihnya 6 desa : IDM (Indeks Desa Membangun) sudah mencapai nilai lebih besar 0,8 IDM, Indeks Sosial, Indeks Kebutuhan ekonomi, indeks kebutuhan ekologi ini merupakan validasi mulai dari tingkat desa, kecamatan dan Kabupaten.	
18	Penataann kota	Untuk jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP belum ada di Kab.Bulukumba	
19	Transportasi	Berkurangnya jumlah ketersediaan kendaraan angkutan umum sehingga capaian realisasi berkurang. Kemudian juga dipengaruhi meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi.	
20	Kebencanaan	Dokumen strategi pengurangan resiko bencana dan Dokumen regulasi SPM kebencanaan di tingkat daerah hanya terwujud di tahun 2019 di akibatkan alokasi anggaran yang tidang mendukung	

2.4 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

1. Evaluasi Pelaksanaan RPJMD tahun 2021

Pemerintah Kabupaten Bulukumba melaksanakan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah sesuai dengan tahapan dan tatacara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif, ini bertujuan antara lain:

- a. untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan Daerah;
- b. serta konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
- c. kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

2. Konsistensi Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan

Berikut ini disajikan tabel yang menggambarkan konsistensi program, Kegiatan dan Sub-kegiatan antara RKPD dengan RPJMD, RKPD dengan APBD.

Tabel II-256
Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD dan APBD

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program				Program Yang Sama				Program Tidak Sama			
		RPJMD	RKPD	Renja - PD	APBD	RKPD & RPJMD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD	RKPD & RPJMD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8	7	7	6	7	7	5	6	1	-	1	2
2	Dinas Kesehatan	5	5	5	5	5	5	5	5	-	-	-	-
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	11	11	11	11	11	11	11	11	-	-	-	-
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	7	5	5	5	5	5	5	5	2	-	-	2
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-
6	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-
7	Dinas Sosial	6	6	6	6	6	6	6	6	-	-	-	-
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	11	11	11	11	11	11	11	11	-	-	-	-
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	5	5	5	5	5	5	5	-	-	-	-
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	5	5	5	5	5	5	5	-	-	-	-
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10	10	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-
12	Dinas Perhubungan	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-
13	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	5	5	5	5	5	5	5	5	-	-	-	-
14	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	10	10	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-
15	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	5	5	5	5	5	5	5	5	-	-	-	-
16	Dinas Perikanan	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-
17	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	6	6	6	7	6	6	6	5	-	-	1	1
18	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	11	11	11	11	11	11	11	11	-	-	-	-
19	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	15	15	15	15	15	15	15	15	-	-	-	-
20	Sekretariat Daerah	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-
21	Sekretariat DPRD	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program				Program Yang Sama				Program Tidak Sama			
		RPJMD	RKPD	Renja - PD	APBD	RKPD & RPJMD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD	RKPD & RPJMD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-
25	Inspektorat Daerah	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-
26	KANTOR KECAMATAN UJUNGBULU	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-
27	KANTOR KECAMATAN UJUNG LOE	4	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	2
28	KANTOR KECAMATAN BULUKUMPA	2	3	3	2	1	3	1	2	1	-	1	-
29	KANTOR KECAMATAN RILAU ALE	3	2	2	2	2	2	2	2	1	-	-	1
30	KANTOR KECAMATAN GANTARANG	3	2	2	2	2	2	2	2	1	-	-	1
31	KANTOR KECAMATAN KINDANG	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-
32	KANTOR KECAMATAN HERLANG	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-
33	KANTOR KECAMATAN BONTO TIRO	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-
34	KANTOR KECAMATAN BONTO BAHARI	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-
35	KANTOR KECAMATAN KAJANG	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	5	5	5	5	5	5	5	1	-	-	1

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bulukumba, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD dan APBD antara lain sebagai berikut:

1. Kesesuaian program RPJMD dan RKPD
 - a. Jumlah rencana program dalam RPJMD yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 adalah 181 program (jumlah pada kolom 3), dan jumlah program dalam RKPD Tahun 2021 juga berjumlah 174 program (jumlah pada kolom 4).
 - b. Antara dokumen RPJMD dan RKPD terdapat selisih 7 program diantara kedua dokumen tersebut.
2. Kesesuaian program RKPD dan Renja-PD
 - a. Jumlah rencana program dalam RKPD adalah 174 program (jumlah pada kolom 4), dan jumlah program dalam Renja-PD adalah 174 program (jumlah pada kolom 5).
 - b. Antara dokumen RKPD dan Renja-PD tidak terdapat program yang selisih diantara keduanya.
3. Kesesuaian program RKPD dan APBD
 - a. Jumlah rencana program dalam RKPD adalah 174 program (jumlah pada kolom 4), sedangkan jumlah program dalam APBD adalah 173 program (jumlah pada kolom 6). Untuk kesesuaian program yang sama antara RKPD dan APBD sejumlah 172 program namun, dari sejumlah program dalam RKPD dan APBD tersebut secara total jumlah terdapat selisih 1 yang tidak sama antara jumlah APBD dan RPKD (jumlah pada kolom 13).
 - b. Program yang tidak sesuai tersebut seluruhnya adalah program yang ada di RKPD namun tidak terdapat dalam APBD.
4. Kesesuaian program RPJMD dan APBD
 - a. Jumlah rencana program dalam RPJMD yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 adalah 181 program, sedangkan jumlah program dalam APBD adalah 173 program (kolom 10). Dengan demikian terdapat 8 program yang tidak sesuai antara kedua dokumen (jumlah pada kolom 14).
 - b. Seluruh program yang tidak sesuai antara kedua dokumen tersebut, merupakan program RPJMD yang tidak dianggarkan dalam APBD. Konsistensi program antara RPJMD dan APBD tersebut di atas dapat digambarkan sebagai berikut:

Menjadi hal penting yang termuat dalam RPJMD adalah program pembangunan daerah. Program tersebut sebagai pedoman perangkat daerah dalam menyusun kegiatan dalam Renstra-PD. Kegiatan dalam Renstra-PD menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun Renja-PD. Selanjutnya kegiatan dalam Renja-PD menjadi acuan dalam penyusunan kegiatan dalam RKPD yang kemudian dijadikan sebagai dasar penyusunan kegiatan pada KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan R-APBD untuk ditetapkan menjadi kegiatan dalam APBD dengan Peraturan Daerah. Adapun gambaran konsistensi dan pelaksanaan kegiatan RKPD sebagai berikut:

Tabel II-257
Konsistensi dan Pelaksanaan Kegiatan RKPD

No.	Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan			Kegiatan Yang Sama			Kegiatan Tidak Sama		
		RKPD	Renja	APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & APBD	Renja & APBD	APBD & APBD	Renja & APBD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	15	15	16	15	14	14	-	1	1
2	Dinas Kesehatan	23	23	23	23	23	23	-	-	-
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	23	23	23	23	23	23	-	-	-
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	18	18	18	18	18	18	-	-	-

No.	Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan			Kegiatan Yang Sama			Kegiatan Tidak Sama		
		RKPD	Renja	APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & APBD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9	9	9	9	9	9	-	-	-
6	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	10	10	10	10	10	10	-	-	-
7	Dinas Sosial	15	15	15	15	15	15	-	-	-
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	18	18	18	18	18	18	-	-	-
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	17	17	17	17	17	17	-	-	-
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	11	11	12	11	10	10	-	1	1
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	30	30	30	30	30	30	-	-	-
12	Dinas Perhubungan	10	10	10	10	10	10	-	-	-
13	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	13	13	13	13	13	13	-	-	-
14	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	28	28	28	28	28	28	-	-	-
15	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	14	14	14	14	14	14	-	-	-
16	Dinas Perikanan	13	13	13	13	13	13	-	-	-
17	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	29	29	29	29	29	29	-	-	-
18	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	44	44	44	44	44	44	-	-	-
19	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	54	54	54	54	54	54	-	-	-
20	Sekretariat Daerah	18	18	18	18	18	18	-	-	-
21	Sekretariat DPRD	14	14	14	14	14	14	-	-	-
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	22	22	22	22	22	22	-	-	-
23	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	21	21	21	21	21	21	-	-	-
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	13	13	13	13	13	13	-	-	-
25	Inspektorat Daerah	11	11	11	11	11	11	-	-	-
26	KANTOR KECAMATAN UJUNGBULU	6	6	6	6	6	6	-	-	-
27	KANTOR KECAMATAN UJUNG LOE	6	6	6	6	6	6	-	-	-
28	KANTOR KECAMATAN BULUKUMPA	9	9	9	9	9	9	-	-	-
29	KANTOR KECAMATAN RILAU ALE	6	6	6	6	6	6	-	-	-
30	KANTOR KECAMATAN GANTARANG	6	6	6	6	6	6	-	-	-
31	KANTOR KECAMATAN KINDANG	6	6	6	6	6	6	-	-	-
32	KANTOR KECAMATAN HERLANG	6	6	6	6	6	6	-	-	-
33	KANTOR KECAMATAN BONTO TIRO	7	7	7	7	7	7	-	-	-
34	KANTOR KECAMATAN BONTO BAHARI	6	6	6	6	6	6	-	-	-
35	KANTOR KECAMATAN KAJANG	6	6	6	6	6	6	-	-	-
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10	10	11	10	9	9	-	1	1

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bulukumba, 2022

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel di atas dapat dijelaskan konsistensi dan pelaksanaan kegiatan RKPD antara lain sebagai berikut:

1. RKPD dan Renja-PD.

- Kegiatan dalam RKPD adalah sejumlah 567 (jumlah pada kolom 3) dan Renja-PD adalah sejumlah 567 (jumlah pada kolom 4). Jumlah kegiatan untuk kedua dokumen konsisten adalah 567 kegiatan. (jumlah pada kolom 6), sedangkan kegiatan yang tidak sesuai adalah 0 (jumlah pada kolom 8).

- Untuk jumlah kegiatan Antara RKPD dan Renja-PD telah sesuai.c. Persentase konsistensi kegiatan RKPD dan Renja-PD adalah sebesar100 %.

2. RKPD dan APBD.

- a. Kegiatan dalam RKPD adalah sejumlah 567 (jumlah pada kolom 3) dan APBD adalah sejumlah 570 (jumlah pada kolom 5). Jumlah kegiatan yang sesuai antara kedua dokumen adalah 567 (jumlah pada kolom 7), sedangkan kegiatan yang tidak sesuai adalah 3 (jumlah pada kolom 10).
- b. Dari 3 kegiatan yang tidak sesuai antara RKPD dan APBD tersebut adalah kegiatan RKPD yang tidak dianggarkan dalam APBD demikian pula sebaliknya. Persentase konsistensi kegiatan RKPD dan APBD adalah sebesar 99,47%. Ketidaksesuaian kegiatan antara RKPD dan APBD tersebut disebabkan antara lain dukungan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan yang masih kurang.

Untuk pelaksanaan RKPD tahun 2021 sudah mengacu kepada permendagri 90 tahun 2020 yang dalam pelaksanaan penjabarannya memuat rincian sampai pada sub kegiatan. Sebagai bentuk dari pelaksanaan evaluasi terkait konsistensi pelaksanaan sub kegiatan pada RKPD terhadap Renja Perangkat daerah, RKPD terhadap APBD. Adapun gambaran konsistensi dan pelaksanaan sub kegiatan RKPD sebagai berikut:

Tabel II-258
Konsistensi dan Pelaksanaan Sub Kegiatan RKPD

No.	Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan			Sub Kegiatan Yang Sama			Sub Kegiatan Tidak Sama		
		RKPD	RENJA	APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & APBD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	65	65	67	65	65	67	-	2	2
2	Dinas Kesehatan	89	89	88	89	89		-	1	1
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	66	66	66	66	66		-	-	-
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	32	32	32	32	32		-	-	-
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	19	19	19	19	19		-	-	-
6	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	22	22	22	22	22		-	-	-
7	Dinas Sosial	41	41	41	41	41		-	-	-
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	37	37	37	37	37		-	-	-
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	58	58	58	58	58		-	-	-
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	31	31	33	31	31		-	2	2
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	79	79	79	79	79		-	-	-
12	Dinas Perhubungan	19	19	19	19	19		-	-	-
13	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	35	35	35	35	35		-	-	-
14	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	56	56	56	56	56		-	-	-
15	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	45	45	45	45	45		-	-	-
16	Dinas Perikanan	41	41	41	41	41		-	-	-
17	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	65	65	65	65	65		-	-	-
18	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	106	106	107	106	106		-	1	1
19	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	140	140	144	140	140		-	4	4
20	Sekretariat Daerah	54	54	54	54	54		-	-	-
21	Sekretariat DPRD	45	45	45	45	45		-	-	-
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	77	77	78	77	77		-	1	1
23	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	113	113	113	113	113		-	-	-
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	33	33	33	33	33		-	-	-
25	Inspektorat Daerah	29	29	29	29	29		-	-	-
26	KANTOR KECAMATAN UJUNGBULU	18	18	18	18	18		-	-	-
27	KANTOR KECAMATAN UJUNG LOE	19	19	19	19	19		-	-	-
28	KANTOR KECAMATAN BULUKUMPA	15	15	15	15	15		-	-	-
29	KANTOR KECAMATAN RILAU ALE	19	19	19	19	19		-	-	-
30	KANTOR KECAMATAN GANTARANG	15	15	15	15	15		-	-	-

No.	Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan			Sub Kegiatan Yang Sama			Sub Kegiatan Tidak Sama		
		RKPD	RENJA	APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & APBD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	KANTOR KECAMATAN KINDANG	14	14	14	14	14		-	-	-
32	KANTOR KECAMATAN HERLANG	13	13	13	13	13		-	-	-
33	KANTOR KECAMATAN BONTO TIRO	15	15	15	15	15		-	-	-
34	KANTOR KECAMATAN BONTO BAHARI	16	16	16	16	16		-	-	-
35	KANTOR KECAMATAN KAJANG	16	16	16	16	16		-	-	-
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	28	28	30	28	28		-	2	2

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bulukumba, 2022

Berdasarkan data yang tercantum dalam table diatas, dapat dijelaskan konsistensi dan pelaksanaan sub kegiatan RKPD antara lain sebagai berikut:

1. RKPD dan Renja-PD.

- Sub Kegiatan dalam RKPD adalah sejumlah 1585 (jumlah pada kolom 3) dan Renja-PD adalah sejumlah 1585 (jumlah pada kolom 4). Jumlah kegiatan untuk kedua dokumen konsisten adalah 61846 (jumlah pada kolom 6), sedangkan kegiatan yang tidak sesuai adalah 0 (jumlah pada kolom 9).
- Untuk jumlah sub kegiatan Antara RKPD dan Renja-PD telah sesuai.
- Persentase konsistensi kegiatan RKPD dan Renja-PD adalah sebesar 100%.

2. RKPD dan APBD.

- Sub Kegiatan dalam RKPD adalah sejumlah 1585 (jumlah pada kolom 3) dan APBD adalah sejumlah 1596 (jumlah pada kolom 5). Jumlah sub kegiatan yang sesuai antara kedua dokumen adalah 1585 (jumlah pada kolom 7), sedangkan sub kegiatan yang tidak sesuai adalah 11 (jumlah pada kolom 10).
- Dari 11 sub kegiatan yang tidak sesuai antara RKPD dan APBD tersebut adalah sub kegiatan yang dianggarkan dalam APBD mendapatkan untuk alokasi Anggaran disebabkan perubahan anggaran dan untuk mendukung penanganan Covid-19.
- Persentase konsistensi kegiatan RKPD dan APBD adalah sebesar 100,70%. Ketidaksesuaian kegiatan antara RKPD dan APBD tersebut disebabkan antara lain dukungan alokasi anggaran dalam pelaksanaan sub kegiatan yang berdampak langsung dalam penanganan Covid-19.

3. Renja-PD dan APBD

- Sub Kegiatan dalam RKPD adalah sejumlah 1585 (jumlah pada kolom 3) dan APBD adalah sejumlah 1596 (jumlah pada kolom 5). Jumlah subkegiatan yang sesuai antara kedua dokumen adalah 1585 (jumlah pada kolom 7), sedangkan sub kegiatan yang tidak sesuai adalah 11 (jumlah pada kolom 10).
- Dari 11 sub kegiatan yang tidak sesuai antara Renja-PD dan APBD tersebut adalah sub kegiatan yang dianggarkan dalam APBD mendapatkan untuk alokasi Anggaran

3. Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja RKPD 2021

Pengukuran capaian target kinerja dan penyerapan dana Program/kegiatan RKPD Perubahan Kabupaten Bulukumba Tahun 2021, digunakan beberapa kriteria penilaian seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel II-259

Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2021

No.	Perangkat Daerah	APBD	Realisasi	%
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	460.127.123.309	434.218.533,891	94,37
2	Dinas Kesehatan	231.107.433.193	193.990.366,91	83,94

No.	Perangkat Daerah	APBD	Realisasi	%
3	RSUD H.A.Sultan Daeng Radja	116.965.136.943	97.705.358,17	83,53
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	91.677.325.671	68.586.461,95	74,81
5	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	33.938.820.228	30.397.233,93	89,56
6	Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan	52.249.168.781	48.355.864,216	92,55
7	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	3.292.594.495	3.180.142,385	96,58
8	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Damkar	12.304.975.912	12.168.461,512	98,89
9	Dinas Sosial	5.983.854.810	5.731.084,563	95,78
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16.558.160.225	2.565.223,124	15,49
11	Dinas Tenaga Kerja	3.874.047.662	3.232.740,058	83,45
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	3.123.044.838	2.596.455,068	83,14
13	Dinas Ketahanan Pangan	4.259.585.547	4.132.059,551	97,01
14	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	17.498.034.017	16.633.849,738	95,06
15	Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil	5.690.521.167	5.424.541,426	95,33
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	3.622.961.227	3.480.419,900	96,07
17	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	9.307.395.648	7.913.888,786	85,03
18	Dinas Perhubungan	5.698.423.150	5.549.657,309	97,39
19	Dinas Komonikasi Dan Informatika	4.453.426.089	4.373.475,328	98,20
20	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	5.495.382.322	4.978.997,354	90,60
21	Dinas Penanaman Modal Ptsip	3.887.420.360	3.815.326,314	98,15
22	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	6.857.638.168	6.563.601,676	95,71
23	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	3.144.272.510	2.970.322,790	94,47
24	Dinas Perikanan Dan Kelautan	10.460.850.402	10.205.834,032	97,56
25	Dinas Pariwisata	9.791.884.492	9.065.834,870	92,59
26	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura P	20.100.765.531	19.820.361,734	98,61
27	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	7.176.297.114	6.831.798,949	95,20
28	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	14.815.717.788	12.557.971,266	84,76
29	Sekretariat Daerah	22.471.353.047	21.132.384,326	94,04
30	Sekretariat Dprd	37.710.579.080	36.806.930,034	97,60
31	Inspektorat Daerah	7.776.434.467	6.940.295,292	89,25
32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8.237.283.850	7.693.083,622	93,39
33	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	202.814.323.576	196.111.587,233	96,70
34	Badan Pendapatan Daerah	11.150.748.315	9.237.420,900	82,84
35	Badan Kepegawaian Pengembangan SDM	7.129.226.060	6.976.027,844	97,85
36	Badan Penelitian Dan Pengembangan	2.712.657.866	2.690.529,020	99,18
37	Kantor Kecamatan Ujungbulu	10.863.470.398	10.621.889,374	97,78
38	Kantor Kecamatan Ujung Loe	2.342.286.563	2.270.830,860	96,95
39	Kantor Kecamatan Bulukumpa	4.028.201.679	3.821.155,888	94,86
40	Kantor Kecamatan Rilau Ale	3.757.870.996	3.668.000,235	97,61
41	Kantor Kecamatan Gantarang	5.022.166.872	4.975.233,883	99,07
42	Kantor Kecamatan Kindang	1.904.547.867	1.870.577,355	98,22
43	Kantor Kecamatan Herlang	2.716.121.585	2.636.077,129	97,05
44	Kantor Kecamatan Bonto Tiro	2.828.889.978	2.751.215,015	97,25
45	Kantor Kecamatan Bonto Bahari	4.823.287.486	4.708.408,602	97,62
46	Kantor Kecamatan Kajang	3.663.781.954	3.455.672,988	94,32
	JUMLAH	1.505.415.493.238	1.355.408.883.900	90,04

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa total jumlah anggaran yang dialokasikan unruk pelaksanaan kegiatan pembangunan di Bulukumba tahun 2021 adalah Rp.1.532.690.063.871,- anggaran tersebut terbagi atas 46 perangkat daerah. Realisasi serapan anggaran dari pelaksanaan kegiatan pada tahun 2021 sebesar 90,04%, Pengukuran capaian target kinerja outcome/output pada Program/kegiatan/sub kegiatan yang diakumulasi berdasarkan urusan dan penyerapan dana Program/kegiatan/sub kegiatan RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021, adapapun Skala Nilai Peringkat Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-260
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Simbol
1	91% ≤ 100%	SANGAT TINGGI	ST
2	76% ≤ 90%	TINGGI	T
3	66% ≤ 75%	SEDANG	S
4	51% ≤ 65%	RENDAH	R
5	≤ 50%	SANGAT RENDAH	SR

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat Kinerja dari 46 perangkat daerah hanya 1 perangkat daerah yang masuk dalam kategori Sangat Rendah yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (15,49%) ini dikarenakan ada belanja transfer yang tidak sempat dibayarkan, kategori Tinggi berjumlah 11 Perangkat Daerah dan Kategori sangat tinggi berjumlah 34.

Tabel II-261
Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Keuangan Evaluasi Hasil RKPD

No	Urusan	Rata-Rata Tingkat Capaian RKPD			
		Kinerja	Predikat	Keu	Predikat
I	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	95,58	ST	94,14	ST
2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	82,31	T	78,31	T
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	80,84	T	79,54	T
4	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	96,19	ST	90,41	T
5	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	96,84	ST	90,96	T
6	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	97,31	ST	93,01	ST
II	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
1	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	96,73	ST	81,62	T
2	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	80,54	T	77,4	T
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	99,5	ST	97,23	ST
4	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	85,36	T	82,22	T
5	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	99,63	ST	96,4	ST
6	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	100	ST	97,04	ST
7	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	100	ST	98,89	ST
8	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	81,1	T	72,63	S
9	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	99,28	ST	95,92	ST
10	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	96,53	ST	96,03	ST
11	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	97,51	ST	95,38	ST
12	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	91,92	ST	91,7	ST
13	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	92,12	ST	91,72	ST
14	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	100	ST	98,02	ST
15	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	100	ST	100	ST
16	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	72,5	S	70,41	S
17	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	94,79	ST	95,56	ST
18	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	96,82	ST	96,15	ST
III	Urusan Pemerintahan Pilihan				
1	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	88,56	T	84,63	T
2	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	86,87	T	85,2	T
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	95,15	ST	90,54	T

No	Urusan	Rata-Rata Tingkat Capaian RKPD			
		Kinerja	Predikat	Keu	Predikat
4	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan	96,33	ST	94,84	ST
5	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	75,05	S	71,12	S
6	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	93,5	ST	89,9	T
IV	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan				
1	Sekretariat Daerah	93,23	ST	90,06	T
2	Sekretariat DPRD	93,16	ST	88,57	T
V	Urusan Peemeerintahan Unsur Penunjang				
1	Perencanaan	93,68	ST	90,07	T
2	Keuangan	95,83	ST	88,41	T
3	Kepegawaian,	98,63	ST	96,48	ST
4	Pendidikan Dan Pelatihan	100	ST	97,6	ST
5	Penelitian Dan Pengembangan	93,89	ST	93,62	ST
VI	Urusan Pemerintahan Unsur Pengawasan				
1	Pengawasan	87,63	T	79,9	T
VII	Urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan				
1	Kecamatan	90,24	T	88,31	T
VIII	Unsur Pemerintahan Umum				
	Kesatuan Bangsa Dan Politik	98,91	ST	92,19	ST
	RKPD Kabupaten Bulukumba	92,85	ST	89,55	T

Sumber : Laporan Evaluasi Triwulan IV Tahun 2021

4. Faktor Penghambat Pelaksanaan RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021

Hambatan dan kendala dalam melaksanakan kegiatan tahun 2021 dipengaruhi oleh:

- 1) Secara umum capaian Program dan Kegiatan telah mencapai target maksimal (90,04 persen) pada Tahun 2021, disebabkan karena adanya kebijakan pemerintah pusat terkait refocusing anggaran dalam rangka penanganan *Covid-19*, sehingga menyebabkan beberapa program atau kegiatan tidak berjalan
- 2) Sebagian besar program dan kegiatan pekerjaan fisik masih sementara dalam proses pengadaan barang/jasa (tender) di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Bulukumba.
- 3) Terdapat beberapa program dan kegiatan khususnya pada belanja modal yang pelaksanaannya masih dalam proses kontrak sehingga belum menyerap anggaran.
- 4) Secara umum pekerjaan di seluruh OPD masih dalam tahap awal pelaksanaan pekerjaan sehingga belum menyerap anggaran yang cukup besar.
- 5) Adanya Pandemi *Covid - 19* sehingga mempengaruhi kegiatan utamanya kegiatan Fisik dan Pengadaan yang dilakukan oleh OPD.

5. Faktor Pendorong Keberhasilan Pelaksanaan RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021

Merujuk dari faktor penghambat Pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2021 tentunya mengalami berbagai kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Faktor Pendorong Keberhasilan Pelaksanaan RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 dalam pencapaian keberhasilan kinerja disampaikan sebagai berikut:

- 1) Komitmen pimpinan dan Koordinasi OPD yang baik untuk melaksanakan kegiatan secara maksimal;
- 2) Adanya koordinasi/konsultasi yang sinergi antar struktur jabatan internal dan eksternal serta adanya komunikasi yang terjalin antar pemimpin dan yang dipimpin dalam organisasi;
- 3) Tersedianya Sarana dan prasarana pendukung yang memadai;
- 4) Penyerapan program dan kegiatan masing-masing bidang dan kesekretariatan berjalan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan;
- 5) Adanya pedoman/dokumen Standar Pelayanan/SOP dan regulasi yang sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan;
- 6) Kualitas SDM yang mampu, terampil dan memadai serta memiliki komitmen dan motivasi untuk melakukan tugas dan fungsi secara maksimal dalam rangka memberikan pelayanan prima;
- 7) Adanya komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

6. Tindak Lanjut

Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut:

- 1) Peningkatan pemahaman aparatur perangkat daerah dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan.
- 2) Penyusunan dokumen rencana dan anggaran sesuai dengan tahapan dan tatacara yang diatur dalam peraturan perundangan.
- 3) Pengelolaan data yang baik. Sebagai bentuk tindak lanjut dan rekomendasi dari penyajian data-data tersebut diatas, maka rekomendasi sebagai Identifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat serta tindak lanjut bisa bermanfaat bagi keberhasilan pencapaian kinerja dan daya serap anggaran antara lain karena :

Untuk lebih jelasnya terkait evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu, tahun berjalan dan realisasi RPJMD dapat dilihat pada berikut:

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.																												
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD		APBD		I		II		III		IV		K	Rp (000)	K			Rp (000)	K	Rp (000)																									
										Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)																																	
1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran																																																	
1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	-	0,00	-	12,00	-	-	3,00	25.034	3,00	67.582,08	3,00	24.252	3,00	26.259	12,00	143.127,13	100,00	0,00	0,00	12,00	143.127	0,00	0,00	Dinas Dikbud	APBD Kab																							
1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	-	0,00	-	12,00	-	-	3,00	-	3,00	-	3,00	-	3,00	13.896	12,00	13.896,41	100,00	0,00	0,00	12,00	13.896	0,00	0,00	SKB	APBD Kab																							
1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan dan Jasa Kebersihan Kantor	12,00	-	-	-	12,00	-	-	3,00	-	3,00	-	3,00	-	3,00	16.800	12,00	16.800,00	100,00	0,00	0,00	12,00	16.800	0,00	0,00	SKB	APBD Kab																							
1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan dan Jasa Kebersihan Kantor	12,00	-	-	-	12,00	-	-	3,00	4000	3,00	6000	3,00	8000	3,00	6000	12,00	24.000,00	100,00	0,00	0,00	12,00	24.000	0,00	0,00	Dinas Dikbud	APBD Kab																							
1	1	2.09	1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran																																																	
1	1	2.09	1	Pemeliharaan mobil jabatan secara berkala	Terpeliharanya mobil jabatan secara berkala	0,00	-	0,00	-	3,00	-	-	0,00	-	1,41	14.237,83	0,54	5.630	0,96	8.918	2,91	28.786,66	97,00	0,00	0,00	2,91	28.787	0,00	0,00	Dinas Dikbud	APBD Kab																							
1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	12,00	-	-	-	12,00	-	-	3,00	-	3,00	-	3,00	-	3,00	1.750	12,00	1.749,74	100,00	0,00	0,00	12,00	1.750	0,00	0,00	SKB	APBD Kab																							
1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor secara berkala dan Revitalisasi SKB serta Pemeliharaan FGRI	0,00	-	0,00	-	9,00	-	-	0,00	-	-	-	9,00	-	9,00	17.020	9,00	17.019,75	100,00	0,00	0,00	9,00	17.020	0,00	0,00	SKB	APBD Kab																							
1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor secara berkala dan Revitalisasi SKB serta Pemeliharaan FGRI	0,00	-	0,00	-	9,00	-	-	0,00	-	-	-	1,80	-	366.117	5,85	1.154.545	7,65	1.520.661,50	85,00	0,00	0,00	7,65	1.520.662	0,00	0,00	Dinas Dikbud	APBD Kab																						
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																				98,76	0,00	0,00																																
Predikat Kinerja																				ST	SR	SR																																
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN																																																						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 4)																				95,58	0,00	0,00																																
PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 4)																				ST	SR	SR																																
1	2	2	0	0,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																																																	
2	2	2	0,00	0,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemberian pelayanan GD yang bersertifikat masih berlaku BLS/PPGD/ GELS/ALS, Waktu tanggap pelayanan dokter di GD, Kepuasan pelanggan pada gawat darurat, Pemberi pelayanan unit intensif, Baku mutu limbah cair, Pengolahan limbah padat berbahaya s																																																
2	2	2	2,01	2,01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terperuhnya kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan, sarana, prasarana dan alkes sesuai standar																																																
2	2	2	2,01	1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Tersedianya RS Pratama	0,00	-	0,00	-	1,00	-	0,08	45.097,20	0,08	4.167.266	0,83	29.465.986	1,00	33.678.348,77	100,00	0,00	0,00	1,00	33.678.349	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab																									
2	2	2	2,01	4	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Tersedianya Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	0,00	-	0,00	-	1,00	-	0,00	-	0,33	237.563	0,62	574.313	0,95	811.876,08	95,10	0,00	0,00	0,95	811.876	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab																									
2	2	2	2,01	6	Pengembangan Puskesmas	Terlaksananya perbaikan dan penataan sistem perencanaan	0,00	-	0,00	-	20,00	-	0,00	-	0,00	-	15,00	8.795	15,00	8.795,00	75,00	0,00	0,00	15,00	8.795	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab																									
2	2	2	2,01	9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Puskesmas yang terpenuhi kebutuhan sarana dan prasarana	0,00	-	0,00	-	3,00	-	0,00	-	0,75	2.407	1,76	6.239.291	2,51	6.241.697,93	83,67	0,00	0,00	2,51	6.241.698	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab																									
2	2	2	2,01	9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas yang terpenuhi kebutuhan sarana dan prasarana	0,00	-	0,00	-	3,00	-	0,00	-	-	2,55	669.132	2,55	669.131,995	85,00	0,00	0,00	2,55	669.132	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab																										
1	2	2	2,01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Pemberian pelayanan GD yang bersertifikat masih berlaku BLS/PPGD/ GELS/ALS, Waktu tanggap pelayanan dokter di GD, Kepuasan pelanggan pada gawat darurat, Pemberi pelayanan unit intensif, Baku mutu limbah cair, Pengolahan limbah padat berbahaya sesuai dengan aturan, Persentase anggota Tim PPI terlatih, Persentase koordinasi APD																																																
2	2	2	2,01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Puskesmas, Pustu/ Poskesdes yang terpenuhi kebutuhan sarana, sesuai standar	0,00	-	0,00	-	4	-	0,00	-	0,68	99.980,00	0,04	93.160,00	3,01	3.401.980,04	3,73	3.595.120,04	93,33	0,00	0,00	3,73	3.595.120	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab																							
2	2	2	2,01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Puskesmas, Pustu/ Poskesdes yang terpenuhi kebutuhan prasarana dan alkes sesuai standar	0,00	-	0,00	-	1,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2,00	417.486	2,00	417.485,65	100,00	0,00	0,00	2,00	417.486	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab																						
2	2	2	2,01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Puskesmas, Pustu/ Poskesdes yang terpenuhi kebutuhan prasarana dan alkes sesuai standar	0,00	-	0,00	-	2,00	-	0,00	-	0,00	-	0,95	9.077.554	1,00	9.077.554,05	100,00	0,00	0,00	1,00	9.077.554	8,33	0,00	RSUD	APBD Kab																									
2	2	2	2,01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Puskesmas terpenuhi kebutuhan alkes sesuai standar	12,00	-	0,00	-	1,00	-	0,00	-	0,05	-	0,95	9.077.554	17,60	6.221.777	17,60	6.276.633,02	88,00	0,00	0,00	17,60	6.276.633	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab																							
2	2	2	2,01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Puskesmas terpenuhi kebutuhan alkes sesuai standar	0,00	-	0,00	-	20,00	-	1,00	21.946,50	2,00	32.910	14,60	6.221.777	17,60	6.276.633,02	88,00	0,00	0,00	17,60	6.276.633	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab																									
2	2	2	2,01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Puskesmas yang terpenuhi kebutuhan alkes sesuai standar	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab																									
2	2	2	2,01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Terperuhnya kebutuhan masyarakat akan obat dan vaksin	0,00	-	0,00	-	100,00	-	0,00	-	4,00	52.625,00	21,00	278.472	75,00	997.226	100,00	1.328.322,46	100,00	0,00	0,00	100,00	1.328.322	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab																							
2	2	2	2,01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Terperuhnya kebutuhan masyarakat akan perbekalan	0,00	-	0,00	-	100,00	-	0,00	-	15,00	180.775	80,00	1.641.775	95,00	1.822.549,12	95,00	0,00	0,00	95,00	1.822.549	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab																									
2	2	2	2,01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya Rehabilitasi Gedung PCS	0,00	-	0,00	-	1,00	-	0,00	-	0,56	344.591	0,56	344.590,83	55,60	0,00	0,00	0,56	344.591	0,00	0,00	0,56	344.591	0,00	0,00	RSUD	APBD Kab																							
2	2	2	2,01	2	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya pelayanan kefarmasian di sarana pelayanan kesehatan	0,00	-	0,00	-	20,00	-	0,00	-	20,00	19.589	0,00	-	20,00	19.589,05	100,00	0,00	0,00	20,00	19.589	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab																									
2	2	2	2,02	2,02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat, upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit																																																
2	2	2	2,02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil di Puskesmas	0,00	-	0,00	-	100	-	0,00	-	0,00	-	32,96	3.470,00	32,96	3.470,00	32,96	0,00	0,00	32,96	3.470	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab																									
2	2	2	2,02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Meningkatnya Cakupan Kesehatan Ibu & anak serta persalinan di sarana kesehatan	0,00	-	0,00	-	100,00	-	0,00	-	0,33	1.300,00	0,34	92,66	1.608.849	93,33	1.610.148,90	93,33	0,00	0,00	93,33	1.610.149	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab																								
2	2	2	2,02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	0,00	-	0,00	-	100	-	0,00	-	5,1	1.400,00	1,9	-	0,00	-	7,00	1.400,00	7,00	0,00	0,00	7,00	1.400	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab																							
2	2	2	2,02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Balita	0,00	-	0,00	-	100,00	-	0,00	-	50,00	3.560	35,00	2.800	85,00	6.360,00	85,00	0,00	0,00	85,00	6.360	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab																									
2	2	2	2,02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Meningkatnya cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0,00	-	0,00	-	20,00	-	0,00	-	7,00	1.203	7,00	1.202,50	35,00	0,00	0,00	7,00	1.203	0,00	0,00	7,00	1.203	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab																							
2	2	2	2,02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0,00	-	0,00	-	20,00	-	0,00	-	10,00	3035	10,00	3.035,00	50,00	0,00	0,00	10,00	3.035	0,00	0,00	10,00	3.035	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab																							
2	2	2																																																				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.						
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	I		II		III		IV		K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)			K	Rp (000)				
									Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)																
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													90,67	0,00	0,00	15=7+13		0,00	0,00	17		18										
Predikat Kinerja													T	SR	SR			SR	SR													
3	2	4	0.00	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Kmampuan melayani life saving anak&Dewasa, Jam buka pelayanan GD, Kematian pasien 24 jam di GD, pasien yg diharuskan membayar uang muka, Pemberi pelayanan rawat inap, Dokter penanggung jawab pasien rawat inap, Ketersediaan plyanan rawat inap, Kma																											
	2	4	2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Tersedianya obat rasional di sarana pelayanan yang terjamin keamanan khasiat dan mutunya																											
	2	4	2.01	1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Menjamin keamanan khasiat dan mutu obat yang beredar di sarana distribusi	%	0,00	-	0,00	-	100,00	-	0,00	-	15,00	2.100,00	45,00	2.800	40,00	3.500	100,00	8.400,00	100,00	0,00	0,00	100,00	8.400	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab	
	2	4	2.01	2 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	%	0,00	-	0,00	-	100,00	-	0,00	-	30,00	4.950,00	5,00	1.800	65,00	13.699	100,00	20.448,60	100,00	0,00	0,00	100,00	20.449	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab	
	2	4	2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Terpenuhihnya alkes di sarana pelayanan kesehatan																											
	2	4	2.02	1 Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Meningkatnya pelayanan alkes di sarana pelayanan kesehatan	%	0,00	-	0,00	-	100,00	-	0,00	-	0,00	-	65,00	8.551	65,00	8.551,49	65,00	0,00	0,00	65,00	8.551	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab			
	2	4	2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Terbitnya sertifikat/izin produksi bagi industri rumah tangga																											
	2	4	2.03	1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Inspeksi sanitasi makanan hasil industri dan Terawasinya pangan hasil produksi IRT	%	0,00	-	0,00	-	100,00	-	0,00	-	10,00	5.850,00	15,00	18.018	73,00	78.763	98,00	102.630,93	98,00	0,00	0,00	98,00	102.631	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab	
	2	4	2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Terselenggaranya peningkatan kapasitas penjamah makanan, sosialisasi kantin sehat, bimbingan teknis pengawasan TPM dan pembinaan uji petik TPM di wilayah puskesmas																											
	2	4	2.04	1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Terselenggaranya sosialisasi & bimbingan teknis pengawasan TPM	%	0,00	-	0,00	-	100,00	-	0,00	-	0,00	45,00	4.050	35,00	1.655	80,00	5.704,83	80,00	0,00	0,00	80,00	5.705	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab		
	2	4	2.05	Penerbitan Siker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Terlaksananya pengawasan dan pembinaan pada penjaja makanan																											
	2	4	2.05	1 Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Siker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Terselenggaranya uji petik TPM di wilayah Puskesmas	kali	0,00	-	0,00	-	1,00	-	0,00	-	1,00	5.780	1,00	5.780,00	100,00	0,00	0,00	1,00	5.780	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab					
	2	4	2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Produk Industri Rumah tangga bebas bahan berbahaya																											
	2	4	2.06	1 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Terawasinya bahan berbahaya pada pangan	%					100				0,00																	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													90,14	0,00	0,00			0,00	0,00													
Predikat Kinerja													T	SR	SR			SR	SR													
4	2	5	0.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase rumah tangga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta Cakupan desa yang melaksanakan STBM																											
	2	5	2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan Desa/Kelurahan siaga aktif																											
	2	5	2.01	1 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya jumlah Desa/Kelurahan siaga aktif	desa/kel					136				0,00		0,50	5.917,19	10,50	36.740,00	77,00	214.771,59	88,01	257.428,78	64,71	0,00	0,00	88,01	257.429	0,00	0,00	Dinkes
	2	5	2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya media promosi kesehatan menuju kemandirian masyarakat untuk ber PHBS																											
	2	5	2.02	1 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Meningkatnya pemanfaatan media promosi kesehatan dan kemandirian masyarakat untuk ber PHBS	%	0,00	-	0,00	-	100,00	-	0,00	-	1,00	4.844,00	11,00	11.000	73,00	95.472	85,00	111.315,70	85,00	0,00	0,00	85,00	111.316	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													74,86	0,00	0,00			0,00	0,00													
Predikat Kinerja													S	SR	SR			SR	SR													
5	2	1	0.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	"Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumberdaya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan"																											
	2	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan, dan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program																											
	2	1	2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah lingkup Dinas Kesehatan	%	0,00	-	0,00	-	100,00	-	0,00	-	75,00	10.107,00	0,00	-	15,00	18.061	90,00	28.167,90	90,00	0,00	0,00	90,00	28.168	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab	
	2	1	2.01	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Whitar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD dinas kesehatan	%	0,00	-	0,00	-	100,00	-	0,00	-	92,50	5.184,30	6,50	-	1,00	-	100,00	5.184,30	100,00	0,00	0,00	100,00	5.184	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab	
	2	1	2.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terevaluasinya kemajuan program dan kegiatan secara bertahap dan berjenjang	%					100				0,00		10	1.890,00	15,00	-	29,16	13.689,94	54,16	15.579,94	54,16	0,00	0,00	54,16	15.580	0,00	0,00	Dinkes

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.					
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	RKPD		APBD		I		II		III		IV		K	Rp (000)	K	Rp (000)	K			Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)
									K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=9+10+11+12	14=13/8*100	15=7+13	16=15/6*100	17	18										
2	3	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	OK	0,00	-	0,00	-	441,00	9.611	3,00	271,50	195	100	106,06	28.973	306,98	38.955,00	69,61	0,00	0,00	306,98	38.955	0,00	0,00	PUTR	APBD Kab			
2	3	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD, Dokumen Perubahan RKA-SKPD, Dokumen DPA-SKPD, Dokumen Perubahan DPA-SKPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	9.611	3,00	9.179,58	3,00	10.265	3,00	14.684	12,00	43.739,51	100,00	0,00	0,00	12,00	43.740	0,00	0,00	PSDA	APBD Kab		
2	3	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen SAKIP, Perjanjian Kinerja dan Laporan Akhir Tahun, SPM, Rencana Aksi, SPIP, LKJP, Laporan Semesteran, Jasa Sunat Menyurat	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	12.360	3,00	37.148,62	3,00	14.718	3,00	34.645	12,00	98.871,48	100,00	0,00	0,00	12,00	98.871	0,00	0,00	PSDA	APBD Kab		
2	3	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen laporan keuangan																										
2	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	734.103	3,00	1.191.867,47	3,00	722.673	3,00	782.961	12,00	3.431.605,36	100,00	0,00	0,00	12,00	3.431.605	0,00	0,00	PUTR	APBD Kab		
2	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	gaji dan Tunjangan ASN	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	1.037.385	3,00	1.426.384	3,00	1.306.185	3,00	1.114.044	12,00	4.883.998,42	100,00	0,00	0,00	12,00	4.883.998	0,00	0,00	PSDA	APBD Kab		
2	3	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemenuhan administrasi ASN	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	5.156	3,00	7.992,90	3,00	5.732	3,00	-	12,00	18.880,90	100,00	0,00	0,00	12,00	18.881	0,00	0,00	PSDA	APBD Kab		
2	3	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dan pembayaran honorarium kegiatan keuangan dan tersedianya dokumen LPJ Keuangan	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	15.875	3,00	97.575,00	3,00	69.557	3,00	144.102	12,00	327.109,00	100,00	0,00	0,00	12,00	327.109	0,00	0,00	PUTR	APBD Kab		
2	3	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bahan Verifikasi Keuangan, Jasa administrasi Keuangan	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	24.750,00	3,00	38.322,48	3,00	58.328	3,00	67.120	12,00	188.520,41	100,00	0,00	0,00	12,00	188.520	0,00	0,00	PSDA	APBD Kab		
2	3	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Dokumen	0,00	-	0,00	-	1,00	-	0,00	-	0,00	-	0,35	3.496	0,35	3.496,00	35,33	0,00	0,00	0,35	3.496	0,00	0,00	PUTR	APBD Kab		
2	3	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan																										
2	3	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Latipm III	orang	0,00	-	0,00	-	2	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	PUTR	APBD Kab		
2	3	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pengertian Aparatur	orang	0,00	-	0,00	-	2,00	-	0,00	-	2,00	103.045	0,00	-	2,00	103.045,00	100,00	0,00	0,00	2,00	103.045	0,00	0,00	PSDA	APBD Kab		
2	3	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pelaksanaan dan Peningkatan Kemampuan Teknis Bagi Aparatur	kali	85,00	-	0,00	-	8,00	-	0,00	-	2,00	7.933,50	0,00	-	2,00	7.933,50	25,00	0,00	0,00	2,00	7.934	2,35	0,00	PSDA	APBD Kab		
2	3	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya kemampuan ASN DPUPR	orang	0,00	-	0,00	-	20,00	-	0,00	-	2,00	13.490,00	3,29	1.013	6,13	8.790	11,42	23.293,00	57,12	0,00	0,00	11,42	23.293	0,00	0,00	PUTR	APBD Kab
2	3	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di adakan dan dielihara																										
2	3	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik kantor	item	0,00	-	0,00	-	8,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	PUTR	APBD Kab		
2	3	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kebutuhan Bangunan kantor	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	-	3,00	-	3,00	-	3,00	2.552	9,00	2.552,14	75,00	0,00	0,00	9,00	2.552	0,00	0,00	PSDA	APBD Kab		
2	3	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	7.720	3,00	38.852	3,00	31.401	3,00	62.162	12,00	140.134,96	100,00	0,00	0,00	12,00	140.135	0,00	0,00	PSDA	APBD Kab		
2	3	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan dan minum	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	-	3,00	-	0,00	-	6,00	-	6,00	-	0,00	0,00	0,00	6,00	-	0,00	0,00	PUTR	APBD Kab		
2	3	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	-	3,00	-	3,00	2.496,20	9,00	2.496,20	75,00	0,00	0,00	9,00	2.496	0,00	0,00	9,00	2.496	0,00	0,00	PUTR	APBD Kab
2	3	1	2.06	8	Facilitasi Kunjungan Tamu	Makanan Minum	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	-	3,00	4.323,00	3,00	4.412	3,00	13.209	12,00	21.943,63	100,00	0,00	0,00	12,00	21.944	0,00	0,00	PSDA	APBD Kab		
2	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah	kali	0,00	-	0,00	-	96,00	3.500	0,84	63,36	23.720	28,80	36.964	96,00	64.184,23	100,00	0,00	0,00	96,00	64.184	0,00	0,00	PSDA	APBD Kab			
2	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	10.590	3,00	61.710,00	3,00	39.965	3,00	93.466	12,00	205.730,52	100,00	0,00	0,00	12,00	205.731	0,00	0,00	PUTR	APBD Kab		
2	3	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di adakan dan dielihara																										
2	3	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kendaraan dinas/operasional	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	PSDA	APBD Kab			
2	3	1	2.07	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peralatan gedung kantor	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	-	3,00	-	3,00	-	6,00	-	50,00	0,00	0,00	0,00	6,00	-	0,00	0,00	PSDA	APBD Kab			
2	3	1	2.07	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan dan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	unit	0,00	-	0,00	-	3,00	0,56	0,00	-	2,44	31.458	3,00	31.457,80	100,00	0,00	0,00	3,00	31.458	0,00	0,00	PUTR	APBD Kab				
2	3	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di adakan dan dielihara																										
2	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya biaya wifi dan listrik	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	2.996.339	3,00	2.821.133,12	3,00	2.981.281	3,00	2.979.950	12,00	11.778.703,67	100,00	0,00	0,00	12,00	11.778.704	0,00	0,00	PUTR	APBD Kab		
2	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Air, dan Listrik	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	13.176	3,00	14.448,62	3,00	15.851	3,00	17.526	12,00	60.801,87	100,00	0,00	0,00	12,00	60.802	0,00	0,00	PSDA	APBD Kab		
2	3	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kebersihan Kantor	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	4.000	3,00	6.000,00	3,00	8.000	3,00	9.911	12,00	27.911,40	100,00	0,00	0,00	12,00	27.911	0,00	0,00	PSDA	APBD Kab		
2	3	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dan pembayaran honorarium kegiatan keuangan dan tersedianya dokumen LPJ Keuangan	kegiatan	0,00	-	0,00	-	1,00	2000,00	0,04	8000,00	0,66	6000,00	0,17	9750,00	0,92	25.750,00	92,21	0,00	0,00	0,92	25.750	0,00	0,00	PUTR	APBD Kab		
2	3	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di adakan dan dielihara																										
2	3	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya mobil jabatan	Unit	0,00	-	0,00	-	1,00	-	0,00	-	0,47	23.090,00	0,51	29.020,43	0,98	52.110,43	98,10	0,00	0,00	0,98	52.110	0,00	0,00	PUTR	APBD Kab		
2	3	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	terselenggaranya jasa pemeliharaan biaya pajak kendaraan dinas	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	13.563,77	3,00	10.368	3,00	49.023	9,00	72.954,79	75,00	0,00	0,00	9,00	72.955	0,00	0,00	PSDA	APBD Kab				
2	3	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terbayarnya STNK Kendaraan Dinas/Operasional dan Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	unit	0,00	-	0,00	-	45,00	11,72	0,00	-	1,87	23.931	22,86	58.073	36,45	82.003,83	81,00	0,00	0,00	36,45	82.004	0,00	0,00	PUTR	APBD Kab		
2	3	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya bangunan gedung kantor	unit	0,00	-	0,00	-	2,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	PUTR	APBD Kab			
2	3	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Rehab Gedung Kantor	unit	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	0,90	6.642,52	0,90	6.642,52	90,00	0,00	0,00	0,90	6.643	0,00	0,00	PSDA	APBD Kab				
2																																

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.								
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD		APBD		I		II		III		IV		K	Rp (000)	K			Rp (000)	K	Rp (000)					
										Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=9+10+11+12		14=13/100		15=7+13		16=15/100				17	18						
1	5	00.0	2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																														
1	5	00.0	2.01	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	-	3,00	663.480	3,00	668.160,00	3,00	751.008	3,00	628.950	12,00	2.711.597,50	100,00	0,00	0,00	12,00	2.711.598	0,00	0,00	SATPOL PP	APBD Kab				
1	5	00.0	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		0,00	-	0,00	-		-	0,00	-	0,00	-		0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	SATPOL PP	APBD Kab					
1	5	00.0	2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota																														
1	5	00.0	2.02	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	-	3,00	68.731	3,00	138.109,50	3,00	115.211	3,00	137.109	12,00	459.160,80	100,00	0,00	0,00	12,00	459.161	0,00	0,00	SATPOL PP	APBD Kab				
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																			66,67	0,00	0,00			0,00	0,00									
Predikat Kinerja																			S	SR	SR			SR	SR									
3	5	0.00	3	0.00	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	"Persentase peningkatan jumlah aparaturnya yang mengikuti pelatihan tanggap darurat bencana dan korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat"																												
5	0.00	3	2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana																													
5	0.00	3	2.01	2 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Terbentuknya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana	kecamatan	0,00	-	0,00	-	10,00	-	0,00	-	5,20	1.615,00	3,00	1.000	1,50	483	10,00	3.098,00	100,00	0,00	0,00	10,00	3.098	0,00	0,00	BPBD	APBD Kab			
5	0.00	3	2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rasio mitigasi dan pengurangan risiko bencana, serta peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan penanggulangan bencana																													
5	0.00	3	2.02	1 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	fasilitasi petugas reviter dan sunami	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	-	3,00	2.100,00	3,00	1.400,00	3,00	2.800	3,00	2.800	12,00	9.100,00	100,00	0,00	0,00	12,00	9.100	0,00	0,00	Dinas Perhubungan	APBD Kab			
5	0.00	3	2.02	1 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Rasio mitigasi dan pengurangan risiko bencana, serta peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan penanggulangan bencana	kecamatan	0,00	-	0,00	-	10,00	-	4,29	15.455	2,49	1.953,00	1,90	4.844	1,32	3.402	10,00	25.653,85	100,00	0,00	0,00	10,00	25.654	0,00	0,00	BPBD	APBD Kab			
5	0.00	3	2.02	3 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Rasio mitigasi dan pengurangan risiko bencana, serta peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan penanggulangan bencana	set	0,00	-	0,00	-	8,00	-	0,00	-					8,00	100,00	8,00	100,00,00	100,00	0,00	0,00	8,00	100,00	0,00	0,00	BPBD	APBD Kab			
5	0.00	3	2.02	7 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Tertindakannya fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Tertindakannya identifikasi dan verifikasi kondisi kerusakan dan kerugian sarana dan prasarana pascabencana	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	-	3,00	5.340	3,00	147.652,80	3,00	25.010	3,00	106.759	12,00	284.761,82	100,00	0,00	0,00	12,00	284.762	0,00	0,00	BPBD	APBD Kab			
5	0.00	3	2.02	8 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Terselenggaranya pelatihan tanggap darurat bencana bagi TRC dan Relawan Bencana																													
5	0.00	3	2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Rasio ketersediaan peralatan dan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana																													
5	0.00	3	2.03	2 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya pos siaga dan tanggap darurat bencana	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	-	1,70	96.240	4,06	153.025,35	3,00	117.289	3,00	143.112	11,76	509.665,95	98,00	0,00	0,00	11,76	509.666	0,00	0,00	BPBD	APBD Kab			
5	0.00	3	2.03	4 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Tertindakannya mobilisasi/operasionalisasi logistik bencana	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	-	3,00	-	3,00	1.955,00	3,00	4.329	3,00	584	12,00	6.868,00	100,00	0,00	0,00	12,00	6.868	0,00	0,00	BPBD	APBD Kab			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																			116,33	0,00	0,00			0,00	0,00									
Predikat Kinerja																			ST	SR	SR			SR	SR									
4	1	5	00.0	0.00	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat waktu tanggap (response time rate) layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)																												
1	5	00.0	2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebakaran yang siap Pakai. Terebutnya pelayanan pencegahan, pengendalian kebakaran																													
1	5	00.0	2.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tertindakannya pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota dan tersedianya makan minum Posko Damkar	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	-	3,00	155.950	3,00	133.634,00	3,00	142.980	3,00	78.474	12,00	511.038,00	100,00	0,00	0,00	12,00	511.038	0,00	0,00	SATPOL PP	APBD Kab			
1	5	1.05	2.01	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tertindakannya penanganan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota serta tersedianya Gaji Non PNS Petugas Pemadam Kebakaran dan Tersedianya Honor PPTK/Staf PPTK	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	-	3,00	723.330	3,00	721.710,00	3,00	720.900	3,00	720.900	12,00	2.886.840,00	100,00	0,00	0,00	12,00	2.886.840	0,00	0,00	SATPOL PP	APBD Kab			
1	5	00.0	2.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya Pengadaan Sarana dan prasarana pemadam kebakaran	buah	0,00	-	0,00	-	20,00	-	0,00	-	20,00	45.580,00	0,00	-	0,17	-	20,17	45.580,00	100,85	0,00	0,00	20,17	45.580	0,00	0,00	SATPOL PP	APBD Kab			
1	5	00.0	2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebakaran yang siap Pakai																													
1	5	00.0	2.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Tersedianya sarana dan prasarana Perawatan Kendaraan Dinas Operasional	unit	0,00	-	0,00	-	10,00	-	1,70	42.499	3,00	73.445,52	2,60	66.534	2,70	67.520	10,00	249.999,17	100,00	0,00	0,00	10,00	249.999	0,00	0,00	SATPOL PP	APBD Kab			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																			100,21	0,00	0,00			0,00	0,00									
Predikat Kinerja																			ST	SR	SR			SR	SR									
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN																			-	-	-	3.303.219,56	4.437.080,44	3.387.695,12	3.614.789,52	14.742.784,64	96,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Satpol PP
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 4)																			96,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 4)																			ST	SR	SR			SR	SR									
1	6	00.0	0.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Meningkatnya kelembagaan kesejahteraan sosial																													
6	00.0	0.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota. Layanan PUSKESOS dan Penguatan SLRT, tersedianya sarana dan prasarana pendukung, pelaksanaan KEMA BAKTI serta insentif bagi pekerja sosial (TKSK) yang tersedia																														
1	6	00.0	2.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Penguatan kelembagaan SLRT dan Bimtek Pendamping SLRT	bulan				12	-	3,00	45.700	3,00	55.980	3,00	43.750	3,00	137.480	12,00	282.910,00	100,00	0,00	0,00	12,00	282.910	0,00	0,00	Dinas Sosial	APBD Kab				
1	6	00.0	2.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya insentif bagi TKSK dan meningkatnya kemampuan potensi TKSK	orang	0,00	-	0,00	-	10,00	-	0,00	-	4,00	12.805	4,00	10.390	2,00	10.000	10,00	33.195,00	100,00	0,00	0,00	10,00	33.195	0,00	0,00	Dinas Sosial	APBD Kab			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.														
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	I		II		III		IV		K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)			K	Rp (000)												
									RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)													K	Rp (000)										
3	7 00.0 4 0.00	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Angka pengangguran terbuka																																					
	7 00.0 4 2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	terwujudnya pelayanan rehabilitasi ketenagakerjaan																																					
	7 00.0 4 2.01	4 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	tersenggarahnya unit layanan disabilitas ketenagakerjaan	kegiatan	0,00	-	0,00	-	1,00	-	0,00	-	0,33	2.950,00	0,00	-	0,63	2.668	0,96	5.618,00	95,90	0,00	0,00	0,96	5.618	0,00	0,00	DISNAKER	APBD Kab											
	7 00.0 4 2.03	2 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	terwujudnya informasi tentang pencari keraharjujudnya job fair/bursa kerja																																					
	7 00.0 4 2.03	2 Pelayan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	terlaksananya pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online	%	0,00	-	0,00	-	95,00	-	15,45	6.000,00	46,31	13.310,00	13,02	4.200	19,27	6.090	94,05	29.600,00	99,00	0,00	0,00	94,05	29.600	0,00	0,00	DISNAKER	APBD Kab											
	7 00.0 4 2.04	1 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	terwujudnya informasi tentang pencari keraharjujudnya job fair/bursa kerja																																					
	7 00.0 4 2.04	1 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Pekerja Migran Indonesia (PMI), Terbertuknya Satuan Tugas Penanggulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal, Terlaksananya laporan Online Sistem Kab. Bulukumba, Sosialisasi Penanggulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal	paket	0,00	-	0,00	-	1,00	-	0,10	3.000,00	0,11	2.000,00	0,46	1.500	0,34	3.448	1,00	9.948,00	100,00	0,00	0,00	1,00	9.948	0,00	0,00	DISNAKER	APBD Kab											
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	98,30	0,00	0,00			0,00	0,00																	
Predikat Kinerja																	ST	SR	SR			SR	SR																	
4	7 00.0 5 0.00	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Angka sengketa pengusaha- pekerja per tahun																																					
	7 00.0 5 2.01	1 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya pemahaman berbagai peraturan pelaksanaan ketenagakerjaan																																					
	7 00.0 5 2.01	1 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	terwujudnya sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan dan terwujudnya sosialisasi pengusaha	kegiatan				1	-	0,10	3.560	0,10	22.987	0,00	-	0,80	7.655	1,00	34.201,30	99,56	0,00	0,00	1,00	34.201	0,00	0,00	DISNAKER													
	7 00.0 5 2.02	1 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pendataan dan pembinaan terhadap pengusaha dan pekerja dan terlaksananya sosialisasi bipartit dan tripartit pada bidang hubungan industrial	%	0,00	-	0,00	-	100,00	-	0,00	-	0,00	-	87,79	1.906	0,99	-	88,78	1.905,75	88,78	0,00	0,00	88,78	1.906	0,00	0,00	DISNAKER	APBD Kab											
	7 00.0 5 2.02	1 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	tercegahnya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																																					
	7 00.0 5 2.02	3 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	terwujudnya sosialisasi pembentukan serikat pekerja di perusahaan dan terbentuknya tim verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha fedens dan konfederasi serikat pekrja	kegiatan				1	-	0,00	-	0,09	1.610,00	0,67	1.610,00	0,02	-	0,78	3.220,00	77,60	0,00	0,00	0,78	3.220	0,00	0,00	DISNAKER													
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	88,65	0,00	0,00			0,00	0,00																	
Predikat Kinerja																	T	SR	SR			SR	SR																	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN																						689.174,88		873.390,26			867.057,97		803.116,95		3.232.740,06									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 4)																	96,73	0,00	0,00				1,67	0,00																
PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 4)																	ST	SR	SR			SR	SR																	
1	2 08 0 0.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																																						
	2 08 2 0.00	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Jumlah Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan, Pelatihan Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan, serta Kelompok PK Remaja yang terbina dan terbentuk disekolah (SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi)																																					
	2 08 2 2.01	1 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kondisi perempuan dan laki-laki mempunyai akses dan kontrol terhadap sumber daya, mendapat manfaat dan terlibat dalam pengambilan keputusan yang sama dalam proses pembangunan serta terciptanya anggaran yang responsif gender melalui PPRG																																					
	2 08 2 2.01	4 Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Terlaksananya kegiatan sosialisasi PUG bagi perempuan dan pelatihan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender (PPRG)		0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DPPPA	APBD Kab												
	2 08 2 2.02	1 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terciptanya keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan																																					
	2 08 2 2.02	1 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan politik dan terlaksananya kegiatan Peningkatan Hari Ibu							0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DPPPA													
	2 08 2 2.02	2 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	pterlaksananya pembinaan organisasi Perempueneran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan politik dan terlaksananya kegiatan Peningkatan Hari Ibu	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	-	3,00	-	3,00	3,00	97.904	12,00	97.903,70	100,00	0,00	0,00	12,00	97.904	0,00	0,00	12,00	97.904	0,00	0,00	DPPPA	APBD Kab										
	2 08 2 2.03	1 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																																					
	2 08 2 2.03	3 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Media KIE Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan	kegiatan				2	-	0,00	-	0,00	-	0,93	23.071,75	0,76	19.195,00	1,69	42.266,75	84,55	0,00	0,00	1,69	42.267	0,00	0,00	DPPPA													
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	92,28	0,00	0,00			0,00	0,00																	
Predikat Kinerja																	ST	SR	SR			SR	SR																	
2	2 08 3 0.00	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Upaya Perlindungan Perempuan terhadap Kekerasan																																					
	2 08 3 2.02	1 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Upaya Perlindungan Perempuan terhadap Kekerasan pencatatan dan pelaporan kekerasan terhadap perempuan, serta pendampingannya																																					
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	kegiatan				1,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				DPPPA													
	2 08 3 2.02	1 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan terkait perlindungan perempuan, dan terlaksananya sosialisasi buta aksara di kalangan perempuan serta sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan	kegiatan	0,00	-	0,00	-	1,00	-	0,00	-	0,90	23.100	0,90	23.100,00	90,00	0,00	0,00	0,90	23.100	0,00	0,00	0,90	23.100	0,00	0,00	DPPPA	APBD Kab											

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.																					
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD		APBD		I		II		III		IV		K	Rp (000)	K			Rp (000)	K	Rp (000)																		
										Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)																										
1	2 08 3 0 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok PATBM yang terbentuk, dan jejaring lainnya	orang					25,00																																						
	2 08 3 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok PATBM yang terbentuk, dan jejaring lainnya																																												
	2 08 3 2.03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terbentuknya jejaring lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan	kegiatan	0,00	-	0,00	-	3,00	-	0,00	-	1,00	15,622,75	0,54	9,933	0,80	13,436	2,34	38,992,56	78,00	0,00	0,00	2,34	38,993	0,00	0,00	DPPPA	APBD Kab																		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																			56,00	0,00	0,00																										
Predikat Kinerja																			R	SR	SR																										
2	08 4 0.00	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Jumlah Regulasi terkait PUG dan Perindungan Anak dan Kelompok UPPKS yang terbentuk dan terbina di Tingkat Kecamatan																																												
2	08 4 2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan ibu, gender dan kekerasan dalam rumah tangga serta peningkatan ketahanan keluarga	kecamatan	0,00	-	0,00	-	5,00	-	0,26	5,294,50	0,74	2,700,00	1,00	31,691	2,58	51,949	4,58	91,634,09	91,64	0,00	0,00	4,58	91,634	0,00	0,00	DPPPA	APBD Kab																		
2	08 4 2.01	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya sosialisasi guna peningkatan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan ibu, gender dan kekerasan dalam rumah tangga	kegiatan																																											
2	08 4 2.01	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya sosialisasi guna peningkatan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan ibu, gender dan kekerasan dalam rumah tangga	kegiatan					1	-	0,03	2,700	0,07	3,900,00	0,1	3,900,00	0,72	81,498,10	0,92	91,998,10	92,30	0,00	0,00	0,92	91,998	0,00	0,00	DPPPA																			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																			91,97	0,00	0,00																										
Predikat Kinerja																			ST	SR	SR																										
2	08 5 0.00	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Terwujudnya pengelolaan sistem data gender dan anak																																												
2	08 5 2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terwujudnya sistem pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak																																												
2	08 5 2.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	terbentuknya sistem informasi gender dan anak	kegiatan	0,00	-	0,00	-	2,00	-	0,12	2,700,00	0,12	2,700,00	0,38	5,962	0,97	8,492	1,59	19,853,25	79,45	0,00	0,00	1,59	19,853	0,00	0,00	DPPPA	APBD Kab																		
2	08 5 2.01	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya profil gender dan anak	profil					2	-	0,00	-	0,17	2,100,00	0,28	1,800,00	0,62	5,550,00	1,07	9,450,00	53,70	0,00	0,00	1,07	9,450	0,00	0,00	DPPPA																			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																			66,58	0,00	0,00																										
Predikat Kinerja																			S	SR	SR																										
3	2 08 6 0.00	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase penambahan Jumlah Forum Anak yang terbentuk di Tingkat Kecamatan, dan Cakupan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam Unit Pelayanan terpadu P2T/P2A																																												
2	08 6 2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terwujudnya pemenuhan hak anak																																												
2	08 6 2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pencapaian Indikator Kabupaten Layak Anak	kegiatan	0,00	-	0,00	-		-	0,00	-	3,00					0,00	-	3,00		0,00	0,00	3,00	-	0,00	0,00	DPPPA	APBD Kab																		
2	08 6 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terwujudnya lembaga penyedia layanan guna peningkatan kualitas hidup anak dalam meningkatkan pengetahuan dan kreatifitasnya																																												
2	08 6 2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Operasional Forum Anak serta pelibatan anak dalam perencanaan Pembnagunan (Mustrenbang Anak)	kegiatan	0,00	-	0,00	-	4,00	-	2,43	60,700,00	0,37	2,700,00	0,20	5,000	0,50	11,670	3,50	80,070,00	87,50	0,00	0,00	3,50	80,070	0,00	0,00	DPPPA	APBD Kab																		
2	08 6 2.02	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	meningkatnya pengetahuan dan kreatifitas anak		0,00	-	0,00	-		-	0,00	-						0,00	-	0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DPPPA	APBD Kab																		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																			87,50	0,00	0,00																										
Predikat Kinerja																			T	SR	SR																										
4	2 08 7 0.00	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	"Pengumpulan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak serta Penyuluhan Penanggulangan Narkotika PMS terhadap HIV/AIDS																																												
2	08 7 2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya upaya perlindungan kepada anak yang memerlukan perlindungan khusus																																												
2	08 7 2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah korban kekerasan terhadap Anak yang mendapatkan penanganan	tahun	0,00	-	0,00	-	12,00	-	3,00	-	3,00	5,000,00	3,00	10,000	3,00	7,500	12,00	22,500,00	100,00	0,00	0,00	12,00	22,500	0,00	0,00	DPPPA	APBD Kab																		
2	08 7 0	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	tersedianya Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																																												
2	08 7 0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	anak					25,00	-		-						5,20	44,070	5,20	44,070,00	20,79	0,00	0,00				DPPPA																			
2	08 7 0	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	berkembangnya Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																																												
2	08 7 0	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	anak					25,00	-		-						23,23	24,400	23,23	24,400,00	92,90	0,00	0,00				DPPPA																			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021 (%)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		OPD Penanggung Jawab	Ket.									
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	I				II				III				K		K			Rp (000)	K	Rp (000)						
									RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=9+10+11+12	14=13/8*100	15=7+13	16=15/6*100	17	18																	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													71,23	0,00	0,00			0,00	0,00															
Predikat Kinerja													S	SR	SR			SR	SR															
5	2	06	1	0.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													"Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumberdaya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan"																
2	06	1	2.01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan, penyusunan program dan kegiatan																
2	06	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	terlaksananya perencanaan program kegiatan SKPD	dokumen	0,00	-	0,00	-	6,00	-	0,40	2.700,00	2,60	11.248,59	0,26	3.960	2,34	12.925	5,60	30.833,34	93,38	0,00	0,00	5,60	30.833	0,00	0,00	DPPPA	APBD Kab		
2	06	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan kinerja SKPD	laporan	0,00	-	0,00	-	2,00	-	0,00	1.499,74	0,00	-	0,00	-	2,00	1.499,74	100,00	0,00	0,00	2,00	1.500	0,00	0,00	DPPPA	APBD Kab				
2	06	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													Meningkatnya kinerja pegawai dan efektifitas Administrasi perkantoran, Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan																	
2	06	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	-	3,00	384.922,92	3,00	624.793,93	3,00	345.010	3,00	388.202	12,00	1.742.929,37	100,00	0,00	0,00	12,00	1.742.929	0,00	0,00	DPPPA	APBD Kab		
2	06	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran honor bagi pengelola administrasi keuangan dan jasa pihak ketiga (Operator Komputer)	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	-	3,00	13.580,00	3,00	20.860,00	3,00	10.390	3,00	27.741	12,00	72.570,96	100,00	0,00	0,00	12,00	72.571	0,00	0,00	DPPPA	APBD Kab		
2	06	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun	laporan				1,00	-	0,00	-	1,00	1.499,74	0,00	-	0,00	-	1,00	1.499,74	100,00	0,00	0,00	1,00	1.500	0,00	0,00	DPPPA	APBD Kab			
2	06	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													meningkatkan kinerja pegawai dan meningkatkan SDM Aparatur																	
2	06	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Latipim III								0,00	-				0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DPPPA				
2	06	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan								0,00	-				0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DPPPA	APBD Kab			
2	06	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah													Meningkatnya kinerja pegawai dan efektifitas Administrasi perkantoran																	
2	06	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor	bulan				12	-	-	3,00	-	3			3,00	1.462,18	12,00	1.462,18	100,00	0,00	0,00	12,00	1.462	0,00	0,00	DPPPA	APBD Kab			
2	06	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	unit	0,00	-	0,00	-	3,00	-	2,85	21.420,51	0,00	-	0,00	-	0,05	-	2,90	21.420,51	96,67	0,00	0,00	2,90	21.421	0,00	0,00	DPPPA	APBD Kab		
2	06	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	-	3,00	5.700,00	3,00	15.467,20	3,00	6.900	3,00	22.098	12,00	50.165,08	100,00	0,00	0,00	12,00	50.165	0,00	0,00	DPPPA	APBD Kab		
2	06	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya biaya Cetak dan Penggandaan kantor	bulan				12	-	-	3,00	-	3			3,00	1.705,00	12,00	1.705,00	100,00	0,00	0,00	12,00	1.705	0,00	0,00	DPPPA	APBD Kab			
2	06	1	2.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya Makan dan Minum untuk tamu dan rapat-rapat	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	-	3,00	-	3,00	-	3,00	900	3,00	3.262	12,00	4.161,70	100,00	0,00	0,00	12,00	4.162	0,00	0,00	DPPPA	APBD Kab		
2	06	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	-	3,00	6.776,25	3,00	26.098,88	3,00	3.540	3,00	6.457	12,00	42.860,13	100,00	0,00	0,00	12,00	42.860	0,00	0,00	DPPPA	APBD Kab		
2	06	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													Meningkatnya kinerja pegawai dan efektifitas Administrasi perkantoran																	
2	06	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Tersedianya mobilieur Kantor	%	0,00	-	0,00	-	100,00	-	0,00	-				0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DPPPA	APBD Kab			
2	06	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													Meningkatnya kinerja pegawai dan efektifitas Administrasi perkantoran																	
2	06	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kebutuhan komponen listrik dan penerangan bangunan kantor	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	-	3,00	4.378,50	3,00	3.422,00	3,00	3.329	3,00	3.378	12,00	14.507,50	100,00	0,00	0,00	12,00	14.508	0,00	0,00	DPPPA	APBD Kab		
2	06	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran honor Tenaga Kebersihan Kantor	bulan				12	-	-	3,00	3.000	3	3000	3,00	3.000	3,00	3.000	12,00	12.000,00	100,00	0,00	0,00	12,00	12.000	0,00	0,00	DPPPA	APBD Kab		
2	06	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													Meningkatnya kinerja pegawai dan efektifitas Administrasi perkantoran																	
2	06	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perpanjangan izin kendaraan (mobil jabatan dan mobil operasional, serta roda 2), terpeliharanya kendaraan dinas operasional	unit	0,00	-	12,00	-	6,00	-	0,00	-	0,00	-	1,46	3.640	3,54	6.121	5,00	9.761,39	83,33	0,00	0,00	17,00	9.761	0,00	0,00	DPPPA	APBD Kab		
2	06	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	bulan	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-				0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DPPPA	APBD Kab			
2	06	1	2.09	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terpeliharanya peralatan kantor yang layak pakai	bulan	0,00	-	12,00	-	12,00	-	3,00	-	3,00	-	3,00	2.840	12,00	2.840,00	100,00	0,00	0,00	24,00	2.840	0,00	0,00	24,00	2.840	0,00	0,00	DPPPA	APBD Kab
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													98,23	0,00	0,00											0,00	0,00							
Predikat Kinerja													ST	SR	SR											SR	SR							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN													-	-	-	513.872,674	742.600,821	472.027,177	867.954,396	2.596.455,068														
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 5)													80,54	0,00	0,00												0,00	0,00						
PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 5)													T	SR	SR												SR	SR						
1	2	09	0	0.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																													
2	09	2	0.00	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN													Meningkatnya Ketersediaan Sumber Daya Pangan dan Penanganan Pangan																	
2	09	2	2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota													Tersedianya Lumpung Pangan dan sarana pendukungnya																	
2	09	2	2.01	1	Penyediaan Infrastruktur Lumpung Pangan	Terbangunnya Lumpung Pangan Masyarakat	unit				1,00	-	-	0,01	1.200	0,02	2.302	0,51	235.056	0,46	288.516	1,00	527.074,00	100,00	0,00	0,00	1,00	527.074	0,00	0,00	DISHANPAN			
2	09	2	2.01	2	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Tersedianya Lantai jemur		0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DISHANPAN	APBD Kab			
2	09	2	2.01	3	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Tersedianya Rumah Rice Milling Unit dan Rumah RMU Lainnya		0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DISHANPAN	APBD Kab			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													100,00	0,00	0,00											0,00	0,00							
Predikat Kinerja													ST	SR	SR											SR	SR							
2	2	09	3	0.00	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT													% pningktn PDRB sktor pertanian umum ADHB, areal kmddi unggin pkbunn, rhibilitasi htan<hkan kritis, Pngmbngan kwsan rmtg pgnan lstar. Pmrosi pcpatn pgnan krgmgn<nsmsi pgnan, pmbinaan klp wnita tani, Lmba cipta menu tngkt kabupaten, prov.<nas., Ssialis																
2	09	3	2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan													Tersedianya informasi harga dan kelembagaan tani																	
2	09	3	2.01	1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Tersedianya Informasi Harga Pangan, Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan Neraca Bahan Makanan(NBM)	dokumen				2	-	-	0,29	1.500	0,31	800	0,4	600	1,00	6.700	2,00	9.600,00	100,00	0,00	0,00	2,00	9.600	0,00	0,00	DISHANPAN			

No	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.								
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD		APBD		I		II		III		IV		K	Rp (000)	K			Rp (000)	K	Rp (000)					
										Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)									Rp (000)	Rp (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=9+10+11+12		14=13/100		15=7+13		16=15/100		17	18													
Predikat Kinerja													ST	SR	SR			SR	SR															
2	12	3	0.00	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan penerbitan akta kematian, Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk serta Rasio bayi berakta Kelahiran																													
	2	12	3	2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Tersedianya Dokumen Pengumpulan data Kependudukan dan Pemamfaatan serta penyajian data base kependudukan dan Pelayanan Pencatatan Sipil serta Tertatanya Administrasi Kependudukan																												
	2	12	3	2.01	2 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Tertaksananya Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	-	3,00	-	31.280	3,00	45.212,00	3,00	31.556	3,00	54.464	12,00	162.512,00	100,00	0,00	0,00	12,00	162.512	0,00	0,00	DISDUKCAPIL	APBD Kab	
	2	12	3	2.01	3 Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Tertaksananya Pengumpulan, analisis dan diseminasi data pencatatan sipil	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DISDUKCAPIL	APBD Kab	
	2	12	3	2.01	5 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Tertaksananya Pengadaan blangko dokumen kependudukan selain blangko KTP-el, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	-	3,00	-	124.397,41	3,00	135.762	3,00	836.908	12,00	1.097.066,41	100,00	0,00	0,00	12,00	1.097.066	0,00	0,00	DISDUKCAPIL	APBD Kab			
	2	12	3	2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Terselenggaranya urusan administrasi kependudukan																												
	2	12	3	2.02	1 Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Tertaksananya Koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam	bulan					12	-	3,00	-	3,00	2.810,00	3,00	-	3	-	12,00	2.810,00	100,00	0,00	0,00	12,00	2.810	0,00	0,00	DISDUKCAPIL			
	2	12	3	2.02	3 Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pencatatan Sipil	Tertaksananya Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah di kabupaten/ kota dalam penerbitan pelayanan administrasi kependudukan	bulan	-	-	0,00	-	12,00	-	3,00	-	3,00	254,00	3,00	-	3,00	-	12,00	254,00	100,00	0,00	0,00	12,00	254	0,00	0,00	DISDUKCAPIL	APBD Kab		
	2	12	3	2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Tertaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan																												
	2	12	3	2.03	3 Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaksanaan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Tertaksananya Supervisi bersama dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dan pengadilan agama mengenai pelaksanaan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam dalam rangka pembangunan basis data kependudukan	bulan	-	-	0,00	-	12,00	-	3,00	-	3,00	2.240,00	3,00	-	3,00	-	12,00	2.240,00	100,00	0,00	0,00	12,00	2.240	0,00	0,00	DISDUKCAPIL	APBD Kab		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													100,00	0,00	0,00			0,00	0,00															
Predikat Kinerja													ST	SR	SR			SR	SR															
3	12	4	0.00	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah penduduk yang mengikuti sosialisasi kebijakan penduduk																													
	2	12	4	2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Tersedianya Dokumen Pengumpulan data Kependudukan dan Pemamfaatan serta penyajian data base kependudukan																												
	2	12	4	2.01	1 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Tertaksananya Pengolahan dan penyajian data kependudukan	bulan	-	-	0,00	-	12,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	12	4	2.01	2 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Tertaksananya Kerjasama pemanfaatan data kependudukan	bulan	-	-	0,00	-	12,00	-	3,00	-	3,00	682,00	3,00	-	3,00	-	12,00	682,00	100,00	0,00	0,00	12,00	682	0,00	0,00	DISDUKCAPIL	APBD Kab		
	2	12	4	2.01	3 Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Tertaksananya Inventarisasi data untuk kepentingan pembangunan daerah	bulan	-	-	0,00	-	12,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	12	4	2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tertatanya Administrasi Kependudukan																												
	2	12	4	2.02	1 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tertaksananya Penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian urusan administrasi kependudukan di kabupaten/ kota	bulan	-	-	0,00	-	12,00	-	3,00	-	3,00	1.610,00	3,00	-	3,00	99.282	12,00	100.892,00	100,00	0,00	0,00	12,00	100.892	0,00	0,00	DISDUKCAPIL	APBD Kab		
	2	12	4	2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terselenggaranya urusan administrasi kependudukan																												
	2	12	4	2.03	3 Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tertaksananya Fasilitas penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan	bulan	-	-	0,00	-	12,00	-	3,00	-	3,00	290,00	3,00	-	3,00	-	12,00	290,00	100,00	0,00	0,00	12,00	290	0,00	0,00	DISDUKCAPIL	APBD Kab		
	2	12	4	2.03	4 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Tertaksananya Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	bulan	-	-	0,00	-	12,00	-	3,00	-	3,00	3,00	3,00	1.155	12,00	1.155,00	100,00	0,00	0,00	12,00	1.155	0,00	0,00	DISDUKCAPIL	APBD Kab				
	2	12	4	2.03	5 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tertaksananya Sosialisasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan	bulan	-	-	0,00	-	12,00	-	3,00	-	1.460,00	3,00	14.485,00	3,00	37.138	3,00	54.722	12,00	107.805,42	100,00	0,00	0,00	12,00	107.805	0,00	0,00	DISDUKCAPIL	APBD Kab	
	2	12	4	2.03	6 Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi	Tertaksananya Kerjasama dengan organisasi masyarakat dan perguruan tinggi	bulan	-	-	0,00	-	12,00	-	3,00	-	3,00	3,00	3,00	226	3,00	-	12,00	226,20	100,00	0,00	0,00	12,00	226	0,00	0,00	DISDUKCAPIL	APBD Kab		
	2	12	4	2.03	7 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Tertaksananya Komunikasi, Informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan Masyarakat	bulan	-	-	0,00	-	12,00	-	3,00	-	3,00	1.716,00	3,00	-	3,00	-	12,00	1.716,00	100,00	0,00	0,00	12,00	1.716	0,00	0,00	DISDUKCAPIL	APBD Kab		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													100,00	0,00	0,00			0,00	0,00															
Predikat Kinerja													ST	SR	SR			SR	SR															
4	2	12	5	0.00	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Jumlah buku argerat kependudukan yang diterbitkan per tahun																												
	2	12	5	2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Tersusunnya Profil Kependudukan																												
	2	12	5	2.01	1 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Tertaksananya Penyediaan data kependudukan kabupaten/kota	bulan					12	-	3,00	-	3,00	-	-	3	-	3	4999,8	12,00	4.999,80	100,00	0,00	0,00	12,00	5.000	0,00	0,00	DISDUKCAPIL		
	2	12	5	2.01	2 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Tertaksananya Penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	-	3,00	-	3,00	-	-	3,00	-	3,00	5.000	12,00	4.999,80	100,00	0,00	0,00	12,00	5.000	0,00	0,00	DISDUKCAPIL	APBD Kab	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													100,00	0,00	0,00			0,00	0,00															
Predikat Kinerja													ST	SR	SR			SR	SR															

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.		
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD		I		II		III		IV		K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)			K	Rp (000)
										Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)										
1	2	16	0	0.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																								
1	2	16	2	0.00	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK																								
2	16	2	2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																									
2	16	2	2.01	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik																									
2	16	2	2.01	2	Terkelolanya informasi dan komunikasi publik pemerintah Daerah,																								
2	16	2	2.01	3	Tersedianya informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah																								
2	16	2	2.01	5	Terkelolanya informasi publik melalui Radio SPL FM																								
2	16	2	2.01	6	Tersedianya forum konsultasi publik dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Penguatan PPIID																								
2	16	2	2.01	7	Layanan Hubungan Media																								
2	16	2	2.01	1	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik																								
2	16	2	2.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah																								
													Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		95.83	0.00	0.00			0.00	0.00								
													Predikat Kinerja		ST	SR	SR			SR	SR								
2	2	16	3	0.00	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA																								
2	2	16	3	2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																								
2	2	16	3	2.01	2	Penetakaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																							
2	2	16	3	2.01	3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah																							
2	2	16	3	2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																								
2	2	16	3	2.02	1	Penetakaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																							
2	2	16	3	2.02	3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah																							
													Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100.00	0.00	0.00			0.00	0.00								
													Predikat Kinerja		ST	SR	SR			SR	SR								
3	2	16	1	0.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																								
2	2	16	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																								
2	2	16	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																							
2	2	16	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																								
2	2	16	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																							
2	2	16	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																							
2	2	16	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																							
2	2	16	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																							
2	2	16	1	2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah																								
2	2	16	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																							
2	2	16	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																								
2	2	16	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																							
2	2	16	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																							
2	2	16	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																							
2	2	16	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																							
2	2	16	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.																						
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	RKPD		APBD		I		II		III		IV		K	Rp (000)	K	Rp (000)			K	Rp (000)	K	Rp (000)																		
									K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)																												
1	2	18	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Ikut sertanya Aparat DPMPPTSP dalam, Latpim, Bimtek, Sosialisasi dan Seminar																																										
2	18	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Ikut sertanya Aparat DPMPPTSP dalam, Latpim, Bimtek, Sosialisasi dan Seminar			2,00	-	-	0,00	-	1,5	1.180,00	0,00	-	0,48	-	1,98	1.180,00	99,00	0,00	0,00	1,98	1.180	0,00	0,00	DPMPPTSP																			
2	18	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kantor																																										
2	18	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			12,00	-	-	3,00	11.914	3,00	5.186	3,00	1.240	3,00	15.376	12,00	33.715,68	100,00	0,00	0,00	12,00	33.716	0,00	0,00	DPMPPTSP																			
2	18	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan			12,00	-	-	3,00	3.999,71	3,00	3.999,71	3,00	868	9,00	4.867,50	75,00	0,00	0,00	9,00	4.868	0,00	0,00	DPMPPTSP	APBD Kab																				
2	18	1	2.06	8	Facilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman			12,00	-	-	3,00	1.500,00	3,00	1.022,00	3,00	2.554	3,00	2.127	12,00	7.203,00	100,00	0,00	0,00	12,00	7.203	0,00	0,00	DPMPPTSP	APBD Kab																		
2	18	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah			12,00	-	-	3,00	13.085,00	3,00	12.715,00	3,00	20.750	3,00	24.075	12,00	70.625,00	100,00	0,00	0,00	12,00	70.625	0,00	0,00	DPMPPTSP	APBD Kab																		
2	18	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kantor																																										
2	18	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Tersedianya pengadaan Mebeleur DPMPPTSP			2	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DPMPPTSP																				
2	18	1	2.07	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya pengadaan peralatan DPMPPTSP			7,00	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	7,00	48.793	7,00	48.793,44	100,00	0,00	0,00	7,00	48.793	0,00	0,00	DPMPPTSP	APBD Kab																		
2	18	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kantor																																										
2	18	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhi nya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik			12,00	-	-	3,00	15.275,21	3,00	15.667,90	3,00	14.895	3,00	28.750	12,00	74.587,30	100,00	0,00	0,00	12,00	74.587	0,00	0,00	DPMPPTSP	APBD Kab																		
2	18	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa tenaga pembersih ruang dan halaman kantor			5,00	-	-	2,50	15.855,00	0,50	15.710,00	1,30	14.906	0,60	14.669	4,90	61.140,00	98,00	0,00	0,00	4,90	61.140	0,00	0,00	DPMPPTSP	APBD Kab																		
2	18	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kantor																																										
2	18	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional.Terpenuhi nya jasa administrasi STNK mobil dan motor			8,00	-	0,00	-	8,00	750,72	3,02	5.178,75	0,76	1.883	3,99	10.220	7,99	18.031,71	99,88	0,00	0,00	7,99	18.032	0,00	0,00	DPMPPTSP	APBD Kab																	
2	18	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya pemeliharaan gedung kantor			1,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DPMPPTSP	APBD Kab																			
2	18	1	2.09	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja DPMPPTSP			10,00	-	0,00	-	0,00	-	6,00	1.775,00	1,00	-	3,00	1.065	10,00	2.840,00	100,00	0,00	0,00	10,00	2.840	0,00	0,00	DPMPPTSP	APBD Kab																	
2	18	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya			8,00	-	0,00	-	0,00	-	3,24	1.220,00	0,76	-	4,00	1.220	8,00	2.440,00	100,00	0,00	0,00	8,00	2.440	0,00	0,00	DPMPPTSP	APBD Kab																	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		62,39	0,00	0,00																												
Predikat Kinerja																		R	SR	SR																												
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN																		-	-	-																												
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 6)																		91,92	0,00	0,00																												
PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 6)																		ST	SR	SR																												
1	2	19	0	0.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Jumlah Organisasi Olahraga dan sarana dan prasarana olahraga dan kepemudaan																																										
2	19	2	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Lancarnya pelaksanaan paskibraka.Meningkatnya prestasi pemuda																																										
2	19	2	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Terlaksananya pembinaan pemuda pelopor			0,00	-	0,00	-	30,00	-	0,00	-	0,00	-	30,00	17.520	30,00	17.520,00	100,00	0,00	0,00	30,00	17.520	0,00	0,00	DISPORA	APBD Kab																	
2	19	2	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Terlaksananya PIRN dan KIR			0,00	-	0,00	-	3,00	-	0,05	1.800,00	0,14	5.400,00	0,51	3.600	2,30	33.003	3,00	43.803,00	100,00	0,00	0,00	3,00	43.803	0,00	0,00	DISPORA	APBD Kab															
2	19	2	2.01	8	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Meningkatnya kapasitas organisasi kepemudaan			0,00	-	0,00	-	4,00	-	0,00	-	0,00	-	3,64	125.000	3,64	125.000,00	90,91	0,00	0,00	3,64	125.000	0,00	0,00	DISPORA	APBD Kab																	
2	19	2	2.01	9	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Terlaksananya pelatihan PASKIBRA			0,00	-	0,00	-	1,00	-	0,00	1.800,00	0,01	5.715,00	0,95	392.223	0,02	47.800	0,99	447.537,56	99,38	0,00	0,00	0,99	447.538	0,00	0,00	DISPORA	APBD Kab															
2	19	2	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya prestasi pemuda																																										
2	19	2	2.02	2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Terlaksananya jambore pemuda			0,00	-	0,00	-	3,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DISPORA	APBD Kab																		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		97,57	0,00	0,00																												
Predikat Kinerja																		ST	SR	SR																												
2	2	19	3	0.00	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAN	Jumlah Organisasi Olahraga, Jumlah sarana dan prasarana olahraga dan kepemudaan																																										
2	2	19	3	2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana olahraga																																										
2	2	19	3	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembangunan/Rehab Sarana dan prasarana olahraga			0,00	-	0,00	-	7,00	-	0,00	-	3,39	351.789,20	1,80	508.949	1,54	743.425	6,73	1.604.163,29	96,19	0,00	0,00	6,73	1.604.163	0,00	0,00	DISPORA	APBD Kab														
2	2	19	3	2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya prestasi olahraga																																										
2	2	19	3	2.02	1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya lomba lari 10K dan kejuaraan piala menpora			0,00	-	0,00	-	1,00	-	0,04	1.800,00	0,10	5.100,00	0,13	2.700	0,73	24.815	1,00	34.415,10	100,00	0,00	0,00	1,00	34.415	0,00	0,00	DISPORA	APBD Kab														
2	2	19	3	2.02	2	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Meningkatnya prestasi olahraga			0,00	-	0,00	-	24,00	-	0,00	-	12,73	350.000,00	0,00	-	11,27	310.000	24,00	660.000,00	100,00	0,00	0,00	24,00	660.000	0,00	0,00	DISPORA	APBD Kab														
2	2	19	3	2.02	3	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Terlaksananya partisipasi dan keikutsertaan atlet dalam kejuaraan			0,00	-	0,00	-	16,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DISPORA	APBD Kab																
2	2	19	3	2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya prestasi atlet usia dini																																										
2	2	19	3	2.03	1	Seleksi Atlet Daerah	Terlaksananya Kejurda			0,00	-	0,00	-	18,00	-	0,46	1.800,00	1,31	5.100,00	11,01	2.700	4,64	9.110	17,42	18.710,00	96,77	0,00	0,00	17,42	18.710	0,00	0,00	DISPORA	APBD Kab														
2	2	19	3	2.03	3	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan klub olahraga			0,00	-	0,00	-	2,00	-	0,00	-	0,62	15.456,00	0,00	-	1,20	29.881	1,83	45.337,00	91,25	0,00	0,00	1,83	45.337	0,00	0,00	DISPORA	APBD Kab														
2	2	19	3	2.03	4	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemberian penghargaan bagi pelatih dan atlet berprestasi			0,00	-	0,00	-	11,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DISPORA	APBD Kab																	
2	2	19	3	2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Tersedianya pelatih berlisensi			</																																							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.								
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	I		II		III		IV		K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K			Rp (000)							
									K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)													K	Rp (000)					
1	2	19	4	2.01	2	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Meningkatnya kegiatan kepramukaan di setiap Kecamatan	regu	0,00	-	0,00	-	1,00	-	0,00	-	0,00	-	0,75	75.000	0,25	25.000	1,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	1,00	100.000	0,00	0,00	DISPORA	APBD Kab		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																									100,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Predikat Kinerja																									ST	SR	SR	SR	SR						
4	2	19	1	0.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	"Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumberdaya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan"																													
2	19	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lancarnya administrasi keuangan dan Terlaksananya kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja dispora																														
2	19	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya rencana, renstra, rkt, ra, perjanjian kinerja, fakta integritas, koordinasi dan konsultasi perencanaan dan ketersediaan data kepemudaan dan keolahragaan	dokumen	0,00	-	0,00	-	10,00	-	1,14	7.351,00	4,02	25.847,00	2,10	11.340	2,48	8.615	9,74	53.152,95	97,43	0,00	0,00	9,74	53.153	0,00	0,00	DISPORA	APBD Kab			
2	19	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya RKA Pokok dan RKA Perubahan	dokumen	0,00	-	0,00	-	3,00	-	0,00	-	0,35	1.200,00	0,50	1.692	2,15	7.310	3,00	10.201,50	99,93	0,00	0,00	3,00	10.202	0,00	0,00	DISPORA	APBD Kab			
2	19	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya DKA Pokok dan DKA Perubahan	dokumen	0,00	-	0,00	-	3,00	-	0,00	-	0,43	1.199,00	0,00	-	2,52	3.874	2,95	5.072,50	98,30	0,00	0,00	2,95	5.073	0,00	0,00	DISPORA	APBD Kab			
2	19	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya LAKIP	dokumen	0,00	-	0,00	-	1,00	-	0,00	-	0,52	2.900,00	0,00	-	0,48	240	1,00	3.140,00	100,00	0,00	0,00	1,00	3.140	0,00	0,00	DISPORA	APBD Kab			
2	19	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya monitoring dan evaluasi program dan kegiatan dispora	dokumen	0,00	-	0,00	-	20,00	-	0,00	-	2,46	2.691,50	0,34	375	17,03	16.704	19,84	19.770,00	99,18	0,00	0,00	19,84	19.770	0,00	0,00	DISPORA	APBD Kab			
2	19	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Lancarnya administrasi keuangan dan umum kantor																														
2	19	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Lancarnya pembayaran gaji dan TPP ASN	%	0,00	-	0,00	-	100,00	-	50,00	576.485,60	10,00	1.274.161,44	11,66	436.554	26,04	663.971	97,70	2.951.172,02	97,70	0,00	0,00	97,70	2.951.172	0,00	0,00	DISPORA	APBD Kab			
2	19	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Lancarnya pelaksanaan administrasi tugas ASN	%	0,00	-	0,00	-	100,00	-	5,57	1.600,00	44,43	10.978,00	7,26	3.860	40,80	8.381	98,06	24.819,00	98,06	0,00	0,00	98,06	24.819	0,00	0,00	DISPORA	APBD Kab			
2	19	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Lancarnya administrasi keuangan	%	0,00	-	0,00	-	100,00	-	5,57	12.875,00	41,58	24.145,00	24,60	19.313	25,80	20.257	97,55	76.589,00	97,55	0,00	0,00	97,55	76.589	0,00	0,00	DISPORA	APBD Kab			
2	19	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersusunnya SPJ GU, TU dan LS	%	0,00	-	0,00	-	100,00	-	5,57	-	39,42	3.630,00	42,66	3.442	12,22	987	99,87	8.058,70	99,87	0,00	0,00	99,87	8.059	0,00	0,00	DISPORA	APBD Kab			
2	19	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan keuangan akhir tahun	dokumen	0,00	-	0,00	-	2,00	-	2,00	4.982	0,00	-	0,00	-	-0,01	-	1,99	4.982,00	99,65	0,00	0,00	1,99	4.982	0,00	0,00	DISPORA	APBD Kab			
2	19	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Lancarnya administrasi umum kantor																														
2	19	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan gedung	paket	0,00	-	0,00	-	1,00	-	0,00	-	0,45	1.000,00	0,25	553	0,29	648	1,00	2.201,00	100,00	0,00	0,00	1,00	2.201	0,00	0,00	DISPORA	APBD Kab			
2	19	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	paket	0,00	-	0,00	-	1,00	-	0,39	1.247,25	0,23	725,00	0,00	-	0,19	611	0,81	2.582,75	80,52	0,00	0,00	0,81	2.583	0,00	0,00	DISPORA	APBD Kab			
2	19	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	paket	0,00	-	0,00	-	1,00	-	0,20	5.312	0,16	4.380	0,24	4.896	0,40	9.610	1,00	24.197,47	99,96	0,00	0,00	1,00	24.197	0,00	0,00	DISPORA	APBD Kab			
2	19	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya cetak dan penggandaan	Paket	0,00	-	0,00	-	1,00	-	0,19	1.089,00	0,31	1.749,00	0,20	1.125	0,29	2.947	0,99	6.909,90	98,54	0,00	0,00	0,99	6.910	0,00	0,00	DISPORA	APBD Kab			
2	19	1	2.06	8	Facilities Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman	kali	0,00	-	0,00	-	5,00	-	0,21	418,00	1,07	2.100,00	1,17	2.308	0,93	3.812	3,38	8.638,00	67,51	0,00	0,00	3,38	8.638	0,00	0,00	DISPORA	APBD Kab			
2	19	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	OK	0,00	-	0,00	-	16,00	-	0,60	4.575,00	1,60	12.251,00	9,81	14.312	3,99	29.549	15,99	60.687,09	99,94	0,00	0,00	15,99	60.687	0,00	0,00	DISPORA	APBD Kab			
2	19	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																															
2	19	1	2.07	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	unit	0,00	-	0,00	-	5,00	-	0,00	-	0,00	-	0,58	4.300	0,19	-	0,77	4.300,00	15,38	0,00	0,00	0,77	4.300	0,00	0,00	DISPORA	APBD Kab			
2	19	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																														
2	19	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	buah	0,00	-	0,00	-	250,00	-	63,63	420,00	90,93	600,00	45,45	300	50,00	330	250,00	1.650,00	100,00	0,00	0,00	250,00	1.650	0,00	0,00	DISPORA	APBD Kab			
2	19	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	%	0,00	-	0,00	-	100,00	-	19,39	9.234,65	20,61	9.424,72	35,00	8.570	1,42	9.172	76,42	36.401,36	76,42	0,00	0,00	76,42	36.401	0,00	0,00	DISPORA	APBD Kab			
2	19	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	%	0,00	-	0,00	-	100,00	-	13,84	9.800,00	36,16	22.400,00	25,00	15.600	24,69	15.600	99,69	63.400,00	99,69	0,00	0,00	99,69	63.400	0,00	0,00	DISPORA	APBD Kab			
2	19	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																														
2	19	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pentninan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pembayaran pajak dan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	unit	0,00	-	0,00	-	7	-	0,36	1.055	2,13	6.301	0,00	-	1,43	4.240	3,91	11.595,48	55,88	0,00	0,00	3,91	11.595	0,00	0,00	DISPORA	APBD Kab			
2	19	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	unit	0,00	-	0,00	-	10,00	-	0,00	-	3,34	1.410,00	0,00	-	4,58	3.025	7,92	4.435,00	79,20	0,00	0,00	7,92	4.435	0,00	0,00	DISPORA	APBD Kab			
2	19	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya rehab berat gedung kantor	paket	0,00	-	0,00	-	1,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DISPORA	APBD Kab			
2	19	1	2.09	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	unit	0,00	-	0,00	-	10,00	-	0,00	-	0,00	-	3,24	1.975	5,70	3.475	8,93	5.450,00	89,34	0,00	0,00	8,93	5.450	0,00	0,00	DISPORA	APBD Kab			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																									85,42	0,00	0,00	0,00	0,00						
Predikat Kinerja																									T	SR	SR	SR	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN					-	-	649.644,46	2.159.452,26	1.534.665,74	2.219.839,22	6.563.601,68																								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 4)																									92,12	0,00	0,00	0,00	0,00						
PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 4)																									ST	SR	SR	SR	SR						
1	2	20	0	0.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																														
2	20	2	2.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tersedianya Data Statistik Sektoral dengan Terlaksananya Pengumpulan Data dan Statistik Daerah																														
2	20	2	2.01	1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terkumpulnya Data Statistik Sektoral dan Daerah																													
2	20	2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral. Terlaksananya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	-	3,00	-	3,00	600,00	3,00	2.965	3,00	1.295	12,00	4.860,00	100,00	0,00	0,00	12,00	4.860	0,00	0,00	DISKOMINFO	APBD Kab			
2	20	2	2.01	2	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Meningkatnya Kapasitas SDM Pemda Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi. Terkumpulnya data Statistik Sektoral. Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur. Terselenggaranya Operasi Statistik sektoral Di Daerah. Terkumpulnya data Statistik Sekt	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	-	3,00	-	3,00	3,00	3,00	7.500</																

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)				Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)				Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
					K		Rp (000)		K		Rp (000)		K		Rp (000)		K		Rp (000)		K		Rp (000)		K		Rp (000)		K	Rp (000)	K	Rp (000)		
					RKPD	APBD	I	II	III	IV	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)		
1	2	21	2	0.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				Meningkatnya terbit Administrasi persandian												13=9+10+11+12				14=13/8*100				15=7+13		16=15/6*100		17	18
2	21	2	2.01	1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				Terselenggaranya Persandian untuk pengamanan Informasi Daerah Kabupaten/Kota																									
2	21	2	2.01	1	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	-	3,00	-	3,00	-	3,00	2.500	3,00	2.500	12,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	12,00	5.000	0,00	0,00			DISKOMINFO	APBD Kab		
2	21	2	2.01	3	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	-	3,00	-	3,00	-	3,00	750	3,00	300	12,00	1.050,00	100,00	0,00	0,00	12,00	1.050	0,00	0,00			DISKOMINFO	APBD Kab		
2	21	2	2.02	1	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	-	3,00	-	3,00	-	3,00	-	3,00	2.500	12,00	2.500,00	100,00	0,00	0,00	12,00	2.500	0,00	0,00			DISKOMINFO	APBD Kab		
													Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				100,00	0,00	0,00			0,00	0,00											
													Predikat Kinerja				ST	SR	SR			SR	SR											
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN													-	-	-	-	-	-	-	3.250,00	5.300,00	8.550,000												
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 11)													100,00	0,00	0,00			0,00	0,00															
PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 11)													ST	SR	SR			SR	SR															
1	22	2	0.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya																										
2	22	2	2.01	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				Tercapainya Pelestarian Kesenian Tradisional dalam Daerah Kabupaten/Kota																										
2	22	2	2.01	2	kegiatan	1,00	-	0,00	-	1,00	-	0,02	3.500	0,48	5.250,00	0,29	5.000	0,21	3.750	1,00	17.500,00	100,00	0,00	0,00	1,00	17.500	100,00	0,00			Dinas Dikbud	APBD Kab		
2	22	2	2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				Berkembangnya Budaya Adat																										
2	22	2	2.02	1	kegiatan	0,00	-	0,00	-	1,00	-	0,16	16.900	0,64	22.195,70	0,10	5.000	0,10	3.750	1,00	47.845,70	100,00	0,00	0,00	1,00	47.846	0,00	0,00			Dinas Dikbud	APBD Kab		
													Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				100,00	0,00	0,00			33,33	0,00											
													Predikat Kinerja				ST	SR	SR			SR	SR											
2	22	5	0.00	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				Jumlah Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten																										
2	22	5	2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				Persentase Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten																										
2	22	5	2.01	2	%	100,00	-	0,00	-	100,00	-	1,65	1.500,00	30,95	2.250,00	25,83	2.974	-13,43	109.718	45,00	116.442,00	45,00	0,00	0,00	45,00	116.442	45,00	0,00			Dinas Dikbud	APBD Kab		
													Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				45,00	0,00	0,00			0,00	0,00											
													Predikat Kinerja				SR	SR	SR			SR	SR											
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN													-	-	-	-	21.900,000	29.695,700	12.974,000	117.218,000	181.787,700													
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 2)													72,50	0,00	0,00			0,00	0,00															
PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 2)													S	SR	SR			SR	SR															
1	23	2	0.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				Jumlah koleksi judul perpustakaan umum daerah, perpustakaan milik pemerintah pada satuan pendidikan SD/MI Negeri, perpustakaan Desa/Kel., Jmlh perpustakaan yg dibina (Perpustakaan SD/MI, SMP/MTs Perpustakaan Desa/Kel., Kecamatan, perpustakaan khusus. Jumlah bangunan perpustakaan)																										
2	23	2	2.01	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				Terselenggaranya Penyelenggaraan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																										
2	23	2	2.01	1	paket	0,00	-	0,00	-	1,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			DISPUSIP	APBD Kab		
2	23	2	2.01	2	paket	0,00	-	0,00	-	1,00	-	0,00	-	0,20	1.500,00	0,30	1.000	0,41	7.866	0,91	10.365,50	91,20	0,00	0,00	0,91	10.366	0,00	0,00			DISPUSIP	APBD Kab		
2	23	2	2.01	3	paket	0,00	-	0,00	-	1,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			DISPUSIP	APBD Kab		
2	23	2	2.01	4	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	-	3,00	-	3,00	120,00	3,00	531	3,00	1.506	12,00	2.157,00	100,00	0,00	0,00	12,00	2.157	0,00	0,00			DISPUSIP	APBD Kab		
2	23	2	2.01	5	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			DISPUSIP	APBD Kab		
2	23	2	2.01	6	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	-	3,00	4.800,00	3,00	8.074,00	3,00	4.800	3,00	13.440	12,00	31.114,40	100,00	0,00	0,00	12,00	31.114	0,00	0,00			DISPUSIP	APBD Kab		
2	23	2	2.01	7	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	-	3,00	-	3,00	720,00	3,00	120	3,00	1.645	12,00	2.485,00	100,00	0,00	0,00	12,00	2.485	0,00	0,00			DISPUSIP	APBD Kab		
2	23	2	2.01	8	paket	0,00	-	0,00	-	1,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			DISPUSIP	APBD Kab		
2	23	2	2.01	9	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			DISPUSIP	APBD Kab		
2	23	2	2.01	1	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	-	3,00	-	3,00	-	3,00	1.293	3,00	688	12,00	1.981,00	100,00	0,00	0,00	12,00	1.981	0,00	0,00			DISPUSIP	APBD Kab		
2	23	2	2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				Terwujudnya Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																										

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.																						
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD		APBD		I		II		III		IV		K	Rp (000)	K			Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)																	
										Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)											K	Rp (000)															
1	3	26	5	2.01	1	0,00	-	0,00	-	7,00	-	0,00	-	0,00	-	0,05	3.070	6,95	405.842	7,00	408.912,28	100,00	0,00	0,00	7,00	408.912	0,00	0,00	Dinas Pariwisata	APBD Kab																		
					kegiatan	0,00	-	0,00	-	3,00	-	-	-	0,00	-	0,12	7.535,30	1,88	129.872	1,00	283.449	3,00	420.856,64	100,00	0,00	0,00	3,00	420.857	0,00	0,00	Dinas Pariwisata	APBD Kab																
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																					100,00	0,00	0,00	Predikat Kinerja		ST	SR	SR	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00	0,00	0,00	Predikat Kinerja		SR	SR	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00	0,00	0,00	Predikat Kinerja		SR	SR		
4	3	26	1	0.00	###	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya dokumen perencanaan, dokumen evaluasi pelaporan, serta dokumen pendukung lainnya																																						
					1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	0,00	-	0,00	-	18,00	-	2,64	14.502,00	6,36	9.472,65	0,90	4.349	0,81	16.313	10,71	44.636,45	59,52	0,00	0,00	10,71	44.636	0,00	0,00	Dinas Pariwisata	APBD Kab																
					2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN, tersusunnya dokumen LK dan perjanjian kinerja																																									
					1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	-	3,00	624.824,03	3,00	1.033.468,82	3,00	626.061	3,00	681.483	12,00	2.965.837,26	100,00	0,00	0,00	12,00	2.965.837	0,00	0,00	Dinas Pariwisata	APBD Kab																
					3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	-	3,00	16.686,00	3,00	23.654,00	3,00	32.871	3,00	26.660	12,00	99.871,00	100,00	0,00	0,00	12,00	99.871	0,00	0,00	Dinas Pariwisata	APBD Kab																
					1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	-	3,00	-	3,00	17.300,50	3,00	6.905	3,00	6.406	12,00	30.611,00	100,00	0,00	0,00	12,00	30.611	0,00	0,00	Dinas Pariwisata	APBD Kab																
					9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	orang	0,00	-	0,00	-	4,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pariwisata	APBD Kab																
					4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	-	3,00	18.086,20	3,00	25.989,00	3,00	35.886	3,00	70.525	12,00	150.486,22	100,00	0,00	0,00	12,00	150.486	0,00	0,00	Dinas Pariwisata	APBD Kab																
					9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kali	0,00	-	0,00	-	74,00	-	18,86	55.858,38	18,86	37.649,53	12,00	48.004	19,28	59.000	68,29	200.512,10	92,28	0,00	0,00	68,29	200.512	0,00	0,00	Dinas Pariwisata	APBD Kab																
					2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit	0,00	-	0,00	-	1,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pariwisata	APBD Kab																	
					2	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	unit	0,00	-	0,00	-	11,00	-	0,00	-	-	-	10,23	43.931	10,23	43.930,82	93,03	0,00	0,00	10,23	43.931	0,00	0,00	Dinas Pariwisata	APBD Kab																		
					2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	rekening	0,00	-	0,00	-	9,00	-	1,22	22.975,66	3,28	24.026,93	2,25	25.070	-0,11	28.915	6,64	100.987,65	73,81	0,00	0,00	6,64	100.988	0,00	0,00	Dinas Pariwisata	APBD Kab																
					4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	orang	0,00	-	0,00	-	35,00	-	2,45	25.416,00	15,05	75.436,00	8,75	110.955	4,29	111.413	30,54	323.220,00	87,27	0,00	0,00	30,54	323.220	0,00	0,00	Dinas Pariwisata	APBD Kab																
					1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	unit	0,00	-	0,00	-	9,00	-	0,00	-	2,25	8.541,97	2,75	7.222	2,65	15.758	7,65	31.522,21	85,00	0,00	0,00	7,65	31.522	0,00	0,00	Dinas Pariwisata	APBD Kab																
					9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	paket	0,00	-	0,00	-	1,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pariwisata	APBD Kab																	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																					80,99	0,00	0,00	Predikat Kinerja		T	SR	SR	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		80,99	0,00	0,00	Predikat Kinerja		SR	SR	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		80,99	0,00	0,00	Predikat Kinerja		SR	SR		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN						-	-	838.991,51		1.733.883,70		2.225.123,56		4.267.836,11		9.065.834,87																																
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 4)																					86,87	0,00	0,00	PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 4)		T	SR	SR	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 4)		86,87	0,00	0,00	PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 4)		SR	SR	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 4)		86,87	0,00	0,00	PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 4)		SR	SR		
1	3	27	0	0.00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tlksnnya pnyssn renja, renstra DTPHP Kab.BLK(2 dok), Tpnhnya dt lhn kmdti tnmn pngn, hort dan pkbnan (Skec), Tpnhnya infor hrg psr dt tglkt ptni&pngceer(10kec), Trsdnya AR, AS, & AT TPHP(4 lap), Tsdnya dt statis TPHP (10kec), Tsdnya sknnsasi d&ksmanan ps																																						
					1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Renja, Renstra, RKA, dan DPA OPD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bulukumba																																									
					1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	-	3,00	1.975,00	3,00	1.405,00	3,00	1.076	3,00	2.737	12,00	7.192,40	100,00	0,00	0,00	12,00	7.192	0,00	0,00	DISNAK KESWAN	APBD Kab																
					1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	0,00	-	0,00	-	1,00	-	0,06	1.260,00	0,44	6.000,00	0,25	2.400	3,00	3.200	3,75	12.860,00	375,00	0,00	0,00	3,75	12.860	0,00	0,00	DTPHP	APBD Kab																
					2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen				1,00			1,00	3334,98	0,00	-	0,00	-	0	1,00	3.334,98	100,00	0,00	0,00	1,00	3.335	0,00	0,00	DTPHP	APBD Kab																	
					3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen				1,00			0,00	-	0,00	-	-	3,335	0,00	3.334,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.335	0,00	0,00	DTPHP	APBD Kab																	
					4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	dokumen				1,00			1,00	1.909,82	0,00	-	0,00	-	1,00	1.909,82	100,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1.910	0,00	0,00	DTPHP	APBD Kab																	
					5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	dokumen				1,00			0,00	-	0,00	-	-	1,00	1.910	1,00	1.910,15	100,00	0,00	0,00	1,00	1.910	0,00	0,00	DTPHP	APBD Kab																	
					6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	dokumen	0,00	-	0,00	-	1,00	-	0,00	-	0,00	-	1,00	5.000	0,00	-	1,00	4.999,90	100,00	0,00	0,00	1,00	5.000	0,00	0,00	DISNAK KESWAN	APBD Kab																
					7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	-	3,00	2.400,00	3,00	1.700,00	3,00	4.200	3,00	4.400	12,00	12.700,00	100,00	0,00	0,00	12,00	12.700	0,00	0,00	DISNAK KESWAN	APBD Kab																

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021 (%)				OPD Penanggung Jawab	Ket.													
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	RKPD		APBD		I		II		III		IV		K	Rp (000)			K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)							
									K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)											K	Rp (000)					
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=9+10+11+12	14=13/8*100	15=7+13	16=15/6*100	17	18															
3	27	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumberdaya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan"	kecamatan	0,00	-	0,00	-	10,00	-	-	-	2,00	5.976,00	6,00	1.950,00	2,00	-	-	-	10,00	7.926,00	100,00	0,00	0,00	12,00	12.521.770,15	0,00	0,00	DTPHP	APBD Kab			
3	27	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran berjalan dengan maksimal dan Terwujudnya pengembangan sistem keuangan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan																															
3	27	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terwujudnya kesejahteraan pegawai	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	-	-	-	3,00	2.304.509,67	3,00	4.628.079,89	3,00	3.402.294	3,00	2.186.887	12,00	12.521.770,15	100,00	0,00	0,00	12,00	12.521.770,15	0,00	0,00	DTPHP	APBD Kab			
3	27	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN dan TPP	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	-	-	-	3,00	923.214,96	3,00	1.517.964,30	3,00	942.281	3,00	1.031.595	12,00	4.415.055,49	100,00	0,00	0,00	12,00	4.415.055,49	0,00	0,00	DISNAK KESWAN	APBD Kab			
3	27	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya jasa administrasi keuangan	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	-	-	-	3,00	22.507,50	3,00	9.582,50	3,00	2.100	3,00	38.623	12,00	72.812,50	100,00	0,00	0,00	12,00	72.813	0,00	0,00	DISNAK KESWAN	APBD Kab			
3	27	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tertindakannya kegiatan administrasi keuangan dan laporan keuangan	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	-	-	-	3,00	7.085,00	3,00	47.770,00	3,00	22.798	3,00	32.971	12,00	110.623,50	100,00	0,00	0,00	12,00	110.624	0,00	0,00	DTPHP	APBD Kab			
3	27	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terperolehnya laporan pertanggungjawaban keuangan akhir tahun	dokumen	0,00	-	0,00	-	1,00	-	-	-	0,00	-	1,00	3.230,47	0,00	-	0,00	-	1,00	3.230,47	100,00	0,00	0,00	1,00	3.230	0,00	0,00	DTPHP	APBD Kab			
3	27	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Akhir Tahun	dokumen	0,00	-	0,00	-	1,00	-	-	-	1,00	4.999,90	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,00	4.999,90	100,00	0,00	0,00	1,00	5.000	0,00	0,00	DISNAK KESWAN	APBD Kab			
3	27	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tercapainya move dan pelaporan program/kegiatan pembangunan pertanian/ Pengamanan aset daerah																															
3	27	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tertindakannya move dan pelaporan program/kegiatan pembangunan pertanian/ Pengamanan aset daerah	kecamatan	0,00	-	0,00	-	10,00	-	-	-	0,00	-	2,00	421,00	1,00	225	7,00	2.322	10,00	2.968,00	100,00	0,00	0,00	10,00	2.968	0,00	0,00	DTPHP	APBD Kab			
3	27	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kualitas disiplin dan SDM aparatur sipil negara semakin meningkat																															
3	27	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terwujudnya pegawai terampil dan siap pakai (latipm III)	orang	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DTPHP	APBD Kab			
3	27	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran berjalan dengan maksimal																															
3	27	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik	paket	0,00	-	0,00	-	1,00	-	-	-	0,00	-	1,00	2.999,80	0,00	-	-	-	1,00	2.999,80	100,00	0,00	0,00	1,00	3.000	0,00	0,00	DTPHP	APBD Kab			
3	27	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terperolehnya kebutuhan bangunan kantor	buah	0,00	-	0,00	-	25,00	-	-	-	0,00	-	25,00	1.355,20	0,00	-	0,00	-	25,00	1.355,20	100,00	0,00	0,00	25,00	1.355	0,00	0,00	DISNAK KESWAN	APBD Kab			
3	27	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	-	-	-	3,00	3.045,90	3,00	-	3,00	-	3,00	-	12,00	3.045,90	100,00	0,00	0,00	12,00	3.046	0,00	0,00	DISNAK KESWAN	APBD Kab			
3	27	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya ATK	paket	0,00	-	0,00	-	1,00	-	-	-	0,00	-	1,00	5.991,90	0,00	-	-	-	1,00	5.991,90	100,00	0,00	0,00	1,00	5.992	0,00	0,00	DTPHP	APBD Kab			
3	27	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya pelayanan kebersihan kantor	paket	0,00	-	0,00	-	1,00	-	-	-	0,04	4.300,00	0,78	86.350,00	0,10	5.450	0,12	7.670	1,04	103.770,00	103,87	0,00	0,00	1,04	103.770	0,00	0,00	DTPHP	APBD Kab			
3	27	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan Minuman Rapat	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	-	-	-	3,00	17.941,35	3,00	23.822,25	3,00	10.929	3,00	20.846	12,00	73.538,50	100,00	0,00	0,00	12,00	73.539	0,00	0,00	DISNAK KESWAN	APBD Kab			
3	27	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Cetak dan Penggandaan	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	-	-	-	3,00	12.479,60	3,00	1.314,60	3,00	-	3,00	-	12,00	13.794,20	100,00	0,00	0,00	12,00	13.794	0,00	0,00	DISNAK KESWAN	APBD Kab			
3	27	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	paket	0,00	-	0,00	-	1,00	-	-	-	0,00	-	0,12	3.445,00	0,63	5.404	3,00	10.951	3,75	19.800,38	375,00	0,00	0,00	3,75	19.800	0,00	0,00	DTPHP	APBD Kab			
3	27	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	koran	0,00	-	0,00	-	1,00	-	-	-	0,17	160	0,28	240	0,3	960,00	3,00	320	3,00	3.75	960,00	375,00	0,00	0,00	3,75	960	0,00	0,00	DISNAK KESWAN	APBD Kab		
3	27	1	2.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya makan dan minum kantor	paket	0,00	-	0,00	-	1,00	-	-	-	0,00	-	0,20	2.390,00	0,70	5.250	0,10	1.050	1,00	8.690,00	100,00	0,00	0,00	1,00	8.690	0,00	0,00	DTPHP	APBD Kab			
3	27	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tertindakannya rapat koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	-	-	-	3,00	25.637,06	3,00	43.593,50	3,00	27.110	3,00	31.056	12,00	127.396,82	100,00	0,00	0,00	12,00	127.397	0,00	0,00	DTPHP	APBD Kab			
3	27	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tertindakannya rapat koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	-	-	-	3,00	24.466,41	3,00	20.478,00	3,00	16.966	3,00	34.545	12,00	96.455,31	100,00	0,00	0,00	12,00	96.455	0,00	0,00	DISNAK KESWAN	APBD Kab			
3	27	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran berjalan dengan maksimal																															
3	27	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya perlengkapan gedung kantor, Tersedianya peralatan gedung kantor	unit	0,00	-	0,00	-	1,00	-	-	-	0,30	3.449	0,00	-	0,00	-	0,70	11.733	1,00	15.181,50	100,00	0,00	0,00	1,00	15.182	0,00	0,00	DISNAK KESWAN	APBD Kab			
3	27	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terdny prtng gndg kntnr/Pngadn laptop(Sunit), Tsdny prtng gndg kntnr/Pngdn msnk kntnrk (unit), Tsdny prtng gndg kntnr/Pngadn printer(Sunit), Tsdny plgkpn gndg kntnr/pngdn AC(Eunit), Tsdny plgkpn gndg kntnr/pngdn intercom(1pkt), Tsdny plgkpn gndg k	paket	0,00	-	0,00	-	1,00	-	-	-	0,00	-	0,71	37.780,00	0,00	-	0,29	55.404	1,00	93.184,00	100,00	0,00	0,00	1,00	93.184	0,00	0,00	DTPHP	APBD Kab			
3	27	1	2.07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya aplikasi untuk cp/ci tingkat kabupaten	paket	0,00	-	0,00	-	1,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DTPHP	APBD Kab			
3	27	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran berjalan dengan maksimal																															
3	27	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tertindakannya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	-	-	-	3,00	-	3,00	28.303,62	3,00	13.003	3,00	21.796	12,00	63.102,28	100,00	0,00	0,00	12,00	63.102	0,00	0,00	DTPHP	APBD Kab			
3	27	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	-	-	-	3,00	11.701,99	3,00	11.207,57	3,00	10.614	3,00	12.071	12,00	45.594,72	100,00	0,00	0,00	12,00	45.595	0,00	0,00	DISNAK KESWAN	APBD Kab			
3	27	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terjaganya kebersihan kantor	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	-	-	-	3,00	6.000,00	3,00	6.000,00	3,00	6.000	3,00	6.000	12,00	24.000,00	100,00	0,00	0,00	12,00	24.000	0,00	0,00	DISNAK KESWAN	APBD Kab			
3	27	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	orang	0,00	-	0,00	-	2,00	-	-	-	0,33	8.000,00	0,50	12.000,00	0,67	12.000	0,50	16.000	2,00	48.000,00	100,00	0,00	0,00	2,00	48.000	0,00	0,00	DTPHP	APBD Kab			
3	27	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran berjalan dengan maksimal																															
3	27	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perpanjangan STNK dan KIR kendaraan dinas roda 2 dan 4	unit	0,00	-	0,00	-	80,00	-	-																							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.																							
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	RKPD		APBD		I		II		III		IV		K	Rp (000)	K	Rp (000)			K	Rp (000)	K	Rp (000)																			
									K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)											K	Rp (000)																	
																																	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)							
2	3	27	2	0.00	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase ketersediaan infrastruktur pertanian mendukung produksi dan produktivitas																																											
					Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Terwujudnya pengawasan dan pemantauan penggunaan sarana pertanian yang semakin baik																																											
					1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Bertambahnya jumlah lahan yang mengembangkan bibit unggul pertanian/perkebunan(3kec), Terlaksananya peningkatan produksi tembakau dataran tinggi melalui pertanian GAP(pelatihan petani(60org), Terlaksananya peningkatan produksi tembakau dataran tinggi mel	%																				DTPHP																					
					###	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pembangunan sumur dangkal/dalam	paket																				DTPHP																					
					2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Tercapainya peningkatan produksi dan mutu pangan sektor pertanian																																										
					1	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Meningkatnya produksi tanaman komoditi aneka kacang dan umbi	paket																				DTPHP																					
					2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman		paket																				DTPHP																					
					2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Terlaksananya pelayanan inseminasi buatan, pemerknaan kebuntingan dan kelahiran	kecamatan	0,00	-	0,00	-	10,00	-	2,63	20.480,00	1,37	9.280,00	5,00	4.500	1,00	24.540	10,00	58.800,00	100,00	0,00	0,00	10,00	58.800	0,00	0,00	DISNAK KESWAN	APBD Kab																
					3	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Terlaksananya peningkatan mutu ternak	ekor	0,00	-	0,00	-	55000,00	-	225,50	2.100,00	1424,50	5.100,00	21538,00	3,600	20812	8,015	44000,00	18,815,00	80,00	0,00	0,00	#####	18.815	0,00	0,00	DISNAK KESWAN	APBD Kab																
					2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten																																										
					5	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Tersedianya benih/bibit ternak dan hijauan pakan dalam daerah	stek																								DISNAK KESWAN																	
					2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Terlaksananya Pemberian bibit HPT yang berkualitas, bantuan ternak kepada masyarakat, Pelaksanaan IB dan Pengkantuan Ternak																																										
					1	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Terdistribusinya bibit ternak sapi bali kepada masyarakat	ekor	0,00	-	0,00	-	4646,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISNAK KESWAN	APBD Kab															
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		93,75	0,00	0,00																													
Predikat Kinerja																		ST	SR	SR																													
3	3	27	3	0.00	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	% ptmbhn PDRB ptnian umum ADHK, pbinaan Kp.tani,ppulasi trnak,areal kom.prtkbunan,Ktrsediaan Air u/Lhn ptnian Msy ,prrpn tknolgi ptnian,Klhirn insem.buati,kwsn pnydia pkan&air bg tnak,Adpsi tknlg bid.ptrnkn,pmnfaatn biogs&ppuk orgnk dr lmbah ptknk,pmnuhn																																											
					2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya																																										
					9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Tersedianya paket instalasi biogas asal ternak	unit	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISNAK KESWAN	APBD Kab															
					9	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Mengoptimalisasi lahan kritis menjadi lahan subur dengan menggunakan pupuk organik hasil olahan petani dengan pemantauan limbah sampah pertanian, yang ada disekitar lingkungan petani dan Meningkatkan pengetahuan dalam penerapan teknologi pertanian	paket																									DTPHP																
					2.02	Pengembangan Prasarana Pertanian	Peningkatan produksi dan produktifitas melalui pengelolaan sumber sumber air dan jalan jalan produksi serta prasarana lainnya yang semakin baik																																										
					2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Terwujudnya pembangunan rehabilitasi/pemeliharaan embung	unit	0,00	-	0,00	-	6,00	-	0,00	-	1,50	180.000,00	4,20	527.819	0,30	48.180	6,00	755.999,00	100,00	0,00	0,00	6,00	755.999	0,00	0,00	DTPHP	APBD Kab																
					3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Terwujudnya pembangunan rehabilitasi/pemeliharaan jalan usaha tani	unit/km	0,00	-	0,00	-	12,00	-	0,00	-	2,20	351.890,00	5,80	785.257	4,00	780.497	12,00	1.917.643,89	100,00	0,00	0,00	12,00	1.917.644	0,00	0,00	DTPHP	APBD Kab																
					4	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Terwujudnya pembangunan rehabilitasi/pemeliharaan dam parit	unit	0,00	-	0,00	-	6,00	-	0,00	-	1,50	180.000,00	1,50	346.259	3,00	229.718	6,00	755.977,00	100,00	0,00	0,00	6,00	755.977	0,00	0,00	DTPHP	APBD Kab																
					8	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Terwujudnya pembangunan dan pemeliharaan balai penyuluh pertanian di kecamatan dan Terwujudnya pengadaan sarana pendukung BPP	paket	0,00	-	0,00	-	1,00	-	0,00	-	0,50	20.845,00	0,00	-	0,50	44.774	1,00	65.619,00	100,00	0,00	0,00	1,00	65.619	0,00	0,00	DTPHP	APBD Kab																
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		83,33	0,00	0,00																													
Predikat Kinerja																		T	SR	SR																													
4	3	27	4	0.00	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persen peningkatan penanganan penyakit ternak, penanganan hewan yang mengalami gangguan reproduksi, keamanan dan pengendalian penyakit hewan strategis, kualitas sarana dan prasarana RPH, serta pertumbuhan usaha-usaha dibidang peternakan, dan pengendalian																																											
					2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	tercapainya penyakit hewan zoonosis																																										
					1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	terlaksananya penanggulangan penyakit hewan zoonosis	ekor	0,00	-	0,00	-	6500,00	-	6500,00	3.775,00	3250,00	37.093,45	1841,45	2.100	758,55	139.714	6500,00	182.681,95	100,00	0,00	0,00	6500,00	182.682	0,00	0,00	DISNAK KESWAN	APBD Kab																
					2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya peredaran ternak dan bahan asal hewan di perbatasan	pos	0,00	-	0,00	-	2,00	-	0,20	2.000,00	0,80	6.376,00	0,58	3.000	0,42	3.000	2,00	14.376,00	100,00	0,00	0,00	2,00	14.376	0,00	0,00	DISNAK KESWAN	APBD Kab																
					2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya jasa laboratorium dan jasa medik dan paramedik veteriner																																										
					2	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	tersedianya jasa medik dan paramedik veteriner	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	-	3,00	6.000,00	3,00	11.000,00	3,00	7.500	3,00	9.800	12,00	34.300,00	100,00	0,00	0,00	12,00	34.300	0,00	0,00	DISNAK KESWAN	APBD Kab																
					2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terwujudnya pengelolaan RPH sebagai penghasil bahan pangan yang ASUH, dan terlaksananya pemantauan bahan asal hewan yang aman sehat utuh dan halal																																										
					1	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	terlaksananya pengelolaan RPH sebagai penghasil bahan pangan yang ASUH	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	-	3,00	10.000,00	3,00	13.000,00	3,00	10.000	3,00	13.300	12,00	46.300,00	100,00	0,00	0,00	12,00	46.300	0,00	0,00	DISNAK KESWAN	APBD Kab																

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.												
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	I		II		III		IV		K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)			K	Rp (000)										
									K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)													K	Rp (000)								
1	3 27 4 2.04	2	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	terpantainya bahan asal hewan (BAH) yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH)	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	-	3,00	5.360,00	3,00	10.000,00	3,00	7.140	3,00	7.860	12,00	30.360,00	100,00	0,00	0,00	12,00	30.360	0,00	0,00	DISNAK KESWAN	APBD Kab								
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																100,00	0,00	0,00			0,00	0,00																
Predikat Kinerja																ST	SR	SR																				
5	3 27 5 2.01	1	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Tersedianya pengendalian penanggulangan bencana pertanian																																		
3	27 5 2.01	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Berkurangnya jumlah petani yang mengalami kerugian akibat dampak perubahan iklim di Kab. Bulukumba	paket	0,00	-	0,00	-	1,00	-	0,00	-	0,10	5.698,00	0,65	27768,00	0,25	19.201	1,00	52.667,00	100,00	0,00	0,00	1,00	52.667	0,00	0,00	DTPHP	APBD Kab								
3	27 5 2.01	3	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terlaksananya pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi dan pestisida	kali	60,00	-	0,00	-	1,00	-	0,00	-	0,80	11.920,00	0,10	2.100	0,10	4.330	1,00	18.350,00	100,00	0,00	0,00	1,00	18.350	1,67	0,00	DTPHP									
3	27 5 2.01	3	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Tersedianya pestisida untuk pengendalian hama terlaksananya kegiatan pengendalian serangan hama dan penyakit tanaman	kecamatan	100,00	-	0,00	-	10	-	0,11	522	0,90	2.942	4,00	3.703	5,00	25.495	10,00	32.662,00	100,00	0,00	0,00	10,00	32.662	10,00	0,00	DTPHP									
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																100,00	0,00	0,00																				
Predikat Kinerja																ST	SR	SR																				
6	3 27 6 2.01	2	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Tertibnya Pemberian Izin Usaha dibidang peternakan																																		
3	27 6 2.01	2	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya kegiatan survey awal untuk penerbitan rekomendasi, dan Terlaksananya Pembinaan UMKM sektor peternakan	paket	0,00	-	0,00	-	1,00	-	0,00	-	0,72	27.900,00	0,19	-	0,02	-	0,93	27.900,00	93,00	0,00	0,00	0,93	27.900	0,00	0,00	DISNAK KESWAN	APBD Kab								
3	27 6 2.01	3	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Terlaksananya Kegiatan Survey Awal Untuk Penerbitan Rekomendasi	kecamatan					7,00	-	0,13	160	0,08	0	2,1	0	0	0	2,31	160,00	33,00	0,00	0,00	2,31	160	0,00	0,00	DISNAK KESWAN									
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																63,00	0,00	0,00																				
Predikat Kinerja																R	SR	SR																				
7	3 27 7 2.01	1	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	% Kont. ptanian umum thdp PDRB,td pngolhn pdi brteklgi,pdptan pkpta petni, pngbngan ag.bisnis.prod.yg bkwlits rmh ling., Tib adm. tnak dimasy.&bntuan pemrth.,sttus klp.mdiri, kmpuan ptnak&aprat ptrnkn,ptngkntn prduk olhn prkbunan.pngolhn pasca pnen&msar																																		
3	27 7 2.01	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Terwujudnya Bimtek kelembagaan peternakan dan terlaksananya pembayaran jasa pihak ketiga pada petugas pendamping	orang	0,00	-	0,00	-	20,00	-	0,38	2.800,00	8,02	56.505,00	4,60	22.100	7,00	55.200	20,00	136.605,00	100,00	0,00	0,00	20,00	136.605	0,00	0,00	DISNAK KESWAN	APBD Kab								
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																100,00	0,00	0,00																				
Predikat Kinerja																ST	SR	SR																				
8	3 27 7 2.01	1	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	% Kont. ptanian umum thdp PDRB,td pngolhn pdi brteklgi,pdptan pkpta petni, pngbngan ag.bisnis.prod.yg bkwlits rmh ling., Tib adm. tnak dimasy.&bntuan pemrth.,sttus klp.mdiri, kmpuan ptnak&aprat ptrnkn,ptngkntn prduk olhn prkbunan.pngolhn pasca pnen&msar																																		
3	27 7 2.01	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Terwujudnya perubahan pola fikir pada petani melalui transfer ilmu dan pengetahuan oleh penyuluh pertanian yang mengikuti perkembangan jaman	paket	5,00	-	0,00	-	1,00	-	0,00	-	0,07	9.420,45	0,10	7.300	0,83	135.952	1,00	152.672,00	100,00	0,00	0,00	1,00	152.672	20,00	0,00	DTPHP									
3	27 7 2.01	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya musyawarah mattirolaong ruma, Terlaksananya pembinaan gapoktan, Terlaksananya pembinaan/pelatihan dan pelaku agribisnis, Terlaksananya revitalisasi kelembagaan petani	kecamatan	5,00	-	0,00	-	10,00	-	0,00	-	2,08	7.622,50	5,92	5.438	2,00	5.289	10,00	18.349,00	100,00	0,00	0,00	10,00	18.349	200,00	0,00	DTPHP									
3	27 7 2.01	3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya pameran hasil pertanian/pelatihan dan pelaku agribisnis/Pameran hari jadi Kab. Bulukumba, Terlaksananya pameran hasil pertanian/pelatihan dan pelaku agribisnis/Pameran Pihinis Ekspo, Terlaksananya pameran nasional/Luar Daerah, Terlaksananya p	tahun	0,00	-	0,00	-	1,00	-	0,00	-	0,02	660,00	0,73	31.445	0,25	76.878	1,00	108.983,00	100,00	0,00	0,00	1,00	108.983	0,00	0,00	DTPHP	APBD Kab								
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																100,00	0,00	0,00																				
Predikat Kinerja																ST	SR	SR																				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN																-	-	-	3.463.543,10	-	-	-	7.942.494,46	-	-	6.478.713,57	-	-	8.767.409,56	-	-	26.652.160,68						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 8)																95,15	0,00	0,00																				
PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 8)																ST	SR	SR																				
3	28 0 0.00	0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN																																			
3	28 4 0.00	0	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase terjaganya Kelestarian sumberdaya, fungsi kawasan hutan, keanekaragaman hayati (Flora dan Fauna) serta rekonstruksi tata batas pada Kawasan TAHURA di Kecamatan Bontobahari																																		
3	28 4 2.01	1	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	Persen peningkatan potensi wisata dan jasa lingkungan yang optimal	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	-	3,00	460	3,00	12.476,00	3,00	3.596	3,00	1.998	12,00	18.529,70	100,00	0,00	0,00	12,00	18.530	0,00	0,00	DLHK	APBD Kab								
3	28 4 2.01	5	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota	Tersedianya database dan terehabilitasinya ekosistem TAHURA	paket	0,00	-	0,00	-	1,00	-	0,00	-	0,07	5.703,00	0,08	3.907	0,85	87.926	1,00	97.535,40	100,00	0,00	0,00	1,00	97.535	0,00	0,00	DLHK	APBD Kab								

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.																																			
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	I		II		III		IV		K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)			K	Rp (000)																																	
									K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)													K	Rp (000)																															
1	3	28	4	2.01	8	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Best practice di Lokasi TAHURA model, Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan pengembangan masyarakat TAHURA, Terlaksananya studi banding di Lokasi TAHURA model, Pelaksanaan Workshop pengembangan masyarakat TAHURA, Pembangunan sarana dan prasarana	paket	0,00	-	0,00	-	1,00	1.000,00	0,10	2.718,00	0,48	5.077	0,29	6.473	13=9+10+11+12	0,89	15.268,00	89,00	0,00	0,00	14=13/8*100	0,89	15.268	0,00	0,00	15=7+13	0,00	0,00	16=15/6*100	DLHK	APBD Kab																								
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																								96,33	0,00	0,00			0,00	0,00																															
Predikat Kinerja																								ST	SR	SR																																			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN																								-	-	-					1.460,00							20.897,00				12.579,70																			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 11)																								96,33	0,00	0,00																																			
PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 11)																								ST	SR	SR																																			
1	3	30	0	0.00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Meningkatnya kapasitas dan efektifitas dalam distribusi barang dan produk perdagangan																																																						
3	30	3	3	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya Distribusi Perdagangan, Tersedianya Pasar																																																						
3	30	3	2.01	1		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar	pasar	0,00	-	0,00	-	14,00	-	-	0,01	3.400	0,03	4.360	2,36	959.204	10,90	4.928.745	13,30	5.895.709,75	95,00	0,00	0,00	13,30	5.895.710	0,00	0,00																													
3	30	3	2.02	1		Pembiinan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Terjaminya Distribusi Barang ke masyarakat																																																						
3	30	3	2.02	1		Pembiinan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya Keamanan Pasar, Kebersihan Pasar, Penarikan Retribusi Pasar	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	-	-	3,00	240.500	3,00	360.085	3,00	246.714	2,40	712.809	11,40	1.560.108,30	95,00	0,00	0,00	11,40	1.560.108	0,00	0,00																													
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																								95,00	0,00	0,00																																			
Predikat Kinerja																								ST	SR	SR																																			
2	3	30	4	0.00		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Meningkatnya Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok daerah																																																						
3	30	4	2.01			Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terjaminya Ketersediaan Barang di Pasar																																																						
3	30	4	2.01	1		Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya	%					95	-	-	3,80	3.000	2,26	3.000	65,19	34.970	19	21.100	90,25	62.070,00	95,00	0,00	0,00	90,25	62.070	0,00	0,00																													
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																								95,00	0,00	0,00																																			
Predikat Kinerja																								ST	SR	SR																																			
3	3	30	5	0.00		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Meningkatnya Aksesibilitas terhadap jaringan perdagangan domestik dan internasional																																																						
3	30	5	2.01			Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Hasil Produk Daerah dapat dipasarkan lebih Luas																																																						
3	30	5	2.01	2		Pameran Dagang Nasional	Pameran Dagang Nasional	kegiatan	0,00	-	0,00	-	1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0	0	0	0	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00																													
3	30	5	2.01	3		Pameran Dagang Lokal	Terlaksananya Pameran Dagang Lokal	kegiatan					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0	0	0	0	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00																													
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																								0,00	0,00	0,00																																			
Predikat Kinerja																								SR	SR	SR																																			
4	3	30	6	0.00		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Jumlah pasar yang direhabilitasi dan peningkatan Perdagangan Barang dan Jasa																																																						
3	30	6	2.01			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Tertibanya Pemakaian Alat Ukur sesuai Standar SNI																																																						
3	30	6	2.01	1		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Terlaksananya Pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat UTTTP (13 SPBU dan SPDN, 42 pasar dan 7 Jembatan Timbang)	%					95	-	-	8,55	13.480	9,29	18.300	32,16	11.650	40,25	165.428	90,25	208.857,80	95,00	0,00	0,00	90,25	208.858	0,00	0,00																													
3	30	6	2.01	2		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Terlaksananya Pengawasan BDKT dan Penyuluhan (13 SPBU dan SPDN, 42 pasar dan 150 Toko)	%	0,00	-	0,00	-	95,00	-	-	0,00	-	18,60	26.955	41,40	29.806	25,50	24.016	85,50	80.776,80	90,00	0,00	0,00	85,50	80.777	0,00	0,00																													
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																								92,50	0,00	0,00																																			
Predikat Kinerja																								ST	SR	SR																																			
5	3	30	1	0.00		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumberdaya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan"																																																						
3	30	1	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan sebagai Dasar pelaksanaan Kegiatan dan Laporan Keuangan, Gaji dan Tunjangan ASN.																																																						
3	30	1	2.01	1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Renstra dan Renja	dokumen					2,00	-	-	0,18	4.819	0,69	9.523	0,17	1.498	0,66	9.576	1,70	25.415,37	85,00	0,00	0,00	1,70	25.415	0,00	0,00																													
3	30	1	2.01	2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan	dokumen	0,00	-	0,00	-	1,00	-	-	0,05	823,1	0,06	1.001	0,74	12.164	0,85	13.987,90	85,00	0,00	0,00	0,85	13.988	0,00	0,00																															
3	30	1	2.01	4		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan DPA-SKPD	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	-	-	3,00	1.580	1,80	7.060	10,80	8.640,00	90,00	0,00	0,00	10,80	8.640,00	90,00	0,00	0,00	10,80	8.640	0,00	0,00																												
3	30	1	2.01	6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kesesuaian perencanaan dengan unsur terkait dan Laporan Capaian Kinerja	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	-	-	3,00	511,5	3,00	4.498	-2,40	1.359	6,60	6.368,00	55,00	0,00	0,00	6,60	6.368	0,00	0,00																															
3	30	1	2.01	7		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan	laporan	0,00	-	0,00	-	1,00	-	-	0,00	-	0,55	2373	0,55	2.373,00	55,00	0,00	0,00	0,55	2.373	0,00	0,00																																	
3	30	1	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan Administrasi Perkantoran dan Tersedianya Laporan Keuangan, Gaji dan Tunjangan ASN																																																						
3	30	1	2.02	1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	-	-	3,00	590.253	3,00	949.818	3,00	527.556	3,00	593.822	12,00	2.661.448,10	100,00	0,00	0,00	12,00	2.661.448	0,00	0,00																													
3	30	1	2.02	2		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	meningkatnya ASN dinas perindag	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	-	-	3,00	23.505	3,00	23.325	3,00	21.445	3,00	47.425	12,00	115.700,00	100,00	0,00	0,00	12,00	115.700	0,00	0,00																													
3	30	1	2.02	5		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	laporan	0,00	-	0,00	-	1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	1,00	5402,7	1,00	5.402,70	100,00	0,00	0,00	1,00	5.403	0,00	0,00																															
3	30	1	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	ASN Lebih Menguasai Tugas dan Fungsinya																																																						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.								
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	I		II		III		IV		K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)			K	Rp (000)						
									K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)																		
					Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																89,79	0,00	0,00					#REF!	#REF!					
1	4 01 1 2.14 3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Adanya pengetahuan dan informasi di kalangan masyarakat terkait penyelenggaraan pemerintahan. Adanya pengetahuan dan informasi di kalangan masyarakat terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tersosialisasinya informasi penyelenggaraan pemerintahan dan	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	-	3,00	6.660	3,00	15.783	3,00	21.043	3	45.339	13=9+10+11+12	12,00	88.845,25	14=13/8*100	100,00	0,00	0,00	15=7+13	12,00	88.845	0,00	0,00	16=15/6*100	17	18	APBD Kab
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																89,79	0,00	0,00			#REF!	#REF!												
Predikat Kinerja																T	SR	SR			#REF!	#REF!												
2	4 01 2 0.00	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah, SOTK kelembagaan pemerintah daerah, penyediaan dokumen LKPJ, penyusunan dokumen LPPD, Terpaparnya PATEN bagi aparatur kecamatan, terbit penyaluran Raskin tiap desa/ke, tindak lanjut																															
4	01 2 2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Terciptanya pengendalian kebijakan KDH, perencanaan pembangunan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, penataan otonomi daerah dan pembinaan kecamatan guna mewujudkan pelayanan prima di Kecamatan																															
4	01 2 2.01 1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Terpenuhi kewajiban Kepala Daerah dalam hal menyampaikan LKPJ kepada DPRD dan Kewajiban Penerbitan Surat Izin serta Terpenuhi kewajiban Kepala Daerah dalam hal Pemerintahan	dokumen	0,00	-	0,00	-	4,00	-	0,48	25.094	1,92	99.167	0,80	24.055	0,6	47.169	3,80	195.485,24	95,00	0,00	0,00	3,80	195.485	0,00	0,00				SETDA	APBD Kab		
4	01 2 2.01 2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Terpenuhi kewajiban Kepala Daerah dalam hal menyampaikan LKPJ kepada DPRD dan Kewajiban Penerbitan Surat Izin dan Terpenuhi kewajiban Kepala Daerah dalam hal Pemerintahan	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	-	3,00	8.612	3,00	5.600	3,00	6.930	2,4	13.351	11,40	34.492,40	95,00	0,00	0,00	11,40	34.492	0,00	0,00				SETDA	APBD Kab		
4	01 2 2.01 3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Terlaksananya penegakan Tapal Batas Daerah, Terpeliharanya urusan SPM yang di fasilitasi dari keseluruhan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah (6 SKPD), Tersusunnya Nama-Nama Rupa Bumi (1 Dokumen), Tersusunnya Naskah Kerjasama Daerah (1 Dokumen)	dokumen	0,00	-	0,00	-	4,00	-	0,2	2.914	0,96	19.757	1,46	13.603	0,90	53.843	3,52	90.117,67	88,00	0,00	0,00	3,52	90.118	0,00	0,00				SETDA	APBD Kab		
4	01 2 2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Juara MTQ/STQ Tk. Kecamatan dan Tk. Kabupaten serta ketertarikan tingkat Provinsi dan Nasional																															
4	01 2 2.02 1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Juara MTQ dan LASOJ Tingkat Kabupaten Bulukumba dengan SDM Cinta Al Quran yang unggul dan terbaik hasil seleksi. Mewujudkan pemahaman beragama, berbangsa dan bernegara melalui pembinaan mental dan keagamaan, Pembinaan Kegiatan Guru TKA/TPA, Tersedianya Saran	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	-	3,00	3.070	3,00	63.144	3,00	177.108	1,56	496.208	10,56	739.529,62	88,00	0,00	0,00	10,56	739.530	0,00	0,00				SETDA	APBD Kab		
4	01 2 2.02 2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya evaluasi terkait Kesejahteraan Sosial	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	-	3,00	900	3,00	7.253	3,00	138.995	1,56	355.440	10,56	502.587,20	88,00	0,00	0,00	10,56	502.587	0,00	0,00				SETDA	APBD Kab		
4	01 2 2.02 3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Terlaksananya Evaluasi kebijakan Kesejahteraan Masyarakat	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	-	3,00	-	3,00	29077,5	3,00	3.070	1,20	21.817	10,20	53.964,90	85,00	0,00	0,00	10,20	53.965	0,00	0,00				SETDA	APBD Kab		
4	01 2 2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Meningkatnya pelayanan bantuan hukum dan penanganan kasus di Pemerintah Kabupaten, Terselaksananya draft rancangan Peraturan Daerah.																															
4	01 2 2.03 1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah (800 Naskah), Tercapainya pembangunan dibidang hukum melalui koordinasi dan kerjasama (65 Produk)	%	0,00	-	0,00	-	100,00	-	5,00	4.865	25,00	18.345	48,51	39.476	21,49	29.729	100,00	92.414,00	100,00	0,00	0,00	100,00	92.414	0,00	0,00				SETDA	APBD Kab		
4	01 2 2.03 2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum (11 Ranperda), Tercapainya Kabupaten peduli HAM (5 Lap), Terwujudnya masyarakat sadar hukum dan Terwujudnya Generasi 'Sadar Hukum yang dapat menginformasikan hukum kepada masyarakat (1 Klp), Terwujudnya pelayanan bantuan hukum,	dokumen	0,00	-	0,00	-	19,00	-	0,95	7.445	4,56	31.568	6,49	19.412	7,00	78.868	19,00	137.292,75	100,00	0,00	0,00	19,00	137.293	0,00	0,00				SETDA	APBD Kab		
4	01 2 2.03 3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang produk hukum (5 Kali), Terpublikasinya produk hukum Daerah (12 Bulan), Terwujudnya penataan perundang-undangan dan peraturan Desa dalam bentuk dokumen dan Terselaksananya Produk Hukum Daerah ke Provinsi, SKPD dan Masy	dokumen	0,00	-	0,00	-	3,00	-	0,15	600	0,15	12.297	1,17	40.331	1,53	95.882	3,00	149.110,90	100,00	0,00	0,00	3,00	149.111	0,00	0,00				SETDA	APBD Kab		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																93,22	0,00	0,00			0,00	0,00												
Predikat Kinerja																ST	SR	SR			SR	SR												
4	01 3 0.00	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Ketersediaan informasi produksi daerah, pelayanan pengadaan secara elektronik dan laporan inflasi tingkat kabupaten																															
4	01 3 2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase ketersediaan informasi produksi daerah untuk promosi dan investasi, Terpenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat wilayah terpencil, Tersedianya Data Potensi panas bumi, Meningkatnya kemampuan modal kelompok-kelompok usaha dimasyarakat dan Ter																															
4	01 3 2.01 1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	Unit	0,00	-	0,00	-	15,00	-	0,00	-	0,00	-	4,16	630	7,09	1.031	11,25	1.660,80	75,00	0,00	0,00	11,25	1.661	0,00	0,00				SETDA	APBD Kab		
4	01 3 2.01 2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Tersedianya laporan inflasi dan terkoordinasinya kegiatan pengendalian inflasi daerah dengan Tim TPID Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Nasional	Unit	0,00	-	0,00	-	2,00	-	0,00	-	0,64	8.460	0,86	8.930	0,40	7.840	1,90	25.229,60	95,00	0,00	0,00	1,90	25.230	0,00	0,00				SETDA	APBD Kab		
4	01 3 2.01 3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Tersedianya Data Produksi, Promosi dan Informasi Potensi Daerah	Bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	-	3,00	-	3,00	498	3,00	5.738	3,00	1.451	12,00	7.687,10	100,00	0,00	0,00	12,00	7.687	0,00	0,00				SETDA	APBD Kab		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)				Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)				Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)				OPD Penanggung Jawab	Ket.																			
					K		Rp (000)		K		Rp (000)		K		Rp (000)		K		Rp (000)		K		Rp (000)		K		Rp (000)		K		Rp (000)		K				Rp (000)																		
					K		Rp (000)		K		Rp (000)		K		Rp (000)		K		Rp (000)		K		Rp (000)		K		Rp (000)		K		Rp (000)		K				Rp (000)																		
					K		Rp (000)		K		Rp (000)		K		Rp (000)		K		Rp (000)		K		Rp (000)		K		Rp (000)		K		Rp (000)		K				Rp (000)																		
1	5 01 1	2.01	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tertindaknya Penyediaan Dokumen DPA,DPAP	paket	0,00	-	0,00	-	1,00	11.215	0,35	-	500	0,05	11.350	1,00	23.065,23	100,00	0,00	0,00	1,00	23.065	0,00	0,00	1,00	23.065	0,00	0,00	1,00	23.065	0,00	0,00	Bappeda	APBD Kab																				
	5 01 1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya pelayanan Administrasi Keuangan serta administrasi perkantoran Lingkup Bappeda Kab.Bulukumba	%					100,00																																													
	5 01 1	2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tertindaknya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Lingkup Bappeda	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	760.343	3,00	1.222.128,63	3,00	714.361	3,00	812.128	12,00	3.508.959,78	100,00	0,00	0,00	12,00	3.508.960	0,00	0,00	12,00	3.508.960	0,00	0,00	12,00	3.508.960	0,00	0,00	Bappeda	APBD Kab																			
	5 01 1	2.02	Pelaksanaan Petausahan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tertindaknya Jasa Administrasi Keuangan	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	23.738	3,00	27.132,00	3,00	25.105	3,00	54.841	12,00	130.815,61	100,00	0,00	0,00	12,00	130.816	0,00	0,00	12,00	130.816	0,00	0,00	12,00	130.816	0,00	0,00	Bappeda	APBD Kab																			
	5 01 1	2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tertindaknya Jumlah laporan keuangan akhir tahun Bappeda Kabupaten Bulukumba (Dok)	dokumen	0,00	-	0,00	-	1,00	1.500	0,01	-	0,00	-	0,03	-	1.500,00	95,00	0,00	0,00	0,95	1.500	0,00	0,00	0,95	1.500	0,00	0,00	0,95	1.500	0,00	0,00	Bappeda	APBD Kab																				
	5 01 1	2.03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur Bappeda di bidang administrasi,teknis dan fungsional terutama pada sistem Perencanaan pembangunan	%					100,00																																													
	5 01 1	2.03	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tertindaknya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	orang	0,00	-	0,00	-	2,00	-	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bappeda	APBD Kab																				
	5 01 1	2.03	Simulasi Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tertindaknya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	kegiatan	0,00	-	0,00	-	1,00	-	-	0,00	-	0,98	86.672	0,02	-	86.672,20	100,00	0,00	0,00	1,00	86.672	0,00	0,00	1,00	86.672	0,00	0,00	1,00	86.672	0,00	0,00	Bappeda	APBD Kab																			
	5 01 3	2.04	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran serta Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang kerja Kantor Aparatur Bappeda Kab.Bulukumba	%					100,00																																													
	5 01 3	2.02	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terwujudnya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	paket					1	-	-	0,00	-	0,19	995	0,6588	3.525	0,15	973	1,00	5.492,72	100,00	0,00	0,00	1,00	5.493	0,00	0,00	1,00	5.493	0,00	0,00	Bappeda	APBD Kab																				
	5 01 3	2.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tertindaknya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	paket	0,00	-	0,00	-	1,00	-	-	0,00	-	0,18	1.990,50	0,42	4.765	0,40	4.603	1,00	11.358,05	100,00	0,00	0,00	1,00	11.358	0,00	0,00	1,00	11.358	0,00	0,00	Bappeda	APBD Kab																				
	5 01 3	2.03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tertindaknya Penyediaan Alat Tulis Kantor,Tertindaknya Penyediaan Makanan dan Minuman	paket	0,00	-	0,00	-	1,00	-	-	0,03	4.902	0,05	3.648,00	0,55	101.265	0,37	6.521	1,00	116.336,13	100,00	0,00	0,00	1,00	116.336	0,00	0,00	1,00	116.336	0,00	0,00	Bappeda	APBD Kab																				
	5 01 3	2.03	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tertindaknya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	paket	0,00	-	0,00	-	1,00	-	-	0,00	-	0,26	2.834,50	0,04	835	0,70	9.022	1,00	12.690,76	100,00	0,00	0,00	1,00	12.691	0,00	0,00	1,00	12.691	0,00	0,00	Bappeda	APBD Kab																				
	5 01 3	2.03	Facilitasi Kunjungan Tamu	Tertindaknya Fasilitas Kunjungan Tamu	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	-	-	3,00	1.498	3,00	4.487,00	3,00	4.960	3,00	4.822	12,00	15.767,40	100,00	0,00	0,00	12,00	15.767	0,00	0,00	12,00	15.767	0,00	0,00	Bappeda	APBD Kab																				
	5 01 3	2.03	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tertindaknya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	kali	0,00	-	0,00	-	108,00	-	-	12,96	31.400	33,05	49.639,58	40,39	111.731	21,60	56.129	108,00	248.898,73	100,00	0,00	0,00	108,00	248.899	0,00	0,00	108,00	248.899	0,00	0,00	Bappeda	APBD Kab																				
	5 01 3	2.03	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran serta Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang kerja Kantor Aparatur Bappeda Kab.Bulukumba	%					100,00																																													
	5 01 3	2.03	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Pengadaan Mobil Jabatan Eselon II	unit	0,00	-	0,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bappeda	APBD Kab																				
	5 01 3	2.03	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Motor Dinas Eselon IV	unit					2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bappeda	APBD Kab																				
	5 01 3	2.03	Pengadaan Mebel	Tertindaknya Pengadaan Mebeleur	set	0,00	-	0,00	-	1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	1,00	131.652	100,00	0,00	0,00	1,00	131.652	0,00	0,00	1,00	131.652	0,00	0,00	Bappeda	APBD Kab																					
	5 01 3	2.03	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tersedianya Motor Dinas Eselon IV	unit					2	-	-	-	-	0,8	40612	1,20	59350,5	2,00	99.962,50	100,00	0,00	0,00	2,00	99.963	0,00	0,00	2,00	99.963	0,00	0,00	Bappeda	APBD Kab																						
	5 01 1	1.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tertindaknya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	paket	0,00	-	0,00	-	1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	1,00	179.289	1,00	179.289,25	100,00	0,00	0,00	1,00	179.289	0,00	0,00	1,00	179.289	0,00	0,00	Bappeda	APBD Kab																				
	5 01 1	2.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tertindaknya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	paket	0,00	-	0,00	-	1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	1,00	29.800	1,00	29.800,00	100,00	0,00	0,00	1,00	29.800	0,00	0,00	1,00	29.800	0,00	0,00	Bappeda	APBD Kab																				
	5 01 1	2.01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran serta Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang kerja Kantor Aparatur Bappeda Kab.Bulukumba	%					100,00																																													
	5 01 1	2.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tertindaknya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	19.532	3,00	19.851,05	3,00	20.935	3,00	21.604	12,00	81.921,63	100,00	0,00	0,00	12,00	81.922	0,00	0,00	12,00	81.922	0,00	0,00	12,00	81.922	0,00	0,00	Bappeda	APBD Kab																			
	5 01 1	2.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tertindaknya Jasa Pelayanan umum Kantor	bulan					12	-	-	3,00	30.715	3,00	22.998	3	28.049	3,00	41.300	12,00	123.062,00	100,00	0,00	0,00	12,00	123.062	0,00	0,00	12,00	123.062	0,00	0,00	Bappeda	APBD Kab																				
	5 01 1	2.02	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran serta Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang kerja Kantor Aparatur Bappeda Kab.Bulukumba	%					100,00																																													
	5 01 1	2.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tertindaknya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional,Tertindaknya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	paket	0,00	-	0,00	-	1,00	-	-	0,00	-	0,21	7.878,64	0,39	12.039	0,40	18.159	1,00	38.076,58	100,00	0,00	0,00	1,00	38.077	0,00	0,00	1,00	38.077	0,00	0,00	Bappeda	APBD Kab																				
	5 01 1	2.02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tertindaknya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;Tertindaknya Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	paket					1,00	-	-	0,1	1.645	0,213	3.470	0,39	4.305	0,30	5.325	1,00	14.745,00	100,00	0,00	0,00	1,00	14.745	0,00	0,00	1,00	14.745	0,00	0,00	Bappeda	APBD Kab																				
	5 01 1	2.02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tertindaknya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;Tertindaknya Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	paket	0,00	-	0,00	-	1,00	-	-	0,00	-	0,41	1.250,00	0,00	-	0,49	3.558	0,90	4.807,50	90,00	0,00	0,00	0,90	4.808	0,00	0,00	0,90	4.808	0,00	0,00	Bappeda	APBD Kab																				
	5 01 1	2.05	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran serta Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang kerja Kantor Aparatur Bappeda Kab.Bulukumba	paket	0,00	-	0,00	-	1,00	-	-	0,10	2.823	0,05	1.830,00	0,70	22.000	0,15	6.079	1,00	32.732,00	100,00	0,00	0,00	1,00	32.732	0,00	0,00	1,00	32.732	0,00	0,00	Bappeda	APBD Kab																				
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																				95,21	0,00	0,00																																	
Predikat Kinerja																				ST	SR	SR																																	
2	5 01 02		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah Dok-Ren, Rev. RPJPD yg ditetapkan dngn PERDA, Dok-Ren, RPJMD yg ditetapkan dngn PERDA, Dok-Ren, RPKD yg telah ditetapkan dngn PERBUP, Konsistensi penjabaran prog. RPJMD ke dlm RPKD, Dok, Rev. RPJMD Kab. Blk Thn 2016-2020, Jmlah Dok, KLHS Rev. RPJPD	%					100,00																																													
	5 01 02	1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Terciptanya sinergi antara Dokumen Perencanaan Daerah dan Dokumen Perencanaan OPD	%					100,00																																													
	5 01 02	1.01	01 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Harmonisasi dan Integrasi Dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD, RPKD) dan Dok perencanaan OPD (RENSTRA, REN																																																			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.																				
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	I		II		III		IV		K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)			K	Rp (000)																		
									K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)													K	Rp (000)																
1	5 01 02 1.01	06 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dok. RPJMD, Dok. RKPD 2022, Dokumen RKPD-Perubahan 2021, Terlaksananya konsultasi publik Ranwal RKPD, Terlaksananya verifikasi renja OPD.	dokumen					0,24	38.073,50	0,45	82.233,10	1,01	194.017,44	0,30	62.488,20	2,00	376.812,24	100,00	0,00	0,00	2,00	376.812	0,00	0,00	Bappeda	APBD Kab																			
5	01 02 1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya akurasi, efektifitas dan efisiensi perencanaan pembangunan dengan dukungan basis data yang akurat guna peningkatan Kualitas Pembangunan Daerah Terwujudnya masyarakat sejahtera melalui percepatan dan optimalisasi pelaksanaan program-program Pem	%						100,00																																				
5	01 02 1.02	01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Data dan Informasi dari Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang telah di analisis untuk digunakan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bulukumba.	dokumen					0,08	5.531,00	0,15	5.686,00	0,27	19.035,00	0,40	30.525,18	0,90	60.777,18	90,00	0,00	0,00	0,90	60.777	0,00	0,00	Bappeda	APBD Kab																			
5	01 02 1.02	02 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Matras RKPD, RKPD-P, KUA, PPAS, KUA-P dan PPAS-P yang di cetak dan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), dan Dokumen hasil Update Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi ke dalam Website	dokumen					1,05	24.741,13	2,32	42.234,13	0,13	44.266,00	3,15	116.258,44	6,65	227.499,69	95,00	0,00	0,00	6,65	227.500	0,00	0,00	Bappeda	APBD Kab																			
5	01 02 1.02	04 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Buku profil Daerah Kabupaten Bulukumba	dokumen					0,00	-	0,21	11.300,00	0,04	4.723,00	0,60	52.345,63	0,85	68.368,63	85,00	0,00	0,00	0,85	68.369	0,00	0,00	Bappeda	APBD Kab																			
5	01 02 1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah	%						100,00																																				
5	01 02 1.03	01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Dokumen hasil Evaluasi RPJPD, RPJMD, RKPD Kabupaten Bulukumba serta dokumen pengendalian Perencanaan dan evaluasi Program dan Kegiatan yang di dani oleh DAK, DID, DBH dan Sumber lainnya	dokumen					0,40	11.981,13	0,96	17.878,00	0,32	0	1,72	52.471,32	3,40	82.330,45	85,00	0,00	0,00	3,40	82.330	0,00	0,00	Bappeda	APBD Kab																			
5	01 02 1.03	02 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dokumen monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah.	dokumen					0,60	17.946,50	1,01	30.444,00	0,79	28.215,50	1,00	41.054,26	3,40	117.660,26	85,00	0,00	0,00	3,40	117.660	0,00	0,00	Bappeda	APBD Kab																			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																			92,27	0,00	0,00			0,00	0,00																					
Predikat Kinerja																			ST	SR	SR			SR	SR																					
3	5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Terwujudnya perencanaan pembangunan bidang sosbud yang berkualitas	%						18,00																																				
5	01 03 1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Trwjdnya rapat,asistensi,sosialisasi,konsultasi, monev peny. dok kemiskinan(RPKD&LP2KD),terbentuknya tim koor pnnnggulan kmisknan&tim peny revisi RPJMDes perenc pnnnggulan kmisknan sub bid. pmrinth kpdudukan capil&pemb desa,Koordinasi bid KESOS,PPPA	%						100,00																																				
5	01 03 1.01	01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Rapat Penyusunan Dokumen Kemiskinan, Sosialisasi, Koordinasi, Konsultasi Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan serta terlaksananya asistensi dan evaluasi program perencanaan penanggulangan kemiskinan Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	%					5	6.430,00	14,09	11.949,30	40,91	36.036,00	38,00	41.158,47	98,00	95.573,77	98,00	0,00	0,00	98,00	95.574	0,00	0,00	Bappeda	APBD Kab																			
5	01 03 1.01	02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya Rapat, Asistensi, Koordinasi dan Konsultasi serta monitoring Penyusunan Dokumen Perencanaan sub bidang pemerintahan, kependudukan catatan sipil dan pembangunan desa Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	%					10	4.829,80	22,7	8.209,08	52,30	15.707,00	15,00	10.615,00	100,00	39.360,88	100,00	0,00	0,00	100,00	39.361	0,00	0,00	Bappeda	APBD Kab																			
5	01 03 1.01	03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya Rapat, koordinasi, konsultasi Monitoring Keg Kemiskinan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	%					10	399,90	13,71	4.174,00	61,29	7.773,20	5,00	5.139,00	90,00	17.486,10	90,00	0,00	0,00	90,00	17.486	0,00	0,00	Bappeda	APBD Kab																			
5	01 03 1.01	03 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	jumlah dokumen perencanaan kawasan pedesaan, penyelenggaraan rapat koordinasi sinergitas harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	%						100,00					100,00	47862,1	100,00	47.862,10	100,00	0,00	0,00	100,00	47.862	0,00	0,00	Bappeda	APBD Kab																			
5	01 03 1.01	04 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya rapat, sosialisasi, koordinasi, konsultasi, penyusunan dokumen, serta monitoring dan evaluasi penyusunan matriks capaian pembangunan SDGs 2018-2021 Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	%					10	8.686,75	9,11	7.432,90	65,89	39.148,15	15,00	31.981,45	100,00	87.249,25	100,00	0,00	0,00	100,00	87.249	0,00	0,00	Bappeda	APBD Kab																			
5	01 03 1.01	06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya rapat, asistensi, koordinasi dan konsultasi serta monitoring dan evaluasi bidang pendidikan dan kebudayaan, pemuda dan olah raga, perpustakaan dan arsip Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) serta Koordinasi, Keg. Data Base Sekolah (SD, SMP)	%					12	9.422,80	23,11	12.306,50	24,89	21.221,00	40,00	25.118,38	100,00	68.068,68	100,00	0,00	0,00	100,00	68.069	0,00	0,00	Bappeda	APBD Kab																			
5	01 03 1.01	07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya rapat,asistensi, sosialisasi,koordinasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi kegiatan bidang Kesehatan, PPPA, PPKB, kord.keg. pencngn dan penanganan stunting, serta fasilitasi, verifikasi program Kab.Kota Sehat di semua tingkat wilayah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	%					29	26.292,83	30,09	19.467,60	10,91	12.721,90	30,00	15.801,80	100,00	74.284,13	100,00	0,00	0,00	100,00	74.284	0,00	0,00	Bappeda	APBD Kab																			
5	01 03 1.01	08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya rapat,asistensi, koordinasi dan knsultasi,monitoring dan evaluasi serta terbentuknya tim percepatan peningkatan IPM bid.Pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD,RKPD)	%					4,00	1.673,08	44,00	13.845,20	27,00	8.050	25,00	8.638	100,00	32.206,13	100,00	0,00	0,00	100,00	32.206	0,00	0,00	Bappeda	APBD Kab																			
5	01 03 1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	terlaksananya keg Koordinasi, rapat koordinasi, Asistensi, Monev Penyusunan dok Pere Pembangunan Bid pnnam modal&tenaga perindustrian &perdagangan, pariwisata, koperasi, usaha kecil & menengah, Pertanian, Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan terba	%						100,00																																				
5	01 03 1.02	01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	bulan	0,00	-	0,00	-	3,00	18.519,98	3,00	17.852,50	1,20	21.495	3,60	21.906	10,80	79.773,81	90,00	0,00	0,00	10,80	79.774	0,00	0,00	Bappeda	APBD Kab																			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.																							
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K		Rp (000)		K		Rp (000)		K		Rp (000)		K	Rp (000)	K	Rp (000)			K	Rp (000)																					
									RKPD	APBD	I	II	III	IV	RKPD	APBD																																	
					Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)																												
1	5 01 03 102	02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Tertindaknya asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang perekonomian	paket	0,00	-	0,00	-	1,00	-	0,05	1.800,00	0,16	8.430,00	0,39	17.818	0,20	13.008	0,80	41.056,24	80,00	0,00	0,00	0,80	41.056	0,00	0,00	Bappeda	APBD Kab																				
	5 01 03 102	03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Tertindaknya Monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang perekonomian	paket	0,00	-	0,00	-	1,00	-	0,21	2.935,00	0,09	1.200	0,30	25.171	0,60	29.305,88	60,00	0,00	0,00	0,60	29.306	0,00	0,00	Bappeda	APBD Kab																						
	5 01 03 102	04 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam	Tertindaknya koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam	bulan	12,00	-	-	-	3,00	17.595,20	3,00	9.895,30	3,12	17.390,80	2,28	17.512,83	11,40	62.394,13	95,00	0,00	0,00	11,40	62.394	0,00	0,00	Bappeda	APBD Kab																						
	5 01 03 102	06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Tertindaknya asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam	paket	0,00	-	0,00	-	1,00	-	0,33	3.329,70	0,27	1.230	0,20	3.510	0,80	8.069,19	80,00	0,00	0,00	0,80	8.069	0,00	0,00	Bappeda	APBD Kab																						
	5 01 03 102	07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Tertindaknya Monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam	paket	0,00	-	0,00	-	1,00	-	0,08	2.168,00	0,09	2.312,40	0,18	3.413	0,55	15.551	0,90	23.444,57	90,00	0,00	0,00	0,90	23.445	0,00	0,00	Bappeda	APBD Kab																				
	5 01 03 103	01 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Peningkatan kualitas, kuantitas bidang infrastruktur dan wilayah.	%	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																				
	5 01 03 103	01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Perencanaan, Rapat Koordinasi, Penyusunan Dokumen, Pelatihan, bimbingan teknis serta terbentuknya Tim Perencanaan Pembangunan bidang Infrastruktur	paket	0,00	-	0,00	-	1,00	-	0,15	24.547,20	0,11	10.355,00	0,15	19.665	0,59	78.438	1,00	133.005,48	100,00	0,00	0,00	1,00	133.005	0,00	0,00	Bappeda	APBD Kab																				
	5 01 03 103	02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Rapat Pelaksanaan Kegiatan, asistensi Penyusunan Dokumen, Pelatihan, bimbingan teknis serta implementasi pelaksanaan Perencanaan Pembangunan bidang infrastruktur	paket	0,00	-	0,00	-	1,00	-	0,03	2.500,00	0,18	17.195,00	0,14	10.200	0,65	64.366	1,00	94.260,75	100,00	0,00	0,00	1,00	94.261	0,00	0,00	Bappeda	APBD Kab																				
	5 01 03 103	03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Rapat Monitoring dan evaluasi, asistensi Penyusunan Dokumen, Pelatihan, bimbingan teknis serta implementasi pelaksanaan Perencanaan Pembangunan bidang infrastruktur	paket	0,00	-	0,00	-	1,00	-	0,06	2.500,00	0,491	17.753,00	0,25	8.134,40	0,20	7.032,00	1,00	35.419,40	100,00	0,00	0,00	1,00	35.419	0,00	0,00	Bappeda	APBD Kab																				
	5 01 03 103	04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Sinkronisasi, Harmonisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Bidang infrastruktur	paket	0,00	-	0,00	-	1,00	-	0,10	9.600,00	0,46	23.923,00	0,25	14.554	0,20	13.450	1,00	61.526,90	100,00	0,00	0,00	1,00	61.527	0,00	0,00	Bappeda	APBD Kab																				
	5 01 03 103	06 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah	Rapat Pelaksanaan Kegiatan, asistensi Penyusunan Dokumen, Pelatihan, bimbingan teknis, implementasi pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur, Wilayah dan Penanggulangan Kebencanaan Daerah serta Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Dokumen	2,00	-	-	-	2,00	-	0,24	23.789,00	0,59	46.030,63	0,77	67.530	0,40	28.812	2,00	166.161,23	100,00	0,00	0,00	2,00	166.161	0,00	0,00	Bappeda	APBD Kab																				
	5 01 03 103	06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	Rapat Pelaksanaan Kegiatan, asistensi Penyusunan Dokumen, Pelatihan, bimbingan teknis, implementasi pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Bidang Wilayah	paket	0,00	-	0,00	-	1,00	-	0,08	7.180,00	0,07	5.000,00	0,15	14.169	0,70	64.000	1,00	90.348,50	100,00	0,00	0,00	1,00	90.349	0,00	0,00	Bappeda	APBD Kab																				
	5 01 03 103	07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	Rapat Monitoring dan evaluasi, asistensi Penyusunan Dokumen, Pelatihan, bimbingan teknis serta implementasi pelaksanaan Perencanaan Pembangunan bidang Wilayah	paket	0,00	-	0,00	-	1,00	-	0,04	1.800,00	0,23	3.600,00	0,33	6.504	0,20	2.700	0,80	14.604,00	80,00	0,00	0,00	0,80	14.604	0,00	0,00	Bappeda	APBD Kab																				
	5 01 03 103	08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah	Sinkronisasi, Harmonisasi dan Sinergitas Perencanaan asistensi, Pelatihan, bimbingan teknis, implementasi pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur, Wilayah dan Penanggulangan Kebencanaan Daerah serta Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	paket	0,00	-	0,00	-	1,00	-	0,02	1.800,00	0,37	30.381,10	0,26	22.502	0,30	24.158	0,95	78.841,00	95,00	0,00	0,00	0,95	78.841	0,00	0,00	Bappeda	APBD Kab																				
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																				93,55	0,00	0,00																											
Predikat Kinerja																				ST	SR	SR																											
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN																				-	-	-																											
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)																				93,68	0,00	0,00																											
PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)																				ST	SR	SR																											
1	5 02 01	KEUANGAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	"Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumberdaya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan"																																														
	5 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Dokumen RENJA, RKA, RKAP, DPA, DPAP, Dokumen Laporan Realisasi Fisik Keuangan dan Daftar Gaji Bulanan, Gaji terusan, daftar Kekurangan Gaji, TPP, Administrasi Tugas ASN, LKIP, Penyusunan BKU, Buku Pajak, SPJ Fungsional, SPJ Administratif, dan R																																														
	5 02 01 2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tertindaknya Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	dokumen	1,00	-	-	-	0,10	300	0,23	13.267	0,22	6.119,50	0,40	15.417,50	0,95	35.104,03	95,00	0,00	0,00	0,95	35.104	0,00	0,00	Bapenda	APBD																						
	5 02 01 2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	tersedianya dokumen rencana strategis (renstra) dan dokumen rencana kerja (renja)	dokumen	2,00	-	-	-	1,50	2.774,00	0,00	0	0,10	810,60	0,40	2.097,60	2,00	5.682,20	100,00	0,00	0,00	2,00	5.682	0,00	0,00	BPKD	APBD																						
	5 02 01 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tertindaknya Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi SKPD	dokumen	1,00	-	-	-	0,00	4.620	0,10	4.620	0,10	-	0,00	-	1,00	4.620,00	100,00	0,00	0,00	1,00	4.620	0,00	0,00	Bapenda	APBD																						
	5 02 01 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen rencana kerja anggaran	dokumen	1,00	-	-	-	-	-	-	0,10	580,8	0,90	15.537,30	1,00	16.118,10	100,00	0,00	0,00	1,00	16.118	0,00	0,00	BPKD	APBD																							
	5 02 01 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	tersedianya dokumen perubahan rencana anggaran SKPD	dokumen	1,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	BPKD	APBD																						
	5 02 01 2.01	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Pelaksana Anggaran	dokumen	1,00	-	-	-	0,80	7.268,80	0,20	912,78	0,00	-	0,00	6.142,40	1,00	14.323,98	100,00	0,00	0,00	1,00	14.324	0,00	0,00	BPKD	APBD																						
	5 02 01 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Pelaksana Anggaran Perubahan	dokumen	1,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	BPKD	APBD																						
	5 02 01 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terwujudnya dokumen laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LKIP)	dokumen	1,00	-	-	-	-	-	-	0,60	519,6	0,60	519,6	0,60	519,60	60,00	0,00	0,00	0,60	520	0,00	0,00	BPKD	APBD																							
	5 02 01 2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	tersedianya dokumen evaluasi perangkat daerah dan pelaksanaan monev	bulan	12,00	-	-	-	3,00	19.719,50	3,00	27.714,80	3,00	35.111,98	3,00	44.352,50	12,00	126.898,78	100,00	0,00	0,00	12,00	126.899	0,00	0,00	BPKD	APBD																						
	5 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																																														
	5 02 01 2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya daftar gaji bulanan, gaji terusan, daftar kekurangan gaji, dan TPP	bulan	12,00	-	-	-	3,00	938.156,32	3,00	2.004.048,78	3,00	1.156.268,59	3,00	1.346.462,69	12,00	5.444.936,38	100,00	0,00	0,00	12,00	5.444.936	0,00	0,00	BPKD	APBD																						
	5 02 01 2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	12,00	-	-	-	3,00	819.426	3,00	1.358.818	3,00	898.009,83	3,00	1.026.481,89	12,00	4.102.735,84	100,00	0,00	0,00	12,00	4.102.736	0,00	0,00	Bapenda	APBD																						
	5 02 01 2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tertindaknya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	bulan	12,00	-	-	-	3,00	16.800	3,00	33.331	3,00	33.665,10	3,00	38.383,00	12,00	122.178,90	100,00	0,00	0,00	12,00	122.179	0,00	0,00	Bapenda	APBD																						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.					
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	RKPD		APBD		I		II		III		IV		K	Rp (000)	K	Rp (000)	K			Rp (000)	K	Rp (000)		
									K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)											K	Rp (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=9+10+11+12	14=13/8*100	15=7+13	16=15/6*100	17	18															
5	02	01	2.02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya pembayaran Honorarium Pengelola keuangan BUD, kuasa BUD, PA, PPK, PPTK & staf ASN serta Upah Bagi Jasa Pihak Ketiga	bulan	12,00	-	-	3,00	40.469,20	3,00	37.432,80	3,00	36.818,40	69.218,10	9,00	183.938,50	75,00	0,00	0,00	9,00	183.939	0,00	0,00	BPKD	APBD					
5	02	01	2.02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	bulan	12,00	-	-	3,00	17.820	3,00	44.118	3,00	47.723,00	50.932,50	12,00	160.593,60	100,00	0,00	0,00	12,00	160.594	0,00	0,00	Bapenda	APBD					
5	02	01	2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	bulan	12,00	-	-	3,00	1.328	3,00	3.961,00	3,00	-	12,00	5.289,00	100,00	0,00	0,00	12,00	5.289	0,00	0,00	Bapenda	APBD						
5	02	01	2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	dokumen	1,00	-	-	0,90	4.878,90	0,10	732,50	-	-	1,00	5.611,40	100,00	0,00	0,00	1,00	5.611	0,00	0,00	BPKD	APBD						
5	02	01	2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya BKU, Buku Pajak, SPJ Fungsional, SPJ Administratif, dan Buku Rincian Objek realisasi semesteran	dokumen	1,00	-	-	1,00	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	BPKD	APBD						
5	02	01	2.02	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya dokumen Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	semester	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	BPKD	APBD						
5	02	01	2.02	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran																											
5	02	01	2.02	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya data administrasi kepegawaian	bulan	12,00	-	-	3,00	1.800,00	3,00	2.130,00	3,00	4.500,00	2.700,00	12,00	11.130,00	100,00	0,00	0,00	12,00	11.130	0,00	0,00	BPKD	APBD					
5	02	01	2.02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya Kedisiplinan dan Peningkatan kualitas SDM bagi ASN yang mengikuti DIKLAT Kepemimpinan	orang	1,00	-	-	1,00	22.125,00	-	-	-	-	0,00	-	1,00	22.125,00	100,00	0,00	0,00	1,00	22.125	0,00	0,00	BPKD	APBD				
2	3.00	1	2.05	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	orang	10,00	-	-	0,00	-	1,00	270	-	-	0,00	-	1,00	270,00	10,00	0,00	0,00	1,00	270	0,00	0,00	Bapenda	APBD				
5	02	01	2.02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur bagi ASN yang mengikuti sosialisasi	orang	6,00	-	-	-	-	-	2,40	495	3,60	952,5	6,00	1.447,50	100,00	0,00	0,00	6,00	1.448	0,00	0,00	BPKD	APBD					
5	02	01	2.03	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pembayaran Jasa Rekening Air Listrik, Pajak STNK Kendaraan Roda Dua dan Empat, Honorarium Pengelola Keuangan, Pembayaran Jasa Kebersihan Kantor, ATK, Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan, Pengadaan Mobil Jabatan, Kendaraan Dinas Roda Du																											
5	02	01	2.03	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik BPKD	paket	0,00	-	0,00	-	1,00	-	-	0,40	1.822,50	0,00	-	0,20	2.914	0,25	960	0,85	5.696,50	85,00	0,00	0,00	0,85	5.697	0,00	0,00	BPKD	APBD
2	3.00	1	2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	bulan	12,00	-	-	3,00	-	3,00	1.518	3,00	1.914,00	3,00	1.001,00	12,00	4.433,00	100,00	0,00	0,00	12,00	4.433	0,00	0,00	Bapenda	APBD				
5	02	01	2.03	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	-	3,00	4.400,00	3,00	1.050,00	3,00	23.740	12,00	33.590,00	100,00	0,00	0,00	12,00	33.590	0,00	0,00	BPKD	APBD			
2	3.00	1	2.06	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	bulan	12,00	-	-	3,00	-	-	1.702	3,00	-	-	3,00	1.701,90	100,00	0,00	0,00	12,00	1.702	0,00	0,00	Bapenda	APBD					
5	02	01	2.03	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	paket	1,00	-	-	-	0,20	1.978,00	0,13	0	0,67	4.128,85	-	1,00	6.106,65	100,00	0,00	0,00	1,00	6.107	0,00	0,00	BPKD	APBD				
5	02	01	2.03	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor BPKD	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	-	3,00	3,00	191.380,00	3,00	-	3,00	79.642	12,00	271.022,00	100,00	0,00	0,00	12,00	271.022	0,00	0,00	BPKD	APBD		
2	3.00	1	2.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	bulan	12,00	-	-	3,00	30.626	3,00	71.420	3,00	75.370,33	3,00	50.122,60	12,00	227.539,25	100,00	0,00	0,00	12,00	227.539	0,00	0,00	Bapenda	APBD				
2	3.00	1	2.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	bulan	12,00	-	-	3,00	13.090	3,00	91.300	3,00	69.080,00	3,00	69.646,50	12,00	243.116,50	100,00	0,00	0,00	12,00	243.117	0,00	0,00	Bapenda	APBD				
5	02	01	2.03	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Spanduk dan Penggandaan	bulan	12,00	-	-	3,00	3.400,00	3,00	2.420,50	3,00	3.250,00	3,00	5.212,50	12,00	14.283,00	100,00	0,00	0,00	12,00	14.283	0,00	0,00	BPKD	APBD				
5	02	01	2.03	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Belanja Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	-	3,00	160,00	3,00	320	3,00	320	12,00	960,00	100,00	0,00	0,00	12,00	960	0,00	0,00	BPKD	APBD			
2	3.00	1	2.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bulan	12,00	-	-	3,00	-	3,00	350	3,00	-	-	3,00	-	12,00	350,00	100,00	0,00	0,00	12,00	350	0,00	0,00	Bapenda	APBD			
5	02	01	2.06	8 Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman	bulan	12,00	-	-	3,00	-	3,00	4.061	3,00	2.027,96	3,00	2.027,96	12,00	8.116,79	100,00	0,00	0,00	12,00	8.117	0,00	0,00	Bapenda	APBD				
5	02	01	2.03	8 Fasilitas Kunjungan Tamu	tersedianya makan minum tamu dan rapat	bulan	12,00	-	-	3,00	2.275,00	3,00	11.000,00	3,00	14.640	3,00	15.624	12,00	43.539,00	100,00	0,00	0,00	12,00	43.539	0,00	0,00	BPKD	APBD				
5	02	01	2.03	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	bulan	12,00	-	-	3,00	19.526,89	3,00	29.656,75	3,00	27.074	3,00	32.902	12,00	109.159,79	100,00	0,00	0,00	12,00	109.160	0,00	0,00	BPKD	APBD				
2	3.00	1	2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	bulan	12,00	-	-	3,00	26.970	3,00	14.283	3,00	30.643,60	3,00	56.112,00	12,00	128.009,00	100,00	0,00	0,00	12,00	128.009	0,00	0,00	Bapenda	APBD				
5	02	01	2.04	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pembayaran Jasa Rekening Air Listrik, Pajak STNK Kendaraan Roda Dua dan Empat, Honorarium Pengelola Keuangan, Pembayaran Jasa Kebersihan Kantor, ATK, Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan, Pengadaan Mobil Jabatan, Kendaraan Dinas Roda Du																											
5	02	01	2.04	1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Mobil Jabatan Eselon II	unit	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	BPKD	APBD					
5	02	01	2.04	2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional roda 2 (dua)	unit	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	BPKD	APBD					
2	3.00	1	2.07	2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas operasional	unit	1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bapenda	APBD					
2	3.00	1	2.07	5 Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebeled Kantor	buah	22,00	-	-	-	-	20,90	16.500	0,00	-	0,00	-	20,90	16.500,00	95,00	0,00	0,00	20,90	16.500	0,00	0,00	Bapenda	APBD				
5	02	01	2.04	5 Pengadaan Mebel	Tersedianya Mobiler seperti Meja/Kursi kerja BPKD	buah	22,00	-	-	-	-	-	2,20	7,250	19,80	129,965	22,00	137.215,00	100,00	0,00	0,00	22,00	137.215	0,00	0,00	BPKD	APBD					
5	02	01	2.04	6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor BPKD	unit	10,00	-	-	-	-	-	1,00	10.850	9,00	247.695	10,00	258.545,00	100,00	0,00	0,00	10,00	258.545	0,00	0,00	BPKD	APBD					
5	02	01	2.04	7 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pagor, Pintu Gerbang, dan Papan Nama Kantor	paket	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	BPKD	APBD					
2	3.00	1	2.07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya peralatan gedung Kantor	unit	30,00	-	-	0,00	-	3,33	3.449	-	16,17	61.210	19,50	64.658,50	65,00	0,00	0,00	19,50	64.659	0,00	0,00	Bapenda	APBD					
2	3.00	1	2.07	11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	paket	2,00	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	2,00	4.799,774	2,00	4.799,77	100,00	0,00	0,00	2,00	4.800	0,00	0,00	Bapenda	APBD			
5	02	01	2.05	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pembayaran Jasa Rekening Air Listrik, Pajak STNK Kendaraan Roda Dua dan Empat, Honorarium Pengelola Keuangan, Pembayaran Jasa Kebersihan Kantor, ATK, Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan, Pengadaan Mobil Jabatan, Kendaraan Dinas Roda Du																											
5	02	01	2.05	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran tagihan Jasa rekening Air dan Listrik BPKD	bulan	12,00	-	-	3,00	32.041,74	3,00	32.302,66	3,00	32.647	3,00	32.535	12,00	129.526,37	100,00	0,00	0,00	12,00	129.526	0,00	0,00	BPKD	APBD				
2	3.00	1	2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12,00	-	-	3,00	23.096	3,00	21.812	3,00	22.431,39	3,00	25.352,01	12,00	92.691,53	100,00	0,00	0,00	12,00	92.692	0,00	0,00	Bapenda	APBD				
2	3.00	1	2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	bulan	12,00	-	-	3,00	12.500	3,																				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.							
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	I		II		III		IV		K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K			Rp (000)						
									RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)													K	Rp (000)				
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K			Rp (000)						
5	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	OPD			46	-	-				23	5976	13,80	28139	36,80	34.115,00	80,00	0,00	0,00	36,80	34.115	0,00	0,00	BPKD	APBD						
5	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	dokumen			2	-	-	0,8	150.687,18	0,5	86.138,80					18.272,00	0,60	113.459,50	1,90	368.557,48	95,00	0,00	0,00	1,90	368.557	0,00	0,00	BPKD	APBD		
5	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	dokumen			2	-	-					11522	1,80	216271,32	1,80	227.793,32	90,00	0,00	0,00	1,80	227.793	0,00	0,00	1,80	227.793	0,00	0,00	BPKD	APBD		
5	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	dokumen			2	-	-			0,4	7.690,00	0,3	6.992,00	0,80	80.660,28	1,50	95.342,28	75,00	0,00	0,00	1,50	95.342	0,00	0,00	1,50	95.342	0,00	0,00	BPKD	APBD	
5	02	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	bulan			12	-	-	3	51.261,90	3	111.519,28	3	120.306,00	3,00	93.585,00	12,00	376.672,18	100,00	0,00	0,00	12,00	376.672	0,00	0,00	12,00	376.672	0,00	0,00	BPKD	APBD	
5	02	2.01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	bulan			12	-	-	3	13.753,40	3	13.275,50	3	21.816,00	3,00	24.392,70	12,00	73.237,60	100,00	0,00	0,00	12,00	73.238	0,00	0,00	12,00	73.238	0,00	0,00	BPKD	APBD	
5	02	2.01	13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	bulan			12	-	-	3		3		3	0	3,00	46087,2	12,00	46.087,20	100,00	0,00	0,00	12,00	46.087	0,00	0,00	12,00	46.087	0,00	0,00	BPKD	APBD	
5	02	2.02	02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah																														
5	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	bulan			12	-	-	3	16.491,93	3	4.612,77	3	11.376,59	3,00	51.000,28	12,00	83.481,57	100,00	0,00	0,00	12,00	83.482	0,00	0,00	12,00	83.482	0,00	0,00	BPKD	APBD	
5	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	bulan			12	-	-	3	8.152,00	3	7.010,50	3	22.345,64	3,00	23.113,70	12,00	60.621,84	100,00	0,00	0,00	12,00	60.622	0,00	0,00	12,00	60.622	0,00	0,00	BPKD	APBD	
5	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	dokumen			4	-	-	0,32	13.911,39	0,68	28.376,10			45.414,00	3,00	46.402,32	4,00	134.103,81	100,00	0,00	0,00	4,00	134.104	0,00	0,00					BPKD	APBD
5	02	2.02	08	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	bulan			12	-	-	3	28.039,50	3	29.116,50	3	14.604,00	3,00	52.654,30	12,00	124.414,30	100,00	0,00	0,00	12,00	124.414	0,00	0,00	12,00	124.414	0,00	0,00	BPKD	APBD	
5	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	dokumen			2	-	-	0,38	22.226,39	0,22	11.700,00			19.045,00	1,40	177.535,85	2,00	230.507,24	100,00	0,00	0,00	2,00	230.507	0,00	0,00					BPKD	APBD
5	02	2.03	02	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah																														
5	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	dokumen			2	-	-	0,5	30.053,70	0,5	25.982,96			41.414,99	1,00	44.653,93	2,00	142.105,58	100,00	0,00	0,00	2,00	142.106	0,00	0,00	2,00	142.106	0,00	0,00	BPKD	APBD
5	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	dokumen			2	-	-	0,32	13.062,00	1,48	20.237,00				0,20	4.470,00	2,00	37.769,00	100,00	0,00	0,00	2,00	37.769	0,00	0,00	2,00	37.769	0,00	0,00	BPKD	APBD
5	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	dokumen			2	-	-	0,5	11.023,25	1	9.422,50			4.112,00	0,50	8.727,05	2,00	33.284,80	100,00	0,00	0,00	2,00	33.285	0,00	0,00	2,00	33.285	0,00	0,00	BPKD	APBD
5	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	dokumen			1	-	-		0,75	41.001,90			10.606,00	0,25	8.352,50	1,00	59.960,40	100,00	0,00	0,00	1,00	59.960	0,00	0,00	1,00	59.960	0,00	0,00	BPKD	APBD	
5	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	dokumen			1	-	-					71972,8	1,00	18242,6	1,00	90.215,40	100,00	0,00	0,00	1,00	90.215	0,00	0,00	1,00	90.215	0,00	0,00	BPKD	APBD		
5	02	2.03	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	dokumen			2	-	-									0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	BPKD	APBD	
5	02	2.03	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	dokumen			1	-	-		0,116	3.138,30			14.850,00	0,78	16.501,00	0,90	34.489,30	90,00	0,00	0,00	0,90	34.489	0,00	0,00	0,90	34.489	0,00	0,00	BPKD	APBD	
5	02	2.03	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	dokumen			2	-	-	0,3	10.779,00	0,9	14.276,26			15.408,90	0,80	4.800,00	2,00	45.264,16	100,00	0,00	0,00	2,00	45.264	0,00	0,00	2,00	45.264	0,00	0,00	BPKD	APBD
5	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	dokumen			1	-	-					10830,5	1,00	31304,89	1,00	42.135,39	100,00	0,00	0,00	1,00	42.135	0,00	0,00	1,00	42.135	0,00	0,00	BPKD	APBD		
5	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	dokumen			1	-	-	0,2	16.250,00	0,35	26.587,53			24.035,00	0,45	18.079,00	1,00	84.951,52	100,00	0,00	0,00	1,00	84.952	0,00	0,00	1,00	84.952	0,00	0,00	BPKD	APBD
5	02	2.03	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	dokumen BLUD			1	-	-	0,09	3.789,00	0,16	3.805,00			10.810,41	0,75	12.928,85	1,00	31.333,26	100,00	0,00	0,00	1,00	31.333	0,00	0,00	1,00	31.333	0,00	0,00	BPKD	APBD
5	02	2.03	13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	dokumen			1	-	-	0,00		0,00						0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	BPKD	APBD	
				Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	%			95																										
				Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Tahun			1	-	-	0,00		0,00		50.884,623	1	125.964,423	1,00	176.849,045,79	100,00	0,00	0,00	1,00	176.849,046	0,00	0,00	1,00	176.849,046	0,00	0,00	BPKD	APBD		
				Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Tahun			1	-	-	0,00		0,00		101.767	0	35.991	0,20	137.758,26	20,00	0,00	0,00	0,20	137.758	0,00	0,00	0,20	137.758	0,00	0,00	BPKD	APBD		
				Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Tahun			1	-	-	0,00		0,00		1.399,016	1	6.840,663	0,75	8.239,678,30	75,00	0,00	0,00	0,75	8.239,678	0,00	0,00	0,75	8.239,678	0,00	0,00	BPKD	APBD		
5	02	2.03	11	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	%			95																										
5	02	2.03	12	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Sistem Informasi			1	-	-	0,09	31.046,00	0,53	26.615,23			9.000,00	0,38	26.119,00	1,00	94.780,23	100,00	0,00	0,00	1,00	94.780	0,00	0,00	1,00	94.780	0,00	0,00	BPKD	APBD
5	02	2.03	13	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	OPD			46	-	-			34,5	158.223,25					43,70	158.223,25	95,00	0,00	0,00	43,70	158.223	0,00	0,00	43,70	158.223	0,00	0,00	BPKD	APBD	
													Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				92,81	0,00	0,00			0,00	0,00											
													Predikat Kinerja				ST	SR	SR			SR	SR											

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.					
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	I		II		III		IV		K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)			K	Rp (000)			
									RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)													K	Rp (000)	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=9+10+11+12	14=13/8*100	15=7+13	16=15/6*100	17	18									
4	5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya Pendapatan Daerah sebagai sumber Pembiayaan Pembangunan yang berkelanjutan																												
	5 02 04 2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Penerimaan PAD																												
	5 02 04 2.01 3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Tertindakannya Penusunan standarisasi Kebijakan operasional dan penagihan pajak- pajak Daerah	bulan			12	-	-	3,00	14.795,00	3,00	31.456,80	3,00	35.069,80	3,00	24.762,40	12,00	106.084,00	100,00	0,00	0,00	12,00	106.084	0,00	0,00	Bapenda	APBD			
	5 02 04 2.01 4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tertindakannya Pelayanan Pajak Daerah (PBB) yang berbasis Teknologi Informasi	bulan			12	-	-	3,00	21.100,00	3,00	47.584,96	3,00	52.472,40	3,00	197.730,20	12,00	318.887,56	100,00	0,00	0,00	12,00	318.888	0,00	0,00	Bapenda	APBD			
	5 02 04 2.01 5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Tertindakannya pendataan wajib pajak dan Retribusi Daerah yang Optima	bulan			12	-	-	3,00	28.425,00	3,00	41.364,00	3,00	58.077,00	3,00	49.788,00	12,00	177.654,00	100,00	0,00	0,00	12,00	177.654	0,00	0,00	Bapenda	APBD			
	5 02 04 2.01 6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Tersedianya Basis Data Pajak Daerah Yang Up to Date	bulan			12	-	-	3,00	150.820,00	3,00	73.940,08	3,00	96.770,85	3,00	121.964,50	12,00	443.495,43	100,00	0,00	0,00	12,00	443.495	0,00	0,00	Bapenda	APBD			
	5 02 04 2.01 8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Tertindakannya Evaluasi Kebijakan tentang Sistem Administrasi Pelayanan dan Tersusunnya Surat Ketetapan	bulan			12	-	-	3,00	18.345,00	3,00	30.111,25	3,00	18.405,75	3,00	24.703,05	12,00	91.565,05	100,00	0,00	0,00	12,00	91.565	0,00	0,00	Bapenda	APBD			
	5 02 04 2.01 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Terwujudnya Penatausahaan,pembukuan,pelaporan dan rekonsiliasi PAD Sesuai Standar Akuntansi	bulan			12	-	-	3,00	79.450,00	3,00	18.918,00	3,00	19.050,50	3,00	(775,50)	12,00	116.643,00	100,00	0,00	0,00	12,00	116.643	0,00	0,00	Bapenda	APBD			
	5 02 04 2.01 11	Penagihan Pajak Daerah	Tertindakannya Penusunan standarisasi Kebijakan operasional dan penagihan pajak- pajak Daerah	bulan			12	-	-	3,00	29.413,10	3,00	431.806,21	3,00	514.009,22	3,00	968.642,12	12,00	1.943.870,85	100,00	0,00	0,00	12,00	1.943.871	0,00	0,00	Bapenda	APBD			
	5 02 04 2.01 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Tertindakannya Pemeriksaan, Pengawasan pajak dan Uji Petik	bulan			12	-	-	3,00	12.801,00	3,00	60.722,00	3,00	58.806,50	3,00	106.433,00	12,00	238.762,50	100,00	0,00	0,00	12,00	238.763	0,00	0,00	Bapenda	APBD			
	5 02 04 2.01 14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tertindakannya Monitoring dan evaluasi Pemungutan Retribusi Daerah	bulan			12	-	-	3,00	42.059,88	3,00	83.284,88	3,00	61.514,75	3,00	93.729,75	12,00	280.589,25	100,00	0,00	0,00	12,00	280.589	0,00	0,00	Bapenda	APBD			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													100,00	0,00	0,00																
Predikat Kinerja													ST	SR	SR																
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN													-	-	-	3.054.841,91	5.781.375,87	56.590.375	139.922.415	205.349.008											
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 4)													95,83	0,00	0,00																
PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 4)													ST	SR	SR																
1	5 03	KEPEGAWAIAN																													
	5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Jumlah aparat pemerintah daerah yang menyelesaikan jenjang pendidikan formal S1, S2, dan S3, bangunan gedung TIK, prasarana pendukung akses jaringan TIK, prasarana pendukung Meblelur gedung diklat, aparat yang memperoleh penghargaan, serta aparat	Orang/Paket			299																								
	5 03 02 2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Tercapainya Persentase hasil pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	%			100																								
	5 03 02 2.01 03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Tertindakannya Penusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN	paket			1	-	-	0,04	10.285	0,11	30.136,97	0,199	28.078,19	0,65	166.967,63	1,00	235.467,78	100,00	0,00	0,00	1,00	235.468	0,00	0,00	BKPSDM	APBD			
	5 03 02 2.01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Pegawai	Tertindakannya Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	paket			1	-	-	0,09	13.274	0,06	26.086,000	0,449	42.046,600	0,4	66.892,200	1,00	148.298,52	100,00	0,00	0,00	1,00	148.299	0,00	0,00	BKPSDM	APBD			
	5 03 02 2.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tertindakannya Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	paket			1	-	-	0,00	-	0,05	8953,112	0,94	3056,9	0,01	-100	1,00	11.810,01	100,00	0,00	0,00	1,00	11.810	0,00	0,00	BKPSDM	APBD			
	5 03 02 2.01 12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Tertindakannya Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN dan Manajemen Naskah dan Dokumen ASN	paket			1	-	-	0,04	11.550	0,06	17.661,57	0,45	16.913,60	0,45	42.449,60	1,00	88.574,77	100,00	0,00	0,00	1,00	88.575	0,00	0,00	BKPSDM	APBD			
	5 03 02 2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Tercapainya Persentase penyelesaian penempatan,pengangkatan,mutasi jabatan dan pengelolaan penempatan dalam jabatan ASN,Pengelolaan Naiknakan Pangkat Reguler,pilihan pemberhentian PNS dengan hak pensiun dan pemberian kenaikan pangkat pengabdian ASN	%			100																								
	5 03 02 2.02 01	Pengelolaan Mutasi ASN	Tertindakannya Penyelesaian Penempatan, Pengangkatan, Mutasi Jabatan dan Keangkatan, Penataan dan Mutasi Jabatan serta Pengelolaan Penempatan dalam Jabatan ASN	paket			1	-	-	0,14	31.449	0,16	49.069,29	0,35	20.455,00	0,15	27.530,68	0,80	128.503,54	80,00	0,00	0,00	0,80	128.504	0,00	0,00	BKPSDM	APBD			
	5 03 02 2.02 02	Pengelolaan Naiknakan Pangkat ASN	Tertindakannya Pengelolaan Naiknakan Pangkat Reguler,pilihan pemberhentian PNS dengan hak pensiun dan pemberian kenaikan pangkat pengabdian ASN,serta Tertindakannya Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun	paket			1	-	-	0,15	31.392	0,15	41.067,02	0,35	50.688,70	0,35	76.145,70	1,00	199.293,15	100,00	0,00	0,00	1,00	199.293	0,00	0,00	BKPSDM	APBD			
	5 03 02 2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase peningkatan pengembangan Kompetensi ASN	%			100																								
	5 03 02 2.03 03	Pengelolaan Assessment Center	Tertindakannya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	paket			1	-	-						1	199.941,18	1,00	199.941,18	100,00	0,00	0,00	1,00	199.941	0,00	0,00	BKPSDM	APBD				
	5 03 02 2.03 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Tertindakannya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	paket			1	-	-	0,06	6.910	0,04	5.260	0,2	3.190	0,7	51.623	1,00	66.982,90	100,00	0,00	0,00	1,00	66.983	0,00	0,00	BKPSDM	APBD			
	5 03 02 2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Meningkatnya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	%			100																								
	5 03 02 2.01 02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pengembangan Penilaian Kinerja ASN	paket			1	-	-	0,07	1.850	0,34	682,40	0,25	307,50	0,35	2.050,00	1,00	4.899,90	100,00	0,00	0,00	1,00	4.890	0,00	0,00	BKPSDM	APBD			
	5 03 02 2.01 04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Tertindakannya Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan	ASN			200	-	-	38,00	10.510	62,00	3.270	60	1.000	40	3.331	200,00	18.110,70	100,00	0,00	0,00	200,00	18.111	0,00	0,00	BKPSDM	APBD			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													98,00	0,00	0,00																
Predikat Kinerja													ST	SR	SR																
2		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparat, disiplin aparat, kapasitas sumberdaya aparat, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan*	%			100																								
	5 03 02 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Penyusunan Renstra Renja RKA RKAP DPA DPAP SKPD	%			100																								
	5 03 02	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tertindakannya penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	dokumen			2	-	-	0,13	600	0,03	900	0,44	2.190	1,30	7.540	1,90	11.230,00	95,00	0,00	0,00	1,90	11.230	0,00	0,00	BKPSDM	APBD			
	5 03 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya RKA dan RKAP SKPD	dokumen			2	-	-			1,00	400	0,8	598	0,00	0	1,80	998,00	90,00	0,00	0,00	1,80	998	0,00	0,00	BKPSDM	APBD			
	5 03 02	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya DPA dan DPAP SKPD	dokumen			2	-	-	1,00	400	0,8	250	0,20	115,5	2,00	765,50	100,00	0,00	0,00	2,00	250	766	0,00	0,00	BKPSDM	APBD				
	5 03 02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen LAKIP Dan Perjanjian Kinerja	dokumen			2	-	-	1,00	200	1	1476,8	0,00	0	2,00	1.676,80	100,00	0,00	0,00	2,00	1.677	0,00	0,00	BKPSDM	APBD					
	5 03 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%			100																								
	5 03 02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN BKPSDM	bulan			12	-	-	3	718.032	3,00	1.108.658,65	4,8	763.063,52	1,20	879.821,87	12,00	3.469.576,24	100,00	0,00	0,00	12,00	3.469.576	0,00	0,00	BKPSDM	APBD			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.				
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	I		II		III		IV		K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K			Rp (000)	K	Rp (000)	
									RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)															K
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=9+10+11+12	14=13/8*100	15=7+13	16=15/6*100	17	18									
5	03	02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya jasa administrasi keuangan	bulan			12				3	18.300	3,00	11.892,50	4,8	20.010,00	1,20	10.877,50	12,00	61.080,00	100,00	0,00	0,00	12,00	61.080	0,00	0,00	BKPSDM	APBD	
5	03	02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Akhir Tahun	dokumen			1						1,00	1130,4	0	0	0,00	0	1,00	1.130,40	100,00	0,00	0,00	1,00	1.130	0,00	0,00	BKPSDM	APBD	
5	03	02	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapainya Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ,pengetahuan dan kompetensi sumber daya manusia	%			100																							
5	03	02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tertindakannya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	kegiatan			1				0,32	7.795	0,18	2.525	0,4	-	0,10	1.140	1,00	11.460,00	100,00	0,00	0,00	1,00	11.460	0,00	0,00	BKPSDM	APBD	
5	03	02	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Jasa administrasi surat Keuangan kebersihan kantor Komunikasi Listrik Pengadaan kendaraan Dinas Peralatan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Kendaraan Mebeleur Gedung Kantor dan Rehabilitasi Berat Gedung Kantor	%			100																							
5	03	02	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya instalasi listrik dan kebutuhan bangunan kantor	paket			1							1	500	0,00	0	1,00	500,00	100,00	0,00	0,00	1,00	500	0,00	0,00	BKPSDM	APBD		
5	03	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	paket			7				0,63	3.101	5,20	31.900,000	0,4669	-	0,70	11.495,000	7,00	46.495,63	100,00	0,00	0,00	7,00	46.496	0,00	0,00	BKPSDM	APBD	
5	03	02	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Makanan Minuman Rapat	bulan			12				3	6.400	3,00	18.425,10	3	12.500,50	3,00	12.743,25	12,00	50.068,85	100,00	0,00	0,00	12,00	50.069	0,00	0,00	BKPSDM	APBD	
5	03	02	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Tersedianya Cetak dan Pengadaan	bulan			12				3	1.050	3,00	1.673,20	3	1.137,80	3,00	1.300,00	12,00	5.161,00	100,00	0,00	0,00	12,00	5.161	0,00	0,00	BKPSDM	APBD	
5	03	02	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	koran			1					3,400	0,15	600	0,849	-	0,00	-	1,00	4.000,00	100,00	0,00	0,00	1,00	4.000	0,00	0,00	BKPSDM	APBD	
5	03	02	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tertindakannya Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	bulan			12				3	40.984	3,00	43.458,02	3	18.871,88	3,00	65.899,08	12,00	169.212,92	100,00	0,00	0,00	12,00	169.213	0,00	0,00	BKPSDM	APBD	
5	03	02	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa administrasi surat Keuangan kebersihan kantor Komunikasi Listrik Pengadaan kendaraan Dinas Peralatan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Kendaraan Mebeleur Gedung Kantor dan Rehabilitasi Berat Gedung Kantor	%			100																							
5	03	02	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebeleur	unit			2				1,91	9.860	0,03	-	0,06	-	0,00	-	2,00	9.860,00	100,00	0,00	0,00	2,00	9.860	0,00	0,00	BKPSDM	APBD	
5	03	02	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa administrasi surat Keuangan kebersihan kantor Komunikasi Listrik Pengadaan kendaraan Dinas Peralatan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Kendaraan Mebeleur Gedung Kantor dan Rehabilitasi Berat Gedung Kantor	%			100																							
5	03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi,air dan listrik	bulan			12				3	41.101	3,00	46.997,36	3	49.334,34	3,00	49.308,04	12,00	186.740,72	100,00	0,00	0,00	12,00	186.741	0,00	0,00	BKPSDM	APBD	
5	03	02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terjaganya kebersihan kantor	bulan			12				3	6.000	3,00	6.000	3	6.000	3,00	6.000	12,00	24.000,00	100,00	0,00	0,00	12,00	24.000	0,00	0,00	BKPSDM	APBD	
5	03	02	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa administrasi surat Keuangan kebersihan kantor Komunikasi Listrik Pengadaan kendaraan Dinas Peralatan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Kendaraan Mebeleur Gedung Kantor dan Rehabilitasi Berat Gedung Kantor	%			100																							
5	03	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Mobil Jabatan	unit			1				0,08	3.500	0,42	1.103,75	1.930,00	0,50	6.380,00	1,00	12.913,75	100,00	0,00	0,00	1,00	12.914	0,00	0,00	BKPSDM	APBD		
5	03	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	unit			23				2,70	2.710	8,80	3.892,72	6,9	784,95	4,60	2.509,75	23,00	9.897,42	100,00	0,00	0,00	23,00	9.897	0,00	0,00	BKPSDM	APBD	
5	03	02	Pemeliharaan Mebel	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur	unit			25				-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	BKPSDM	APBD		
5	03	02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	unit			24				8,88	1.950	0,72	-	10,8	1.250	3,60	385	24,00	3.585,00	100,00	0,00	0,00	24,00	3.585	0,00	0,00	BKPSDM	APBD	
5	03	02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala dan Rehabilitasi gedung kantor	paket			2				-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	BKPSDM	APBD		
					Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	99,25	0,00	0,00		0,00	0,00				
					Predikat Kinerja																	ST	SR	SR		SR	SR				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN					-	-			982.001,76				1.462.243,06			1.045.634,07			1.692.345,77			5.182.224,66									
					TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)																	98,63	0,00	0,00		0,00	0,00				
					PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)																	ST	SR	SR		SR	SR				
3	5	04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Jumlah aparatur pemerintah daerah yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional, pendidikan dan pelatihan prajabatan, pendidikan dan pelatihan teknis, aparatur pemerintah desa yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis, serta Apar																											
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Jumlah aparatur pemerintah daerah yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional, pendidikan dan pelatihan prajabatan, pendidikan dan pelatihan teknis, aparatur pemerintah desa yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis, serta Apar	orang			1513																							
5	04	02	2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Terpenuhinya dan terselenggaranya Penyusunan Kebijakan Teknis Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	%			100																							
5	04	02	2.01 04 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Tertindakannya Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pe	paket			1,00				0,04	400	0,46	2.391,47	0,5	2.580	0,00	-	1,00	5.371,47	100,00	0,00	0,00	1,00	5.371	0,00	0,00	BKPSDM		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.							
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	I		II		III		IV		K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)			K	Rp (000)					
									K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)													K	Rp (000)			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 2)													93,89	0,00	0,00																		
PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 2)													ST	SR	SR																		
1	6	1	2	0.00	UNSUB PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAH AN																												
1	6	1	2	0.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN																												
					% peningkatan tindak lanjut temuan, Opini BPK atas LKD dlm Pengawasan SKPD, Akunt. Kinerja Pemerintah, Pengawasan Dlm Pengawasan SKPD thdp pdmpingan SKPD pd Ev-SAKIP, Pringkat LPPD Kab.Blk dlm Pengawasan SKPD thdp Pndampingan SKPD atas LPJ Pemb. Daerah, Level K		100																										
					Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan Internal		100																										
					1 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		100		0,00	10,5	10.500	14,5	32.400	50,00	46.500	75,00	89.400,00	75,00	0,00	0,00	75,00	89.400	0,00	0,00									
					Terlaksananya audit IT PBJ Terlaksananya audit kepatuhan PBJ Terlaksananya audit kepatuhan penyelenggaraan perizinan Terlaksananya audit kepegawaian Terlaksananya audit probity Terlaksananya evaluasi perencanaan dan penganggaran responsive gender Terlaks		100																				Inspektorat	APBD Kab					
					2 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		100		20	199.620	25,00	86.325	5	1.410	46,03	371.385	96,03	658.740,00	96,03	0,00	0,00	96,03	658.740	0,00	0,00								
					Terlaksananya pemeriksaan dana BOS Terlaksananya pemeriksaan fisik dan keuangan OPD Terlaksananya pemeriksaan penutupan kas dan stock oprname Terlaksananya pengawasan audit operasional OPD		100																				Inspektorat	APBD Kab					
					3 Reviu Laporan Kinerja		100		0,00	45	26.100	25	30.900	23,78	78.600	93,78	135.600,00	93,78	0,00	0,00	93,78	135.600	0,00	0,00									
					Terlaksananya koordinasi reviu laporan kinerja Terlaksananya reviu atas kepatuhan BMD Terlaksananya reviu LKJIP Terlaksananya reviu LPPD Terlaksananya reviu Renstra Terlaksananya reviu RKPD Perubahan 2021 dan RKPD 2022 Terlaksananya reviu RPJMD		100																				Inspektorat	APBD Kab					
					4 Reviu Laporan Keuangan		100		0,00	45	79.780	10	49.800	31,67	73.500	86,67	203.080,00	86,67	0,00	0,00	86,67	203.080	0,00	0,00									
					Terlaksananya reviu ASB dan HSPK Terlaksananya reviu DAK SKPD Terlaksananya reviu KUPA dan PPAS Terlaksananya reviu KPDP Terlaksananya reviu penyerapan anggaran, barang jasa dan dana desa Terlaksananya reviu RKA Perubahan dan RKA Pokok 2021		100																				Inspektorat	APBD Kab					
					5 Pengawasan Desa		100		4	0,00	-	-	-	-	93,98	188.100	97,98	188.100,00	97,98	0,00	0,00	97,98	188.100	0,00	0,00								
					7 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		100		-	-	-	55	56190	28,33	37.910	83,33	94.100,00	83,33	0,00	0,00	83,33	94.100	0,00	0,00									
					Meningkatnya penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu		100																				Inspektorat	APBD Kab					
					2 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		100		9	21.000	53,00	76.500	13	34.800	22,29	50.400	97,29	182.700,00	97,29	0,00	0,00	97,29	182.700	0,00	0,00								
					Terlaksananya audit dengan tujuan tertentu dan pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat		100																				Inspektorat	APBD Kab					
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													90,01	0,00	0,00																		
Predikat Kinerja													T	SR	SR																		
2	6	1	3	0.00	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI																												
2	6	1	3	0.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan		15																										
					Terselenggaranya coaching clinic manajemen risiko, kegiatan sosialisasi SPIP bagi Kades se-Blk, sosialisasi SPIP bagi Kepek SD SMP se-Blk, sosialisasi SPIP bagi OPD lingkup Pemda Blk, dan Terlaksananya pendampingan FCP, koordinasi manajemen resiko serta		12																										
					2 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan		100		0,00	0,00	-	-	33,00	66.139	33,00	66.139,48	33,00	0,00	0,00	33,00	66.139	0,00	0,00										
					Terlaksananya coaching clinic manajemen risiko, kegiatan sosialisasi SPIP bagi Kades se-Blk, sosialisasi SPIP bagi Kepek SD SMP se-Blk, sosialisasi SPIP bagi OPD lingkup Pemda Blk, dan Terlaksananya pendampingan FCP, koordinasi manajemen resiko serta		100																				Inspektorat	APBD Kab					
					Meningkatnya Pendampingan dan Asistensi Pemerintah Daerah		100																										
					1 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		100		10	53.712	20,00	16.800	-	66,67	165.750	96,67	236.262,00	96,67	0,00	0,00	96,67	236.262	0,00	0,00									
					Terlaksananya koordinasi pendampingan LKPD BPK Terlaksananya Pendampingan BPK		100																				Inspektorat	APBD Kab					
					2 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		100		0,00	33,33	12.180	36,67	17.010	23,33	10.990	93,33	40.180,00	93,33	0,00	0,00	93,33	40.180	0,00	0,00									
					Terlaksananya koordinasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi Terlaksananya penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan tercapainya indeks PMPRB Terlaksananya rapat PMPRB		100																				Inspektorat	APBD Kab					
					3 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		100		2,00	2.430	13,00	20.895	15	74.700	55,75	207.451	85,75	305.475,58	85,75	0,00	0,00	85,75	305.476	0,00	0,00								
					Terlaksananya koordinasi MCP Terlaksananya koordinasi pengawasan APIP/Tim Saber Pungli Terlaksananya monev APIP dan APH atas pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi Terlaksananya pemantauan atas pengaduan masyarakat yang berindikasi pungli Terlaksananya		100																				Inspektorat	APBD Kab					
					4 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pengakan Integritas		100		0,00	33,33	28.840	66,67	(640)	0,00	-	100,00	28.200,00	100,00	0,00	0,00	100,00	28.200	0,00	0,00									
					Terlaksananya kegiatan Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK Terlaksananya koordinasi/perdis SPI Terlaksananya verifikasi LHKPN dan LHKASN		100																				Inspektorat	APBD Kab					
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													81,75	0,00	0,00																		
Predikat Kinerja													T	SR	SR																		
3	6	1	1	0.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																												
3	6	1	1	0.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100																										
					Meningkatnya akuntabilitas laporan keuangan dan pelayanan administrasi keuangan serta efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan administrasi perkantoran		100																										
					1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100		35,00	1.638	50,00	2.268	-	12,00	1.040	97,00	4.946,00	97,00	0,00	0,00	97,00	4.946	0,00	0,00									
					Terlaksananya penyusunan perencanaan		100																				Inspektorat	APBD Kab					
					Meningkatnya akuntabilitas laporan keuangan dan pelayanan administrasi keuangan serta efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan administrasi perkantoran		100																										
					1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		12		3,00	852.553	3,00	1.368.074	3	809.241	3,00	933.362	12,00	3.963.230,56	100,00	0,00	0,00	12,00	3.963.231	0,00	0,00								
					Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN Inspektorat Daerah		12																				Inspektorat	APBD Kab					
					3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12		3,00	21.255	3,00	12.790	3	17.115	3,00	22.820	12,00	73.980,00	100,00	0,00	0,00	12,00	73.980	0,00	0,00								
					Terlaksananya penatausahaan administrasi keuangan		12																				Inspektorat	APBD Kab					
					5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2		1,9	3.689	0,1	-	-	-0,11	-	1,89	3.689,00	94,60	0,00	0,00	1,89	3.689	0,00	0,00									
					Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semester dan akhir tahun		2																				Inspektorat	APBD Kab					
					7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		100		0,00	0,00	-	-	-	94,84	2.991	94,84	2.991,00	94,84	0,00	0,00	94,84	2.991	0,00	0,00									
					Meningkatkan kapasitas ASN Inspektorat Daerah		49																				Inspektorat	APBD Kab					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.																								
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	I		II		III		IV		K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)																										
									K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)																										
1	6	1	2.05	9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	orang				33		0,99	2.865	1,67	22.942	2,3	17.949	17,05	113.857	22,00	157.611,52	66,67	0,00	0,00	22,00	157.612	0,00	0,00	Inspektorat	APBD Kab																					
	6	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	%				100																																									
	6	1	2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	bulan				12	-	3,00	-	3,00	1.207	3	-	3,00	-	12,00	1.206,88	100,00	0,00	0,00	12,00	1.207	0,00	0,00	Inspektorat	APBD Kab																					
	6	1	2.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	bulan				12	-	3,00	17.990	3,00	21.569	3,0	7.755	3,00	23.366	12,00	70.679,63	100,00	0,00	0,00	12,00	70.680	0,00	0,00	Inspektorat	APBD Kab																					
	6	1	2.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	bulan				12	-	3,00	6.883	3,00	630	3,0	2.844	3,00	4.422	12,00	14.779,84	100,00	0,00	0,00	12,00	14.780	0,00	0,00	Inspektorat	APBD Kab																					
	6	1	2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	orang				66	-	10,56	46.656	18,86	44.015	10,18	43.135	25,93	103.964	65,53	237.769,66	99,29	0,00	0,00	65,53	237.770	0,00	0,00	Inspektorat	APBD Kab																					
	6	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%				100																																									
	6	1	2.07	1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	%				100	-	0,00	-	10	5.115		-	90,00	-	100,00	5.115,00	100,00	0,00	0,00	100,00	5.115	0,00	0,00	Inspektorat	APBD Kab																					
	6	1	2.07	11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	%				100	-	0,00	-	100	10.480		-	0,00	-	100,00	10.480,00	100,00	0,00	0,00	100,00	10.480	0,00	0,00	Inspektorat	APBD Kab																					
	6	1	2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan				12	-	3,00	9.809	3,00	8.179	1,80	8.508	3,00	9.322	10,80	35.819,52	90,00	0,00	0,00	10,80	35.819	0,00	0,00	Inspektorat	APBD Kab																					
	6	1	2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan				12	-	3,00	20.714	3,00	13.316	1,80	28.340	3,00	17.700	10,80	80.069,75	90,00	0,00	0,00	10,80	80.070	0,00	0,00	Inspektorat	APBD Kab																					
	6	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%				100																																									
	6	1	2.09	2 Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Penzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit				29	-	0,87	1.948	6,13	9.572	3,73	12.910	11,27	23.367	22,00	47.795,87	75,86	0,00	0,00	22,00	47.796	0,00	0,00	Inspektorat	APBD Kab																					
	6	1	2.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit				41	-	0,00	-	4,10	515	11,07	1.300	5,33	340	20,50	2.155,00	50,00	0,00	0,00	20,50	2.155	0,00	0,00	Inspektorat	APBD Kab																					
	6	1	2.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	gedung				1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Inspektorat	APBD Kab																					
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																					91,14	0,00	0,00																											
Predikat Kinerja																					ST	SR	SR																											
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program Per-Urusan																																																		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)																					87,63	0,00	0,00																											
Predikat Kinerja Per-Urusan (Program 1 s.d Program 3)																					T	SR	SR																											
1	7	1		UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN																																														
	7	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA																																														
	7	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																																														
	7	1	1	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	bulan				12,00	-	3,00	25.227	3,00	44.168	3,00	43.303	3,00	133.905	12,00	246.602,32	100,00	0,00	0,00	12,00	246.602	0,00	0,00	Bulukumpa	APBD Kab																					
	7	1	2.02	0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																																														
	7	1	2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	bulan				12,00	-	3,00	1.922.499	3,00	2.038.887,86	3,00	1.459.762,48	3,00	1.561.162,66	12,00	6.982.311,98	100,00	0,00	0,00	12,00	6.982.312	0,00	0,00	Ujung Bulu	APBD Kab																					
	7	1	2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	bulan				12,00	-	3,00	526.864	3,00	1.105.499	3,00	635.427	3,00	689.806	12,00	2.957.595,43	100,00	0,00	0,00	12,00	2.957.595	0,00	0,00	Bulukumpa	APBD Kab																					
	7	1	2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	bulan				12,00	-	3,00	372.554	3,00	650.131	3	753.359	3	753.359	12,00	1.776.043,54	100,00	0,00	0,00	12,00	1.776.044	0,00	0,00	Ujung Loe	APBD Kab																					
	7	1	2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	bulan				12,00	-	3,00	661.042	3,00	1.198.142	3,00	681.073	3,00	724.987	12,00	3.265.243,35	100,00	0,00	0,00	12,00	3.265.243	0,00	0,00	Rilau Ale	APBD Kab																					
	7	1	2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	bulan				12,00	-	3,00	745.956	3,00	1.296.713,33	3,00	844.167,20	3,00	858.523,76	12,00	3.745.360,29	100,00	0,00	0,00	12,00	3.745.360	0,00	0,00	Gantarang	APBD Kab																					
	7	1	2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	%				100,00	-	16,00	298.348	24,00	298.348	16,00	226.142	44,00	755.214	100,00	1.578.052,50	100,00	0,00	0,00	100,00	1.578.053	0,00	0,00	Kindang	APBD Kab																					
	7	1	2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	bulan				12,00	-	3,00	276.427	3,00	781.694,65	3	420.345,92	3	497.033,47	12,00	1.975.500,81	100,00	0,00	0,00	12,00	1.975.501	0,00	0,00	Herlang	APBD Kab																					
	7	1	2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	bulan				12,00	-	3,00	486.191	3,00	879.392,20	3,00	463.507,16	3,00	514.165,04	12,00	2.343.255,57	100,00	0,00	0,00	12,00	2.343.256	0,00	0,00	Bonto Tiro	APBD Kab																					
	7	1	2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	bulan				12,00	-	3,00	662.457	3,00	536.643,79	3	1.239.406,86	3	971.084,02	12,00	3.409.591,89	100,00	0,00	0,00	12,00	3.409.592	0,00	0,00	Bonto Bahari	APBD Kab																					
	7	1	2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	bulan				12,00	-	3,00	610.269,95	3,00	1.085.104,28	3,00	582.499,14	3,00	644.180,13	12,00	2.922.053,50	100,00	0,00	0,00	12,00	2.922.054	0,00	0,00	KAJANG	APBD Kab																					
	7	1	2.02	2 Pelaksanaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	bulan				12,00	-	3,00	17.795	3,00	36.535	3	82.290	3	82.290	12,00	136.620,00	100,00	0,00	0,00	12,00	136.620	0,00	0,00	Ujung Loe	APBD Kab																					
	7	1	2.02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	bulan				12,00	-	3,00	26.250,00	3,00	105.900,00	3,00	98.360,00	3,00	99.510,00	12,00	330.020,00	100,00	0,00	0,00	12,00	330.020	0,00	0,00	KAJANG	APBD Kab																					
	7	1	2.02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	bulan				12,00	-	3,00	4.375	3,00	23.050	3	10.330,00	3	52.585,00	12,00	90.340,00	100,00	0,00	0,00	12,00	90.340	0,00	0,00	Herlang	APBD Kab																					
	7	1	2.02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	bulan				12,00	-	3,00	-	3,00	15837,5	3,00	3352,5	3,00	10777,5	12,00	29.967,50	100,00	0,00	0,00	12,00	29.968	0,00	0,00	Bonto Tiro	APBD Kab																					
	7	1	2.02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	bulan				12,00	-	3,00	24.710	3,00	65.748,60	3,00	82.653,20	3,00	100.165,20	12,00	273.277,00	100,00	0,00	0,00	12,00	273.277	0,00	0,00	Ujung Bulu	APBD Kab																					
	7	1	2.02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	bulan				12,00	-	3,00	27.015	3,00	30.550	3,00	54.815	3,00	83.560	12,00	195.940,00	100,00	0,00	0,00	12,00	195.940	0,00	0,00	Rilau Ale	APBD Kab																					
	7	1	2.02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	bulan				12,00	-	3,00	29.870	3,00	17.362,50	3,00	31.017,50	3,00	46.695,60	12,00	124.945,60	100,00	0,00	0,00	12,00	124.946	0,00	0,00	Gantarang	APBD Kab																					
	7	1	2.02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	%				100,00	-	13,00	9.721	12,00	13.664	31,00	18.423	44,00	19.003	100,00	60.810,00	100,00	0,00	0,00	100,00	60.810	0,00	0,00	Kindang	APBD Kab																					
	7	1	2.02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	bulan				12,00	-	3,00	8.190	3,00	47.880	3	4.095	3	58.875	12,00	11																														

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021 (%)				OPD Penanggung Jawab	Ket.					
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	I		II		III		IV		K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)			K	Rp (000)			
									K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)											K	Rp (000)	
					13=9+10+11+12		14=13/8*100		15=7+13		16=15/6*100																		
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terciptanya kenyamanan kerja	unit	13,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Herliang	APBD Kab			
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	unit	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kindang	APBD Kab			
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Gantarang	APBD Kab			
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terlaksananya saran dan prasarana gedung kantor lainnya	bulan	12,00	-	-	3,00	-	3,00	5462,5	3,00	0	3,00	0	12,00	5.462,50	100,00	0,00	0,00	12,00	5.463	0,00	0,00	Bonto Tiro	APBD Kab
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya peralatan rumah tangga	bulan	12,00	-	-	3,00	-	3,00	-	3	8200	3	8100	12,00	16.300,00	100,00	0,00	0,00	12,00	16.300	0,00	0,00	Bonto Bahari	APBD Kab
7	1	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya peralatan kantor	Unit	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	KAJANG	APBD Kab	
7	1	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya peralatan rumah tangga	bulan	12,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bonto Bahari	APBD Kab	
7	1	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bonto Tiro	APBD Kab	
7	1	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Gantarang	APBD Kab	
7	1	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	tersedianya perlengkapan gedung kantor	bulan	12,00	-	-	0,00	-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Rilau Ale	APBD Kab	
7	1	1	2.08	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terwujudnya kegiatan perkantoran																							
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya pelayanan Administrasi perkantoran	bulan	12,00	-	-	3,00	627	3,00	1.629	3,00	903	3,00	1.101	12,00	4.260,00	100,00	0,00	0,00	12,00	4.260	0,00	0,00	Ujung Bulu	APBD Kab
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan	12,00	-	-	3,00	8.953	3,00	23.197,06	3,00	25.501,89	3,00	28.383,16	12,00	86.035,48	100,00	0,00	0,00	12,00	86.035	0,00	0,00	Ujung Bulu	APBD Kab
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	12,00	-	-	3,00	2.858	3,00	3.763	3	-	3	11.035	12,00	17.655,97	100,00	0,00	0,00	12,00	17.656	0,00	0,00	Ujung Loe	APBD Kab
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	12,00	-	-	3,00	8.285	3,00	4.978,29	3,00	8.287,79	3,00	10.762,51	12,00	32.313,65	100,00	0,00	0,00	12,00	32.314	0,00	0,00	Gantarang	APBD Kab
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	12,00	-	-	3,00	1.360	3,00	954,03	3	1.526,24	3	2.863,62	12,00	6.703,57	100,00	0,00	0,00	12,00	6.704	0,00	0,00	Herliang	APBD Kab
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	unit	4,00	-	-	0,00	1.07	690	-	-	2,93	2.600	4,00	3.290,00	100,00	0,00	0,00	4,00	3.290	0,00	0,00	Ujung Loe	APBD Kab	
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor dan terciptanya lingkungan kerja yang bersih dan tertata	bulan	12,00	-	-	3,00	4.450	3,00	23.900	3	14.950	3	86.100	12,00	129.400,00	100,00	0,00	0,00	12,00	129.400	0,00	0,00	Herliang	APBD Kab
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa kebersihan	bulan	12,00	-	-	3,00	32.400	3,00	23.800	3,00	49.400	3,00	73.200	12,00	178.800,00	100,00	0,00	0,00	12,00	178.800	0,00	0,00	Gantarang	APBD Kab
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor dan terciptanya lingkungan kerja yang bersih dan tertata	bulan	12,00	-	-	3,00	3.500	3,00	5.800	3	-	3	15.240	12,00	24.540,00	100,00	0,00	0,00	12,00	24.540	0,00	0,00	Ujung Loe	APBD Kab
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	bulan	12,00	-	-	3,00	25.200	3,00	103.550	3,00	137.100	3,00	215.650	12,00	481.500,00	100,00	0,00	0,00	12,00	481.500	0,00	0,00	Ujung Bulu	APBD Kab
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Peralatan Kantor	unit	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,80	10671,712	4,80	10.671,71	60,00	0,00	0,00	4,80	10.672	0,00	0,00	Bulukumpa	APBD Kab
7	1	1	2.08	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan administrasi umum pada kecamatan dan kelurahan																							
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12,00	-	-	3,00	1.548	3,00	719	3,00	1.437	3,00	3.213,33	12,00	6.917,41	100,00	0,00	0,00	12,00	6.917	0,00	0,00	Rilau Ale	APBD Kab
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	12,00	-	-	3,00	400	3,00	680,58	3,00	540,29	3,00	1.620,86	12,00	3.241,73	100,00	0,00	0,00	12,00	3.242	0,00	0,00	Kindang	APBD Kab
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Struk/Bukti Pembayaran Rekening Listrik	kali	12,00	-	-	3,00	2.839	3,00	12.097,79	1,00	1.290,14	4,40	16.255,96	11,40	32.483,16	95,00	0,00	0,00	11,40	32.483	0,00	0,00	Bonto Bahari	APBD Kab
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	12,00	-	-	3,00	3886,735	3,00	1206,806	3,00	10796,364	12,00	15.889,91	100,00	0,00	0,00	12,00	15.890	0,00	0,00	Bonto Tiro	APBD Kab		
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	bulan	12	-	-	3,00	721,50	3,00	2.737,55	3,00	1.674,64	3,00	332,98	12,00	5.466,68	100,00	0,00	0,00	12,00	5.467	0,00	0,00	KAJANG	APBD Kab
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Lancarnya tugas pelayanan masyarakat	bulan	12,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Rilau Ale	APBD Kab	
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Jasa kebersihan	kali	12,00	-	-	3,00	11.550	3,00	127.950	1,00	18.250	5,00	119.250	12,00	277.000,00	100,00	0,00	0,00	12,00	277.000	0,00	0,00	Bonto Bahari	APBD Kab
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya jasa kebersihan kantor	bulan	12	-	-	3,00	3.000,00	3,00	11.500,00	3,00	12.500,00	3,00	8.761,83	12,00	35.761,83	100,00	0,00	0,00	12,00	35.762	0,00	0,00	KAJANG	APBD Kab
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa kebersihan	bulan	12,00	-	-	3,00	28400	3,00	28400	3,00	17950	3,00	80050	12,00	126.400,00	100,00	0,00	0,00	12,00	126.400	0,00	0,00	Bonto Tiro	APBD Kab
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa kebersihan	bulan	12,00	-	-	3,00	14.000	3,00	26.000	3,00	38.000	3,00	18.000	12,00	96.000,00	100,00	0,00	0,00	12,00	96.000	0,00	0,00	Kindang	APBD Kab
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa Kebersihan kantor	bulan	12,00	-	-	3,00	6.000	3,00	4.500	3,00	9.000	3,00	10.500	12,00	30.000,00	100,00	0,00	0,00	12,00	30.000	0,00	0,00	Rilau Ale	APBD Kab
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	bulan	12,00	-	-	3,00	1.500	3,00	3.700	3,00	4.250	3,00	12.250	12,00	21.700,00	100,00	0,00	0,00	12,00	21.700	0,00	0,00	Bulukumpa	APBD Kab
7	1	1	2.09	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terwujudnya kegiatan perkantoran																							
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	lancarnya kegiatan operasional	bulan	12,00	-	-	3,00	220	3,00	2.316,56	3,00	8.050,20	12,00	16.681,01	100,00	0,00	0,00	12,00	16.681	0,00	0,00	Ujung Bulu	APBD Kab		
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas mobil jabatan	unit	1,00	-	-	0,00	0,19	2.807	0,81	4.106	1,00	6.912,46	100,00	0,00	0,00	1,00	6.912	0,00	0,00	Ujung Loe	APBD Kab			
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhiya perizinan kendaraan dinas/operasional,Terawatnya kendaraan dinas kecamatan dan kelengkapan STNK	unit	4,00	-	-	0,00	0,76	1.253	2,64	806	3,40	2.059,66	85,00	0,00	0,00	3,40	2.060	0,00	0,00	Ujung Loe	APBD Kab			
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Perizinan dan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	unit	2,00	-	-	-	-	-	1,60	1065,756	1,60	1.065,76	80,00	0,00	0,00	1,60	1.066	0,00	0,00	Bulukumpa	APBD Kab			
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Perizinan dan terpeliharanya kendaraan Dinas/Operasional	unit	2,00	-	-	0,13	1.638	0,07	-	0,30	3.952	0,50	5.431	1,00	11.021,45	100,00	0,00	0,00	1,00	11.021	0,00	0,00	Rilau Ale	APBD Kab
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan																								

No	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.				
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	RKPD		APBD		I		II		III		IV		K	Rp (000)	K	Rp (000)			K	Rp (000)	K	Rp (000)
									K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)										
1	8.01.02.00	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																												
1	8.01.02.00	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terpeliharanya 4 pilar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	kali					5,00																					
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya Kewaspadaan Dini Masyarakat	bulan					12,00																					
	8.01.02.2.01.4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Koordinasi Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK), Tersedianya Database Organisasi Masyarakat, dan Terlaksananya Seminar, Talkshow, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan serta Terlaksananya Kegiatan Kewaspadaan Dini Daerah dan Pemantauan Pengawasan Orang Asing yang ada di Bukukumba	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	-	3,00	4.420	3,00	12.055,00	3,00	33.537	3,00	208.913	12,00	258.925,00	100,00	0,00	0,00	12,00	258.925	0,00	0,00	Kesbangpol	APBD Kab	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		100,00	0,00	0,00			0,00	0,00						
Predikat Kinerja																		ST	SR	SR			SR	SR						
2	8.01.03.00	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Jumlah kegiatan pendidikan politik masyarakat dan jumlah Desk Pemilu	buah					6,00																					
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Meningkatnya Pengetahuan tentang Peraturan Perundang-undangan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Terpenuhnya syarat administrasi pengajuan bantuan keuangan ke	bulan					12,00																					
	8.01.03.2.01.4	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Meningkatnya Pengetahuan tentang Peraturan Perundang-undangan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Terpenuhnya syarat administrasi pengajuan bantuan keuangan kepada Partai Politik.	bulan					12,00	-	3,00	2.970	3,00	3.150	3	827.704	3,00	153.255	12,00	987.078,80	100,00	0,00	0,00	12,00	987.079	0,00	0,00	Kesbangpol	APBD Kab	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		100,00	0,00	0,00			0,00	0,00						
Predikat Kinerja																		ST	SR	SR			SR	SR						
3	8.01.05.00	PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Terciptanya kantrantibmas pada pelaksanaan sistem demokrasi	%	0,00	-	0,00	-	100,00																					
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terciptanya Kerukunan Umat Beragama, Terwujudnya Kerukunan Antar Suku Etnis, Terwujudnya tertib data dan laporan Organisasi Masyarakat serta Terpeliharanya 4 Pilar Utama dalam Kehidupan Berbangsa dan bernegara yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal I	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00																					
	8.01.05.2.01.4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Fasilitas Pencegahan Narkoba dan Koordinasi Forum Antar Kerukunan Umat Beragama	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	-	3,00	2.140	3,00		3,00	52.690	3,00	61.960	12,00	116.790,00	100,00	0,00	0,00	12,00	116.790	0,00	0,00	Kesbangpol	APBD Kab	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		100,00	0,00	0,00			0,00	0,00						
Predikat Kinerja																		ST	SR	SR			SR	SR						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	I		II		III		IV		K	Rp (000)	K	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		K	Rp (000)	K			Rp (000)
										RKPD	APBD	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)						
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13=9+10+11+12		14=13/8*100		15=7+13		16=15/6*100		17	18						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN					-	-	397.860,82	583.361,42	1.271.854,73	927.065,42	3.180.142,39	94,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 5)															98,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 5)															ST	SR	SR	SR	SR	SR								
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM SEMUA URUSAN					(1.672)	(1.672)	106.340.886	248.319.953	287.915.357	701.195.951	1.355.403.358	92,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 305)															92,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 305)															ST	SR	SR	SR	SR	SR								

2.5 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.5.1 Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Permasalahan pembangunan daerah muncul dari adanya celah/gap antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan apa yang direncanakan. Celah tersebut juga dapat muncul antara apa yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan tersebut disusun. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum teratasi, peluang yang belum dimanfaatkan secara optimal, serta ancaman yang belum diantisipasi baik yang dipengaruhi lingkungan internal maupun lingkungan eksternal pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba.

Masih terdapat sejumlah permasalahan pembangunan mendasar yang dihadapi Kabupaten Bulukumba sampai saat ini, yaitu sebagai berikut:

1. Melambatnya Pertumbuhan ekonomi
2. Belum optimalnya Sistem kesehatan daerah
3. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur
4. Masih tingginya ketimpangan pendapatan masyarakat
5. Belum optimalnya SDM berkualitas dan berdaya saing
6. Masih rendahnya nilai tambah komoditas unggulan
7. Belum Optimalnya Reformasi Birokrasi

Untuk itu, identifikasi permasalahan pembangunan daerah kabupaten Bulukumba dibagi dalam 2 cakupan permasalahan, yaitu identifikasi permasalahan pembangunan yang berdampak pada sasaran pembangunan daerah untuk penentuan prioritas daerah dan sasaran pembangunan daerah serta identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah untuk penentuan prioritas masing-masing urusan.

2.5.2 Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Daerah (Permasalahan Menurut Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah)

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus konsisten dengan permasalahan yang dijabarkan dalam permasalahan perangkat daerah pada Renja Perangkat Daerah.

2.5.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

- a. Belum Optimalnya Penduduk Usia 6 – 15 tahun yang termasuk dalam usia penduduk yang berpartisipasi dalam Pendidikan (SPM)
- b. Belum optimalnya pencapaian peningkatan angka melek huruf
- c. Belum Optimalnya Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana sekolah Jenjang PAUD /Kesteraan dan Pendidikan Dasar
- d. Belum Optimalnya Pemenuhan kuantitas dan kualitas Tenaga Pendidik

2. Kesehatan

- a. Masih tingginya presentase balita gizi buruk .
- b. Masih tingginya prevalensi angka stunting.
- c. Masih rendahnya rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk.
- d. Masih rendahnya cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.
- e. Masih rendahnya Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh.

- f. Masih rendahnya cakupan penanganan prevalensi HIV AIDS

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Masih rendahnya proporsi jaringan jalan dengan kondisi baik (PUTR)
- b. Masih rendahnya persentase jalan yang memiliki talud/drainase saluran pembuangan air (PUTR)
- c. Belum tersedianya data base talud/drainase (PUTR)
- d. Masih rendahnya progres revisi RTRW Kabupaten Bulukumba serta masih terbatasnya rencana rinci tata ruang dengan rencana pembangunan daerah (PUTR)
- e. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan maupun peningkatan jaringan irigasi dilakukan setelah masa panen (PSDA)
- f. Peningkatan maupun penurunan persentase irigasi dalam kondisi baik sangat dipengaruhi oleh tingkat kerusakan yang biasanya akibat longsor/bencana alam dan tingginya curah hujan (PSDA)
- g. Persentase irigasi dalam kondisi baik juga dapat meningkat karena pengerjaan pembenahan jaringan irigasi maupun kegiatan peningkatan jaringan irigasi (PSDA)
- h. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik sangat ditunjang oleh ketersediaan anggaran (PSDA)

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- a. Masih rendahnya kawasan kumuh dan permukiman kumuh yang tertata
- b. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni khususnya bagi masyarakat miskin dan keterbatasan akses pembiayaan.
- c. Belum optimalnya sistem data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman
- d. Belum terpenuhinya air minum dan sanitasi layak.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- a. Cakupan petugas perlindungan masyarakat masih kurang
- b. Masih terdapat potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum
- c. Cakupan pelayanan bencana kebakaran terkait sarana prasarana masih belum memadai
- d. Perlu penambahan armada mobil pemadam kebakaran untuk memaksimalkan pelayanan waktu tanggap (response time rate)
- e. Masih minimnya petugas penyidik pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan fasilitas pendukung lainnya.

6. Sosial

- a. Masih rendahnya sarana Sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi yang dikelola pemerintah Daerah
- b. Masih rendahnya program mitigasi bencana bagi masyarakat
- c. Minimnya PMKS yang menerima program pemberdayaan Sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.
- d. Jumlah jenis PMKS yang tidak didukung dengan data yang valid dan akurat serta masih terbatasnya jumlah pekerja sosial profesional dalam penanganan disabilitas dan lansia.

2.5.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

- a. Lapangan pekerjaan semakin terbatas
- b. Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka
- c. Rendahnya tingkat pendidikan
- d. Terbatasnya alokasi anggaran program dan kegiatan
- e. Rendahnya kompetensi pencari kerja
- f. Kurangnya sarana dan prasarana aparatur

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Presentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah masih rendah.
- b. Masih tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga.

- c. masih rendahnya cakupan layanan kesehatan korban kekerasan anak dan perempuan.
- d. Kurangnya tenaga psikiater yang menangani trauma korban kekerasan anak dan perempuan.
- e. Tidak adanya kontribusi yang diberikan perempuan dalam pekerjaan non pertanian.

3. Pangan

- a. Masih rendahnya tingkat pendapatan masyarakat / Kelompok Tani dan pemenuhan kebutuhan dari budidaya pangan lokal.
- b. Kelembagaan usaha pangan masyarakat tidak berjalan dengan maksimal
- c. Rendahnya peran serta masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal
- d. Kurangnya ketersediaan dan cadangan pangan serta infrastruktur pendukung kemandirian pangan

4. Pertanian

- a. Masih minimnya penyelesaian kasus negara
- b. Belum optimalnya proses pengadaan tanah karena masih rendahnya dukungan perencanaan pembangunan infrastruktur yang membutuhkan pengadaan lahan

5. Lingkungan Hidup

- a. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah, Sarana -Prasarana PPLHD dan PPNS belum ada di kabupaten/Kota sehingga Pelaksanaan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan tidak terlaksana dengan baik
- b. Kurangnya Tenaga Polisi kehutanan untuk pengamanan Tahura Bontobahari sehingga Lokasi Tahura Bonto Bahari banyak diklaim oleh Masyarakat Bonto Bahari.
- c. Permasalahan dalam mengurangi dan menangani persampahan :
 - SDM Pengelola belum memenuhi Standar
 - Armada Pengangkutan Persampahan sudah banyak yang tidak layak pakai
 - Prilaku dan Partisipasi Masyarakat Masih rendah
- d. Dimensi Cell landfill TPA Bulukumba seluas 16.208 M2 dengan kapasitas 577.512 M3 atau 190.579 ton dan diperkirakan dapat melayani kota Bulukumba sampai dengan jangka waktu + 6 Tahun. Dimana saat ini TPA Bulukumba sudah beroperasi selama 6 tahun lebih dan total volume sampah yang masuk ke TPA sudah mencapai 109.540 ton. Sehingga luas cell landfill hanya dapat menampung sekitar 81.039 ton lagi. (kota Bulukumba sudah darurat sampah)
- e. Tidak adanya alat berat (Buldozer) untuk memadatkan sampah pada cell landfill
- f. Lahan untuk penempatan TPS/container yang tidak ada sehingga selama ini hanya memakai lahan kosong/milik masyarakat
- g. Tidak ada container yang tetap di TPST untuk dipakai setelah memilah sampah
- h. Kurangnya alat dan prasarana alah pengolahan sampah di TPST
- i. Kurangnya sarana dan prasarana Laboratorium yang mendukung kinerja dalam rangka pemantauan kualitas air sungai dan air limbah di Kabupaten Bulukumba. Sarana dan prasarana utama yang seharusnya tersedia adalah Atomic Absorbtion Spektrofotometer (AAS), Ultra-Violet Visible (UV-Vis), peralatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), peralatan sampling, termasuk peralatan kualitas udara ambien dan emisi
- j. Belum tersedianya sarana Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL)
- k. Instalasi ruang asam tidak berfungsi dengan baik
- l. Masih kurangnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) personil UPT Laboratorium

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Kualitas jaringan perekaman biometrik KTP-el yang tidak stabil
- b. Ketersediaan blangko KTP-el juga tidak memadai
- c. Kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk mengurus KTP-el masih rendah.
- d. Belum seluruhnya masyarakat memiliki adminduk

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Masih rendahnya cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa.

- b. Belum optimalnya lembaga pemberdayaan masyarakat guna menunjang program pemerintah desa.
- c. Belum optimalnya peran lembaga ekonomi masyarakat desa dalam mendukung perekonomian desa.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Rendahnya keikutsertaan Keluarga Berencana (KB) yang menggunakan alat kontrasepsi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
- b. Masih rendahnya SDM kader dan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana
- c. Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan tribina di tingkat desa.
- d. Belum maksimalnya pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi penguatan ketahanan keluarga balita, remaja, lansia dan peningkatan pendapatan kesejahteraan keluarga.

9. Perhubungan

- a. Alat kir sudah tidak beroperasi karena mengalami kerusakan dan diberlakukannya KIR elektronik
- b. Menurunnya arus penumpang karena banyaknya kendaraan umum yang rusak
- c. Masih kurangnya rambu-rambu di kabupaten Bulukumba
- d. Masih kurangnya pengawasan sehingga izin trayek semakin berkurang dari tahun ketahun

10. Komunikasi dan Informatika

- a. Perjanjian kerja sama penyelesaian permasalahan pelayanan publik di kabupaten Bulukumba
- b. Perlunya peningkatan optimalisasi ketersediaan dan pemanfaatan data sektoral
- c. Perlunya peningkatan optimalisasi peran keterbukaan badan publik dalam penyediaan informasi
- d. Perlunya peningkatan upaya mewujudkan single data penguatan pengelolaan data statistik sektoral
- e. Rendahnya kesadaran dan sistem keamanan informasi berdasarkan hasil assessment.

11. Koperasi dan UKM

- a. Para pengelola Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) belum profesional dan akuntabel dalam pengelolaan kelembagaan dan usaha;
- b. Kemampuan dalam mengakses teknologi informasi, jaringan produksi dan pemasaran masih sangat rendah
- c. Fungsi kelembagaan dan infrastruktur Koperasi dan UMKM belum optimal terutama pembiayaan dan pemasaran;
- d. Para pengelola KUKM baik laki-laki dan perempuan belum mampu untuk berinovasi dalam pengembangan produk

12. Penanaman Modal

- a. Potensi penanaman Modal di Kabupaten Bulukumba masih rendah.

13. Kepemudaan dan Olahraga

- a. Belum optimalnya pembinaan sumber daya kepemudaan.
- b. Masih rendahnya peningkatan pelatihan kewirausahaan Muda untuk menunjang pembangunan Daerah
- c. Belum optimalnya prestasi atlet termasuk atlet usia Dini dan pelajar
- d. Kurangnya sarana dan prasarana olah raga yang sesuai standar yang ditetapkan

14. Statistik

- a. Belum adanya data sektoral yang dikelola oleh pemerintah daerah sebagai dasar perumusan kebijakan pemerintah daerah
- b. Perlunya peningkatan optimalisasi ketersediaan dan pemanfaatan data sektoral.
- c. Perlunya pengelolaan data secara optimal menuju program satu data

15. Persandian

- a. Masih rendahnya SDM dan sistem persandian modern yang masih menggunakan sarana dan prasarana manual.
- b. Masih rendahnya tingkat keamanan informasi berdasarkan hasil assesment.

16. Kebudayaan

- a. Belum Optimalnya Pembinaan pelaku budaya dan kesenian pada satuan pendidikan dan daerah

- b. Belum Optimalnya Pelestarian cagar budaya dan adat istiadat
- c. Belum Optimalnya Pembinaan dan pelestarian seni budaya daerah

17. Perpustakaan

- a. Belum optimalnya pelayanan perpustakaan kepada masyarakat
- b. Belum optimalnya jumlah buku dan pengadaan buku setiap tahunnya pada perpustakaan
- c. Menurunnya minat baca dan minat pemanfaatan perpustakaan
- d. Masih kurangnya jumlah perpustakaan yang ada di Desa dan Kecamatan
- e. Belum optimalnya sarana dan prasarana SDM untuk mendukung gerakan literasi masyarakat

18. Kearsipan

- a. Belum mencukupinya arsip arsip di daerah
- b. sarana dan prasarana arsip belum memadai
- c. belum adanya landasan hukum untuk arsip Jadwal retensi arsip (JRA)
- d. Terbatasnya anggaran sarana dan prasarana serta SDM pengelola arsip digital dalam mendukung reformasi birokrasi.
- e. Belum optimalnya Penerapan Sistem Kearsipan Daerah Terintegrasi” untuk mendukung Proyek Prioritas Nasional yaitu Penerapan e-arsip terintegrasi.

2.5.2.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

- a. Menjangkitnya penyakit udang dan rumput laut
- b. Pencapaian peningkatan produksi terganggu karena kewenangan kelautan diambil alih provinsi sehingga program perlindungan dan pengawasan ekosistem kelautan tidak bisa dilaksanakan
- c. Banyaknya negara pesaing yang juga merupakan penghasil udang dan rumput laut.
- d. Kurangnya penerapan teknik budidaya yg sesuai dengan standar budidaya oleh masyarakat
- e. Metode penangkapan ikan yang masih cenderung tradisional
- f. Terjadinya fluktuasi harga produk-produk perikanan
- g. Usaha dibidang kelautan dan perikanan belum *Bankable* sehingga pihak perbankan sulit untuk menyalurkan kredit.
- h. Adanya pencemaran tambak intensif secara masif sehingga mengganggu budidaya rumput laut
- i. Lemahnya kelembagaan nelayan, pembudidaya dan pelaku usaha perikanan lainnya.
- j. Keamanan pangan produk hasil pengolahan ikan yang belum memenuhi persyaratan mutu
- k. Nelayan masih tergolong miskin

2. Pariwisata

- a. Kurangnya alokasi anggaran untuk pengembangan pariwisata
- b. Rendahnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pariwisata
- c. Rendahnya kuantitas dan kualitas aparatur
- d. Rendahnya peran aktif dan sadar wisata dari pelaku pariwisata

3. Pertanian

- a. Masih rendahnya produktivitas lahan pertanian
- b. Masih rendahnya daya saing produk pertanian
- c. Masih rendahnya kualitas SDM penyuluh
- d. Belum optimalnya pelayanan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, perencanaan dan pelaporan
- e. Masih rendahnya pemahaman para pelaku utama pembangunan pertanian melakukan registrasi produk sebagai syarat mendapatkan sertifikat Prima
- f. Pertumbuhan populasi ternak rendah (Kesehatan Hewan)
- g. Sarana prasarana peternakan dan daya saing produk hewan yang belum optimal (Kesehatan Hewan)
- h. Skala usaha peternakan, kelembagaan kelompok dan Jejaring pemasaran produk hewan belum optimal (Kesehatan Hewan)
- i. Keterlibatan keluarga miskin dalam kegiatan usaha peternakan masih kurang

(Kesehatan Hewan)

- j. Keterbatasan pengetahuan dan ketampilan petani peternak serta akses untuk memperoleh informasi, teknologi dan sarana Prasarana (Kesehatan Hewan)
- k. Ancaman Penyakit Hewan menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ), gangguan reproduksi ternak dan Pematangan ternak ruminansia betina produktif belum terkendali (Kesehatan Hewan)
- l. Belum optimalnya produksi ternak (Kesehatan Hewan)

4. Kehutanan

- a. Perlunya dibuatkan rekonstruksi palbatas karena sejak Tahun 1991 sampai sekarang belum pernah dilaksanakan rekonstruksi palbatas,seharusnya sekali dalam 5 tahun dilaksanakan Rekonstruksi.
- b. Perlunya penambahan tenaga polisi kehutanan karna luas kawasan TAHURA 3.475 Ha tidak sebanding dengan polisi kehutanan yang hanya berjumlah 2 orang saat ini, perbandingan untuk 1 tenaga polisi kehutanan dengan luasan sekitar 50 – 75 Ha /orang polisi hutan, sehingga untuk luas TAHURA 3.475 Ha membutuhkan 47 orang polisi hutan.
- c. Perlunya pengganti tanaman penghijauan pada turus jalan yang sudah tua yang sering roboh pada saat hujan dan angin kencang yang dapat membahayakan masyarakat dan memperbanyak Ruang-ruang terbuka Hijau , untuk taman kota tidak adanya lahan pemerintah untuk dijadikan penambahan lahan luasan RTH pembangunan taman, penataan dan pemeliharaan taman , yang sampai saat ini seluas 13,88 % sesuai perda nomor 22 tahun 2012 harus mencapai 20 % , sesuai perbup untuk pemenuhan porsi RTH dikota kab Bulukumba maka pemerintah harus menyiapkan lahan RTH. Karena tanaman pelindung sudah mengawatirkan sudah mengganggu ketenteraman pengguna jalan yang berbatasan perlunya dipikirkan penambahan lokasi pekuburan umum

5. Perdagangan

- a. Rendahnya daya saing pasar tradisional dibandingkan dengan retail moderen karena belum didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.
- b. Belum optimalnya kinerja pelaksanaan dan pengawasan metrologi legal karena rendahnya anggaran pelaksanaan kegiatan serta terbatasnya jumlah sdm kemetrologian (Penera, Pengamat dan PPNS).
- c. Terbatasnya sarana metrologi legal.

6. Perindustrian

- a. Belum optimalnya pemenuhan standarisasi kualitas produk industri kecil dan menengah.
- b. Kurangnya ketersediaan dukungan sarana dan prasarana industri, yang meliputi pengelolaan lingkungan, kawasan industri, lahan industri dan infrastruktur penunjang.
- c. Terbatasnya pemberdayaan industri kecil dan menengah khususnya melalui upaya penguatan sentra, unit pelayanan teknis, tenaga penyuluh, konsultan dan penyediaan pusat promosi

2.5.2.4 Urusan Penunjang Pemerintahan

1. Perencanaan

- a. Belum optimalnya ketersediaan, akurasi data dan informasi aktual guna penyusunan rencana dan evaluasi program pembangunan.
- b. Ketersediaan data terkini yang belum akurat
- c. Monitoring dan evaluasi yang belum optimal
- d. Koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan daerah belum optimal
- e. Belum optimalnya pemanfaatan hasil-hasil penelitian untuk pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan daerah

2. Keuangan

- a. Belum tersosialisasinya dengan baik tentang pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan pelaku usaha Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah untuk mendorong pendapatan asli daerah.

3. Kepegawaian dan Diklat

- a. Belum optimalnya sinergitas antara kebutuhan pengembangan kompetensi PNS

dengan pelaksanaan pendidikan dan latihan formal dalam rangka peningkatan kapasitas PNS;

- b. Belum optimalnya pemetaan kompetensi PNS sebagai dasar pengembangan kompetensi dan karier;

4. Penelitian dan Pengembangan

- a. Pemanfaatan hasil litbang belum sepenuhnya mendukung kebutuhan perencanaan pembangunan;
- b. Belum optimalnya upaya fasilitasi penerapan inovasi daerah terhadap perangkat daerah

5. Pengawasan

- a. belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan baik internal maupun eksternal.
- b. Masih perlunya peningkatan internal para ASN dalam pelaksanaan kegiatan di OPD untuk mengurangi potensi pelanggaran.
- c. Opini atas laporan Keuangan BPK-RI menjadi sebagai salah satu indikator dalam penatausahaan dan mempertanggungjawabkan keuangan secara baik harus tetap dipertahankan guna mewujudkan tata kelola keuangan secara akuntabel.

6. Sekretariat DPRD

- a. Kurangnya pemanfaatan kemajuan informasi teknologi(IT).

7. Sekretariat Daerah

- a. Peranan Forum kerukunan umat beragama belum berfungsi secara optimal.
- b. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang dan pendukung pengembangan SDM syiar Al Quran.
- c. Kurangnya data akurat terkait pembinaan dan pengembangan SDM keagamaan.
- d. Tingkat dukungan pemerintah akan pengembangan keagamaan masih rendah.

2.6 Isu Strategis

Analisis isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang.

Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi atau kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Sumber lain isu strategis dari lingkungan eksternal (masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga nonprofit, dan lain-lain) skala regional, nasional, dan internasional juga merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan dan menjadi masukan dalam menganalisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah. Dalam menentukan data atau informasi yang akan dijadikan isu strategis dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2. Merupakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah;
3. Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap publik;
4. Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah;

5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan 6) Prioritas Pembangunan pemerintah pusat.

Berdasarkan kriteria tersebut setelah dilakukan penilaian terhadap berbagai isu-isu strategis, maka yang menjadi isu strategis pembangunan 5 (lima) tahun kedepan pada setiap urusan penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2021-2026.

2.6.1 Isu Strategis Global

2.6.1.1 Pandemi COVID-19

Pemerintah Indonesia menjalankan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). PEN merupakan salah satu rangkaian kegiatan buat mengurangi dampak COVID-19 terhadap perekonomian. Selain penanganan krisis kesehatan, pemerintah juga menjalankan program ini sebagai respons atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi.

Pandemi COVID-19 melanda hampir semua negara dalam waktu singkat, dengan waktu penyebaran dan lama pandemi, tingkat gangguan, serta kemampuan negara-negara untuk meresponnya sangat bervariasi. Negara maju memiliki sumberdaya dan infrastruktur yang lebih lengkap untuk melakukan recovery dibandingkan dengan negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia, Thailand dan Filipina, sehingga berdampak serius pada bidang ekonomi dan sosial. Meskipun demikian negara berkembang memiliki beberapa potensi bagi percepatan recovery ekonomi. Menurut studi yang dilakukan McKinsey Global Institute (2020), terdapat 5 (lima) sektor yang sangat berpotensi, yaitu: 1) sebagai pusat manufaktur, 2) infrastruktur hijau, 3) investasi dalam sektor digital, 4) pelatihan ulang bakat, dan 5) industri makanan bernilai tinggi. Potensi ini bila mampu dikelola dengan baik, dapat mempercepat pemulihan ekonomi dan meletakkan dasar untuk pertumbuhan yang berkelanjutan bagi negara-negara berkembang.

Tekanan untuk menerapkan kebijakan karantina wilayah di setiap daerah dipastikan akan meningkat, yang berarti ketidakpastian ekonomi akan cenderung naik dan membuat pelambatan ekonomi baik secara gradual maupun drastis. Semua daerah akan berhadapan dengan kondisi dimana pendapatan daerah turun, tetapi di sisi lain daerah membutuhkan peningkatan pengeluaran daerah yang sangat tinggi untuk berbagai kebutuhan penanganan *COVID-19* sehingga mempengaruhi kinerja pembangunan daerah.

2.6.1.2 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDG's)

Konsep SDGs diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca tahun 2015-MDGs. Terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu berkurangnya sumberdaya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, perlindungan sosial, makanan dan energi, serta pembangunan yang lebih berpihak kepada kaum miskin. SDGs terdiri dari 17 tujuan, 169 target dengan 240 indikator. Adapun tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) ditahun 2016-2030 antara lain:

- 1) Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya dimana mana;
- 2) Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan;
- 3) Pastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua;
- 4) Menjamin kualitas pendidikan inklusif, adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
- 5) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
- 6) Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan air dan sanitasi untuk semua;

- 7) Menjamin akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua;
- 8) Mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif dan ekonomi berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak untuk semua;
- 9) Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan mendorong inovasi;
- 10) Mengurangi kesenjangan didalam dan antar negara;
- 11) Membuat kota kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
- 12) Pastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan;
- 13) Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
- 14) Melestarikan dan berkelanjutan menggunakan samudera, laut dan sumberdaya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;
- 15) Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, berkelanjutan mengelola hutan, memerangi desertifikasi, menggantikan dan mengembalikan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
- 16) Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif disemua tingkatan; dan
- 17) Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Rekomendasi Muatan KLHS yang telah disesuaikan dengan Analisis tujuan pembangunan berkelanjutan dimana Kabupaten Bulukumba melaksanakan 17 TPB yang terbagi atas 202 indikator yang menjadi kewenangan. Adapun Rekomendasi Muatan KLHS yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2021-2026 diantaranya sebagai berikut:

- 1) Untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian maka disarankan untuk menerapkan pendekatan intensifikasi pertanian dikarenakan kemampuan lahan untuk kegiatan pertanian di Kabupaten Bulukumba terbatas.
- 2) Pangan merupakan kebutuhan primer untuk kebutuhan hidup manusia, tetapi perlu diperhatikan bahwa perubahan tata guna lahan untuk kawasan pertanian dapat menghilangkan potensi pertanian. Sehingga, perencanaan pusat kegiatan dapat diletakkan pada daerah yang memiliki jasa ekosistem penyedia pangan sedang.
- 3) Air merupakan sumber kehidupan manusia, namun perlu diperhatikan bahwa pada area yang memiliki nilai jasa ekosistem penyediaan tinggi perlu tetap perlu dipertahankan eksistensinya sehingga ketersediaan air tetap *sustain*.
- 4) Apabila nilai jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir tinggi maka pada area tersebut mengindikasikan mempunyai daya tampung yang baik, sehingga rencana pembangunan dapat diarah ke daerah tersebut untuk menghindari terendahnya permukiman dari bencana banjir.
- 5) Apabila nilai jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana alam dengan nilai tinggi maka pada area tersebut mengindikasikan mempunyai daya tampung yang baik. Sehingga rencana kegiatan pembangunan harus menghindari area jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana alam dari sangat rendah hingga rendah.
- 6) Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah pada daerah-daerah yang memiliki kerentanan sangat tinggi.
- 7) Sebagai upaya menghadapi resiko bencana maka perlu dilakukan :
 - Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana
 - Peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana

- Peningkatan kapasitas pemulihan bencana

2.6.1.3 Perubahan Iklim

Melalui Undang Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim), Indonesia secara nasional (Nationally Determined Contribution) menyatakan komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 sebesar 29% dengan upaya sendiri, dan 41% dengan bantuan dan kerjasama internasional. Sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam komitmen Pemerintah, dalam rangka mengantisipasi perubahan iklim dan meminimalisasi dampaknya maka pemerintah provinsi melakukan tiga pendekatan yaitu antisipasi, adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim.

Antisipasi dampak perubahan iklim dilakukan pada tataran penyusunan rencana, kebijakan dan program dengan mempertimbangkan isu dampak perubahan iklim dalam pengambilan keputusan. Pada aspek adaptasi dilakukan penguatan kapasitas masyarakat baik individu maupun kelembagaan dalam menghadapi dampak perubahan iklim khususnya pada daerah-daerah yang rentan.

Pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tidak dapat dilakukan semata oleh pemerintah provinsi oleh karena itu diperlukan pelibatan secara aktif pihak swasta, organisasi sosial kemasyarakatan (CSO), mitra pembangunan dan pemerintah kabupaten/kota sesuai perannya masing-masing

2.6.1.4 Revolusi Industri 4.0

Revolusi Industri 4.0 memiliki tingkat kecepatan perubahan yang tidak pernah ada dalam sejarah revolusi industri sebelumnya, sehingga memiliki efek disruption industri di setiap negara pada keseluruhan sistem serta meluas mulai dari pemerintahan, ekonomi, hukum, politik, kesehatan, pendidikan dan hubungan sosial kemasyarakatan. Pada bidang ekonomi ditandai dengan munculnya bidang pekerjaan baru (data miner, analisis big data, ilmuwan kecerdasan buatan) dan hilangnya beberapa pekerjaan lama; pekerjaan yang dilakukan oleh manusia digantikan dengan mesin atau robot yang mengakibatkan hilangnya sumber penghidupan manusia pada bidang pekerjaan tersebut. Bidang organisasi dan institusi publik yang menghendaki pengambilan keputusan dilakukan secara cepat, sehingga perlu memiliki integrasi data, kemampuan analisis big data dan kecerdasan buatan, sedangkan pada bidang sosial kemasyarakatan, revolusi industri 4,0 memunculkan beberapa fenomena baru yang perlu diantisipasi agar tidak membawa efek negatif pada perubahan perilaku, pola komunikasi dan sosialisasi, pola belajar, privasi, kepemilikan, konsumsi, gaya hidup, dan lain sebagainya. Bila disikapi dengan positif, era revolusi industri 4.0 membawa peluang secara ekonomi makro berupa proses otomatisasi dan digitalisasi berpeluang untuk meningkatkan efektifitas dan produktifitas akan membuka pasar baru dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi.

2.6.2 Isu Kebijakan Nasional

2.6.2.1 Standar Pelayanan Minimal

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2023

Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar. Penerapan SPM didasarkan pada pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang terdiri atas:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
6. Sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal telah dijelaskan bahwa target pencapaian setiap indikator adalah 100% (seratus persen) setiap tahun dari enam urusan tersebut. Dari target tersebut maka menjadi isu pokok yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah adalah capaian indikator mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar yang belum mencapai 100% sebagaimana capaian kinerja tersebut telah dibahas pada bab II.

2.6.2.2 Bonus Demografi

Bonus demografi adalah suatu fenomena dimana jumlah penduduk usia produktif (15- 64 tahun keatas) lebih besar dibanding penduduk usia tidak produktif (kurang dari 15 tahun dan 64 tahun keatas). Saat ini Indonesia sedang memasuki masa bonus demografi dan kondisi ini memberi keuntungan ekonomi berupa percepatan pertumbuhan ekonomi, karena menurunnya rasio ketergantungan. Bonus demografi menjadi peluang strategis bagi daerah untuk melakukan percepatan pembangunan, karena tersedianya sumber daya manusia produktif. Agar bonus demografi menjadi peluang yang menguntungkan di daerah, diperlukan upaya serius semua pihak terutama yang menyangkut peningkatan kualitas SDM, penyiapan tenaga kerja berkualitas dan pembangunan kependudukan. Ketidakmampuan menyiapkan lapangan kerja dan peningkatan kualitas SDM seperti pendidikan yang tinggi dan pelayanan kesehatan dan gizi yang memadai, maka akan terjadi permasalahan, yaitu terjadinya pengangguran yang besar dan akan menjadi beban daerah. Jumlah penduduk yang besar pada masa bonus demografi tentu akan meningkatkan penawaran angkatan kerja di Indonesia. Dan penawaran angkatan kerja dalam jumlah yang besar akan berpotensi meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Data BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Bulukumba yang berusia 15- 64 tahun sebesar 70,13 persen. Pemerintah Kabupaten Bulukumba harus menangkap peluang ini dengan merancang road map pengembangan SDM unggul dan berdaya saing sehingga bonus demografi dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

2.6.3 Isu Strategis Daerah

2.6.3.1 Isu Strategis Sulawesi Selatan

Kebijakan pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 diarahkan untuk mencapai Visi Sulawesi Selatan yaitu “Sulawesi Selatan Yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter. Visi tersebut diwujudkan melalui 5 (lima) misi yaitu: 1. Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif; 2. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel; 3. Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif; 4. Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter; 5. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan Isu strategis pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023 sebagai berikut:

1. Mendekatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Syarat pokok pelayanan kesehatan yang baik berkualitas adalah pelayanan kesehatan tersebut harus tersedia di masyarakat (available) serta bersifat berkesinambungan (continuously).
2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan harus memastikan perekonomian dapat terus bertumbuh positif.
3. Kualitas infrastruktur yang menunjang kegiatan perekonomian. Sulawesi Selatan memiliki luas kurang lebih 45.500 km persegi, dengan daratan yang luas dan gugusan pulau-pulau. Untuk menunjang perekonomian, dibutuhkan interkoneksi antar daerah yang ditunjang oleh Infrastruktur yang mumpuni.
4. Pemerataan Pendapatan bagi warga Sulawesi Selatan. Selain fokus terhadap pertumbuhan ekonomi, sebuah pemerintahan tidak bisa melupakan pemerataan pendapatan warganya.
5. Keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Untuk mengakselerasi pembangunan, kunci utama yang harus dimiliki adalah keberadaan Sumberdaya Manusia (SDM) yang berkualitas.
6. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam. Letak geografis yang strategis dan kondisi biofisik wilayah yang mendukung menyebabkan Sulawesi Selatan memiliki sumberdaya alam yang berlimpah.
7. Revitalisasi Paradigma pengelolaan Komoditi (Petik, Olah, Jual) Industri merupakan salah satu komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi.
8. Sulawesi Selatan sebagai poros maritim.

2.6.3.2 Isu Strategis Kabupaten Bulukumba

Isu strategis Kabupaten Bulukumba merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan yang dielaborasi berdasarkan dinamika isu-isu strategis internasional, nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan. Isu Strategis Kabupaten Bulukumba dalam RPJMD Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis sumber daya lokal

Dalam rangka pemerataan pendapatan bagi masyarakat Bulukumba khususnya peningkatan nilai tukar petani dan menurunnya angka kesenjangan (Indeks Gini) serta penurunan rasio ketergantungan.
2. Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih, melayani dan inovatif

Peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan daya saing daerah. Pemantapan kesejahteraan masyarakat ini merupakan lanjutan dari peningkatan pembangunan sumberdaya manusia, yang diharapkan akan meningkat baik pada pendidikan, kesehatan serta pendapatan masyarakat Kabupaten Bulukumba. Pembangunan pada penggalan terakhir ini diharapkan dapat menyempurnakan tingkat kesejahteraan masyarakat menuju Bulukumba yang bermarwah, maju dan sejahtera
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

Pemantapan kualitas sumberdaya manusia, infrastruktur dan perekonomian masyarakat menuju Bulukumba yang majudan sejahtera. Pemantapan kualitas sumberdaya manusia dan infrastruktur inimerupakan lanjutan dari peningkatan pembangunan sebelumnya yang diharapkan telah membentuk struktur perekonomian daerah yang kuat baik perekonomian yang mendukung industri maupun perekonomian berbasis masyarakat. Kualitas sumber daya yang memiliki daya saing yang baik serta infrastruktur konektivitas yang telah lancar ntar kawasan.
4. Mendorong kontribusi sektor pertanian, perikanan, pariwisata, perindustrian dan perdagangan

Peningkatan penciptaan kawasan-kawasan ekonomi lokal yang telah direncanakan pada pembangunan berbasis spasial Kabupaten Bulukumba. Penguatan lokus pembangunan ini dilakukan secara terintegrasi dan mendukung kebijakan-kebijakan pembangunan nasional serta provinsi. Pembangunan yang terarah dan terintegrasi pada lokus-lokus ini dimaksudkan untuk menciptakan kemandirian masyarakat serta mendorong peningkatan produktifitas dan jiwa wirausaha (enterpreneuership) generasi muda yang berbasis pada UMKM (Start Up) sehingga sub sektor perekonomian semakin maju.

5. Peningkatan kualitas, kapasitas dan penataan infrastruktur wilayah

Pemulihan ekonomi dan kondisi masyarakat sudah mulai membaik kembali akibat dari pandemi Covid-19. Difokuskan pada peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan sebagai penopang utama terhadap pengembangan perekonomian masyarakat berbasis potensi unggulan daerah dengan mengedepankan penggunaan dan penerapan teknologi.

6. Meningkatnya aspek Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dalam mendukung perekonomian daerah.

7. Sinergitas kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan stakeholder lainnya.

2.7 Inovasi Daerah

Seiring dengan dinamika pembangunan di Kabupaten Bulukumba, terdapat beberapa inovasi yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya dan rencana akan dilakukan pada tahun 2023. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II-263
Daftar Inovasi Kabupaten Bulukumba

No	Inovasi	Deksripsi Singkat
1	Karcis Elektronik Kawasan Pantai Bira(Kareba)	Untuk mempermudah pelayanan transaksi karcis atau tiket masuk kawasan wisata Bira dan bertujuan untuk meningkatkan PAD
2	Pelayanan Perizinan Bagi Pedagang Pasar Sentral Bulukumba (Lupakanmi Pazar)	Meningkatnya pelayanan perizinan bagi masyarakat
3	Silikha (Sistem Layanan Informasi Dan Konsultasi Hukum Daring)	Layanan konsultasi hukum kepada ASN dan aparat pemerintah terkait dengan pemerintah daerah. Pemohon dapat mengajukan melalui link google form atau no WA yang tersedia kemudian akan di respon oleh petugas di dalam jam kerja.
4	Klinik Pepes Yanlik	Klinik untuk memfasilitasi OPD dalam pembuatan SPP, SKM, forum Konsultasi Publik dan layanan pengaduan.
5	E-Office Termini (Tertib Administrasi)	Penyajian surat keluar dan masuk yang belum cepat, efektif, efisien dan informatif. Komunikasi eksternal dapat berjalan secara langsung dan komunikatif.
6	Well Come Snack Dan Drink “ Sedapkepuncak” (Selamat Datang Di Bulukumba Kusapa Engkau Dengan Kue Dan Minumanku)	Tersedianya Panganan dan Minuman Lokal di setiap Penerimaan Kunjungan Tamu Sebagai Panganan dan Minuman Selamat Datang. Ada Display Pengolahan Panganan yang disiapkan dengan inovasi varian baik rasa maupun bentuk panganan yang disajikan pada saat ada peneriman kunjungan.
7	Sistem Layanan Jadwal Tentative (Sila Jati)	Aplikasi yang dapat diakses oleh OPD/Ormas untuk mengetahui jadwal pimpinan
8	Sistem Aspirasi Online	Aplikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan aspirasi dari seluruh masyarakat dan dapat langsung direspon.
9	Appti (Aplikasi Pemantauan Dan Pemeriksaan Tindak Lanjut	Aplikasi untuk memudahkan proses pemeriksaan. Mulai dari mengupload surat tugas, kertas kerja, dll. OPD dapat mengupload berkas via aplikasi tersebut. Laporan Hasil Pemeriksaan juga dapat dilihat oleh auditee.

No	Inovasi	Deksripsi Singkat
10	Go Asesment (Goment) Hari Ini Selesai Jangan Tunggu Sampai Besok (Rijama)	Go Asesment mengarahkan para siswa lebih aktif dan kreatif Hari ini selesai jangan tunggu sampai besok: perlunya pelayanan yang prima dalam pendidikan.
11	Sistem Informasi Kawasan Permukiman (Si Kasper)	Inovasi Sistem Informasi Kawasan Permukiman merupakan suatu sistem yang berisi informasi dalam penyediaan data tentang Kawasan permukiman mengenai kondisi wilayah Kecamatan, Kelurahan/Desa hingga tingkat paling kecil (RT) yang berbasis GIS untuk pengembangan Kawasan Permukiman di Kabupaten Bulukumba.
12	Simpatik Penegakan Perda (SIMPEDA)	Sistem Penanganan Penegakan Perda dan Perbup di Wilayah Kabupaten Bulukumba selama ini mengedepankan penanganan dengan cara persuasif dalam menjaga keamanan, ketertiban dan ketentraman umum tetapi masih belum maksimal dan belum diterima dengan baik oleh masyarakat karena dianggap masih bersinggungan dengan kepentingan masyarakat sehingga muncul persepsi dikalangan masyarakat bahwa Satpol.PP terkesan arogan/musuh masyarakat.
13	Siap Membantu Damkar (SIMDA)	Dengan terbentuknya Relawan SIMDA (Siap Membantu Damkar) di beberapa Desa berarti dapat mengurangi Tingkat Kerugian Masyarakat yang berada disekitar kebakaran karena lebih cepatnya ada tindakan pemadaman, sehingga masyarakat merasa aman dari ancaman kebakaran yang bisa berdampak korban jiwa, korban harta dan terputusnya akses perekonomian.
14	Aksi Cepat, Tepat Pemadam Kebakaran (Asap Pak)	Sistem pelaporan terjadinya bahaya kebakaran lewat aplikasi android lebih mudah karena masyarakat yang berada di lokasi kebakaran hanya mengambil gambar atau video kejadian kebakaran tersebut dan akan langsung terkoneksi dengan Komputer petugas operator yang ada di Posko Induk Pemadam Kebakaran dan petugas lainnya yang sudah menginstal aplikasi ASAP PAK (Aksi cepat, dan tepat Pemadam Kebakaran).
15	Peduli Bijangta (Peduli Keluarga)	Mengunjungi pasien ODG], membantu pengobatan dan mengurus dokumen kependudukan. Pasien yang telah sembuh diberikan pembinaan dan keterampilan.
16	Gadis Manis (Gerakan Validasi Pemutahiran Data Penerima Layanan Sosial)	Gerakan validasi data yang akurat bagi penerima layanan sosial dengan cara mendatangi rumah (door to door).
17	Proposal Masyarakat Interaktif Untuk Nelayan (Promina)	Proposal Masyarakat Interaktif untuk Nelayan (PROMINA) ini merupakan media interaktif secara online bagi masyarakat sehingga masyarakat yang membutuhkan bantuan sektor perikanan dapat dengan mudah mengajukan kebutuhan mereka.
18	Gerakan Tabur Benih Dilaut (Getar Belut) "Sedekah Laut Versi Millenial"	Getar Belut adalah gerakan tabur benih di laut sebagai upaya memulihkan ekosistem laut. Tebar benih yang dimaksud bukan saja berupa benih ikan namun juga berupa benda-benda padat yang nantinya akan berfungsi sebagai substrat benih-benih polip karang untuk bertumbuh.
19	Retribusi Pasar Non Tunai	Inovasi Pelaksanaan penarikan Retribusi Pasar non Tunai akan memudahkan dalam penarikan retribusi dan laporan realisasi akan mudah diketahui, dan dengan inovasi tersebut mampu meningkatkan PAD.
20	Aplikasi Layanan Pengawasan Lingkungan Hidup Akurat Dan Terintegrasi (Alasan Lihai)	Aplikasi Layanan Pengawasan Lingkungan Hidup Akurat dan Terintegrasi (ALASAN LIHAI) adalah sistem yang dibangun untuk memudahkan pelaporan pengelolaan dan pemantauan LH bagi pelaku usaha dan kegiatan.
21	Pandubersolek "Pengarsipan Dokumen Berbasis Elektronik"	PANDU BERSOLEK "Pengarsipan Dokumen Berbasis Elektronik" adalah aplikasi pelayanan administrasi kepegawaian ini menjadi tools memudahkan bagi tugas pelayanan pada sub bagian kepegawaian yang selanjutnya seluruh urusan kepegawaian tidak lagi dibebankan ke masing-masing pegawai tetapi terselesaikan melalui tools aplikasi ini

No	Inovasi	Deksripsi Singkat
22	Sistem Informasi Pelayanan Persampahan Dan Lingkungan Hidup (Si Papa Lh)	Aplikasi SI PAPA LH dibuat untuk menyelesaikan permasalahan pelayanan Bidang Lingkungan Hidup. Aplikasi menyediakan 8 enis layanan Bidang LH yaitu pelayanan persampahan, pelayanan pembinaan adiwiyata, pelayanan pengujian laboratorium, pelayanan persetujuan tekhnis, pelayanan pengaduan lingkungan, pelayanan perizinan lingkungan, pelayanan bank sampah serta pelayanan pembinaan perumahan sosial.
23	Terong Pustaka (Teras Dongeng) Perpustakaan Muncul Setelah Diskusi Tentang Latar Belakang	Sasarannya adalah anak usia dini yaitu TK dan SD untuk lebih memperkenalkan/meningkatkan pengenalan terhadap literasi dasar juga mensosialisasikan perpustakaan pada anak dengan memanfaatkan teras Perpustakaan Daerah.
24	Pena (Perpustakaan Untuk Anak)	Pena merupakan salah satu inovasi yang akan dirintis tahun ini. Bektuk kegiatan adalah menentukan titik layanan pada area pelayanan umum seperti tempat pelayanan kesehatan(Rumah sakit /klinik), dan area publik.
25	Terong Pustaka (Teras Dongeng Perpustakaan)	Terong Pustaka adalah salah satu kegiatan pembudayaan kegemaran membaca/budaya literasi.
26	Wisata Pustaka	Kegiatan memperkenalkan perpustakaan kepada anak, agar mereka dapat mengetahui perpustakaan sejak dini.
27	Tasbih Pustaka (Disabilitas Bisa Perpustakaan Peduli)	Implementasi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, dengan mengundang para penyandang disabilitas ke perpustakaan untuk berkegiatan.
28	Kerjasama Antar Desa Membangun Desa Cerdas (Kembang Desa)	Penyiapan SDM terkait pelatihan dan pendampingan. Penyiapan infrastruktur yakni konektifitas/ jaringan, peralatan penunjang dan data desa. Penyediaan platform digital dengan penggunaan database desa khususnya untuk perencanaan pembangunan desa dan pengembangan 6 pilar desa.
29	Kado Pernikahan Dukcapil	Kado Pernikahan Dukcapil adalah Kado yang diberikan oleh pihak Dukcapil berupa Kartu Keluarga,KTP-el sepasang penganting dengan perubahan status perkawinan dan perubahan alamat Inovasi ini akan berdampak pada naiknya capaian kepemilikan akta lahir dan KIA di Kab.Bulukumba
30	Gadis Desa (Gabungan Aksi Disekolah Dan Didesa)	Layanan Inovasi GADIS DESA adalah Inovasi pelayanan jemput bola yang dilakukan di sekolah (SMA dan sederajat) serta layanan yang diberikan dikantor desa dn kelurahan sesuai permintaan/persuratan kepada Dinas Dukcapil.
31	Hadiah Ulah Dukcapil	Kado Ulang tahun Dukcapil adalah upaya pelayanan jemput bola yang diberikan kepada anak usia 17 tahun yang wajib KTP-el, dimana layanan ini diberikan kepada pelajar usia 17 tahun disekolah dengan bekerja sama dengan Pengurus IKA, Osis dan Pramuka di Sekolah.
32	Loket Mu (Layanan Online Kependudukan Terpadu Masyarakat Umum)	Inovasi Loket MU adalah Layanan Online Kependudukan Terpadu Masyarakat Umum berawal dari keluhan masyarakat yang sering dating bola balik ke Ducafil untuk pengambilan Dokumen Kependudukan yang jarak tempuh ke Ducafil sangat jauh , sehingga diperlukan solusi untuk bekerjasama dengan jasa antar yang mengantar dokumen kependudukan langsung kerumah ,tempat kerja atau dimana pemohon akan menerima dokumen kependudukannya.
33	Pinisi Dukcapil (Pusat Informasi Inovasi Dukcapil)	PINISI DUKCAPIL adalah pusat informasi Inovasi Dukcapil yang merupakan sebuah wadah untuk menghimpun semua Inovasi Dukcapil agar masyarakat luas dapat mengakses informasi terkait Inovasi Dukcapil yang telah di laksanakan dengan harapan dapat dilakukan secara terus menerus dan direplikasi baik oleh pejabat Dukcapil maupun Dinas Dukcapil se Indonesia.
34	Sekolah Sadar Adminduk	Pelayanan ini dlawali dengan sosialisasi disekolah setiap tahun ajaran baru untuk memberikan pemahaman kepada pihak sekolah dan orang tua murid terkait tertib administrasi

No	Inovasi	Deksripsi Singkat
		kependudukan. Jika sekolah tersebut sudah tercipta sekolah sadar adminduk maka akan dicanangkan benmdera GISA atau pintu Gerbang SEKOLAH SADAR ADMINDUK.
35	E - KIA (Edukasi Kartu Identitas Anak)	Inovasi Pelayanan Kepemilikan KIA dilakukan dengan lebih menarik dan lebih efisien dengan melibatkan Forum Anak Indonesia dengan metode pendekatan emosional, kegiatan yang berkaitan dengan dunia anak sehingga melahirkan layanan yang Ramah anak sehingga saat pelayanan perkaman KIA anak anak merasa senang dan tertarik, termasuk didalamnya peningkatan kepemilikan KIA sejak dini dengan memberikan edukasi informasi yang sesuai dengan dunia anak.
36	Gammara (Gerakan Masyarakat Menuju Sadar Adminduk)	Upaya yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah setempat dalam meningkatkan kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Kesadaran serta keterlibatan dalam upaya pemenuhan hak hak identitas kependudukan melalui layanan yang memudahkan yaitu melalui Layanan No WA Admin.
37	Lorong Jelita (Layanan Jemput Bola Identitas Anak Dari Lorong Ke Lorong)	Inovasi Lorong Jelita lahir karena adanya keterbatasan pelayanan Kepemilikan KIA yang tadinya dilakukan disekolah sekolah kerjasama dengan Diknas Dan Himpaudi , namun karena masa Pandemi dan sekolah belajar Daring sehingga mengakibatkan layanan kepemilikan KIA terhambat sementara Pusat dalam hal ini Dirjen Dukcapil telah menetapkan Target Capaian Kepemilikan KIA tingkat Nasional harus mencapai 40%.
38	My Ktp-El, My Dream	-
39	Fotoku Online (Formulir Persyaratan Dokumen Kependudukan Online Yang Dapat Diakses Melalui Website Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Bulukumba	Inovasi Fotoku Online memudahkan masyarakat dalam kepengurusan dokumen kependudukan yang awalnya persyaratan diambil secara manual namun setelah adanya inovasi ini menjadi sitem online yang berbasis web . Masyarakat tinggal mengunduh persyaratan dokumen kependudukan terkait formulir yang diperlukan dalam mengurus dokumen kependudukan dan bisa diakses melalui rumah sendiri.
40	Jempol (Layanan Jemput Bola Perekaman Ktp-El Di Sekolah Sekolah	Pelayanan Perekaman Secara Secara Offline Disekolah Sekolah Bagi Pelajar Yang Berusia 17 Tahun Keatas Kerjasama Dengan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dan Pengurus Osis Slta Dan Masih Berkelanjutan Sampai Sekarang Dilaksanakan Setiap Tiga Bulan (Per Triwulan)
41	"Sinergitas Pelayanan kepemilikan Akta kematian Dengan pendataan Masyarakat Yang Meninggal Dunia	Kegiatan Pelayanan kepemilikan akta kematian di Kecamatan Ujungloe ini merupakan Implementasi dari Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
42	Laraku Nyata (Pelayanan Administrasi Kependudukan Bagi Penyandang Disabilitas)	Layanan jemput bola dari desa kedesa dalam hal pendataan penyandang difabel/disabilitas yang belum memiliki identitas kependudukan yang akan digunakan untuk mendapatkan layanan umum lainnya kerja sama dengan PPDI dan PMI
43	Adminduk Inklusif (Pelayanan Administrasi Kependudukan Bagi Masyarakat Inklusif)	Layanan jemput bola dari rumah ke rumah bagi penyandang disabilitas/difabel yang belum memiliki ktp-el kerjasama dengan ppdi, pmi, bkprmi,tp pkk, koni dan dai muda, bpjs dan rsu
44	Gertas(Gerakan Tuntas Administrasi Kependudukan Tahun)	Layanan jemput bola kolaborasi dengan mitra kerjasama yang diperkuat dalam perjanjian kerjasama dan inovasi ini dilaksanakan pada 136 desa/kelurahan pada 10 kecamatan.
45	Jempol Dusun Terpencil Na'Na Dan Dusun Liukang Lohe	Pelayanan jemput bola di Dusun terpencil Na'na dan Dusun Liukang Lohe yang jauh akses internet dan masyarakat kesulitan mendapatkan layanan dokumen kependudukan
46	Layanan Jempol Akta Lahir	inovasi pelayanan kepemilikan akta lahir dan penambahan anggota keluarga dengan melibatkan dinas kesehatan, klinik bersalin ,rumah sakit dan puskesmas

No	Inovasi	Deksripsi Singkat
47	One Day Services Kartu Keluarga Ok	Pemutakhiran data kartu keluarga dengan sehari jadi yang mana sebelumnya pelayanan selesai selama 3-7 hari
48	Pelayananin(Pelayanan Tri In One)	INOVASI LAYANAN SATU Permohonan dapat tiga dokumen kependudukan (pelayanan terintegrasi)
49	Kakaekku Datang (Kartu Keluargaku Datang)	Inovasi pelayanan percepatan validfasi data kependudukan dan perbaikan data kartu keluarga bekerjasama dengan tim penggerak pkk di sepuluh kecamatan, desa dan kelurahan dimana masyarakat terlayani dari rumah kerumah
50	Pelayanan Pindah Datang Melalui Aplikasi Whatshapp	Inovasi pelayanan untuk memberi kemudahan bagi warga negara yang kan melakukan pindah datang antar provinsi dan antar kabupaten melalui aplikasi whatshapp sehingga masyarakat tidak perlu lagi kembali kedaerah asal untuk mengurus skpwnii (surat keterangan pindah warga negara indonesia)
51	Pemuda Perkasa (Pemutakhiran Data Dan Perekaman Di Desa Kawasan Adat)	Inovasi pelayanan jemput bola dengan melibatkan pemangku adat kawasan hukum adat tanah toa kajang sebagai kawasan tertutup mengingat masih banyaknya warga dalam kawaan adat belum terdata data kependudukannya
52	Layanan Adminduk Melalui Web Pemkab	inovasi pelayanan persyaratan dan prosedur pelayanan melalui whatshapp
53	Ramah Adat (Perekaman Masyarakat Hukum Adat)	inovasi pelayanan perekaman ktp-el secara online dimana masyarakat direkam lansung ceatk melalui mobil pelayanan dan lansung doserahkan kepada masyarakat
54	Peta Duka (Pengelolaan Data Dokumen Kematian)	inovasi pelayanan kepemilikan akta kematian yang diantarkan lansung kepada keluarga yang berduka pada saat malam taksiyah bekerjasama dengan DAI MUDA,KPUI Kasimpurangi dan Petugas Penguburan.
55	Jempol Kia Kesekolah Sltp, Sd, Tk Dan Paud	inovasi pelayanan jemput bola ke sekolah sekolah dari tk sampai sd di 10 kecamatan kerjasama dengan dinas pendidikan dan himpaudi, persit, dwp dan bhayangkari
56	Gadis Desa (Gabungan Aksi Disekolah Dan Desa)	inovasi pelayanan jemput bola perekman ktp-el, akta lahir, kia,kartu keluarga melalui mobile (mobil pelayanan online) dimana masyarakat dilayani di sekolah sekolah dan di kantor desa/kelurhan lansung cetak
57	Peduli Mapan (Pelayanan Kependudukan Online Dimasa Pandemi)	inovasi pelayanan dimasa pandemi untuk memudahkan masyarakat mengurus dokumen kependudukannya dirumah saja tanpa harus ke kantor dinas dukcapil melalui layanan aplikasi whatshapp
58	Skm Online	inovasi pelayanan terkait tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan dukcapil yang dapat diakses melalui link pelayanan secara online
59	Gammara (Gerakan Masyarakat Menuju Sadar Adminduk)	Inovasi pelayanan kepada masayarakat dusun Liukang Lohe yang mengalami hambatan geografis dan jaringan dalam mendapatkan layanan Administrasi Kependudukan dengan jalan pelibatan masyarakat dan pemerintah setempat dalam kepemilikan identitas kependudukan
60	Lorong Jelita (Pelayanan Jemput Bola Identitas Anak Dari Lorong Ke Lorong)	inovasi pelayanan jemput bola dalam upaya meningkatkan capaian kepemilikan kia dimasa pandemi dengan sistim jemput bola
61	Layanan Link Pengaduan Online	inovasi pelayanan dimasa pandemi terkait pengaduan masyarakat melalui media sosial dan link pengaduan yang disiapkan oleh bidang informasi untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan pertanyaan dan aduan dimasa pandemi
62	Loket Jastar (Layanan Online Kependudukan Terpadu Jasa Antar	inovasi pelayanan dimasa pandemi dalam upaya mengurangi kerumunan dikantor selama masa pandemi dan upaya peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat melalui layanan antar dokumen dari rumah kerumah

No	Inovasi	Deksripsi Singkat
63	Sistem Informasi Manajemen Pajak Dan Retribusi Daerah (Simpada)	Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang transparan dan akuntabel, Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah lebih mudah dalam satu Aplikasi, Memantau potensi peningkatan PAD dari Pajak dan Retribusi Daerah dll.
64	Dikerja (Aplikasi Pelaporan Kinerja Dan Absensi Berbasis Android)	Pada Aplikasi DIKERJA dapat menampilkan Jumlah TPP sesuai dengan Kinerja dan tingkat kehadiran PNS tersebut, Absensi berbasis GPS sehingga dapat mengetahui posisi PNS tersebut, adapun tugas diluar kantor harus berkoordinasi dengan Kasubag umum dan kepegawaian selaku admin OPD, 5. Dapat melihat hasil kinerja dan jumlah kehadiran PNS setiap bulannya dll.
65	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten)	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan atau yang lebih sering disingkat dengan PATEN merupakan suatu penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dimana dalam proses pengelolaannya mulai dari permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu loket atau meja pelayanan.
66	Polwan : Pos Layanan Malam Warga Herlang	Meningkatkan kualitas layanan warga Kecamatan Herlang yang efektif dan efisien melalui POLWAN (Pos Layanan Malam Warga Herlang dan Mewujudkan tata kelola pemerintahan Kecamatan Herlang yang bersih dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).
67	(Petir) Penyelenggaraan Pemerintahan Terintegrasi	Petir Ini juga mendukung Visi Misi Bupati Bulukumba pembinaan dan pengawasan ini kami lakukan secara terintegrasi mulai dari Polsek, Danramil, KUA dan Puskesmas ,tentu kita membina perangkat desa dan kelurahan guna terlaksananya sumber daya manusia yang baik ,mengenia dengan Pelayanan system Online belum dapat dilaksanakan dikarenakan belum adanya WIFI di Kantor Camat olehnya itu kami dari kecamatan belum bisa melaksanakan pelayanan secara online.
68	Teras Pelayanan	Membuat tempat Pelayanan Administrasi dan konsultasi di Halaman Kantor Kecamatan Rilau yang akan diberi nama TERAS PELAYANAN untuk memudahkan memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mendapatkan suasana baru yang sehat dan dapat memberikan rasa puas terhadap masyarakat yang dilayani karena tempat pelayanan yang strategis dan tidak perlu memasuki ruangan setiap kepala seksi.
69	Layanan Informasi Data Yang Akurat Dan Cepat	Penyediaan Informasi data melalui Bank Data Ujung Loe adalah untuk memenuhi ketersediaan data secara cepat dan tepat dengan memanfaatkan perangkat jejaring secara on line baik melalui, whatsApp (WA), Facebook dan sistem on line lainnya klo memungkinkan, dan termasuk dengan cara sistim manual atau cetakan.
70	Layanan Penelitian Dan Pengkajian (Lanikaji)	Bappelitbangda pada bidang Litbang sebagai pelaksana Kelitbang selama ini melakukan penelitian dan pengkajian sebanyak-banyaknya, tapi dengan ide inovasi ini, Kelitbang didorong banyak digunakan oleh SKPD/ OPD maka, Kelitbang diajukan atau kewenangan SKPD/OPD. Olehnya itu ICP yang disampaikan oleh peneliti sesuai rekomendasi pengguna, agar informasi ini dapat cepat diterima pengelola Kelitbang dapat menggunakan WhatsApp (WA)
71	Klinik Laboratorium Inovasi (Nilan)	Bappelitbangda pada bidang Litbang sebagai koordinator pelaksana Inovasi Daerah sesuai PP.No 38 tahun 2017, menyediakan ruang klinik guna mengkonsultasikan ide-ide atau inovasi yang akan diselenggarakan oleh SKPD/ OPD, sehingga terbangun inovasi dari Inovator yang kuat dalam merancang, maupun melaksanakan inovasi sesuai kewenangan SKPD/OPD.
72	E-Monev Sipakatau	Proses awal adalah penginputan dokumen RPJMD pada aplikasi e-Planning di menu e-RPJMD pada halaman ini berisi informasi

No	Inovasi	Deksripsi Singkat
		mengenai executive summary pencapaian program dan kegiatan selama 5 tahun (periode RPJMD) dsb.
73	One Base, One Map, One Policy (Satu Data, Satu Peta, Satu Regulasi)	Kegiatan Kebijakan satu data setiap tahunnya dilaksanakan di Balai Perumahan Permukiman Wilayah Provinsi SulSel, merujuk peraturan Presiden No 39 tentang " Mengatur Penyelenggaraan Tata Kelola Data yang di hasilkan oleh instansi daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan"
74	Penyediaan Layanan Pengaduan Dan Konsultasi Yg Sesuai Indikasi Kebutuhan	Inovasi Penyediaan layanan Pengaduan dan Konsultasi Sesuai Indikasi Kebutuhan merupakan Ruang khusus dan layanan secara online yang disediakan untuk Pengaduan dan Kosultasi terhadap kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Konsultasi tentang KB dan dan konsultasi Remaja bermasalah sehingga dalam proses pengaduan dan konsultasi lebih menjaga privasi dari yang bersangkutan dengan alur pelayanan yaitu dari pihak pelapor bisa melaporkan secara langsung ke OPD.
75	Sapa (Sahabat Pegawai Bulukumba)	SAPA merupakan inovasi yang dibuat atas dasar tingginya tingkat tingkat perceraian dikalangan pegawai dalam lingkup Pemkab Bulukumba sehingga bekerjasama denan Darma Wanita Persatuan, TP-PKK dan PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) dengan memberikan edukasi dan asilitas mediasi kepada pasangan pegawai agar tetap mempertahankan rumah tangga

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mendorong pencapaian program prioritas dalam rangka mewujudkan target-target pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Bulukumba pada tahun 2023 disusun dengan mengacu pada kebijakan ekonomi yang termuat dalam dokumen RKP Nasional, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 dan RPJPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2005-2025.

Kerangka ekonomi Kabupaten Bulukumba tahun 2023 yang didalamnya juga memuat kerangka pendanaan tahun yang sama, merupakan gambaran tentang perkiraan keadaan ekonomi Kabupaten Bulukumba Tahun 2023, perkiraan tersebut didasari pada perekonomian global, nasional dan regional.

Dalam rangka memenuhi target kinerja Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023, gambaran tentang kondisi perekonomian tahun bersangkutan menjadi bagian penting untuk merumuskan kerangka pendanaan yang selanjutnya akan dituangkan pada KUA dan PPAS Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 sebagai pedoman penyusunan APBD Kabupaten Bulukumba Tahun 2023. Kerangka pendanaan tersebut menjadi basis dalam pengalokasian anggaran secara efektif dan efisien.

Selain itu, kebijakan ekonomi Kabupaten Bulukumba diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas melalui pengembangan kegiatan utama dengan mewujudkan tujuan bersama dari kebijakan pembangunan dengan berdasarkan potensi lokal untuk mengurangi disparitas kesejahteraan antar penduduk serta memantapkan infrastruktur wilayah dalam rangka mendukung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi.

Untuk mencapai tujuan dari arah kebijakan ekonomi makro Kabupaten Bulukumba tahun 2023 maka akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap semua program yang telah dan sedang dilaksanakan untuk kemudian dilakukan penajaman terhadap prioritas pembangunan daerah.
2. Dengan keterbatasan APBD maka fokus penganggaran pembangunan ekonomi akan lebih diarahkan pada upaya pemecahan masalah utamanya permasalahan yang muncul pada masyarakat golongan menengah kebawah, serta pada upaya pemulihan ekonomi akibat dampak dari Pandemi *Covid-19*.
3. Menyelenggarakan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*) sehingga tidak akan terjadi penyalahgunaan wewenang dan praktek KKN.
4. Mengupayakan melahirkan kebijakan yang mendukung pembangunan ekonomi yang berbasis kerakyatan dan berkeadilan dengan tetap menyelaraskan dengan isu dan permasalahan yang muncul pada setiap bidang.
5. Terus menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban serta menumbuhkan iklim investasi dengan menjamin adanya kepastian hukum bagi investor yang akan berinvestasi di Kabupaten Bulukumba serta mendorong *high-cost economy*.

3.1.1 Prospek Dan Tantangan Perekonomian Daerah

3.1.1.1 Prospek Perekonomian Daerah

Perekonomian Bulukumba pada tahun 2023 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2022. Penerapan adaptasi Kebiasaan Baru disertai dengan upaya pemerintah dalam menggerakkan kembali roda perekonomian diperkirakan akan meningkatkan perbaikan konsumsi rumah tangga serta investasi yang mulai terakselerasi mendorong tren pemulihan ekonomi.

Letak Bulukumba yang strategis dengan beberapa kelebihan yang dimiliki secara struktural dimana Bulukumba merupakan episentrum perekonomian Sulampua, hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi Bulukumba relatif stabil dibandingkan dengan perekonomian sulampua. Dalam kaitan itu Bulukumba dapat mengambil langkah langkah strategis untuk menjadi basis perekonomian utama di Kawasan Provinsi Sulawesi Selatan.

Selaras dengan tema pembangunan Tahun 2023, Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomiyang lebih tinggi dan berkelanjutan. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaankelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Rezim ekonomi mengalami perlambata Aspek lain pembangunan ekonomi ke depan adalah aspek lingkungan. Perubahan iklim dan menurunnya daya dukung lingkungan dapat berdampak negatif terhadap pencapaian target pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya pembangunan kedepan harus diarahkan untuk mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, target penurunan dan intensitas emisi serta kapasitas daya dukung SDA dan daya tampung Lingkungan Hidup saat ini dan di masa yang akan datang. Rezim ekonomi mengalami perlambatan, Kemunduran, membutuhkan penyesuaian. Dampak *pandemi Covid-19* membuat perekonomian terjerembab. Konon terparah dalam sejarah. Ditengah upaya tata ulang prioritas pembangunan, satu agenda akan tetap digenjot. Selain penguatan inovasi, pemantapan hilirisasi pengolahan sumber daya alam juga menjadi fokus pembangunan tahun 2023. Hilirisasi bukan isu baru. Hilirisasi bahan mentah yang berasal dari industri ekstraktif di wilayah Bulukumba harus dilakukan besar-besaran. Mulai produk pertanian, perkebunan, perikanan, hingga migas.

Ada tiga rasionalitas dalam upaya mewujudkan hilirisasi SDA. Dalam jangka pendek, hilirisasi SDA bertujuan memperbaiki neraca perdagangan. Selama ini, neraca perdagangan memang kedodoran. Meskipun kaya SDA, namun industri domestik masih sangat ekstraktif. Produk SDA langsung diekspor sebagai komoditas nilai-nilai tambah- membuat tak mampu mendongkrak nilai ekspor. Ironisnya, pengolahan bahan mentah dari SDA kemudian diimpor dalam bentuk barang jadi. Dampak lanjutannya menghasilkan devisa minimalis. Konsekuensinya, Bulukumba terus mengalami defisit transaksi berjalan.

Dalam jangka menengah. Hilirisasi sangat penting untuk mewujudkan lokomotif pertumbuhan ekonomi. Hilirisasi akan menciptakan berbagai industri pengolahan bahan baku yang melimpah. Selain akan menciptakan nilai tambah produk, multiplier effect-nya akan menciptakan berbagai peluang usaha lainnya. Mendatangkan investasi, menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, dan meningkatkan pendapatan. Pada akhirnya hilirisasi bisa menjadi pintu masuk terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai kawasan di Sulawesi Selatan.

Dalam jangka panjang, hilirisasi SDA akan membawa Bulukumba menjadi Kawasan industri, menjadi daerah eksportir- produsen dengan produk akhir bernilai tinggi, dan

berkembang menjadi daerah industri maju di bidang pertanian, demikian pula dengan perikanan, perkebunan, pertambangan dan industri berbasis SDA lainnya.

Inovasi dan hilirisasi bidang pertanian sangat diperlukan mengingat pandemi menjadi momentum meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi produk lokal. Hilirisasi pertanian bersifat *renewable* lebih muda untuk dapat *sustainable* dan *environmental friendly* serta dapat mendukung kampanye *global green economy*.

3.1.1.2 Tantangan Perekonomian Daerah

A. Tantangan Perekonomian Global

Perang menghadapi pandemi virus belum usai. Hampir seluruh negara, termasuk di Asia dan Asia Tenggara, harus menghadapi tantangan yang sama, di waktu yang bersamaan pula.

Situasi seperti ini sangat jarang terjadi. Boleh jadi, peperangan melawan pandemi virus belum akan tuntas dalam waktu cepat. Kalaupun, mudah-mudahan, bisa secepatnya tertangani lantaran keberadaan vaksin semakin nyata, setiap negara masih harus menghadapi tantangan pemulihan ekonomi yang rontok sebagai konsekuensi penanganan pandemi.

Setelah berbulan-bulan diberlakukan pembatasan kegiatan sosial dan ekonomi, banyak negara mulai melakukan upaya menyeimbangkan kebijakan antara dua persoalan yang sesungguhnya bukan pilihan.

Banyak negara kini mulai berupaya menghindari keruntuhan total perekonomian sekaligus mencegah meluasnya atau munculnya gelombang baru pandemi, plus distribusi vaksin. Keseimbangan pilihan tersebut jelas bukan perkara mudah. Tetapi, setidaknya, celah-celah pemulihan ekonomi ditengarai mulai terlihat.

Dana Moneter Internasional (IMF) pada bulan April, merevisi ke atas proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2021, tetapi Indonesia justru direvisi ke bawah dari proyeksi sebelumnya di bulan Januari.

Setelah terkontraksi 3,3% (proyeksi) di 2020, *World Economic Outlook* IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global sebesar 6% di 2021, naik dari 5,5% dari proyeksi bulan Januari. Sedangkan untuk 2023, diperkirakan ekonomi dunia naik 4,4% dibanding proyeksi sebelumnya 4,2%. Sementara itu untuk Indonesia, pertumbuhan ekonomi 2022 diperkirakan di 4,3%, lebih rendah dibanding proyeksi Januari sebesar 4,8%. Untuk 2023, PDB Indonesia diperkirakan tumbuh 5,8%, di bawah proyeksi Januari sebesar 5,8%.

Untuk kelompok negara berkembang di Asia, proyeksi 2022 naik 0,6% menjadi 8,6%. Ini berkat dilonggarkannya kebijakan lockdown di beberapa negara seperti India. Tetapi, kasus *Covid-19* yang masih banyak seperti di Indonesia dan Malaysia menahan prospek pertumbuhan lebih tinggi.

IMF mengatakan prospek pemulihan global masih penuh ketidakpastian meskipun pandemi sudah berlalu setahun. Mutasi baru dan jumlah korban jiwa yang terus naik menghantui program vaksinasi yang terus berjalan. Pemulihan ekonomi bergerak dalam laju yang berbeda-beda tergantung kebijakan masing-masing negara.

IMF lebih optimistis akan pertumbuhan ekonomi global berkat kebijakan fiskal yang diambil beberapa perekonomian besar, program vaksinasi, dan adaptasi aktivitas ekonomi di tengah pembatasan sosial. Namun, masih banyak ketidakpastian terkait pandemi, efektivitas kebijakan, dan evolusi kondisi keuangan.

Berdasarkan asumsi ekonomi Makro yang tercantum dalam APBN 2022 yang disusun oleh Kementerian Keuangan, pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2022 diperkirakan sebesar 5%. Selanjutnya untuk tingkat inflasi di tahun 2022 diperkirakan berada pada kisaran 3%. Nilai tukar rupiah diperkirakan akan bergerak pada kisaran Rp.14.600 per dolar AS.

Secara umum, kondisi ekonomi nasional diharapkan mampu mendorong kondisi ekonomi regional dan daerah dimana pada tahun 2023 perekonomian global diproyeksikan stagnan, ada beberapa tahapan yang perlu diperhatikan yang patut menjadi pertimbangan yaitu:

1. Ketidakpastian Global

ketidakpastian masih akan mewarnai perkembangan perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia diperkirakan akan cenderung stagnan dengan tren melambat, masing-masing diproyeksikan sebesar 3,6 dan 3,8 persen per tahun.

2. Wabah *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*.

Merebaknya *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* menimbulkan dampak yang luar biasa (extraordinary) pada perekonomian global tahun 2020. *Covid-19* yang pertama kali muncul di Wuhan, Tiongkok, pada Desember 2019, menyebar dengan sangat cepat ke-178 negara atau 99,5% dari PDB dunia. Dengan skala dan kecepatan penyebarannya yang sangat tinggi, *Covid-19* ditetapkan sebagai pandemi global oleh World Health Organization pada Maret 2020. Selama 2020, pandemi ini telah menginfeksi lebih dari 85 juta jiwa dan mengakibatkan kematian lebih dari 1,8 juta jiwa, sehingga menyebabkan krisis kesehatan dan kemanusiaan yang besar di berbagai negara dan jumlah penduduk miskin yang meningkat di dunia. Krisis kesehatan dan kemanusiaan ini telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi kontraktif yang merata di berbagai belahan dunia.

Pada Tahun 2021 Pemerintah Pusat berupaya mengendalikan kasus *Covid-19* masih terus menjadi tantangan meski kini vaksinasi mulai berjalan. Masyarakat harus tetap disiplin dalam memberlakukan protokol kesehatan agar kasus tetap terkendali dan pemerintah tak perlu mengambil tindakan gas dan rem. Hal ini mengganggu perekonomian.

3. Defisit Transaksi Berjalan yang Meningkat

Bank Indonesia (BI) memprediksi defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) di tahun 2021 akan berada di kisaran 1,0% hingga 2,0% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Seiring dengan CAD yang bergerak rendah, BI juga optimistis aliran masuk modal asing ke Indonesia tetap berlanjut, seiring dengan ketidakpastian di pasar keuangan global yang mereda. BI juga optimistis kalau cadangan devisa akan tetap memadai, didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang baik akibat moncernya stimulus untuk pemulihan ekonomi.

Selain itu, aliran masuk modal asing juga didorong oleh imbal hasil instrumen keuangan domestik yang tetap menarik, kepercayaan yang terjaga terhadap kondisi ekonomi Indonesia, serta likuiditas global yang meningkat.

4. Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital

Saat ini dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0. Revolusi tersebut memberikan tantangan dan peluang bagi perkembangan perekonomian ke depan. Di satu sisi, digitalisasi, otomatisasi, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam aktivitas ekonomi akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi modern, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Digital teknologi juga membantu proses pembangunan di berbagai bidang di antaranya pendidikan melalui distance learning, pemerintahan melalui e-government, inklusi keuangan melalui fin-tech, dan pengembangan UMKM seiring berkembangnya e-commerce. Namun di sisi lain, perkembangan revolusi industri 4.0 berpotensi menyebabkan hilangnya pekerjaan di dunia.

5. Dampak konflik Rusia-Ukraina

Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan atau Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) memproyeksi pertumbuhan ekonomi global Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2023

tahun 2022 sebesar 3 persen secara tahunan. Proyeksi ini lebih rendah dari perkiraan semula di akhir tahun lalu, yakni 4,5 persen. Artinya, ada penurunan sekitar 1,5 persen. Penurunan ini diproyeksi berlangsung hingga tahun 2023 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,8 persen. Berdasarkan laporannya, penurunan ekonomi merupakan sebab dari konflik antara Rusia dengan Ukraina. Konflik ini menghasilkan krisis kemanusiaan bagi jutaan orang, hal ini menyebabkan Harga komoditas telah meningkat secara substansial, yang mencerminkan pentingnya pasokan dari Rusia dan Ukraina di banyak pasar, menambah tekanan inflasi serta memukul pendapatan dan pengeluaran riil, terutama untuk rumah tangga yang paling rentan.

B. Tantangan Perekonomian Nasional

Perekonomian Indonesia 2021 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp16.970,8 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp62,2 juta atau US\$4.349,5.

Ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 10,46 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 24,04 persen.

Sinergi kebijakan yang erat dan kinerja perekonomian tahun 2021 menjadi modal untuk semakin bangkit dan optimis akan pemulihan ekonomi Indonesia yang lebih baik pada tahun 2022. Penguatan sinergi dan inovasi ditujukan untuk menciptakan imunitas masal dari pandemi *Covid-19* dan pembukaan kembali sektor ekonomi prioritas, mendorong pemulihan ekonomi dalam jangka pendek melalui kebijakan peningkatan permintaan, serta memperkuat pertumbuhan yang lebih tinggi dalam jangka menengah melalui kebijakan reformasi struktural. Presiden RI, Joko Widodo, dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi atas sinergi dan komunikasi yang terjalin intens dan baik diantara jajaran otoritas, baik antara BI, OJK, LPS, dan Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan. Hal ini menjadi kunci dalam mengelola dampak varian delta Covid 19 terhadap perekonomian nasional di 2021, sehingga setiap permasalahan kecil dapat terselesaikan. Ke depan, Presiden RI juga mendorong untuk dikembangkannya ekonomi hijau dan memperkuat digitalisasi ekonomi, khususnya UMKM.

Respons bauran kebijakan BI yang bersinergi dengan kebijakan ekonomi nasional akan terus mengawal perekonomian pada tahun 2022. Inflasi rendah dan terkendali pada sasaran $3\pm 1\%$ pada tahun 2022, didukung oleh kenaikan kapasitas produksi nasional melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas dalam memenuhi kenaikan permintaan agregat di dalam perekonomian. Defisit transaksi berjalan rendah, pada kisaran 1,1-1,9% pada 2022. Stabilitas sistem keuangan terjaga, kecukupan modal tinggi, dan likuiditas melimpah. Dana Pihak Ketiga dan kredit akan tumbuh 7,0-9,0% dan 6,0-8,0% pada 2022. Ekonomi-keuangan digital akan meningkat pesat. Pada tahun 2022, nilai transaksi e-commerce diperkirakan akan mencapai Rp530 triliun, uang elektronik Rp337 triliun, dan digital banking lebih Rp 48 ribu triliun.

Bauran kebijakan BI pada tahun 2022 akan terus disinergikan dan sebagai bagian dari arah kebijakan ekonomi nasional untuk mengakselerasi pemulihan sekaligus menjaga stabilitas perekonomian. Bauran kebijakan tersebut mencakup 5 instrumen kebijakan, yaitu:

1. Kebijakan moneter

Sejalan dengan risiko meningkatnya tekanan instabilitas pasar keuangan global dari normalisasi kebijakan moneter the Fed dan sejumlah negara Advanced Economies (AEs), kebijakan moneter BI pada tahun 2022 akan lebih diarahkan untuk menjaga stabilitas (pro-stability), baik pencapaian sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar, maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2023

stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Normalisasi kebijakan moneter akan dilakukan secara sangat hati-hati dan terukur agar tidak mengganggu proses pemulihan ekonomi nasional. Sementara itu, 4 instrumen kebijakan lainnya pada tahun 2022 akan terus diarahkan untuk dan sebagai bagian dari upaya bersama untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional (pro-growth), yaitu:

2. Kebijakan makro prudensial

Kebijakan makroprudensial longgar akan tetap dilanjutkan dan bahkan diperluas untuk mendorong kredit dan pembiayaan perbankan pada sektor-sektor prioritas dan UMKM guna percepatan pemulihan ekonomi nasional, sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan dan mengembangkan ekonomi dan keuangan hijau.

3. Kebijakan sistem pembayaran

Digitalisasi sistem pembayaran terus diperluas untuk mengakselerasi ekonomi dan keuangan digital nasional, antara lain melalui penguatan konsolidasi industri, pengembangan infrastruktur sistem pembayaran yang modern (QRIS, SNAP, BI FAST), termasuk perluasan QRIS dengan target 15 juta pengguna, kerja sama QRIS antarnegara, dan melanjutkan Elektronifikasi Transaksi Keuangan Pemerintah Daerah, bansos G2P 4.0, moda transportasi, serta digitalisasi UMKM dan pariwisata.

4. Kebijakan pengembangan pasar uang

Akselerasi pendalaman pasar uang dan pasar valas sesuai Blueprint Pendalaman Pasar Uang (BPPU) 2025 juga ditempuh untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan, pembangunan infrastruktur pasar uang yang modern dan berstandar internasional, serta pengembangan instrumen pembiayaan termasuk pengembangan keuangan berkelanjutan.

5. Kebijakan UMKM dan ekonomi keuangan syariah

Program-program pengembangan ekonomi-keuangan inklusif pada UMKM dan ekonomi-keuangan syariah juga terus diperluas, termasuk dengan digitalisasi serta perluasan akses pasar domestik dan ekspor.

Untuk mencapai target tersebut di tahun 2023 yang merupakan tahun ketiga, Prioritas Nasional tersebut, yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Mencermati perkembangan kasus Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Indonesia pada awal Maret 2021 sampai dengan Maret 2022, hal ini direspon Pemerintah Pusat dengan mengeluarkan kebijakan vaksinasi serentak di seluruh wilayah Indonesia yang diharapkan mampu untuk menekan laju penyebaran *Covid-19* dan menimbulkan relaksasi terhadap Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa provinsi yang pada akhirnya mampu menggerakkan sektor ekonomi dan perdagangan.

Dengan mempertimbangkan kondisi global tersebut dan sesuai tema RKP 2023 yaitu **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”** dengan target ekonomi makro yang harus dicapai pada akhir tahun 2023, antara lain: (1). Pertumbuhan ekonomi 5,3 – 5,9 persen; (2). Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 27,02 %; (3). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,3-6,0 persen; (4). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2023

Tingkat Kemiskinan 7,0 – 8,0 persen, (5). Rasio Gini sebesar 0,375-0,378 nilai; dan (6). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 73,29 – 73,35 Tahun.

C. Tantangan Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan

Kesadaran masyarakat dalam melaksanakan protokol Kesehatan diharapkan dapat mencegah meluasnya pandemi COVID-19. Pemanfaatan bantuan pemerintah dalam rangka penanganan COVID-19 secara optimal diharapkan dapat memberikan pengaruh positif dalam meningkatkan daya beli masyarakat. Selain itu Akselerasi pertumbuhan ekonomi akan dicapai melalui kolaborasi dan gotong royong antar daerah dalam mengembangkan ekonomi regional. Dibutuhkan effort dari masing-masing Pemda dalam memaksimalkan Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Ekonomi (SDE) karena Pemda sebagai interpreneur yang harus terlibat aktif dan inovatif untuk mendorong aktifitas dan kreatifitas bisnis di daerah.

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Dengan melihat kondisi Sulawesi Selatan yang saat ini masih bergelut dengan wabah covid-19 yang makin meluas, sehingga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi masih mengalami perkembangan yang fluktuasi, maka pada tahun 2022 Sulawesi Selatan memproyeksikan target capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,98 – 7,60 persen dan Nasional menargetkan capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,00-9,00 persen. Sementara untuk pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan ditargetkan sebesar 5,04 – 6,52 persen dan Nasional sebesar 6,0-6,3 persen

Jika dilihat Dari sisi lapangan usaha (LU) pelemahan ekonomi disebabkan oleh terkontraksinya beberapa lapangan usaha dengan kontribusi yang cukup besar. Struktur PDRB Sulawesi Selatan menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Sulawesi Selatan masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 22,55 persen, diikuti oleh perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 14,58 persen; konstruksi sebesar 14,41 persen dan industri pengolahan sebesar 12,50 persen. Kontribusi keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Sulawesi Selatan mencapai 64,04 persen.

Sedangkan untuk PDRB perkapita Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Sulawesi Selatan rata-rata mampu menciptakan PDRB atau nilai tambah sebesar nilai perkapita setiap tahunnya. Hal ini ditunjukkan dengan capaian PDRB Perkapita (ADHB) Sulawesi Selatan pada tahun 2021 sebesar Rp. 59,66 juta. Dan pada tahun 2022, ditargetkan capaian PDRB perkapita sebesar Rp. 62,37 juta, kemudian untuk tahun 2023 ditargetkan akan mencapai sebesar Rp. 65,98 juta.

2. Inflasi

Inflasi merupakan indikator yang menunjukkan kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa. Dengan tingginya inflasi, akan memberikan dampak pada daya beli masyarakat atas barang dan jasa terutama barang kebutuhan pokok yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2021, inflasi Sulsel (2,04 persen) lebih tinggi dibandingkan Nasional (1,68 persen). Rendahnya tekanan inflasi di tahun 2021 didorong oleh daya beli masyarakat yang menurun sebagai imbas pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak minggu ke-3 di Maret 2021 menambah jumlah angka pengangguran dan menurunkan sumber pendapatan masyarakat yang berakibat penurunan daya beli. Kondisi ini merupakan hubungan terbalik antara tingkat pengangguran dan inflasi. Hubungan kedua indikator tersebut memiliki tren yang cukup linear. Penurunan inflasi menghasilkan trade-off dengan meningkatnya jumlah pengangguran. Menjaga dan meningkatkan pendapatan masyarakat untuk mendorong level konsumsi perlu mendapat prioritas kebijakan nasional saat ini. Dengan pulihnya konsumsi masyarakat, maka level produksi akan meningkat dan pada akhirnya berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan akselerasi pertumbuhan ekonomi. Maka Inflasi yang terjadi di tahun 2022 diproyeksi akan mengalami peningkatan ke level 3,0-1,0 persen demikian juga tahun 2023 sebesar 3,0-1,0 persen.

3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Perbaikan kondisi ketenagakerjaan dibandingkan kondisi awal pandemi COVID-19 di Sulawesi Selatan pada Tahun 2021 dipengaruhi oleh peningkatan pada beberapa lapangan usaha seperti lapangan usaha konstruksi, lapangan usaha perdagangan, dan lapangan usaha industri pengolahan. Meski mengalami perlambatan pertumbuhan dibanding dengan periode sebelumnya, lapangan usaha pertanian masih menjadi sektor penyerap tenaga kerja terbanyak di Sulawesi Selatan dengan pangsa sebanyak 37,43 persen poin pada Tahun 2021 atau setara dengan 1,56 juta orang. Melihat dari kondisi saat ini, Pemerintah Sulawesi Selatan ditahun 2022 masih memprediksikan capaian tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,16-6,95 persen atau masih lebih tinggi jika dibandingkan dari capaian tahun 2021 yang mencapai 5,72 persen dan lebih rendah dari capaian Nasional sebesar 6,49 persen. Sementara untuk tahun 2023, tingkat pengangguran terbuka di target oleh pemerintah Sulawesi Selatan sebesar 6,28 persen atau lebih tinggi dari target Nasional yaitu 6,0-5,30 persen

4. Kemiskinan

Penduduk miskin di Sulawesi Selatan pada September 2021 berjumlah 765,46 ribu orang, mengalami penurunan sebesar 34,78 ribu orang terhadap September 2020 dan menurun sebanyak 19,52 ribu orang terhadap Maret 2021. Penduduk miskin pada September 2021 tercatat sebesar 8,53 persen, turun 0,46 persen poin dari September 2020 dan turun 0,25 persen poin dari Maret 2021. Penduduk miskin di daerah perkotaan secara tahunan mengalami peningkatan sebanyak 3,76 ribu orang. Peningkatan ini terjadi sebab adanya penurunan pendapatan masyarakat akibat tekanan ekonomi serta adanya kebijakan pembatasan aktivitas yang mengakibatkan beberapa usaha tutup dan berujung sumber pendapatan masyarakat yang semakin menurun. Sedangkan pada September 2021, penduduk miskin di daerah perdesaan mengalami penurunan sebanyak 38,54 ribu orang dibandingkan periode yang sama ditahun sebelumnya. Penurunan angka kemiskinan di daerah perdesaan Sulawesi Selatan disebabkan perekonomian, terutama di sektor pertanian yang masih mengalami pertumbuhan di tahun 2021. Komposisi penduduk miskin antar daerah perkotaan dan perdesaan di Sulawesi Selatan dari tahun ke tahun relatif tidak mengalami perubahan yang signifikan. Pada September 2021, komposisi penduduk miskin di perdesaan menurun sebanyak 1,6 persen poin dari periode September 2020 menjadi 74,02 persen. Di sisi lain, komposisi penduduk miskin di daerah perkotaan menurun sebanyak 1,6 persen poin menjadi 25,98 persen. Akibat dampak tersebut, penduduk miskin di Sulawesi Selatan pada tahun 2022 di prediksi akan mencapai 8,38-9,19 persen. Namun pada tahun 2023, dengan asumsi bahwa kondisi perekonomian dan sosial masyarakat akan membaik, maka pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan untuk menurunkan penduduk miskin sebesar 8,26 persen atau dibawah target Nasional yaitu 8.5-7.5 persen

5. Gini Rasio

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini ratio di Provinsi Sulawesi Selatan berfluktuasi dari waktu ke waktu. Gini Ratio Provinsi Sulawesi Selatan pada periode September tahun 2021 mencapai sebesar 0,377, atau berada dibawah capaian angka Nasional yaitu 0,381. Untuk tahun 2022, Gini Ratio di Sulawesi Selatan di prediksi akan mencapai angka 0,381, dan di tahun yang sama Nasional memprediksi angka Gini Rasio Indonesia sebesar 0,376-0,378, atau dibawah angka Sulawesi Selatan. Sementara pada tahun 2023, angka Gini Rasio Sulawesi Selatan ditargetkan sebesar 0,381, atau menurun dari tahun sebelumnya, sedangkan target Nasional sebesar 0,360-0,374 atau dibawah angka Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan di Provinsi Sulawesi Selatan cukup signifikan kenaikannya dari tahun 2021 ke tahun 2022 dan 2023. Kenaikan Gini Ratio ini disebabkan karena dampak pandemi Covid-19 sehingga pendapatan penduduk (didekati dengan pengeluaran) desil 1 meningkat, sementara golongan menengah atas walaupun dari sisi pengeluaran meningkat namun pendapatannya naik. Akibat pendapatan penduduk menengah atas lebih tinggi, maka menyebabkan gap (jarak) antara penduduk miskin dan menengah atas menjadi semakin jauh.

Dalam pencapaian sasaran indikator makro ekonomi daerah, pemerintah daerah Sulawesi Selatan selain berperan secara langsung dalam implementasi program pembangunan yang teralokasikan dalam APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, secara

tidak langsung juga dituntut untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaku ekonomi lainnya dalam menjalankan aktivitas usahanya di Sulawesi Selatan. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing memberikan kontribusi pada pencapaian sasaran makroekonomi Sulawesi Selatan 2023 dan pencapaian target Nasional, mulai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, laju inflasi yang stabil, PDRB per kapita meningkat tajam, persentase penduduk miskin yang menurun, serta tingkat pengangguran terbuka yang menurun dan mencapai tingkat yang terendah. Dalam perspektif itulah, arah kebijakan perekonomian daerah sangat diperlukan, bukan hanya untuk sektor pemerintah, tetapi yang jauh lebih penting untuk menjadi arahan bagi pelaku ekonomi lainnya di Sulawesi Selatan.

Dengan melihat kondisi perekonomian global dan nasional tersebut dan sesuai dengan Tema RKP Tahun 2023, maka RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 mengusung tema **“Pemanfaatan Kesejahteraan Melalui Pembangunan Manusia Yang Produktif dan Berkarakter”**, dengan target ekonomi makro yang harus dicapai pada akhir tahun 2023, antara lain: (1). Pertumbuhan ekonomi 5,04- 6,52 persen, (2). Inflasi daerah dikisaran 3,0-1,0 persen; (3). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,69 persen; (4). Tingkat Kemiskinan 7,45 persen, (5). Rasio Gini sebesar 0,381; dan (6). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 73,05 (7). Pendapatan Perkapita Rp. 66.100.000,-

Untuk mencapai target tersebut di tahun 2023 maka ditetapkanlah 5 Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan dalam RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, yaitu:

1. Perbaikan tataklola pemerintahan dan pelayanan publik
2. Pemuatan infrastruktur dan wilayah
3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan
4. Penutupan kesenjangan sosial ekonomi
5. Pembangunan manusia
6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas
7. Pelestarian lingkungan hidup

D. Tantangan Perekonomian Daerah

Sementara itu, perekonomian Kabupaten Bulukumba pada tahun 2021 mengalami peningkatan pertumbuhan jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2020. Laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB-ADHK) Kabupaten Bulukumba tahun 2021 sebesar 4,76 persen, sedangkan tahun 2020 sebesar 0,43 persen. Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 diproyeksi (*Tren Analisis*) akan mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 4,25 persen, hal ini diasumsikan seiring dengan adanya vaksinasi *Covid-19* dan bantuan berkala bagi penduduk miskin secara nasional, yang diharapkan mampu menahan laju penyebaran *Covid-19* dan pada akhirnya berimplikasi pada relaksasi pembatasan sosial guna memastikan berjalannya aktivitas ekonomi masyarakat.

Sementara itu, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bulukumba tahun 2021 sebanyak 31.310 jiwa (7,43 persen), dan jumlah ini mengalami peningkatan jika dibandingkan penduduk miskin tahun 2020 yaitu 30.000 jiwa (7,10 persen), atau mengalami peningkatan sebesar 0,33 persen. Pada tahun 2021 Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bulukumba diproyeksi (*Tren Analisis*) akan mengalami penurunan menjadi 6,62 persen.

Posisi relatif persentase tingkat kemiskinan Kabupaten Bulukumba tahun 2021 masih lebih rendah yaitu 7,43 persen jika dibandingkan dengan persentase tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 8,53 persen dan persentase tingkat kemiskinan Indonesia (Nasional) yaitu 9,72 persen.

Selanjutnya, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bulukumba tahun 2021 yaitu 3,14 persen, jumlah ini mengalami penurunan jika dibandingkan TPT tahun 2020 yaitu 3,42 persen. Pada tahun 2023 TPT Kabupaten Bulukumba diproyeksi akan mengalami peningkatan menjadi 3,27 persen.

Dengan melihat kondisi perekonomian global, nasional, dan Provinsi Sulawesi Selatan tersebut dan sesuai dengan Tema RKP Tahun 2023 dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022, maka RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 mengusung **“Pengembangan Daya Tahan Perekonomian Masyarakat Dengan Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah”**, dengan target ekonomi makro yang harus dicapai pada akhir tahun 2023, antara lain: (1). Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,19-6,01 persen; (2). Inflasi berkisar antara 2,55 persen; (3). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 2,91 persen; (4). Tingkat Kemiskinan sebesar 5,99 persen (5). Gini Ratio sebesar 0,355 dan (6). Indeks Pembangunan Manusia sebesar 71,09 tahun.

Untuk mencapai target tersebut di tahun 2023, maka ditetapkanlah 10 Prioritas Pembangunan di Kabupaten Bulukumba. 10 Prioritas Pembangunan tersebut, yaitu:

1. Pembangunan sumber daya manusia
2. Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan
3. Pemantapan reformasi birokrasi
4. Peningkatan kualitas sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/kerakyatan
5. Peningkatan kualitas sistem pelayanan kesehatan
6. Pelestarian lingkungan hidup
7. Kesiapsiagaan dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana
8. Peningkatan Kemitraan antar institusi
9. Peningkatan kemandirian desa
10. Peningkatan produktifitas generasi muda

Selain dari pada itu untuk mendorong peningkatan daya saing daerah yang merupakan agenda yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 di tegaskan bahwa setiap daerah harus mengembangkan inovasi daerah melalui potensi lokal dan melakukan koordinasi dan pelaporan hingga ke pemerintah pusat.

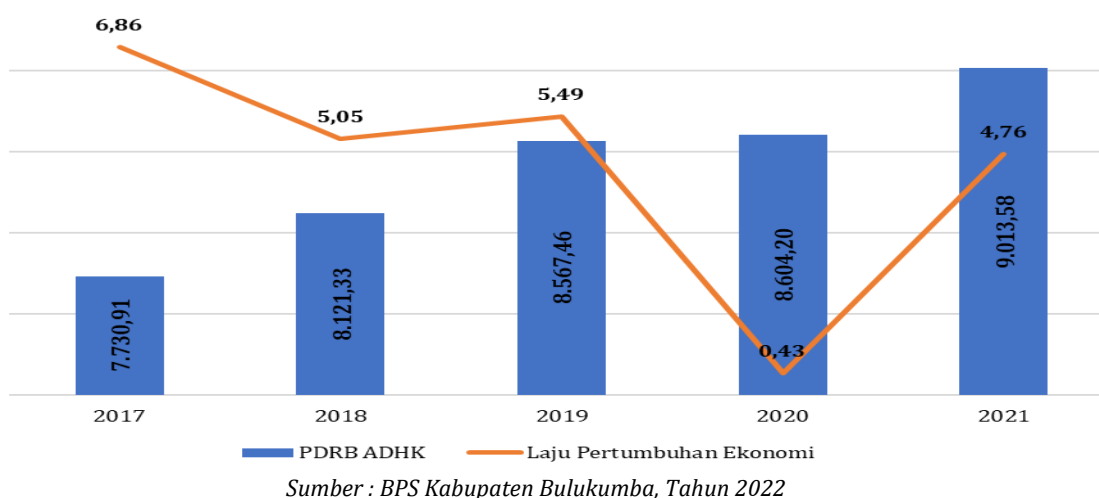
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam melihat keberhasilan pembangunan. Angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan disertai pula dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan di suatu wilayah. Angka pertumbuhan ekonomi diperoleh dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Penggunaan harga konstan ini bertujuan untuk menghilangkan pengaruh perubahan harga. Saat ini, tahun dasar PDRB harga konstan ialah tahun 2010. Grafik III-1 menyajikan PDRB atas dasar harga konstan 2010 dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulukumba selama lima tahun terakhir. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, perekonomian Kabupaten Bulukumba mengalami tren pertumbuhan yang berfluktuasi, dengan rata-rata pertumbuhan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sebesar 4,52%. Pada tahun 2020 terjadi perlambatan yang sangat drastis hingga mencapai angka 0,43%, hal ini disebabkan oleh dampak pandemi *Covid-19* yang berpengaruh sangat besar pada aktivifitas ekonomi di tingkat global, nasional, dan di tingkat regional akan tetapi pada tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi naik menjadi 4,76% yang dipengaruhi upaya pemerintah dalam menanggulangi masa Pandemi. Namun demikian, terdapat kenaikan nilai *output* (nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan) dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang dimulai sejak tahun 2017 dipengaruhi oleh gejala elnino yang menyebabkan kekeringan panjang dan berpengaruh pada produktifitas sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Hal ini menyebabkan defisit neraca perdagangan antar daerah yang berpengaruh pada terjadinya kontraksi komponen

pengeluaran net ekspor antar daerah dari 0,76 triliun rupiah pada 2017 menjadi (197,33) triliun rupiah pada tahun 2018. Untuk selengkapnya disajikan pada grafik III.1 berikut ini:

Grafik III-1

PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021



Selama kurun waktu tahun tahun 2017-2021, jika dirata-ratakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulukumba masih berada di bawah capaian Provinsi Sulawesi Selatan. Namun jika diperbandingkan dengan capaian rata-rata nasional, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulukumba masih lebih baik. Untuk tahun 2021, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bulukumba tercatat sebesar 4,76 persen, sementara pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan mengalami kontraksi hingga pada angka -0,71 persen. Kondisi yang sama juga dialami oleh nasional, yang mengalami kontraksi sebesar 3,69 persen. Sebagaimana di gambarkan pada tabel berikut.

Tabel III-1

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Kabupaten Bulukumba	%	6,89	5,05	5,49	0,43	4,76
2	Provinsi Sulawesi Selatan	%	7,21	7,06	6,92	-0,71	4,65
3	Nasional	%	5,07	5,17	5,02	-2,07	3,69

Sumber : BPS Kabupaten Bulukumba, Tahun 2022

Selama lima tahun terakhir (2017-2021) laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Bulukumba Menurut Lapangan Usaha mengalami fluktuasi ditiap tahunnya namun pada tahun 2020 terdapat 7 kategori usaha yang mengalami nilai kontraksi diakibat merebaknya pandemi Covid-19 adapun Perubahan struktur perekonomian Bulukumba mengalami kontraksi, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (-1,12 persen); Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor (-1,25 persen); Jasa Perusahaan (-4,26 persen); Industri Pengolahan -3,60); Transportasi dan Pergudangan (-14,41 persen); Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (-1,99); Jasa lainnya (-1,21 persen) dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (-0,43 persen), menyebabkan pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 0,43 persen. Namun, pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan seperti pada tahun – tahun sebelumnya. Selengkapnya pada dilihat tabel berikut.

Tabel III-2
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Kabupaten Bulukumba Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2017 - 2021

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2017	2018	2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,34	0,06	2,13	-1,12	3,65
B	Pertambangan dan Penggalian	13,04	12,85	3,14	2,09	3,06
C	Industri Pengolahan	3,08	3,96	11,76	-3,60	5,72
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,68	6,95	7,23	3,77	8,91
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,52	6,34	1,72	4,98	0,01
F	Konstruksi	9,32	9,59	3,27	5,11	5,12
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,95	9,73	9,93	-1,25	6,51
H	Transportasi dan Pergudangan	8,94	9,46	9,68	-14,41	5,95
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12,41	15,80	5,23	-1,99	5,88
J	Informasi dan Komunikasi	9,38	9,27	7,66	11,92	4,42
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,06	5,37	9,65	9,00	7,15
L	Real Estate	12,54	6,88	2,18	1,03	3,28
M, N	Jasa Perusahaan	9,95	9,88	10,53	-4,26	6,80
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,80	8,40	10,35	-0,43	4,36
P	Jasa Pendidikan	9,55	9,12	3,31	9,27	4,12
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,06	9,66	5,71	6,31	6,39
R,S,T,U	Jasa Lainnya	9,81	13,11	11,92	-1,21	8,81
Produk Domestik Regional Bruto		6,89	5,05	5,49	0,43	4,76

Sumber: BPS Kabupaten Bulukumba, Tahun 2022

3.1.1.3 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang banyak ditemukan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2021 sebesar 9,71 persen. Sementara di Sulawesi Selatan tingkat kemiskinan berada pada tingkat 8,53 persen, lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional sebesar 9,71 persen.

Beberapa program penanggulangan kemiskinan, baik berupa subsidi maupun bantuan keuangan kepada penduduk miskin telah banyak dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Selain itu, upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin juga telah dilakukan sebagai bagian penting dari program pengentasan kemiskinan sebagai solusi permasalahan kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bulukumba cenderung meningkat dari tahun sebelumnya pada tahun 2021 berada pada angka 7,43 persen, perihal tersebut disebabkan oleh pandemi *Covid-19*. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel III-3
Garis Kemiskinan (Rp), Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) dan Peresentase Penduduk Miskin Kabupaten Bulukumba Tahun 2017- 2021

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase penduduk Miskin (%)
2017	284.108	33.10	8,00
2018	310.753	31.25	7,48
2019	330.161	30.49	7,26
2020	351.180	30.00	7,10
2021	369.022	31,31	7,43

Sumber : Profil Kemiskinan Kab. Buluumba Maret 2021, BPS Kab. Bulukumba. 2021

Perbandingan Angka Kemiskinan Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nasional menunjukkan bahwa kinerja penurunan Kabupaten Bulukumba tidak lebih baik daripada kinerja penurunan kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Kinerja penurunan kemiskinan di Kabupaten Bulukumba, menunjukkan bahwa program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang telah berjalan masih perlu lebih dioptimalkan. Perbandingan Angka Kemiskinan Kabupaten Bulukumba dengan Sulawesi Selatan dan Nasional, selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel III-4
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional Tahun 2017-2021

Wilayah	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Bulukumba	%	8,00	7,48	7,26	7,10	7,43
Provinsi Sulawesi Selatan	%	9,48	8,87	8,69	8,72	8,53
Nasional	%	10,12	9,66	9,41	9,78	9,71

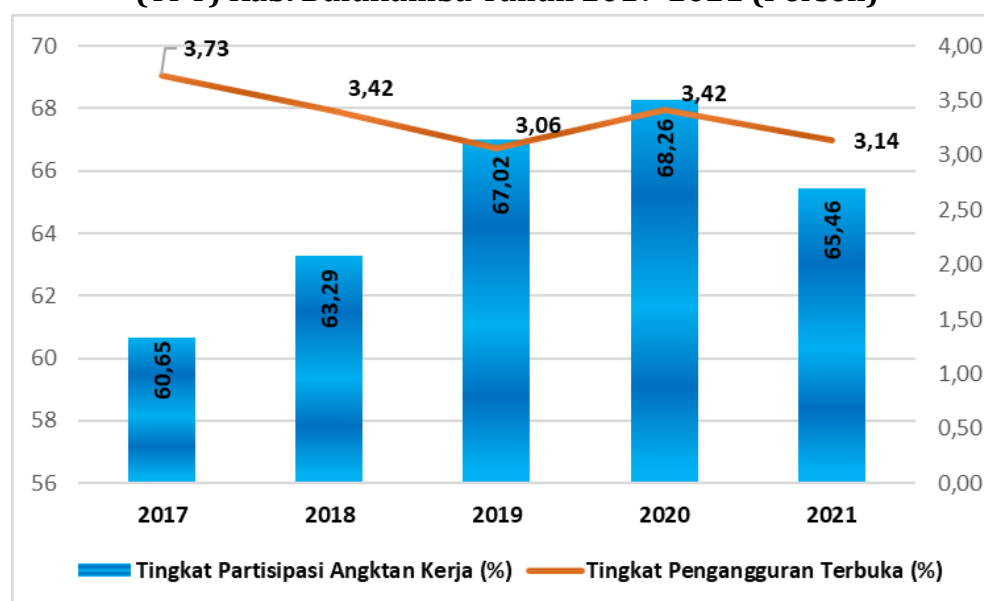
Sumber : Profil Kemiskinan Kab. Buluumba 2021 (BPS Kab. Bulukumba.Sul-Sel dan Nasional) 2022

3.1.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Kondisi ketenagakerjaan pada kondisi awal pandemi COVID-19 di Bulukumba pada Tahun 2021 mengalami penurunan diakibatkan ipengaruhi oleh peningkatan pada beberapa lapangan usaha seperti lapangan usaha pertanian, lapangan usaha perdagangan, dan lapangan usaha industri pengolahan.

Tingkat Pengangguran Terbuka(TPT) di Kabupaten Bulukumba tahun2021 adalah sebesar 3,14. Dapatdikatakan bahwa sekitar 3-4 dari 100angkatan kerja yang ada di Bulukumba menganggur.

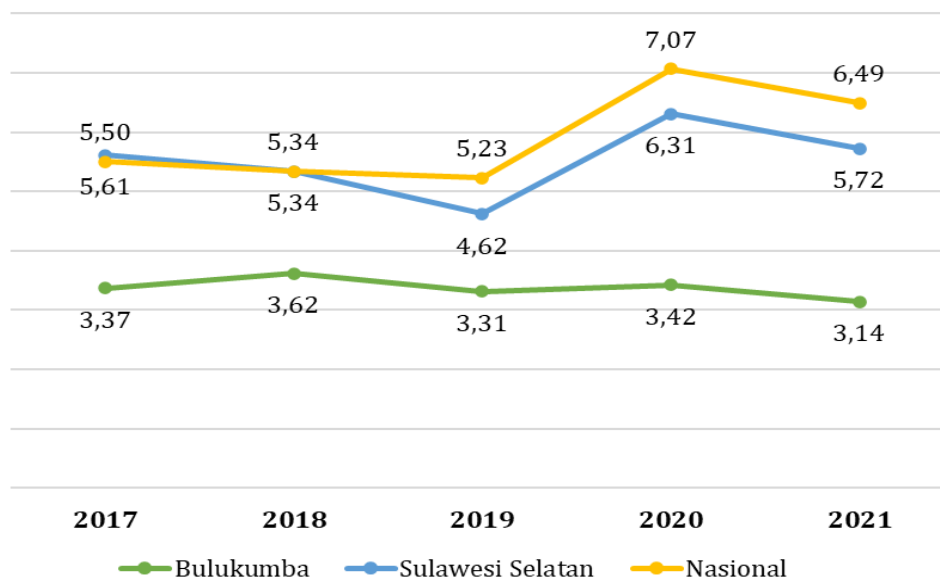
Grafik III-2
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab. Bulukumba Tahun 2017-2021 (Persen)



Sumber : Keadaan Ketenagakerjaan Kab. Bulukumba Agustus 2021, BPS Kab. Bulukumba 2021

Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 masih lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional pada tahun yang sama.

Grafik III-3
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab. Bulukumba,
Prov. Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017-2021 (Persen)



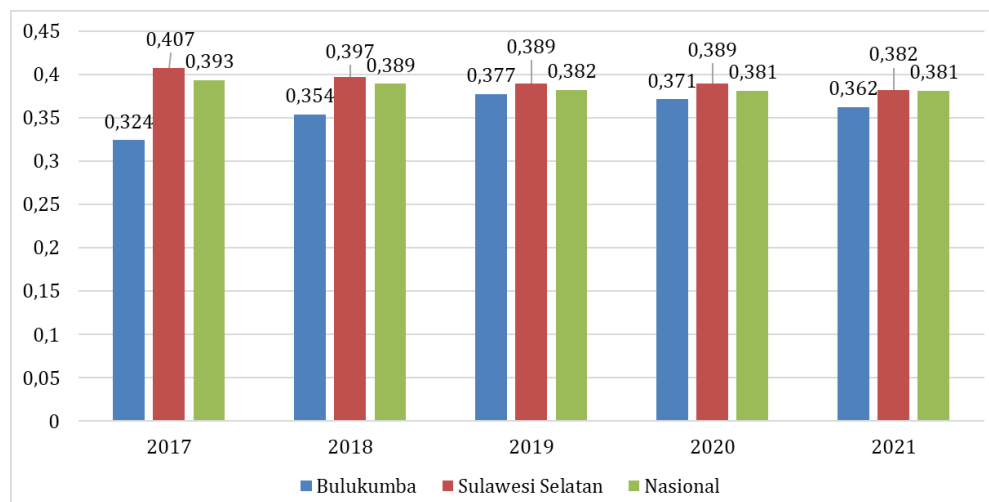
Sumber : Provinsi Sulawesi Selatan dalam Angka 2022, Statistik Indonesia 2022

3.1.1.5 Rasio Gini

Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna. atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama dari suatu perekonomian. Koefisien Gini dihitung dengan mengukur jarak antara Garis Lorentz yang menunjukkan distribusi pendapatan dengan garis lurus yang menunjukkan distribusi pendapatan ideal atau setara penuh.

Pada periode tahun 2017-2021 Capaian Indeks Gini di Kabupaten Bulukumba mengalami tren yang berfluktuasi. Jika diperbandingkan dengan capaian rata-rata Indeks Gini Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, capaian Indeks Gini di Kabupaten Bulukumba masih lebih baik. Sesuai dengan data BPS Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021, nilai Indeks Gini di Kabupaten Bulukumba tahun 2021 sebesar 0,362, Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,377, dan Nasional sebesar 0,381. Selengkapnya pada tabel berikut.

Grafik III-4
Perbandingan Rasio Gini Kabupaten Bulukumba,
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Kabupaten Bulukumba, 2022

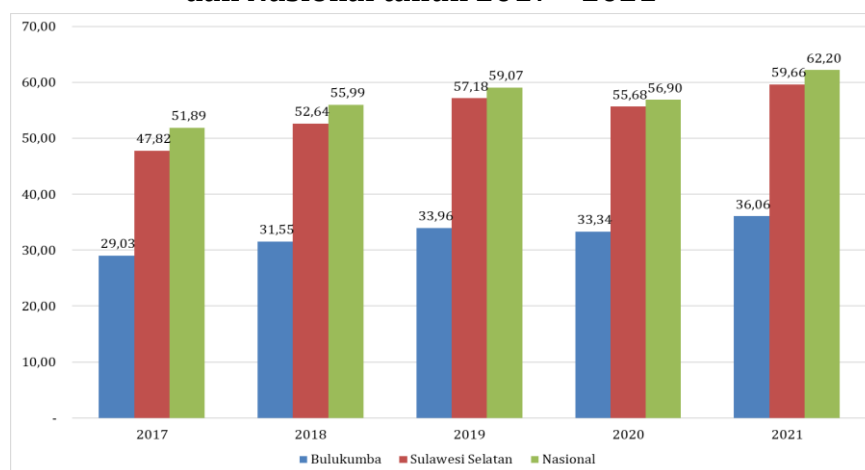
3.1.1.6 PDRB Perkapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Bulukumba Atas Dasar Harga Berlaku sejak tahun 2017 hingga 2021 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 PDRB perkapita tercatat sebesar 29,03 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2021 mencapai 36,06 juta rupiah dan . Kenaikan angka PDRB perkapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

Grafik III-5

Perbandingan PDRB Per Kapita Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional tahun 2017 – 2021



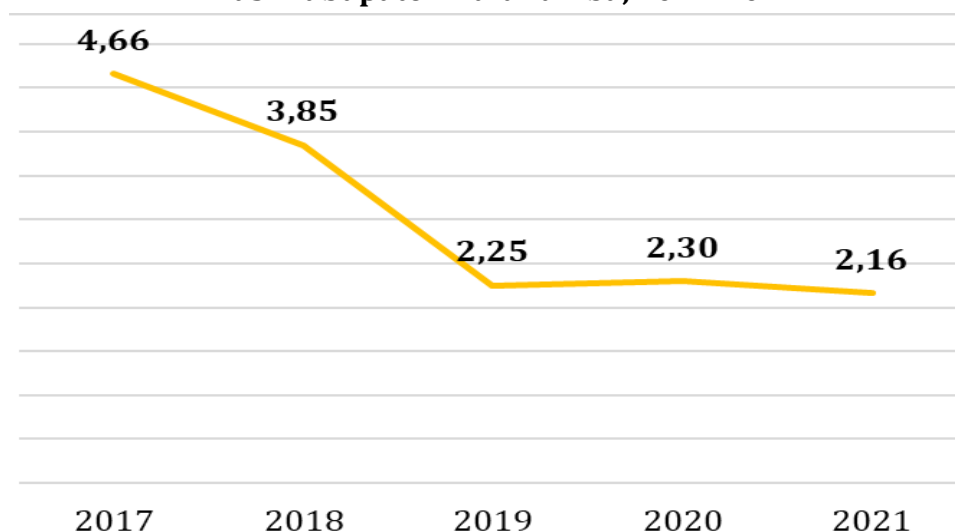
Sumber : Bulukumba dalam Angka 2022, Statistik Indonesia 2022, (diolah)

3.1.1.7 Inflasi

Inflasi merupakan gejala ekonomi yang tidak mungkin dihilangkan secara tuntas. namun perlu dikontrol untuk menjaga stabilitas ekonomi. Pengendalian inflasi penting dilakukan agar berdampak positif terhadap perekonomian. dan sebaliknya juga perlu dikendalikan untuk menghindari dampak negatif terhadap perekonomian. Pengendalian tingkat inflasi harus diupayakan tidak menyebabkan kemerosotan perekonomian. Pengendalian inflasi diperlukan karena, inflasi kerap terjadi secara tiba-tiba, sehingga berdampak negatif terhadap perekonomian jika tidak mampu mengatasinya dengan cepat.

Tren inflasi di Kabupaten Bulukumba menunjukkan peningkatan yang signifikan pada tahun 2017 yang diiringi penurunan tingkat inflasi hingga 2019 pada angka 2,25 persen, namun kembali mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 2,30 persen akan tetapi di tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 2,16 persen. Dari data tersebut menunjukkan penurunan tingkat inflasi. Hal ini sejalan dengan fenomena penurunan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di wilayah kabupaten, sehingga jumlah uang beredar di masyarakat juga semakin berkurang. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 4,66 persen dan termasuk kategori inflasi ringan. Pengendalian inflasi di daerah menjadi penting untuk menjaga stabilitas perekonomian daerah dan juga untuk menjaga daya beli masyarakat, sehingga tidak jatuh pada kemiskinan. Selengkapnya pada tabel berikut:

Grafik III-6
Inflasi Kabupaten Bulukumba, 2017-2021



Sumber: Perkembangan Indeks Harga Konsumen Desember 2021 BPS Kabupaten Bulukumba, 2021

.Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III-5
Target Indikator Makro Kabupaten Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja Tahun 2023		
			RPJMD Kab.Bulukumba Tahun 2021-2026 (Tahun 2023)	RKPD Prov. Sulsel Tahun 2023	RKPD Kab. Bulukumba Tahun 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,25	5,04-6,52	5,19-6,01
2	Tingkat kemiskinan	%	6,18	7,45	5,99
3	Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)	%	3,27	5,69	2,91
4	Rasio Gini	Angka	0,349	0,381	0,355
5	PDRB PerkapitaADHB	Rp. (juta)	40,92	66,01	40,92
6	Inflasi	%	2,55	3,0-1,0	2,55
7	IPM	Angka	70,61	73,05	71,09

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah, berdasarkan hasil analisis sebelumnya diuraikan sebagai berikut.

Kapasitas fiskal daerah mempunyai implikasi langsung terhadap kemampuan daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Kemampuan fiskal daerah dapat diukur melalui penerimaan pendapatan daerah, meliputi (1).pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah; (2).Dana Perimbangan yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak; (3).Lain-lain pendapatan yang sah.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan konstruksi awal kemampuan fiskal daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang didalamnya memuat kebijakan penganggaran serta kerangka pendanaannya. Untuk mengukur dan menjaga konsistensi proses perencanaan dan pembangunan yang berkelanjutan maka arah kebijakan

pendapatan daerah yang ditetapkan melalui dokumen RKPD harus saling berkaitan sebagai satu rangkaian proses perencanaan tahunan yang merupakan dasar dari penyusunan APBD.

Dalam rangka implementasi kebijakan tersebut, maka kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Bulukumba diarahkan pada “penguatan kapasitas kelembagaan pengelola potensi serta penguatan regulasi dan strategi pemanfaatan potensi unggulan daerah dalam kerangka optimalisasi sumber-sumber pendapatan”. Secara umum Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 difokuskan pada:

1. Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan.
2. Meneliti dan mengkaji potensi, eksplorasi potensi serta penerapan manajemen pengelolaan pendapatan yang efektif.
3. Melakukan perbaikan mekanisme pemungutan pendapatan daerah dalam rangka peningkatan dan percepatan penerimaan pendapatan daerah.
4. Perbaikan kinerja dan efisiensi manajemen pada badan usaha milik daerah.
5. Peningkatan koordinasi dalam rangka perolehan dan pengelolaan pendapatan daerah.
6. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber-sumber pendapatan daerah
7. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap sumber-sumber pendapatan daerah.
8. Pemberian *punishment* dan *reward* bagi aparatur pengelola pendapatan daerah.
9. Kebijakan pendapatan daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018.

3.2.1.1. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih (UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah). Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pendapatan Transfer terdiri dari Bagi Hasil/DAU/DAK /Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya berupa bagi hasil pajak, dan Bantuan Keuangan. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat serta Pendapatan lainnya.

Kebijakan Pendapatan Daerah yang merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan daerah sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Pendapatan Taransfer/Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Kebijakan Pendapatan Daerah ditujukan untuk peningkatan pendapatan daerah, guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah, mengurangi ketergantungan fiskal, serta meningkatkan ruang fiskal daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi obyek untuk tujuan tersebut, selain menggambarkan kapasitas fiskal daerah juga berpotensi meningkatkan ruang fiskal daerah untuk kebutuhan alokasi belanja prioritas pembangunan daerah. Untuk itu upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah dilaksanakan dengan pengelolaan pendapatan asli daerah yang semakin inovatif dan modern.

Berkaitan dengan pencapaian target penerimaan daerah dari komponen Pendapatan Daerah, maka beberapa upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah antara lain :

- a. Melakukan pembenahan manajemen pemungutan, dengan menggunakan sistem informasi yang kredibel dan akuntabel, sehingga ketersediaan data obyek pajak dan retribusi terintegrasi secara menyeluruh dan dapat diketahui masyarakat.
- b. Menurunkan tingkat kebocoran pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui peningkatan sistem pemungutan dan sistem pengawasan.
- c. Melakukan penyesuaian tarif baru sesuai ketentuan yang berlaku, yang didahului dengan sosialisasi
- d. Memperbaiki pelayanan kepada masyarakat dalam hal pemungutan, pengelolaan dan pertanggungjawabannya.

Perkembangan Rata - Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun pada 2020 - 2021 mengalami perkembangan fluktuasi. Sebagai ilustrasi, realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 1,478 Triliun lebih, sedangkan realisasi pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 1,521 Triliun lebih atau mengalami kenaikan sebagaimana disajikan pada tabel berikut;

Tabel III-6
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2020-2024

Kode	Uraian	Realisasi		Target capaian	Proyeksi	
		2020	2021	2022	2023	2024
4	PENDAPATAN	1.478.492.269.014	1.521.740.009.798	1.433.546.137.889	1.585.308.560.859	1.936.467.467.535
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	168.422.009.341,24	214.268.055.079	228.268.055.079	249.960.923.616	318.401.788.035
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	31.138.613.050,50	62.796.217.623	69.003.059.483	74.523.304.241	107.801.675.366
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	14.387.214.516,00	43.821.837.456	24.864.995.596	26.854.195.243	73.450.112.669
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.840.897.279,00	6.000.000.000	5.000.000.000	8.831.424.132	10.500.000.000
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	118.055.284.495,74	101.650.000.000	129.400.000.000	139.752.000.000	126.650.000.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.247.769.948.927,62	1.252.886.354.719	1.205.278.082.810	1.335.347.637.243	1.528.480.079.500
4.2.1	<i>Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</i>	980.797.900.196,00	<i>1.047.690.384.000</i>	18.978.637.000	20.971.393.849	<i>1.256.832.860.731</i>
4.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	13.755.879.914,00	17.500.844.000			19.500.844.000
4.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	4.182.528.559,00				3.000.000.000
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum	665.224.246.000,00	681.648.431.000	659.907.896.000	729.198.225.080	811.638.786.792
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	297.635.245.723,00	348.541.109.000	349.711.945.000	388.180.258.950	422.693.229.940
4.2.2	<i>Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya</i>	158.752.652.000,00	<i>129.024.961.000</i>	103.308.610.000	115.189.100.150	<i>165.476.209.050</i>
4.2.2.1	Dana Penyesuaian	158.752.652.000,00	129.024.961.000			165.476.209.050
4.2.3	<i>Transfer Pemerintah Provinsi</i>	52.501.770.231,62	<i>76.171.009.719</i>	73.370.994.810	81.808.659.214	<i>106.171.009.719</i>
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	52.501.770.231,62	76.171.009.719			106.171.009.719
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	62.300.310.745,00	54.585.600.000			89.585.600.000
4.3.1	Pendapatan Hibah	62.300.310.745,00	54.585.600.000			69.585.600.000
4.1.3.3	Pendapatan Lainnya					20.000.000.000

Sumber : BPKPD Kab. Bulukumba

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja

Belanja daerah merupakan bentuk kuantitatif dari semua bentuk pengeluaran yang merupakan kewajiban daerah dalam menyelenggarakan fungsi otonomi daerah, belanja daerah tersebut disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing. Penganggaran belanja daerah harus terstruktur dan mengarah pada pencapaian target dari tiap program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan secara berjenjang. Berdasarkan kelompok belanja, maka belanja daerah diurai menjadi 4 (empat) kelompok belanja, yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer berdasarkan tujuan pembelanjanya.

Struktur Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer dengan rincian sebagai berikut :

3.2.2.1. Belanja Operasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Kelompok Belanja Operasi yang meliputi Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai berupa Penganggaran alokasi belanja gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD); Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan Penganggaran dana tambahan penghasilan guru Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.

2) Belanja barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dan Pengadaan barang/jasa dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.

3) Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

4) Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan Usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa Pelayanan Dasar masyarakat. Badan usaha milik negara, BUMD, badan usaha milik swasta, dan/atau badan hukum lain yang akan diberikan subsidi terlebih dahulu dilakukan audit Keuangan oleh kantor akuntan public sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

5) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dapat memberikan Hibah kepada pemerintah pusat; pemerintah daerah lain; Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dialokasikan berdasarkan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 62 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan Pasal 23A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Bantuan Sosial terdiri atas Bantuan Sosial yang direncanakan dan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Pengalokasian anggaran Hibah dan Bantuan Sosial berdasarkan usulan/proposal yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari calon penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2.2.2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan asset tetap dan asset lainnya. Pengadaan asset tetap memenuhi kriteria:

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. Digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- c. Batas minimal kapitalisasi aset.

Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun asset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan asset sampai asset tersebut siap digunakan. Belanja modal meliputi belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;

- a. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- b. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- c. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- d. Belanja asset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan asset tetap lainnya mencakup asset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok asset tetap a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
- e. Belanja asset lainnya, digunakan untuk menganggarkan asset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah, tidak memenuhi definisi asset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya

3.2.2.3. Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2019 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.

Berdasarkan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya

3.2.2.4. Belanja Transfer

1) Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota

Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Besaran alokasi dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi dianggarkan secara bruto. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah Tahun Anggaran 2023, dan alokasi anggaran pelampauan target Tahun Anggaran 2021 yang belum direalisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota atau alokasi kurang salur pada tahun sebelumnya. Dari aspek teknis penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah maka akan diuraikan daftar nama pemerintah Kabupaten/Kota selaku penerima bagi hasil pajak daerah sesuai kode rekening berkenaan.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Pengalokasian Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia atau tidak cukup tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut sesuai kemampuan keuangan daerah. Bantuan Keuangan bersifat stimulan, yang berdasarkan usulan/proposal yang diterima oleh Pemerintah Provinsi dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tatacara penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan mengacu dan memperhatikan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus, bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan. Bantuan keuangan terdiri atas:

- a. bantuan keuangan antar Daerah provinsi;
- b. bantuan keuangan antar Daerah kabupaten/kota;

- c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota diluar wilayahnya;
- d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau
- e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Berdasarkan arah pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bulukumba yang di fokuskan pada pembangunan dan penguatan ekonomi daerah sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPJPD Kabupaten Bulukumba tahun 2005-2025 periode ke 4 (Empat) maka kebijakan belanja daerah Kabupaten Bulukumba secara makro diarahkan pada “pembelanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan dengan penerapan prinsip-prinsip pembelanaan yang transparan dan akuntabel serta efisien, efektif dan proporsional”. Kebijakan belanja tersebut merupakan bagian dari strategi penganggaran pemerintah Kabupaten Bulukumba tahun 2023, arah kebijakan makro belanja tersebut adalah bentuk upaya pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam menjamin keberlangsungan proses pembangunan di Kabupaten Bulukumba. Arah kebijakan belanja tersebut juga merupakan bentuk sinergitas perencanaan kegiatan satu tahunan pemerintah Kabupaten Bulukumba terhadap prioritas dan sasaran pembangunan yang ditetapkan pada tahun tersebut.

Tabel III-7
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2024

Kode	Uraian	Realisasi	Target Capian	Proyeksi	
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
5	BELANJA	1.532.690.063.871	1.545.405.697.666,00	1.610.308.560.859,00	1.886.467.467.536
5.1	BELANJA OPERASI	1.033.433.185.689	1.011.420.984.754,00	1.075.072.764.609,45	1.139.996.638.710
5.1.1	Belanja Pegawai	663.934.753.171	646.571.329.314,00	710.882.762.679,00	753.947.707.332
5.1.2	Belanja Barang	348.627.986.158	344.480.938.326,00	332.614.846.329,87	351.614.760.518
5.1.3	Belanja Bunga		2.250.000.000,00	4.000.000.000,00	10.000.000.000
5.1.4	Belanja Hibah	18.434.170.860	16.746.438.614,00	26.244.045.455,58	19.434.170.860
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.436.275.500	1.372.278.500,00	1.331.110.145,00	5.000.000.000
5.2	BELANJA MODAL	306.474.864.630	350.711.314.482,00	343.225.411.104,93	524.696.035.943
5.2.1	Belanja Tanah	5.255.565.080	5.000.000.843,00	4.850.000.817,71	5.255.565.080
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	101.464.779.509	34.706.643.500,00	33.665.444.195,00	111.464.779.509
5.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	65.993.054.126	149.663.999.423,00	146.670.719.398,54	295.026.948.478
5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	128.307.207.705	153.879.609.916,00	150.802.017.717,68	107.494.484.666
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.454.258.210	3.929.060.800,00	3.811.188.976,00	5.454.258.210
5.2.6	Belanja Aset Lainnya		3.532.000.000,00	3.426.040.000,00	
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	7.616.611.576	5.333.540.086,00	5.173.533.883,42	10.000.000.000
5.3.1	Belanja Tak Terduga	7.616.611.576	5.333.540.086,00	5.173.533.883,42	10.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	185.165.401.976	177.939.858.344,00	186.836.851.261,20	211.774.792.883
5.4.1	Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	6.464.907.880	6.742.595.044,00	7.079.724.796,20	18.125.178.804
5.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	6.464.907.880			10.780.167.537
5.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi				7.345.011.267
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	178.700.494.096	171.197.263.300,00	179.757.126.465,00	193.649.614.079
	<i>BDD</i>	<i>110.535.651.000</i>			<i>110.535.651.000</i>
	<i>ADD</i>	<i>68.164.843.100</i>			<i>83.113.963.079</i>

Sumber : BPKPD Kab. Bulukumba, 2022

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah pengeluaran pembiayaan yang timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar dari jumlah penerimaan daerah sehingga terjadi defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), transfer dari dana cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, dan Penerimaan Piutang Daerah.

Pada tahun 2023 kebijakan pembiayaan makro Kabupaten Bulukumba diarahkan pada “efisiensi dan efektifitas pembiayaan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat”. Melihat keterbatasan APBD Kabupaten Bulukumba, maka untuk mensiasati kondisi tersebut maka penganggaran pembangunan yang bersifat ekspansif akan diupayakan dianggarkan secara kemitraan baik dengan melibatkan kerja sama pihak swasta, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupun pemerintah Pusat.

Selain itu, kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *Covid-19* diberbagai aspek kehidupan, baik di aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Kebijakan new normal menuntut untuk dilakukan pembatasan kontak fisik namun unsur pemerintah daerah dituntut untuk tetap produktif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, terutama yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat umum.

Kebijakan tersebut tercermin pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba untuk Tahun Anggaran 2021, yang tujuannya bermuara pada penanganan dampak pandemi *Covid-19* pada aspek pemerintahan, sosial ekonomi, dan kesehatan.

Tabel III-8
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2024

Kode	Uraian	Realisasi	Target Capaian	Proyeksi	
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN DAERAH	46.050.054.073	111.859.559.777,00	35.000.000.000,00	35.100.000.000
6.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	10.950.054.073	36.859.559.777,00	-	
	Penerimaan Pinjaman Daerah	35.100.000.000	75.000.000.000,00	35.000.000.000,00	35.100.000.000
6.2	PENGELUARAN DAERAH	35.100.000.000		10.000.000.000,00	85.100.000.000
6.2.1	Pembayaran Pokok Utang	35.100.000.000		10.000.000.000,00	85.100.000.000
	PEMBIAYAAN NETTO	10.950.054.073		25.000.000.000	-50.000.000.000
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0	0	0	0

Sumber : BPKPD Kab. Bulukumba, 2022

3.3 Pendanaan Pembangunan Lainnya

Dengan terbatasnya sumber-sumber penerimaan dan besarnya kebutuhan dana untuk pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan mendorong Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mencari alternatif pendanaan dalam membangun. Sumber-sumber pendanaan pembangunan non APBD yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pembangunan antara lain: 1) APBN; 2) *Corporate Social Responsibility* (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)); 3) Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU); 4) Pembiayaan Utang Daerah (Pinjaman Daerah, Obligasi Daerah, Sukuk Daerah). Adapun penjelasan alternatif pendanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

3.3.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Penyelesaian pembangunan dalam suatu daerah membutuhkan banyak sumber pendanaan, pembangunan Kabupaten Bulukumba selain bersumber dari APBD Kabupaten Bulukumba dan APBD Provinsi Sulawesi Selatan, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola oleh perangkat daerah di kabupaten/kota maupun perangkat daerah provinsi. Adapun alokasi pendanaan yang melalui dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan Tahun Anggaran 2018-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III-9
Dana Tugas Pembantuan (TP) Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 - 2021

No	Kementerian / SKPD	Pagu (Rp)			
		2018	2019	2020	2021
1	Kementerian Pertanian : Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	12.369.103.000	4.336.389.000	-	4.358.413.000
2	Kementerian Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian	6.000.000.000	4.000.000.000	-	-
3	Kementerian PU Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan	3.955.000.000	-	2.085.000.000	-
Jumlah Total		22.324.103.000	8.336.389.000	2.085.000.000	4.358.413.000

Sumber: Bappelitbangda Kab. Bulukumba, 2022

3.3.2 Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) didasari atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, pemerintah dimungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan badan usaha. Kondisi yang berkembang saat ini menyebabkan banyak pemerintah daerah menyadari pentingnya kontribusi dari pihak swasta dalam mendorong pembangunan. Berdasarkan fakta, pihak swasta dapat membawa keahlian, ilmu, teknologi, efisiensi, dan permodalan yang sangat dibutuhkan sektor publik sehingga apabila dikombinasikan dengan sumber daya publik yang tepat dapat berkontribusi lebih besar untuk pembangunan berkelanjutan. Namun pihak swasta membutuhkan lingkungan

yang stabil dan dukungan peraturan dan kerangka regulasi yang kuat, persiapan kelembagaan yang jelas, dan faktor lainnya yang penting untuk “menciptakan pangsa pasar”. Salah satu persoalan yang dihadapi pemerintah daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak mampu sepenuhnya membiayai pembangunan infrastruktur yang diinginkan atau diharapkan. Artinya, masih banyak bidang-bidang lain, seperti kesehatan, pendidikan, kebudayaan, sosial, dan agama yang juga membutuhkan penyerapan anggaran dari APBD. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan. Pada kondisi ini skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dapat menjadi solusi dengan prinsip gotong royong. Melalui skema pembiayaan KPBU, pemerintah, BUMN/BUMD, serta swasta bahu-membahu untuk membiayai pengakselerasian pembangunan.

3.3.3 Pembiayaan Utang Daerah

Pembiayaan Utang Daerah adalah setiap penerimaan Daerah yang harus dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan utang daerah tersebut terdiri atas : **(1) Pinjaman Daerah** yaitu Pembiayaan Utang Daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga, yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, **(2) Obligasi Daerah** yaitu surat berharga berupapengakuan utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, **(3) Sukuk Daerah** yaitu surat berharga berdasarkan prinsip Syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan asset Sukuk Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. Usulan pembiayaan utang daerah tersebut harus termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan lebih dulu menetapkan nilai bersih maksimal pembiayaan utang daerah dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD dan persetujuan DPRD diberikan pada saat pembahasan APBD.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023, mengacu kepada permasalahan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2005-2025, visi, misi, dan program kepala daerah terpilih, hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2021, prioritas nasional dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Selain itu rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2023 memperhatikan kebijakan pengembangan wilayah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032, khususnya yang mengedepankan fokus pengembangan wilayah dan sektor unggulan di setiap kabupaten/kota. Rumusan tersebut merupakan acuan bagi OPD dalam menyusun rencana kerja yang menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan, isu strategis, strategi, dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan.

Bab ini berisi prioritas dan sasaran pembangunan daerah Bulukumba Tahun 2023 yang dirumuskan dalam rangka mencapai target janji Bupati yang termuat dalam visi misi Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026. Dokumen ini juga memuat kebijakan turunan dari prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Prioritas pembangunan disusun memperhatikan hasil evaluasi kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021, capaian target pelaksanaan RPJMD tahun sebelumnya, proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah, serta kondisi lingkungan strategis internal-eksternal, sebagaimana dibahas dalam bab sebelumnya.

4.1 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih tersebut menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama lima tahun sesuai dengan misi yang diemban. Adapun visi pembangunan daerah Kabupaten Bulukumba untuk periode RPJMD 2021-2026 adalah sebagai berikut:

“Mewujudkan Masyarakat Produktif, Yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera”

Visi 2021-2026 merefleksikan arah Pembangunan Kabupaten Bulukumba 2021-2026 dilaksanakan dengan fokus prioritas yang lebih jelas, strategis dan berdaya ungkit tinggi. Selain itu, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Bulukumba periode kedua (2018-2022) yang berbunyi: “Mengembangkan berbagai bidang pembangunan sebagai modal dasar pembangunan khususnya kualitas sumberdaya manusia yang handal”, maka visi pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD periode ini juga bermaksud untuk mewujudkan pembangunan yang maju dari sisi profesionalisme penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan infrastruktur dasar untuk meningkatkan akses dasar masyarakat, pengembangan kualitas manusia yang unggul dan ekonomi daerah serta kelestarian lingkungan hidup yang mendukung kemandirian daerah sehingga ketiganya dapat menjadi modal dasar dalam mewujudkan kualitas sumber daya

manusia yang handal. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka penjelasan Visi Kabupaten Bulukumba 2021-2026, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV-1
Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Bulukumba 2021-2026

VISI	PENJELASAN VISI	
“MEWUJUDKAN MASYARAKAT PRODUKTIF, YANG BERKARAKTER KEARIFAN LOKAL MENUJU BULUKUMBA MAJU DAN SEJAHTERA”	PRODUKTIF	Mendorong seluruh sektor pembangunan. meliputi ekonomi. SDM. Infrastruktur. sosial kemasyarakatan. lingkungan dan tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan masyarakat maju dan sejahtera.
	BERKARAKTER	Identitas diri dalam menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan agama untuk berperikehidupan dan kemasyarakatan.
	KEARIFAN LOKAL	Potensi adat. Budaya dan sosial yang dimiliki oleh masyarakat Bulukumba sebagai modal dasar pembangunan.
	MAJU	Pembangunan yang dilaksanakan mengarah pada upaya strategis untuk mewujudkan kondisi yang lebih baik secara konkret dan terukur di segala aspek kehidupan masyarakat Bulukumba. Pencapaian kondisi “maju” yang diharapkan dari visi daerah ini adalah upaya untuk mencapai peningkatan ekonomi masyarakat melalui meningkatnya kinerja dan profesionalisme pemerintahan dan meningkatnya kualitas infrastruktur untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
	SEJAHTERA	Hasil pembangunan dapat terwujud secara nyata serta dimiliki, dirasakan, dan dinikmati oleh masyarakat / penduduk terhadap kebutuhan hak dasar hidupnya dalam mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat sehingga dapat tercukupi atau melebihi. Kebutuhan dasar tersebut antara lain: kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam, lingkungan hidup, rasa aman, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosialpolitik baik bagi perempuan maupun laki-laki

Penjelasan dari setiap misi dapat dilihat pada tabel Tabel IV.2

Tabel IV-2
Perumusan Penjelasan Misi RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026

NO	MISI	PENJELASAN MISI
1	Meningkatkan kesadaran toleransi dan beragama dalam Masyarakat	Memastikan terwujudnya masyarakat Bulukumba yang rukun dan berperilaku sesuai dengan norma agama dan budaya, menjadi syarat untuk mewujudkan manusia Bulukumba yang maju dan sejahtera.
2	Meningkatkan tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik	Sebagai wilayah administrasi, pembangunan harus ditopang dengan pemerintahan yang dapat memberikan pelayanan yang prima. transparan. akuntabel. efektif. dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pelayanan yang prima dapat diwujudkan apabila Pemerintah Kabupaten Bulukumba memiliki Aparatur Sipil Negara dengan kualitas dan kapasitas sumberdaya manusia yang sesuai dengan kebutuhan serta sarana prasarana penunjang yang memadai menjadi dasar dalam meningkatkan tata Kelola pemerintah dan layanan publik yang lebih baik.
3	Mewujudkan tata Kelola Pertanian yang berkualitas dan Berdaya saing untuk memenuhi kebutuhan Daerah dan Ekspor	Untuk menjadi Kabupaten yang mandiri maka perlu untuk mengembangkan potensi perekonomian Bulukumba. Agar Kabupaten Bulukumba dapat menjadi daerah yang mandiri maka diperlukan peningkatan produktivitas komoditas unggulan dibidang pertanian, pengembangan perdagangan dan industri serta pembangunan pasar. Kabupaten Bulukumba tidak akan bisa menjadi daerah yang mandiri apabila sektor perekonomian tidak berkembang.
4	Meningkatkan produktifitas sumber daya Kelautan dan	Untuk menjadi Kabupaten yang mandiri maka perlu untuk mengembangkan potensi perekonomian Bulukumba. Agar Kabupaten

NO	MISI	PENJELASAN MISI
	Perikanan untuk memenuhi kebutuhan Daerah. Nasional dan Internasional	Bulukumba dapat menjadi daerah yang mandiri maka diperlukan peningkatan produktivitas komoditas unggulan dibidang Kelautan dan Perikanan, pengembangan perdagangan dan industri serta pengembangan /pembangunan pasar. Bulukumba tidak akan bisa menjadi daerah yang mandiri apabila sektor perekonomian tidak berkembang.
5	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan kebudayaan yang Berkarakter Kearifan Lokal	Memastikan terwujudnya masyarakat Bulukumba yang berpendidikan, rukun, dan berperilaku sesuai dengan norma agama dan budaya. Hal tersebut merupakan salah satu syarat untuk mewujudkan manusia Bulukumba yang maju dan sejahtera.
6	Meningkatkan Kualitas dan Layanan Kesehatan Masyarakat	Memastikan terwujudnya masyarakat Bulukumba yang sehat untuk mewujudkan manusia Bulukumba yang maju dan sejahtera. Hal ini juga merupakan lanjutan program pembangunan periode sebelumnya pada misi yang berkaitan dengan pengembangan sumberdaya manusia. Berbagai program dari misi-misi tersebut telah mampu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Bulukumba namun masih akan terus ditingkatkan.
7	Mengembangkan Destinasi Wisata untuk menarik Wisatawan Domestik dan Mancanegara	Kabupaten Bulukumba memiliki kondisi alam yang indah, dan asri. Kondisi alam ini memiliki keterkaitan erat dengan kultur dan budaya masyarakat yang perlu dijaga dan dilestarikan untuk diwariskan kepada generasi selanjutnya, sehingga potensi Bulukumba dapat dijadikan sasaran objek wisata untuk menarik wisatawan domestik dan mancanegara dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat
8	Pembangunan Infrastruktur yang Merata untuk melancarkan aktivitas Masyarakat	Pembangunan daerah pada hakikatnya mengedepankan pentingnya kebutuhan infrastruktur fisik. Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur fisik merupakan alasan utama mengapa Kabupaten Bulukumba terus mendorong penyediaan infrastruktur fisik yang lebih memadai. Sarana infrastruktur fisik yang memadai seperti jalan, jembatan, pasar, perumahan, sanitasi, listrik dan telekomunikasi menjadi prasyarat untuk mewujudkan kemajuan wilayah Kabupaten Bulukumba.
9	Pembangunan dan Meningkatkan Perdagangan dan Perindustrian untuk mewujudkan Ekonomi Mandiri berbasis Investasi dan Bantuan Pemerintah	Untuk menjadi daerah yang maju dan sejahtera maka diperlukan pengembangan ekonomi terutama peningkatan produktivitas serta pengembangan industri untuk mewujudkan ekonomi mandiri berbasis investasi dan bantuan pemerintah dalam bidang perdagangan dan perindustrian.
10	Membina Generasi muda yang berkarakter dengan menjunjung tinggi Sportivitas dan Profesionalisme	Meningkatkan sumber daya manusia yang tangguh dan profesional melalui pembinaan generasi muda yang berkarakter dengan menjunjung tinggi sportivitas dan Profesionalisme.
11	Membangun Desa Mandiri untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Untuk menjadi desa yang maju dan sejahtera maka perlu untuk mengedepankan pentingnya peran pemerintah desa di Kabupaten Bulukumba untuk secara aktif mengembangkan potensi perekonomian desa sehingga dapat menjadi desa yang lebih maju dan mandiri. Untuk itu Desa perlu meningkatkan potensi dan produktivitas unggulan agar lebih cepat mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran desa.
12	Penegakan Supremasi Hukum dan Pertahanan dan Keamanan	Mendorong ketercapaian tujuan pembangunan yang tentunya tidak terlepas dari meningkatnya kondisi lingkungan yang nyaman dan tertib sehingga dapat menurunkan konflik-konflik yang akan terjadi di masa yang akan datang yang salah satunya dapat dilihat dari menurunnya tingkat kriminalitas lingkungan.

Pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah kabupaten Bulukumba dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 tahun kedepan. Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan prioritas pembangunan daerah menjadi landasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2023

perumusan sasaran, strategi, dan kebijakan RKPD sebagai rencana tahunan. Rumusan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut: (1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi; (2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah; (4) dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan (5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Target dari tujuan dan sasaran tahun 2022 menjadi landasan RKPD Tahun 2022, sebagaimana yang tercantum dalam Tabel IV. 3.

Tabel IV-3

Tujuan dan sasaran serta target Pembangunan Kabupaten Bulukumba Tahun 2023

VISI : Mewujudkan Masyarakat Produktif, yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera					
Misi / Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi 2021	Rencana Capaian 2022	Target Capaian 2023
Misi 1 Meningkatkan Kesadaran Toleransi dan Beragama dalam Masyarakat					
Tujuan 1 Terwujudnya Kerukunan Umat Beragama	1 Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	na	70	71
Sasaran 1 Meningkatnya Hubungan Masyarakat yang Harmonis Berlandaskan nilai Agama	2 Persentase Konflik Antar Umat Beragama yang tertangani	%	100	100	100
Misi 2 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik					
Tujuan 2 Terwujudnya Pelayanan Prima yang Responsif, Profesional, Transparan dan Akuntabel	3 Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	CC	CC	CC
Sasaran 2 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	4 Skor LPPD/Kategori	Skor	na	3,5095	3,5260
Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi	5 Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	na	2.51-3.25	3.26-4.00
Misi 3 Mewujudkan Tata Kelola Pertanian yang Berkualitas Berdaya Saing untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah dan Ekspor					
Tujuan 3 Meningkatkan Potensi Dan Daya Saing Daerah Bidang Pertanian untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	6 Kontribusi Sub Sektor Pertanian Terhadap PDRB	%	24,31	22,76	22,28
Sasaran 4 Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian	7 Pertumbuhan PDRB Sub sektor Pertanian	%	1,48	1,52	2,85
Misi 4 Meningkatkan Produktivitas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah, Nasional dan Internasional					
Tujuan 4 Meningkatkan Potensi Dan Daya Saing Daerah Bidang Perikanan untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	8 Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan terhadap PDRB	%	12,95	12,86	13,21
Sasaran 5 Meningkatnya Produksi hasil Perikanan	9 Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	%	8,78	5,14	6,75

VISI : Mewujudkan Masyarakat Produktif, yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera					
Misi / Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi 2021	Rencana Capaian 2022	Target Capaian 2023
Misi 5 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter Kearifan Lokal					
Tujuan 5 Terwujudnya SDM yang Unggul, dan Berkarakter Kearifan Lokal	10 Indeks Pembangunan Manusia	Angka	69,62	70,11	70,61
Sasaran 6 Meningkatnya Kualitas Pendidikan	11 Indeks Pendidikan	Angka	63,32	64,06	65,13
Misi 6 Meningkatkan Kualitas dan Layanan Kesehatan Masyarakat					
Tujuan 6 Terwujudnya Derajat Kesehatan masyarakat	12 Indeks Kesehatan	Angka	74,00	74,94	75,62
Sasaran 7 Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	13 Usia Harapan Hidup	Tahun	68,10	68,71	69,15
Misi 7 Mengembangkan Destinasi Wisata untuk Menarik Wisatawan Domestik dan Mancanegara					
Tujuan 7 Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Keuangan Daerah	14 Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	%	3,41	2,88	3,05
Sasaran 8 Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Wisata Domestik Dan Mancanegara	15 Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	%	58,85	5,37	6,11
Misi 8 Pembangunan Infrastruktur yang Merata untuk Melancarkan Aktivitas Masyarakat					
Tujuan 8 Meningkatkan Pemerataan Pembangunan wilayah yang berkualitas	16 Gini Rasio	Angka	0,362	0,356	0,349
Sasaran 9 Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah	17 Indeks Daya saing infrastruktur	Angka	na	88	90
Misi 9 Pembangunan Dan Peningkatan Perdagangan Dan Perindustrian Untuk Mewujudkan Ekonomi Mandiri Berbasis Investasi Dan Bantuan Pemerintah					
Tujuan 9 Meningkatkan Kualitas Perdagangan dan Perindustrian Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi	18 Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB	%	23,39	24,47	24,91
Sasaran 10 Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	19 Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan dan Industri	%	12,23	11,08	10,84
Misi 10 Membina Generasi Muda yang Berkarakter dengan Menjunjung Tinggi Sportivitas dan Profesionalisme					
Tujuan 10 Meningkatkan Kualitas Generasi Muda Yang Berkarakter dan Berprestasi	20 Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	55,11	56,6	58,38
Sasaran 11 Meningkatnya Produktivitas Generasi Muda	21 Persentase Peningkatan Pemuda yang berprestasi	%	18	18	27
Misi 11 Membangun Desa Mandiri untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat					

VISI : Mewujudkan Masyarakat Produktif, yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera					
Misi / Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi 2021	Rencana Capaian 2022	Target Capaian 2023
Tujuan 11 Meningkatkan Pembangunan Desa di Segala Sektor	22 Indeks Desa Membangun	Angka	0,72	0,74	0,76
Sasaran 12 Meningkatnya Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui pengembangan Kawasan Perdesaan	23 Persentase Desa Mandiri	%	5,5	1,83	2,75
Tujuan 12 Meningkatkan Kenyamanan Dan Ketertiban Masyarakat	24 Indeks Rasa Aman	Angka	na	15	15
Sasaran 13 Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman	25 Persentase Penurunan Angka Kriminalitas	%	na	88,56	89,11

Berdasarkan Tabel IV - 3 di atas, menunjukkan tujuan dan sasaran serta indikator yang akan mendukung pencapaian Misi Kabupaten Bulukumba yang terdiri atas 12 tujuan, 13 sasaran dengan rumusan indikator sebanyak 12 indikator tujuan dan 13 indikator sasaran, sehingga total indikator yang digunakan untuk mengukur capaian Misi Kabupaten Bulukumba sebanyak 25 indikator. Tujuan dan sasaran yang terdapat pada penjabaran Visi dan Misi Kabupaten Bulukumba 2021 - 2026 diarahkan pula untuk mendukung sasaran yang telah ditetapkan pada RPJPD 2005-2025 serta Sasaran RPJMN 2020-2024. Berdasarkan analisis yang dilakukan keterkaitan RKPD Kab. Bulukumba Tahun 2023 antara sasaran RPJPD Kab. Bulukumba Tahun 2005-2025 dengan sasaran RPJMD Prov. Sulawesi Selatan 2018-2023, RPJMD Tahun 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV-4
Keterkaitan RKPD Kab. Bulukumba Tahun 2023 antara sasaran RPJPD Kab. Bulukumba Tahun 2005-2025
dengan sasaran RPJMD Prov. Sulawesi Selatan 2018-2023 dan RPJMN 2020-2024

Sasaran RKPD Kab. Bulukumba 2023	Sasaran RPJPD Kab. Bulukumba 2005-2025	Sasaran RPJMD Prov. Sulawesi Selatan 2018-2023	Sasaran RPJMN 2020-2024
Meningkatnya Pelayanan Prima Yang Responsif, Profesional, Transparan Dan Akuntabel	Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan melalui kegiatan industri yang berbasis pada potensi unggulan daerah berupa pertanian (agroindustri), jasa (agribisnis), dan pariwisata (agrowisata);	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah	Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 Undang- Undang. Pertama Undang-Undang Cipta Kerja dan kedua Undang- Undang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM);
Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Meningkatnya penyuluhan kepada para petani dalam peningkatan kapasitas petani dan kelembagaannya, meningkatkan kreativitas petani, serta peningkatan adopsi teknologi bidang pertanian.;		
Meningkatkan Potensi Dan Daya Saing Daerah Bidang Pertanian dan Perikanan Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya diversifikasi dan integrasi usaha secara berkelanjutan melalui sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan, perikanan, dan kehutanan;		
	Meningkatnya nilai guna lahan melalui peningkatan pola usaha tani.		
Meningkatnya SDM Yang Unggul, dan Berkarakter Kearifan Lokal	Meningkatnya kemandirian masyarakat Kabupaten Bulukumba dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang bertaqwa kepada Tuhan YangMaha Esa, berakhlak mulia, sehat, dan berpendidikan, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;	Meningkatkan kualitas SDM secara inklusif, Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pendidikan	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun Sumber Daya Manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual yang seimbang serta berdaya saing dengan tanpa meninggalkan jati dirinya sebagai masyarakat Kabupaten Bulukumba yang memegang prinsip mali siparappe tallang sipahua. Secara umum, peningkatan kualitas sumberdaya manusia ditandai dengan meningkatnya IPM	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	
Meningkatnya Kenyamanan Dan Ketertiban Masyarakat	Meningkatnya kualitas kehidupan dan peran perempuan dalam pembangunansehingga terdapat kesetaraan dengan kaum laki-laki sesuai kaidah pengarusutamaan gender		
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya kinerja aparaturn pemerintah yang bersih, berakhlak mulia, jujur dan adil, sejahtera, profesional, dan akomodatif terhadap aspirasi masyarakat dengan berorientasi pada kepuasan masyarakat yang dilayani;	Meningkatkan tata kelola penyenggaraan pemerintahan yang baik	Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangankerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi;

Sasaran RKPD Kab. Bulukumba 2023	Sasaran RPJPD Kab. Bulukumba 2005-2025	Sasaran RPJMD Prov. Sulawesi Selatan 2018-2023	Sasaran RPJMN 2020-2024
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan legislatif, pemerintah daerah, dan masyarakat yang dinamis, mengikuti tuntutan kebutuhan dan perubahan internal maupun eksternal;	Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahandan pelayanan publik	
	Meningkatnya kesadaran hukum dan budaya tertib masyarakat sebagai upaya pencegahan pelanggaran hukum		
	Terwujudnya stabilitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan demokrasi		
Meningkatnya Pelestarian lingkungan hidup	Meningkatnya fungsi penataan ruang dan pertanahan melalui konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan;	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
	Meningkatnya aksesibilitas, pemeliharaan prasarana dan sarana perhubungan;		
	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan;		
	Terwujudnya keindahan daerah melalui budaya bersih, budaya malu dan penghijauan desa serta penghijauan skala rumah tangga;		
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas fasilitas umum dan fasilitas sosial termasuk kepada perlindungan masyarakat dari bencana serta meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan;		
	Berkurangnya daerah-daerah terisolir dan terpencil dengan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka otonomi desa dan penguatan kegiatan ekonomi dengan daerah yang lebih strategis dan cepat tumbuh		
Meningkatkan kualitas sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/kerakyatan	Terjalinnnya kerjasama pengembangan dibidang agroindustri dengan daerah kabupaten terdekat;	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata	Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untukmenghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
	Meningkatnya perdagangan dengan kabupaten, provinsi terdekat yang ditandai dengan meningkatnya arus barang dan jasa melalui	Menurunya kesenjangan Pendapatan antar lapisan masyarakat	

Sasaran RKPD Kab. Bulukumba 2023	Sasaran RPJPD Kab. Bulukumba 2005-2025	Sasaran RPJMD Prov. Sulawesi Selatan 2018-2023	Sasaran RPJMN 2020-2024
	perbaikan kualitas sarana prasarana jalan, jembatan dan penyeberangan;		
	Terciptanya iklim investasi yang sehat dengan kepastian usaha, layanan efisien untuk memperkuat daya saing pada zona pasar terbuka;	Meningkatnya penyerapan tenaga kerjasektor unggulan	
	Meningkatnya promosi Kabupaten Bulukumba sebagai tujuan wisata sejarah, seni dengan manajemen pengelolaan yang profesional.	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor unggulan	

4.2 Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Bulukumba yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2005-2025 untuk Periode *RPJMD Tahap Keempat Tahun 2021-2026* maka Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bulukumba berlandaskan pada pembangunan tahap sebelumnya yang telah dilaksanakan dandicapai Kabupaten Bulukumba pada RPJMD Tahap Pertama, RPJMD Tahap Kedua, RPJMD Tahap Ketiga, RPJMD Tahap Keempat diarahkan untuk melanjutkan dan menyempurnakan pembangunan yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya pada berbagai bidang pembangunan. RPJMD Tahap Keempat ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Bulukumba yang sejahtera dan mandiri melalui pengembangan agroindustri melalui percepatan pembangunan di segala bidang.

Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat ditunjukkan oleh makin tingginya tingkat pendapatan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Paritas Daya Beli pada IPM Bulukumba, sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan seiring dengan makin efisien dan efektifnya manajemen pelayanan pendidikan, meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender, serta kesejahteraan dan perlindungan anak.

Struktur perekonomian makin maju dan kokoh dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan bergerak dari sektor pertanian menuju sektor industri dan jasa dengan tetap berbasis pada pertanian tanpa mengabaikan keterpaduan antar sektor. Lembaga perekonomian berfungsi dengan baik. Pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin semakin berkurang.

Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing antara lain dengan dititikberatkan pada upaya pencapaian sumber daya manusia yang berkarakter cerdas, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral berdasarkan nilai-nilai religius yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragama, beriman, dan bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran terhadap keberagaman, bergotong royong, dinamis, dan berorientasi kepada ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa meninggalkan ciri khasnya sebagai orang bugis.

Pembangunan aspek pemerintahan telah mencapai hal yang diinginkan yakni telah memahami dan menerapkan 10 (sepuluh) prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yakni partisipasi; penegakan hukum; transparansi; kesetaraan; daya tanggap; wawasan ke depan; akuntabilitas; pengawasan; efisiensi dan efektivitas; dan profesionalisme, peningkatan kondisi keamanan yang telah dicapai, peningkatan kemampuan dan kapasitas aparatur, serta aspek keuangan daerah sistem pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.

4.2.1 Sinergitas Prioritas Nasional dengan Prioritas Kabupaten Bulukumba

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2021-2023 menjadi acuan penyusunan prioritas pada rencana kerja tahunan selama 5 tahun. Selanjutnya, untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan meningkatkan pengendalian dalam proses pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah maka RKP 2023 merupakan penjabaran dari prioritas Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 dan menjadi acuan penyusunan RKP Tahun 2023 untuk menjaga keserasian rencana pembangunan.

Sinergitas proses perencanaan pembangunan merupakan suatu keharusan dalam proses pembangunan, perumusan proses perencanaan harus dilakukan secara berjenjang demi mewujudkan konsistensi arah dan tujuan pembangunan sehingga terwujud pembangunan yang padu dan berkelanjutan.

4.2.1.1 Tema Pembangunan Nasional

Penyusunan tema pembangunan RKP Tahun 2023 dilakukan dengan mempertimbangkan sasaran RPJMN Tahun 2020–2024, arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2021, kebijakan pembangunan tahun 2022, serta berbagai isu strategis yang menjadi perhatian. Tema RKP Tahun 2023 juga disusun sebagai respons terhadap kondisi Indonesia yang sedang berada dalam proses pemulihan akibat pandemi *Covid-19*. Krisis kesehatan akibat pandemi *Covid-19* telah berdampak sistemik terhadap pembangunan nasional, terutama pada aspek sosial dan ekonomi. Kontraksi ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2021 mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran, melemahnya daya beli masyarakat dan menurunnya produktivitas di sektor-sektor strategis. Kebijakan pemulihan ekonomi nasional masih perlu dilakukan pada tahun 2023, dan sekaligus menyiapkan landasan yang kokoh bagi Indonesia untuk melakukan transformasi ekonomi sesuai yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020–2024.

Pandemi *Covid-19* merupakan unprecedented shock yang mengubah secara signifikan pola interaksi antar manusia, sehingga berimplikasi terhadap perubahan pola aktivitas ekonomi, sosial, serta pelayanan publik. Penerapan social distancing dan protokol kesehatan menuntut penggunaan teknologi digital secara intensif dalam mendukung aktivitas manusia. Kondisi demikian tetap akan berlangsung dalam kehidupan era new normal, meskipun herd immunity diharapkan telah tercapai di tahun 2022. Berdasarkan hal tersebut, tema pembangunan RKP Tahun 2023 diarahkan untuk pemulihan ekonomi karena dampak *Covid-19* dengan berorientasi pada membangun kedepan dengan lebih baik (*Build Forward Better*). Adapun tema pembangunan RKP Tahun 2023 adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”

Gambar IV-1
Tema RKP Tahun 2023 dan Prioritas Nasional RKP Tahun 2023



Tema tersebut berfokus pada dua hal yaitu Pemulihan Ekonomi. Pemulihan Ekonomi dapat diterjemahkan sebagai upaya pemulihan daya beli masyarakat dan dunia usaha serta diversifikasi ekonomi. Pemulihan daya beli dan dunia usaha yang dilakukan sejalan dengan penuntasan krisis kesehatan, dilakukan melalui pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha, menjaga daya beli rumah tangga, serta percepatan pembangunan infrastruktur padat karya. Selain itu, dilakukan juga program program khusus untuk mendongkrak kembali daya beli masyarakat dan membangkitkan dunia usaha. Pada saat bersamaan, diversifikasi ekonomi dilakukan melalui program peningkatan nilai tambah, ketahanan pangan, pembangunan rendah karbon, dan pemerataan infrastruktur dan kualitas layanan digital.

4.2.1.2 Sasaran Pembangunan Nasional

Untuk mewujudkan tema tersebut maka sasaran pembangunan nasional tahun 2023 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi khususnya perekonomian nasional yang terdampak pandemi *Covid-19*, adapun sasaran pembangunan tahun 2023 adalah: (1) percepatan pemulihan ekonomi dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca; (2) peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia dan (b) tingkat kemiskinan.

Selain itu, indikator pembangunan tahun 2023 juga menitik beratkan pada indikator nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan. Target sasaran dan indikator pembangunan tahun 2022 ditunjukkan oleh Tabel berikut.

Gambar IV-2
Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023



4.2.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2023, ditetapkan arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2023 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar IV-3
Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023



4.2.1.4 Prioritas Pembangunan Nasional

Dalam merumuskan prioritas pembangunan Kabupaten Bulukumba Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Bulukumba tetap memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan provinsi agar pembangunan tahunan Kabupaten Bulukumba dapat menunjang pembangunan di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dan pusat. Untuk Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, Pemerintah mengusung tema pembangunan "**Peningkatan**

Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan pada tahun 2023, Lebih lanjut tujuh PN RKP Tahun 2022 ditunjukkan pada Tabel

**Tabel IV-5
Prioritas Nasional dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2023**

Prioritas Nasional Tahun 2023	Prioritas Kabupaten Tahun 2023
1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	4. Peningkatan kualitas sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/kerakyatan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	2. Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan
3. Meningkatkan SDM Berkualitas dan berdaya saing	1. Pembangunan sumber daya manusia
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	10. Peningkatan Produktifitas generasi muda
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	5. Peningkatan kualitas sistem pelayanan kesehatan
6. Membangun lingkungan hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	6. Pelestarian lingkungan hidup
	7. Kesiap siagaan dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	3. Pemantapan reformasi birokrasi
	8. Peningkatan kemitraan antar institusi
	9. Peningkatan kemandirian desa

4.2.2 Sinergitas Perencanaan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Prioritas Kabupaten Bulukumba

Prioritas Pemerintah pusat tersebut kemudian menjadi cerminan bagi pemerintah Provinsi Sulawesi dalam merencanakan pembangunan daerah tahunan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2005-2025 dan mempertimbangkan RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026, serta memperhatikan RKP Tahun 2023. Untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengusung tema pembangunan **“Pemantapan Kesejahteraan Melalui Pengembangan Manusia Yang Produktif dan Berkarakter”**, dengan 7 prioritas pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2023, yaitu:

1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik
2. Penguatan infrastruktur wilayah
3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan
4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi
5. Pembangunan manusia
6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas
7. Pelestarian lingkungan hidup

Dalam mencapai prioritas pembangunan tersebut, maka keterkaitan pembangunan daerah RKPDP Prov. Sulawesi Selatan 2022 RKPDP Kab. Bulukumba 2023 difokuskan pada sasaran sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel IV-6
Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2023

Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023	Prioritas Kabupaten Bulukumba Tahun 2023
1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	3.Pemantapan reformasi birokrasi
	8.Peningkatan kemitraan antar institusi
	9.Peningkatan kemandiran desa
2. Penguatan infrastruktur wilayah	2. Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan
	7. Kesiapsiagaan dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana
3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan	4.Peningkatan kualitas sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/kerakyatan
4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi	5.Peningkatan kualitas sistem pelayanan kesehatan
5. Peningkatan Pembangunan manusia	1. Pembangunan sumber daya manusia
6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	10.Peningkatan Produktifitas generasi muda
7. Pelestarian lingkungan hidup	6.Pelestarian lingkungan hidup

4.2.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023

Prioritas tahun 2023 banyak dipengaruhi dengan adanya pandemi *Covid-19* yang telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di seluruh negara dan berakibat terjadinya resesi di dunia. Dampak yang dirasakan Kabupaten Bulukumba juga cukup besar dengan terputusnya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Keadaan ini tentu harus dikendalikan, maka menjadi keharusan bagi Pemerintah daerah untuk melakukan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2023.

Dengan demikian perencanaan pembangunan pada tahun 2023 akan difokuskan pada pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat kembali berjalan lancar, peningkatan sistem kesehatan, memperkuat sistem ketahanan pangan nasional, membangun sistem perlindungan sosial secara terpadu guna menyongsong era baru pasca pandemi *Covid-19*.

Melihat tema dan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, maka untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023, mengusung tema pembangunan "***Pengembangan Daya Tahan Perekonomian Masyarakat Dengan Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah***", dengan 10 prioritas pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2023.

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia,
2. Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan,
3. Pemantapan reformasi birokrasi,
4. Peningkatan kualitas sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/kerakyatan,
5. Peningkatan kualitas sistem Pelayanan kesehatan
6. Pelestarian lingkungan hidup.

7. Kesiapsiagaan dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana
8. Peningkatan Kemitraan antar institusi
9. Peningkatan kemandirian desa
10. Peningkatan produktifitas generasi muda

Dalam mencapai prioritas pembangunan tersebut, maka pembangunan daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 difokuskan pada sasaran sebagai mana pada tabel berikut:

Tabel IV-7
Sasaran Pembangunan Tahun 2023

No	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan	Satuan	Target	
					RPJMD Periode 2023	RKPD Tahun 2023
1	Pembangunan sumber daya manusia	Terwujudnya Kerukunan Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	71	71
		Meningkatnya Hubungan Masyarakat yang Harmonis Berlandaskan nilai Agama	Persentase Konflik Antar Umat Beragama yang tertangani	%	100	100
		Terwujudnya SDM yang Unggul, dan Berkarakter Kearifan Lokal	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	71,09	71,09
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	Angka	65,13	65,13
2	Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan wilayah yang berkualitas	Gini Rasio	Angka	0,349	0,355
		Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah	Indeks Daya saing infrastruktur	Angka	90	90
3	Pemantapan reformasi birokrasi	Terwujudnya Pelayanan Prima yang Responsif, Profesional, Transparan dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	CC	CC
		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pembangunan	Skor LPPD/Kategori	Skor	3,5260	3,5260
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3.26-4.00	3.26-4.00
4	Peningkatan kualitas sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/kerakyatan	Meningkatkan Potensi Dan Daya Saing Daerah Bidang Pertanian untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Kontribusi Sub Sektor Pertanian Terhadap PDRB	%	22,28	22,28
		Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian	Pertumbuhan PDRB Sub sektor Pertanian	%	2,85	2,85
		Meningkatkan Potensi Dan Daya Saing Daerah Bidang Perikanan untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan terhadap PDRB	%	13,21	13,21
		Meningkatnya Produksi hasil Perikanan	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	%	6,75	6,75
		Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Keuangan Daerah	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	%	3,05	3,05

No	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan	Satuan	Target	
					RPJMD Periode 2023	RKPD Tahun 2023
		Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Wisata Domestik Dan Mancanegara	Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	%	6,11	6,11
		Meningkatkan Kualitas Perdagangan dan Perindustrian Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB	%	24,91	24,91
		Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan dan Industri	%	10,84	10,84
5	Peningkatankualitas sistem pelayanan kesehatan	Terwujudnya Derajat Kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Angka	75,62	75,62
		Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	69,15	69,15
6	Pelestarian lingkungan hidup	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan wilayah yang berkualitas	Gini Rasio	Angka	0,366	0,355
7	Kesiapsiagaan dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana	Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah	Indeks Daya saing infrastruktur	Angka	90	90
8	Peningkatan Kemitraan antar institusi	Meningkatkan Kenyamanan Dan Ketertiban Masyarakat	Indeks Rasa Aman	Angka	15	15
		Terwujudnya tatananan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman	Persentase Angka Kriminalitas yang tertangani	%	89,11	89,11
9	Peningkatan kemandirian desa	Meningkatkan Pembangunan Desa di Segala Sektor	Indeks Desa Membangun	Angka	0,76	0,76
		Meningkatnya Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui pengembangan Kawasan Perdesaan	Persentase Desa Mandiri	%	2,75	2,75
10	Peningkatan produktifitas generasi muda	Meningkatnya Kualitas Generasi Muda Yang Berkarakter dan Berprestasi	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	71,09	71,09
		Meningkatnya Produktivitas Generasi Muda	Persentase Peningkatan Pemuda yang berperestasi	%	27	27

Prioritas Pembangunan Tahun 2023 tersebut dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan Tahun sebelumnya dan isu strategis daerah. Sinkronisasi permasalahan dan isu strategis terhadap prioritas pembangunan Tahun 2023, sebagai mana tabel sebagai berikut:

Tabel IV-8
Hubungan Permasalahan Pembangunan Daerah Dan Isu Strategis Terhadap Prioritas Pembangunan Tahun 2023

No	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis			Kabupaten Bulukumba	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran
		Global	Nasional	Provinsi Sul-Sel				
1	Tata Kelola Pemerintahan Yang Belum Optimal	Transformasi Digital		Keberadaan Sumberdaya Manusia (SDM) yang berkualitas.	Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih, melayani dan inovatif	Pemantapan reformasi birokrasi (3)	Terwujudnya Pelayanan Prima yang Responsif, Profesional, Transparan dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi
					Sinergitas kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan stakeholder lainnya		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pembangunan	Skor LPPD/Kategori
							Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat
						Peningkatan Kemitraan antar institusi (8)	Meningkatkan Kenyamanan Dan Ketertiban Masyarakat	Indeks Rasa Aman
							Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman	Persentase Angka Kriminalitas yang tertangani
						Peningkatan kemandirian desa (9)	Meningkatkan Pembangunan Desa di Segala Sektor	Indeks Desa Membangun
							Meningkatnya Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui pengembangan Kawasan Perdesaan	Persentase Desa Mandiri
2	Masih Tingginya Ketimpangan Wilayah	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ <i>Sustainable Development Goals</i> (SDG's)	Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Kualitas infrastruktur yang menunjang kegiatan perekonomian. Sulawesi Selatan sebagai poros maritim	Mendorong kontribusi sektor pertanian, perikanan, pariwisata, perindustrian dan perdagangan	Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan (2)	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan wilayah yang berkualitas	Gini Rasio/ Indeks Gini
							Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah	Indeks Daya saing infrastruktur

No	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis			Kabupaten Bulukumba	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran
		Global	Nasional	Provinsi Sul-Sel				
3	Masih Tingginya Tingkat Angka Kemiskinan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ <i>Sustainable Development Goals</i> (SDG's)	Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.	Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis sumber daya lokal	Peningkatan kualitas sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/kerakyatan (4)	Meningkatkan Potensi Dan Daya Saing Daerah Bidang Pertanian untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Kontribusi Sub Sektor Pertanian Terhadap PDRB
4	Masih Tingginya Tingkat Pengangguran			Peningkatnya aspek Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dalam mendukung perekonomian daerah	Kesiapsiagaan dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana (7)	Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian	Pertumbuhan PDRB Sub sektor Pertanian	
						Meningkatkan Potensi Dan Daya Saing Daerah Bidang Perikanan untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan terhadap PDRB	
						Meningkatnya Produksi hasil Perikanan	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	
						Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Keuangan Daerah	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	
						Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Wisata Domestik Dan Mancanegara	Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	
						Meningkatkan Kualitas Perdagangan dan Perindustrian Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB	
						Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan dan Industri	

No	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis			Kabupaten Bulukumba	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran
		Global	Nasional	Provinsi Sul-Sel				
5	Ketimpangan Pendapatan Masyarakat Masih Tinggi	Pandemi Covid-19		Pemerataan Pendapatan bagi warga Sulawesi Selatan.	Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)	Peningkatankualitas sistem pelayanan kesehatan (5)	Terwujudnya Derajat Kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan
							Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)
6	Masi Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDG's)	Standar Pelaynan Minimal (SPM)	Pelayanan Kesehatan bagi seluruh masyarakat	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pembangunan sumber daya manusia (1)	Terwujudnya Kerukunan Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama
				Keberadaan Sumberdaya Manusia (SDM) yang berkualitas.			Meningkatnya Hubungan Masyarakat yang Harmonis Berlandaskan nilai Agama	Persentase Konflik Antar Umat Beragama yang tertangani
							Terwujudnya SDM yang Unggul, dan Berkarakter Kearifan Lokal	Indeks Pembangunan Manusia
							Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan
7	Adanya Kontraksi Pertumbuhan Ekonomi	Pandemi Covid-19	Pertumbuhan Ekonomi Mengalami Kontraksi	Revitalisasi Paradigma pengelolaan Komoditi (Petik, Olah, Jual)	Pengelolaan dan produktifitas sumber daya alam	Peningkatan produktifitas generasi muda (10)	Meningkatnya Kualitas Generasi Muda Yang Berkarakter dan Berprestasi	Indeks Pembangunan Pemuda
							Meningkatnya Produktivitas Generasi Muda	Persentase Peningkatan Pemuda yang berperestasi
8	Belum Optimalnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	Perubahan Iklim		Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam.	Peningkatan kualitas, kapasitas dan penataan infrastruktur wilayah	Pelestarian lingkungan hidup (6)	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan wilayah yang berkualitas	Gini Rasio/ Indeks Gini
							Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah	Indeks Daya saing infrastruktur

Prioritas Pembangunan 2023 yang merupakan penjabaran dari Visi/Misi dan arah kebijakan RPJMD 2021-2026 sebagai mana pada tabel yang menggambarkan arah kebijakan RPJMD terhadap Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel IV-9

Keterkaitan Misi RPJMD dengan Prioritas Pembangunan Daerah untuk Tahun 2023

No	Misi RPJMD	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan
1	Meningkatkan Kesadaran Toleransi Dan Beragama Dalam Masyarakat	Pembangunan sumber daya manusia	Terwujudnya Kerukunan Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama
			Meningkatnya Hubungan Masyarakat yang Harmonis Berlandaskan nilai Agama	Persentase Konflik Antar Umat Beragama yang tertangani
2	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Layanan Publik	Pemantapan reformasi birokrasi	Terwujudnya Pelayanan Prima yang Responsif, Profesional, Transparan dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi
			Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pembangunan	Skor LPPD/Kategori
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat
3	Mewujudkan Tata Kelola Pertanian Yang Berkualitas Berdaya Saing Untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah Dan Ekspor	Peningkatan kualitas sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/kerakyatan	Meningkatkan Potensi Dan Daya Saing Daerah Bidang Pertanian untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Kontribusi Sub Sektor Pertanian Terhadap PDRB
			Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian	Pertumbuhan PDRB Sub sektor Pertanian
4	Meningkatkan Produktivitas Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah, Nasional Dan Internasional	Peningkatan kualitas sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/kerakyatan	Meningkatkan Potensi Dan Daya Saing Daerah Bidang Perikanan untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan terhadap PDRB
			Meningkatnya Produksi hasil Perikanan	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan
5	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan Kebudayaan yang berkarakter kearifan lokal	Pembangunan sumber daya manusia	Terwujudnya SDM yang Unggul, dan Berkarakter Kearifan Lokal	Indeks Pembangunan Manusia
			Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan
6	Meningkatkan Kualitas dan Layanan Kesehatan Masyarakat	Peningkatankualitas sistem pelayanan kesehatan	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan wilayah yang berkualitas	Gini Rasio
			Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah	Indeks Daya saing infrastruktur
			Terwujudnya Derajat Kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan
			Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)

No	Misi RPJMD	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan
7	Mengembangkan Destinasi Wisata Untuk Menarik Wisatawan Domestik Dan Mancanegara	Peningkatan kualitas sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/kerakyatan	Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Keuangan Daerah	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD
			Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Wisata Domestik Dan Mancanegara	Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata
8	Pembangunan Infrastruktur yang Merata untuk melancarkan aktivitas Masyarakat	Pelestarian lingkungan hidup Kesiapsiagaan dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana	Meningkatkan Kenyamanan Dan Ketertiban Masyarakat	Indeks Rasa Aman
			Terwujudnya tatananan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman	Persentase Angka Kriminalitas yang tertangani
			Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah	Indeks Daya saing infrastruktur
9	Pembangunan Dan Peningkatan Perdagangan Dan Perindustrian Untuk Mewujudkan Ekonomi Mandiri Berbasis Investasi Dan Bantuan Pemerintah	Peningkatan kualitas sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/kerakyatan	Meningkatkan Kualitas Perdagangan dan Perindustrian Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB
			Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan dan Industri
10	Membina Generasi Muda Yang Berkarakter Dengan Menjunjung Tinggi Sportivitas Dan Profesionalisme	Peningkatan produktifitas generasi muda	Meningkatnya Kualitas Generasi Muda Yang Berkarakter dan Berprestasi	Indeks Pembangunan Pemuda
			Meningkatnya Produktivitas Generasi Muda	Persentase Peningkatan Pemuda yang berprestasi
11	Membangun Desa Mandiri Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan kemandirian desa	Meningkatkan Pembangunan Desa di Segala Sektor	Indeks Desa Membangun
			Meningkatnya Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui pengembangan Kawasan Perdesaan	Persentase Desa Mandiri
12	Penegakan Supremasi Hukum Dan Pertahanan Dan Keamanan	Peningkatan Kemitraan antar institusi	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan wilayah yang berkualitas	Gini Rasio
			Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah	Indeks Daya saing infrastruktur

4.2.3.1 Program Prioritas Pembangunan Tahun 2023

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Bulukumba Tahun 2023, dirumuskan program prioritas pembangunan yang merupakan pelaksanaan dari program RPJMD Kabupaten Bulukumba sebagaimana pada tabel berikut:

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Bulukumba Tahun 2023, dirumuskan program prioritas pembangunan yang merupakan pelaksanaan dari program RPJMD Kabupaten Bulukumba sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel IV-10
Program Prioritas Pembangunan Tahun 2023

No	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Sasaran Pembangunan	Program dan Proyek Prioritas	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
					Target		
					Kinerja	Anggaran	
1	Pembangunan sumber daya manusia	Meningkatnya Hubungan Masyarakat yang Harmonis Berlandaskan nilai Agama	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Indeks Kerukunan Umat Beragama dan Kasus Intoleransi Yang Terjadi	77,5%	150.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Peningkatan Penanganan Konflik Di Daerah	15 %	200.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase lembaga keagamaan dan peningkatan kesadaran toleransi beragama, Persentase Jumlah Perkara hukum yang difasilitasi, Ketersediaan dokumen LKPJ dan LPPD tepat waktu	100 %	2.906.120.048	Sekretariat Daerah
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Prsnts Jumlh Wrg Ngr Usi 7 -15 Thun yang brprtisipsi dlm pndidikn dsr (SPM), Prsnts Jumlh Wrg Ngr Usi 7 -18 Thun yang blum mnlyskn pndidikn dsr dn tu mnnggh yang prprtisipsi dlm pndidikn kstrn (SPM)	100%	98.211.230.896	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV, Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah	100%	250.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan	Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase panjang talud/ drainase yang baik, Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1.5 M)	100 %	5.745.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Pemenuhan program penyelenggaraan jalan	100 %	99.677.415.119	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenanga kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	81.7 %	7.971.045.550	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Prsnts Pnduduk Brkss ir Minum, Prsnts Jumlh wrng ngr yang mmprolh kbutuhn pokok ir minum shri-hri (SPM)	92 %	7.196.132.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Sasaran Pembangunan	Program dan Proyek Prioritas	Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
					Target		
					Kinerja	Anggaran	
			Program Kawasan Permukiman	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	93,84 %	16.085.680.628	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Program Pengembangan Perumahan	Persentase Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM), Persentase jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	100 %	888.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Program Pengembangan Permukiman	prsentase pengembagan permukiman, Persentase Pemukiman Yang Tertata	86.18 %	1.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Bangunan Ber IMB Per Satuan Bangunan	20.44 %	33.313.779.400	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan	100 %	1.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengelolaan Persampahan	Presentase Sampah Yang Terkelolah	100 %	10.869.546.098	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Presentase Terjaganya Kelestarian Sumber Daya,Fungsi Kawasan Hutan ,Keanekaragaman Hayati (Flora Dan Fauna) Serta Rekonstruksi Tata Batas Pada Kawasan Tahura Dikecamatan Bt,Bahari	85 %	1.270.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	Pemantapan reformasi birokrasi	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pembangunan	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase lembaga keagamaan dan peningkatan kesadaran toleransi beragama, Persentase Jumlah Perkara hukum yang difasilitasi, Ketersediaan dokumen LKPJ dan LPPD tepat waktu	100 %	2.906.120.048	Sekretariat Daerah
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA, Serta Infrastruktur Dan Kewilayahan	100 %	1.583.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD, Total Dana Bagi Hasil kab/Kota dan Desa, Penetapan APBD (Tepat Waktu), Persentase SILPA terhadap APBD,	48.28 %	224.290.062.366	BPKPD

No	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Sasaran Pembangunan	Program dan Proyek Prioritas	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
					Target		
					Kinerja	Anggaran	
				Persentase Belanja Pendidikan (20%), Persentase Belanja Kesehatan (10%), Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan	11.76 %	6.919.788.547	BPKPD
			Program Kepegawaian Daerah	Presentase Meningkatnya Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara diatas 90 Lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba	45 %	1.462.471.000	BKPSDM
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Presentase Peningkatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional ,pendidikan dan pelatihan prajabatan (LATSAR), serta pendidikan dan pelatihan teknis lainnya	33 %	3.285.629.604	BKPSDM
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Jumlah Temuan BPK dan Persentase Pelanggaran Pegawai	57 %	3.688.105.000	Inspektorat Daerah
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Tindak Lanjut Temuan	50 %	1.569.424.000	Inspektorat Daerah
			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (SPM)Persentase Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (SPM)Persentase Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM)Persentase Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti (SPM)	100 %	417.505.300	Dinas Sosial
			Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan penerbitan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk	100 %	546.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Program Pencatatan Sipil	Cakupan penerbitan akta kelahiran, cakupan penerbitan akta kematian, rasio pasangan berakta nikah, rasio bayi berakta kelahiran.	90 %	208.950.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Sasaran Pembangunan	Program dan Proyek Prioritas	Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
					Target		
					Kinerja	Anggaran	
			Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan data pemerintah	100 %	1.316.446.242	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Program Aplikasi Informatika	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh dinas kominformo	100 %	3.000.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Pelayanan Perizinan	0 %	282.823.665	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
			Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Jumlah Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu	100 %	22.163.687	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
4	Peningkatan kualitas sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/kerakyatan	Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan)	100 %	600.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Meningkatnya Produksi hasil Perikanan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Jumlah Produksi Pertanian	75 %	11.665.274.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Wisata Domestik Dan Mancanegara	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana sektor pertanian yang tersedia	80 %	7.688.500.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Sampel Pangan Dengan Mutu Aman	45 %	25.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani yang dibina	57 %	545.170.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Usaha Sektor Peternakan Yang Berizin	50 %	26.289.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kontribusi PDRB sektor perikanan, Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan, Persentase Produksi Perikanan Tangkap	13,2 %	8.288.500.000	Dinas Perikanan

No	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Sasaran Pembangunan	Program dan Proyek Prioritas	Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
					Target		
					Kinerja	Anggaran	
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya, Cakupan Bina Kelompok Perikanan	100 %	1.784.000.000	Dinas Perikanan
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Tingkat Konsumsi Ikan	93 %	276.109.528	Dinas Perikanan
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (%)	85 %	6.187.640.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
			Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota (%)	85 %	1.350.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	1,64 %	1.037.578.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
			Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	100 %	42.726.300	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
			Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Izin Usaha Simpan Pinjam Yang Ada	100 %	17.921.800	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Program Pemberdayaan UMKM	Persentase UMKM Yang Diberdayakan	2,3 %	1.080.394.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Program Pengembangan UMKM	Persentase peningkatan Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha	2,7 %	590.055.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	50 %	4.760.452.595	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	7.79 %	227.744.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Sasaran Pembangunan	Program dan Proyek Prioritas	Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
					Target		
					Kinerja	Anggaran	
			Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda Tera Sah yang Berlaku	35 %	187.487.500	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
5	Peningkatankualitas sistem pelayanan kesehatan	Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Ketersediaan sarana, Prasarana dan Alkes UKP dan UKM Rujukan	85 %	109.141.925.904	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Wisata Domestik Dan Mancanegara	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar	80 %	4.992.150.013	Dinas Kesehatan
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	persentase ketersediaan ALKES Sesuai standar, Persentase Pemenuhan Kebutuhan Obat dan Bahan Medis Pakai sesuai standar	83 %	592.715.436	Dinas Kesehatan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Keluarga Ber PHBS	66 %	331.077.520	Dinas Kesehatan
6	Pelestarian lingkungan hidup	Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase panjang talud/ drainase yang baik, Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1.5 M)	100 %	5.745.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Kesiapsiagaan dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana		Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Pemenuhan program penyelenggaraan jalan	100 %	99.677.415.119	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenanga kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	81.7 %	7.971.045.550	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Prsnts Pnduduk Brkss ir Minum, Prsnts Jumlh wrg ngr yng mmprolh kbutuhn pokok ir minum shri-hri (SPM)	92 %	7.196.132.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Kawasan Permukiman	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	93,84 %	16.085.680.628	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Program Pengembangan Perumahan	Persentase Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM), Persentase jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah	100 %	888.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Sasaran Pembangunan	Program dan Proyek Prioritas	Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
					Target		
					Kinerja	Anggaran	
				daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh rumah layak huni (SPM)			
			Program Pengembangan Permukiman	prsentase pengembagan permukiman, Persentase Pemukiman Yang Tertata	86.18 %	1.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Bangunan Ber IMB Per Satuan Bangunan	20.44 %	33.313.779.400	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan	100 %	1.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengelolaan Persampahan	Presentase Sampah Yang Terkelolah	100 %	10.869.546.098	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Presentase Terjaganya Kelestarian Sumber Daya,Fungsi Kawasan Hutan ,Keanekaragaman Hayati (Flora Dan Fauna) Serta Rekonstruksi Tata Batas Pada Kawasan Tahura Dikecamatan Bt,Bahari	85 %	1.270.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
8	Peningkatan Kemitraan antar institusi	Terwujudnya tatananan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM), Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM), Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)	100 %	1.170.565.733	BPBD
			Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penegakan Perda, Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara (SPM)	100 %	3.137.899.000	Satpol PP, Damkar, Penyelamatan
			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Kegiatan Pendidikan Politik Masyarakat	75 %	1.570.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal Dan	Presentase cakupan pengakuan keberadaan MHA , kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	100 %	76.860.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Sasaran Pembangunan	Program dan Proyek Prioritas	Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
					Target		
					Kinerja	Anggaran	
			Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH				
			Program Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100 %	226.773.750	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Jumlah anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	77 %	349.980.250	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100 %	105.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
9	Peningkatan kemandirian desa	Meningkatnya Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui pengembangan Kawasan Perdesaan	Program Penataan Desa	Persentase Jumlah Desa yang memiliki Penataan Wilayah Desa Yang Baik	50 %	45.510.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Jumlah Desa yang memiliki Penataan Wilayah Desa Yang Baik	100 %	100.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah Desa yang memiliki administrasi Pemerintahan Desa yang Baik	100 %	1.536.490.100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase peningkatan status desa mandiri	100 %	254.643.615	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10	Peningkatan produktifitas generasi muda	Meningkatnya Produktivitas Generasi Muda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Jumlah Pemuda Inovator	100 %	825.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat nasional dan internasional	100 %	2.419.940.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
			Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	100 %	7.997.076.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

4.2.3.2 Kesesuaian Prioritas Pembangunan Tahun 2022 dengan Sasaran RPJMD

RKPD sebagai perencanaan Tahunan tetap menjaga konsistensi dengan RPJMD yang tergambarkan melalui sasaran prioritas pembangunan, dapat dilihat pada Tabel berikut;

Tabel IV-11
Kesesuaian Prioritas Pembangunan Tahun 2023 dengan Sasaran RPJMD untuk Tahun 2023

No	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan	Satuan	Target RKPD Tahun 2023
1	Pembangunan sumber daya manusia	Terwujudnya Kerukunan Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	71
		Meningkatnya Hubungan Masyarakat yang Harmonis Berlandaskan nilai Agama	Persentase Konflik Antar Umat Beragama yang tertangani	%	100
		Terwujudnya SDM yang Unggul, dan Berkarakter Kearifan Lokal	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	71,09
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	Angka	65,13
2	Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan wilayah yang berkualitas	Gini Rasio/ Indeks Gini	Angka	0,355
		Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah	Indeks Daya saing infrastruktur	Angka	90
3	Pemantapan reformasi birokrasi	Terwujudnya Pelayanan Prima yang Responsif, Profesional, Transparan dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	CC
		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pembangunan	Skor LPPD/Kategori	Skor	3,5260
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3.26-4.00
4	Peningkatan kualitas sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/kerakyatan	Meningkatkan Potensi Dan Daya Saing Daerah Bidang Pertanian untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Kontribusi Sub Sektor Pertanian Terhadap PDRB	%	22,28
		Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian	Pertumbuhan PDRB Sub sektor Pertanian	%	4,37
		Meningkatkan Potensi Dan Daya Saing Daerah Bidang Perikanan untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan terhadap PDRB	%	13,21
		Meningkatnya Produksi hasil Perikanan	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	%	6,75

No	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan	Satuan	Target RKPD Tahun 2023
		Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Keuangan Daerah	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	%	3,05
		Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Wisata Domestik Dan Mancanegara	Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	%	6,11
		Meningkatkan Kualitas Perdagangan dan Perindustrian Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB	%	24,91
		Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan dan Industri	%	10,84
5	Peningkatan kualitas sistem pelayanan kesehatan	Terwujudnya Derajat Kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Angka	75,62
		Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	69,15
6	Pelestarian lingkungan hidup	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan wilayah yang berkualitas	Gini Rasio/ Indeks Gini	Angka	0,355
7	Kesiapsiagaan dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana	Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah	Indeks Daya saing infrastruktur	Angka	90
8	Peningkatan Kemitraan antar institusi	Meningkatkan Kenyamanan Dan Ketertiban Masyarakat	Indeks Rasa Aman	Angka	15
		Terwujudnya tatananan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman	Persentase Angka Kriminalitas yang tertangani	%	89,11
9	Peningkatan kemandirian desa	Meningkatkan Pembangunan Desa di Segala Sektor	Indeks Desa Membangun	Angka	0,76
		Meningkatnya Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui pengembangan Kawasan Perdesaan	Persentase Desa Mandiri	%	2,75
10	Peningkatan produktifitas generasi muda	Meningkatnya Kualitas Generasi Muda Yang Berkarakter dan Berprestasi	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	58,38
		Meningkatnya Produktivitas Generasi Muda	Persentase Peningkatan Pemuda yang berprestasi	%	27

4.2.4 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023

4.2.4.1 Strategi Pembangunan Tahun 2023

Pencapaian sasaran pembangunan tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bulukumba, didasarkan pada strategi yang dirumuskan dengan melakukan analisis berdasarkan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam mencapai sasaran. Strategi Salah satu upaya mencapai sasaran pembangunan daerah Bulukumba, sebagaimana ditetapkan dalam kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bulukumba adalah memperkuat peran pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan Pemerintah Kabupaten Bulukumba guna menjamin pencapaian kinerja pembangunan daerah secara optimal.

Strategi pembangunan daerah Bulukumba tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 yang disusun dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Bulukumba Tahun 2023. Strategi pembangunan daerah Bulukumba meliputi:

1. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis sumber daya lokal dalam rangka pemerataan pendapatan bagi masyarakat Bulukumba khususnya peningkatan nilai tukar petani dan menurunnya Angka Kesenjangan/Indeks Gini serta penurunan rasio ketergantungan.
2. Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih, melayani dan inovatif khususnya dalam peningkatan kualitas layanan pemerintah.
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
4. Mendorong kontribusi sektor pertanian, perikanan, pariwisata, perindustrian dan perdagangan dalam membangkitkan perekonomian daerah.
5. Peningkatan kualitas, kapasitas dan penataan infrastruktur wilayah secara merata serta Pengendalian kualitas lingkungan hidup.
6. Meningkatnya aspek Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dalam mendukung perekonomian daerah.
7. Sinergitas kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan stakeholder lainnya.

4.2.4.2 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023

Penyusunan arah kebijakan pembangunan Tahun 2023 disusun berdasarkan arah kebijakan pada RPJMD. Adapun Keterkaitan Prioritas Pembangunan dengan Arah Kebijakan RPJMD terhadap prioritas pembangunan Tahun 2023 secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV-12
Keterkaitan Prioritas Pembangunan dengan Arah Kebijakan RPJMD
untuk Tahun 2023

No.	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2023
1	Pembangunan sumber daya manusia	Penguatan pendidikan vokasional untuk menghasilkan tamatan yang bisa menciptakan lapangan kerja
		Peningkatan Kelembagaan Keagamaan
2	Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan	Peningkatan jangkauan, kualitas dan kemantapan jalan Kabupaten serta wilayah terisolir
		Penyediaan dan pengembangan infrastruktur pendukung pelabuhan, dermaga, terminal dan bandara

No.	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2023
3	Pemantapan reformasi birokrasi	Pengembangan sumber daya manusia dalam Peningkatankinerja aparatur pemerintah
		Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat pada Instansi terkait
4	Peningkatan kualitas sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/ kerakyatan	Peningkatan ketersediaan dan mutu benih/bibit untuk mendukung produksi pertanian
		Peningkatan sektor perikanan menuju hilirisasi industri
		Peningkatan daya saing wisata Bulukumba di tingkat nasional dan internasional
		Penguatan SDM pelaku usaha dan dukungan sarana prasarana, teknologi, dan micro finance pada wilayah pertumbuhan
5	Peningkatankualitas sistem pelayanan kesehatan	Peningkatan jumlah, kapasitas dan kualitas tenaga kesehatan
6	Pelestarian lingkungan hidup	Peningkatan jangkauan, kualitas dan kemandapan jalan Kabupaten serta wilayah terisolir
		Penyediaan dan pengembangan infrastruktur pendukung pelabuhan, dermaga, terminal dan bandara
7	Kesiapsiagaan dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana	Peningkatan peran dan fungsi kamtibmas sebagai upaya menekan gangguan keamanan
8	Peningkatan Kemitraan antar institusi	Peningkatan peran dan fungsi kamtibmas sebagai upaya menekan gangguan keamanan
		Terwujudnya proses perlindungan masyarakat yg ber keadilan
9	Peningkatan kemandirian desa	Akselerasi peningkatan nilai tambah dan daya saing produk berbasis sumber daya alam
10	Peningkatan produktifitas generasi muda	peningkatan persentase pemuda mendukung domain partisipasi dan kepemimpinan

4.3 Dukungan Terhadap Prioritas Provinsi dan Nasional

4.3.1 Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bulukumba dan Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

Sebagai dukungan terhadap kegiatan Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, maka Kabupaten Bulukumba menetapkan program pembangunan daerah yang menjadi pendukung kegiatan tersebut sebagai mana pada Tabel sebagai berikut

Tabel IV-13
Dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Terhadap Prioritas Provinsi Tahun 2023

No.	Provinsi Sulawesi Selatan			Kabupaten Bulukumba		Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Impact/ Outcome	Satuan	2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Ssaaran	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas				Target	Pagu	
1	Pemantapan Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Pemantapan reformasi birokrasi (3)	Terwujudnya Pelayanan Prima yang Responsif, Profesional, Transparan dan Akuntabel	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Ketersediaan dokumen LKPJ dan LPPD tepat waktu	%	100	2.906.120.048	Sekretariat Daerah
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Provinsi		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pembangunan	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA, Serta Infrastruktur Dan Kewilayahan	%	100	1.583.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
						Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	93,51	224.290.062.366	BPKPD
							Total Dana Bagi Hasil kab/Kota dan Desa	%	0,62		BPKPD
							Penetapan APBD (Tepat Waktu)	%	Tepat Waktu		BPKPD
							Persentase SILPA terhadap APBD	%	3		BPKPD
							Persentase Belanja Pendidikan (20%)	%	21,4		BPKPD
							Persentase Belanja Kesehatan (10%)	%	19,44		BPKPD
							Opini BPK terhadap Laporan Keuangan		WTP		BPKPD
						Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	11,76	6.919.788.546	BPKPD
						Program Kepegawaian Daerah	Presentase Meningkatnya Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara diatas 90 Lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba	%	45	1.462.471.000	BKPSDM
						Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Presentase Peningkatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional ,pendidikan	%	0,3	3.285.629.604	BKPSDM

No.	Provinsi Sulawesi Selatan			Kabupaten Bulukumba		Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Impact/ Outcome	Satuan	2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas				Target	Pagu	
							dan pelatihan prajabatan (LATSAR), serta pendidikan dan pelatihan teknis lainnya				
						Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Jumlah Temuan BPK	%	100	3.688.105.000	Inspektorat Daerah
							Persentase Pelanggaran Pegawai	%	15		Inspektorat Daerah
						Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Tindak Lanjut Temuan	%	50	1.569.424.000	Inspektorat Daerah
		Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	Indeks Pelayanan Publik		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (SPM)	%	100	417.505.300	Dinas Sosial
							Persentase Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (SPM)	%	100		Dinas Sosial
							Persentase Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM)	%	100		Dinas Sosial
							Persentase Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti (SPM)	%	100		Dinas Sosial
						Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan penerbitan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk	%	100	546.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Program Pencatatan Sipil	Cakupan penerbitan akta kelahiran, cakupan penerbitan akta kematian, rasio pasangan berakta nikah, rasio bayi berakta kelahiran.	%	90	208.950.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Provinsi Sulawesi Selatan			Kabupaten Bulukumba		Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Impact/ Outcome	Satuan	2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas				Target	Pagu		
						Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase perangkat daerah yang menggunkan layanan data pemerintah	%	100	1.316.446.242	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
						Program Aplikasi Informatika	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan	%	100	3.000.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
						Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Pelayanan Perizinan	%	100	282.823.665	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	
						Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Jumlah Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu	%	100	22.163.687	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	
				Peningkatan Kemitraan antar institusi (8)	Meningkatkan Kenyamanan Dan Ketertiban Masyarakat	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM)	%	100	1.170.565.733	BPBD	
				Kesiapsiagaan dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana (7)	Terwujudnya tatananan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman		Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM)	%	100		BPBD	
								Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)	%	100		BPBD
							Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	3.137.899.000	Satpol PP, Damkar, Penyelamatan
								Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100		Satpol PP, Damkar, Penyelamatan
							Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibt dari penegakan hukum Perda dan perkada (SPM)	%	100		Satpol PP, Damkar, Penyelamatan	

No.	Provinsi Sulawesi Selatan			Kabupaten Bulukumba		Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Impact/ Outcome	Satuan	2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas				Target	Pagu	
						Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Kegiatan Pendidikan Politik Masyarakat	%	75	1.570.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Presentase cakupan pengakuan keberadaan MHA , kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	%	100	76.860.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
						Program Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	226.773.750	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Jumlah anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	77	349.980.250	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100	105.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
				Peningkatan kemandirian desa (9)	Meningkatkan Pembangunan Desa di Segala Sektor	Program Penataan Desa	Persentase Jumlah Desa yang memiliki Penataan Wilayah Desa Yang Baik	%	50	45.510.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Meningkatnya Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui pengembangan Kawasan Perdesaan	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Jumlah Desa yang memiliki Penataan Wilayah Desa Yang Baik	%	100	100.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Provinsi Sulawesi Selatan			Kabupaten Bulukumba		Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Impact/ Outcome	Satuan	2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas				Target	Pagu	
						Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah Desa yang memiliki administrasi Pemerintahan Desa yang Baik	%	100	1.536.490.100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	100	254.643.615	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	Penguatan infrastruktur wilayah	Meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah	Indeks Williamson	Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan (2)	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan wilayah yang berkualitas	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentasepanjang talud/ drainase yang baik	%	100	5.745.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah	Indeks Layanan Infrastruktur		Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah		Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1.5 M)	%	100		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Pemenuhan program penyelenggaraan jalan	%	100	99.677.415.119	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenanga kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi		81,7	7.971.045.550	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga pengguna air bersih	%	100	7.196.132.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
							Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (SPM)	%	100		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Program Kawasan Permukiman	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	%	85	16.085.680.628	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
						Program Pengembangan Perumahan	Persentase Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang	%	100	888.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No.	Provinsi Sulawesi Selatan			Kabupaten Bulukumba		Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Impact/ Outcome	Satuan	2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas				Target	Pagu	
							memperoleh rumah layak huni (SPM)				
							Persentase jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	%	100		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
						Program Pengembangan Permukiman	presentase pengembangan permukiman	%	98,00	1.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
							Persentase Pemukiman Yang Tertata	%	74,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Bangunan Ber IMB Per Satuan Bangunan	%	20,44	33.313.779.400	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan	%	88,00	1.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Program Pengelolaan Persampahan	Presentase Sampah Yang Terkelolah	%	100	10.869.546.098	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
						Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Presentase Terjaganya Kelestarian Sumber Daya, Fungsi Kawasan Hutan, Keanekaragaman Hayati (Flora dan Fauna) Serta Rekonstruksi Tata Batas Pada Kawasan Tahura Dikecamatan Bt,Bahari	%	85	1.270.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata	PDRB Perkapita AHB	Peningkatan kualitas sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/kerakyatan (4)	Meningkatkan Potensi Dan Daya Saing Daerah Bidang Pertanian untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase Jumlah Desa Mandiri Pangan Yang Dibina	%	100	600.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
					Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Jumlah Produksi Pertanian	%	75	11.665.274.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

No.	Provinsi Sulawesi Selatan			Kabupaten Bulukumba		Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Impact/ Outcome	Satuan	2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas				Target	Pagu	
							Persentase Pertumbuhan Populasi Ternak Komoditi Unggulan	%	20		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
						Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana sektor pertanian yang tersedia	%	80	7.688.500.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
						Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Sampel Pangan Dengan Mutu Aman	%	45	25.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
						Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Kapasitas Penyuluh	%	19	545.170.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
							Persentase Kelompok Tani yang dibina	%	57		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
						Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Usaha Sektor Peternakan Yang Berizin	%	50	26.289.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Tingkat Kemiskinan		Meningkatkan Potensi Dan Daya Saing Daerah Bidang Perikanan untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kontribusi PDRB sektor perikanan	%	12,2	8.288.500.000	Dinas Perikanan
					Meningkatnya Produksi hasil Perikanan		Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan	%	66,5		Dinas Perikanan
							Produksi Perikanan Tangkap	%	100		Dinas Perikanan
						Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	%	100	1.784.000.000	Dinas Perikanan
							Cakupan Bina Kelompok Perikanan	%	68,5		Dinas Perikanan
						Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Tingkat Konsumsi Ikan	%	93	276.109.528	Dinas Perikanan
					Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Keuangan Daerah	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	85	6.187.640.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
					Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Wisata	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan	%	85	1.350.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

No.	Provinsi Sulawesi Selatan			Kabupaten Bulukumba		Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Impact/ Outcome	Satuan	2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas				Target	Pagu	
					Domestik Dan Mancanegara		nusantara yang datang ke kabupaten/kota				
						Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	1,64	1.037.578.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
					Meningkatkan Kualitas Perdagangan dan Perindustrian Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	100	42.726.300	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
					Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Izin Usaha Simpan Pinjam Yang Ada	%	100	17.921.800	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM
						Program Pemberdayaan UMKM	Persentase UMKM Yang Diberdayakan	%	2,3	1.080.394.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM
						Program Pengembangan UMKM	Persentase peningkatan Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha	%	2,7	590.055.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM
						Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	50	4.760.452.595	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM
						Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	%	7,79	227.744.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM
						Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda Tera Sah yang Berlaku	%	35	187.487.500	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM
4	Penurunan kesenjangan sosial ekonomi	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor unggulan daerah	Tingkat Pengangguran terbuka	Peningkatan kualitas sistem pelayanan kesehatan (5)		Terwujudnya Derajat Kesehatan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Standar (SPM)	%	100	109.141.925.904
		Menurunnya kesenjangan Pendapatan antar lapisan masyarakat	Rasio Gini		Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan		Persentas ibu hamil yang mendapatkan fasilitas pelayanan	%	100		Dinas Kesehatan

No.	Provinsi Sulawesi Selatan			Kabupaten Bulukumba		Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Impact/ Outcome	Satuan	2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas				Target	Pagu	
					Kesehatan Masyarakat		kesehatan (fasyankes) (SPM)				
							Persentas bayi baru lahir umur 0 - 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM)	%	100		Dinas Kesehatan
							Persentas Balita yang berumur 0 - 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	%	100		Dinas Kesehatan
							Persentas anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM)	%	100		Dinas Kesehatan
							Persentas orang berusia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM)	%	100		Dinas Kesehatan
							Persentase orang berusia lebih dari 60 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM)	%	100		Dinas Kesehatan
							Persentas orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM)	%	100		Dinas Kesehatan
							Persentas orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM)	%	100		Dinas Kesehatan
							Persentas orang dengan gangguan Jiwa (ODG) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM)	%	100		Dinas Kesehatan
							Persentas orang terduga Tuberkulosis (TBC) yang mendapatkan	%	100		Dinas Kesehatan

No.	Provinsi Sulawesi Selatan			Kabupaten Bulukumba		Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Impact/ Outcome	Satuan	2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Ssaaran	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas				Target	Pagu	
							pelayanan kesehatan standar (SPM)				
							Persentase orang orang terduga beresiko Terinfeksi virus HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM)	%	100		Dinas Kesehatan
							Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	%	93		Dinas Kesehatan
							Persentase Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	80		Dinas Kesehatan
							Rasio Puskesmas terhadap Jumlah Penduduk		1,5		
							Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk		0,8		
							Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk		0,002		
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar	%	80	4.992.150.013	Dinas Kesehatan
						Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	persentase ketersediaan ALKES Sesuai standar	%	75	592.715.436	Dinas Kesehatan
							Persentase Pemenuhan Kebutuhan Obat dan Bahan Medis Pakai sesuai standar	%	90		
						Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Keluarga Ber PHBS	%	66	331.077.520	Dinas Kesehatan
5	pembangunan Sumber daya manusia	Peningkatan SDM yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter		Pembangunan sumber daya manusia (1)	Terwujudnya Kerukunan Umat Beragama	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Indeks Kerukunan Umat Beragama Dan Kasus Intoleransi Yang Terjadi	%	77,5	150.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Provinsi Sulawesi Selatan			Kabupaten Bulukumba		Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Impact/ Outcome	Satuan	2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas				Target	Pagu					
		Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidikan	Indeks Pendidikan		Meningkatnya Hubungan Masyarakat yang Harmonis Berlandaskan nilai Agama	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Peningkatan Penanganan Konflik Di Daerah	%	15	200.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat			Terwujudnya SDM yang Unggul, dan Berkarakter Kearifan Lokal	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase lembaga keagamaan dan peningkatan kesadaran toleransi beragama.	%	100	2.906.120.048	Sekretariat Daerah				
		Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan			Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM)	%	100	98.211.230.896	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
		Meningkatnya aktualisasi nilai- nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat								Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7 -18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM)	%	100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
										Persentase Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM)	%	100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
										Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah		1:7	250.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
											Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	%	100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		6			Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah	Pertumbuhan ekonomi	Peningkatan produktifitas generasi muda (10)	Meningkatnya Kualitas Generasi Muda Yang Berkarakter dan Berprestasi	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Jumlah Pemuda Inovator	%	100	825.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		Meningkatnya hilirisasi ekonomi sektor unggulan daerah	Produktifitas Total Daerah		Meningkatnya Produktivitas Generasi Muda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat nasional dan internasional	%	100	2.419.940.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga				

No.	Provinsi Sulawesi Selatan			Kabupaten Bulukumba		Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Impact/ Outcome	Satuan	2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas				Target	Pagu	
						Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	100	7.997.076.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
7	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	IKLH	Pelestarian lingkungan hidup (6)	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan wilayah yang berkualitas	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentasepanjang talud/ drainase yang baik	%	100	5.745.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Potensi Penurunan emisi GRK (Juta Ton CO ₂ Eq)		Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah		Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1.5 M)	%	100		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		mitigasi perubahan iklim				Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Pemenuhan program penyelenggaraan jalan	%	100	99.677.415.119	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenanga kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi		81,7	7.971.045.550	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga pengguna air bersih	%	100	7.196.132.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
							Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (SPM)	%	100		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Program Kawasan Permukiman	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	%	85	16.085.680.628	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
						Program Pengembangan Perumahan	Persentase Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	%	100	888.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
							Persentase jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota	%	100		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No.	Provinsi Sulawesi Selatan			Kabupaten Bulukumba		Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Impact/ Outcome	Satuan	2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Ssaaran	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas				Target	Pagu	
							yang memperoleh rumah layak huni (SPM)				
						Program Pengembangan Permukiman	presentase pengembangan permukiman	%	98,00	1.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
							Persentase Pemukiman Yang Tertata	%	74,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Bangunan Ber IMB Per Satuan Bangunan	%	20,44	33.313.779.400	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan	%	88,00	1.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Program Pengelolaan Persampahan	Presentase Sampah Yang Terkelolah	%	100	10.869.546.098	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
						Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Presentase Terjaganya Kelestarian Sumber Daya, Fungsi Kawasan Hutan, Keanekaragaman Hayati (Flora dan Fauna) Serta Rekonstruksi Tata Batas Pada Kawasan Tahura Dikecamatan Bt,Bahari	%	85	1.270.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

4.3.2 Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bulukumba dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

Sebagai dukungan terhadap kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2023, maka Kabupaten Bulukumba menetapkan program pembangunan daerah yang menjadi pendukung kegiatan tersebut sebagai mana pada Tabel sebagai berikut:

Tabel IV-14
Dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Terhadap Prioritas Nasional Tahun 2023

No.	Kode	Program Prioritas Nasional	Indikator	Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Indikator Kinerja Program (outcome)
1	PN1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas Dan Berkeadilan		Pangan	
				Pertanian	
				Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	
				Perdagangan	
				Perikanan	
				Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	PP	Pemenuhan Kebutuhan Energi Dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (Ebt)	Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional* (Persen)		
			Indeks Ketahanan Energi (Indeks)		
	PP	Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Produktivitas air (water productivity) (US\$/m ³)	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenanga kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi
	PP	Peningkatan Ketersediaan, Akses Dan Kualitas Konsumsi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (2.2.2(c))	Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Sampel Pangan Dengan Mutu Aman (persen)
			Angka Kecukupan Energi (AKE) (2.1.2(a)) (kkal/hari)	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan Energi Dan Protein Perkapita (Kkal)
			Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/ kapita/hari)		Ketersediaan Energi Dan Protein Perkapita (Gram)
			Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevelence of Under- nourishment/PoU)	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian (persen)
			Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (Food Insecutiry Experience Scale/FIES)		Persentase Peningkatan Produktifitas Ternak (persen)
				Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian (persen)
					Persentase Prasarana Sektor Peternakan Yang Tersedia (persen)
	PP	Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan Dan Kelautan	Konservasi kawasan kelautan (14.5.1*) (Juta ha)		
			Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (14.4.1*) (%) (Persen)	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kontribusi PRDB sektor perikanan (persen)
					Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan (persen)
					Produksi Perikanan Tangkap (persen)
				Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (persen)
					Cakupan Bina Kelompok Perikanan (persen)
	PP	Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (Umkm), Dan Koperasi	Rasio kewirausahaan nasional (Persen)	Pemberdayaan UMKM	Persentase UMKM Yang Diberdayakan (persen)
			Kontribusi UMKM terhadap PDB (Persen)	Pengembangan UMKM	Persentase peningkatan Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha (persen)
			Kontribusi koperasi terhadap PDB (Persen)		
	PP	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Dan Investasi Di Sektor Riil, Dan Industrialisasi	Pertumbuhan PDB pertanian (Persen)	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (persen)

No.	Kode	Program Prioritas Nasional	Indikator	Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Indikator Kinerja Program (outcome)
			Kontribusi PDB kemaritiman (Persen)	Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Peningkatan Jumlah Pasar Yang Direhabilitasi Dan Peningkatan Perdagangan Barang Dan Jasa (persen)
			Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (9.2.1(a)) (Persen)	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (persen)
			Kontribusi PDB pariwisata (8.9.1*) (Persen)	Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota (persen)
			Nilai tambah ekonomi kreatif (Rp triliun)	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (persen)
			Pertumbuhan investasi (PMTB) (Persen)		
			Penyediaan lapangan kerja per tahun (Juta orang)	Penempatan Tenaga Kerja	Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan (persen)
			Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (8.2.1*) (Persen)	Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi (persen)
			Kontribusi tenaga kerja industri (9.2.2*) (Persen)		
			Jumlah tenaga kerja industri (Juta orang)		
			Jumlah tenaga kerja pariwisata (8.9.2*) (Juta orang)		
			Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif (Juta orang)		
	PP	Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi Dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (Tkdn)	Pertumbuhan ekspor barang dan jasa (Persen)	Pengembangan Ekspor	Persentase Peningkatan Aksesibilitas Terhadap Jaringan Perdagangan Domestik Dan Internasional (Persen)
			Neraca perdagangan barang (USD miliar)		
			Nilai devisa pariwisata (8.9.1(c)) (USD miliar) (USD miliar)		
2	PN2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		Perikanan	
				Pangan	
				Kesehatan	
				Pertanian	
				Pendidikan	
	PP	Pembangunan Wilayah Sulawesi	Laju pertumbuhan PDRB Sulawesi (persen/tahun)	Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Tingkat Konsumsi Ikan (persen)
			Share PDRB Wilayah Sulawesi (persen)	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase Jumlah Desa Mandiri Pangan Yang Dibina (persen)
			IPM Wilayah Sulawesi	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Standar (SPM) (persen)
			Persentase penduduk miskin wilayah Sulawesi (persen)		Persentas ibu hamil yang mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) (SPM) (persen)
					Persentas bayi baru lahir umur 0 - 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM) (persen)
					Persentas Balita yang berumur 0 - 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) (persen)
					Persentas anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM) (persen)

No.	Kode	Program Prioritas Nasional	Indikator	Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Indikator Kinerja Program (outcome)
					Persentas orang berusia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM) (persen)
					Persentas orang berusia lebih dari 60 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM) (persen)
					Persentas orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM) (persen)
					Persentas orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM) (persen)
					Persentas orang orang dengan gangguan Jiwa (ODG) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM) (persen)
					Persentas orang orang terduga Tuberkulosis (TBC) yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM) (persen)
					Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (persen)
					Persentase Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (persen)
					Rasio Puskesmas terhadap Jumlah Penduduk
				Pengelolaan Pendidikan	Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM) (persen)
					Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7 –18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM) (persen)
					Persentase Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM) (persen)
				Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV (persen)
				Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian (persen)
					Persentase Peningkatan Produktifitas Ternak (persen)
				Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian (persen)
					Persentase Prasarana Sektor Peternakan Yang Tersedia (persen)
3	PN3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kesehatan	
				Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
				Sosial	

No.	Kode	Program Prioritas Nasional	Indikator	Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Indikator Kinerja Program (outcome)
				Tenaga Kerja	
				Pendidikan	
				Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
				Kepemudaan dan Olahraga	
				Penanaman Modal	
	PP	Perlindungan Sosial Dan Tata Kelola Kependudukan	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial (%)	Rehabilitasi Sosial	Persentase Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (SPM) (persen)
					Persentase Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (SPM) (persen)
					Persentase Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM) (persen)
					Persentase Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti (SPM) (persen)
			Angka kelahiran total (Total fertility rate/TFR)	Pengendalian Penduduk	Persentase Pembinaan Kebijakan Dan Strategi Pengendalian Penduduk (Penyusunan Grand Design , Penyusunan Profil Kependudukan/Paremeter Dan Proyeksi Penduduk) (persen)
			Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)	Rehabilitasi Sosial	Persentase Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (SPM) (persen)
	PP	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial		Persentase Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (SPM) (persen)
			Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah		Persentase Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM) (persen)
					Persentase Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti (SPM) (persen)
				Pengendalian Penduduk	Persentase Pembinaan Kebijakan Dan Strategi Pengendalian Penduduk (Penyusunan Grand Design , Penyusunan Profil Kependudukan/Paremeter Dan Proyeksi Penduduk) (persen)
	PP	Peningkatan Akses Dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Standar (SPM) (persen)
			Angka kematian bayi (AKB) (per 1000 kelahiran hidup)		Persentas ibu hamil yang mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) (SPM) (persen)
			Angka kematian neonatal (per 1.000 kelahiran hidup)		Persentas bayi baru lahir umur 0 - 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM) (persen)
			Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)		Persentas Balita yang berumur 0 - 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) (persen)

No.	Kode	Program Prioritas Nasional	Indikator	Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Indikator Kinerja Program (outcome)
			Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)		Persentas anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM) (persen)
			Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19) (kelahiran hidup per 1000 perempuan)		Persentas orang berusia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM) (persen)
			Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (persen)		Persentas orang berusia lebih dari 60 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM) (persen)
			Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (persen)		Persentas orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM) (persen)
			Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)		Persentas orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM) (persen)
			Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		Persentas orang dengan gangguan Jiwa (ODG) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM) (persen)
			Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria		Persentas orang terduga Tuberkulosis (TBC) yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM) (persen)
			Insidensi hepatitis B (persen)		Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (persen)
			Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun		Persentase Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (persen)
			Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun (persen)		Rasio Puskesmas terhadap Jumlah Penduduk
			Persentase tekanan darah tinggi		
			Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi		
			Persentase rumah sakit terakreditasi		
	PP	Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	Nilai rata-rata hasil PISA: a. Membaca b. Matematika c. Sains	Pengelolaan Pendidikan	Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM) (persen)
			Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test PISA (Persen): a. Membaca b. Matematika c. Sains		Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7 -18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM) (persen)
			Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Tahun)		Persentase Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM) (persen)
			Harapan Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun Keatas(Tahun)	Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah

No.	Kode	Program Prioritas Nasional	Indikator	Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Indikator Kinerja Program (outcome)
					Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV (persen)
	PP	Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan Dan Pemuda	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (persen)
			Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%)	Perlindungan Khusus Anak	Persentase Jumlah anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten (persen)
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada Belanja Daerah APBD (persen)
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Jumlah Layanan Pembinaan Keluarga (persen)
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Sistem Data Gender / Data Terpilah (persen)
			Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Nilai Capaian Kabupaten/Kota Layak Anak
			Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Jumlah Pemuda Inovator (persen)
				Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat nasional dan internasional (persen)
	PP	Pengentasan Kemiskinan	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki asset produktif (layanan keuangan, modal, lahan, pelatihan)	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Izin Usaha Simpan Pinjam Yang Ada (persen)
			Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanaan usaha	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Diklat Perkoperasian Yang Diadakan (persen)
				Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Peningkatan Volume Usaha dan Modal Usaha Koperasi (persen)
				Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota (persen)
				Promosi Penanaman Modal	Persentase Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (persen)
					PMA (investor)
					PMDN (investor)
				Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Pelayanan Perizinan (persen)
			Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dan dilepaskan untuk TORA (Ha)	Konservasi Sumber Daya Hayati Dan Ekosistemnya	Persentase Konservasi daya hayati dan ekosistem yang terlaksana (persen)
			Bidang tanah yang didistribusikan	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi
			Bidang tanah yang dilegalisasi	Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum
				Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase izin membuka tanah (persen)
	PP	Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing	Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas	Penempatan Tenaga Kerja	Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan (persen)
			Jumlah PT yang Masuk ke dalam World Class University	Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi (persen)

No.	Kode	Program Prioritas Nasional	Indikator	Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Indikator Kinerja Program (outcome)
			a. Top 200		
			b. Top 300		
			c. Top 500		
			Proporsi pekerja berkeahlian menengah dan tinggi (%)	Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). (persen)
4	PN4	Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan		Kesatuan Bangsa dan Politik	
				Komunikasi dan Informatika	
				Sekretariat Daerah	
				Pendidikan	
				Kebudayaan	
	PP	Revolusi Mental Dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa Dan Membentuk Mentalitas Bangsa Yang Maju, Modern, Dan Berkarakter		Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Indeks Kerukunan Umat Beragama Dan Kasus Intoleransi Yang Terjadi (persen)
				Pengelolaan Pendidikan	Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM) (persen)
					Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7 -18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM) (persen)
					Persentase Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM) (persen)
				Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV (persen)
	PP	Meningkatkan Pemajuan Dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter Dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia		Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Peningkatan Penanganan Konflik Di Daerah (persen)
				Pengembangan Kebudayaan	Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi (persen)
				Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase sanggar kesenian yang mendapatkan pelatihan/pembinaan (persen)
	PP	Memperkuat Moderasi Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan Dan Harmoni Sosial	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Kegiatan Pendidikan Politik Masyarakat (persen)
				Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase lembaga keagamaan dan peningkatan kesadaran toleransi beragama. (persen)
	PP	Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi Dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, Dan Berkarakter		Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Kegiatan Pendidikan Politik Masyarakat (persen)

No.	Kode	Program Prioritas Nasional	Indikator	Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Indikator Kinerja Program (outcome)
5	PN5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Perumahan dan Permukiman	
				Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
				Pertanian	
				Perhubungan	
				Komunikasi dan Informatika	
	PP	Infrastruktur Pelayanan Dasar	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan kecukupan luas lantai per kapita (%)	Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani (persen)
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding) (%)		
			Persentase rumah tangga yang memiliki sertifikat hak atas tanah untuk perumahan (%)	Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase izin membuka tanah (persen)
			Rasio outstanding KPR terhadap PDB (%)		
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman (%)	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga pengguna air bersih (persen)
			Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (%)		Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (SPM) (persen)
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik (%)	Pengembangan Perumahan	Persentase Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM) (persen)
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (%)		Persentase jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh rumah layak huni (SPM) (persen)
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman (%)	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi (persen)
			Volume tampungan air per kapita (m3/kapita)	Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum (persen)
			Jumlah Daerah Irigasi yang dimodernisasi	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi
			Luas lahan pertanian padi dan non- padi yang beririgasi meningkat (Hektare)		
			Provinsi dengan penurunan risiko bencana di wilayah risiko bencana		
			Penyediaan air baku untuk kebutuhan air minum, industri, dan kawasan unggulan (m3/detik)		
			Rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan (terhadap informasi dasar 2010) (persen)		
	PP	Infrastruktur Ekonomi	Panjang jalan tol baru yang beroperasi dalam 5 tahun (2.500 km)	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase panjang talud/ drainase yang baik (persen)
			Jumlah pelabuhan utama (hub) yang memenuhi standar (7 pelabuhan)	Penyelenggaraan Jalan	Persentase Pemenuhan program penyelenggaraan jalan (persen)
			Kinerja tepat waktu (on time performance) penerbangan (90%)		

No.	Kode	Program Prioritas Nasional	Indikator	Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Indikator Kinerja Program (outcome)
			Panjang jaringan KA yang beroperasi (7.635 km's)		
	PP	Infrastruktur Perkotaan	Jumlah layanan angkutan umum masal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (Kota)	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian (persen)
					Persentase Prasarana Sektor Peternakan Yang Tersedia (persen)
				Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe C (persen)
	PP	Energi Dan Ketenagalistrikan	Rasio elektrifikasi (%)		
			Pemenuhan Kebutuhan (Konsumsi) Listrik (kWh)		
			Penurunan Emisi CO2 Pembangkit (juta ton)		
	PP	Transformasi Digital	Persentase pertumbuhan sektor TIK (rata-rata)		
			Persentase pengguna internet (Persentase)	Aplikasi Informatika	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi jaringan intra pemerintah atau penggunaan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh dinas kominfo (persen)
			Persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalabar (4G Existing Q2 2019 : 97,59%	Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan data pemerintah (persen)
			Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam (Persentase)		
6	PN6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim		Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Lingkungan Hidup	
	PP	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan (persen)
			Indeks Kualitas Air (IKA)	Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Operasionalisasi TPA/ TPST/ SPA di kabupaten/kota (persen)
			Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Terjaganya Kelestarian Sumber Daya,Fungsi Kawasan Hutan ,Keanekaragaman Hayati (Flora Dan Fauna) Serta Rekonstruksi Tata Batas Pada Kawasan Tahura Dikecamatan Bt,Bahari (persen)
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKTL)	Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah Yang Terkelolah (persen)
	PP	Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim	Persentase potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana (persen)	Penanggulangan Bencana	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM) (persen)
			Persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim (persen)		Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM) (persen)
			Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat (menit)		Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM) (persen)
	PP	Pembangunan Rendah Karbon	Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi (persen)	Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan (persen)

No.	Kode	Program Prioritas Nasional	Indikator	Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Indikator Kinerja Program (outcome)
			Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor lahan (persen)	Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Operasionalisasi TPA/ TPST/ SPA di kabupaten/kota (persen)
			Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor limbah (persen)		
			Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor IPPU (persen)		
			Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor pesisir dan kelautan (persen)		
7	PN7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	
				Sekretariat Daerah	
				Perencanaan	
				Kepegawaian	
				Keuangan	
				Inspektorat Daerah	
				Pendidikan dan Pelatihan	
				Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	PP	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	Indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional	Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (persen)
	PP	Penegakan Hukum Nasional	Indeks Pembangunan Hukum		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (persen)
	PP	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Global Fire Power Index		Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibt dari penegakan hukum Perda dan perkada (SPM) (persen)
			Global Terrorism Index		
			Proporsi orang yang merasa aman berjalan sendirian		
			Indeks Keamanan dan Ketertiban Nasional		
	PP	Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola	Persentase Instansi Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) dengan Indeks RB Baik Keatas*		
			PersentaseInstansi Pemerintah Daerah (Provinsi) dengan Indeks RB Baik Keatas*		
			Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dengan Indeks RB Baik Keatas*	Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Ketersediaan dokumen LKPJ dan LPPD tepat waktu (persen)
				Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA, Serta Infrastruktur Dan Kewilayahan (persen)
				Pengelolaan Keuangan Daerah	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (persen)
					Total Dana Bagi Hasil kab/Kota dan Desa (persen)
					Penetapan APBD (Tepat Waktu) (persen)
					Persentase SILPA terhadap APBD (persen)
					Persentase Belanja Pendidikan (20persen) (persen)

No.	Kode	Program Prioritas Nasional	Indikator	Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Indikator Kinerja Program (outcome)
					Persentase Belanja Kesehatan (10persen) (persen)
					Opini BPK terhadap Laporan Keuangan ()
				Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan (persen)
				Kepegawaian Daerah	Persentase Meningkatnya Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara diatas 90 Lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba (persen)
				Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Peningkatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional ,pendidikan dan pelatihan prajabatan (LATSAR), serta pendidikan dan pelatihan teknis lainnya (persen)
				Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Jumlah Temuan BPK (persen)
					Persentase Pelanggaran Pegawai (persen)
				Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Tindak Lanjut Temuan (persen)
				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (persen)
				Pendaftaran Penduduk	Cakupan penerbitan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk (persen)
				Pencatatan Sipil	Cakupan penerbitan akta kelahiran, cakupan penerbitan akta kematian, rasio pasangan berakta nikah, rasio bayi berakta kelahiran. (persen)

4.4 Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Bulukumba

Ada beberapa gagasan pokok-pokok pikiran DPRD sebagai berikut:

4.4.1 Bidang Pemerintahan

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang telah menjadi konsensus nasional diharapkan mampu mempercepat upaya peningkatan kemakmuran daerah. Dalam perkembangannya, Daerah Kabupaten Bulukumba dengan segenap potensinya diharapkan mampu mengelola berbagai potensi tersebut dengan konsep *Good Governance*. Prinsip transparansi, akuntabilitas dan Profesionalitas harus mampu ditunjukkan secara nyata dalam pembangunan daerah dalam rangka merealisasikan konsep *good governance* tersebut.

Menempatkan desa sebagai pertumbuhan juga sangat penting mengingat desa mempunyai modal pembangunan cukup besar dan kontinyu. Pemerintah Kabupaten Bulukumba tentu saja membutuhkan kajian-kajian baru yang kemudian di implementasikan dengan berbagai kebijakan daerah untuk mengatur beberapa kewenangan-kewenangan yang terbagi menjadi kewenangan pemerintah Kecamatan, dan pemerintah desa.

Penataan SDM dalam pemerintahan, baik Pemerintah daerah dan DPRD secara kelembagaan menjadi penting. Terlebih banyak anggota DPRD yang baru dan menjadi bagian dari mitra kerja pemerintah daerah. Terlebih menyikapi UU pemerintah daerah yang baru, UU pemerintah desa, dan beberapa perubahan UU lainnya membutuhkan banyak peningkatan kapasitas dan pengetahuan DPRD maupun pemerintah daerah.

4.4.2 Bidang Ekonomi dan Keuangan

Urusan bidang ekonomi dan keuangan mempunyai beberapa sub bidang yang terkait dengan program-program peningkatan ekonomi masyarakat dan peningkatan aset daerah. Bidang-bidang dibawah ekonomi disajikan sebagai berikut :

A. Urusan Pariwisata

Visi Pariwisata Kabupaten Bulukumba yang ingin menjadikan Kabupaten Bulukumba sebagai tujuan wisata terkemuka di Sulawesi Selatan tentu saja menjadi tujuan yang tidak mudah diperoleh dengan usaha-usaha yang normatif saja. Kabupaten Bulukumba dengan potensi khas budaya memang telah menjadi fenomena pariwisata nasional yang membedakan dengan daerah lainnya.

Namun dengan segala potensi yang dimiliki Kabupaten Bulukumba, apabila tidak dikelola dengan baik maka bukan tidak mungkin akan ketinggalan dengan daerah yang lain. Sejalan dengan perkembangan industri pariwisata yang semakin kompetitif dan trend pasar yang terus meningkat maka pembangunan pada bidang ini harus di dorong lebih kuat dan di arahkan secara tepat untuk meningkatkan daya saing dalam peta kepariwisataan nasional dan regional.

Beberapa usulan permasalahan yang menjadi usulan prioritas yaitu:

1. Pengembangan sarana dan prasarana pariwisata
2. Pengembangan Promosi Pariwisata, Pembinaan Event Budaya dan Pariwisata
3. Pengembangan Sarana dan Prasarana Keolahragaan

B. Urusan Perikanan dan Kelautan

Beberapa usulan permasalahan yang menjadi usulan prioritas perikanan dan kelautan adalah:

1. Pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap
2. Pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya

C. Urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan

Seperti kita ketahui sektor pertanian saat ini masih menjadi tumpuan hidup masyarakat Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Bulukumba pada khususnya. Sektor pertanian sebagai penghasil dari kebutuhan pangan masyarakat menjadi vital untuk mendapatkan perhatian dan prioritas.

Sektor pertanian menyimpan masalah yang serius di masa depan apabila tidak mendapatkan respon yang memadai. Fenomena klasik yang sering mengemuka seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk adalah semakin meningkatnya kebutuhan permukiman. Hal ini menyimpan problem sosial yang sangat dilematis, dimana lahan-lahan

pertanian yang sebelumnya Hijau dan subur menjadi kawasan permukiman yang pada akhirnya menghilangkan fungsi awal sebagai lahan produktif.

Dalam menyikapi kebutuhan pangan di Kabupaten Bulukumba yang semakin besar pada tahun-tahun mendatang ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk dan industri perhotelan yang pesat menjadikan komoditas-komoditas primer dan unggulan di Kabupaten Bulukumba untuk ditingkatkan. Produksi hasil pertanian perlu dijaga dan mendapat perhatian yang cukup sehingga diharapkan di Kabupaten Bulukumba memiliki ketahanan pangan yang baik.

Hal ini penting dilakukan untuk memenuhi kebutuhan di Kabupaten Bulukumba ini. Usulan permasalahan yang menjadi usulan prioritas bidang pertanian dan ketahanan pangan adalah:

1. Pengembangan Sarana Pertanian/Peternakan
2. Pengembangan Prasarana Pertanian/Peternakan
3. Pengembangan Keamanan Pangan
4. Peningkatan pengawasan jejaring keamanan pangan

D. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Peran koperasi sebagai soko guru perekonomian dan usaha kecil menengah sebagai denyut nadi perekonomian di Kabupaten Bulukumba selayaknya mendapatkan perhatian yang kuat dan luas.

Oleh karena itu, diperlukan pendampingan yang bersifat berkesinambungan agar koperasi dapat kembali tumbuh subur di Kabupaten Bulukumba ini. Salah satu langkah yang dapat dilakukan yaitu pendampingan pra koperasi, koperasi pemula dan koperasi mantap dengan sistem manajemen yang berbeda sehingga mereka bisa naik tingkatan sesuai kemampuannya.

Melalui dominasi UKM tersebut maka perekonomian di daerah kabupaten Bulukumba memiliki ketahanan ekonomi yang cukup baik di mata nasional. Oleh karena itu, pembinaan usaha kecil dan menengah di kabupaten Bulukumba mutlak diperlukan sehingga usaha kecil menengah dapat terus berjalan dan mampu meningkatkan diri.

E. Urusan Penanaman Modal

Kabupaten Bulukumba memiliki potensi harus dikembangkan dengan kerjasama dari segala pihak. Momentum seperti ini mampu memberikan penjelasan dan jaminan kepada investor asing untuk melirik Daerah kabupaten Bulukumba sebagai tempat menanamkan modal, hendaknya mampu dijadikan catatan bahwa Kabupaten Bulukumba memiliki suatu magnet dan potensi yang besar bagi datangnya penanaman modal.

Pemerintah Kabupaten Bulukumba perlu keseriusan dan energi yang lebih untuk mempersiapkan hal ini, untuk mengakselerasi perekonomian daerah sekaligus mengurangi pengangguran secara signifikan di Bulukumba. Pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan dengan membawa lebih besar lagi sumber daya sehingga dapat menyerap tenaga kerja di Kabupaten Bulukumba.

Dalam hal ini upaya peningkatan penanaman modal merupakan cermin dari keterbukaan daerah didalam bermitra dan bekerjasama dengan para investor dalam rangka mengakselerasi kemajuan dan pembangunan daerah.

4.4.3 Bidang Pembangunan

Urusan pekerjaan Umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari SKPD adalah membangun infra struktur public dengan tersedianya infrastruktur jalan yang baik maka hal ini merupakan modal utama untuk mendorong akselerasi kegiatan ekonomi masyarakat dengan kondisi jalan yang yang baik dan mulus maka transportasi public untuk angkutan manusia maupun barang menjadi lancar, akselerasi perekonomian menjadi lebih cepat disamping itu kemudahan untuk menjangkau daerah-daerah tujuan wisata menjadi lebih meningkat sehingga visi untuk menjadi destinasi favorit bagi wisatawan domestik maupun mancanegara bisa terwujud.

Disamping jalan-jalan yang berstatus jalan propinsi tidak kalah urgensinya adalah jalan dan jembatan pedesaan dengan kondisi jalan dan jembatan pedesaan yang memadai maka akan membuka akses ke daerah-daerah yang terisolir, disamping semakin lancarnya

transportasi untuk mengangkut hasil-hasil pertanian bagi warga desa. Perumahan pedesaan yang dihuni oleh keluarga-keluarga miskin pada umumnya merupakan rumah tinggal yang sebenarnya tidak layak huni baik ditinjau dari segi kesehatan maupun keselamatan terhadap terjadinya bencana, oleh sebab itu subsidi atau bantuan untuk mewujudkan rumah tinggal yang layak bagi keluarga miskin harus dilakukan.

Tata kelola air sesuai dengan fungsinya baik air untuk kebutuhan hidup sehari-hari maupun air untuk keperluan usaha pertanian (irigasi) haruslah direncanakan secara komprehensif, ketersediaan air bersih bagi daerah-daerah yang sering terjadi bencana kekeringan harus bisa ditingkatkan dengan program-program pembangunan embung-embung, telaga-telaga maupun dengan pembangunan sumur-sumur bor, disamping pemeliharaan sempadan sungai untuk menanggulangi bencana banjir, dengan membangun tanggul-tanggul maupun crosdam dan sebagainya.

Adapun usulan permasalahan yang menjadi usulan prioritas diantaranya sebagai berikut:

1. Peningkatan Pembangunan Drainase Perkotaan
2. Peningkatan Jalan
3. Optimalisasi jaringan irigasi (PSDA)
4. Peningkatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai
5. Peningkatan sarana dan Prasarana Air Bersih/ Air Minum
6. Pengembangan Sarana dan Prasarana Persampahan
7. Pengembangan dan Penataan Taman Milik Daerah
8. Penataan Tata Kawasan Perkotaan
9. Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
10. Penataan Tata Kawasan Perumahan Tidak Layak Huni
11. Peningkatan Sarana dan Prasarana Penerangan dan Pengaman Jalan

4.4.4 Bidang Kesejahteraan Rakyat

Orientasi urusan sosial harus mewadahi segenap persoalan sosial yang berkembang di masyarakat. Penyandang masalah kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan diharapkan menjadi arah kebijakan yang dibangun pada tahun berjalan. Hal ini penting karena persoalan tersebut merupakan persoalan yang terus ada tiap tahun dan selayaknya ada political will yang lebih jelas, sehingga keberpihakan pemerintah daerah kepada masyarakat lebih nyata dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka.

Urusan kesejahteraan rakyat merupakan gabungan dari beberapa bidang gerak pembangunan. Fungsi dari bidang komisi ini lebih fokus pada kesejahteraan rakyat secara langsung bersentuhan dengan masyarakat. Beberapa usulan permasalahan yang menjadi usulan prioritas dalam bidang komisi ini Adalah :

A. Urusan Pendidikan :

Berikut usulan permasalahan yang menjadi usulan prioritas pendidikan yaitu Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan

B. Urusan Kesehatan, Perempuan dan Anak

Beberapa usulan permasalahan yang menjadi usulan prioritas terkait kesehatan, perempuan dan anak, diantaranya :

1. Pengembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan
2. Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan

C. Urusan Budaya

Beberapa prioritas program budaya, yaitu Permasalahan Terkait Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya

D. Urusan Agama

Terealisasinya landasan kehidupan beragama sebagai nafas kehidupan masyarakat diharapkan mampu menurunkan segenap persoalan sosial yang terjadi di masyarakat. Persoalan sosial yang dimaksud diantaranya adalah persoalan yang mencakup menurunnya pengamalan nilai-nilai ajaran agama sehingga menimbulkan beraneka perilaku masyarakat yang cenderung negatif dan persoalan kerukunan antar umat beragama yang saat ini perlu ditingkatkan lagi sehingga toleransi dan kedamaian dalam

beragama dapat dirasakan di seluruh penjuru atau pelosok desa di daerah kabupaten Bulukumba.

Dalam kondisi yang mengedepankan sikap Budaya Sipaka Tau menekankan adanya sikap gotong royong dan saling bahu membahu di dalam mengisi pembangunan walaupun dalam keyakinan agama yang berbeda. Toleransi yang selama ini dijunjung tinggi oleh masyarakat Kabupaten Bulukumba harus tetap lestari dan berkembang maju sehingga mampu menjadi salah satu ciri khas Bulukumba.

Adapun beberapa prioritas program urusan agama yaitu :

1. Fasilitasi peningkatan kualitas umat beragama
2. Peningkatan keimanan dan ketaqwaan pada Tuhan Yang Maha Esa
3. Peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama.
4. Peningkatan upaya-upaya pencegahan penyimpangan ajaran agama.
5. Peningkatan sarana dan prasarana rumah ibadah dan kegiatan ibadah
6. Peningkatan Kerukunan antar umat beragama
7. Penguatan organisasi keagamaan dalam membangun keberagaman dan toleransi dalam kebhinekaan sebagai ciri khas Kabupaten Bulukumba.

Secara khusus DPRD sebagai representasi masyarakat lembaga kontrol dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah daerah menyampaikan beberapa hal yang penting untuk menjadi atensi khusus pemerintah daerah sebagaimana yang banyak menjadi fokus perhatian masyarakat dewasa ini yakni

1. Perlunya pemerintah daerah untuk secara serius melakukan rekrutmen, seleksi dan penempatan pejabat atau mutas dalam konteks untuk mewujudkan kinerja pemerintah daerah yang lebih optimal sehingga kompetensi menjadi pertimbangan utama selain disiplin dan loyalitas, tentu dengan tetap mengacu kepada aturan dan ketentuan yang ada.
2. Perlunya memperhatikan hal-hal penting terutama pada proses rekrutmen pada lembaga-lembaga pelayanan publik yang tentu sangat bersentuhan dengan ranah masyarakat. Dalam konteks ini kami ingin mengambil contoh pelayanan rumah sakit yang masih banyak disorot berbagai kalangan, baik Ormas, OKP maupun lembaga Kontrol di bidang pelayanan publik.

4.5 Integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals (SDGs)* dengan RKPD Tahun 2021

Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke 70 pada bulan September 2015 di New York, Amerika Serikat, menjadi titik sejarah baru dalam pembangunan global. Sebanyak 193 kepala negara dan pemerintah dunia hadir untuk menyepakati agenda pembangunan universal baru yang tertuang dalam dokumen berjudul *Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development* berisi 17 Tujuan dan 169 Sasaran yang berlaku mulai tahun 2016 hingga tahun 2030.

Indonesia bertekad untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Pasalnya, Indonesia adalah salah satu negara yang turut membidani kelahiran SDGs. Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 menunjukkan komitmen negarawan seluruh elemen bangsa melaksanakan SDGs. "Sesuai peraturan itu, presiden sebagai kepala negara juga memimpin sendiri pelaksanaan SDGs secara inklusif".

SDGs membawa 5 prinsip-prinsip mendasar yang menyeimbangkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, yaitu 1) *People* (manusia), 2) *Planet* (bumi), 3) *Prosperity* (kemakmuran), 4) *Peace* (perdamaian), dan 5) *Partnership* (kerjasama). Kelima prinsip dasar ini dikenal dengan istilah 5 P dan menaungi 17 Tujuan dan 169 Sasaran yang tidak dapat dipisahkan, saling terhubung, dan terintegrasi satu sama lain guna mencapai kehidupan manusia yang lebih baik.

Tujuh belas tujuan SDG's tersebut adalah tanpa kemiskinan; tanpa kelaparan; hidup sehat dan kesejahteraan; kualitas pendidikan; kesetaraan gender; air bersih dan sanitasi layak; pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; industri, inovasi, dan infrastruktur; berkurangnya kesenjangan; kota dan pemukiman yang berkelanjutan; konsumsi dan

produksi yang bertanggung jawab; penanganan perubahan iklim; ekosistem laut; ekosistem darat; perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh; dan, kemitraan untuk mencapai tujuan.

Sejak SDGs disahkan tahun 2015, Pemerintah Daerah (Pemda) Kota/Kabupaten diyakini akan memainkan peran sentral dalam pelaksanaan dan pencapaian SDGs. Dekat dengan warga, memiliki kewenangan dan dana, dapat melakukan beragam inovasi dan ujung tombak penyedia layanan publik serta kebijakan dan program pemerintah, menjadipertimbangan pentingnya peran Pemda. Beragam keunggulan Pemda tersebut harus dapat digunakan sebaik mungkin dalam pelaksanaan dan pencapaian SDGs. Kegagalan MDGs yang tidak mampu mengoptimalkan peran Pemda tidak boleh terulang.

Seluruh Tujuan dan Target SDGs secara langsung maupun tidak, sangat terkait dengan kerja-kerja Pemda Kota dan Kabupaten. Meningkatkan pengetahuan Pemda dan kemudian mengajak untuk melaksanakan SDGs menjadi sebuah tantangan tersendiri. Terlebih untuk negara seperti Indonesia yang memiliki lebih kurang 500 Kota dan Kabupaten, yang masing-masing memiliki situasi yang berbeda baik secara politik, ekonomi dan sosial.

Terdapat beberapa faktor yang akan membuat pelaksanaan SDGs di daerah bisa berjalan dengan baik, yaitu pertama adanya komitmen politik yang kuat di tingkat lokal, kedua adanya birokrasi di tingkat lokal yang mampu menterjemahkan dan mengoperasionalkan SDGs dan ketiga adanya kelompok masyarakat sipil kuat di tingkat lokal.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals (SDGs)* merupakan komitmen internasional untuk meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, TPB menjadi salah satu acuan dalam pembangunan daerah Kabupaten Bulukumba. RKPD Bulukumba Tahun 2023 telah mengarusutamakan pencapaian TPB dalam bentuk rumusan kebijakan, program, kegiatan dan indikator yang terukur. Integrasi TPB dalam Program Prioritas RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2023, sebagaimana pada Tabel IV – 5 berikut:

Tabel IV-15
Matriks Integrasi TPB/SDGs Terhadap Program Prioritas RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2023

No	Pembangunan Daerah	Instansi Pelaksana
	Program/Kegiatan	
	TUJUAN 1 : Tanpa Kemiskinan : Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun	
	INDIKATOR TUJUAN 1. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	
1	Program 1 : Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
2	Program 2 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
3	Program 3 : Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Dikbud
4	Program 4 : Program Perekonomian Dan Pembangunan	Bagian Ekonomi Pembangunan, Setda
5	Program 5 : Program Pengembangan Perumahan	DPPP
6	Program 6 : Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	DPMD
7	Program 7 : Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Dinas Pertanian dan Ketapan
8	Program 8 : Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketapan
9	Program 9 : Program Perlindungan Perempuan	Dinas DPPKBP3A
10	Program 10: Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
11	Program 11: ProgramPemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Dinas Perdagangan, Perdagangan, Koperasi dan UKM
12	Program 12 : Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	DPK
13	Program 13 : ProgramPenyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DPK
14	Program 14 : Program Perizinan Usaha Pertanian	DPK
15	Program 15 : Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
16	Program 16 : Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas PUTR
17	Program 17 : Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perdagangan, Perdagangan, Koperasi dan UKM
	Indikator SDGs: 1.3.1.(A) Proporsi Peserta Jaminan Kesehatan Melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Dinas Kesehatan
18	Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs: 1.3.1.(B) Proporsi Peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	
19	Program 1 : Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas PMPTSP & Tenaga Kerja
	Indikator SDGs: 1.3.1.(C) Persentase Penyandang Disabilitas Yang Miskin Dan Rentan Yang Terpenuhi Hak Dasarnya Dan Inklusivitas.	Dinas Sosial, Dinas Kesehatan
20	Program 1 : Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
	Indikator SDGs: 1.3.1.(D) Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Dinas Sosial
21	Program 1 : Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
	Indikator SDGs: 1.4.1.(B) Persentase Anak Umur 12-23 Bulan Yang Menerima Imunisasi Dasar Lengkap	Dinas Kesehatan
22	Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan

No	Pembangunan Daerah	Instansi Pelaksana
	Program/Kegiatan	
	Indikator Sdgs: 1.4.1.(C) Prevalensi Penggunaan Metode Kontrasepsi (Cpr) Semua Cara Pada Pasangan Usia Subur (Pus) Usia 15-49 Tahun Yang Berstatus Kawin.	DPPKBP3A
23	Program 1 : Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	DPPKBP3A
	Indikator SDGs: 1.4.1.(D) Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak Dan Berkelanjutan.	DPPP
24	Program 1 : Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPPP
25	Program 1 : Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPPP
	Indikator SDGs: 1.4.1.(E) Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak Dan Berkelanjutan.	DPPP
26	Program 1 : Program Pengembangan Permukiman	DPPP
	Indikator SDGs: 1.4.1.(F) Persentase Rumah Tangga Kumuh Perkotaan	DPPP
27	Program 1 : Program Pengembangan Permukiman	DPPP
	Indikator SDGs: 1.4.1.(I) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI – SMP/MTs Sederajat.	Dinas Dikbud
28	Program 1 : Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Dikbud
	Indikator SDGs: 1.4.1.(J) Persentase Penduduk Umur 0-17 Tahun dengan Kepemilikan Akta Kelahiran.	Disdukcapil
29	Program 1 : Program Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil
30	Program 2 : Program Pencatatan Sipil	Disdukcapil
	Indikator SDGs: 1.5.1* Jumlah Korban Meninggal, dan Terkena Dampak Bencana Per 100.000 Orang.	BPBD
31	Program 1 : Program Penanggulangan Bencana	BPBD
	Indikator SDGs: 1.5.1.(A) Jumlah Lokasi Penguatan Pengurangan Risiko Bencana Daerah	BPBD
32	Program 1 : Program Penanggulangan Bencana	BPBD
	Indikator SDGs: 1.5.1.(B) Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Sosial	BPBD, Dinas Sosial
33	Program 1 : Program Rehabilitasi Sosial	BPBD, Dinas Sosial
	Indikator SDGs: 1.5.1.(C) Pendampingan Psikososial Korban Bencana Sosial	Dinas Sosial
34	Program 1 : Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
	Indikator SDGs: 1.5.1.(E) Indeks Risiko Bencana pada Pusat-Pusat Pertumbuhan yang Berisiko Tinggi.	BPBD
35	Program 1 : Program Penanggulangan Bencana	BPBD
	Indikator SDGs: 1.5.2.(A) Jumlah Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana.	BPBD
36	Program 1 : Program Penanggulangan Bencana	BPBD
	Indikator SDGs: 1.5.3* Dokumen Strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Tingkat Nasional dan Daerah.	BPBD
37	Program 1 : Program Penanggulangan Bencana	BPBD
	Indikator SDGs: 1.A.1* Proporsi Sumber Daya yang Dialokasikan oleh Pemerintah Secara Langsung Untuk Program Pemberantasan Kemiskinan.	Bappelitbangda, BPKPD
38	Program 1 : Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
39	Program 1 : Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
40	Program 1 : Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	TUJUAN 2 : Tanpa Kelaparan : Mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan	
	INDIKATOR TUJUAN 2. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	

No	Pembangunan Daerah	Instansi Pelaksana
	Program/Kegiatan	
	Indikator SDGs: 2.1.1.(A) Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) pada Anak Balita	Dinkes, Dinas Dikbud, Dinas Pertanian dan Ketapan, Dinas Sosial, Disdukcapil, Diskominfo, Kanwil Agama, BPOM
41	Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
42	Program 2 : Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Dikbud
43	Program 3 : Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappelitbangda
44	Program 4 : Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Dinas Pertanian dan Ketapan
	Indikator SDGs: 2.1.2.* Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat, Berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Dinas Pertanian dan Ketapan
45	Program 1 : Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Pertanian dan Ketapan
	Indikator SDGs: 2.1.2.(A) Proporsi Penduduk dengan Asupan Kalori Minimum Di Bawah 1400 Kkal/Kapita/Hari.	Dinas Pertanian dan Ketapan
46	Program 1 : Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Dinas Pertanian dan Ketapan
	Indikator SDGs: 2.2.1 Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) pada Anak di Bawah Lima Tahun/Balita.	Dinas Pertanian dan Ketapan
47	Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
48	Program 2 : Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Dinas Pertanian dan Ketapan
	Indikator SDGs: 2.2.1.(A) Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) pada Anak Di Bawah Dua Tahun/Baduta.	Dinkes, Dinas Dikbud, Dinas Ketapan, Dinas Sosial, Disdukcapil, Diskominfo, Dinas Perkimtan, Bagian Kesra, Kanwil Agama, BPOM, Bappelitbangda
49	Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
50	Program 2 : Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Dikbud
51	Program 3 : Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Pertanian dan Ketapan
52	Program 4 : Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Dinas Pertanian dan Ketapan
	Indikator SDGs: 2.2.2.* Prevalensi Malnutrisi (Berat Badan/Tinggi Badan) Anak pada Usia Kurang dari 5 Tahun, Berdasarkan Tipe.	Dinas Kesehatan, Dinas Dikbud, Dinas Ketapan, Dinas Sosial, Disdukcapil, Diskominfo, Dinas Perkimtan, Bagian Kesra, Kanwil Agama, BPOM, Bappelitbangda
53	Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
54	Program 2 : Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs: 2.2.2.(A) Prevalensi Anemia pada Ibu Hamil.	Dinas Kesehatan, Dinas Dikbud, Dinas Pertanian dan Ketapan, Dinas Sosial, Disdukcapil, Diskominfo, Dinas Perkimtan, Biro

No	Pembangunan Daerah	Instansi Pelaksana
	Program/Kegiatan	
		Kesra, Kanwil Agama, BPOM, Bappelitbangda
55	Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs: 2.2.2.(B) Persentase Bayi Usia Kurang Dari 6 Bulan yang Mendapatkan ASI Eksklusif.	Dinas Kesehatan
56	Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
	TUJUAN 3 : Kehidupan Sehat Dan Sejahtera : Menjamin Kehidupan Yang Sehat Dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Di Semua Usia	
	INDIKATOR TUJUAN 3 : Proporsi Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun Yang Proses Melahirkan Terakhirnya Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih	
	<i>3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI).</i>	
	<i>3.1.2.(A) Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun Yang Proses Melahirkan Terakhirnya Di Fasilitas Kesehatan</i>	
	<i>3.2.1* Angka Kematian Balita (Akba) Per 1000 Kelahiran Hidup.</i>	Dinas Kesehatan
	<i>3.2.2*Angka Kematian Neonatal (AKN) Per 1000 Kelahiran Hidup.</i>	Dinas Kesehatan
	<i>3.2.2.(A) Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup.</i>	Dinas Kesehatan
	<i>3.2.2.(B) Persentase Kabupaten/Kota Yang Mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi.</i>	Dinas Kesehatan
57	Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs: 3.3.3* Kejadian Malaria Per 1000 Orang	Dinas Kesehatan, Bagian Kesra
	<i>3.3.1.(A) Prevalensi Hiv Pada Populasi Dewasa.</i>	
	<i>3.3.2.(A) Insiden Tuberkulosis (Itb) Per 100.000 Penduduk.</i>	
	<i>3.3.3.(A) Jumlah Kabupaten/Kota Yang Mencapai Eliminasi Malaria</i>	
	<i>3.3.4.(A) Persentase Kabupaten/Kota Yang Melakukan Deteksi Dini Untuk Infeksi Hepatitis B.</i>	
	<i>3.3.5* Jumlah Orang Yang Memerlukan Intervensi Terhadap Penyakit Tropis Yang Terabaikan (Filariasis Dan Kusta).</i>	
	<i>3.3.5.(A) Jumlah Kab/ Kota Dengan Eliminasi Kusta</i>	
	<i>3.3.5.(B) Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Eliminasi Filariasis (Berhasil Lolos Dalam Survei Penilaian Transmisi Tahap I).</i>	
58	Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs: 3.4.1.(A) Persentase Merokok Pada Penduduk Umur ≤18 Tahun.	Dinas Kesehatan
59	Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
60	Program 2 : Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs: 3.4.1.(B) Prevalensi Tekanan Darah Tinggi.	Dinas Kesehatan
61	Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
62	Program 2 : Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs: 3.4.1.(C) Prevalensi Obesitas Pada Penduduk Umur ≥18 Tahun	Dinas Kesehatan
63	Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
64	Program 2 : Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs: 3.4.2* Angka Kematian (Insidens Rate) Akibat Bunuh Diri	Dinas Kesehatan
65	Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan

No	Pembangunan Daerah	Instansi Pelaksana
	Program/Kegiatan	
66	Indikator SDGs: 3.4.2.(A) Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki Puskesmas yang Menyelenggarakan Upaya Kesehatan Jiwa	Dinas Kesehatan
	Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
67	Indikator SDGs: 3.5.1.(E) Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba	Dinas Kesehatan & Biro Kesra
	3.5.2* <i>Konsumsi Alkohol (Liter Per Kapita) Oleh Penduduk Umur ≥ 15 Tahun Dalam Satu Tahun Terakhir.</i>	Dinas Kesehatan, Biro Kesra
	Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
	3.7.1.(A) <i>Angka Prevalensi Penggunaan Metode Kontrasepsi (CPR) Semua Cara Pada Pasangan Usia Subur (PUS) Usia 15-49 Tahun Yang Berstatus Kawin.</i>	Dinas Kesehatan, DPPKBP3A
68	3.7.1.(B) <i>Angka Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Cara Modern.</i>	
	3.7.2* <i>Angka Kelahiran Pada Perempuan Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)</i>	
	3.7.2.(A) <i>Total Fertility Rate (TFR)</i>	
	Program 1 : Program Keluarga Berencana	
	Indikator SDGs: 3.8.2* Jumlah Penduduk Yang Dicakup Asuransi Kesehatan atau Sistem Kesehatan Masyarakat Per 1000 Penduduk	Dinas Kesehatan, Disdukcapil
69	Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan,
	Indikator SDGs: 3.8.2.(A) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn).	Dinas Kesehatan
70	Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan,
	Indikator SDGs: 3.A.1* Persentase Merokok Pada Penduduk Umur ≥15 Tahun	Dinas Kesehatan
71	Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan,
	Program 2 : Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan,
72	Indikator SDGs: 3.B.1.(A) Persentase Ketersediaan Obat Dan Vaksin Di Puskesmas	Dinas Kesehatan
	Program 1 : Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan,
73	Indikator SDGs: 3.C.1* Rasio Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Program 1 : Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan,
74	TUJUAN 4 : Pendidikan Berkualitas : Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Untuk Semua;	
	INDIKATOR TUJUAN 4. Persentase SD/MI-SMP/MTs Berakreditasi Minimal B	
75	Program 1 : Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Dikbud
	Indikator SDGs: 4.1.1.(d/e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI – SMP/MTs Sederajat	Dinas Dikbud
	Indikator SDGs: 4.1.1.(G) Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Umur ≥15 Tahun.	
76	Indikator SDGs: 4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-Laki Di (1) Sd/Mi/Sederajat; (2) Smp/Mts/Sederajat; (3) Sma/Smk/Ma/Sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Perempuan/Laki-Laki Di (4) Perguruan Tinggi.	
	Program 1 : Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Dikbud
77	Indikator SDGs: 4.6.1.(A) Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur ≥15 Tahun	Dinas Dikbud
	Indikator SDGs: 4.6.1.(B) Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur 15-24 Tahun dan Umur 15-59 Tahun	Dinas Dikbud
77	Program 1 : Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Dikbud

No	Pembangunan Daerah	Instansi Pelaksana
	Program/Kegiatan	
	Indikator SDGs: 4.A.1* Proporsi Sekolah Dengan Akses Ke: (A) Listrik (B) Internet Untuk Tujuan Pengajaran, (C) Komputer Untuk Tujuan Pengajaran, (D) Infrastruktur Dan Materi Memadai Bagi Siswa Disabilitas, (E) Air Minum Layak, (F) Fasilitas Sanitasi Dasar Per Jenis Kelamin, (G) Fasilitas Cuci Tangan (Terdiri Air, Sanitasi, Dan Higienis Bagi Semua (Wash)).	Dinas Dikbud
78	Program 1 : Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Dikbud, Dinas Kesehatan
79	Program 2 : Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Dikbud, DPPKBP3A
80	Program 3 : Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPPP
81	Program 4 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs: 4.C.1* Persentase Guru TK, SS, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang Bersertifikat Pendidik	Dinas Dikbud
82	Program 1 : Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Dikbud
	TUJUAN 5 : Kesetaraan Gender : Mencapai Kesetaraan Gender Dan Memberdayakan Kaum Perempuan;	
	INDIKATOR TUJUAN 5 Jumlah Kebijakan Yang Responsif Gender Mendukung Pemberdayaan Perempuan	
83	Program 1 : Program Perlindungan Perempuan	Dinas DPPKBP3A
84	Program 2 : Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas DPPKBP3A
	Indikator SDGs: 5.2.1* Proporsi Perempuan Dewasa Dan Anak Perempuan (Umur 15-64 Tahun) Mengalami Kekerasan (Fisik, Seksual, Atau Emosional) oleh Pasangan atau Mantan Pasangan Dalam 12 Bulan Terakhir	Dinas DPPKBP3A
85	Program 1 : Program Perlindungan Perempuan	Dinas DPPKBP3A
86	Program 2 : Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas DPPKBP3A
	Indikator SdDGs: 5.2.1.(A) Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak Perempuan	Dinas DPPKBP3A
87	Program 1 : Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas DPPKBP3A
	Indikator SDGs: 5.2.2.(A) Persentase Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Mendapat Layanan Komprehensif	Dinas DPPKBP3A
88	Program 1 : Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas DPPKBP3A
	Indikator SDGs: 5.2.2* Proporsi Perempuan Dewasa Dan Anak Perempuan (Umur 15-64 Tahun) Mengalami Kekerasan Seksual Oleh Orang Lain Selain Pasangan Dalam 12 Bulan Terakhir	Dinas DPPKBP3A
89	Program 1 : Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas DPPKBP3A
	Indikator SDGs: 5.3.1* Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 15 Tahun Dan Sebelum Umur 18 Tahun	Dinas DPPKBP3A
90	Program 1 : Program Perlindungan Perempuan	Dinas DPPKBP3A
91	Program 2 : Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas DPPKBP3A
	Indikator SDGs: 5.3.1.(C) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI-SMP/MTs Sederajat	Dinas Dikbud
92	Program 1 : Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Dikbud
	Indikator SDGs: 5.5.1* Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan Di Parlemen Tingkat Pusat, Parlemen Daerah Dan Pemerintah Daerah	Dinas DPPKBP3A
93	Program 1 : Program Perlindungan Perempuan	Dinas DPPKBP3A
	Indikator SDGs: 5.5.2* Proporsi Perempuan Yang Berada Di Posisi Manajerial	Dinas DPPKBP3A
94	Program 1 : Program Perlindungan Perempuan	Dinas DPPKBP3A
	Indikator SDGs: 5.6.1.(A) Unmet Need Kbb (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak Terpenuhi).	DPPKBP3A
95	Program 1 : Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	DPPKBP3A

No	Pembangunan Daerah	Instansi Pelaksana
	Program/Kegiatan	
	Indikator SDGs: 5.6.1.(B) Pengetahuan Dan Pemahaman Pasangan Usia Subur (Pus) Tentang Metode Kontrasepsi Modern	Disdukcapil, DPPKBP3A
96	Program 1 : Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas DPPKBP3A
	Indikator SDGs: 5.B.1* Proporsi Individu Yang Menguasai/Memiliki Telepon Genggam.	Diskominfo, Persandian
97	Program 1 : Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Diskominfo, Persandian
	TUJUAN 6 : Air Bersih Dan Sanitasi Layak : Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih Dan Sanitasi Yang Berkelanjutan Untuk Semua	
	INDIKATOR TUJUAN 6. Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak	
98	Program 1 : Program Pengembangan Perumahan	DPPP
99	Program 2 : Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPPP
100	Program 3 : Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPPP
	Indikator SDGs: 6.1.1.(B) Kapasitas Prasarana Air Baku Untuk Melayani Rumah Tangga, Perkotaan dan Industri, Serta Penyediaan Air Baku untuk Pulau-Pulau.	DPPP, Dinas PUTR, Dinkes
101	Program 1 : Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas PUTR
102	Program 2 : Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPPP, Dinkes
103	Program 3 : Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
	Indikator SDGs: 6.1.1.(C) Proporsi Populasi Yang Memiliki Akses Layanan Sumber Air Minum Amandan Berkelanjutan	DPPP, Dinkes
104	Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DPPP, Dinkes
105	Program 2 : Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPPP, Dinkes
106	Program 3 : Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
	Indikator SDGs: 6.2.1.(A) Proporsi Populasi Yang Memiliki Fasilitas Cuci Tangan Dengan Sabun dan Air	DPPP, Dinkes
107	Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DPPP, Dinkes
	Indikator SDGs: 6.2.1.(C) Jumlah Desa/Kelurahan Yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	DPPP, Dinkes
108	Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DPPP, Dinkes
	Indikator SDGs: 6.2.1.(D) Jumlah Desa/Kelurahan Yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	DPPP, Dinkes
109	Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DPPP, Dinkes
	Indikator SdGs: 6.3.2.(B) Kualitas Air Sungai Sebagai Sumber Air Baku	DLHK
110	Program 1 : Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLHK
	Indikator SDGs: 6.5.1.(C) Jumlah Jaringan Informasi Sumber Daya Air Yang Dibentuk.	DLHK, Dinas PUTR
111	Program 1 : Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	DLHK, Dinas PUTR
112	Program 2 : Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas PUTR
113	Program 3 : Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	DLHK
	Indikator Sdgs: 6.5.1.(G) Kegiatan Penataan Kelembagaan Sumber Daya Air.	Dinas PUTR
114	Program 1 : Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas PUTR
	Indikator Sdgs: 6.6.1.(D) Luas Lahan Kritis Dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (Kph) Yang Direhabilitasi.	DLHK
115	Program 1 : Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	DLHK

No	Pembangunan Daerah	Instansi Pelaksana
	Program/Kegiatan	
	TUJUAN 8 : Pekerjaan Layak Dan Pertumbuhan Ekonomi : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan Kesempatan Kerja Yang Produktif Dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan Yang Layak Untuk Semua	
	INDIKATOR TUJUAN 8 : Pertumbuhan PDRB	Bagian Ekonomi pembangunan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Disnaker dan BPS
	INDIKATOR TUJUAN 8. PDRB Per Kapita	
116	Program 1 : Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perdagangan, Perdagangan, Koperasi dan UKM
	Indikator Sdgs: 8.3.1* Proporsi Lapangan Kerja Informal Sektor Non-Pertanian, Berdasarkan Jenis Kelamin.	Dinas PMPTSP & Tenaga Kerja
	Indikator Sdgs: 8.3.1.(A) Persentase Tenaga Kerja Formal.	Dinas PMPTSP & Tenaga Kerja
	Indikator Sdgs: 8.3.1.(B) Persentase Tenaga Kerja Informal Sektor Pertanian.	Dinas PMPTSP & Tenaga Kerja
117	Program 1 : Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas PMPTSP & Tenaga Kerja
	Indikator Sdgs: 8.5.2* Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Kelompok Umur	Dinas PMPTSP & Tenaga Kerja
	Indikator Sdgs: 8.5.2.(A) Persentase Setengah Pengangguran	Dinas PMPTSP & Tenaga Kerja
118	Program 1 : Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas PMPTSP & Tenaga Kerja
	Indikator Sdgs: 8.9.1* Proporsi Kontribusi Pariwisata Terhadap Pdrb	Dinas Pariwisata, Pora
119	Program 1 : Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata, Pora
	TUJUAN 9 : Industri, Inovasi Dan Infrastruktur : Membangun Infrastruktur Yang Tangguh, Meningkatkan Industri Kreatif Dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi;	
	INDIKATOR TUJUAN 9. Panjang Pembangunan Jalan Tol	
	Indikator Sdgs: 9.1.1.(C) Panjang Jalur Kereta Api	Dishub
120	Program 1 : Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dishub
	Indikator Sdgs: 9.1.2.(B) Jumlah Dermaga Penyeberangan	Dishub
121	Program 1 : Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dishub
	Indikator SDGs: 9.1.2.(C) Jumlah Pelabuhan Strategis	Dishub
122	Program 1 : Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dishub
	Indikator SDGs: 9.2.1* Proporsi Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur Terhadap Pdb Dan Per Kapita	Dinas Perdagangan, Perdagangan, Koperasi dan UKM
	Indikator Sdgs: 9.4.1* Rasio Emisi Co2/Emisi Gas Rumah Kaca Dengan Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur	DLHK
	Indikator Sdgs: 9.4.1(A) Persentase Perubahan Emisi Co2/Emisi Gas Rumah Kaca	DLHK
123	Program 1 : Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLHK
	Indikator Sdgs: 9.5.1* Proporsi Anggaran Riset Pemerintah Terhadap PDB	DLHK
	INDIKATOR TUJUAN 9 : Industri, Inovasi Dan Infrastruktur	
124	Program 1 : Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Bappelitbangda
	Indikator Sdgs: 9.C.1.(A) Proporsi Individu Yang Menguasai/Memiliki Telepon Genggam	Diskominfo, Persandian
125	Program 1 : Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Diskominfo, Persandian

No	Pembangunan Daerah	Instansi Pelaksana
	Program/Kegiatan	
	Indikator Sdgs: 9.C.1.(B) Proporsi Individu Yang Menggunakan Internet	Diskominfo, Persandian
126	Program 1 : Program Aplikasi Informatika	Diskominfo, Persandian
	TUJUAN 10 : Berkurangnya Kesenjangan : Mengurangi Kesenjangan Intra Dan Antar Negara;	
	INDIKATOR TUJUAN 10. Indeks Gini	
	Indikator Sdgs: 10.1.1.(B) Jumlah Daerah Tertinggal Yang Terentaskan.	DPMD
127	Program 1 : Program Administrasi Pemerintahan Desa	DPMD
128	Program 2 : Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	DPMD
129	Program 3 : Program Pengembangan Perumahan	DPPP
130	Program 4 : Program Pengembangan Permukiman	DPPP
131	Program 5 : Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPPP
132	Program 6 : Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPPP
133	Program 7 : Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Dikbud
134	Program 8: Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
	Indikator SDGs: 10.4.1.(B) Proporsi Peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Dinas PMPTSP & Tenaga Kerja
135	Program 1 : Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas PMPTSP & Tenaga Kerja
	TUJUAN 11 : Kota Dan Pemukiman Yang Berkelanjutan	
	INDIKATOR TUJUAN 11. Jumlah Kawasan Perkotaan Metropolitan Yang Terpenuhi Standar Pelayanan Perkotaan (SPP).	
	Indikator SDGs: 11.2(A) Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum Di Perkotaan.	Dishub
136	Program 1 : Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dishub
	Indikator SDGs: 11.3.2.(B) Jumlah Lembaga Pembiayaan Infrastruktur.	Dinas PUTR, DPPP
137	Program 1 : Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas PUTR
	Indikator Sdgs: 11.4.1.(A) Jumlah Kota Pusaka Di Kawasan Perkotaan Metropolitan, Kota Besar, Kota Sedang Dan Kota Kecil.	Dinas Pariwisata
138	Program 1 : Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas PUTR
	Indikator Sdgs: 11.5.1* Jumlah Korban Meninggal, Hilang Dan Terkena Dampak Bencana Per 100.000 Orang.	BPBD
139	Program 1 : Program Penanggulangan Bencana	BPBD
140	Program 2 : Program Penanggulangan Bencana	BPBD
	Indikator Sdgs: 11.5.1.(A) Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	BPBD
141	Program 1 : Program Penanggulangan Bencana	BPBD
142	Program 2 : Program Penanggulangan Bencana	BPBD
	Indikator SDGs: 11.5.1.(C) Jumlah Sistem Peringatan Dini Cuaca Dan Iklim Serta Kebencanaan.	BPBD
143	Program 1 : Program Penanggulangan Bencana	BPBD
	Indikator SDGs: 11.5.2.(A) Jumlah Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana	BPBD
144	Program 1 : Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	
	Indikator SDGs: 11.B.2* Dokumen Strategi Pengurangan Risiko Bencana (Prb) Tingkat Daerah.	BPBD
145	Program 1 : Program Penanggulangan Bencana	BPBD
	Indikator SDGs: 11.6.1.(A) Persentase Sampah Perkotaan Yang Tertangani.	DLHK, DPPP

No	Pembangunan Daerah	Instansi Pelaksana
	Program/Kegiatan	
146	Program 1 : Program Pengelolaan Persampahan	DLHK, DPPP
	Indikator SDGs: 11.6.1.(B) Jumlah Kota Hijau Yang Mengembangkan Dan Menerapkan Green Waste Di Kawasan Perkotaan Metropolitan.	DLHK
147	Program 1 : Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLHK
	Indikator SDGs: 11.7.1.(A) Jumlah Kota Hijau Yang Menyediakan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan Metropolitan Dan Kota Sedang	DLHK
148	Program 1 : Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	DLHK
	TUJUAN 12 : Konsumsi Dan Produksi Yang Bertanggung Jawab	
	INDIKATOR TUJUAN 12. Umlah Limbah B3 Yang Terkelola Dan Proporsi Limbah B3 Yang Diolah Sesuai Peraturan Perundangan (Sektor Industri)	
149	Program 1 : Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLHK
	Indikator SDGs: 12.6.1.(A) Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan Sertifikasi SNI ISO 14001	DLHK, Dinas Perdagangan, Perdagangan, Koperasi dan UKM
150	Program 1 : Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLHK
	Indikator SDGs: 12.7.1.(A) Jumlah Produk Ramah Lingkungan Yang Teregister	DLHK
151	Program 1 : Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLHK
	TUJUAN 13 : Penanganan Perubahan Iklim : Mengambil Tindakan Cepat Untuk Mengatasi Perubahan Iklim Dan Dampaknya	
	INDIKATOR TUJUAN 13. Dokumen Strategi Pengurangan Risiko Bencana (Prb) Tingkat Nasional Dan Daerah.	
152	Program 1 : Program Penanggulangan Bencana	BPBD
	Indikator SDGs: 13.1.2* Jumlah Korban Meninggal, Hilang Dan Terkena Dampak Bencana Per 100.000 Orang.	BPBD
153	Program 1 : Program Penanggulangan Bencana	BPBD
	Indikator SDGs: 13.2.1.(A) Dokumen Pelaporan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK).	Bappelitbangda (KLHS)
154	Program 1 : Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLHK
155	Program 2 : Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	DLHK
	TUJUAN 14 : Ekosistem Lautan : Melestarikan Dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan Dan Samudera Untuk Pembangunan Berkelanjutan	
	INDIKATOR TUJUAN 14. Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha	
156	Program 1 : Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
157	Program 2 : Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
	Indikator SDGs: 14.B.1* Ketersediaan Kerangka Hukum/ Regulasi/ Kebijakan/ Kelembagaan Yang Mengakui Dan Melindungi Hak Akses Untuk Perikanan Skala Kecil	Dinas Perikanan
158	Program 1 : Program pengembangan perikanan tangkap	Dinas Perikanan
159	Program 2 : Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
	Indikator SDGs: 14.B.1.(A) Jumlah Kab/ Kota Dengan Peningkatan Akses Pendanaan Usaha Nelayan	Dinas Perikanan
160	Program 1 : Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
161	Program 2 : Program pengembangan budidaya perikanan	Dinas Perikanan
	Indikator SDGs: 14.B.1.(B) Jumlah Nelayan Yang Terlindungi.	Dinas Perikanan
162	Program 1 : Program pengembangan perikanan tangkap	Dinas Perikanan

No	Pembangunan Daerah	Instansi Pelaksana
	Program/Kegiatan	
163	Program 2 : Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
	TUJUAN 15 : Ekosistem Daratan : Melindungi, Merestorasi, Dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggunaan, Memulihkan Degradasi Lahan, Serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	
	INDIKATOR TUJUAN 15. Proporsi Tutupan Hutan Terhadap Luas Lahan Keseluruhan.	
	Indikator SDGs: 15.1.1.(A) Proporsi Tutupan Hutan Terhadap Luas Lahan Keseluruhan.	DLHK
164	Program 1 : Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	DLHK
	Indikator SDGs: 15.2.1.(A) Luas Kawasan Konservasi Terdegradasi Yang Dipulihkan Kondisi Ekosistemnya	DLHK
165	Program 1 : Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLHK
	Indikator SDGs: 15.2.1.(B) Luas Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem	
166	Program 1 : Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	DLHK
	Indikator SDGs: 15.2.1.(D) Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.	DLHK
167	Program 1 : Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	DLHK
	Indikator SDGs: 15.3.1.(A) Proporsi Luas Lahan Kritis Yang Direhabilitasi Terhadap Luas Lahan Keseluruhan	DLHK
168	Program 1 : Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	DLHK
	Indikator SDGs: 15.6.1* Tersedianya Kerangka Legislasi, Administrasi Dan Kebijakan Untuk Memastikan Pembagian Keuntungan Yang Adil Dan Merata	DLHK
169	Program 1 : Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLHK
	Indikator SDGs: 15.9.1.(A) Dokumen Rencana Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati	DLHK
170	Program 1 : Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLHK
	TUJUAN 16 : Perdamaian, Keadilan, Dan Kelembagaan Yang Tangguh : Menguatkan Masyarakat Yang Inklusif Dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, Dan Membangun Kelembagaan Yang Efektif, Akuntabel Dan Inklusif Di Semua Tingkat	
	INDIKATOR TUJUAN 16. Proporsi Penduduk Yang Merasa Aman Berjalan Sendirian Di Area Tempat Tinggalnya	
	Indikator SDGs: 16.2.1.(A) Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Anak Umur 1-17 Tahun Yang Mengalami Hukuman Fisik Dan/Atau Agresi Psikologis Dari Pengasuh Dalam Setahun Terakhir.	DP3A
	Indikator SDGs: 16.2.1.(B) Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan.	DP3A
171	Program 1 : Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	DP3A
	Indikator SDGs: 16.6.1.(B) Persentase Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Sakip) Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Bappelitbangda, Bagian Ortala Setda
172	Program 2 : Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Biro Organisasi Dan Tata Laksana
173	Program 3 : Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappelitbangda
	Indikator SDGs: 16.6.1.(D) Persentase Instansi Pemerintah Yang Memiliki Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Bagian Ortala, Setda
174	Program 1 : Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Ortala, Setda

No	Pembangunan Daerah	Instansi Pelaksana
	Program/Kegiatan	
	Indikator SDGs: 16.10.2.(C) Jumlah Kepemilikan Sertifikat Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Untuk Mengukur Kualitas Ppid Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsi Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Perundang-Undangan.	Diskominfo, Persandian
175	Program 1 : Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Diskominfo, Persandian
	TUJUAN 17 : Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan : Memperkuat Sarana Pelaksanaan Dan Merevitalisasi Kemitraan	
	INDIKATOR TUJUAN 17. Total Pendapatan Pemerintah Sebagai Proporsi Terhadap Pdb Menurut Sumbernya.	
	Indikator SDGs: 17.8.1* Proporsi Individu Yang Menggunakan Internet.	Diskominfo, Persandian
176	Program 1 : Program Aplikasi Informatika	Diskominfo, Persandian
	Indikator SDGs: 17.8.1.(A) Persentase Kabupaten 3t Yang Terjangkau Layanan Akses Telekomunikasi Universal Dan Internet.	Diskominfo, Persandian
177	Program 1 : Program Aplikasi Informatika	Diskominfo, Persandian
	Indikator Sdgs: 17.18.1.(A) Persentase Konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) Yang Merasa Puas Dengan Kualitas Data Statistik.	BPS
	Indikator Sdgs: 17.18.1.(B) Persentase Konsumen Yang Menjadikan Data Dan Informasi Statistik BPS Sebagai Rujukan Utama.	BPS
178	Program 1 : Program Pengembangan Data Dan Informasi Statistik Sektoral	BPS
	Indikator Sdgs: 17.18.1.(C) Jumlah Metadata Kegiatan Statistik Dasar, Sektoral, Dan Khusus Yang Terdapat Dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (Sirusa).	BPS
179	Program 1 : Program Pengembangan Data Dan Informasi Statistik Sektoral	BPS
180	Program 2 : Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Diskominfo, Persandian
	Indikator Sdgs: 17.18.1.(D) Persentase Indikator SDGs Terpilah Yang Relevan Dengan Target.	Bappelitbangda / BPS
181	Program 1 : Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappelitbangda / BPS
	Indikator SDGs: 17.19.2.(C) Jumlah Pengunjung Eksternal Yang Mengakses Data Dan Informasi Statistik Melalui Website.	Diskominfo, Persandian
182	Program 1 : Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Diskominfo, Persandian

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Kerangka Pendanaan Tahun 2023

Sebagaimana tertuang dalam Bab III tentang Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah, pendapatan daerah tahun 2023 diproyeksikan sebesar **Rp.1.585.308.560.895** yang bersumber dari PAD sebesar **Rp.74.523.304.241** dan pendapatan transfer sebesar **Rp.1.335.347.637.279**, serta Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar **Rp. 139.752.000.000** dan akan dilakukan pengeluaran daerah sebesar **Rp.10.000.000.000**. Berdasarkan proyeksi Pendapatan daerah Pembiayaan Daerah tersebut akan digunakan untuk membiayai serangkaian program/kegiatan pembangunan dalam rencana belanja daerah tahun 2023, dengan jumlah belanja **Rp.1.610.308.560.895**.

Belanja daerah tahun 2023 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis *money follow* program priority, memperhatikan prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan tahun 2023, serta dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Belanja daerah tahun 2023 antara lain diarahkan untuk pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pilihan sesuai dengan potensi daerah, serta membiayai kegiatan-kegiatan strategis yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2023.

Tabel V-1
Rincian Rencana Pendanaan Tahun 2023

Kode	Uraian	Belanja 2023
5	BELANJA	1.610.308.560.895,00
5.1	BELANJA OPERASI	1.075.072.764.609,45
5.1.1	Belanja Pegawai	710.882.762.679,00
5.1.2	Belanja Barang	332.614.846.329,87
5.1.3	Belanja Bunga	4.000.000.000,00
5.1.4	Belanja Hibah	26.244.045.455,58
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.331.110.145,00
5.2	BELANJA MODAL	343.225.411.140,93
5.2.1	Belanja Tanah	4.850.000.817,71
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	33.665.444.195,00
5.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	146.670.719.434,54
5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	150.802.017.717,68
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	3.811.188.976,00
5.2.6	Belanja Aset Lainnya	3.426.040.000,00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	5.173.533.883,42
5.3.1	Belanja Tak Terduga	5.173.533.883,42
5.4	BELANJA TRANSFER	186.836.851.261,20
5.4.1	Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	7.079.724.796,20
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	179.757.126.465,00

5.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023

Pelaksanaan proses penyusunan penetapan program prioritas telah melalui tahapan dan prosedur perencanaan yang sesuai dengan aturan, ditetapkan dan menjadi dasar acuan dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah untuk tahun 2023, Perumusan program prioritas pembangunan daerah yang merupakan panduan dalam menentukan kegiatan prioritas perangkat daerah yang terdiri dari 10 (Sepuluh) prioritas pembangunan.

Tabel V-2
Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023

No.	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Sasaran Pembangunan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2023		Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
					Target		Target		
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
1	Pembangunan sumber daya manusia	Meningkatnya Hubungan Masyarakat yang Harmonis Berlandaskan nilai Agama	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Indeks Kerukunan Umat Beragama dan Kasus Intoleransi Yang Terjadi	77,5%	150.000.000	77,5%	165.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Peningkatan Penanganan Konflik Di Daerah	15 %	200.000.000	15 %	220.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase lembaga keagamaan dan peningkatan kesadaran toleransi beragama, Persentase Jumlah Perkara hukum yang difasilitasi, Ketersediaan dokumen LKPJ dan LPPD tepat waktu	100 %	2.906.120.048	100 %	3.196.732.052	Sekretariat Daerah
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Prsnts Jumlh Wrg Ngr Usi 7 - 15 Thun yng brprtisipsi dlm pndidkn dsr (SPM), Prsnts Jumlh Wrg Ngr Usi 7 -18 Thun yng blum mnylsikn pndidkn dsr dn tu mnnggh yng prprtisipsi dlm pndidkn kstrn (SPM)	100%	98.211.230.896	100%	99.372.856.066	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV, Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah	100%	250.000.000	100%	300.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan	Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase panjang talud/ drainase yang baik, Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1.5 M)	100 %	5.745.000.000	100 %	24.809.395.877	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Sasaran Pembangunan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2023		Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
					Target		Target		
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
			Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Pemenuhan program penyelenggaraan jalan	100 %	99.677.415.119	100 %	105.795.138.630	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenanga kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	81.7 %	7.971.045.550	81.7 %	28.934.500.501	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Prsnts Pnduduk Brkss ir Minum, Prsnts Jumlh wrg ngr yng mmprolh kbutuhn pokok ir minum shri-hri (SPM)	92 %	7.196.132.000	92 %	9.836.884.200	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Kawasan Permukiman	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	93,84 %	16.085.680.628	93,84 %	17.694.248.691	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Program Pengembangan Perumahan	Persentase Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM), Persentase jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	100 %	888.000.000	100 %	976.800.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Program Pengembangan Permukiman	prsentase pengembangan permukiman, Persentase Pemukiman Yang Tertata	86.18 %	1.000.000	86.18 %	1.100.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Bangunan Ber IMB Per Satuan Bangunan	20.44 %	33.313.779.400	20.44 %	36.590.157.340	Dinas Pekerjaan Umum dan

No.	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Sasaran Pembangunan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2023		Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
					Target		Target		
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
									Penataan Ruang
			Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan	100 %	1.000.000	100 %	1.100.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengelolaan Persampahan	Presentase Sampah Yang Terkelolah	100 %	10.869.546.098	100 %	11.956.500.707	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Presentase Terjaganya Kelestarian Sumber Daya,Fungsi Kawasan Hutan ,Keanekaragaman Hayati (Flora Dan Fauna) Serta Rekonstruksi Tata Batas Pada Kawasan Tahura Dikecamatan Bt,Bahari	85 %	1.270.000.000	85 %	1.397.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	Pemantapan reformasi birokrasi	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pembangunan	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat						Sekretariat Daerah
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA, Serta Infrastruktur Dan Kewilayahan	100 %	1.583.000.000	100 %	1.741.300.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD, Total Dana Bagi Hasil kab/Kota dan Desa, Penetapan APBD (Tepat Waktu), Persentase SILPA terhadap APBD, Persentase Belanja Pendidikan (20%),	48.28 %	224.290.062.366	48.28 %	246.719.068.603	BPKPD

No.	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Sasaran Pembangunan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2023		Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
					Target		Target		
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
				Persentase Belanja Kesehatan (10%), Opini BPK terhadap Laporan Keuangan					
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan	11.76 %	6.919.788.547	11.76 %	7.611.767.401	BPKPD
			Program Kepegawaian Daerah	Presentase Meningkatnya Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara diatas 90 Lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba	45 %	1.462.471.000	45 %	1.608.718.100	BKPSDM
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Presentase Peningkatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional ,pendidikan dan pelatihan prajabatan (LATSAR), serta pendidikan dan pelatihan teknis lainnya	33 %	3.285.629.604	33 %	3.614.192.564	BKPSDM
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Jumlah Temuan BPK dan Persentase Pelanggaran Pegawai	57 %	3.688.105.000	57 %	3.872.510.250	Inspektorat Daerah
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persenatse Tindak Lanjut Temuan	50 %	1.569.424.000	50 %	1.647.895.200	Inspektorat Daerah
			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitas sosial diluar panti (SPM)Persentase Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (SPM)Persentase Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM)Persentase Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti (SPM)	100 %	417.505.300	100 %	459.255.830	Dinas Sosial

No.	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Sasaran Pembangunan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2023		Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
					Target		Target		
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
			Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan penerbitan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk	100 %	546.000.000	100 %	600.600.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Program Pencatatan Sipil	Cakupan penerbitan akta kelahiran, cakupan penerbitan akta kematian, rasio pasangan berakta nikah, rasio bayi berakta kelahiran.	90 %	208.950.000	90 %	229.845.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase perangkat daerah yang menggunkan layanan data pemerintah	100 %	1.316.446.242	100 %	1.448.090.867	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Program Aplikasi Informatika	Persentase perangkat daerah yag terkoneksi dijaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh dinas kominfo	100 %	3.000.000.000	100 %	3.300.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Peresentase Peningkatan Pelayanan Perizinan	0 %	282.823.665	0 %	311.106.032	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
			Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Jumlah Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu	100 %	22.163.687	100 %	24.163.680	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
4	Peningkatan kualitas sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/kerakyatan	Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan)	100 %	600.000.000	100 %	614.660.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

No.	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Sasaran Pembangunan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2023		Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
					Target		Target		
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
		Meningkatnya Produksi hasil Perikanan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Jumlah Produksi Pertanian	75 %	11.665.274.000	75 %	14.389.294.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Wisata Domestik Dan Mancanegara	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana sektor pertanian yang tersedia	80 %	7.688.500.000	80 %	8.108.500.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Sampel Pangan Dengan Mutu Aman	45 %	25.000.000	45 %	27.500.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani yang dibina	57 %	545.170.000	57 %	852.250.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Usaha Sektor Peternakan Yang Berizin	50 %	26.289.000	50 %	35.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kontribusi PDRB sektor perikanan, Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan, Persentase Produksi Perikanan Tangkap	13,2 %	8.288.500.000	13,2 %	9.117.350.000	Dinas Perikanan
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya, Cakupan Bina Kelompok Perikanan	100 %	1.784.000.000	100 %	2.182.400.000	Dinas Perikanan
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Tingkat Konsumsi lkan	93 %	276.109.528	93 %	260.554.116	Dinas Perikanan
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	85 %	6.187.640.000	85 %	6.806.404.000	Dinas Pariwisata,

No.	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Sasaran Pembangunan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2023		Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
					Target		Target		
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
				mancanegara per kebangsaan (%)					Pemuda dan Olahraga
			Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota (%)	85 %	1.350.000.000	85 %	1.485.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	1,64 %	1.037.578.000	1,64 %	1.141.335.800	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
			Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	100 %	42.726.300	100 %	46.998.930	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
			Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Izin Usaha Simpan Pinjam Yang Ada	100 %	17.921.800	100 %	34.320.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM
			Program Pemberdayaan UMKM	Persentase UMKM Yang Diberdayakan	2,3 %	1.080.394.000	2,3 %	642.765.339	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM
			Program Pengembangan UMKM	Persentase peningkatan Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha	2,7 %	590.055.000	2,7 %	306.350.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	50 %	4.760.452.595	50 %	9.330.077.878	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	7.79 %	227.744.000	7.79 %	3.155.335.711	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM
			Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP)	35 %	187.487.500	35 %	370.828.645	Dinas Perdagangan,

No.	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Sasaran Pembangunan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2023		Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
					Target		Target		
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
				bertanda Tera Sah yang Berlaku					Perindustrian, Koperasi, UKM
5	Peningkatankualitas sistem pelayanan kesehatan	Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Ketersediaan sarana, Prasarana dan Alkes UKP dan UKM Rujukan	85 %	109.141.925.904	85 %	120.041.821.907	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Wisata Domestik Dan Mancanegara	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar	80 %	4.992.150.013	80 %	5.491.365.015	Dinas Kesehatan
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	persentase ketersediaan ALKES Sesuai standar, Persentase Pemenuhan Kebutuhan Obat dan Bahan Medis Pakai sesuai standar	83 %	592.715.436	83 %	651.986.979	Dinas Kesehatan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Keluarga Ber PHBS	66 %	331.077.520	66 %	364.185.272	Dinas Kesehatan
6	Pelestarian lingkungan hidup	Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase panjang talud/ drainase yang baik, Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1.5 M)	100 %	5.745.000.000	100 %	24.809.395.877	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Pemenuhan program penyelenggaraan jalan	100 %	99.677.415.119	100 %	105.795.138.630	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenanga kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	81.7 %	7.971.045.550	81.7 %	28.934.500.501	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Prsnts Pnduduk Brkss ir Minum, Prsnts Jumlh wrng ngr yng mmprolh kbutuhn pokok ir minum shri-hri (SPM)	92 %	7.196.132.000	92 %	9.836.884.200	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Sasaran Pembangunan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2023		Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
					Target		Target		
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
			Program Kawasan Permukiman	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	93,84 %	16.085.680.628	93,84 %	17.694.248.691	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Program Pengembangan Perumahan	Persentase Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM), Persentase jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	100 %	888.000.000	100 %	976.800.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Program Pengembangan Permukiman	presentase pengembangan permukiman, Persentase Pemukiman Yang Tertata	86.18 %	1.000.000	86.18 %	1.100.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Bangunan Ber IMB Per Satuan Bangunan	20.44 %	33.313.779.400	20.44 %	36.590.157.340	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan	100 %	1.000.000	100 %	1.100.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengelolaan Persampahan	Presentase Sampah Yang Terkelolah	100 %	10.869.546.098	100 %	11.956.500.707	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Presentase Terjaganya Kelestarian Sumber Daya,Fungsi Kawasan Hutan ,Keanekaragaman Hayati (Flora Dan Fauna) Serta	85 %	1.270.000.000	85 %	1.397.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Sasaran Pembangunan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2023		Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
					Target		Target		
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
				Rekonstruksi Tata Batas Pada Kawasan Tahura Dikecamatan Bt,Bahari					
7	Kesiapsiagaan dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana	Terwujudnya tatananan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM), Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM), Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)	100 %	1.170.565.733	100 %	1.287.622.306	BPBD
8	Peningkatan Kemitraan antar institusi		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penegakan Perda, Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara (SPM)	100 %	3.137.899.000	100 %	3.451.688.900	Satpol PP, Damkar, Penyelamatan
			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Kegiatan Pendidikan Politik Masyarakat	75 %	1.570.000.000	75 %	1.727.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Presentase cakupan pengakuan keberadaan MHA , kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	100 %	76.860.000	100 %	84.546.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Program Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100 %	226.773.750	100 %	249.451.125	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Sasaran Pembangunan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2023		Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
					Target		Target		
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
			Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Jumlah anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	77 %	349.980.250	77 %	384.978.275	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100 %	105.000.000	100 %	115.500.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
9	Peningkatan kemandirian desa	Meningkatnya Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui pengembangan Kawasan Perdesaan	Program Penataan Desa	Persentase Jumlah Desa yang memiliki Penataan Wilayah Desa Yang Baik	50 %	45.510.000	50 %	50.061.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Jumlah Desa yang memiliki Penataan Wilayah Desa Yang Baik	100 %	100.000.000	100 %	110.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah Desa yang memiliki administrasi Pemerintahan Desa yang Baik	100 %	1.536.490.100	100 %	1.744.198.410	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase peningkatan status desa mandiri	100 %	254.643.615	100 %	341.515.477	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10	Peningkatan produktifitas generasi muda	Meningkatnya Produktivitas Generasi Muda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Jumlah Pemuda Inovator	100 %	825.000.000	100 %	907.500.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat nasional dan internasional	100 %	2.419.940.000	100 %	2.826.934.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

No.	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Sasaran Pembangunan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Tahun 2023		Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
					Target		Target		
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
			Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	100 %	7.997.076.000	100 %	8.951.333.221	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

5.3 Indikasi Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Bulukumba Tahun 2023

Untuk matriks rencana kerja dan pendanaan daerah program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel V-3
Rekap pagu Matriks Rencana Kerja dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 Kabupaten Bulukumba

No	OPD	Pagu RKPD Tahun 2023 (Rp.)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	525.035.198.168
2	Dinas Kesehatan	201.151.423.195
3	Rumah Sakit Umum Daerah H.A.Sultan Dg Raja	86.000.000.000
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	174.385.431.359
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	33.948.771.058
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.172.026.367
7	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	12.194.003.486
8	Dinas Sosial	4.568.619.829
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19.407.982.643
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.835.983.725
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.536.115.235
12	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	14.507.048.632
13	Dinas Perhubungan	16.111.321.496
14	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	7.823.400.319
15	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	7.906.521.601
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	3.241.822.745
17	Dinas Perikanan	15.625.697.784
18	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	20.271.117.552
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	41.104.144.234
20	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	15.781.669.243
21	Sekretariat Daerah	24.667.467.455
22	Sekretariat DPRD	35.818.359.401
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	11.368.122.304
24	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	246.919.037.983
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.633.023.227
26	Inspektorat Daerah	12.250.936.541
27	KANTOR KECAMATAN UJUNGBULU	16.234.683.832
28	KANTOR KECAMATAN UJUNG LOE	3.179.370.195
29	KANTOR KECAMATAN BULUKUMPA	6.513.231.779
30	KANTOR KECAMATAN RILAU ALE	4.683.094.781
31	KANTOR KECAMATAN GANTARANG	7.161.477.504
32	KANTOR KECAMATAN KINDANG	2.931.103.969
33	KANTOR KECAMATAN HERLANG	4.243.061.717
34	KANTOR KECAMATAN BONTO TIRO	3.679.370.411
35	KANTOR KECAMATAN BONTO BAHARI	7.593.347.440
36	KANTOR KECAMATAN KAJANG	5.240.030.907
37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.584.542.741
	Total Anggaran	1.620.308.560.859

Tabel V- 4
Indikasi Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2023-2024

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif				
1													
1	1						523.891.201.875			525.386.283.087			
1	1	1					425.379.970.979		100 %	425.613.427.021			
1	1	1	2.01				200.000.000		100 %	250.000.000			
1	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	2 Dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	100.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	5 Dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Dokumen	150.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.02					423.642.318.715	100 %		100 %	423.671.042.715	
1	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	12 bulan	422.168.342.715	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 bulan	422.168.342.715	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	2 Dokumen	1.452.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	1.452.700.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	1 Dokumen	10.638.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	25.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	1 Dokumen	10.638.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	25.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.05					150.762.000	100 %		100 %	155.000.000	
1	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	1 Kegiatan	38.262.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Kegiatan	40.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	800 Orang	37.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	800 Orang	40.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.06					410.165.404	100 %		100 %	424.069.044	
1	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	1 Tahun	99.379.044	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Tahun	99.379.044	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	28571 Lembar	19.896.360	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	28571 Lembar	30.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	800 Orang	31.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	800 Orang	35.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	30 Kegiatan	259.690.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30 Kegiatan	259.690.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.08					413.249.860	1 Tahun		1 Tahun	444.390.262	
1	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, Biaya tagihan air dan listrik yang terbayarkan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	1 Tahun	115.249.860	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Tahun	144.390.262	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang terbayar	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	1 Tahun	298.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Tahun	300.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah mahasiswa yang mendapatkan beasiswa berprestasi		250 Orang			250 Orang		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif					
1	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	persentase barang milik yang disiapkan dan terpelihara dalam kondisi baik		55 %	563.475.000			55 %	668.925.000	
1	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	2 Unit	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	5.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	37 Unit	20.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		37 Unit	25.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang bertambah	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	8 Unit	138.925.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 Unit	138.925.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang kondisi baik		1 Paket				1 Paket		
1	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya kondisi baik	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	5 Paket	400.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Paket	500.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Prsnts Jumlh Wrg Ngr Usi 7 -15 Thun yng brprtisipi dlm pndidkn dsr (SPM), Prsnts Jumlh Wrg Ngr Usi 7 -18 Thun yng blum mnysikn pndidkn dsr dn tu mnnggh yng prprtisipi dlm pndidkn kstrn (SPM)		100 %	98.211.230.896			100 %	99.372.856.066	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		100 %	52.209.530.886			100 %	52.264.531.066	
1	1	2	2.01	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	2 Sekolah	1.500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Sekolah	1.500.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.01	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 Sekolah	950.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11 Sekolah	1.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
										Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1	1	2	2.01	4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23 Sekolah	1.500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		23 Sekolah	1.500.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
										Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1	1	2	2.01	5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 Sekolah	1.255.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11 Sekolah	1.255.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
										Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1	1	2	2.01	6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42 Sekolah	4.515.940.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		42 Sekolah	4.515.940.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
										Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1	1	2	2.01	8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Sekolah	2.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Sekolah	2.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Rencana Tahun 2023				Catatan Penting		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target	Pagu Indikatif
1	1	2	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 Sekolah	250.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		9 Sekolah	250.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
										Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1	1	2	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55 Sekolah	1.200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		55 Sekolah	1.200.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
										Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1	1	2	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa SD yang mengikuti Lomba KSN Tingkat Kabupaten dan Nasional	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	420.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Kegiatan	420.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 PTK	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 PTK	150.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	350 Sekolah	38.318.591.066	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		350 Sekolah	38.318.591.066	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang mendapatkan Dana BOS	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	350 Sekolah	74.999.820	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		350 Sekolah	80.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Bimtek ARKAS Dana BOS SD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	75.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		100 %	30.331.383.010			100 %	30.180.808.000	
1	1	2	2.02	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Sekolah	1.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Sekolah	1.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Sekolah	1.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Sekolah	1.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Sekolah	1.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Sekolah	1.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	6	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Sekolah	1.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Sekolah	1.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Sekolah	1.158.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Sekolah	1.158.400.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Paket	3.310.331.950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Paket	3.310.331.950	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19 Paket	3.266.904.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		19 Paket	3.266.904.100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Rencana Tahun 2023			Catatan Penting		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif			Sumber Dana	Target
1	1	2	2.02	16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Paket	1.073.264.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Paket	1.073.264.800	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	1	2	2.02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Paket	1.131.473.850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7 Paket	1.131.473.850	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	1	2	2.02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14 Paket	3.775.564.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	14 Paket	3.775.564.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	1	2	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19 Paket	2.535.404.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	19 Paket	2.535.404.800	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	1	2	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14 Paket	1.075.904.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	14 Paket	1.075.904.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
									Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					
1	1	2	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa SMP yang mengikuti Lomba KSN Tingkat Kabupaten dan Nasional	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	375.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Kegiatan	125.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	1	2	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	100.575.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Orang	200.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah sekolah yang mendapatkan dana BOS	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 Sekolah	8.403.560.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	70 Sekolah	8.403.560.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69 Sekolah	74.999.910	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	69 Sekolah	75.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	1	2	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Bimtek ARKAS Dana BOS SMP	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	50.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	1	2	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		100 %	13.041.888.000		100 %	13.227.517.000		
1	1	2	2.03	1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Sekolah	240.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Sekolah	240.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	1	2	2.03	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Sekolah	396.012.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Sekolah	396.012.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	1	2	2.03	3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Sekolah	3.520.295.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Sekolah	3.520.295.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	1	2	2.03	4	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Sekolah	329.010.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	15 Sekolah	329.010.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	1	2	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Sekolah	240.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Sekolah	240.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif					
1	1	2	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Sekolah	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Sekolah	200.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	368 Sekolah	8.100.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		368 Sekolah	8.232.200.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Sekolah	66.571.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Sekolah	70.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang menyelesaikan pendidikan pada Jenjang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		85 %	2.628.429.000			85 %	3.700.000.000	
1	1	2	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 PKBM	128.429.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		24 PKBM	150.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.04	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 PKBM	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		24 PKBM	100.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 PKBM	2.400.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		24 PKBM	3.400.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 PKBM	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		24 PKBM	50.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	4			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV, Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah		100 %	250.000.000			100 %	300.000.000	
1	1	4	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		100 %	250.000.000			100 %	300.000.000	
1	1	4	2.01	1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	300.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	5			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Yang memperoleh Izin Penyelenggaraan Pendidikan		50 %	50.000.000			50 %	100.000.000	
1	1	5	2.01		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Satuan Pendidikan Dasar Yang memperoleh Izin Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah		100 %	25.000.000			100 %	50.000.000	
1	1	5	2.01	2	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	50.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	5	2.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Satuan Pendidikan PAUD dan Nonformal Yang memperoleh Izin Penyelenggaraan Pendidikan PAUD dan Nonformal		100 %	25.000.000			100 %	50.000.000	
1	1	5	2.02	2	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	50.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif				
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			1.043.996.345			1.053.440.790				
2	22	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi		65 %	238.441.000		65 %	238.441.000			
2	22	2	2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		100 %	238.441.000		100 %	238.441.000		
2	22	2	2.02	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah kegiatan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Pemajuan Tradisi Budaya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	238.441.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Kegiatan	238.441.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	3		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase sanggar kesenian yang mendapatkan pelatihan/pembinaan		45 %	170.555.555		45 %	180.000.000		
2	22	3	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional		100 %	170.555.555		100 %	180.000.000	
2	22	3	2.01	1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Kesenian Tradisional	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	170.555.555	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Kegiatan	180.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	5		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang dilestarikan		50 %	634.999.790		50 %	634.999.790		
2	22	5	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Cagar Budaya yang di Tetapkan		100 %	634.999.790		100 %	634.999.790	
2	22	5	2.01	2	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	634.999.790	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	634.999.790	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	6		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Jumlah Benda koleksi daerah yang terverifikasi		10 %	-		10 %	-		
2	22	6	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Meseum yang diBangun		1 Museum	-		1 Museum	-	
2	22	6	2.01	1	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Kegiatan	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Kegiatan	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				99.999.948			114.454.000		
1	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)		100 %	99.999.948			100 %	114.454.000	
1	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi keuangan		100 %	15.000.000		100 %	15.000.000	
1	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	5 Dokumen	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Dokumen	15.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran		100 %	27.110.000		100 %	27.110.000	
1	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	1 Kegiatan	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Kegiatan	5.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Kab. Bulukumba, Gantorang, Polewali	1 Kegiatan	750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Kegiatan	750	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bulukumba, Gantorang, Polewali	1 Kegiatan	21.360.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Kegiatan	21.360.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1 1 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang yang disiapkan		1 Tahun	44.545.948			1 Tahun	59.000.000	
1 1 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, Biaya tagihan air dan listrik yang terbayarkan	Kab. Bulukumba, Gantorang, Polewali	1 Tahun	20.545.948	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	35.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 1 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang terbayar	Kab. Bulukumba, Gantorang, Polewali	1 Tahun	24.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	24.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 1 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	persentase barang milik yang disiapkan dan terpelihara dalam kondisi baik		55%	13.344.000			55%	13.344.000	
1 1 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bulukumba, Gantorang, Polewali	1 Kegiatan	13.344.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Kegiatan	13.344.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				201.151.423.195				221.254.238.369	
1 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Kesehatan)		100 %	86.093.554.322			100 %	94.704.879.196	
		Terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota		100 %				100 %		
1 2 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu		100 %	243.065.750			100 %	269.341.524	
1 2 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Dinas Kesehatan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	100 %	91.506.310	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	92.506.310	Dinas Kesehatan
1 2 1 2.01 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Tersedianya dokumen RKA dan DPA Dinas Kesehatan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	4 Dokumen	50.235.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	65.235.000	Dinas Kesehatan
1 2 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	100 %	6.075.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	6.825.830	Dinas Kesehatan
1 2 1 2.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kesehatan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	100 %	95.249.440	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	104.774.384	Dinas Kesehatan
1 2 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN perangkat daerah berkinerja kategori baik dan sangat baik (dinas kesehatan)		100 %	80.643.186.347			100 %	88.707.505.243	
1 2 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	100 %	79.638.033.220	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	87.601.836.543	Dinas Kesehatan
1 2 1 2.02 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	100 %	781.035.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	859.138.500	Dinas Kesehatan
1 2 1 2.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	100 %	102.532.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	112.785.750	Dinas Kesehatan
1 2 1 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	100 %	27.716.761	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	30.488.437	Dinas Kesehatan
1 2 1 2.02 6	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	100 %	31.164.240	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	34.280.664	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif		
1 2 1 2.02 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	100 %	23.976.795	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	26.374.735	Dinas Kesehatan	
1 2 1 2.02 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	5 Dokumen	38.727.831	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	42.600.614	Dinas Kesehatan	
1 2 1 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	terlaksananya pengelolaan administrasi retribusi yankes di puskesmas dan jaringannya		100 %	602.857.634			100 %	663.143.397		
1 2 1 2.04 1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	5 Dokumen	602.857.634	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	663.143.397	Dinas Kesehatan	
1 2 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian sesuai standar		100 %	48.555.847			100 %	53.411.432		
1 2 1 2.05 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	5 Dokumen	27.429.417	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	30.172.359	Dinas Kesehatan	
1 2 1 2.05 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	5 Dokumen	21.126.430	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	23.239.073	Dinas Kesehatan	
1 2 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum di instansi kesehatan, puskesmas dan jaringannya		100 %	782.596.622			100 %	860.856.285		
1 2 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	100 %	51.024.746	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	56.127.221	Dinas Kesehatan	
1 2 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	100 %	361.499.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	397.649.725	Dinas Kesehatan	
1 2 1 2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	100 %	26.489.183	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	29.138.101	Dinas Kesehatan	
1 2 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	45.846.195	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	50.430.815	Dinas Kesehatan	
1 2 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	1 Paket	28.718.570	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	31.590.427	Dinas Kesehatan	
1 2 1 2.06 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	28.228.178	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	31.050.996	Dinas Kesehatan	
1 2 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	240.790.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	264.869.000	Dinas Kesehatan	
1 2 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	terlaksananya pengadaan kendaraan dinas perorangan, kendaraan dinas operasiabd dan pusk keliling serta ambulans		100 %	1.341.422.854			100 %	1.475.565.139		
1 2 1 2.07 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Bulukumpa, Tanete	3 Unit	1.341.422.854	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	1.475.565.139	Dinas Kesehatan	
1 2 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya jasa penunjang pelayanan urusan pemerintahan bidang kesehatan		100 %	1.929.577.847			100 %	2.122.535.632		
1 2 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	12 Bulan	509.038.122	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	559.941.934	Dinas Kesehatan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif		
1 2 1 2.08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	29.139.725	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	32.053.698	Dinas Kesehatan	
1 2 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	1.391.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	1.530.540.000	Dinas Kesehatan	
1 2 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang pemerintahan bidang kesehatan		100 %	202.290.040			100 %	222.519.044		
1 2 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 Unit	32.678.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11 Unit	35.946.625	Dinas Kesehatan	
1 2 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Unit	169.611.290	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Unit	186.572.419	Dinas Kesehatan	
		Terlaksananya pemeliharaan dan pajak kendaraan operasional dinas kesehatan		12 Unit				12 Unit			
1 2 1 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya pengelolaan keuangan secara langsung dan mandiri oleh RS utk mendukung peningkatan mutu layanan Rumah Sakit dan Puskesmas		100 %	300.001.381			100 %	330.001.500		
1 2 1 2.10 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Puskesmas	300.001.381	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Puskesmas	330.001.500	Dinas Kesehatan	
1 2 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Ketersediaan sarana, Prasarana dan Alkes UKP dan UKM Rujukan		85 %	109.141.925.904			85 %	120.041.821.907		
		Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Kesehatan)		100 %				100 %			
		Terwujudnya Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		85 %				85 %			
		Terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota		100 %				100 %			
1 2 2 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		100 %	27.243.850.237			100 %	29.958.263.370		
1 2 2 2.01 3	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	7.020.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	7.722.000.000	Dinas Kesehatan	
		Tersedianya bangunan LABKESDA		1 Unit				1 Unit			
1 2 2 2.01 10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Unit	1.085.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Unit	1.193.500.000	Dinas Kesehatan	
1 2 2 2.01 13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Puskesmas	7.020.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		5 Puskesmas	7.722.000.000	Dinas Kesehatan	
1 2 2 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	5.020.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		1 Paket	5.522.000.000	Dinas Kesehatan	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target	Pagu Indikatif
1	2	2	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	4.010.564.730	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	1 Paket	4.411.621.203	Dinas Kesehatan		
1	2	2	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	2.574.368.106	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	1 Paket	2.831.804.917	Dinas Kesehatan		
1	2	2	2.01	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	144.519.901	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	159.000.000	Dinas Kesehatan		
1	2	2	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	219.397.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	241.337.250	Dinas Kesehatan		
1	2	2	2.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	150.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	100 %	155.000.000	Dinas Kesehatan		
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi capaian indikator Standar pelayanan minimal bidang kesehatan		100 %	80.393.749.597		100 %	88.428.799.859			
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21 Puskesmas	103.926.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	21 Puskesmas	114.319.590	Dinas Kesehatan		
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21 Puskesmas	333.118.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	21 Puskesmas	366.429.800	Dinas Kesehatan		
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21 Puskesmas	31.391.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	21 Puskesmas	34.530.100	Dinas Kesehatan		
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21 Puskesmas	44.682.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	21 Puskesmas	49.150.200	Dinas Kesehatan		
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21 Puskesmas	28.476.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	21 Puskesmas	31.324.370	Dinas Kesehatan		
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	39.953.970	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	43.949.400	Dinas Kesehatan		
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	29.375.520	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	32.313.072	Dinas Kesehatan		
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	39.999.880	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	43.999.868	Dinas Kesehatan		
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	39.983.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	43.981.850	Dinas Kesehatan		
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	39.999.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	43.999.670	Dinas Kesehatan		
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	39.999.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	43.999.780	Dinas Kesehatan		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Rencana Tahun 2023				Catatan Penting		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target	Pagu Indikatif
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	39.883.710	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	43.872.081	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	29.375.720	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	27.988.560	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	88.882.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	97.770.530	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	731.725.700	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		5 Dokumen	804.898.270	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	38.699.990	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	42.569.989	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	151.399.910	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	166.539.901	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	104.737.335	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	115.211.069	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	72.408.804	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	79.649.684	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	37.330.782	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	41.063.860	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	31.065.650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	34.172.215	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	81.585.165	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	89.743.682	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	89.950.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		5 Dokumen	98.945.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	74.990.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	82.489.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	59.457.597.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	65.403.357.580	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	38.586.949	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	42.445.644	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	21.035.457	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	23.139.003	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	248.062.776	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	272.869.054	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Rencana Tahun 2023				Catatan Penting		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target	Pagu Indikatif
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	17.239.475.720	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	5 Dokumen	18.963.423.292	Dinas Kesehatan	
1	2	2	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	26.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Dokumen	28.600.000	Dinas Kesehatan	
1	2	2	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21 Puskesmas	570.803.930	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	21 Puskesmas	627.884.323	Dinas Kesehatan	
1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	72.207.760	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	79.428.536	Dinas Kesehatan	
1	2	2	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	38.587.169	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Dokumen	42.445.886	Dinas Kesehatan	
1	2	2	2.02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	338.450.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	372.295.000	Dinas Kesehatan	
1	2	2	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentasi instansi/sarana kesehatan yg menerapkan sistem informasi berbasis teknologi (web)		83 %	1.217.495.787		83 %	1.339.245.366		
1	2	2	2.03	1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	746.817.007	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Dokumen	821.498.708	Dinas Kesehatan	
1	2	2	2.03	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	70.678.780	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Dokumen	77.746.658	Dinas Kesehatan	
1	2	2	2.03	3	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Terpenuhinya alat/perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan jaringan internet yang diadakan	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	400.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	440.000.000	Dinas Kesehatan	
1	2	2	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap mutu layanan kesehatan		66 %	286.830.283		66 %	315.513.312		
1	2	2	2.04	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	22.049.768	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	24.254.745	Dinas Kesehatan	
1	2	2	2.04	2	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi pengelolaan rumah sakit dan faskes lainnya sesuai standar	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	22.825.000	Dinas Kesehatan	
1	2	2	2.04	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	34.030.515	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	37.433.567	Dinas Kesehatan	
1	2	2	2.04	4	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	210.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Dokumen	231.000.000	Dinas Kesehatan	
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar		80 %	4.992.150.013		80 %	5.491.365.015		
1	2	3	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentasi praktek tenaga kesehatan yg dibina dan diawasi		70 %	43.750.000		70 %	48.125.000		
1	2	3	2.01	1	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Persentase praktik tenaga kesehatan yang dibina dan diawasi sesuai standar	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55 %	21.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	55 %	23.100.000	Dinas Kesehatan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1 2 3 2.01 2	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	22.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		85 %	25.025.000	Dinas Kesehatan
1 2 3 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentasi pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar		87 %	4.621.097.784			87 %	5.083.207.563	
1 2 3 2.02 1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	32.356.379	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	35.592.017	Dinas Kesehatan
1 2 3 2.02 2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4.563.642.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	5.020.006.200	Dinas Kesehatan
1 2 3 2.02 3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	25.099.405	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	27.609.346	Dinas Kesehatan
1 2 3 2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi tenaga kesehatan yg telah ditingkatkan kompetensinya		80 %	327.302.229			80 %	360.032.452	
1 2 3 2.03 1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	327.302.229	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	360.032.452	Dinas Kesehatan
1 2 4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	persentase ketersediaan ALKES Sesuai standar, Persentase Pemenuhan Kebutuhan Obat dan Bahan Medis Pakai sesuai standar		83 %	592.715.436			83 %	651.986.979	
1 2 4 2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pesentasi apotek, toko obat, toko alkes, optikal dan Umot yg memiliki izin		77 %	38.959.900			77 %	42.855.890	
1 2 4 2.01 2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksanya validasi dan Pengawasan perizinan sarana Apotek dan Toko Obat	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	38.959.900	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		100 %	42.855.890	Dinas Kesehatan
1 2 4 2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentasi PKRT yg duawasi dan bersertifikat laik		55 %	75.824.567			55 %	83.407.023	
1 2 4 2.02 2	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	75.824.567	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	83.407.023	Dinas Kesehatan
1 2 4 2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri	Persentasi produksi pangan industri Rumah tangga yg duawasi dan bersertifikat laik		55 %	121.390.100			55 %	133.529.110	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1 2 4 2.03 1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Terlaksananya Pengawasan sertifikat produksi PIRT dan Nomor PIRT sebagai izin Produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang diproduksi oleh IRT	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	121.390.100	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		100 %	133.529.110	Dinas Kesehatan
1 2 4 2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentasi TPM dan DAM yg diawasi dan bersertifikat laik		95 %	36.537.313			95 %	40.191.044	
1 2 4 2.04 1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	36.537.313	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	40.191.044	Dinas Kesehatan
1 2 4 2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentasi pembinaan pd sentra makanan jajanan dan pemberian stiker		50 %	27.716.056			50 %	30.487.662	
1 2 4 2.05 1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	27.716.056	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	30.487.662	Dinas Kesehatan
1 2 4 2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentasi pengawasan post market pd produksi dan produk makanan minuman IRT		58 %	292.287.500			58 %	321.516.250	
1 2 4 2.06 1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	292.287.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	321.516.250	Dinas Kesehatan
1 2 5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Keluarga Ber PHBS		66 %	331.077.520			66 %	364.185.272	
1 2 5 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentasi kelompok masyarakat di desa/kelurahan yg berpartisipasi dlm pembangunan kesehatan		22 %	99.890.020			22 %	109.879.022	
1 2 5 2.01 1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	99.890.020	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		100 %	109.879.022	Dinas Kesehatan
1 2 5 2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentasi masyarakat ditempat kerja dan tempat umum yg ber PHBS		41 %	148.837.500			41 %	163.721.250	
1 2 5 2.02 1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	148.837.500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		5 Dokumen	163.721.250	Dinas Kesehatan
1 2 5 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 %	82.350.000			100 %	90.585.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1 2 5 2.03 1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	82.350.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		5 Dokumen	90.585.000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				86.000.000.000				94.600.000.000	
1 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Cakupan Layanan BLUD		100 %	86.000.000.000			100 %	94.600.000.000	
1 2 1 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya pengelolaan keuangan secara langsung dan mandiri oleh RS utk mendukung peningkatan mutu layanan Rumah Sakit dan Puskesmas		100 %	86.000.000.000			100 %	94.600.000.000	
1 2 1 2.10 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	1 Unit Kerja	86.000.000.000	Pendapatan dari BLUD		1 Unit Kerja	94.600.000.000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1 3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				174.385.431.359				228.012.456.683	
1 3 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)		100 %	16.428.334.290			100 %	16.569.605.613	
1 3 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dihasilkan dan dievaluasi		53 Dokumen	186.013.500			53 Dokumen	240.349.670	
1 3 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	39 Dokumen	186.013.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		39 Dokumen	240.349.670	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 3 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah		100 %	11.650.442.990			100 %	10.118.188.000	
1 3 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	1200 Orang/bulan	8.942.872.990	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1200 Orang/bulan	9.936.688.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 3 1 2.02 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	10 Dokumen	2.707.570.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Dokumen	181.500.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Terlaksananya Jasa Administrasi keuangan		12 bulan				12 bulan		
1 3 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah		100 %	103.970.000			100 %	344.987.367	
1 3 1 2.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Latpim III	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	2 Orang	64.480.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Orang	121.687.500	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		2 Orang				2 Orang		
1 3 1 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	15 Orang	39.490.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 Orang	223.299.867	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		15 Orang				15 Orang		
1 3 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan administrasi umum perangkat daerah		100 %	438.411.000			100 %	505.123.300	
1 3 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	40 Unit	3.410.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		40 Unit	10.225.600	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket				1 Paket				
1	3	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Kali	12.007.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Kali	13.207.700	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			4 Paket			4 Paket		
1	3	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan yang tersedia	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	2000 Buah	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2000 Buah	60.396.600	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			100680 Paket			100680 Paket		
1	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Biaya rapat koordinasi dan konsultasi	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	120 Orang / kali	382.994.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	120 Orang / kali	421.293.400	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			120 Laporan			120 Laporan		
1	3	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang barang milik daerah yang diadakan		28 Unit	1.554.842.400		28 Unit	2.585.128.370	
1	3	1	2.07	3	Pengadaan Alat Besar	Jumlah alat berat yang tersedia	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	1 Unit	1.482.843.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	2.530.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	3	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	3 Unit	71.999.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Unit	55.128.370	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			8 Unit			8 Unit		
1	3	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terbayarnya jasa penunjang urusan kantor		24 Orang / Bulan	2.151.024.400		24 Orang / Bulan	2.366.126.840	
1	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya tagihan listrik dan biaya tagihan wifi	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	12 Bulan	192.824.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	212.106.840	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan			12 Laporan		
1	3	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah biaya jasa tenaga kebersihan kantor	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	12 Orang	1.958.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Orang	2.154.020.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan			12 Laporan		
1	3	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah aset dinas PUTR yang dipelihara		104 Unit	343.630.000		104 Unit	409.702.066	
1	3	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan jabatan yang di pemelihara dan pajak	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	1 Unit	40.630.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	55.244.200	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			1 Unit			1 Unit		
1	3	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	42 Unit	214.020.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	42 Unit	249.190.066	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
					Jumlah Pajak Kendaraan Dinas/operasional roda 4 dan roda 2 yang terbayarkan			68 Unit			68 Unit		
1	3	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	4 Unit	56.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Unit	62.150.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	3	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah laptop, AC, Printer dan PC yang dipelihara	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	31 Unit	32.480.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	31 Unit	43.117.800	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		32 Unit				32 Unit			
1 3 2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenanga kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi		81.7 %	7.971.045.550			81.7 %	28.934.500.501		
1 3 2	2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya penanganan bangunan SDA pengendali banjir, Embung/Bangunan Penampung ari lainnya, serta normalisasi saluran sungai		340 Satuan	2.284.277.600			340 Satuan	4.744.641.621	
		Terlaksananya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		100 %				100 %			
1 3 2	2.01	11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Paket	284.671.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8 Paket	557.901.083	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 3 2	2.01	18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Jumlah seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya yang terbangun	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Paket	530.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Paket	2.175.475.545	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun		0.2 KM				0.2 KM			
1 3 2	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Jumlah lokasi /sungai yang dinormlisasi/ restorasi	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi		0.01 KM				0.01 KM			
1 3 2	2.01	54	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Jumlah tenaga OP kanal banjir	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 Orang	916.096.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	40 Orang	1.778.945.550	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 3 2	2.01	60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air yang Dilaksanakan pada WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	229.690.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Dokumen	196.019.673	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Jumlah tenaga petugas curah hujan		22 Orang				22 Orang			
1 3 2	2.01	61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah anggota P3A yang dibina dan diberdayakan	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	240 Kelompok P3A	23.820.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	240 Kelompok P3A	36.299.770	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 3 2	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jaringan irigasi kondisi baik		100 %	5.686.767.950		100 %	24.189.858.880	
		Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		100 %				100 %			
1 3 2	2.02	8	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	jumlah Irigasi yang ditingkatkan	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32 Paket	1.806.010.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	32 Paket	1.986.611.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 3 2	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	jumlah Daerah irigasi yang direhabilitasi/dipelihara	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23 Paket	2.872.111.950	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	23 Paket	20.157.248.870	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi		23 KM				23 KM			
1 3 2	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	jumlah tenaga OP (POB, PPA)		65 Orang	968.226.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	65 Orang	1.930.643.990	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1 3 6 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Talud/drainase yang baik		32.02 Km	5.745.000.000			32.02 Km	24.809.395.877	
		Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		100 %				100 %		
1 3 6 2.01 1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah dokumen rencana sistem drainase		2 Dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	110.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun		3 Dokumen				3 Dokumen		
1 3 6 2.01 5	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun		3 M	4.095.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 M	23.204.500.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Panjang talud jalan yang terbangun (M)		3000 Meter				3000 Meter		
1 3 6 2.01 7	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi		200 Meter	1.550.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		200 Meter	1.494.895.877	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 3 7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	prsentase pengembagan permukiman, Persentase Pemukiman Yang Tertata		86.18 %	1.000.000			86.18 %	1.100.000	
1 3 7 2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Pembangunan Drainase dan Jalan Lingkungan yang telah terbangun di Daerah Permukiman		28000 Meter	1.000.000			28000 Meter	1.100.000	
		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		100 %				100 %		
1 3 7 2.01 1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan Drainase Lingkungan,Capaian Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Blok) Capaian pembangunan Jalan Lingkungan (Rabat Beton) Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	195 Meter	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		195 Meter	1.100.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		10 Sistem Jaringan				10 Sistem Jaringan		
1 3 8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Bangunan Ber IMB Per Satuan Bangunan		20.44 %	33.313.779.400			20.44 %	36.590.157.340	
1 3 8 2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung yang terbangun dan jumlah rekomendasi IMB yang terbit		413 Unit	33.313.779.400			413 Unit	36.590.157.340	
1 3 8 2.01 1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG		20 Dokumen	263.779.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Dokumen	235.157.340	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Jumlah Rekomendasi IMB Yang terbit (BOP IMB)		400 Lembar				400 Lembar		
1 3 8 2.01 2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	210 Dokumen	33.050.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		210 Dokumen	36.355.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Jumlah Gedung Pemerintah yang terbangun		13 Unit				13 Unit		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1 3 #	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Pemenuhan program penyelenggaraan jalan		100 %	99.677.415.119			100 %	105.795.138.630	
1 3 #	2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan dalam kondisi baik		84 km	99.677.415.119			84 km	105.795.138.630	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		100 %				100 %		
1 3 #	2.01 4 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	275.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Jumlah Dokumen survey kondisi jalan		3 Dokumen				3 Dokumen		
1 3 #	2.01 5 Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.5 KM	54.610.769.188	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7.5 KM	60.071.846.107	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 3 #	2.01 8 Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan		10 KM	9.311.452.724	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 KM	10.242.579.996	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 3 #	2.01 9 Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 KM	13.262.193.207	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 KM	14.588.412.527	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 3 #	2.01 10 Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 KM	6.913.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		10 KM	7.604.300.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 3 #	2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 KM	5.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 KM	1.650.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 3 #	2.01 12 Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Unit	8.905.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Unit	9.795.500.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Panjang Jembatan yang Dibangun		6 M				6 M		
1 3 #	2.01 18 Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang direhabilitasi	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	1.425.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	1.567.500.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi		2 M				2 M		
1 3 #	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga kerja trampil yang bersertifikat		100 %	97.000.000			100 %	107.800.000	
1 3 #	2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga kerja trampil yang dilatih		100 orang	50.000.000			100 orang	55.000.000	
1 3 #	2.01 4 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah orang yang dilatih dan disertifikasi	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Orang	55.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 3 #	2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peralatan laboratorium dan dokumen yang diuji		7 Unit	47.000.000			7 Unit	52.800.000	
1 3 #	2.02 7 Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	47.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	52.800.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 3 #	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Jumlah dokumen penataan ruang yang dihasilkan		100 %	975.617.000			100 %	374.678.822	
1 3 #	2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penataan ruang yang dihasilkan		3 Dokumen	877.697.000			3 Dokumen	266.966.822	
1 3 #	2.01 3 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	877.697.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	266.966.822	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1 3 # 2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Frekuensi pengawasan dan koordinasi yang dilakukan		24 Kali	97.920.000			24 Kali	107.712.000	
1 3 # 2.04 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Frekuensi pengawasan yang dilaksanakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Kali	55.960.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Kali	61.556.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 3 # 2.04 4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Frekuensi koordinasi TKPRD yang dilaksanakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Kali	41.960.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Kali	46.156.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1 4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				24.676.695.058				26.735.064.564	
1 4 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan)		100 %	6.863.014.430			100 %	7.140.015.873	
1 4 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	"Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumberdaya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan"		34 Dokumen	205.000.000			34 Dokumen	225.500.000	
1 4 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	34 dokumen	105.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		34 dokumen	115.500.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1 4 1 2.01 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan DPA-SKPD	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	30 dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 dokumen	110.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1 4 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	4.579.314.430			100 %	4.653.945.873	
1 4 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	12 Bulan	4.258.814.430	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	4.301.395.873	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1 4 1 2.02 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Jasa administrasi Keuangan ASN yang tersedia	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	12 Bulan	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	165.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1 4 1 2.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Pelaksanaan Penatausahaan SKPD	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	12 Bulan	100.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	110.550.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1 4 1 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	1 dokumen	70.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	77.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1 4 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	95.000.000			100 %	104.500.000	
1 4 1 2.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Latpim	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	3 Orang	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Orang	82.500.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1 4 1 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	3 Orang	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Orang	22.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1 4 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum		12 Bulan	805.000.000			12 Bulan	863.500.000	
1 4 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	12 Bulan	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	55.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1 4 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	6 Paket	270.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Paket	275.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1 4 1 2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Petalatan rumah tangga yang tersedia	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	12 Bulan	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	33.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1 4 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor dan makan dan minum tamu serta rapat yang tersedia	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	12 Bulan	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	165.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif		
1 4 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah Cetak dan Penggandaan yang tersedia	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	12 Bulan	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	110.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
1 4 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah biaya rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksanaan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	12 bulan	205.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	225.500.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
1 4 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kendaraan dinas yang tersedia		12 bulan	267.000.000			12 bulan	289.700.000		
1 4 1 2.07 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	3 Unit	67.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	73.700.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
1 4 1 2.07 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	1 Unit	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	51.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
1 4 1 2.07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang tersedia	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	15 Unit	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 Unit	165.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
1 4 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	140.700.000			100 %	154.770.000		
1 4 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah Biaya tagihan listrik, wifi, dan air		12 Bulan	71.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	78.870.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
1 4 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga kebersihan kantor	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	12 Bulan	69.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	75.900.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
1 4 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	771.000.000			100 %	848.100.000		
1 4 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	12 Bulan	171.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	188.100.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
1 4 1 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	100 Persen	600.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	660.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
1 4 2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM), Persentase jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh rumah layak huni (SPM)		100 %	888.000.000			100 %	976.800.000		
1 4 2 2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	terlaksananya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		100 %	103.000.000			100 %	113.300.000		
1 4 2 2.01 1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	jumlah dokumen perumahan rawan bencana dan yang terkena relokasi	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	1 Dokumen	103.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	113.300.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
1 4 2 2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Layak Huni bagi masyarakat Korban bencana atau Relokasi Program Pemerintah		1 Paket	785.000.000			1 Paket	863.500.000		
1 4 2 2.03 1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	30 Unit	655.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 Unit	720.500.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
1 4 2 2.03 4	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	2 Unit	130.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	143.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
1 4 3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau		93,84 %	16.085.680.628			93,84 %	17.694.248.691		
1 4 3 2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen dan database Penetapan lokasi permukiman kumuh		1 Dokumen	1.430.000.000			1 Dokumen	1.573.000.000		
1 4 3 2.02 1	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	jumlah Dokumen penetapan lokasi perumahan dan permukiman Kumuh	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	1 Dokumen	305.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	335.500.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif		
1 5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				3.172.026.367				3.489.229.004		
1 5 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (BPBD)		100 %	2.001.460.634				100 %	2.201.606.697	
1 5 1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kualitas administrasi keuangan	100 %	1.529.121.828				100 %	1.682.034.011	
1 5 1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	12 Orang/Bulan	1.343.575.628	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Orang/Bulan	1.477.933.191	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	5 Dokumen	185.546.200	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 Dokumen	204.100.820	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan		12 Bulan	45.815.771		12 Bulan	50.397.348	
1 5 1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	12 Orang	45.815.771	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Orang	50.397.348	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum	100 %	194.803.841				100 %	214.284.225	
1 5 1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	12 Paket	4.229.585	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Paket	4.652.544	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	12 Paket	60.724.082	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Paket	66.796.490	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	129.850.174	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	142.835.191	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	75.003.797				100 %	82.504.177	
1 5 1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	12 Unit	75.003.797	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Unit	82.504.177	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	65.677.497				100 %	72.245.247	
1 5 1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	12 Laporan	29.983.175	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	32.981.493	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	12 Laporan	35.694.322	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	39.263.754	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	91.037.900				100 %	100.141.690	
1 5 1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	12 Unit	85.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Unit	93.500.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	12 Unit	6.037.900	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Unit	6.641.690	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM), Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM), Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)		100 %	1.170.565.733				100 %	1.287.622.306	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif		
1 5 3	2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	terlaksananya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		100 %	100.000.000			100 %	110.000.000	
1 5 3	2.01	2 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Sekolah	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Sekolah	110.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 3	2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Peningkatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		100 %	418.322.969			100 %	460.155.266	
1 5 3	2.02	1 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	70.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	77.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 3	2.02	4 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Unit	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Unit	55.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 3	2.02	7 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	228.322.969	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	251.155.266	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 3	2.02	8 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	70.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	77.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 3	2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		100 %	652.242.764			100 %	717.467.040	
1 5 3	2.03	2 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	5 Dokumen	608.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	669.240.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 3	2.03	4 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Orang	43.842.764	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Orang	48.227.040	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1 5			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			12.194.003.486				13.413.403.835	
1 5 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Satpol, Damkar dan Penyelamatan)		100 %	5.781.194.486		100 %	6.359.313.935	
1 5 1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Satpol.PP dan Damkar		100 %	51.302.000		100 %	56.432.200	
1 5 1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	5 Dokumen	34.220.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Dokumen	37.642.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
				tersedianya dokumen, renja perubahan, renja RKA, DPA, RKAP, DPAP, Renstra dan forum OPD Serta Terbayarnya gaji Operator SIPD/Fmis		12 Bulan			12 Bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1 5 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	2 Laporan	5.762.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	6.338.200	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1 5 1 2.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	4 Laporan	11.320.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	12.452.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1 5 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Administrasi Keuangan Satpol PP dan Damkar		100 %	5.100.697.606			100 %	5.610.767.367	
1 5 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	12 Orang/ bulan	5.006.396.606	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Orang/ bulan	5.507.036.267	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1 5 1 2.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	1 Dokumen	68.280.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	75.108.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		tersedianya jasa administrasi pengelolaan keuangan		12 Bulan				12 Bulan		
1 5 1 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	1 Laporan	4.921.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	5.413.100	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1 5 1 2.02 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	12 Laporan	21.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	23.210.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1 5 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah		100 %	11.460.000			100 %	12.606.000	
1 5 1 2.03 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	1 Laporan	11.460.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	12.606.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1 5 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	103.045.000			100 %	113.349.500	
1 5 1 2.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	5 Orang	103.045.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Orang	113.349.500	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1 5 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pengadministrasian Umum Satpol.PP dan Damkar		100 %	115.075.420			100 %	126.582.962	
1 5 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	1 Paket	1.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	1.210.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1 5 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	1 Paket	31.829.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	35.012.560	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1 5 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	1 Paket	9.311.720	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	10.242.892	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1 5 1 2.06 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	1 Laporan	3.317.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	3.648.810	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1 5 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	12 Laporan	69.517.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	76.468.700	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1 5 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pengadaan Barang Kantor Satpol.PP dan Damkar		100 %	79.121.100			100 %	87.033.210	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1 5 1 2.07 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	1 Unit	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	27.500.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1 5 1 2.07 7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	6 Unit	54.121.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Unit	59.533.210	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1 5 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya jasa Penunjang Pelayanan Kantor Satpol.PP dan Damkar		100 %	45.303.360			100 %	49.833.696	
1 5 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	12 Laporan	43.457.760	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	47.803.536	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1 5 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	12 Laporan	1.845.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	2.030.160	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1 5 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Kantor Satpol.PP dan Damkar		100 %	275.190.000			100 %	302.709.000	
1 5 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	1 Unit	7.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	8.250.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1 5 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	24 Unit	260.340.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		24 Unit	286.374.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1 5 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	6 Unit	7.350.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Unit	8.085.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1 5 2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan Perda, Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada (SPM)		100 %	3.137.899.000			100 %	3.451.688.900	
1 5 2 2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terciptanya Situasi yang aman dan tentram serta kondusif dalam wilayah Kabupaten Bulukumba		100 %	2.667.820.000			100 %	2.934.602.000	
		terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		100 %				100 %		
1 5 2 2.01 2	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	15 Kasus	2.655.660.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 Kasus	2.921.226.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		terbayarnya gaji non ASN Satuan Polisi Pamong Praja		12 Bulan				12 Bulan		
1 5 2 2.01 3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	1 Dokumen	10.480.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	11.528.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1 5 2 2.01 5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	30 Orang	1.680.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 Orang	1.848.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target	Pagu Indikatif
					terlaksananya kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum		12 Bulan				12 Bulan			
1	5	2	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terciptanya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Bulukumba		100 %	470.079.000			100 %	517.086.900	
1	5	2	2.02	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	1 Laporan	52.758.110	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Laporan	58.033.921	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	5	2	2.02	2	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	12 Laporan	11.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		12 Laporan	12.100.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	5	2	2.02	3	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	12 Laporan	406.320.890	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		12 Laporan	446.952.979	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	5	4			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran (SPM), Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)		100 %	3.274.910.000			100 %	3.602.401.000	
1	5	4	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah	Terciptanya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten Bulukumba		100 %	3.274.910.000			100 %	3.602.401.000	
1	5	4	2.01	2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	12 Laporan	3.213.660.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	3.535.026.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	5	4	2.01	6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	9 Unit	61.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9 Unit	67.375.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				4.568.619.829				5.099.049.289	
1	6	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Sosial)		100 %	2.440.858.669			100 %	2.684.944.536	
1	6	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Sistem Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	84.722.000			100 %	93.194.200	
1	6	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	4 Dokumen	46.020.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	50.622.000	Dinas Sosial
1	6	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	2 Dokumen	15.601.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	17.161.100	Dinas Sosial
1	6	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Tahunan LKJ, LKPI, LPPD, dan LAKIP yang Tersedia	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	5 Dokumen	23.101.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	25.411.100	Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1 6 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Capaian Kinerja Kesejahteraan ASN, dan Peningkatan sistem dan capaian Laporan Keuangan		100 %	2.104.661.174			100 %	2.315.127.291	
1 6 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	22 Orang/ bulan	1.967.661.174	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		22 Orang/ bulan	2.164.427.291	Dinas Sosial
1 6 1 2.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	12 Bulan	135.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	148.500.000	Dinas Sosial
1 6 1 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	1 Laporan	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	2.200.000	Dinas Sosial
1 6 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	120.678.125			100 %	132.745.938	
1 6 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	1 Paket	1.746.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	1.920.820	Dinas Sosial
1 6 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	1 Unit	5.940.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	6.534.000	Dinas Sosial
1 6 1 2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	1 Paket	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	1.100.000	Dinas Sosial
1 6 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	1 Paket	12.003.675	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	13.204.043	Dinas Sosial
1 6 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	12 Bulan	1.742.950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	1.917.245	Dinas Sosial
1 6 1 2.06 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu yang Tersedia	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	12 Bulan	4.021.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	4.423.430	Dinas Sosial
1 6 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	40 kali	94.224.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		40 kali	103.646.400	Dinas Sosial
1 6 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Jasa dan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	9.955.000			100 %	10.950.500	
		Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah berupa kendaraan roda dua dan meubeleu kantor		100 %				100 %		
1 6 1 2.07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	4 Unit	9.955.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Unit	10.950.500	Dinas Sosial
1 6 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	66.422.370			100 %	73.064.607	
1 6 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	12 Bulan	54.422.370	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	59.864.607	Dinas Sosial
1 6 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	12 Bulan	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	13.200.000	Dinas Sosial
1 6 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang Urusan pemerintah daerah		100 %	54.420.000			100 %	59.862.000	
1 6 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	12 Bulan	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	55.000.000	Dinas Sosial
1 6 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	12 Bulan	2.640.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	2.904.000	Dinas Sosial
1 6 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	12 Bulan	1.780.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	1.958.000	Dinas Sosial
1 6 2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan		94 %	256.684.700			94 %	282.353.170	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1 6 2 2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kemampuan, Keahlian, Keterampilan, Kesejahteraan serta Potensi Sumber Daya Pekerja Sosial dan Kelembagaan Sosial		100 %	256.684.700			100 %	282.353.170	
1 6 2 2.03 1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pendamping SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu) yang Mendapatkan Peningkatan Potensi dan Intensif	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	154.779.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	170.257.890	Dinas Sosial
1 6 2 2.03 2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Orang	38.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Orang	42.350.000	Dinas Sosial
		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang mendapatkan peningkatan potensi		12 Bulan				12 Bulan		
1 6 2 2.03 4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Karang Taruna yang Mendapatkan Peningkatan Potensi	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	55.664.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		95 %	61.231.280	Dinas Sosial
		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		10 Lembaga				10 Lembaga		
		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang mendapatkan peningkatan potensi		10 Orang				10 Orang		
1 6 2 2.03 5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (Visit Home)	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	7.740.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	8.514.000	Dinas Sosial
1 6 4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (SPM)Persentase Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (SPM)Persentase Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM)Persentase Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti (SPM)		100 %	417.505.300			100 %	459.255.830	
1 6 4 2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Meningkatnya Layanan Perlindungan Rehabilitasi Sosial dan Kesejahteraan PMKS (Penyandang Disabilitas, Lansia Terlantar, Anak Terlantar, serta Gelandangan Pengemis) diluar Panti Sosial.		95 %	337.924.800			95 %	371.717.280	
1 6 4 2.01 1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Orang	121.278.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Orang	133.406.350	Dinas Sosial
		Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Lansia Terlantar, dan Anak Terlantar yang Mendapatkan Bantuan Permakanan		65 Orang				65 Orang		
1 6 4 2.01 2	Penyediaan Sandang	Jumlah Anak Terlantar yang Mendapatkan Bantuan Pakaian	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 Orang	38.512.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		60 Orang	42.363.640	Dinas Sosial
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota		100 Orang				100 Orang		
1 6 4 2.01 3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Orang	148.283.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Orang	163.112.290	Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif				
			Jumlah Penyandang Disabilitas Produktif yang Mendapatkan Bantuan UEP		38 Paket				38 Paket				
1	6	4	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Penyandang Disabilitas, Lansia Terlantar, dan Anak Terlantar yang Mendapatkan Layanan Rujukan ke Fasilitas Rehabilitasi Sosial	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	29.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	32.835.000	Dinas Sosial
						Jumlah Penyandang Disabilitas, Lansia Terlantar, dan Anak Terlantar yang Mendapatkan Layanan Rujukan ke Fasilitas Rehabilitasi Sosial		12 Orang			12 Orang		
1	6	4	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Meningkatnya Layanan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan, dan Kesejahteraan Sosial PMKS Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan Napza diluar Panti Sosial		95 %	79.580.500		95 %	87.538.550	
1	6	4	2.02	5	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Paket	49.950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8 Paket	54.945.000	Dinas Sosial
1	6	4	2.02	7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Paket	14.999.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Paket	16.499.450	Dinas Sosial
1	6	4	2.02	13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah PMKS Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Rujukan Fasilitas Rehabilitasi Sosial	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	14.631.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	16.094.100	Dinas Sosial
1	6	5			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Jumlah PMKS yang Tervalidasi dalam data terpadu DTKS dan SIKS-NGPersentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial		95 %	795.723.410		95 %	948.863.228	
1	6	5	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Meningkatnya Layanan Penjangkauan, Rujukan dan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		100 %	15.000.000		100 %	16.500.000	
1	6	5	2.01	1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	16.500.000	Dinas Sosial
1	6	5	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Layanan dan Pengelolaan data Fakir Miskin dan PMKS, serta Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi dan Kesejahteraan Ekonomi dan Keluarga fakir Miskin dan PMKS			780.723.410			932.363.228	
1	6	5	2.02	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendamping dan Operator yang Memperoleh Biaya Operasional Pendataan dan Pengelolaan Data (validasi Data DTKS,PMKS,PBI BPJS Kesehatan) dan Pelabelan Penerimaan Bantuan	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	69.383.925	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	76.322.318	Dinas Sosial
						Jumlah Pendamping dan Operator yang Mendapatkan Bimbingan Tehknis		50 Orang			50 Orang		
1	6	5	2.02	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Masyarakat Miskin yang Memperoleh Surat Rekomendasi untuk BPJS Kesehatan	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	261.627.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	287.789.700	Dinas Sosial
						Jumlah Pemberian Beasiswa Penyelesaian Study yang akan Diberikan Kepada Mahasiswa (Kurang Mampu)		8 Orang			8 Orang		
						Jumlah Pemberian Beasiswa Penyelesaian Study yang akan Diberikan Kepada Mahasiswa (Kurang Mampu)		12 Orang			12 Orang		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif				
			Jumlah Pendamping PKH yang Mendapatkan Biaya Operasional Penguatan Program Keluarga Harapan dan Layanan Sosialisasi Stunting		48 Orang				48 Orang				
1	6	5	2.02	4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Orang	449.712.485	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 Orang	568.251.210	Dinas Sosial
1	6	6			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (SPM)		100 %	565.000.000		100 %	621.500.000	
1	6	6	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Meningkatnya Bantuan Logistik Bencana bagi Korban Bencana Alam dan Sosial		100 %	30.000.000		100 %	33.000.000	
1	6	6	2.01	1	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	33.000.000	Dinas Sosial
						"Jumlah Persediaan Makanan Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sosial Kab/Kota		12 Bulan			12 Bulan		
1	6	6	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kemampuan Keterampilan Petugas dan Penanggulangan Bencana dalam Penanganan Bencana Alam dan Sosial		100 %	535.000.000		100 %	588.500.000	
1	6	6	2.02	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	535.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	588.500.000	Dinas Sosial
						Jumlah Petugas Bencana (TAGANA) yang Memperoleh Insentif		12 Bulan			12 Bulan		
1	6	7			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan yang Dipelihara		100 %	92.847.750		100 %	102.132.525	
1	6	7	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pelestarian Taman Makam Pahlawan, Nilai-Nilai Kepahlawanan, Kejuangan, Keperintisan dan KSN		3 Buah	92.847.750		3 Buah	102.132.525	
1	6	7	2.01	2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Mendapatkan Pemeliharaan	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Paket	92.847.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Paket	102.132.525	Dinas Sosial
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				19.174.442.924			21.091.845.089	
2	11	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan)		100 %	6.164.109.041		100 %	6.780.477.821	
2	11	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		38 Dokumen	39.575.900		38 Dokumen	43.533.490	
2	11	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	16 Dokumen	35.642.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	16 Dokumen	39.206.200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	12 Bulan	3.933.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	4.327.290	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	5.329.630.705		100 %	5.862.593.775	
2	11	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	12 Bulan	5.033.360.439	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	5.536.696.483	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif					
2	11	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	12 Bulan	277.486.560	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	305.235.216	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	12 Bulan	18.783.706	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	20.662.076	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Umum		100 %	338.923.800			100 %	372.774.058	
2	11	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia		12 Bulan	7.133.629	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	7.832.725	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket				1 Paket		
2	11	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket	7.971.227	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	8.752.408	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
						Tersedianya bahan dan alat kebersihan kantor DLHK		12 Bulan				12 Bulan		
2	11	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	1 Paket	86.181.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	94.799.100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
						Tersedianya alat tulis kantor dan makan minum rapat staf dan tamu		12 Bulan				12 Bulan		
2	11	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	5.956.650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	6.540.402	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket				1 Paket		
2	11	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	12 Dokumen	2.437.560	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	2.681.316	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
						Tersedianya bahan bacaan pegawai kantor DLHK		12 Bulan				12 Bulan		
2	11	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	12 Bulan	229.243.734	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	252.168.107	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah		100 %	144.110.809			100 %	158.521.889	
2	11	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	1 Paket	21.960.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	24.156.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya		12 Bulan	122.150.809	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	134.365.889	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1 Paket				1 Paket		
2	11	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah		100 %	188.954.445			100 %	207.849.889	
2	11	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	12 Bulan	2.745.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	3.019.500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya tagihan listrik dan Wifi	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	12 Bulan	175.229.445	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	192.752.389	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 Bulan				12 Bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif				
2	11	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor DLHK	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	12 Bulan	10.980.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	12.078.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
					Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12 Bulan				12 Bulan		
2	11	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah		12 Bulan	122.913.382		12 Bulan	135.204.720	
2	11	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pajak Kendaraan Dinas/operasional roda 4 ,Roda 3 dan roda 2 yang terbayarkan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	12 Bulan	101.065.962	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	111.172.558	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
					Tersedianya Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		12 Bulan				12 Bulan		
2	11	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perbaikan peralatan kerja	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	12 Bulan	11.847.420	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	13.032.162	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
					Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		12 Bulan				12 Bulan		
2	11	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana prasarana gedung kantor terpelihara	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	12 Bulan	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	11.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
					Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		12 Bulan				12 Bulan		
2	11	2			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan		85 %	75.000.000		85 %	82.500.000	
2	11	2	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPPLH dan Daya Dukung Daya Tampung LH		12 Bulan	75.000.000		12 Bulan	82.500.000	
					Terlaksananya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		100 %				100 %		
2	11	2	2.01	1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPPLH dan Daya Dukung Daya Tampung LH	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	82.500.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
					Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota		12 Bulan				12 Bulan		
2	11	3			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Operasionalisasi TPA/ TPST/ SPA di kabupaten/kota		24,30 %	396.962.177		24,30 %	436.658.393	
2	11	3	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung Iklim yang dibentuk untuk menjaga Kerusakan Lingkungan Akibat Perubahan Iklim		23 Lokasi	297.949.345		23 Lokasi	327.744.278	
					Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		100 %				100 %		
2	11	3	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah kampung yang melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	154.775.947	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	170.253.541	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
					Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		12 Bulan				12 Bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif					
2	11	3	2.01	3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian liambah air dan udara di laboratorium,terlaksananya IHT bagi personil laboratorium,tersedianya bahan kimia,terpeliharanya alat laboratorium	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	143.173.398	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	157.490.737	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
						Terlaksananya Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan		12 Bulan				12 Bulan		
2	11	3	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Presentase Data Kualitas Air Sungai di Kabupaten Bulukumba		6 sungai	39.015.192			6 sungai	42.916.711	
2	11	3	2.02	1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	39.015.192	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	42.916.711	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	3	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Presentase Terahabilitasinya kawasan Pantai Lahan Kritis		20000 Batang	59.997.640			20000 Batang	65.997.404	
2	11	3	2.03	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Penanaman Mangrove		12 Bulan	59.997.640	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	65.997.404	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
						Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi		12 Bulan				12 Bulan		
2	11	4			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Presentase Terjaganya Kelestarian Sumber Daya,Fungsi Kawasan Hutan ,Keanekaragaman Hayati (Flora Dan Fauna) Serta Rekonstruksi Tata Batas Pada Kawasan Tahura Dikecamatan Bt,Bahari		85 %	1.270.000.000			85 %	1.397.000.000	
2	11	4	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	% Pemenuhan Taman Kehati dan TAHURA yang dikelola dengan baik		85 %	1.270.000.000			85 %	1.397.000.000	
						Terlaksanya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		100 %				100 %		
2	11	4	2.01	4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah RTH yang terehab dan terbangun dalam Kota,Pembangunan Rumah Bibit Pohon dan tanaman Hias, pengadaan pohon dan pemangkasan		12 Bulan	1.270.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	1.397.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
						Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola		12 Bulan				12 Bulan		
2	11	5			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani		100 %	52.698.290			100 %	57.968.119	
2	11	5	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	persentase limbah B3 yang dkendalikan dengan baik		48 %	52.698.290			48 %	57.968.119	
2	11	5	2.01	2	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3		1 Laporan	52.698.290	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	57.968.119	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
						Jumlah verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara LB3		12 Bulan				12 Bulan		
						Terlaksananya Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3		12 Bulan				12 Bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif					
2	11	6												
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Perusahaan Yang Memiliki Izin K3Presentase Penyelesaian Terhadap Pengaduan Lingkungan HidupPersentase Ketersediaan Data Potensi Kerusakan 10 Kecamatan Dan Peningkatan 10 Kecamatan Tentang Upaya Pengendalian Kerusakan Serta Status Lingkungan Hidup Daerah Setiap Tahun		85 %	72.891.555				85 %	80.180.710		
2	11	6	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pembinaan dan Pengawasan usaha dan atau kegiatan yang izin LH dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota		85 %	72.891.555			85 %	80.180.710	
2	11	6	2.01	3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Usaha dan atau kegiatan yang telah memiliki izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Pelaku Usaha	72.891.555	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 Pelaku Usaha	80.180.710	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
						Meningkatnya Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		12 Bulan				12 Bulan		
2	11	7			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Presentase cakupan pengakuan keberadaan MHA , kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		100 %	76.860.000			100 %	84.546.000	
2	11	7	2.02		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Presentase Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan HAK MHA terkait Perlindungan dan Pengelolaan LH		100 %	76.860.000			100 %	84.546.000	
2	11	7	2.02	1	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Peningkatan Kapasitas dan kompetensi Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup		1 Kelompok	76.860.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Kelompok	84.546.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
						Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan		12 Bulan				12 Bulan		
2	11	8			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup kepada masyarakat		100 %	164.700.000			100 %	181.170.000	
2	11	8	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pengetahuan masyarakat di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup		30 Sekolah	164.700.000			30 Sekolah	181.170.000	
2	11	8	2.01	2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah pendampingan gerakan peduli Lingkungan Hidup di Sekolah	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 sekolah	164.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 sekolah	181.170.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
						Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup		12 Bulan				12 Bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif					
2	11	#		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan rekomendasi penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti		100 %	31.675.763			100 %	34.843.339		
2	11	#	2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Presentase Tindak lanjut Pengaduan			31.675.763				34.843.339		
2	11	#	2.01	1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Pengaduan	31.675.763	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Pengaduan	34.843.339	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
					Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Dikelola			12 Bulan				12 Bulan		
2	11	#		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Presentase Sampah Yang Terkelolah		100 %	10.869.546.098			100 %	11.956.500.707		
2	11	#	2.01	Pengelolaan Sampah	Terlaksananya Pengelolaan Sampah		100 %	10.869.546.098			100 %	11.956.500.707		
2	11	#	2.01	3	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan sampah dengan melakukan pemilahan pengumpulan pengangkutan dan pengolahan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten Kota	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	7.318.452.395	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	8.050.297.634	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
					Terlaksananya Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota			12 Bulan				12 Bulan		
2	11	#	2.01	4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah peran serta masyarakat dalam pengurangan Sampah yang menunjang program Adipura	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	196.832.531	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	216.515.784	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
					Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah			12 Bulan				12 Bulan		
2	11	#	2.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	sarana dan Prasarana Persampahan	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	3.354.261.172	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	3.689.687.289	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
					Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada			12 Bulan				12 Bulan		
					Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada			12 Bulan				12 Bulan		
3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
3	28			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				233.539.719					256.893.689	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
3 28 4	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Konservasi daya hayati dan ekosistem yang terlaksana		100 %	233.539.719			100 %	256.893.689	
3 28 4	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	% Pemenuhan Terjaganya Kelestarian Sumber daya, Fungsi Kawasan Hutan ,Keanekaragaman Hayati (Flora dan Fauna) serta Rekonstruksi Tata Batas Pada Kawasan TAHURA dikecamatan Bt.Bahari		100 %	233.539.719			100 %	256.893.689	
3 28 4	2.01 1	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	Jumlah database dan terehabilitasinya ekosistem TAHURA	Kab. Bulukumba, Bonto Bahari, Semua Kelurahan	100 %	59.908.477	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	65.899.324	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 4	2.01 5	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan Sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah database dan terehabilitasinya ekosistem TAHURA	Kab. Bulukumba, Bonto Bahari, Semua Kelurahan	25 Hektar	116.071.117	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25 Hektar	127.678.228	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 4	2.01 8	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah database dan terehabilitasinya ekosistem TAHURA	Kab. Bulukumba, Bonto Bahari, Semua Kelurahan	3 Kelompok	57.560.125	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Kelompok	63.316.137	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2										
2 12						5.835.983.725			6.412.582.097	
2 12 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)		100 %	5.035.783.725			100 %	5.532.362.097	
2 12 1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Renstra, renja, SOP, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, RKT, Sirup, dan IKU.Tersusunnya RKA Tersusunnya RKA-PTersusunnya DPATersusunnya DPA-PTersusunnya Laporan KinerjaTersusunnya laporan bulanan, triwulan dan semester serta laporan evaluasi renja, LPPD dan Sensus BMD		100 %	21.724.910		100 %	23.897.401	
2 12 1	2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen	1.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 Dokumen	1.650.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Tersusunnya Renstra, Renja,SOP,Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, RKT, Sirup,dan IKU		10 dokumen			10 dokumen		
2 12 1	2.01 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 Dokumen	3.300.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Tersusunnya RKA		1 dokumen			1 dokumen		
2 12 1	2.01 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		5 Dokumen	1.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Dokumen	1.815.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 1	2.01 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		5 Dokumen	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Dokumen	3.300.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 1	2.01 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		5 Dokumen	5.574.910	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Dokumen	6.132.401	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 1	2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Kinerja		1 dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen	5.500.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 1	2.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		20 dokumen	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 dokumen	2.200.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2.12.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Lancarnya administrasi pelaksanaan Tugas ASN Lancarnya penatausahaan keuangan SKPD Lancarnya penyusunan akuntansi SKPD Tersusunnya laporan akhir tahun Tersedianya bahan tanggapan pemeriksaan. Tersusunnya laporan keuangan secara berjenjang Tersusunnya laporan akhir tahun		100 %	2.905.523.815			100 %	3.196.076.196	
2.12.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		14 bulan	2.865.523.815	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14 bulan	3.152.076.196	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Dokumen	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	38.500.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1.2.02.6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya bahan tanggapan pemeriksaan.		1 Dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.500.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya sapras kedisiplinan pegawai, Tersedianya pakaian dinas, Terlaksananya pendataan dan pengolahan administrasi pegawai, Terlaksananya sistem informasi kepegawaian, Terlaksananya pendidikan dan pelatihan tupoksi, terlaksananya sosialisasi peraturan perundang- undangan, Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		100 %	44.250.000			100 %	48.675.000	
2.12.1.2.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		2 Orang	44.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Orang	48.675.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor, Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor, Tersedianya peralatan rumah tangga kantor, Tersedianya bahan logistik kantor, tersedianya barang cetak dan penggandaan, Tersedianya bahan bacaan, Tersedianya makanan dan minuman tamu kantor, Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, Terlaksananya penatausahaan arsip dinamis, Terlaksananya sistem pemerintahan berbasis elektronik		100 %	342.870.000			100 %	377.157.000	
2.12.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	2.200.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	2.200.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	331.370.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	364.507.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	7.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	8.250.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2.12.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	"Tersedianya Kendaraan dinas operasional/ lapangan, Tersedianya Mebel, Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya, Tersedianya aset tetap lainnya, Tersedianya Gedung Kantor atau bangunan lainnya, Tersedianya Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya, Tersedianya Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya"		100 %	1.150.415.000			100 %	1.265.456.500	
2.12.1.2.07.5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1 Paket	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	11.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Paket	1.140.415.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	1.254.456.500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Tersedianya Jasa Surat menyurat, Tersedianya Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik, Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor, Tersedianya jasa pelayanan umum kantor"		100 %	266.000.000			100 %	285.600.000	
2.12.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Paket	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	2.200.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Bulan	140.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	147.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		100 %	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	110.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Bulan	24.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	26.400.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas jabatan beserta pembayaran pajaknya, Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional beserta pembayaran pajaknya, Terpeliharanya mebel kantor., Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, Tersedianya pemeliharaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya, Tersedianya pemeliharaan Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya, Tersedianya pemeliharaan Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		100 %	305.000.000			100 %	335.500.000	
2.12.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas jabatan beserta pembayaran pajaknya		1 Unit	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	66.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional beserta pembayaran pajaknya		9 Unit	65.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9 Unit	71.500.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor		20 Unit	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Unit	27.500.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya pemeliharaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya		1 Paket	90.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	99.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2 12 1 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya pemeliharaan Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		1 Paket	65.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	71.500.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan penerbitan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk		100 %	546.000.000			100 %	600.600.000	
2 12 2 2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk		100 %	546.000.000			100 %	600.600.000	
2 12 2 2.01 1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan		5 Dokumen	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	16.500.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 2 2.01 4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		12 Bulan	531.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	584.100.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan penerbitan akta kelahiran, cakupan penerbitan akta kematian, rasio pasangan berakta nikah, rasio bayi berakta kelahiran.		90 %	208.950.000			90 %	229.845.000	
2 12 3 2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil		100 %	192.500.000			100 %	211.750.000	
2 12 3 2.01 2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan		12 bulan	188.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	207.350.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 3 2.01 3	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil		5 Dokumen	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	4.400.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 3 2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		12 bulan	15.450.000			12 bulan	16.995.000	
2 12 3 2.02 1	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam		12 bulan	8.450.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	9.295.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 3 2.02 3	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil		12 bulan	7.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	7.700.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 3 2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Terlaksananya koordinasi dengan instansi vertikal terkait, koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam penertiban pelayanan pencatatan sipil.		100 %	1.000.000			100 %	1.100.000	
2 12 3 2.03 3	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan		12 Bulan	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	1.100.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah saluran sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil		3 Buah	41.750.000			3 Buah	45.925.000	
2 12 4 2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	terlaksananya pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian data base kependudukan			8.250.000				9.075.000	
2 12 4 2.01 1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan		5 Dokumen	3.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	4.125.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 4 2.01 2	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan		5 Dokumen	4.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	4.950.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif					
2	12	4	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.		100 %	33.500.000			100 %	36.850.000	
2	12	4	2.03	3	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		12 Bulan	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	11.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	4	2.03	5	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		4 Buah	17.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Buah	19.525.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	4	2.03	6	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi		5 Dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	5.500.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	4	2.03	7	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat		12 Bulan	750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	825	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	5			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Pesentase buku agregat kependudukan yang diterbitkan per tahun		100 %	3.500.000			100 %	3.850.000	
2	12	5	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	tersusunnya dokumen Profil Kependudukan		100 %	3.500.000			100 %	3.850.000	
2	12	5	2.01	2	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun		5 Dokumen	3.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	3.850.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				5.536.115.235				6.205.193.559	
2	13	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)		100 %	3.599.471.520			100 %	3.959.418.673	
2	13	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100 %	33.500.000			100 %	36.850.000	
2	13	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		9 Dokumen	31.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9 Dokumen	34.100.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		12 Laporan	2.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	2.750.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu		100 %	3.050.661.686			100 %	3.355.727.855	
2	13	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	33 Orang/ bulan	2.971.022.076	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		33 Orang/ bulan	3.268.124.284	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	12 Dokumen	75.139.610	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	82.653.571	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	6 Laporan	4.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Laporan	4.950.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah		100 %	13.830.000			100 %	15.213.000	
2	13	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	2 Laporan	13.830.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	15.213.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	60.000.000			100 %	66.000.000	
2	13	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Orang	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Orang	66.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif		
2 13 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	190.746.999				100 %	209.821.699	
2 13 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Paket	42.976.899	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Paket	47.274.589		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 1 2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket	2.763.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	3.039.300		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		5 Paket	64.047.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Paket	70.451.810		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		ketersediaan logistik kantor		100 %				100 %			
2 13 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		24 Laporan	80.960.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		24 Laporan	89.056.000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	-			100 %	-		
2 13 1 2.07 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		100 %	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	-		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 1 2.07 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		100 %	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	-		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	143.335.000			100 %	157.668.500		
2 13 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		24 Laporan	57.585.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		24 Laporan	63.343.500		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	85.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	94.325.000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terbayarkan		100 %	107.397.835			100 %	118.137.619		
2 13 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		8 Unit	23.757.835	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 Unit	26.133.619		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		68 Unit	13.640.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		68 Unit	15.004.000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Unit	70.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	77.000.000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 2	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Jumlah Desa yang memiliki Penataan Wilayah Desa Yang Baik		50 %	45.510.000			50 %	50.061.000		
2 13 2 2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang memiliki Penataan Wilayah Desa Yang Baik		50 %	45.510.000			50 %	50.061.000		
		Jumlah Kawasan Perdesaan yang terfasilitasi		109 Desa				109 Desa			
2 13 2 2.01 2	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya		90 Desa	45.510.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		90 Desa	50.061.000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 3	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Jumlah Desa yang memiliki Penataan Wilayah Desa Yang Baik		100 %	100.000.000			100 %	110.000.000		
2 13 3 2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Terlaksananya fasilitasi kerja sama antar desa		12 bulan	100.000.000			12 bulan	110.000.000		
2 13 3 2.01 3	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		10 Dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Dokumen	110.000.000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Jumlah Desa yang memiliki administrasi Pemerintahan Desa yang Baik		100 %	1.536.490.100			100 %	1.744.198.410		
2 13 4 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa		100 %	1.536.490.100			100 %	1.744.198.410		
2 13 4 2.01 2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa		109 Dokumen	52.508.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		109 Dokumen	57.758.800		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif			
2 8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					933.754.000				1.027.129.400		
2 8 2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada Belanja Daerah APBD		50 %		65.000.000				50 %	71.500.000	
2 8 2	2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase ARG pada Belanja Daerah		55 %		30.000.000				55 %	33.000.000	
2 8 2	2.01 4 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	37 Perangkat Daerah		30.000.000	Pajak Rokok			37 Perangkat Daerah	33.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 8 2	2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan pada organisasi kemasyarakatan perempuan yg mendapatkan pemberdayaan di bidang ekonomi, politik, hukum, dan sosial		55 %		35.000.000				55 %	38.500.000	
2 8 2	2.02 1 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	5 Dokumen		35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5 Dokumen	38.500.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 8 3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu		100 %		226.773.750				100 %	249.451.125	
2 8 3	2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		100 %		95.000.000				100 %	44.000.000	
2 8 3	2.01 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	5 Dokumen		95.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik			5 Dokumen	44.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 8 3	2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan korban kekerasan yang memperoleh layanan rujukan lanjutan komprehensif		55 %		100.019.000				55 %	170.520.900	
2 8 3	2.02 1 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya honor Tim Reaksi Cepat		5 Orang			Pajak Rokok			5 Orang	60.500.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 8 3	2.02 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	27 Layanan		100.019.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik			27 Layanan	110.020.900	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 8 3	2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan perlindungan perempuan yang terstandarisasi		55 %		31.754.750				55 %	34.930.225	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2 8 3 2.03 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	6 Orang	31.754.750	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		6 Orang	34.930.225	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 8 4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Jumlah Layanan Pembinaan Keluarga		25 %	172.000.000			25 %	189.200.000	
2 8 4 2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan pembelajaran keluarga yang terstandarisasi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga		30 %	80.000.000			30 %	88.000.000	
2 8 4 2.01 2	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	2 Dokumen	80.000.000	Pajak Rokok		2 Dokumen	88.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 8 4 2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		30 %	92.000.000			30 %	101.200.000	
2 8 4 2.03 1	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	2 Layanan	92.000.000	Pajak Rokok		2 Layanan	101.200.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 8 6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Nilai Capaian Kabupaten/Kota Layak Anak		650 Nilai	120.000.000			650 Nilai	132.000.000	
2 8 6 2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		100 %	120.000.000			100 %	132.000.000	
2 8 6 2.01 1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	4 Organisasi	120.000.000	Pajak Rokok		4 Organisasi	132.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 8 7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Jumlah anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten		77 %	349.980.250			77 %	384.978.275	
2 8 7 2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan model pencegahan kekerasan terhadap anak		77 %	72.950.000			77 %	80.245.000	
2 8 7 2.01 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	2 Dokumen	72.950.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2 Dokumen	80.245.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 8 7 2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak yang di kuatkan dan dikembangkan di lintas kab/kota		77 %	231.979.000			77 %	255.176.900	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2 8 7 2.02 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	27 Layanan	161.979.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		27 Layanan	178.176.900	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 8 7 2.02 4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	10 Dokumen	70.000.000	Pajak Rokok		10 Dokumen	77.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 8 7 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	presentase anak korban kekerasan yang memperoleh layanan komprehensif		77 %	45.051.250			77 %	49.556.375	
2 8 7 2.03 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	2 Dokumen	45.051.250	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2 Dokumen	49.556.375	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				13.573.294.632				14.250.221.537	
2 14 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas PPKB, PPPA)		100 %	7.318.829.293			100 %	7.370.309.665	
2 14 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu		100 %	92.626.705			100 %	101.889.873	
2 14 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	4 Dokumen	10.769.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	11.846.890	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 1 2.01 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	2 Dokumen	65.639.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	72.203.450	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 1 2.01 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	2 Dokumen	12.117.525	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	13.329.775	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	12 Laporan	2.599.780	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		12 Laporan	2.859.758	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 1 2.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Laporan	1.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	1.650.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2 14 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu		100 %	5.554.114.202			100 %	6.109.525.622	
2 14 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		53 Orang/ bulan	5.435.931.822	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		53 Orang/ bulan	5.979.525.004	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 1 2.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	12 Dokumen	115.598.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	127.157.800	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 1 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Laporan	2.584.380	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	2.842.818	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah yang tersusun		3 Laporan	22.000.000			3 Laporan	24.200.000	
2 14 1 2.03 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	12 Dokumen	17.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	18.700.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 1 2.03 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	2 Laporan	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	5.500.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor		100 %	627.806.485			100 %	690.587.134	
2 14 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Paket	7.653.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	8.418.575	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Paket	5.806.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	6.386.875	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Paket	153.690.075	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	169.059.083	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Paket	4.979.910	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	5.477.901	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2 14 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	24 Laporan	455.677.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		24 Laporan	501.244.700	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah		100 %	170.431.869			100 %	187.475.056	
2 14 1 2.07 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	4 Unit	120.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Unit	132.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 1 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	4 Unit	35.581.869	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Unit	39.140.056	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 1 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	3 Unit	14.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	16.335.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	642.381.032			100 %	144.554.080	
2 14 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	12 Laporan	73.812.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	81.194.080	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	12 Laporan	568.568.232	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	63.360.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara/ direhabilitasi		100 %	209.469.000			100 %	112.077.900	
2 14 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Unit	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	27.500.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	6 Unit	45.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Unit	49.500.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 1 2.09 5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	4 Unit	120.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Unit	13.662.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif		
2 14 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Unit	4.884.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	5.372.400	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2 14 1 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	3 Unit	8.365.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	9.201.500	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2 14 1 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	3 Unit	6.220.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	6.842.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2 14 2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Pembinaan Kebijakan Dan Strategi Pengendalian Penduduk (Penyusunan Grand Design , Penyusunan Profil Kependudukan/Paremeter Dan Proyeksi Penduduk)		100 %	226.244.530			100 %	248.868.983		
2 14 2 2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		100 %	49.810.530			100 %	54.791.583		
2 14 2 2.01 1	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana))	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	11 Dokumen	14.680.730	Pajak Rokok		11 Dokumen	16.148.803	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2 14 2 2.01 9	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal yang Terlaksana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 sekolah	35.129.800	Pajak Rokok		5 sekolah	38.642.780	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2 14 2 2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Bahan-bahan dan Data untuk pengambilan kebijakan pemetaan pengendalian penduduk yang tersedia		12 Bulan	176.434.000			12 Bulan	194.077.400		
2 14 2 2.02 8	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Unit	9.801.700	Pajak Rokok		1 Unit	10.781.870	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2 14 2 2.02 11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	12 Dokumen	11.970.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		12 Dokumen	13.167.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2 14 2 2.02 12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	12 Laporan	46.662.300	Pajak Rokok		12 Laporan	51.328.530	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2 14 2 2.02 13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	12 Dokumen	108.000.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		12 Dokumen	118.800.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Program Keluarga Berencana, Pelayanan Kontrasepsi Dan Kelembagaan Jaringan KB		100 %	3.171.823.809			100 %	3.489.006.189	
2 14 3 2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal yang terlaksana		10 Kecamatan	701.105.000			10 Kecamatan	771.215.500	
2 14 3 2.01 1	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	4 Organisasi	4.411.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		4 Organisasi	4.852.100	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 3 2.01 2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	2 Dokumen	25.000.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		2 Dokumen	27.500.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 3 2.01 4	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	2 Dokumen	70.604.000	DAK Non Fisik-BOKB-BOKB		2 Dokumen	77.664.400	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 3 2.01 6	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	10 Laporan	157.030.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		10 Laporan	172.733.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 3 2.01 7	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	10 Laporan	405.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Laporan	445.500.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 3 2.01 8	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	4 Laporan	39.060.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		4 Laporan	42.966.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 3 2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang Didayagunakan		10 Kecamatan	652.800.000			10 Kecamatan	718.080.000	
2 14 3 2.02 4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		68 Orang	652.800.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		68 Orang	718.080.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif		
2 14 3 2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Faskes yang teregister yang mendapat ketersediaan alat kontrasepsi MKJP		21 Faskes	1.303.996.269				21 Faskes	1.434.395.895	
2 14 3 2.03 1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	21 Laporan	9.765.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB			21 Laporan	10.741.500	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 3 2.03 3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	100 Orang	471.600.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB			100 Orang	518.760.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 3 2.03 5	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokasi) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokasi) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Dokumen	62.402.420	Pajak Rokok			1 Dokumen	68.642.662	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 3 2.03 6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	3 Unit	730.629.749	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB			3 Unit	803.692.723	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 3 2.03 7	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	50 Orang	19.999.100	Pajak Rokok			50 Orang	21.999.010	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 3 2.03 8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	11 Laporan	9.600.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB			11 Laporan	10.560.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 3 2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Pelayanan KB dan KR Bergerak/Bakti Sosial di Wilayah dan Sasaran Khusus		10 Kecamatan	513.922.540				10 Kecamatan	565.314.794	
2 14 3 2.04 1	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	5 Organisasi	134.422.540	Pajak Rokok			5 Organisasi	147.864.794	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 3 2.04 3	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	20 Kampung	379.500.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB			20 Kampung	417.450.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Jumlah Kecamatan terkait Keluarga Yang Mandiri, Tenram Dan Bahagia (Keluarga Berkualitas)		100 %	2.856.397.000				100 %	3.142.036.700	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif		
2 14 4 2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang terlaksana		10 Kecamatan	2.856.397.000				10 Kecamatan	3.142.036.700	
2 14 4 2.01 2	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	19 Unit	631.244.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		19 Unit	694.368.400	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2 14 4 2.01 3	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	5 Laporan	34.999.500	Pajak Rokok		5 Laporan	38.499.450	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2 14 4 2.01 4	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	60 Orang	31.443.300	Pajak Rokok		60 Orang	34.587.630	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2 14 4 2.01 5	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	20 Orang	2.048.250.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		20 Orang	2.253.075.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2 14 4 2.01 7	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	5 Laporan	42.499.300	Pajak Rokok		5 Laporan	46.749.230	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2 14 4 2.01 8	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	5 Laporan	67.960.900	Pajak Rokok		5 Laporan	74.756.990	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2 15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				16.111.321.496				18.643.485.362		
2 15 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik ((Dinas Perhubungan)		100 %	14.596.293.708			100 %	16.976.953.696		
2 15 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Program SKPD dan Renstra, Lakip.Iku, RKA, DPA, RA, Perjanjian Kinerja SPIP, tersedianya monitoring, evaluasi program kegiatan SKPD terlaksana Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber PAD melalui Uji Petik.		5 Dok	43.738.600			5 Dok	56.553.000		
2 15 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	5 Dokumen	43.738.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	56.553.000	Dinas Perhubungan	
2 15 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan pelayanan administrasi umum, peningkatan pelayanan administrasi keuangan		12 Bulan	4.840.120.628			12 Bulan	5.324.132.691		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif				
2	15	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	51 Orang/ bulan	4.713.320.428	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	51 Orang/ bulan	5.184.652.471	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Belanja Jasa Admnistrasi Keuangan		12 Bulan	32.380.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	35.618.220	Dinas Perhubungan
					Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12 Bulan			12 Bulan		
					Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12 Bulan			12 Bulan		
2	15	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Bulan	94.420.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	103.862.000	Dinas Perhubungan
					Jumlah penatausahaan keuangan SKPD			12 Bulan			12 Bulan		
					Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Bulan			12 Bulan		
2	15	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Tersedianya Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur		1 Orang	74.600.000		1 Orang	82.500.000	
2	15	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		3 Orang	74.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Orang	82.500.000	Dinas Perhubungan
					Jumlah Pelaksana Latpim 3			1 Orang			1 Orang		
					Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			3 Orang			3 Orang		
2	15	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum		12 Bulan	161.187.475		12 Bulan	183.193.763	
2	15	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	3.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	3.850.000	Dinas Perhubungan
					Jumlah Penyediaan Jasa Pembayaran komunikasi, air, listrik, dan Internet, penerangan bangunan kantor, PJU			12 Bulan			12 Bulan		
					Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1 Paket			1 Paket		
2	15	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	12 Paket	97.687.675	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Paket	113.343.983	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi sinkronisasi dan belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah		34 Kali	59.999.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	34 Kali	65.999.780	Dinas Perhubungan
					Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			34 Kali			34 Kali		
					Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			34 Kali			34 Kali		
2	15	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah Peningkatan pelayanan administrasi Umum		12 Bulan	9.428.868.500		12 Bulan	11.278.017.886	
2	15	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	12 Laporan	9.398.253.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	11.244.341.496	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Belanja Jasa peralatan kerja		12 Unit	4.580.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Unit	5.038.000	Dinas Perhubungan
					Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			6 Unit			6 Unit		
					Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			6 Unit			6 Unit		
2	15	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Fasilitas pembayaran jasa kebersihan kantor (petugas Cining Service) penyediaan perlatan jasa kebersihan kantor		12 Bulan	26.034.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	28.638.390	Dinas Perhubungan
					Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Bulan			12 Bulan		
					Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor			12 Bulan			12 Bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2 15 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah pelayanan adminitrasi umum		12 Bulan	47.778.505			12 Bulan	52.556.356	
2 15 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya		1 Unit	11.860.625	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	13.046.688	Dinas Perhubungan
		Jumlah pemeliharaan mobil Jalan		1 Unit				1 Unit		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 Unut				1 Unut		
2 15 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		16 Unit	25.917.880	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		16 Unit	28.509.668	Dinas Perhubungan
		Jumlah pembayaran jasa pemeliharaan jasa pemeliharaan, perizinan kendaraan dinas/operasional, pemeliharaan kendaraan dinas operasional mobil dan motor		12 Bulan				12 Bulan		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		16 Unit				16 Unit		
2 15 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	11.000.000	Dinas Perhubungan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		12 Bulan				12 Bulan		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 Unit				1 Unit		
2 15 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe C		80 %	1.515.027.788			80 %	1.666.531.666	
2 15 2 2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		100 %	484.665.288			100 %	533.132.916	
2 15 2 2.02 1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	jumlah Perlengkapan dan pengadaan Pagar pengaman jalan yang tersedia		3 Paket	81.360.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Paket	89.496.000	Dinas Perhubungan
		Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun		3 Paket				3 Paket		
		Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		3 Paket				3 Paket		
2 15 2 2.02 2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia		2 Unit	296.095.288	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	325.705.916	Dinas Perhubungan
2 15 2 2.02 4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah PJU yang di pelihara		150 Titik	107.210.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		150 Titik	117.931.000	Dinas Perhubungan
		Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara		50 titik				50 titik		
		Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		50 titik				50 titik		
2 15 2 2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Peningkatan pelayanan dan keberfungsian terminal Tipe C		100 %	361.260.000			100 %	397.386.000	
2 15 2 2.03 5	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah Fasilitas Jasa Petugas parkir, terminal dan di tepi jalan		12 Bulan	361.260.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	397.386.000	Dinas Perhubungan
		Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya		12 Bulan				12 Bulan		
		Meningkatnya Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C		12 Bulan				12 Bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif		
2 15 2 2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Terlaksananya pengujian kendaraan bermotor Uji kear		12 Bulan	322.920.900				12 Bulan	355.212.990	
2 15 2 2.05 1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Pemeliharaan Trafic Light dan Warning Light		6 Unit	70.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6 Unit	77.440.000	Dinas Perhubungan
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia		16 Unit					16 Unit		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		16 Unit					16 Unit		
2 15 2 2.05 7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		12 Bulan	252.520.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Bulan	277.772.990	Dinas Perhubungan
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara		12 Bulan					12 Bulan		
		Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		12 Bulan					12 Bulan		
2 15 2 2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tersedianya angkutan umum bagi masyarakat, terwujudnya pengawasan dan penerbitan angkutan umum dan pengaturan lalu lintas jalan		12 Bulan	346.181.600				12 Bulan	380.799.760	
2 15 2 2.09 1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia		12 Bulan	143.685.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Bulan	158.054.160	Dinas Perhubungan
		Jumlah terlaksananya jasa biaya operasional kendaraan bus sekolah dan bus pariwisata, terwujudnya fasilitasi jasa petugas bus sekolah dan bus pariwisata, terwujudnya jumlah petugas		1 Paket					1 Paket		
		Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		12 Bulan					12 Bulan		
2 15 2 2.09 2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi jasa pengendalian dan pengawasan lalu lintas, jumlah petugas pengendalian dan pengawasan lalu lintas		12 Bulan	202.496.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Bulan	222.745.600	Dinas Perhubungan
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2 16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			7.768.400.321					8.807.551.407	
2 16 1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian)		100 %	3.451.954.079			100 %	4.059.460.540	
2 16 1 2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja		64 Dokumen	104.087.000			64 Dokumen	114.495.700	
2 16 1 2.01 1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun dan ditetapkan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	1 Dokumen	18.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	20.350.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 16 1 2.01 7		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi yang telah disusun dan diserahkan ke OPD yang menangani	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	12 Bulan	85.587.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	94.145.700	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 16 1 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah		100 %	2.565.709.047			100 %	2.822.279.952	
2 16 1 2.02 1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	12 Bulan	2.397.300.597	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	2.637.030.657	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 16 1 2.02 2		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pengelolaan administrasi keuangan dan kesekretariatan yang dilaksanakan di Kominfo.	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	12 Bulan	85.587.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	94.145.700	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2 16 1 2.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen/Berkas pertanggungjawaban yang dikelola dalam penatausahaan keuangan.	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	58 Kegiatan	70.260.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	58 Kegiatan	77.286.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
2 16 1 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Koordinasi dan Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang dibutuhkan.		5 Dokumen	12.561.450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Dokumen	13.817.595	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
2 16 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah		100 %	25.443.750		100 %	27.988.125		
2 16 1 2.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kantor	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	1 Orang	25.443.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Orang	27.988.125	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
2 16 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum		100 %	318.949.500		100 %	350.844.450		
2 16 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor yang dibutuhkan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	30 Unit	7.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30 Unit	8.250.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
2 16 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	3 Unit	33.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Unit	36.300.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
2 16 1 2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	1 Paket	11.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	12.100.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
2 16 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor, Makanan dan Minuman yang disediakan.	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	12 Bulan	105.916.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	116.508.150	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
2 16 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah yang dilaksanakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	55 Kali	150.533.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	55 Kali	165.586.300	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
2 16 1 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	5 Dokumen	11.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Dokumen	12.100.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
2 16 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah		100 %	49.548.396		100 %	54.503.235		
2 16 1 2.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Mesin dan Peralatan Lainnya yang akan dibutuhkan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	1 Paket	34.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	37.950.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
2 16 1 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dibutuhkan.	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	2 Unit	15.048.396	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Unit	16.553.235	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
2 16 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	195.860.320		100 %	215.446.352		
2 16 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	12 Bulan	77.995.320	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	85.794.852	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
2 16 1 2.08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Layanan Jasa perbaikan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	12 Bulan	91.320.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	100.452.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
2 16 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Layanan Jasa Kebersihan Kantor Diskominfo	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	12 Bulan	26.545.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	29.199.500	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
2 16 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah yang terpelihara		100 %	192.356.066		100 %	473.902.726		
2 16 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	1 Unit	48.740.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	53.614.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
2 16 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Operasional yang dipelihara	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	2 Unit	90.220.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Unit	99.242.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
2 16 1 2.09 4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	12 Bulan	4.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	5.390.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
2 16 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	10 Unit	11.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Unit	12.100.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
2 16 1 2.09 8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aplikasi layanan yang dipelihara	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	2 Aplikasi	11.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Aplikasi	12.100.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif		
2 16 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	1 Paket	26.496.066	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	291.456.726	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
2 16 2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase perangkat daerah yang mengunkan layanan data pemerintah		100 %	1.316.446.242			100 %	1.448.090.867		
2 16 2 2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan informasi publik melalui media informasi publik		100 %	1.316.446.242			100 %	1.448.090.867		
2 16 2 2.01 1	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	5 Dokumen	25.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	27.830.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
2 16 2 2.01 2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	5 Dokumen	124.080.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	136.488.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
2 16 2 2.01 3	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	5 Dokumen	86.460.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	95.106.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
2 16 2 2.01 4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	66.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
2 16 2 2.01 5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Kegiatan pengelolaan Informasi Publik Melalui Radio SPL FM		12 Bulan	191.160.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	210.276.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
2 16 2 2.01 6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	98.010.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	107.811.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
2 16 2 2.01 7	Layanan Hubungan Media	Jumlah kerjasama media dengan pemerintah daerah dalam rangka optimalisasi penyebaran informasi pembangunan daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Media	254.391.707	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Media	279.830.878	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
2 16 2 2.01 8	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	55.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	60.500.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
2 16 2 2.01 10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang terbentuk	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Kelompok	117.739.435	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Kelompok	129.513.379	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
2 16 2 2.01 11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	304.305.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	334.735.610	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
2 16 3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh dinas kominfo		100 %	3.000.000.000			100 %	3.300.000.000		
2 16 3 2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya pengelolaan domain dan sub domain milik pemerintah daerah		36 Domain	2.135.000.000			36 Domain	2.348.500.000		
2 16 3 2.01 1	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Domain	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Domain	5.500.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
2 16 3 2.01 2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	130.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	143.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
2 16 3 2.01 3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 aplikasi	2.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 aplikasi	2.200.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif			
2 16 3	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya pengelolaan E-Government/SPBE baik Infrastruktur maupun sistem		100 %	865.000.000			100 %	951.500.000	
2 16 3	2.02	1	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Informasi Elektronik melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Data	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Data	110.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 16 3	2.02	2	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen arsitektur dan peta rencana SPBE	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	110.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 16 3	2.02	3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	165.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 16 3	2.02	4	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	55.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 16 3	2.02	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	55.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 16 3	2.02	6	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	110.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 16 3	2.02	7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	110.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 16 3	2.02	8	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	11.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 16 3	2.02	9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	110.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 16 3	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	82.500.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 16 3	2.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	33.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 20			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				27.500.000				30.250.000	
2 20 2			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		100 %	27.500.000			100 %	30.250.000	
2 20 2	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Statistik Sektoral dengan terlaksananya pengumpulan data dan statistik daerah		100 %	27.500.000			100 %	30.250.000	
2 20 2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	11.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	12.100.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 20 2	2.01	2	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150 Buah	16.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		150 Buah	18.150.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 21			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				27.499.998				24.199.998	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif					
2	21	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah		100 %	27.499.998			100 %	24.199.998	
2	21	2	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Tertib Administrasi Pesandian		100 %	16.500.000			100 %	18.150.000	
2	21	2	2.01	1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi, Terlaksananya Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah dapat dikelola		12 Bulan	11.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	12.100.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2	21	2	2.01	3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi dapat tersedia		12 Bulan	5.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	6.050.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2	21	2	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		100 %	10.999.998			100 %	6.049.998	
2	21	2	2.02	1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terlaksana		12 Bulan	10.999.998	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	6.049.998	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				267.313.300				294.044.630	
2	7	2			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Jumlah Kasus Pengusaha Pekerja Pertahun, Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)		50.01 %	10.000.000			50.01 %	11.000.000	
2	7	2	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Makro dan Mikro		100 %	10.000.000			100 %	11.000.000	
2	7	2	2.01	1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.500.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2	7	2	2.01	2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	10 Perusahaan	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Perusahaan	5.500.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2	7	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi		0,79 %	143.680.000			0,79 %	158.048.000	
2	7	3	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pencari kerja / tenaga kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi		12 Bulan	71.180.000			12 Bulan	78.298.000	
2	7	3	2.01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	480 Orang	71.180.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		480 Orang	78.298.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
										Dana Insentif Daerah				
2	7	3	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Pelatihan/sosialisasi		1 Kegiatan	12.500.000			1 Kegiatan	13.750.000	
2	7	3	2.02	1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Lembaga	12.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Lembaga	13.750.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2	7	3	2.04		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Keci		100 %	60.000.000			100 %	66.000.000	
2	7	3	2.04	1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah kelompok Usaha yang mendapatkan bantuan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	100 %	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	66.000.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif		
2 7 4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan		2,09 %	70.907.000				2,09 %	77.997.700	
2 7 4	2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi para penyandang Disabilitas		1 Kegiatan	5.000.000				1 Kegiatan	5.500.000	
2 7 4	2.01 4 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	4 Orang	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4 Orang	5.500.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2 7 4	2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Terlaksananya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		100 %	18.597.000				100 %	20.456.700	
2 7 4	2.03 2 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	10 Orang	18.597.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10 Orang	20.456.700	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2 7 4	2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		100 %	47.310.000				100 %	52.041.000	
2 7 4	2.04 1 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	10 Orang	47.310.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10 Orang	52.041.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2 7 5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).		100 %	42.726.300				100 %	46.998.930	
2 7 5	2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelatihan dan sosialisasi yang terlaksana (Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan)		12 Bulan	13.278.300				12 Bulan	14.606.130	
2 7 5	2.01 1 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	10 Perusahaan	13.278.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10 Perusahaan	14.606.130	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2 7 5	2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Presentase perselisihan hubungan industrial di perusahaan yang dapat diselesaikan		1 Kegiatan	29.448.000				1 Kegiatan	32.392.800	
2 7 5	2.02 1 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	5 Perkara	24.448.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5 Perkara	26.892.800	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2 7 5	2.02 3 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah pelatihan dan sosialisasi yang terlaksana	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Kegiatan	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Kegiatan	5.500.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2 18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				7.639.208.301					8.402.912.866	
2 18	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas PM,PTSP & Tenaga Kerja)		100 %	6.820.116.449				100 %	7.502.128.204	
2 18	1 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	102.817.430				100 %	113.099.173	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target		Pagu Indikatif
2 18 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		12 Dokumen	47.629.610	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	52.392.571	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2 18 1 2.01 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	2 Dokumen	28.159.690	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	30.975.659	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2 18 1 2.01 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	2 Dokumen	25.728.440	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	28.301.284	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2 18 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Laporan	1.299.690	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	1.429.659	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2 18 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	6.013.185.658			100 %	6.614.504.224	
2 18 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		12 Orang/ bulan	5.935.050.988	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Orang/ bulan	6.528.556.087	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2 18 1 2.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	12 Bulan	75.090.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	82.599.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen				12 Dokumen		
2 18 1 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	3 Laporan	3.044.670	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Laporan	3.349.137	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2 18 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	60.000.000			100 %	66.000.000	
2 18 1 2.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	2 Orang	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Orang	66.000.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2 18 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Pra Sarana yang tersedia		100 %	194.928.020			100 %	214.420.932	
2 18 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Paket	6.242.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	6.866.750	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2 18 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Paket	70.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	77.000.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2 18 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Paket	6.377.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	7.015.140	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2 18 1 2.06 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Laporan	6.826.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	7.509.590	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2 18 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	36 Laporan	105.481.320	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		36 Laporan	116.029.452	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2 18 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	200.000.000			100 %	220.000.000	
2 18 1 2.07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	2 Unit	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	44.000.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif		
2 18 1 2.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	6 Unit	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Unit	110.000.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
2 18 1 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan DPMPSTPTK	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Paket	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	66.000.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
		Jumlah Pengadaan Perlengkapan DPMPSTPTK		1 Paket				1 Paket			
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		2 Unit				2 Unit			
2 18 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	174.640.000			100 %	192.104.000		
2 18 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	12 Laporan	90.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	99.000.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
2 18 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	12 Laporan	84.640.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	93.104.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
2 18 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	74.545.341			100 %	81.999.875		
2 18 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	12 Unit	44.265.341	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Unit	48.691.875	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
2 18 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	10 Unit	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Unit	22.000.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
2 18 1 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	10 Unit	10.280.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Unit	11.308.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
2 18 2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota		20 %	44.000.000			20 %	48.400.000		
2 18 2 2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		100 %	24.000.000			100 %	26.400.000		
2 18 2 2.01 1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Dokumen	24.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	26.400.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
2 18 2 2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyajian informasi penanaman Modal		125 Buku	20.000.000			125 Buku	22.000.000		
2 18 2 2.02 1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Dokumen	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	22.000.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
2 18 3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)		76 Investor	95.459.000			76 Investor	105.004.900		
2 18 3 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		100 %	95.459.000			100 %	105.004.900		
2 18 3 2.01 1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Dokumen	20.262.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	22.288.200	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2 18 3 2.01 2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Dokumen	75.197.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	82.716.700	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2 18 4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Peresentase Peningkatan Pelayanan Perizinan		100 %	282.823.665			100 %	311.106.032	
2 18 4 2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		100 %	282.823.665			100 %	311.106.032	
2 18 4 2.01 1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	500 Pelaku Usaha	263.595.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		500 Pelaku Usaha	289.954.500	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2 18 4 2.01 3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	6 Orang	19.228.665	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Orang	21.151.532	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2 18 5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)		500/ 500000 Rp (M)/ Dollar	374.645.500			500/ 500000 Rp (M)/ Dollar	412.110.050	
2 18 5 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tertib administrasi pelayanan Invertasi		76 Investor	374.645.500			76 Investor	412.110.050	
2 18 5 2.01 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	2 Kegiatan Usaha.	64.843.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2 Kegiatan Usaha.	71.327.300	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2 18 5 2.01 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	5 Pelaku Usaha	210.290.500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		5 Pelaku Usaha	231.319.550	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2 18 5 2.01 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Kegiatan Usaha	99.512.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1 Kegiatan Usaha	109.463.200	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2 18 6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Jumlah Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu		100 %	22.163.687			100 %	24.163.680	
2 18 6 2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	penyajian Informasi data base Perizinan		1 Buku	22.163.687			1 Buku	24.163.680	
2 18 6 2.01 1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Dokumen	22.163.687	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	24.163.680	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2 23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				3.154.690.956				3.470.160.053	
2 23 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Kearsipan dan Perpustakaan)		100 %	3.003.152.590			100 %	3.303.467.850	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif					
2	23	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keterpaduan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan kinerja tepat waktu		100 Persen	52.252.300			100 Persen	57.477.530	
						Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %				100 %		
2	23	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah		3 Dokumen	34.405.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	37.845.500	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2	23	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD		2 Dokumen	8.110.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	8.921.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2	23	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD		2 Dokumen	7.406.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	8.146.600	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2	23	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		12 Bulan	2.331.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	2.564.430	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2	23	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi keuangan pada PD		100 Persen	2.622.472.489			100 Persen	2.884.719.738	
						Terpenuhinya Administrasi keuangan PD		100 %				100 %		
2	23	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		12 Bulan	2.514.578.489	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	2.766.036.338	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2	23	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		12 Bulan	106.390.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	117.029.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2	23	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD		1 Laporan	1.504.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	1.654.400	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2	23	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 Persen	5.350.000			100 Persen	5.885.000	
						Tersedianya Sumber Daya Aparatur Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Bulukumba		100 %				100 %		
2	23	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		7 Orang	5.350.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 Orang	5.885.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2	23	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya dokumen administrasi umum		100 Persen	146.050.060			100 Persen	160.655.066	
						Tersedianya Pelayanan Administrasi dan meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana Aparatur		100 %				100 %		
2	23	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	635	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	6.985	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2	23	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	72.125	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Paket	793.375	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2	23	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 paket	5.691	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 paket	62.601	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2	23	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 Bulan	47.544.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	52.299.060	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2	23	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		12 Bulan	1.507.110	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	1.657.821	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2	23	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		31 Kali	95.073.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		31 Kali	104.580.300	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2	23	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase pemenuhan sarana dan prasarana pengadaan barang milik daerah		100 Persen	54.646.295			100 Persen	60.110.925	
						Tersedianya Pelayanan Administrasi dan Peningkatan Fasilitas Pengadaan Barang Milik daerah		100 %				100 %		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif		
2 23 1 2.07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang Disediakan		3 Unit	5.060.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	5.566.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
2 23 1 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		8 Unit	49.586.295	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 Unit	54.544.925	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
2 23 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 Persen	76.869.696			100 Persen	84.556.666		
		Tersedianya Pelayanan Administrasi sebagai penunjang Urusan perintah daerah		100 %				100 %			
2 23 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Bulan	52.869.696	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	58.156.666	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
2 23 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		2 Orang	24.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Orang	26.400.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
2 23 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Terpenuhinya sarana dan prasarana pemeliharaan barang milik daerah		100 Persen	45.511.750			100 Persen	50.062.925		
		Tersedianya Pelayanan Administrasi dan Peningkatan Fasi;itas Pemeliharaan barang milik daerah		100 %				100 %			
2 23 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		7 Unit	44.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 Unit	49.280.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
2 23 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Paket	71.175	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	782.925	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
2 23 2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan pendudukPresentase keterampilan perpustakaan oleh masyarakat Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan pendudukPresentase Jumlah KCKR daerah yang dihimpun		98 %	150.588.366			98 %	165.647.203		
2 23 2 2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan perpustakaan		100 %	76.986.966			100 %	84.685.663		
		Tersedianya Pengelolaan Perpustakaan		98 %				98 %			
2 23 2 2.01 1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM: Information Technology Service Management)		1 Layanan	9.433.850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Layanan	10.377.235	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
2 23 2 2.01 2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya		4100 Orang	9.496.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4100 Orang	10.446.260	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
2 23 2 2.01 4	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan		32 Perpustakaan Sekolah	6.923.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		32 Perpustakaan Sekolah	7.615.520	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
2 23 2 2.01 6	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		315 Orang	34.430.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		315 Orang	37.873.220	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
2 23 2 2.01 7	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi		60 Eksamplarr	2.235.916	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		60 Eksamplarr	2.459.508	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
2 23 2 2.01 8	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan		110 Eksamplarr	6.003.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		110 Eksamplarr	6.604.180	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif		
2 23 2 2.01 9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan		250 Eksemplarr	2.714.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		250 Eksamp rr	2.985.620	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
2 23 2 2.01 10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 %	5.749.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	6.324.120	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
2 23 2 2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pembudayaan gemar membaca		100 %	73.601.400			100 %	80.961.540		
		Tersedianya Pembudayaan Gemar Membaca		98 %				98 %			
2 23 2 2.02 1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan		380 Orang	25.977.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		380 Orang	28.575.360	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
2 23 2 2.02 4	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan		90 Orang	40.727.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		90 Orang	44.799.920	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
2 23 2 2.02 5	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Keegiatannya		30 Orang	6.896.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 Orang	7.586.260	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
2 23 3	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi/terdaftar yang ada diwilayahnyaPersentase Jumlah naskah kuno yang dialihaksara dan dialihbahasaPersentase Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada diwilayahnya		100 %	950			100 %	1.045.000		
2 23 3 2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pengembangan kolesksi budaya etnis nusantara		100 %	950			100 %	1.045.000		
2 23 3 2.02 1	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan		1 Paket	950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	1.045.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
2 24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				87.131.789				95.844.968		
2 24 2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Pesentase Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat		100 %	57.455.183			100 %	63.200.701		
2 24 2 2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengelolaan arsip dinamis		100 %	42.158.599			100 %	46.374.459		
		Tersedianaya Pengelolaan Arsip Dinamis		100 %				100 %			
2 24 2 2.01 1	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan		27 OPD	24.265.424	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		27 OPD	26.691.966	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
2 24 2 2.01 2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan		12 Bulan	17.893.175	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	19.682.493	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
2 24 2 2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	cakupan pengelolaan arsip statis		100 %	15.296.584			100 %	16.826.242		
		Tersedianya Pengelolaan Arsip statis		100 %				100 %			
2 24 2 2.02 2	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis		12 Bulan	15.296.584	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	16.826.242	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
2 24 3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Presentase dokumen arsip daerah yang diamankan dan dilestarikan		100 %	29.676.606			100 %	32.644.267		
2 24 3 2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Tersedianya Autentikasi Arsip Statis dan Arsip alih media yang di kelolah		100 %	29.676.606			100 %	32.644.267		
2 24 3 2.04 1	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan		12 Bulan	19.145.606	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	21.060.167	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif					
2	24	3	2.04	2	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip		12 Bulan	10.531.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	11.584.100	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				15.625.697.784				17.371.701.197	
3	25	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Perikanan)		100 %	5.277.088.256			100 %	5.811.397.081	
3	25	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen		19 Dokumen	62.000.000			19 Dokumen	68.200.000	
3	25	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen	7.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	8.250.000	Dinas Perikanan
3	25	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	5.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	6.050.000	Dinas Perikanan
3	25	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	5.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	6.050.000	Dinas Perikanan
3	25	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	5.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	6.050.000	Dinas Perikanan
3	25	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	5.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	6.050.000	Dinas Perikanan
3	25	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan	7.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	8.250.000	Dinas Perikanan
3	25	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12 Laporan	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	27.500.000	Dinas Perikanan
3	25	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gaji Tunjangan yang terbayarkan		12 Bulan	4.487.387.786			12 Bulan	4.942.726.564	
3	25	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		45 Orang/ bulan	4.377.387.786	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		45 Orang/ bulan	4.815.126.564	Dinas Perikanan
3	25	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	110.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	121.000.000	Dinas Perikanan
3	25	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Akhir Tahun		1 Dokumen	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	6.600.000	Dinas Perikanan
3	25	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimtek/Pelatihan		1 Orang	33.000.000			1 Orang	36.300.000	
3	25	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		1 Orang	33.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Orang	36.300.000	Dinas Perikanan
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pemenuhan administrasi umum		12 Bulan	259.119.000			12 Bulan	285.030.900	
3	25	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	3.300.000	Dinas Perikanan
3	25	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	33.000.000	Dinas Perikanan
3	25	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	16.500.000	Dinas Perikanan
3	25	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		3 Dokumen	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	2.200.000	Dinas Perikanan
3	25	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 Laporan	7.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	7.700.000	Dinas Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target		Pagu Indikatif
3 25 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	202.119.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	222.330.900	Dinas Perikanan
3 25 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan BMD		8 Unit	44.580.470			8 Unit	49.038.517	
3 25 1 2.07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		2 Unit	7.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	7.700.000	Dinas Perikanan
3 25 1 2.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		3 Unit	32.080.470	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	35.288.517	Dinas Perikanan
3 25 1 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit	5.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	6.050.000	Dinas Perikanan
3 25 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunang Urusan Pemerintahan Daerah		12 Bulan	261.451.000			12 Bulan	287.596.100	
3 25 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	176.433.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	194.076.630	Dinas Perikanan
3 25 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	85.017.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	93.519.470	Dinas Perikanan
3 25 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah BMD yang terpelihara		53 Unit	129.550.000			53 Unit	142.505.000	
3 25 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		40 Unit	91.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		40 Unit	100.705.000	Dinas Perikanan
3 25 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		10 Unit	4.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Unit	4.950.000	Dinas Perikanan
3 25 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	29.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	31.900.000	Dinas Perikanan
3 25 1 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		5 Unit	4.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit	4.950.000	Dinas Perikanan
3 25 3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Kontribusi PDRB sektor perikanan, Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan, Persentase Produksi Perikanan Tangkap		13,2 %	8.288.500.000			13,2 %	9.117.350.000	
3 25 3 2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Bantuan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap yang diberikakan		75 Unit	6.608.500.000			75 Unit	7.269.350.000	
		Jumlah Dokumen Data		2 dok				2 dok		
		Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)		305 Kelompok				305 Kelompo k		
		Terlaksananya Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		100 %				100 %		
3 25 3 2.01 1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia		1 Dokumen	30.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	33.550.000	Dinas Perikanan
3 25 3 2.01 2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia		75 Paket	2.153.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		75 Paket	2.368.300.000	Dinas Perikanan
3 25 3 2.01 3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia		6 Paket	4.425.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Paket	4.867.500.000	Dinas Perikanan
3 25 3 2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nelayan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan		3 Paket	205.000.000			3 Paket	225.500.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
3 25 3 2.02 1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya		160 Orang	175.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		160 Orang	192.500.000	Dinas Perikanan
3 25 3 2.02 2	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya		40 Orang	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		40 Orang	33.000.000	Dinas Perikanan
3 25 3 2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase TPI yang operasional (%)		100 %	1.445.000.000			100 %	1.589.500.000	
3 25 3 2.03 1	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		1 Dokumen	1.420.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	1.562.000.000	Dinas Perikanan
		Pembangunan Kolam Labuh		1 Paket				1 Paket		
3 25 3 2.03 2	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		1 Layanan	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Layanan	27.500.000	Dinas Perikanan
3 25 3 2.04	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan		120 Rekomendasi	10.000.000			120 Rekomendasi	11.000.000	
3 25 3 2.04 1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Paket	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	5.500.000	Dinas Perikanan
3 25 3 2.04 2	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan		1 Rekomendasi	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Rekomendasi	5.500.000	Dinas Perikanan
3 25 3 2.05	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Izin Pengadaan Kapa			10.000.000				11.000.000	
3 25 3 2.05 1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Paket	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	5.500.000	Dinas Perikanan
3 25 3 2.05 2	Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan		1 Rekomendasi	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Rekomendasi	5.500.000	Dinas Perikanan
3 25 3 2.06	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kapal yang terdaftar			10.000.000				11.000.000	
3 25 3 2.06 1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Paket	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	5.500.000	Dinas Perikanan
3 25 3 2.06 2	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan		1 Paket	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	5.500.000	Dinas Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif			
3 25 4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya, Cakupan Bina Kelompok Perikanan		100 %	1.784.000.000				100 %	2.182.400.000		
3 25 4	2.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanya Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		100 %	10.000.000			100 %	11.000.000		
3 25 4	2.01	1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing		1 Rekomendasi	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Rekomendasi	5.500.000	Dinas Perikanan
3 25 4	2.01	2	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan		1 Rekomendasi	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Rekomendasi	5.500.000	Dinas Perikanan
3 25 4	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Memperoleh Kegiatan Pemberdayaan Jumlah Pembudidaya Ikan yang Memperoleh Kegiatan Pemberdayaan Jumlah Pembudidaya yang memperoleh kegiatan pemberdayaan Jumlah Pembudidaya yang memperoleh kegiatan pemberdayaan Jumlah Saprodu Budidaya			100.000.000				220.000.000	
3 25 4	2.02	1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas		40 Orang	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		40 Orang	27.500.000	Dinas Perikanan
3 25 4	2.02	2	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan		40 Kelompok	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		40 Kelompok	27.500.000	Dinas Perikanan
3 25 4	2.02	3	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Pelatihan/Sosialisasi yang Terlaksana		3 Kali	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Kali	110.000.000	Dinas Perikanan
3 25 4	2.02	4	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		60 Orang	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		60 Orang	55.000.000	Dinas Perikanan
3 25 4	2.03		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK)			10.000.000				11.000.000	
3 25 4	2.03	1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan		1 Rekomendasi	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Rekomendasi	5.500.000	Dinas Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target		Pagu Indikatif				
3	25	4	2.03	2	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Daya Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Rekomendasi	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Rekomendasi	5.500.000	Dinas Perikanan
3	25	4	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Memperoleh Kegiatan Pemberdayaan Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP) Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP) Jumlah Saprodidi Budidaya Jumlah sarana dan prasarana perikanan budidaya			1.664.000.000				1.940.400.000	
3	25	4	2.04	2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		8 Paket	1.370.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 Paket	1.507.000.000	Dinas Perikanan
3	25	4	2.04	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		3 Paket	234.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Paket	257.400.000	Dinas Perikanan
3	25	4	2.04	4	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan		1 Dokumen	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	33.000.000	Dinas Perikanan
3	25	4	2.04	5	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat		40 Orang	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		40 Orang	33.000.000	Dinas Perikanan
3	25	4	2.04	6	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jembatan Penghubung Tambak		2 Unit		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	110.000.000	Dinas Perikanan
3	25	6			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Tingkat Konsumsi Ikan		93 %	276.109.528			93 %	260.554.116	
3	25	6	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pembinaan Usaha Mikro		1 kali	50.000.000			1 kali	55.000.000	
3	25	6	2.02	1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko		1 Paket	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	55.000.000	Dinas Perikanan
						Pengujian / Pengawasan Standar Mutu Hasil Perikanan		1 Paket				1 Paket		
3	25	6	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumah Promosi Hasil Perikanan Jumlah Pembinaan Usaha Pengolahan yang dilaksanakan			226.109.528				205.554.116	
3	25	6	2.03	2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi		6 Paket	226.109.528	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Paket	205.554.116	Dinas Perikanan
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				3.394.940.000				3.899.434.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2 19 2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Jumlah Pemuda Inovator		100 %	825.000.000			100 %	907.500.000	
2 19 2	2.01 Penyelesaian, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Terlaksana Penyelesaian, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		100 %	825.000.000			100 %	907.500.000	
2 19 2	2.01 1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah pemuda pelopor	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 orang	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 orang	55.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
		Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya		5 Orang				5 Orang		
2 19 2	2.01 3 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Orang	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Orang	220.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
		Jumlah prestasi karya ilmiah remaja		5 orang				5 orang		
2 19 2	2.01 8 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah OKP yang mendapatkan dana Hibah	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 OKP	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 OKP	110.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
		Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan		1 Orang				1 Orang		
2 19 2	2.01 9 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah pelajar yang lolos paskibra	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72 orang	475.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		72 orang	522.500.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
		Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan		72 Orang				72 Orang		
2 19 3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat nasional dan internasional		100 %	2.419.940.000			100 %	2.826.934.000	
2 19 3	2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		100 %	774.940.000			100 %	1.017.434.000	
2 19 3	2.01 3 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah sapras olahraga yang di bangun	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 paket	774.940.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 paket	1.017.434.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
		Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan		4 Unit				4 Unit		
2 19 3	2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kejuaraan yang pertandingkan		5 event	1.300.000.000			5 event	1.430.000.000	
2 19 3	2.02 1 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Dokumen	300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Dokumen	330.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
		Jumlah kejuaraan yang diselenggarakan		6 event				6 event		
2 19 3	2.02 2 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	1.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	1.100.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
		Jumlah prestasi olahraga		2 medali				2 medali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif					
2	19	3	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah	jumlah atlet berprestase yang mendapat pembinaan		25 atlet	275.000.000			25 atlet	302.500.000	
2	19	3	2.03	1	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Orang	110.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
						Jumlah atlet usia dini yang dibina		50 atlet				50 atlet		
2	19	3	2.03	3	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Orang	125.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Orang	137.500.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
						Jumlah klub binaan		2 klub				2 klub		
2	19	3	2.03	4	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah atlet dan pelatih yang mendapatkan penghargaan	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 org	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 org	55.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
						Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan		15 Orang				15 Orang		
2	19	3	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	jumlah olahraga rekreasi yang dibina		2 Cabor	70.000.000			2 Cabor	77.000.000	
2	19	3	2.05	1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	70.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	77.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
						jumlah olahraga rekreasi yang dikembangkan		3 olahraga				3 olahraga		
2	19	4			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Jumlah gugus pramuka yang berprestasi di tingkat nasional		100 %	150.000.000			100 %	165.000.000	
2	19	4	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	jumlah gugus pramuka yang berprestasi tingkat nasional		2 Gudep	150.000.000			2 Gudep	165.000.000	
2	19	4	2.01	2	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah kwartir yang mendapatkan pembinaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 kwarcab	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 kwarcab	165.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
						Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya		1 Organisasi				1 Organisasi		
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				16.876.177.552				18.563.795.306	
3	26	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Pariwisata dan Pemuda Olahraga)		100 %	8.300.959.552			100 %	9.131.055.506	
3	26	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan yang disusun		20 dok	167.500.000			20 dok	184.250.000	
3	26	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Dokumen	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Dokumen	165.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
						Jumlah dokumen perencanaan yang di susun		20 dok				20 dok		
3	26	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	17.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	19.250.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
						Tersusunnya LAKIP		1 dok				1 dok		
3	26	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase realisasi keuangan			6.491.575.990				7.140.733.589	
3	26	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang/ bulan	6.341.575.990	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Orang/ bulan	6.975.733.589	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
						Persentase realisasi belanja gaji ASN		100 %				100 %		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target		Pagu Indikatif
3 26 1 2.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Dokumen	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Dokumen	165.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
		Jumlah spj yang terverifikasi		100 %				100 %		
3 26 1 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	persentase pencapaian PAD			445.000.000				489.500.000	
3 26 1 2.04 1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Dokumen	445.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Dokumen	489.500.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
		Presentasi PAD		100 %				100 %		
3 26 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan administasi umum			484.427.766				532.870.542	
3 26 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah atk yang tersedia	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 jenis	134.427.766	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 jenis	147.870.542	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		50 Paket				50 Paket		
3 26 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 Laporan	350.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		40 Laporan	385.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
		jumlah perjalanan Dinas ASN		40 kali				40 kali		
3 26 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumaah pengadaan barang milik daerah			116.290.000				127.919.000	
3 26 1 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah laptop yang di beli	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 unit	116.290.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 unit	127.919.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit				1 Unit		
3 26 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang			521.165.796				573.282.375	
3 26 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Laporan	146.165.796	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Laporan	160.782.375	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
		Persentase pemenuhan pembayaran listrik		100 %				100 %		
3 26 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan penyediaan jasa umum kantor	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	375.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	412.500.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		100 Laporan				100 Laporan		
3 26 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	jumlah BMD yang dipelihara			75.000.000				82.500.000	
3 26 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Unit	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Unit	82.500.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
		jumlah kendaraan dinas yang mendapatkan perawatan		20 unit				20 unit		
3 26 2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (%)		85 %	6.187.640.000			85 %	6.806.404.000	
3 26 2 2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	jumlah objek wisata yang dikelola			2.075.000.000				2.282.500.000	
3 26 2 2.01 2	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	1.525.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	1.677.500.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif		
3 26 2 2.01 3	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Lokasi	550.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 Lokasi	605.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	
		Jumlah objek wisata yang di kelola		7 unit				7 unit			
3 26 2 2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan prasarana dibangun/dipelihara		14 Pkt	3.912.640.000			14 Pkt	4.303.904.000		
3 26 2 2.03 4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sapras pariwisata yang dibangun	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 unit	3.912.640.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 unit	4.303.904.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara		10 Unit				10 Unit			
3 26 2 2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi pengendalian yang dilaksanakan		1 1 Kali	200.000.000			1 1 Kali	220.000.000		
3 26 2 2.04 4	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	220.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	
		Jumlah sosialisasi pengendalian yang dilaksanakan		2 kali				2 kali			
3 26 3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota (%)		85 %	1.350.000.000			85 %	1.485.000.000		
3 26 3 2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Event pariwisata yang diselenggarakan		10 Event	1.350.000.000			10 Event	1.485.000.000		
3 26 3 2.01 1	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	275.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	
		Jumlah media promosi yang digunakan		3 media				3 media			
3 26 3 2.01 2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah event pariwisata yang dilaksanakan	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 event	1.100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 event	1.210.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	
		Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri		8 Laporan				8 Laporan			
3 26 5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD		1,64 %	1.037.578.000			1,64 %	1.141.335.800		
3 26 5 2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pelatihan kewirausahaan yang dilaksanakan		7 Pkt	1.037.578.000			7 Pkt	1.141.335.800		
3 26 5 2.01 1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah pelatihan kepariwisataan yang dilaksanakan	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 pelatihan	175.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 pelatihan	192.500.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	
		Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya		7 Orang				7 Orang			
3 26 5 2.01 2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah ajang bakat yang dilaksanakan	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 ajang bakat	862.578.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 ajang bakat	948.835.800	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata		3 Orang				3 Orang			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif				
2													
2	9			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	9			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			894.676.000				1.581.653.600		
2	9	2		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan)		100 %	600.000.000			100 %	614.660.000	
					Persentase Jumlah Desa Mandiri Pangan Yang Dibina		100 %				100 %		
2	9	2	2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksana Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		100 %	600.000.000			100 %	614.660.000	
					Tersedianya infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah		100 %				100 %		
2	9	2	2.01	2	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	1 Paket	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	55.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	9	2	2.01	3	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	1 Unit	550.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	559.660.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	9	3			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Energi Dan Protein Perkapita, Ketersediaan Energi Dan Protein Perkapita		4.207,57/ 100,69 Kkal/ Gram/ Kap/ Hr	201.500.000		4.207,57/ 100,69 Kkal/ Gram/ Kap/ Hr	234.500.000	
					Persentase prasarana sektor pertanian yang tersedia			80 %			80 %		
2	9	3	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Terlaksana Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		100 %	37.500.000		100 %	44.750.000	
					Tersedianya informasi harga pangan dan NBM serta meningkatnya kinerja kelembagaan usaha pangan dan jaringan distribusi pangan			100 %			100 %		
2	9	3	2.01	1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kelurahan	1 Dokumen	22.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	24.750.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	9	3	2.01	6	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan		1 Unit	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	20.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	9	3	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi serta pengadaan dan pemeliharaan cadangan pangan kabupaten		100 %	19.000.000		100 %	22.000.000	
2	9	3	2.02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		1 Laporan	7.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	8.800.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	9	3	2.02	3	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)		1000 Kg	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1000 Kg	13.200.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	9	3	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Tercapainya target skor PPH pemanfaatan lahan pekarangan dan penanekaragaman konsumsi pangan, berragam, bergizi, seimbang dan aman		100 %	145.000.000		100 %	167.750.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target		Pagu Indikatif
2 9 3 2.04 2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		15 Laporan	145.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 Laporan	167.750.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2 9 4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)		100 %	68.176.000			100 %	704.993.600	
2 9 4 2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya penanganan kerawanan pangan daerah		100 %	68.176.000			100 %	704.993.600	
2 9 4 2.02 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sistem Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) dan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan		1 Dokumen	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	4.400.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2 9 4 2.02 2	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Masyarakat (CPM)		10000 Kg	64.176.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10000 Kg	700.593.600	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2 9 5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Sampel Pangan Dengan Mutu Aman		45 %	25.000.000			45 %	27.500.000	
2 9 5 2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar pada daerah kabupaten		100 %	25.000.000			100 %	27.500.000	
		Terlaksananya Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		100 %				100 %		
2 9 5 2.01 5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		1 dokumen	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	27.500.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				40.209.468.234				45.961.420.364	
3 27 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan)		100 %	19.547.836.609			100 %	21.660.700.364	
3 27 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100 %	142.543.030			100 %	161.120.300	
3 27 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5 Dokumen	112.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	127.523.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 1 2.01 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	3.960.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	4.356.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 1 2.01 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	3.960.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	4.356.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 1 2.01 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	4.023.030	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	4.425.300	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 1 2.01 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	3.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	3.960.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 1 2.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan		12 Bulan	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	16.500.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kegiatan perangkat daerah		100 %	18.484.431.406			100 %	20.372.747.534	
3 27 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan Pendapatan		12 Bulan	18.292.561.406	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	20.161.690.534	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 1 2.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD		12 Bulan	188.370.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	207.207.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 1 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	3.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	3.850.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
3 27 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya pengadministrasian barang milik daerah pada perangkat daerah		100 %	3.500.000			100 %	3.850.000	
3 27 1 2.03 2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen		12 Bulan	3.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	3.850.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah		100 %	66.375.000			100 %	66.375.000	
3 27 1 2.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		3 Orang	66.375.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Orang	66.375.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya penadministrasian umum perangkat daerah			445.997.597				574.097.997	
3 27 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor		1 Paket	5.525.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	6.077.500	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 1 2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket	8.221.420	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	11.577.500	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	164.761.377	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	235.442.997	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	51.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100 Laporan	227.489.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Laporan	270.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan kantor OPD			60.390.000				100.000.000	
3 27 1 2.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		5 Unit	60.390.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit	100.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi umum OPD			194.353.336				160.388.669	
3 27 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	140.353.336	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	154.388.669	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	54.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	6.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Meningkatnya kualitas seluruh aset dan pengamanan aset OPD			150.246.240				222.120.864	
3 27 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		345 Unit	115.246.240	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		345 Unit	126.770.864	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		12 Unit	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Unit	75.350.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 1 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	20.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Jumlah Produksi Pertanian		75 %	11.665.274.000			75 %	14.389.294.000	
3 27 2 2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Terlaksanya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		100 %	4.485.790.000			100 %	5.044.169.000	
3 27 2 2.01 1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		5 Laporan	3.825.290.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Laporan	4.294.169.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 2 2.01 2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		23 Laporan	660.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		23 Laporan	750.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 2 2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan	Terlaksananya peningkatan produksi dan mutu produksi pertanian			5.179.875.000				7.111.125.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif					
3	27	2	2.02	1	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian		4 VUB	458.625.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 VUB	718.625.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	2	2.02	2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman		7 Dokumen	4.710.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 Dokumen	5.692.500.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	2	2.02	3	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman		1 Dokumen	11.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	700.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	2	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase cakupan terhadap pengendalian dan pengawasan penyediaan bibit ternak			122.899.000				169.000.000	
3	27	2	2.05	5	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia		2 Ton	107.899.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Ton	152.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	2	2.05	6	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan		1 Laporan	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	17.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	2	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang disediakan			1.876.710.000				2.065.000.000	
3	27	2	2.06	1	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain		170 Ekor	1.826.710.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		170 Ekor	2.000.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	2	2.06	2	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain		2 Ton	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Ton	65.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana sektor pertanian yang tersedia		80 %	7.688.500.000			80 %	8.108.500.000	
3	27	3	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian		100 %	100.000.000			100 %	150.000.000	
3	27	3	2.01	4	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan		1 Dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	150.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	3	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Terlaksananya pembangunan prasarana pertanian			7.588.500.000				7.958.500.000	
3	27	3	2.02	1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara		10 Unit	1.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Unit	1.500.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
										Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik				
3	27	3	2.02	3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		31 Unit	4.660.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		31 Unit	4.500.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
										Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik				
3	27	3	2.02	8	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		3 Unit	1.558.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	1.558.500.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
										Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik				
3	27	3	2.02	9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		3 Unit	370.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	400.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif				
							Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik						
3	27	4		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular		13.94 %	361.406.375			13.94 %	437.100.000	
3	27	4	2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase wabah penyakit hewan yang berhasil dikendalikan			56.074.375				60.000.000	
3	27	4	2.01	1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	50 Laporan	56.074.375	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Laporan	60.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	4	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan pemasukan atau pengeluaran hewan dan produk hewan		24.613.000				28.600.000	
3	27	4	2.02	2	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	182 Laporan	24.613.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		182 Laporan	28.600.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	4	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase aparaturnya petugas pelayanan medik dan paramedik veteriner		182.260.000				206.000.000	
3	27	4	2.03	1	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	50 Laporan	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Laporan	6.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	4	2.03	2	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	jumlah jasa medik dan paramedik veteriner yang disediakan	8 Orang	176.260.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 Orang	200.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
						jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	50 Laporan				50 Laporan		
3	27	4	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terlaksananya pendampingan dan pengawasan masyarakat veteriner veteriner		98.459.000				142.500.000	
3	27	4	2.04	1	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	50 Laporan	43.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Laporan	82.500.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	4	2.04	2	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	50 Laporan	55.259.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Laporan	60.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	4	2.05		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Terlaksananya penerapan dan pengawasan terhadap persyaratan teknis kesejahteraan hewan		-				-	
3	27	4	2.05	1	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	5000 ekor	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5000 ekor	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	5			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Bencana Pertanian yang dikendalikan dan ditanggulangi	85 %	374.992.250			85 %	478.576.000	
3	27	5	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengendalian bencana alam pertanian		374.992.250				478.576.000	
3	27	5	2.01	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	10000 Ha	352.416.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10000 Ha	420.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	5	2.01	2	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	50 Ha	10.076.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Ha	20.076.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
3 27 5 2.01 3	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		50 Ha	12.500.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Ha	38.500.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 6	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Usaha Sektor Peternakan Yang Berizin		50 %	26.289.000			50 %	35.000.000	
3 27 6 2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penerbitan izin usaha pertanian dalam daerah		100 %	26.289.000			100 %	35.000.000	
3 27 6 2.01 2	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian		30 Dokumen	7.976.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 Dokumen	10.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 6 2.01 3	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi		90 Laporan	18.313.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		90 Laporan	25.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok Tani yang dibina		57 %	545.170.000			57 %	852.250.000	
		Persentase Peningkatan Kapasitas Penyuluh		19.00 %				19.00 %		
3 27 7 2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	terlaksananya penyuluhan pertanian		12 bulan	545.170.000			12 bulan	852.250.000	
3 27 7 2.01 1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		3 Unit	185.670.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	297.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 7 2.01 2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		10 Unit	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Unit	250.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 7 2.01 3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian		10 Unit	259.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Unit	305.250.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
						Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2 17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				2.206.405.540				1.878.894.739	
2 17 2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Izin Usaha Simpan Pinjam Yang Ada		100 %	17.921.800			100 %	34.320.000	
2 17 2 2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Penerbitan Ijin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kab/kota		2 Ijin	17.921.800			2 Ijin	34.320.000	
2 17 2 2.01 1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Penerbitan Ijin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kab/kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Ijin	17.921.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Ijin	34.320.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Yang Dilakukan		74,4 %	14.083.000			74,4 %	79.750.000	
2 17 3 2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi Yang Diawasi Kekuatan, kesehatan, Kemandirian, ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota		290 Koperasi	14.083.000			290 Koperasi	79.750.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif		
2 17 3 2.01 1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	290 Unit Usaha	14.083.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		290 Unit Usaha	79.750.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2 17 4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Kategori Sehat		74,3 %	88.225.740			74,3 %	149.875.000		
2 17 4 2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penghargaan Kesehatan KSP/ USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota		2 Koperasi	88.225.740			2 Koperasi	149.875.000		
		Jumlah Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Yang Dinilai Kesehatannya		267 Koperasi				267 Koperasi			
2 17 4 2.01 1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	267 Unit Usaha	33.067.760			267 Unit Usaha	39.875.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2 17 4 2.01 2	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Koperasi	55.157.980	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Koperasi	110.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2 17 5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Diklat Perkoperasian Yang Diadakan		55 %	390.304.000			55 %	429.334.400		
2 17 5 2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Koperasi Yang Mengikuti Diklat Perkoperasian		100 Orang	390.304.000			100 Orang	429.334.400		
2 17 5 2.01 1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	390.304.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		100 Orang	429.334.400	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2 17 6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Volume Usaha dan Modal Usaha Koperasi		98,8 %	25.422.000			98,8 %	236.500.000		
2 17 6 2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Yang Diberikan Dukungan Pembiayaan, Pemasaran, Pendampingan dan Kemitraan		5 Koperasi	25.422.000			5 Koperasi	236.500.000		
2 17 6 2.01 1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Unit Usaha	25.422.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit Usaha	236.500.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2 17 7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM Yang Diberdayakan		2,3 %	1.080.394.000			2,3 %	642.765.339		
2 17 7 2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku	Jumlah Usaha Mikro Yang Bermitra		3280 Usaha	1.080.394.000			3280 Usaha	642.765.339		
		Jumlah Usaha Mikro Yang Diberikan Fasilitas Kemudahan Perizinan		500 Izin				500 Izin			
		Jumlah Usaha Mikro Yang Diberikan Pendampingan Kelembagaan dan Usaha		32178 Usaha				32178 Usaha			
		Jumlah Usaha Mikro Yang Di Fasilitas Pelatihan, Pemasaran dan Standarisasi Produk		3 Paket				3 Paket			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif					
		Jumlah Usaha Mikro Yang Diinput Ke Dalam Sistem Data Online (ODS)		9302 Usaha				9302 Usaha						
2	17	7	2.01	1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	21.912.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	165.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	7	2.01	2	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3280 Unit Usaha	14.432.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3280 Unit Usaha	96.250.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	7	2.01	3	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500 Unit Usaha	23.512.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		500 Unit Usaha	55.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	7	2.01	4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21 Unit Usaha	999.643.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		21 Unit Usaha	271.515.339	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
										Dana Insentif Daerah				
2	17	7	2.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro Yang Diberikan Pendampingan Kelembagaan dan Usaha	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32178 Usaha	20.895.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		32178 Usaha	55.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	8			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase peningkatan Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha		2,7 %	590.055.000			2,7 %	306.350.000	
2	17	8	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Pertumbuhan Wirausaha Baru		18 Paket	590.055.000			18 Paket	306.350.000	
2	17	8	2.01	1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Unit Usaha	590.055.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Unit Usaha	306.350.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
										Dana Insentif Daerah				
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				12.980.313.003				19.686.912.797	
3	30	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM)		100 %	7.907.251.908			100 %	9.572.639.474	
3	30	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen		100 %	124.225.190			100 %	193.853.374	
3	30	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	2 Dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	82.576.505	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	30	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	2 Dokumen	23.831.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	26.214.100	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	30	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	2 Dokumen	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	18.436.880	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	30	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	1 Laporan	7.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	30.442.280	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	30	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	4 Laporan	32.894.190	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	36.183.609	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	30	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	5.358.670.718			100 %	7.363.270.817	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
3 30 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	56 Orang/ bulan	5.195.048.550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		56 Orang/ bulan	6.345.536.891	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3 30 1 2.02 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	1 Dokumen	29.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	324.044.655	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3 30 1 2.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	12 Dokumen	113.580.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	222.915.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3 30 1 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	1 Laporan	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	355.910.423	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3 30 1 2.02 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	12 Laporan	10.442.168	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	114.863.848	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3 30 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Gaji, Tunjangan dan Honorarium		100 %	131.426.000			100 %	319.311.300	
		Jumlah Pegawai yang ikut Pelatihan		100 %				100 %		
3 30 1 2.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	2 Orang	67.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Orang	243.492.700	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3 30 1 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	50 Orang	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Orang	16.500.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3 30 1 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	10 Orang	53.926.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Orang	59.318.600	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3 30 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Kantor		100 %	625.500.000			100 %	868.958.022	
3 30 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	15 Unit	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 Unit	46.417.401	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3 30 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	4 Paket	178.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Paket	236.633.980	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3 30 1 2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	2 Paket	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	45.283.652	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3 30 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	2 Paket	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	120.169.960	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3 30 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	3 Paket	32.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Paket	79.433.957	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3 30 1 2.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	2 Dokumen	105.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	5.500.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3 30 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	50 Kali	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Kali	335.519.072	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3 30 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan dan Peralatan Kantor		100 %	267.000.000			100 %	248.659.650	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif		
3 30 1 2.07 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	3 Unit	200.000.000	Dana Insentif Daerah		3 Unit	88.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
3 30 1 2.07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	3 Paket	67.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Paket	160.659.650	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
3 30 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perlengkapan Kebutuhan Kantor			557.930.000				371.841.166		
3 30 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	1 Laporan	13.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	14.300.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		Jumlah Materai dalam Dokumen Persuratan		800 Materai				800 Materai			
3 30 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	12 Laporan	166.830.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	114.157.806	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
3 30 1 2.08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	1 Laporan	29.820.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	32.802.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		Jumlah Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		35 Kali				35 Kali			
3 30 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	12 Laporan	348.280.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	210.581.360	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
3 30 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah			842.500.000				206.745.145		
3 30 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	43 Kendaraan	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		43 Kendaraan	110.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
3 30 1 2.09 5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	2 Unit	7.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	8.250.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
3 30 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	3 Unit	735.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	88.495.145	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
3 30 3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal		50 %	4.760.452.595			50 %	9.330.077.878		
3 30 3 2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang di Bangun dan di Rehabilitasi		10 Pasar	3.128.981.551			10 Pasar	7.531.480.000		
3 30 3 2.01 1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang di Bangun, Renovasi dan di Rehabilitasi	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Unit	3.128.981.551	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit	7.531.480.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
3 30 3 2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Terlaksananya Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		100 %	1.631.471.044			100 %	1.798.597.878		
3 30 3 2.02 1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	1.631.471.044	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	1.798.597.878	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
3 30 4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Presentase Peningkatan Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok		25.58 %	55.121.000			25.58 %	213.521.000		
3 30 4 2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting			55.121.000				213.521.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
3 30 4 2.01 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	55.121.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	213.521.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3 30 5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Promosi Komoditi Ekspor		100 %	70.000.000			100 %	199.845.800	
3 30 5 2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	terlaksana Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		100 %	70.000.000			100 %	199.845.800	
3 30 5 2.01 2	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Pelaku Usaha	45.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Pelaku Usaha	123.505.800	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3 30 5 2.01 3	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Pelaku Usaha	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Pelaku Usaha	76.340.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3 30 6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda Tera Sah yang Berlaku		35 %	187.487.500			35 %	370.828.645	
3 30 6 2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	terlaksana Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		100 %	187.487.500			100 %	370.828.645	
3 30 6 2.01 1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera, Tera Ulang	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	750 Unit	141.514.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		750 Unit	202.615.545	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3 30 6 2.01 2	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Orang	45.973.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 Orang	168.213.100	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				594.950.700				3.395.574.611	
3 31 2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi		7.79 %	227.744.000			7.79 %	3.155.335.711	
3 31 2 2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang di Bina dan yang di Bantu		100 %	227.744.000			100 %	3.155.335.711	
3 31 2 2.01 3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	36.186.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	176.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3 31 2 2.01 4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	177.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	2.902.335.711	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3 31 2 2.01 5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	13.908.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	77.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3 31 3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait		85 %	17.206.700			85 %	55.000.000	
3 31 3 2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah IUI, IPIU, IUKI dan IPKI yang di Awasi		100 %	17.206.700			100 %	55.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
3 31 3 2.01 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	17.206.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	55.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
3 31 4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini		83.33 %	350.000.000		83.33 %	185.238.900		
3 31 4 2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pameran		1 Kali	350.000.000		1 Kali	185.238.900		
3 31 4 2.01 2	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	350.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	185.238.900	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4 1	SEKRETARIAT DAERAH				24.667.467.455			26.166.462.959		
4 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Sekretariat Daerah)		100 %	21.170.270.481		100 %	22.319.546.289		
4 1 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumber daya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan		100 %	126.141.540		100 %	138.755.694		
4 1 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Terwujudnya penyusunan Renja dan Renstra, RKA dan DPA Anggaran Pokok dan Anggaran Perubahan Setda.Renja	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	8 Dokumen	126.141.540	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8 Dokumen	138.755.694	Sekretariat Daerah	
		2. Terlaksananya proses pengelolaan keuangan Setda dan Koordinasi Instansi terkait		12 Bulan			12 Bulan			
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		8 Dokumen			8 Dokumen			
4 1 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumber daya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan		100 %	10.282.276.179		100 %	11.310.503.796		
4 1 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	123 Orang/ bulan	10.025.941.749	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	123 Orang/ bulan	11.028.535.923	Sekretariat Daerah	
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan		12 Bulan			12 Bulan			
4 1 1 2.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	12 Dokumen	196.246.330	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	215.870.963	Sekretariat Daerah	
		Terlaksananya Administrasi Perbendaharaan dan sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan Lingkup Setda		12 Bulan			12 Bulan			
4 1 1 2.02 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1. Terwujudnya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Dokumen	60.088.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	66.096.910	Sekretariat Daerah	
		2. Penyusunan Laporan Bulanan Realisasi Anggaran lingkup Setda		12 Dokumen			12 Dokumen			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif					
		3. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran/Prognosis per 6 Bulan		2 Dokumen				2 Dokumen						
		4. Tersusunya laporan capaian kinerja		1 Dokumen				1 Dokumen						
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		16 Laporan				16 Laporan						
4	1	1	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumber daya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan		100 %	28.230.000			100 %	31.053.000		
4	1	1	2.03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	2 Dokumen	28.230.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	31.053.000	Sekretariat Daerah
					Terpenuhinya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah			1 Kali				1 Kali		
4	1	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumber daya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan.		100 %	168.106.000				100 %	184.916.600	
4	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Paket	115.720.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	127.292.000	Sekretariat Daerah
					Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan ASN lingkup Setda			2 Orang				2 Orang		
					Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Hari-hari tertentu beserta Atribut Kelengkapannya			51 Pasang				51 Pasang		
4	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	2 Orang	52.386.000			2 Orang	57.624.600	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumber daya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan		100 %	1.881.955.309				100 %	2.070.150.838	
4	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Paket	65.373.935	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	71.911.328	Sekretariat Daerah
					Terpenuhinya kebutuhan penerangan bangunan gedung Kantor Daerah, Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati			3 Gedung				3 Gedung		
4	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Paket	83.352.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	91.687.750	Sekretariat Daerah
					Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor lingkup Setda			4 Jenis				4 Jenis		
4	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Paket	148.865.495	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	163.752.044	Sekretariat Daerah
					Meningkatkan Pelayanan dan tugas kedinasan lingkup Setda, Dialog Audiens dengan Tokoh Masyarakat, Kunjungan Kerja Pejabat Negara serta tersedianya Penatausahaan Kesekretariatan SKPD Sekretariat Daerah			12 Bulan				12 Bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target		Pagu Indikatif			
4	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	12 Dokumen	119.664.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	131.630.400	Sekretariat Daerah
						Tersedianya Koran, Tabloid, Majalah serta Sarana Prasarana Komunikasi dan Terjalinnnya Kerjasama Media Massa di Kab. Bulukumba		12 Bulan			12 Bulan		
4	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	12 Laporan	710.155.551	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	781.171.106	Sekretariat Daerah
						Terlaksananya penerimaan kunjungan tamu Pejabat Negara, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Terlaksananya dialog audiens dan tokoh masyarakat		12 Bulan			12 Bulan		
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	2 Laporan	754.543.828	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Laporan	829.998.210	Sekretariat Daerah
						Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi.		12 Bulan			12 Bulan		
4	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumber daya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan		100 %	727.075.734		100 %	799.783.307	
4	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	8 Unit	39.673.480	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8 Unit	43.640.828	Sekretariat Daerah
						Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		2 Unit			2 Unit		
4	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	4 Unit	117.293.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Unit	129.022.300	Sekretariat Daerah
						Tersedianya Pengadaan Mebeleur		1 Paket			1 Paket		
4	1	1	2.07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	2 Unit	53.641.544	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Unit	59.005.698	Sekretariat Daerah
						Terpenuhinya Perlengkapan Rumah Jabatan dan Aset lainnya		5 Jenis			5 Jenis		
4	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Unit	315.347.560	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	346.882.316	Sekretariat Daerah
						Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		5 Jenis			5 Jenis		
4	1	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	6 Unit	201.120.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Unit	221.232.165	Sekretariat Daerah
						Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		6 Jenis			6 Jenis		
4	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumber daya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan			1.954.391.405			2.149.830.545	
4	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	12 Laporan	782.577.864	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	860.835.650	Sekretariat Daerah
						Tersedianya sarana Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 Bulan			12 Bulan		
4	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	12 Laporan	1.171.813.541	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	1.288.994.895	Sekretariat Daerah
						Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Bupati dan Rumah Jabatan		12 Bulan			12 Bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif					
4	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya komunikasi pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kualitas pelayanan informasi publik.		100 %	2.980.985.776			100 %	3.279.084.353	
						Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumber daya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan		100 %				100 %		
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	9 Unit	253.874.000			9 Unit	279.261.400	Sekretariat Daerah
						Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan Asisten		9 Unit				9 Unit		
4	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	25 Unit	230.345.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		25 Unit	253.379.720	Sekretariat Daerah
						Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional dan Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional		25 Unit				25 Unit		
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	4 Unit	2.411.770.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Unit	2.652.947.000	Sekretariat Daerah
						Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan, Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Jabatan Bupati		4 Paket				4 Paket		
4	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Unit	84.996.576	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	93.496.233	Sekretariat Daerah
						Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rehabilitasi Gedung Kantor		1 Paket				1 Paket		
4	1	1	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumber daya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan.		100 %	778.478.748			100 %	856.326.622	
4	1	1	2.11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	12 Orang/ Bulan	178.478.748	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Orang/ Bulan	196.326.622	Sekretariat Daerah
						Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		12 Bulan				12 Bulan		
4	1	1	2.11	4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	12 Orang/ Bulan	600.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Orang/ Bulan	660.000.000	Sekretariat Daerah
						Terlaksananya Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		12 Bulan				12 Bulan		
4	1	1	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumber daya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan			1.828.574.250				1.043.680.440	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif				
4	1	1	2.12	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	12 Paket	977.526.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Paket	107.527.915	Sekretariat Daerah
						Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		12 Bulan			12 Bulan		
4	1	1	2.12	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	12 Paket	851.047.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Paket	936.152.525	Sekretariat Daerah
						Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		12 Bulan			12 Bulan		
4	1	1	2.13		Penataan Organisasi	Persentase kesesuaian program prioritas dengan struktur organisasi perangkat daerah		100 %	256.089.690		100 %	281.698.659	
4	1	1	2.13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	36 Dokumen	91.158.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	36 Dokumen	100.273.800	Sekretariat Daerah
						Tersusunnya Dokumen Analisis Jabatan, Dokumen Evaluasi Jabatan, Dokumen Standar Kompetensi Manajerial PNS dan Tertatanya Kelembagaan Perangkat Daerah serta tersusunnya Ranperda dan Ranperbub		36 Perangkat Daerah			36 Perangkat Daerah		
4	1	1	2.13	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	10 Laporan	35.884.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Laporan	39.473.170	Sekretariat Daerah
						Tersusunnya Standar Pelayanan Publik dan Penerapannya pada Unit Pelayanan Publik dan Tata Laksana		5 SKPD			5 SKPD		
4	1	1	2.13	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	10 Dokumen	37.779.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Dokumen	41.557.890	Sekretariat Daerah
						Tersusunnya Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi dan Laporan Reformasi Birokrasi		6 Dokumen			6 Dokumen		
4	1	1	2.13	4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	36 Dokumen	32.395.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	36 Dokumen	35.634.500	Sekretariat Daerah
						Tersusunnya Dokumen Standar Operasional Prosedur dan Dokumen Peta Proses Bisnis		36 Perangkat Daerah			36 Perangkat Daerah		
4	1	1	2.13	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	2 Dokumen	58.872.090	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	64.759.299	Sekretariat Daerah
						Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Dokumen			1 Dokumen		
4	1	1	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Protokol dan Komunikasi Pimpinan		100 %	157.965.850		100 %	173.762.435	
4	1	1	2.14	1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	12 Laporan	68.602.160	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	75.462.376	Sekretariat Daerah
						Meningkatnya Pelaksanaan Fungsi Keprotokolan Pimpinan Daerah dan Tersedianya Sarana Penunjang Keprotokolan		12 Bulan			12 Bulan		
4	1	1	2.14	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	12 Laporan	29.865.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	32.851.500	Sekretariat Daerah
						Pelaksanaan Jumpa Pers dan Dialog Publik, Pembuatan Press Rilis Kegiatan Pimpinan dan Pembuatan Sambutan Bupati/Wakil Bupati		12 Bulan			12 Bulan		
4	1	1	2.14	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1. Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan Dokumentasi Pimpinan.	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	12 Bulan	59.498.690	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	65.448.559	Sekretariat Daerah
						2.Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan dokumentasi pimpinan berdasarkan program kerja yang ditetapkan.		12 Bulan			12 Bulan		
						3.Meningkatkan kualitas pendokumentasian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		12 Bulan			12 Bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target		Pagu Indikatif			
		Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan		24 Laporan				24 Laporan					
4	1	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase lembaga keagamaan dan peningkatan kesadaran toleransi beragama, Persentase Jumlah Perkara hukum yang difasilitasi, Ketersediaan dokumen LKPJ dan LPPD tepat waktu		100 %	2.906.120.048		100 %	3.196.732.052			
4	1	2	2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	terlaksana Administrasi Tata Pemerintahan		100 %	458.715.118		100 %	504.586.629		
4	1	2	2.01	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	5 Dokumen	111.424.218	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Dokumen	122.566.639	Sekretariat Daerah
					Tersusunnya Dokumen LKPJ,LPPD, RLPPD,Memori Serah Terima Jabatan dan Terfasilitasinya Pengurusan Surat Keputusan Gubernur/Surat Izin Pejabat Negara		5 Dokumen			5 Dokumen			
4	1	2	2.01	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1. Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan,	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	12 Bulan	120.290.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	132.319.990	Sekretariat Daerah
					2. Rapat Koordinasi terkait Kecamatan dan Kelurahan di Provinsi dan Pusat		12 Bulan			12 Bulan			
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		16 Dokumen			16 Dokumen			
4	1	2	2.01	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27 Dokumen	227.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	27 Dokumen	249.700.000	Sekretariat Daerah
						Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka							
4	1	2	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	terlaksana Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		100 %	2.136.186.890		100 %	2.349.805.579	
4	1	2	2.02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1. Jumlah Guru Kontrak TKA/TPA Penerima Honor/Gaji	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	57 orang	1.967.117.020	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	57 orang	2.163.828.722	Sekretariat Daerah
					2. Jumlah Tahapan Pelaksanaan Kegiatan STQ/MTQ dan Lasqi		4 Kali			4 Kali			
					3. Terlaksananya Pembinaan Mental Spiritual melalui Pengajian Rutin		4 kali			4 kali			
					4. Terlaksananya Bantuan/Hibah, Organisasi/ Lembaga Keagamaan dan Sarana Peribadatan		12 Bulan			12 Bulan			
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		5 Dokumen			5 Dokumen			
4	1	2	2.02	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	5 Dokumen	30.910.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Dokumen	34.001.000	Sekretariat Daerah
					Terlaksananya Koordinasi Penanganan di Bidang Kesehatan, Bidang Sosial dan Bidang Pendidikan		2 Kali			2 Kali			
4	1	2	2.02	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	1. Jumlah Calon/Jamaah Haji yang mendapatkan Pelayanan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	2 Kali	138.159.870	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Kali	151.975.857	Sekretariat Daerah
					2. Jumlah Kecamatan yang di kunjungi dalam Safari Ramadhan		1 kali			1 kali			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif			
		3. Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Seleksi Pimpinan BAZNAS		2 kali				2 kali				
		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas		10 Dokumen				10 Dokumen				
4	1	2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Terlaksananya bantuan hukum penanganan kasus, tersedianya dokumen LHP, terlaksananya penyuluhan hukum terpadu dan terselesaikannya Draf rancangan Perda serta kajian produk hukum daerah.			311.218.040			342.339.844		
4	1	2.03	1 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	1. Meningkatkan Kualitas Produk Hukum Daerah	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	800 Naskah	63.125.340	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	800 Naskah	69.437.874	Sekretariat Daerah	
				2. Tercapainya Pembangunan di Bidang Hukum melalui Koordinasi dan Kerjasama		65 Produk			65 Produk			
				Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun		100 Dokumen			100 Dokumen			
4	1	2.03	2 Fasilitasi Bantuan Hukum	1. Meningkatkan Kualitas Produk Hukum	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	11 Ranperda	113.029.760	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	11 Ranperda	124.332.736	Sekretariat Daerah	
				2. Tercapainya Kabupaten Peduli HAM		5 Laporan			5 Laporan			
				3. Terwujudnya masyarakat sadar hukum dan terwujudnya generasi sadar hukum yang dapat menginformasikan hukum kepada masyarakat		1 Kelompok			1 Kelompok			
				4. Terwujudnya pelayanan bantuan hukum, Penanganan kasus dan adanya pertimbangan hukum pada pemerintah Daerah.		2 Kasus			2 Kasus			
				Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum		20 Kasus			20 Kasus			
4	1	2.03	3 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	1. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang produk hukum	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	5 Kali	135.062.940	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Kali	148.569.234	Sekretariat Daerah	
				2. Terpublikasinya produk hukum daerah		12 Bulan			12 Bulan			
				3. Terwujudnya Penataan Perundang- undangan dan Peraturan Desa dalam bentuk dokumen dan terdistribusinya produk hukum daerah ke provinsi, SKPD dan masyarakat		800 Naskah			800 Naskah			
				Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi		200 Dokumen			200 Dokumen			
4	1	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Peningkatan jumlah lembaga Ekonomi Kab/Kota yang berdaya saing, Persentase Jumlah Laporan DAK dan APBD dari OPD tepat waktu, Persentase kesesuaian pengadaan barang dan jasa dengan rencana.		100 %	591.076.926		100 %	650.184.618		
4	1	3	2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		100 %	65.870.426		100 %	72.457.468		
4	1	3	2.01	1 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	4 Dokumen	18.685.210	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	20.553.731	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif				
			Meningkatnya dokumen potensi produksi daerah secara berkala, terlaksananya peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi yang berbasis kerakyatan.		4 Dokumen				4 Dokumen				
4	1	3	2.01	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	12 Laporan	25.394.640	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	27.934.104	Sekretariat Daerah
						Tersedianya laporan Inflasi dan terkoordinasikannya kegiatan pengendalian Inflasi daerah dengan Tim TPID Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Nasional		12 Laporan			12 Laporan		
4	1	3	2.01	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Dokumen	21.790.576	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	23.969.633	Sekretariat Daerah
						Tersedianya data Produksi, Promosi dan Informasi Potensi Daerah		1 Dokumen			1 Dokumen		
4	1	3	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Tersedianya dokumen penyusunan perencanaan sekretariat Daerah, Jumlah dokumen Data laporan Tepra secara berkala dan laporan Capaian Fisik serta data laporan hasil Monitoring pelaksanaan kegiatan Pembangunan Daerah.		100 %	107.856.810		100 %	118.642.491	
4	1	3	2.02	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	1. Tersusunnya evaluasi Renja/ Renstra Sekretariat Daerah dan Laporan Pembangunan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	4 Dokumen	70.125.350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	77.137.885	Sekretariat Daerah
						2. Tersedianya Data Laporan Hasil Monitoring Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah		4 Dokumen			4 Dokumen		
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah		8 Dokumen			8 Dokumen		
4	1	3	2.02	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	24 Laporan	22.310.160	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	24 Laporan	24.541.176	Sekretariat Daerah
						Terwujudnya Penyajian Informasi Laporan TEpra dan Laporan APBD secara berkala		12 Bulan			12 Bulan		
4	1	3	2.02	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Data Laporan dan Pengadaan Pemerintah secara berkala serta Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi, Tersedianya Dokumen Data Laporan Data Alokasi Khusus (DAK) Kab. Bulukumba	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	12 Bulan	15.421.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	16.963.430	Sekretariat Daerah
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		16 Laporan			16 Laporan		
4	1	3	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	terlaksananya pelatihan Aplikasi Sirup dan Aplikasi SPSE dan Asosiasi/penyedia Barang Jasa.		100 %	417.349.690		100 %	459.084.659	
4	1	3	2.03	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1. Terlaksananya Proses Barang dan Jasa	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	65 Dokumen	17.307.710	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	65 Dokumen	19.038.481	Sekretariat Daerah
						2. Tersusunnya Data dan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa		12 Bulan			12 Bulan		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		100 Dokumen			100 Dokumen		
4	1	3	2.03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	24 Dokumen	366.921.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	24 Dokumen	403.614.090	Sekretariat Daerah
						Terwujudnya Pelayanan Pengadaan secara Elektronik kepada pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)		12 Bulan			12 Bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target		Pagu Indikatif				
4	1	3	2.03	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1. Terlaksananya Pelatihan Aplikasi SIRUP dan Aplikasi SPSE bagi ASN dan Asosiasi/ Penyedia Barang Jasa	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	150 Orang	33.120.080	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		150 Orang	36.432.088	Sekretariat Daerah
						2. Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		12 Bulan				12 Bulan		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		150 Orang				150 Orang		
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4	2				SEKRETARIAT DPRD				35.818.359.401				44.001.180.597	
4	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Sekretariat DPRD)		100 %	27.979.547.428			100 %	32.031.776.806	
4	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen, Penganggaran dan Pelaporan Tepat waktu		100 %	75.349.300			100 %	142.955.890	
4	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5 Dokumen	54.998.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	110.000.000	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan	4.391.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	5.500.000	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	15.959.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	27.455.890	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN Lingkup Sekretariat DPRD Pengelolaan Administrasi Keuangan Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Laporan Keuangan Akhir Tahun Pengeloan dan Penyiapan Bahan Tanggapan		100 %	3.639.014.947			100 %	3.950.175.281	
4	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		100 %	3.485.279.147	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	3.702.965.681	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	181.500.000	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		12 Bulan	34.736.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	38.209.600	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Dokumen	3.999.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.500.000	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		5 Dokumen	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	22.000.000	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Penatausahaannya		100 %	5.592.450			100 %	6.151.695	
4	2	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5.592.450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	6.151.695	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	1.979.199.100			100 %	3.214.520.000	
4	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Khusus hari-hari Tertentu Pimpinan & Anggota DPRD dan Dinas Pimpinan & Anggota DPRD		120 Pasang	176.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		120 Pasang	374.000.000	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		3 Kali	1.723.199.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Kali	2.753.520.000	Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif					
4	2	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	79.999.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	87.000.000	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	1.131.358.010			100 %	1.336.280.170	
4	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		12 Bulan	4.998.550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	5.555.500	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		12 Bulan	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	33.000.000	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 Bulan	797.501.160	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	968.980.540	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		100 %	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	55.000.000	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	248.858.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	273.744.130	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	346.853.080			100 %	369.000.000	
4	2	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Kecamatan	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Kecamatan	110.000.000	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Kecamatan	146.853.080	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Kecamatan	149.000.000	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		100 %	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	110.000.000	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	1.134.759.271			100 %	1.472.532.140	
4	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Kecamatan	1.956.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Kecamatan	2.151.600	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	474.601.871	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	497.000.000	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Cenderamata/Plakat		19 Unit	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		19 Unit	4.400.000	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Bulan	654.201.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	968.980.540	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	250.887.970			100 %	269.975.000	
4	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		1 Unit	48.634.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	49.000.000	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan Roda Dua dan Empat dan Terpeliharanya Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat		16 Unit	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		16 Unit	110.000.000	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya Mebel		100 %	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	2.200.000	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		100 persen	64.998.670	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 persen	70.000.000	Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target		Pagu Indikatif				
4	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		100 persen	20.005.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 persen	22.000.000	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100 persen	15.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 persen	16.775.000	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		100 %	19.316.600.000			100 %	21.160.260.000	
4	2	1	2.15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD		12 Bulan	19.216.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	21.050.260.000	Sekretariat DPRD
						Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPR		12 Bulan				12 Bulan		
4	2	1	2.15	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Terpeliharanya Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD		1 Kali	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Kali	110.000.000	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Terlaksananya Layanan Administrasi DPRD			99.933.300				109.926.630	
4	2	1	2.16	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		12 Bulan	99.933.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	109.926.630	Sekretariat DPRD
4	2	2			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase PROLEGDA yang Terealisasi, "Persentase jumlah program kerja DPRD yang terintegrasi dengan program RPJMD dan RKPD, Persentase Jumlah Ranperda yang difasilitasi pembahasannya		100 %	7.838.811.973			100 %	11.969.403.791	
4	2	2	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Produk Hukum Daerah yang difasilitasi pembahasannya		100 %	702.802.400			100 %	993.082.640	
4	2	2	2.01	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19 Dokumen	277.830.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		19 Dokumen	415.613.770	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.01	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		5 Dokumen	299.993.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	439.993.070	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.01	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	24.978.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	27.475.800	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.01	4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Terciptanya Ranperda Inisiatif DPRD		2 Buah	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Buah	110.000.000	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Cakupan Anggota DPRD yang Kompeten dibidangnya		100 %	1.914.999.173			100 %	2.726.683.410	
4	2	2	2.04	2	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD		5 Dokumen	999.999.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	1.649.999.890	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.04	3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Terlaksananya Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi dewan		12 Bulan	447.803.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	492.583.520	Sekretariat DPRD
						Tersebaranya informasi Pembangunan Daerah		12 Bulan				12 Bulan		
4	2	2	2.04	4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli		12 Bulan	131.196.073	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	214.500.000	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.04	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	8 Orang	336.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 Orang	369.600.000	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terfasilitasinya Kegiatan Reses dalam Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		100 %	1.898.173.000			100 %	2.887.471.180	
4	2	2	2.05	1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Terlaksananya Penyerapan Aspirasi dan Kunjungan Kerja Dalam daerah		12 Bulan	19.994.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	21.993.730	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.05	2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Terlaksananya Penerimaan Aspirasi Masyarakat dan Penyusunan Pokok - Pokok Pikiran DPRD		12 Bulan	54.979.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	60.477.450	Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif					
4	2	2	2.05	3	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses		5 Dokumen	1.823.199.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	2.805.000.000	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD serta Meningkatkan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD		100 %	3.322.837.400			100 %	5.362.166.561	
4	2	2	2.08	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		5 Dokumen	3.322.837.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	5.362.166.561	Sekretariat DPRD
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	1				PERENCANAAN				10.949.108.478				12.044.019.326	
5	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Bappelitbangda)		100 %	7.894.462.707			100 %	8.683.908.978	
5	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu		100 %	242.945.003			100 %	267.239.503	
5	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	7 Dokumen	130.337.730	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 Dokumen	143.371.503	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	2 Dokumen	23.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	25.850.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	2 Dokumen	19.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	20.900.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	14 Laporan	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14 Laporan	27.500.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Laporan	45.107.273	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	49.618.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu		100 %	5.548.447.139			100 %	6.103.291.853	
5	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	12 Orang/ bulan	5.405.947.139	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Orang/ bulan	5.946.541.853	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan dalam pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	12 bulan	135.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	148.500.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Dokumen				1 Dokumen		
5	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Laporan	7.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	8.250.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	pemenuhan terhadap pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah		100 %	451.250.000			100 %	496.375.000	
5	1	1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Unit	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	27.500.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	100 Paket	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Paket	110.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif					
5	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	2 Orang	44.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Orang	48.675.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	50 Orang	282.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Orang	310.200.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan adminstrasi umum kantor		100 %	389.000.000			100 %	427.900.000	
5	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Paket	8.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	8.800.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Paket	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	16.500.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Paket	120.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	132.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Paket	11.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	12.100.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	12 Laporan	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	27.500.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	98 Laporan	160.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		98 Laporan	176.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	55.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
						Persen penerapan SPBE dalam Perencanaan, Pengendalian serta Evaluasi dan Pelaporan pembangunan daerah		25 %				25 %		
5	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	708.000.000			100 %	778.800.000	
5	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	8 Unit	240.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 Unit	264.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Unit	218.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	239.800.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Unit	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	165.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Unit	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	110.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	pemenuhan terhadap penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	372.620.565			100 %	409.882.622	
5	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	12 Laporan	122.620.565	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	134.882.622	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif					
5	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Laporan	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	110.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	12 Laporan	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	165.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik		100 %	182.200.000			100 %	200.420.000	
5	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Unit	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	55.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	8 Unit	57.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 Unit	62.920.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Unit	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	27.500.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Unit	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	27.500.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Unit	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	27.500.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	2			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD, Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPDP Kedalam APBD		100 %	1.471.645.771			100 %	1.618.810.348	
5	1	2	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase pemenuhan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah		100 %	658.982.000			100 %	724.880.200	
5	1	2	2.01	2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	20 kali	199.999.850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 kali	219.999.835	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
						Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah		1 Dokumen				1 Dokumen		
5	1	2	2.01	3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Berita Acara	29.098.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Berita Acara	32.008.680	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
						Jumlah pelaksanaan Konsultasi Publik Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah (RPJMD dan RKPDP)		1 kali				1 kali		
5	1	2	2.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Berita Acara	25.169.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Berita Acara	27.686.780	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
						Jumlah pelaksanaan forum gabungan OPD dalam penyusunan RPJPD, RENSTRA dan RENJA		1 kai				1 kai		
5	1	2	2.01	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Berita Acara	41.510.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Berita Acara	45.661.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
						Jumlah pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kabupaten (RPJPD, RPJMD dan RKPDP).		1 kali				1 kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif				
5	1	2	2.01	6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah bahan koordinasi Musrenbang yang disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	10 kecamatan	74.533.660	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 kecamatan	81.987.026	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
						Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan		544 Usulan			544 Usulan		
5	1	2	2.01	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Dokumen	288.669.890	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	317.536.879	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	2	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	memenuhan terhadap analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah		100 %	572.663.771		100 %	629.930.148	
5	1	2	2.02	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Dokumen	180.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	198.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	2	2.02	2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Matriks RPJMD, RENSTRA, RKPd, dan RKPd-P yang dihasilkan.	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	4 dok	262.663.771	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 dok	288.930.148	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
						Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi		37 Orang			37 Orang		
5	1	2	2.02	3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Buku	130.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Buku	143.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	2	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Memenuhan terhadap pengendalian evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah		100 %	240.000.000		100 %	264.000.000	
5	1	2	2.03	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	3 Laporan	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Laporan	110.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	2	2.03	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	4 Laporan	140.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	154.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA, Serta Infrastruktur Dan Kewilayahan		100 %	1.583.000.000		100 %	1.741.300.000	
5	1	3	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		100 %	541.000.000		100 %	595.100.000	
5	1	3	2.01	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Dokumen	89.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	97.900.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
						Jumlah penyelenggaraan rapat koordinas,sosialisasi,konsultasi dan asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		18 paket			18 paket		
5	1	3	2.01	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	4 Laporan	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	55.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.01	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	4 Laporan	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	55.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif				
5	1	3	2.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	4 Laporan	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	55.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.01	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Dokumen	92.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	101.200.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
					Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi, sosialisasi, konsultasi dan monitoring Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		15 paket				15 paket		
5	1	3	2.01	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	4 Laporan	80.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	88.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.01	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	4 Laporan	80.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	88.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.01	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Laporan	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	55.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
					Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi, konsultasi dan monitoring Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		24 kali				24 kali		
5	1	3	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	memenuhi terhadap dokumen pertencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		100 %	442.000.000		100 %	486.200.000	
5	1	3	2.02	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Dokumen	85.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	93.500.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
					Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		29 kali				29 kali		
5	1	3	2.02	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	4 Laporan	90.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	99.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.02	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	4 Laporan	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	55.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.02	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	24 dok	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	24 dok	55.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian		1 Laporan				1 Laporan		
5	1	3	2.02	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	55.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target		Pagu Indikatif				
			Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		19 kali				19 kali					
5	1	3	2.02	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	4 Laporan	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	33.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.02	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	4 dok	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 dok	55.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		1 Laporan				1 Laporan		
5	1	3	2.02	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	24 kali	37.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		24 kali	40.700.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA		1 Laporan				1 Laporan		
5	1	3	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Pemenuhan terhadap dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan		100 %	600.000.000			100 %	660.000.000	
5	1	3	2.03	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Dokumen	300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	330.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
						Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		27 kali				27 kali		
5	1	3	2.03	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Dokumen	300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	330.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
						Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		27 kali				27 kali		
5	5				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				419.013.826				458.892.309	
5	5	2			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan, Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan,, Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah, Persentase Kebijakan Inovasi Yang Diterapkan Di Daerah Penerapan Sida		100 %	419.013.826			100 %	458.892.309	
5	5	2	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	"Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan"		100 %	36.549.000			100 %	40.203.900	
5	5	2	2.01	11	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	36.549.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	40.203.900	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	2	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		100 %	62.937.000			100 %	67.207.800	
5	5	2	2.02	1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Dokumen	38.388.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	40.203.900	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif				
5	5	2	2.02	2	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Dokumen	24.549.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	27.003.900	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
					Tersedianya Kajian Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		100 %				100 %		
5	5	2	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		100 %	36.549.000		100 %	40.203.900	
5	5	2	2.03	4	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Dokumen	36.549.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	40.203.900	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
					Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan. Serta Tersedianya Dokumen Pengembangan Pertanian dan Pangan		100 %				100 %		
5	5	2	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi		100 %	282.978.826		100 %	311.276.709	
5	5	2	2.04	1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kelurahan	1 Dokumen	37.399.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	41.138.900	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	2	2.04	4	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	2 Laporan	240.579.826	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Laporan	264.637.809	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	2	2.04	5	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	10 Laporan	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Laporan	5.500.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5	2				KEUANGAN				246.919.037.984			271.610.941.779	
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (BPKPD)		100 %	14.642.091.531		100 %	16.106.300.681	
5	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Pelaporan sesuai standar		100 %	254.791.359		100 %	280.270.495	
5	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	4 dokumen	50.295.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 dokumen	55.324.500	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5 Dokumen			5 Dokumen		
5	2	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	2 dokumen	12.483.580	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 dokumen	13.731.938	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			2 Dokumen			2 Dokumen		
5	2	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	2 dokumen	12.483.580	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 dokumen	13.731.938	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			2 Dokumen			2 Dokumen		
5	2	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	2 Dokumen	11.438.580	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	12.582.438	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
					Jumlah dokumen Pelaksana Anggaran			2 dokumen			2 dokumen		
5	2	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen Pelaksana Anggaran Perubahan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	2 dokumen	11.438.580	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 dokumen	12.582.438	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target		Pagu Indikatif			
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		2 Dokumen				2 Dokumen				
5	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Laporan	6.224.699	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	6.847.169	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LKIP)			2 dokumen			2 dokumen		
5	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	12 Bulan	150.427.340	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	165.470.074	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			44 Laporan			44 Laporan		
5	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)		100 %	10.653.970.852		100 %	11.719.367.936	
5	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	91 Orang/ bulan	10.062.845.398	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	91 Orang/ bulan	11.069.129.937	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
					Jumlah Pegawai Negeri Sipil Badan Pengelola Keuangan Daerah			101 Orang			101 Orang		
5	2	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	12 Bulan	141.960.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	156.156.770	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1 Dokumen			1 Dokumen		
5	2	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	12 Dokumen	425.526.484	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	468.079.132	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
					"Jumlah Honorarium Pengelola keuangan BUD, kuasa BUD, PA, PPK, PPTK & staf ASN serta Upah Bagi Jasa Pihak Ketiga"			12 Bulan			12 Bulan		
5	2	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Laporan	13.638.270	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	15.002.097	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
					Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun			1 Laporan			1 Laporan		
5	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Laporan	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	5.500.000	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
					Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen		
5	2	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	5.500.000	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
					Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran			1 semesteran			1 semesteran		
5	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan administrasi kepegawaian yang berstandar		100 %	109.315.387		100 %	120.246.925	
5	2	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	57 orang	11.130.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	57 orang	12.243.000	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			57 Dokumen			57 Dokumen		
5	2	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	2 Orang	52.125.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Orang	57.337.500	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
					Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi			2 orang			2 orang		
5	2	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	6 Orang	8.797.520	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Orang	9.677.272	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif				
			"Jumlah Pegawai yang mengikuti sosialisasi"		6 orang				6 orang				
5	2	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	9 Orang	37.262.867	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	9 Orang	40.989.153	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
						Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek		9 orang			9 orang		
5	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase peningkatan pelayanan administrasi umum perangkat daerah			1.189.088.128			1.307.996.940	
5	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 paket	20.817.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 paket	22.898.920	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket			1 Paket		
5	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	12 Paket	21.520.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Paket	23.672.000	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
						Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia		12 Bulan			12 Bulan		
5	2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Paket	15.909.850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	17.500.835	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
						Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia		1 Paket			1 Paket		
5	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor BPKD yang tersedia	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Tahun	438.055.420	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Tahun	481.860.962	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		10 Paket			10 Paket		
5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah lembar Spanduk dan Penggandaan yang disiapkan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	12 Bulan	261.672.542	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	287.839.796	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		12 Paket			12 Paket		
5	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	12 Dokumen	3.379.203	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	3.717.123	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
						"Jumlah lembar Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan"		12 Bulan			12 Bulan		
5	2	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	12 Laporan	47.046.103	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	51.750.713	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
						Jumlah makan minum tamu dan rapat yang tersedia		12 Bulan			12 Bulan		
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	12 Laporan	380.687.810	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	418.756.591	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
						"Terlaksananya Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah"		12 Bulan			12 Bulan		
5	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor / barang mililik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	1.422.489.179		100 %	1.564.738.096	
5	2	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan Eselon II	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 unit	510.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 unit	561.550.000	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		1 Unit			1 Unit		
5	2	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	7 Unit	425.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7 Unit	467.500.000	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	75 Unit	171.989.179	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	75 Unit	189.188.096	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	5 Unit	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Unit	38.500.000	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	"Jumlah Pagar, Pintu Gerbang, dan Papan Nama Kantor"	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Paket	45.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	49.500.000	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif					
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit				1 Unit					
5	2	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis Sarana dan Prasarana Gedung kantor yang tersedia	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	35 Buah	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		35 Buah	38.500.000	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		35 Unit				35 Unit		
5	2	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor yang tersedia	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	7 Buah	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 Buah	220.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		7 Unit				7 Unit		
5	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa administrasi perkantoran		95 %	676.445.003			95 %	744.089.504	
5	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Pemenuhan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Diadakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Tahun	320.066.956	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	352.073.652	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan				1 Laporan		
5	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	12 Laporan	356.378.047	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	392.015.852	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
						Jumlah Pemenuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor BPKD		12 Bulan				12 Bulan		
5	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor / pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		95 %	335.991.623			95 %	369.590.785	
5	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Unit	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	33.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
						Jumlah mobil jabatan Eselon II BPKD dan STNK yang dipelihara		1 Unit				1 Unit		
5	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	52 Unit	118.991.623	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		52 Unit	130.890.785	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
						Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional baik Roda Dua maupun Roda 4 yang dipelihara dan jumlah pajak		52 unit				52 unit		
5	2	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebeleur Kantor yang dipelihara	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	5 Buah	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Buah	2.200.000	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
						Jumlah Mebel yang Dipelihara		5 Unit				5 Unit		
5	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	12 Bulan	130.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	143.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	24 Unit	55.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		24 Unit	60.500.000	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
						Jumlah sarana dan prasarana gedung yang dipelihara		24 Buah				24 Buah		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif					
5	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD, Total Dana Bagi Hasil kab/Kota dan Desa, Penetapan APBD (Tepat Waktu), Persentase SILPA terhadap APBD, Persentase Belanja Pendidikan (20%), Persentase Belanja Kesehatan (10%), Opini BPK terhadap Laporan Keuangan		48.28 %	224.290.062.366			48.28 %	246.719.068.603	
5	2	2	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		100 %	2.403.555.920			100 %	2.643.911.512	
5	2	2	2.01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	2 Dokumen	200.230.760	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	220.253.836	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
						Jumlah KUA dan Perubahan PPAS yang disusun		2 Dokumen				2 Dokumen		
5	2	2	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	2 Dokumen	145.169.760	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	159.686.736	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
						Jumlah Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun		2 Dokumen				2 Dokumen		
5	2	2	2.01	3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran SKPD terverifikasi	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	48 opd	208.066.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		48 opd	228.872.600	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
						Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi		48 Dokumen				48 Dokumen		
5	2	2	2.01	4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan rencana kerja dan anggaran SKPD terverifikasi	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	48 OPD	158.755.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		48 OPD	174.630.500	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
						Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi		48 Dokumen				48 Dokumen		
5	2	2	2.01	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Kabupaten Bulukumba terverifikasi	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	48 OPD	53.779.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		48 OPD	59.157.670	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
						Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi		48 Dokumen				48 Dokumen		
5	2	2	2.01	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Kabupaten Bulukumba terverifikasi	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	48 OPD	53.779.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		48 OPD	59.157.670	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
						Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi		48 Dokumen				48 Dokumen		
5	2	2	2.01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Buku perda APBD dan Perbup Penjabaran APBD yang tersusun	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	2 Dokumen	393.485.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	432.834.050	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
						Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		2 Dokumen				2 Dokumen		
5	2	2	2.01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	2 Dokumen	424.203.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	466.623.850	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
						Jumlah perda Perubahan APBD dan Perbup Penjabaran Perubahan APBD yang tersusun		2 Dokumen				2 Dokumen		
5	2	2	2.01	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah buku peraturan bupati tentang pokokpokok pengelolaan keuangan daerah dan jumlah buku sisdur keuangan tentang pedoman penyusunan APBD	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	2 BUKU	89.325.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 BUKU	98.257.500	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
						Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		2 Dokumen				2 Dokumen		
5	2	2	2.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Dokumen	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	33.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
						Jumlah laporan pendapatan daerah diseluruh OPD yang disusun		1 Tahun				1 Tahun		
5	2	2	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Dokumen	442.741.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	487.015.100	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif				
			Jumlah perencanaan anggaran belanja yang dikoordinasikan		1 Tahun				1 Tahun				
5	2	2	2.01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Anggaran Pembiayaan Daerah yang dialokasikan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Tahun	85.150.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Tahun	93.665.000	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan		1 Dokumen			1 Dokumen		
5	2	2	2.01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	48 Orang	118.870.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	48 Orang	130.757.000	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
						Jumlah SKPD yang dibina dalam penganggaran daerah		48 OPD			48 OPD		
5	2	2	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase realisasi pengeluaran kas terhadap realisasi penerimaan kas daerah		95 %	1.031.878.310		95 %	1.135.066.141	
5	2	2	2.02	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	12 Dokumen	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	82.500.000	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
						Jumlah pelaporan pengelolaan kas OPD yang dikelola dengan baik		12 Bulan			12 Bulan		
5	2	2	2.02	2	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Laporan	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	55.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
						Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya		1 Tahun			1 Tahun		
5	2	2	2.02	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	48 Dokumen	107.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	48 Dokumen	117.700.000	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
						Jumlah surat penyedia dana (SPD) yang diterbitkan		48 OPD			48 OPD		
5	2	2	2.02	4	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah alokasi dana pembiayaan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Tahun	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Tahun	55.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
						Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah		1 Dokumen			1 Dokumen		
5	2	2	2.02	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	4 Dokumen	205.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	225.500.000	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
						Jumlah laporan Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya yang dibuat		4 Dokumen			4 Dokumen		
5	2	2	2.02	6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	48 Dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	48 Dokumen	55.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
						Jumlah laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan laporan pajak (PFK) yang disusun		48 OPD			48 OPD		
5	2	2	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan laporan pajak (PFK) yang disusun	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	3 LAPORAN	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 LAPORAN	55.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif					
		Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		3 Laporan				3 Laporan						
5	2	2	2.02	8	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	2 Dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	55.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
					Jumlah Laporan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas yang disusun			2 LAPORAN				2 LAPORAN		
5	2	2	2.02	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah data Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait yang dibuat	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	12 Bulan	213.251.950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	234.577.145	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
					Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait			12 Dokumen				12 Dokumen		
5	2	2	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah buku petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan yang tersusun	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 BUKU PEDOMAN	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 BUKU PEDOMAN	44.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
					Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan			1 Dokumen				1 Dokumen		
5	2	2	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang dibina pada pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	48 OPD	141.626.360	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		48 OPD	155.788.996	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			48 Orang				48 Orang		
5	2	2	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase dokumen akuntansi pelaporan keuangan daerah sesuai standar akuntansi pemerintah (SAP)		95 %	1.074.379.940			95 %	1.181.817.934	
5	2	2	2.03	1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	12 Laporan	152.899.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	168.188.900	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
					Jumlah laporan pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah yang disusun			12 Bulan				12 Bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif				
5	2	2	2.03	2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	2 Dokumen	86.169.520	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	94.786.472	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
						Jumlah dokumen laporan yang dievaluasi Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban		2 Dokumen			2 Dokumen		
5	2	2	2.03	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran yang disusun	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	3 Dokumen	53.999.990	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	59.399.989	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
						Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		3 Laporan			3 Laporan		
5	2	2	2.03	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	2 Dokumen	85.438.020	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	93.981.822	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
						Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi		2 Laporan			2 Laporan		
5	2	2	2.03	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah buku rancangan peraturan daerah dan peraturan bupati tentang pertanggungjawaban APBD yang dievaluasi oleh Pemerintah provinsi	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	55 BUKU	152.851.020	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	55 BUKU	168.136.122	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
						Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		55 Dokumen			55 Dokumen		
5	2	2	2.03	6	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen laporan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang dibuat	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Dokumen	40.863.620	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	44.949.982	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
						Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		1 Dokumen			1 Dokumen		
5	2	2	2.03	7	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Dokumen	55.420.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	60.962.000	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
						Jumlah dokumen Laporan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah TPTGR		1 Dokumen			1 Dokumen		
5	2	2	2.03	8	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang tersusun	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Dokumen	150.189.920	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	165.208.912	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
						Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		1 Dokumen			1 Dokumen		
5	2	2	2.03	9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah buku Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah yang disusun	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	2 Dokumen	62.753.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	69.028.300	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif					
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah		2 Dokumen				2 Dokumen					
5	2	2	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pendapatan daerah diseluruh OPD yang disusun	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Tahun	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	55.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
						Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah		1 Dokumen				1 Dokumen		
5	2	2	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	"Jumlah OPD yang dibina pelaksanaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggung jawaban Pemerintah Kabupaten"	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	48 OPD	90.786.190	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		48 OPD	99.864.809	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		48 Orang				48 Orang		
5	2	2	2.03	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Lembaga	44.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Lembaga	49.005.000	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
						Jumlah OPD yang dibina Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten		1 OPD				1 OPD		
5	2	2	2.03	13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Dokumen	48.459.660	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	53.305.626	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
						Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota		1 Laporan				1 Laporan		
5	2	2	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		95 %	219.464.065.196			95 %	241.410.471.716	
5	2	2	2.04	3	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Analisis Perencanaan dan pelaksanaan penerimaan pinjaman pemerintah daerah	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 LAPORAN	14.230.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 LAPORAN	15.653.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
						Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah		1 Laporan				1 Laporan		
5	2	2	2.04	8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah desa yang mendapat Anggaran ADD dan BDD kepada Pemerintah Desa Se Kabupaten Bulukumba	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	110 DESA	184.300.084.390	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		110 DESA	202.730.092.829	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
						Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		110 Laporan				110 Laporan		
5	2	2	2.04	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah dana Belanja Tidak Terduga yang tersalur	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Tahun	6.138.358.087	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	6.752.193.896	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		1 Laporan				1 Laporan		
5	2	2	2.04	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang mendapat Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa Se Kabupaten Bulukumba	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	110 DESA	14.795.622.719	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		110 DESA	16.275.184.991	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota		110 Laporan				110 Laporan		
5	2	2	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase pengguna system aplikasi terhadap jumlah OPD		95 %	316.183.000			95 %	347.801.300	
5	2	2	2.05	2	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah terpelihara	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	4 Aplikasi	99.923.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Aplikasi	109.915.300	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
						Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah		4 Dokumen				4 Dokumen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif				
5	2	2	2.05	3	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang terbina pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	48 OPD	216.260.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	48 OPD	237.886.000	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		48 Orang				48 Orang		
5	2	3			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD Manajemen Aset		93.82 %	1.067.095.540		93.82 %	1.173.805.094	
5	2	3	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang dikelola dengan baik		95 %	1.067.095.540		95 %	1.173.805.094	
5	2	3	2.01	1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah buku Standar Harga yang disusun	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Buku	109.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Buku	119.900.000	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
					Jumlah Standar Harga yang Disusun			1 Dokumen			1 Dokumen		
5	2	3	2.01	2	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pedoman Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah yang tersusun	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 dokumen	30.195.860	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen	33.215.446	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
					Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah			1 Dokumen			1 Dokumen		
5	2	3	2.01	3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	"Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah yang tersusun"	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	2 dokumen	117.798.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 dokumen	129.577.965	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah			2 Dokumen			2 Dokumen		
5	2	3	2.01	4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Dokumen	55.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	60.500.000	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
					Jumlah kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen		
5	2	3	2.01	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	"Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah"	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	3 Laporan	110.876.230	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Laporan	121.963.853	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah			3 Laporan			3 Laporan		
5	2	3	2.01	6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	"Jumlah dokumen Barang Milik Daerah yang terinventarisasi"	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	2 dokumen	153.590.540	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 dokumen	168.949.594	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
					Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah			3 Laporan			3 Laporan		
5	2	3	2.01	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	"Jumlah dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah"	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 dokumen	57.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen	62.700.000	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
					Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah			1 Laporan			1 Laporan		
5	2	3	2.01	9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	2 Laporan	60.974.020	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Laporan	67.071.422	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
					"Jumlah SK Pemindahtanganan dan SK pinjam pakai pengawasan dan pengendalian BMD"			1 dokumen			1 dokumen		
5	2	3	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	3 Dokumen	151.496.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	166.645.600	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
					Jumlah dokumen, pengawasan Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah se Kab. Bulukumba			1 dokumen			1 dokumen		
5	2	3	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	4 Laporan	25.488.440	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	28.037.284	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
					Jumlah laporan rekonsiliasi Barang Milik Daerah yang tersusun			1 laporan			1 laporan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif				
5	2	3	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	1 Laporan	90.320.460	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	99.352.506	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
					"Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun"			1 laporan			1 laporan		
5	2	3	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	152 Orang	105.355.840	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	152 Orang	115.891.424	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
					Jumlah peserta sosialisasi Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah			150 peserta			150 peserta		
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap pendapatan		11.76 %	6.919.788.547		11.76 %	7.611.767.401	
5	2	4	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		100 %	6.919.788.547		100 %	7.611.767.401	
5	2	4	2.01	1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	12 Dokumen	11.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	12.100.000	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
					Jumlah rapat koordinasi / asistensi/ evaluasi/ pengelolaan PKB dan BBNKB			12 Bulan			12 Bulan		
5	2	4	2.01	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	12 Dokumen	11.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	12.100.000	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
					Jumlah dokumen teknis pemungutan PKB dan BBNKB			12 Bulan			12 Bulan		
5	2	4	2.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	10 Laporan	447.313.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Laporan	492.044.520	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
					Jumlah Sosialisasi/ Penyuluhan Pajak Daerah			10 kecamatan			10 kecamatan		
5	2	4	2.01	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	12 Unit	400.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	12 Unit	440.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
					Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan terpelihara pada bada pendapatan daerah			12 Bulan			12 Bulan		
5	2	4	2.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	12 Laporan	795.142.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	874.656.200	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
					Jumlah Objek Pajak Daerah yang didata (door to door) dan Samsat sipakainge			12 Bulan			12 Bulan		
5	2	4	2.01	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah ketersediaan inovasi layanan unggulan samsat bagi masyarakat	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	12 Bulan	334.623.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	368.086.180	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
					Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah			12 Laporan			12 Laporan		
5	2	4	2.01	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	12 Dokumen	115.302.504	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	126.832.754	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
					Jumlah Wajib Pajak yang ditetapkan di Badan Pendapatan Daerah			12 Bulan			12 Bulan		
5	2	4	2.01	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	12 Layanan	11.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Layanan	12.100.000	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
					Jumlah Pelayanan dan Konsultasi yang dilakukan			12 Bulan			12 Bulan		
5	2	4	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	12 Dokumen	154.795.358	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	170.274.893	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
					jumlah rapat evaluasi PAD untuk lingkup BAPENDA			12 Bulan			12 Bulan		
5	2	4	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	12 Dokumen	3.905.164.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	4.295.680.510	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif				
		Jumlah unit kendaraan yang terjaring pada Badan Pendapatan Daerah		12 Bulan				12 Bulan					
5	2	4	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	12 Dokumen	372.649.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	409.914.890	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
					jumlah laporan pemeriksaan reguler pendapatan daerah			12 Bulan			12 Bulan		
5	2	4	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	12 Laporan	361.797.685	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	397.977.454	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
					jumlah laporan kegiatan retribusi daerah			12 Bulan			12 Bulan		
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5	3				KEPEGAWAIAN				6.347.393.623			6.982.132.985	
5	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (BKPSDM)		100 %	4.884.922.623		100 %	5.373.414.885	
5	3	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		19 Dokumen	36.795.340		19 Dokumen	40.474.874	
5	3	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	3 Dokumen	31.897.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Dokumen	35.087.470	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	12 Laporan	4.897.640	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	5.387.404	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase terlaksananya administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	3.844.912.025		100 %	4.229.403.228	
5	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	45 Orang/ bulan	3.715.622.025	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	45 Orang/ bulan	4.087.184.228	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	12 Bulan	129.290.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Bulan	142.219.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase terlaksananya administrasi umum perangkat Daerah		100 %	381.920.810		100 %	420.112.891	
5	3	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	1 Paket	6.530.810	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Paket	7.183.891	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	1 Paket	4.979.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Paket	5.477.670	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	12 Bulan	59.969.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Bulan	65.966.780	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	1 Paket	11.742.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Paket	12.916.750	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	12 Bulan	198.698.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Bulan	218.567.800	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	5 Dokumen	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Dokumen	110.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	158.452.626		100 %	174.297.888	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif					
5	3	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		3 Unit	20.040.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Unit	22.044.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	13 Unit	138.412.626	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		13 Unit	152.253.888	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	377.391.822			100 %	415.131.004	
5	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	12 Bulan	193.791.822	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Bulan	213.171.004	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	12 Orang	183.600.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Orang	201.960.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Terpelihara dengan Baik		100 %	85.450.000			100 %	93.995.000	
5	3	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	1 Unit	11.400.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	12.540.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	10 Unit	14.750.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Unit	16.225.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	24 Unit	4.800.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24 Unit	5.280.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	15 Unit	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15 Unit	5.500.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	1 Unit	49.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	54.450.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Presentase Meningkatnya Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara diatas 90 Lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba		45 %	1.462.471.000			45 %	1.608.718.100	
5	3	2	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Presentase terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		100 %	540.941.000			100 %	595.035.100	
5	3	2	2.01	3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	321 Formasi	348.106.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		321 Formasi	382.916.600	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	30 Dokumen	132.835.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Dokumen	146.118.500	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	6031 ASN	60.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6031 ASN	66.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Presentase Terlaksananya Mutasi dan Promosi Jabatan		100 %	580.554.000			100 %	638.609.400	
5	3	2	2.02	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	866 Dokumen	405.554.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		866 Dokumen	446.109.400	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif		
5 3 2 2.02 2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	2 Periode	175.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Periode	192.500.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 3 2 2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Aparatur Sipil Negara Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis		100 %	101.000.000			100 %	111.100.000		
5 3 2 2.03 4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	23 Orang	101.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		23 Orang	111.100.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 3 2 2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Presentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		100 %	239.976.000			100 %	263.973.600		
5 3 2 2.04 2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	5970 Dokumen	61.670.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5970 Dokumen	67.837.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 3 2 2.04 4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	350 Orang	28.306.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		350 Orang	31.136.600	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 3 2 2.04 8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	30 Laporan	150.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Laporan	165.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				3.285.629.604				3.614.192.564		
5 4 2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Presentase Peningkatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional ,pendidikan dan pelatihan prajabatan (LATSAR), serta pendidikan dan pelatihan teknis lainnya		33 %	3.285.629.604			33 %	3.614.192.564		
5 4 2 2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Presentase Aparatur sipil Negara Yang Mnegikuti Diklat Pengembangan Komptensi Teknis/Fungsional		100 %	46.780.000			100 %	51.458.000		
5 4 2 2.01 4	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	2 Kali	46.780.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Kali	51.458.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 4 2 2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Presentase Aparatur sipil Negara yang mengikuti diklat pengembangan kompetensi Struktural		100 %	3.238.849.604			100 %	3.562.734.564		
5 4 2 2.02 7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	200 Orang	3.238.849.604	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		200 Orang	3.562.734.564	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN										
6 1	INSPEKTORAT DAERAH				12.250.936.541				13.068.483.324		
6 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Inspektorat Daerah)		100 %	6.993.407.541			100 %	7.548.077.874		
6 1 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	6.205.500			100 %	11.515.775		
6 1 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	6 Dokumen	6.205.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Dokumen	6.515.775	Inspektorat Daerah	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
			Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024								
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target		Pagu Indikatif					
6	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	12 Bulan		-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	5.000.000	Inspektorat Daerah
6	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah terkait ketersediaan gaji dan tunjangan		100 %	4.168.226.258				100 %	4.376.637.571	
6	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	40 Orang/ bulan	4.076.481.658		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		40 Orang/ bulan	4.280.305.741	Inspektorat Daerah
6	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	12 Bulan	85.110.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	89.365.500	Inspektorat Daerah
6	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	1 Laporan	3.545.600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	3.722.880	Inspektorat Daerah
6	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	12 Laporan	3.089.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	3.243.450	Inspektorat Daerah
6	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur pengawasan		100 %	1.406.404.000				100 %	1.476.724.200	
6	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	60 Orang	1.406.404.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		60 Orang	1.476.724.200	Inspektorat Daerah
6	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah		100 %	547.889.845				100 %	575.284.337	
6	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	1 Paket	2.481.125		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	2.605.181	Inspektorat Daerah
6	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	2 Paket	139.483.390		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	146.457.560	Inspektorat Daerah
6	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggunaan yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	4 Paket	46.626.330		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Paket	48.957.647	Inspektorat Daerah
6	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	102 Laporan	359.299.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		102 Laporan	377.263.950	Inspektorat Daerah
6	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		100 %	534.148.938				100 %	660.856.345	
6	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	2 Unit	431.785.038		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	453.374.250	Inspektorat Daerah
6	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	100 %			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	50.000.000	Inspektorat Daerah
6	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	11 Unit	102.363.900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11 Unit	107.482.095	Inspektorat Daerah
6	1	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	100 %			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	50.000.000	Inspektorat Daerah
6	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang dalam hal penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik serta layanan umum kantor		100 %	163.549.000				100 %	171.726.450	
6	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	12 Laporan	43.824.600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	46.015.830	Inspektorat Daerah
						Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12 Bulan					12 Bulan		
6	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	12 Laporan	119.724.400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	125.710.620	Inspektorat Daerah
						Tersedianya jasa Pelayanan Umum Kantor		12 Bulan					12 Bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif					
6	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah dalam hal persentase penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		100 %	166.984.000			100 %	275.333.196	
6	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	1 Unit	18.859.375	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	19.802.344	Inspektorat Daerah
6	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	5 Unit	127.015.625	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit	133.366.402	Inspektorat Daerah
6	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	8 Unit	21.109.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 Unit	22.164.450	Inspektorat Daerah
6	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	100 %	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	100.000.000	Inspektorat Daerah
6	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Jumlah Temuan BPK dan Persentase Pelanggaran Pegawai		57 %	3.688.105.000			57 %	3.872.510.250	
6	1	2	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal		100 %	3.194.305.000			100 %	3.354.020.250	
6	1	2	2.01	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	6 Laporan	272.344.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Laporan	285.961.200	Inspektorat Daerah
6	1	2	2.01	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	20 Laporan	1.465.560.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Laporan	1.538.838.000	Inspektorat Daerah
6	1	2	2.01	3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	8 Laporan	181.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 Laporan	190.260.000	Inspektorat Daerah
6	1	2	2.01	4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	25 Laporan	421.760.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		25 Laporan	442.848.000	Inspektorat Daerah
6	1	2	2.01	5	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	8 Laporan	320.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 Laporan	336.210.000	Inspektorat Daerah
6	1	2	2.01	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	4 Dokumen	533.241.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	559.903.050	Inspektorat Daerah
6	1	2	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu			493.800.000				518.490.000	
6	1	2	2.02	2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	20 Laporan	493.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Laporan	518.490.000	Inspektorat Daerah
6	1	3			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Tindak Lanjut Temuan		50 %	1.569.424.000			50 %	1.647.895.200	
6	1	3	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dibidang fasilitasi pengawasan		100 %	211.780.000			100 %	222.369.000	
						terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		100 %				100 %		
6	1	3	2.01	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	2 Rekomendasi	211.780.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Rekomendasi	222.369.000	Inspektorat Daerah
						Terlaksananya fasilitasi manajemen risiko, SPIP dan Pendampingan FCP		2 Kegiatan				2 Kegiatan		
6	1	3	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Persentase cakupan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah		100 %	1.357.644.000			100 %	1.425.526.200	
6	1	3	2.02	1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	36 perangkat daerah	163.530.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		36 perangkat daerah	171.706.500	Inspektorat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target		Pagu Indikatif			
6	1	3	2.02	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	36 perangkat daerah	276.201.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	36 perangkat daerah	290.011.050	Inspektorat Daerah
6	1	3	2.02	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	3 Kegiatan	860.266.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Kegiatan	903.279.300	Inspektorat Daerah
6	1	3	2.02	4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	36 perangkat daerah	57.647.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	36 perangkat daerah	60.529.350	Inspektorat Daerah
7					UNSUR KEWILAYAHAN								
7	1				KECAMATAN				16.234.683.832			20.382.201.448	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (UJUNGBULU)		100 %	9.475.969.832		100 %	12.947.616.048	
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah		12 Bulan	7.638.400.364		12 Bulan	8.402.240.400	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan TPP ASN		14 bulan	7.269.200.364	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	14 bulan	7.996.120.400	KANTOR KECAMATAN UJUNGBULU
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		5 Dokumen	354.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Dokumen	389.620.000	KANTOR KECAMATAN UJUNGBULU
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	16.500.000	KANTOR KECAMATAN UJUNGBULU
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	terlaksananya Administrasi kepegawaian perangkat daerah		100 %	121.235.000		100 %	133.358.500	
7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		12 buln	121.235.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 buln	133.358.500	KANTOR KECAMATAN UJUNGBULU
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya administrasi umum perangkat daerah		12 Bulan	597.153.117		12 Bulan	1.771.401.687	
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		12 buln	34.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 buln	37.400.000	KANTOR KECAMATAN UJUNGBULU
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 buln	112.579.117	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 buln	1.238.370.287	KANTOR KECAMATAN UJUNGBULU
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		12 buln	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 buln	55.000.000	KANTOR KECAMATAN UJUNGBULU
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 buln	174.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 buln	191.400.000	KANTOR KECAMATAN UJUNGBULU
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 buln	226.574.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 buln	249.231.400	KANTOR KECAMATAN UJUNGBULU
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	terlaksananya pengadaan barang milik daerah		12 Bulan	230.000.000		12 Bulan	253.000.000	
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Meubeler Kantor yang tersedia		12 buln	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 buln	110.000.000	KANTOR KECAMATAN UJUNGBULU
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang tersedia		12 buln	130.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 buln	143.000.000	KANTOR KECAMATAN UJUNGBULU
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		12 Bulan	704.181.351		12 Bulan	1.689.115.461	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 buln	19.306.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 buln	21.236.600	KANTOR KECAMATAN UJUNGBULU
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 buln	92.375.351	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 buln	1.016.128.861	KANTOR KECAMATAN UJUNGBULU
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 buln	592.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 buln	651.750.000	KANTOR KECAMATAN UJUNGBULU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif					
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah		12 Bulan	185.000.000			12 Bulan	698.500.000	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		12 buln	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 buln	550.000.000	KANTOR KECAMATAN UJUNGBULU
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		12 buln	65.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 buln	71.500.000	KANTOR KECAMATAN UJUNGBULU
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		12 buln	70.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 buln	77.000.000	KANTOR KECAMATAN UJUNGBULU
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (UJUNGBULU)		100 %	6.758.714.000			100 %	7.434.585.400	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan		100 %	6.758.714.000			100 %	7.434.585.400	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Bertambahnya Sarana dan Prasarana Kelurahan		12 buln	4.758.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 buln	5.233.800.000	KANTOR KECAMATAN UJUNGBULU
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		12 buln	2.000.714.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 buln	2.200.785.400	KANTOR KECAMATAN UJUNGBULU
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	1				KECAMATAN				3.179.370.195				3.488.313.302	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (UJUNG LOE)		100 %	2.312.471.101			100 %	2.535.424.299	
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah		100 %	1.915.582.149			100 %	2.107.140.363	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bulukumba, Ujungloe, Dannuang	12 bulan	1.859.362.149	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	2.045.298.363	KANTOR KECAMATAN UJUNG LOE
						Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		12 Bulan				12 Bulan		
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bulukumba, Ujungloe, Dannuang	12 Bulan	56.220.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	61.842.000	KANTOR KECAMATAN UJUNG LOE
						Tersedianya pengelolaan administrasi keuangan & LPJ keuangan dan peningkatan aktifitas kerja		12 Bulan				12 Bulan		
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah		100 %	201.014.567			100 %	215.713.121	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Unit	24.150.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		3 Unit	24.433.000	KANTOR KECAMATAN UJUNG LOE
						Tersedianya peralatan perkantoran		12 Bulan				12 Bulan		
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket	10.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	10.500.000	KANTOR KECAMATAN UJUNG LOE
						Tersedianya peralatan rumah tangga		1 Paket				1 Paket		
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 Bulan	22.214.966	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	22.300.032	KANTOR KECAMATAN UJUNG LOE
						Tersedianya alat tulis kantor		12 Bulan				12 Bulan		
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		12 Paket	4.349.601	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Paket	4.480.089	KANTOR KECAMATAN UJUNG LOE
						Tersedianya barang penggandaan		12 Bulan				12 Bulan		
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bulukumba, Ujungloe, Dannuang	12 Bulan	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	55.000.000	KANTOR KECAMATAN UJUNG LOE
						Tersedianya makan minum kantor		12 Bulan				12 Bulan		
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bulukumba, Ujungloe, Dannuang	12 Bulan	90.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	99.000.000	KANTOR KECAMATAN UJUNG LOE

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif					
			Terlaksananya perjalanan dinas PNS dalam rangka rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah guna memperlancar tugas tugas kedinasan		12 Bulan				12 Bulan					
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang dipelihara		100 %	12.000.000			100 %	13.200.000	
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujungloe, Dannuang	8 Jenis	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 Jenis	13.200.000	KANTOR KECAMATAN UJUNG LOE
						Peningkatan kinerja pimpinan		8 Jenis				8 Jenis		
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	147.968.585			100 %	162.532.041	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujungloe, Dannuang	12 Bulan	19.832.185	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	21.815.403	KANTOR KECAMATAN UJUNG LOE
						Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12 Bulan				12 Bulan		
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kerja		4 Unit	3.896.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Unit	4.052.638	KANTOR KECAMATAN UJUNG LOE
						Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja		4 Unit				4 Unit		
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujungloe, Dannuang	12 Bulan	124.240.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	136.664.000	KANTOR KECAMATAN UJUNG LOE
						Tersedianya jasa kebersihan kantor dan terciptanya lingkungan kerja yang bersih dan tertata		12 Bulan				12 Bulan		
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	35.905.800			100 %	36.838.774	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Bulukumba, Ujungloe, Dannuang	1 Unit	10.815.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	11.139.450	KANTOR KECAMATAN UJUNG LOE
						Terpeliharanya kendaraan dinas mobil jabatan		1 Unit				1 Unit		
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Bulukumba, Ujungloe, Dannuang	4 Unit	6.798.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Unit	7.001.940	KANTOR KECAMATAN UJUNG LOE
						Terpenuhinya perizinan kendaraan dinas, terawatnya kendaraan dinas kecamatan dan kelengkapan STNK		4 Unit				4 Unit		
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Bulukumba, Ujungloe, Dannuang	10 Jenis	3.872.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Jenis	3.988.984	KANTOR KECAMATAN UJUNG LOE
						Lancarnya pelaksanaan administrasi kantor		10 Jenis				10 Jenis		
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bulukumba, Ujungloe, Dannuang	1 Paket	14.420.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	14.708.400	KANTOR KECAMATAN UJUNG LOE
						Terpeliharanya sarana perkantoran		1 Paket				1 Paket		
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang terlaksana (UJUNG LOE)		100 %	17.000.000			100 %	18.000.000	
7	1	2	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum		100 %	17.000.000			100 %	18.000.000	
7	1	2	2.03	2	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	Kab. Bulukumba, Ujungloe, Dannuang	1 Tahun	17.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	18.000.000	KANTOR KECAMATAN UJUNG LOE
						Terpeliharanya sarana perkantoran		1 Paket				1 Paket		
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (UJUNG LOE)		100 %	844.899.094			100 %	929.389.003	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif					
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan			844.899.094				929.389.003	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kab. Bulukumba, Ujungloe, Dannuang	1 Paket	44.153.094	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	48.568.403	KANTOR KECAMATAN UJUNG LOE
						Terlaksananya perencanaan pembangunan di kelurahan		12 Bulan				12 Bulan		
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kab. Bulukumba, Ujungloe, Dannuang	13 Paket	569.621.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13 Paket	626.583.100	KANTOR KECAMATAN UJUNG LOE
						Terlaksananya pembangunan sarana prasarana lingkungan pemukiman, transportasi, kesehatan dan pendidikan		12 Bulan				12 Bulan		
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Bulukumba, Ujungloe, Dannuang	1 Paket	231.125.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	254.237.500	KANTOR KECAMATAN UJUNG LOE
						Terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat pendidikan dan kebudayaan dan terlaksananya kegiatan pengembangan usaha mikro		12 Bulan				12 Bulan		
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (UJUNG LOE)		100 %	5.000.000			100 %	5.500.000	
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pemenuhan asistensi APBDesa		100 %	5.000.000			100 %	5.500.000	
7	1	6	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kab. Bulukumba, Ujungloe, Dannuang	2 Kali	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Kali	5.500.000	KANTOR KECAMATAN UJUNG LOE
						Terpenuhinya penyusunan program pemberdayaan masyarakat desa		12 Bulan				12 Bulan		
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	1				KECAMATAN				6.513.231.779				7.532.731.242	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (BULUKUMPA)		100 %	4.110.993.779			100 %	5.130.493.242	
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	193.382.000			100 %	212.720.200	
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bulukumba, Bulukumpa, Tanete	12 BULAN	193.382.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 BULAN	212.720.200	KANTOR KECAMATAN BULUKUMPA
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	3.235.220.170			100 %	4.217.463.430	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bulukumba, Bulukumpa, Tanete	100 %	3.136.358.170	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	4.108.715.230	KANTOR KECAMATAN BULUKUMPA
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Bulukumba, Bulukumpa, Tanete	12 BULAN	98.862.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 BULAN	108.748.200	KANTOR KECAMATAN BULUKUMPA
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100 %	41.018.755			100 %	49.277.285	
7	1	1	2.03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Bulukumba, Bulukumpa, Tanete	5 Dokumen	41.018.755	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	49.277.285	KANTOR KECAMATAN BULUKUMPA
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	240.627.492			100 %	252.356.965	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif				
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Bulukumpa, Tanete	1 PAKET	15.367.725	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 PAKET	16.904.498	KANTOR KECAMATAN BULUKUMPA
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Bulukumpa, Tanete	6 UNIT	6 UNIT	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 UNIT	55.166.174	KANTOR KECAMATAN BULUKUMPA
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Bulukumpa, Tanete	12 BULAN	15.177.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 BULAN	16.694.700	KANTOR KECAMATAN BULUKUMPA
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Bulukumpa, Tanete	12 BULAN	68.166.593	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 BULAN	68.166.593	KANTOR KECAMATAN BULUKUMPA
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Bulukumpa, Tanete	12 BULAN	12.070.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 BULAN	13.277.000	KANTOR KECAMATAN BULUKUMPA
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bulukumba, Bulukumpa, Tanete	12 BULAN	18.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 BULAN	20.680.000	KANTOR KECAMATAN BULUKUMPA
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bulukumba, Bulukumpa, Tanete	12 BULAN	55.880.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 BULAN	61.468.000	KANTOR KECAMATAN BULUKUMPA
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Memenuhi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	185.683.104		100 %	185.683.104	
7	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Bulukumpa, Tanete	1 UNIT	124.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 UNIT	124.000.000	KANTOR KECAMATAN BULUKUMPA
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Bulukumpa, Tanete	2 UNIT	30.316.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 UNIT	30.316.000	KANTOR KECAMATAN BULUKUMPA
7	1	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Bulukumpa, Tanete	1 PAKET	31.367.104	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 PAKET	31.367.104	KANTOR KECAMATAN BULUKUMPA
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Memenuhi Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			213.812.258			211.592.258	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Bulukumpa, Tanete	12 BULAN	33.192.258	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 BULAN	33.192.258	KANTOR KECAMATAN BULUKUMPA
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Bulukumpa, Tanete	12 BULAN	14.420.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 BULAN	12.200.000	KANTOR KECAMATAN BULUKUMPA
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Bulukumpa, Tanete	12 BULAN	166.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 BULAN	166.200.000	KANTOR KECAMATAN BULUKUMPA
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik		100 %	1.250.000		100 %	1.400.000	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kab. Bulukumba, Bulukumpa, Tanete	2 UNIT	1.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 UNIT	1.400.000	KANTOR KECAMATAN BULUKUMPA
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (BULUKUMPA)		100 %	2.402.238.000		100 %	2.402.238.000	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		100 %	2.402.238.000		100 %	2.402.238.000	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kab. Bulukumba, Bulukumpa, Tanete	12 PAKET	1.681.566.600		12 PAKET	1.681.566.600	KANTOR KECAMATAN BULUKUMPA
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Bulukumba, Bulukumpa, Tanete	19 PAKET	720.671.400	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	19 PAKET	720.671.400	KANTOR KECAMATAN BULUKUMPA
7					UNSUR KEWILAYAHAN								
7	1				KECAMATAN				4.683.094.781			5.151.404.258	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (RILAU ALE)		100 %	3.882.348.781		100 %	4.270.583.658	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif					
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gaji dan tunjangan ASN yang tersedia		100 %	3.511.304.792			100 %	3.862.435.271	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah gaji dan tunjangan ASN yang tersedia	Kab. Bulukumba, Rilauale, Palampang	12 Bulan	3.395.742.392	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	3.735.316.631	KANTOR KECAMATAN RILAU ALE
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Bulukumba, Rilauale, Palampang	5 Dokumen	114.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	126.170.000	KANTOR KECAMATAN RILAU ALE
						"Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang terlaksana"		12 Bulan				12 Bulan		
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bulukumba, Rilauale, Palampang	12 Bulan	8.624	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	94.864	KANTOR KECAMATAN RILAU ALE
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Mengikuti pendidikan dan pelatihan		100 %	25.000.000			100 %	27.500.000	
7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Mengikuti pendidikan dan pelatihan		12 Bulan	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	27.500.000	KANTOR KECAMATAN RILAU ALE
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Menunjang Administrasi umum perangkat Daerah		100 %	183.534.449			100 %	201.887.893	
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	"Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga Yang disediakan"		12 Bulan	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	11.000.000	KANTOR KECAMATAN RILAU ALE
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	"Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan"		12 Bulan	31.902.350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	35.092.585	KANTOR KECAMATAN RILAU ALE
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		12 Bulan	3.739.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	4.113.890	KANTOR KECAMATAN RILAU ALE
7	1	1	2.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Bulukumba, Rilauale, Palampang	12 Bulan	52.370.199	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	57.607.218	KANTOR KECAMATAN RILAU ALE
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Bulan	85.522.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	94.074.200	KANTOR KECAMATAN RILAU ALE
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang milik daerah		100 %	101.076.614			100 %	111.184.275	
7	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional dan Lapangan yang diadakan		12 Bulan	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	38.500.000	KANTOR KECAMATAN RILAU ALE
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	Kab. Bulukumba, Rilauale, Palampang	12 Bulan	18.276.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	20.103.600	KANTOR KECAMATAN RILAU ALE
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan mesin yang diadakan		12 Bulan	35.836.314	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	39.419.945	KANTOR KECAMATAN RILAU ALE
7	1	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Aset Tak Berwujud yang diadakan		12 Bulan	11.964.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	13.160.730	KANTOR KECAMATAN RILAU ALE
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terciptanya jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah		100 %	38.524.166			100 %	42.376.583	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran telepon, air dan listrik		12 Bulan	13.774.166	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	15.151.583	KANTOR KECAMATAN RILAU ALE
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara		12 Bulan	2.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	2.475.000	KANTOR KECAMATAN RILAU ALE
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Bulan	22.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	24.750.000	KANTOR KECAMATAN RILAU ALE
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Terpeliharannya Barang Milik Daerah		100 %	22.908.760			100 %	25.199.636	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Biaya pemeliharaan	Kab. Bulukumba, Rilauale, Palampang	12 Bulan	12.181.760	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	13.399.936	KANTOR KECAMATAN RILAU ALE

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif		Sumber Dana		Target
7 1 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Bulukumba, Rilauale, Palampang	100 %	4.060.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	4.466.000	KANTOR KECAMATAN RILAU ALE
7 1 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		100 %	6.667.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	7.333.700	KANTOR KECAMATAN RILAU ALE
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (RILAU ALE)		100 %	800.746.000		100 %	880.820.600	
7 1 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan		100 %	800.746.000		100 %	880.820.600	
7 1 3 2.02 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	542.746.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	597.020.600	KANTOR KECAMATAN RILAU ALE
7 1 3 2.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	258.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	283.800.000	KANTOR KECAMATAN RILAU ALE
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7 1	KECAMATAN				7.161.477.504			8.328.363.018	
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (GANTARANG)		100 %	4.737.094.504		100 %	5.557.685.118	
7 1 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu		100 Persen	4.003.015.106		100 Persen	4.981.047.800	
7 1 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		12 Bulan	3.872.445.146		12 Bulan	4.791.760.500	KANTOR KECAMATAN GANTARANG
7 1 1 2.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		5 Dokumen	126.490.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Dokumen	184.055.000	KANTOR KECAMATAN GANTARANG
7 1 1 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Dokumen	4.079.960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	5.232.300	KANTOR KECAMATAN GANTARANG
7 1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor		100 Persen	239.503.575		100 Persen	274.067.613	
7 1 1 2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan		19 Jenis	3.992.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	19 Jenis	9.262.300	KANTOR KECAMATAN GANTARANG
7 1 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan		23 Jenis	110.864.575	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	23 Jenis	134.790.513	KANTOR KECAMATAN GANTARANG
7 1 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang yang Dicitak dan Digandakan		15 Jenis	13.218.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15 Jenis	14.644.000	KANTOR KECAMATAN GANTARANG
7 1 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Bulan	111.428.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	115.370.800	KANTOR KECAMATAN GANTARANG
7 1 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 Persen	304.632.000		100 Persen	51.704.450	
7 1 1 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang tersedia		5 Buah	266.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Buah	24.780.000	KANTOR KECAMATAN GANTARANG
7 1 1 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang tersedia		2 Buah	10.815.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Buah	11.139.450	KANTOR KECAMATAN GANTARANG
7 1 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang		100 Persen	173.304.600		100 Persen	227.943.738	
7 1 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Bulan	38.110.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	37.193.918	KANTOR KECAMATAN GANTARANG
7 1 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dibayarkan gajinya		12 Bulan	135.194.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	190.749.820	KANTOR KECAMATAN GANTARANG
7 1 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	% Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik		100 Persen	16.639.223		100 Persen	22.921.517	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif					
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		2 Unit	12.212.023	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	16.301.501	KANTOR KECAMATAN GANTARANG
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		7 Unit	4.427.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 Unit	6.620.016	KANTOR KECAMATAN GANTARANG
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang terlaksana(GANTARANG)		100 %	22.145.000			100 %	22.145.000	
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	% Kegiatan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		100 Persen	22.145.000			100 Persen	22.145.000	
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		2 Kegiatan	22.145.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Kegiatan	22.145.000	KANTOR KECAMATAN GANTARANG
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (GANTARANG)		100 %	2.402.238.000			100 %	2.748.532.900	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana		100 Persen	2.402.238.000			100 Persen	2.748.532.900	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dilaksanakan		18 Paket	1.774.916.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		18 Paket	1.994.035.000	KANTOR KECAMATAN GANTARANG
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Jasa Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		12 Bulan	627.321.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	754.497.900	KANTOR KECAMATAN GANTARANG
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	1				KECAMATAN				2.931.103.969				3.224.214.365	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (KINDANG)		100 %	2.130.357.969			100 %	2.343.393.765	
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	1.865.016.973			100 %	2.051.518.670	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bulukumba, Kindang, Borong Rappoa	12 bulan	1.790.820.973	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		12 bulan	1.969.903.070	KANTOR KECAMATAN KINDANG
						"Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN :yang terbayar"		12 bulan				12 bulan		
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Bulukumba, Kindang, Borong Rappoa	12 bulan	74.196.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	81.615.600	KANTOR KECAMATAN KINDANG
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah		100 persen	115.163.441			100 persen	126.679.785	
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kab. Bulukumba, Kindang, Borong Rappoa	12 bulan	80.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	88.000.000	KANTOR KECAMATAN KINDANG
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bulukumba, Kindang, Borong Rappoa	12 bulan	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	4.400.000	KANTOR KECAMATAN KINDANG
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	"Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD"	Kab. Bulukumba, Kindang, Borong Rappoa	12 bulan	31.163.441	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	34.279.785	KANTOR KECAMATAN KINDANG
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksannya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	43.000.000			100 %	47.300.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif					
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Kab. Bulukumba, Kindang, Borong Rappoa	5 Unit	8.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit	8.800.000	KANTOR KECAMATAN KINDANG
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bulukumba, Kindang, Borong Rappoa	2 unit	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 unit	38.500.000	KANTOR KECAMATAN KINDANG
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	75.177.555			100 %	82.695.310	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bulukumba, Kindang, Borong Rappoa	12 bulan	6.277.555	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	6.905.310	KANTOR KECAMATAN KINDANG
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bulukumba, Kindang, Borong Rappoa	12 bulan	68.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	75.790.000	KANTOR KECAMATAN KINDANG
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	32.000.000			100 %	35.200.000	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	"Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor"	Kab. Bulukumba, Kindang, Borong Rappoa	8 UNIT	22.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 UNIT	24.200.000	KANTOR KECAMATAN KINDANG
7	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	"Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya"	Kab. Bulukumba, Kindang, Borong Rappoa	3 unit	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 unit	11.000.000	KANTOR KECAMATAN KINDANG
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (KINDANG)		100 %	800.746.000			100 %	880.820.600	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan		100 Persen	800.746.000			100 Persen	880.820.600	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kab. Bulukumba, Kindang, Borong Rappoa	12 bulan	650.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	715.000.000	KANTOR KECAMATAN KINDANG
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Bulukumba, Kindang, Borong Rappoa	12 bulan	150.746.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	165.820.600	KANTOR KECAMATAN KINDANG
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	1				KECAMATAN				4.243.061.717				4.667.367.889	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (HERLANG)		100 %	2.676.911.717			100 %	2.944.602.889	
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keuangan perangkat Daerah		100 %	2.290.000.000			100 %	2.519.000.000	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		12 Bulan	2.200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	2.420.000.000	KANTOR KECAMATAN HERLANG
						"Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN ;yang terbayar"		12 Bulan				12 Bulan		
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		5 Dokumen	90.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	99.000.000	KANTOR KECAMATAN HERLANG
						Terbayarnya Honorarium PNS		12 Bulan				12 Bulan		
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	20.000.000			100 %	22.000.000	
7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	terlaksananya pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara	Kab. Bulukumba, Herlang, Tanuntung	2 bulan	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 bulan	22.000.000	KANTOR KECAMATAN HERLANG
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Umum Perangkat Daerah		100 %	202.723.908			100 %	222.996.299	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif		
7 1 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 Bulan	117.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	128.700.000	KANTOR KECAMATAN HERLANG	
7 1 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		12 Bulan	5.654.908	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	6.220.399	KANTOR KECAMATAN HERLANG	
7 1 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Bulan	80.069.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	88.075.900	KANTOR KECAMATAN HERLANG	
7 1 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	38.963.099			100 %	42.859.409		
7 1 1 2.07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		100 %	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	22.000.000	KANTOR KECAMATAN HERLANG	
7 1 1 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	"Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Tersedia"		3 Unit	18.963.099	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	20.859.409	KANTOR KECAMATAN HERLANG	
7 1 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			95.224.710				104.747.181		
7 1 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	"Jumlah ketersediaan jaringan komunikasi, sumber daya air dan listrik"		12 Bulan	10.846.710			12 Bulan	11.931.381	KANTOR KECAMATAN HERLANG	
7 1 1 2.08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	"Jumlah dan jenis jasa peralatan dan perlengkapan yang tersedia"		12 Bulan	4.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	4.675.000	KANTOR KECAMATAN HERLANG	
7 1 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	"Jumlah ketersediaan jasa pelayanan umum kantor"		10 Orang	80.128.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Orang	88.140.800	KANTOR KECAMATAN HERLANG	
7 1 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	30.000.000			100 %	33.000.000		
7 1 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	"Jumlah kendaraan dinas jabatan yang diservis dan berizin Roda dua"		1 Unit	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	22.000.000	KANTOR KECAMATAN HERLANG	
7 1 1 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	"Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi"		3 Unit	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	11.000.000	KANTOR KECAMATAN HERLANG	
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (HERLANG)		100 %	1.566.150.000			100 %	1.722.765.000		
7 1 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100 %	1.566.150.000			100 %	1.722.765.000		
7 1 3 2.02 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		12 Bulan	1.250.000.000	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		12 Bulan	1.375.000.000	KANTOR KECAMATAN HERLANG	
7 1 3 2.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		100 %	316.150.000	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		100 %	347.765.000	KANTOR KECAMATAN HERLANG	
7	UNSUR KEWILAYAHAN										
7 1	KECAMATAN				3.679.370.411				4.291.026.127		
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (BONTO TIRO)		100 %	2.878.624.411			100 %	3.410.205.527		
7 1 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan		100 %	2.538.696.766			100 %	2.792.566.443		
7 1 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan untuk tiap bulannya selama 1 tahun		1 Tahun	2.448.286.766	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	2.693.115.443	KANTOR KECAMATAN BONTO TIRO	
7 1 1 2.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan pengujian keuangan SKPD		12 Bulan	90.410.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	99.451.000	KANTOR KECAMATAN BONTO TIRO	
7 1 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata Nilai Perilaku Pegawai Perangkat Daerah berdasarkan Penilaian Kinerja ASN		100 %	-			100 %	-		
7 1 1 2.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		1 Orang	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Orang	-	KANTOR KECAMATAN BONTO TIRO	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif					
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor		100 %	131.456.934			100 %	144.602.627	
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Alat Tulis Kantor yang tersedia sampai akhir tahun		12 Bulan	21.184.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	23.302.400	KANTOR KECAMATAN BONTO TIRO
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penggandaan yang tersedia		12 Bulan	3.915.450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	4.306.995	KANTOR KECAMATAN BONTO TIRO
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Periodesasi Penyediaan Kebutuhan Makanan dan Minuman dalam rangka fasilitasi tamu		12 Bulan	44.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	48.510.000	KANTOR KECAMATAN BONTO TIRO
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Bulan	62.257.484	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	68.483.232	KANTOR KECAMATAN BONTO TIRO
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	50.000.000			100 %	55.000.000	
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang tersedia		3 Unit	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	55.000.000	KANTOR KECAMATAN BONTO TIRO
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang		100 %	128.613.163			100 %	141.474.479	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik		12 Bulan	19.413.163	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	21.354.479	KANTOR KECAMATAN BONTO TIRO
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dibayarkan gajinya		12 Bulan	109.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	120.120.000	KANTOR KECAMATAN BONTO TIRO
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	% Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik		100 %	29.857.548			100 %	276.561.978	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		7 Unit	24.618.048	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 Unit	270.798.528	KANTOR KECAMATAN BONTO TIRO
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara		6 Unit	5.239.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Unit	5.763.450	KANTOR KECAMATAN BONTO TIRO
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (BONTO TIRO)		100 %	800.746.000			100 %	880.820.600	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana		100 %	800.746.000			100 %	880.820.600	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dilaksanakan		4 Paket	452.746.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Paket	498.020.600	KANTOR KECAMATAN BONTO TIRO
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Jasa Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		12 Bulan	348.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	382.800.000	KANTOR KECAMATAN BONTO TIRO
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	1				KECAMATAN				7.593.347.440				9.236.682.615	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (BONTO BAHARI)		100 %	4.390.363.440			100 %	6.142.509.522	
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Terbayarnya Honorarium PNS Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun		100 Persen	3.765.873.885			100 Persen	5.301.156.634	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bulukumba, Bonto Bahari, Semua Kelurahan	12 Bulan	3.579.156.165	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	5.113.629.382	KANTOR KECAMATAN BONTO BAHARI
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Bulukumba, Bonto Bahari, Semua Kelurahan	5 Dokumen	180.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	180.962.760	KANTOR KECAMATAN BONTO BAHARI
						Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang terlaksana		100 Persen				100 Persen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif				
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bulukumba, Bonto Bahari, Semua Kelurahan	12 Bulan	5.967.720	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	6.564.492	KANTOR KECAMATAN BONTO BAHARI
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Logistik Kantor Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Terlaksananya Rapat Rapat Konsultasi dan Koordinasi		100 persen	267.521.369		100 persen	294.273.505	
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis peralatan bahan logistik barang cetakan	Kab. Bulukumba, Bonto Bahari, Semua Kelurahan	12 Bulan	129.896.828	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	142.886.510	KANTOR KECAMATAN BONTO BAHARI
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah jenis peralatan bahan logistik barang cetakan	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	10.520.091	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	11.572.100	KANTOR KECAMATAN BONTO BAHARI
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	127.104.450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	139.814.895	KANTOR KECAMATAN BONTO BAHARI
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Mebeler Kantor Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100 Persen	83.589.300		100 Persen	88.583.658	
7	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1 Unit	36.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	37.000.000	KANTOR KECAMATAN BONTO BAHARI
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	20.467.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	22.513.865	KANTOR KECAMATAN BONTO BAHARI
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100 Persen	20.467.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	21.749.293	KANTOR KECAMATAN BONTO BAHARI
7	1	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	6.655.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	7.320.500	KANTOR KECAMATAN BONTO BAHARI
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terbayarnya Jasa Komunikasi SumberDaya Air dan Listrik Terbayarnya Jasa Pelayanan Umum Kantor		12 Bulan	236.575.816		12 Bulan	418.012.348	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	Kab. Bulukumba, Bonto Bahari, Semua Kelurahan	12 Bulan	42.421.225	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	46.663.348	KANTOR KECAMATAN BONTO BAHARI
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		100 persen	194.154.591	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 persen	371.349.000	KANTOR KECAMATAN BONTO BAHARI
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100 Persen	36.803.070		100 Persen	40.483.377	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Bulukumba, Bonto Bahari, Semua Kelurahan	4 Unit	17.624.570	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Unit	19.387.027	KANTOR KECAMATAN BONTO BAHARI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif					
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100 persen	19.178.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 persen	21.096.350	KANTOR KECAMATAN BONTO BAHARI
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (BONTO BAHARI)		100 %	3.202.984.000			100 %	3.094.173.093	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Bertambahnya Sarana dan Prasarana Kelurahan Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		100 Persen	3.202.984.000			100 Persen	3.094.173.093	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kab. Bulukumba, Bonto Bahari, Semua Kelurahan	100 Persen	2.345.504.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	2.207.338.265	KANTOR KECAMATAN BONTO BAHARI
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Biaya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Bulukumba, Bonto Bahari, Semua Kelurahan	12 Bulan	857.480.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	886.834.828	KANTOR KECAMATAN BONTO BAHARI
7	1				UNSUR KEWILAYAHAN									
7	1				KECAMATAN				5.240.030.907				6.508.439.491	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (KAJANG)		100 %	3.638.538.907			100 %	4.650.250.000	
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terbayarnya gaji dan tunjangan ASN dan terbayarnya Honorarium PNS		100 %	3.371.199.270			100 %	4.000.000.000	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN di Lingkup Kantor Camat Kajang	Kab. Bulukumba, Kajang, Tanah Jaya	12 bulan	3.040.899.270	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	3.600.000.000	KANTOR KECAMATAN KAJANG
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Bulukumba, Kajang, Tanah Jaya	5 Dokumen	330.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	400.000.000	KANTOR KECAMATAN KAJANG
						Jumlah Honorarium Penatausahaan yang di Kelola Lingkup Kantor Camat Kajang		12 Bulan				12 Bulan		
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Logistik Kantor, Tersedianya Makanan dan minuman serta terlaksananya Rapat Konsultasi dan Koordinasi		100 %	144.605.685			100 %	300.000.000	
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Kajang, Tanah Jaya	3 Kantor	31.605.685	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Kantor	65.000.000	KANTOR KECAMATAN KAJANG
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Kajang, Tanah Jaya	1 Paket	3.000.000			1 Paket	15.000.000	KANTOR KECAMATAN KAJANG
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bulukumba, Kajang, Tanah Jaya	12 bulan	50.000.000	Pendapatan Pajak Daerah		12 bulan	95.000.000	KANTOR KECAMATAN KAJANG
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bulukumba, Kajang, Tanah Jaya	12 Bulan	60.000.000	Pendapatan Pajak Daerah		12 Bulan	125.000.000	KANTOR KECAMATAN KAJANG
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Mebeler Kantor dan Peralatan dan Mesin Lainnya		100 %	40.000.000			100 %	205.000.000	
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Barang Milik Daerah yang akan di Kelola Kantor Camat dan Kelurahan	Kab. Bulukumba, Kajang, Tanah Jaya	50 unit	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 unit	85.000.000	KANTOR KECAMATAN KAJANG
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Barang Milik Daerah yang akan di Kelola Kantor Camat dan Kelurahan	Kab. Bulukumba, Kajang, Tanah Jaya	5 unit	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 unit	55.000.000	KANTOR KECAMATAN KAJANG
7	1	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Barang Milik Daerah yang akan di Kelola Kantor Camat dan Kelurahan	Kab. Bulukumba, Kajang, Tanah Jaya	4 unit	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 unit	65.000.000	KANTOR KECAMATAN KAJANG
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran,terbayarnya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik serta terbayarnya jasa pelayanan umum kantor		100 %	52.733.952			100 %	55.250.000	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Kajang, Tanah Jaya	12 Bulan	16.733.952	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	15.250.000	KANTOR KECAMATAN KAJANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif				
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Kajang, Tanah Jaya	12 Bulan	36.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	40.000.000	KANTOR KECAMATAN KAJANG
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya jasa pemeliharaan biaya, pemeliharaan pajak, dan perizinan kendaraan dinas serta tersedianya jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dan terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		100 %	30.000.000		100 %	90.000.000	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Bulukumba, Kajang, Tanah Jaya	14 unit	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	14 unit	35.000.000	KANTOR KECAMATAN KAJANG
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan alat kantor yang di Kelola Lingkup Kantor Camat Kajang dan Kelurahan	Kab. Bulukumba, Kajang, Tanah Jaya	12 unit	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 unit	20.000.000	KANTOR KECAMATAN KAJANG
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bulukumba, Kajang, Tanah Jaya	3 unit	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 unit	35.000.000	KANTOR KECAMATAN KAJANG
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (KAJANG)		100 %	1.601.492.000		100 %	1.858.189.491	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan		100 %	1.601.492.000		100 %	1.858.189.491	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Paket Yang Akan di Bangun di Kelurahan Laikang	Kab. Bulukumba, Kajang, Tanah Jaya	8 paket	1.581.492.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8 paket	1.803.189.491	KANTOR KECAMATAN KAJANG
						Jumlah Paket Yang Akan di Bangun di Kelurahan Tanah Jaya		8 Paket			8 Paket		
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan yang di Laksanakan Kelurahan Laikang	Kab. Bulukumba, Kajang, Tanah Jaya	1 Paket	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	55.000.000	KANTOR KECAMATAN KAJANG
						Jumlah Kegiatan Pemberdayaan yang di Laksanakan Kelurahan Tanah Jaya		1 Paket			1 Paket		
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
8	1				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				4.584.542.741			5.042.997.016	
8	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (BADAN KESBANGPOL)		100 %	2.367.782.741		100 %	2.604.561.016	
8	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu		100 Persen	47.600.000		100 Persen	52.360.000	
8	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	7 Dokumen	28.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7 Dokumen	30.800.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	1 Dokumen	4.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	5.390.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan SKPD	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	1 Dokumen	4.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	5.390.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan DPA SKPD	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	1 Dokumen	4.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	5.390.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	1 Dokumen	4.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	5.390.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan dokumen laporan administrasi dan keuangan perangkat daerah		100 Persen	1.823.711.289		100 Persen	2.006.082.418	
8	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		12 Bulan	1.741.111.289	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	1.915.222.418	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	12 Bulan	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	66.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif					
8	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	12 Bulan	14.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	16.280.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	12 Bulan	7.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	8.580.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi barang milik daerah yang terdata dengan baik		100 Persen	9.640.000			100 Persen	10.604.000	
8	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	12 Bulan	9.640.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	10.604.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah		100 Persen	194.511.177			100 Persen	213.962.295	
8	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	10 Unit	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Unit	4.400.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	20 Buah	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Buah	3.300.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	50 Jenis	25.892.177	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Jenis	28.481.395	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	2 Jenis	9.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Jenis	10.670.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Jenis Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	25 Jenis	23.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		25 Jenis	25.850.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	50 Kali	128.419.000			50 Kali	141.260.900	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana			127.000.000				139.700.000	
8	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	3 Unit	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	82.500.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	10 Buah	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Buah	16.500.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	5 Unit	37.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit	40.700.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Jasa Pelayanan Umum Kantor			86.320.275				94.952.303	
8	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Optimalisasi Jasa Komunikasi dan Listrik	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	12 Bulan	21.220.275	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	23.342.303	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Dokumen Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	12 Bulan	65.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	71.610.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik		100 Persen	79.000.000			100 Persen	86.900.000	
8	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terbayarnya Biaya Pemeliharaan, Pajak STNK Mobil Dinas Jabatan dan Motor Operasional	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	5 Unit	49.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit	53.900.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	15 Unit	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 Unit	16.500.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	1 Unit	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	16.500.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	2			PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Kegiatan Penyuluhan, Seminar Dan Sosialisasi		100 %	75.000.000			100 %	82.500.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif					
8	1	2	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Kegiatan Penyuluhan Seminar dan Sosialisasi		100 Persen	75.000.000			100 Persen	82.500.000	
8	1	2	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	12 Bulan	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	82.500.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	3			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Kegiatan Pendidikan Politik Masyarakat		75 %	1.570.000.000			75 %	1.727.000.000	
8	1	3	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Persentase Kegiatan Pendidikan Politik Masyarakat		100 Persen	1.570.000.000			100 Persen	1.727.000.000	
8	1	3	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	12 Bulan	1.570.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	1.727.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Cakupan Organisasi Kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi			221.760.000				243.936.000	
8	1	4	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan Organisasi Kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi			221.760.000				243.936.000	
8	1	4	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	12 Bulan	221.760.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	243.936.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	5			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Indeks Kerukunan Umat Beragama Dan Kasus Intoleransi Yang Terjadi			150.000.000				165.000.000	
8	1	5	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Indeks Kerukunan umat beragama dan kasus intoleransi yang terjadi			150.000.000				165.000.000	
8	1	5	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	12 Bulan	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	165.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif		
8 1 6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Peningkatan Penanganan Konflik Di Daerah		15 %	200.000.000				15 %	220.000.000	
8 1 6 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Peningkatan Penanganan Konflik di daerah		100 Persen	200.000.000				100 Persen	220.000.000	
8 1 6 2.01 4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	12 Bulan	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Bulan	220.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL					1.620.308.560.859					1.786.663.200.725	

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah dilakukan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil. Penetapan indikator kinerja daerah dituangkan dalam bentuk target kinerja yang akan dicapai pada waktu tertentu yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran target dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan berupa indikator makro pembangunan, Indikator Kinerja Utama (IKU), indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

6.1 Indikator Makro Pembangunan

Indikator makro pembangunan merupakan indikator kinerja pembangunan yang menggambarkan keberhasilan pembangunan daerah secara umum. Pencapaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Kinerja makro merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja beberapa sektor, urusan, dan bidang pemerintahan. Adapun indikator makro pembangunan terdiri dari:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
2. Tingkat Kemiskinan
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
4. Pertumbuhan Ekonomi
5. PDRB Perkapita ADHB
6. Rasio Gini
7. Penurunan Emisi GRK

Adapun target kinerja makro pembangunan secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel VI-1
Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2024

No.	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2021)	Rencana Capaian (2022)	Target	
					2023	2024
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka/ Nilai	69,62	70,11	71,09	71,17
2	Tingkat Kemiskinan	%	7,43	6,62	5,99	6,10
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,14	3,33	2,91	3,23
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,76	3,85	5,19-6,01	4,83
5	PDRB Perkapita ADHB	Juta Rp.	36,06	39,15	40,92	42,83
6	Gini Rasio	Angka	0,362	0,356	0,355	0,342
7	Penurunan Emisi GRK	Gg Co2-Eq	463.880,00	462.952,25	462.026,34	461.102,29

Sumber : BPS, DLHK, Bappelitbangda Kab. Bulukumba 2021, diolah

6.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program. Penetapan Target indikator kinerja utama selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini

Tabel VI-2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 dan Target Indikator Kinerja Utama
Tahun 2023-2024 Kabupaten Bulukumba

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2021)	Rencana Capaian 2022	Target	
					2023	2024
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	n/a*	70	71	71
2	Persentase Konflik Antar Umat Beragama yang tertangani	%	100	100	100	100
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	CC	CC	CC	B
4	Skor LPPD/Kategori	Skor	n/a*	3,5095	3,5260	3,5415
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	2,51-3,25*	2,51-3,25	3,26-4,00	3,26-4,00
6	Kontribusi Sub Sektor Pertanian Terhadap PDRB	%	24,32	22,76	22,28	22,04
7	Pertumbuhan PDRB Sub sektor Pertanian	%	1,48	1,52	2,85	3,77
8	Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan terhadap PDRB	%	12,95	12,86	13,21	13,55
9	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	%	8,78	5,14	6,75	7,66
10	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	69,62	70,11	70,61	71,17
11	Indeks Pendidikan	Angka	63,32	64,06	65,13	66,21
12	Indeks Kesehatan	Angka	74,00	74,94	75,62	76,36
13	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	68,10	68,71	69,15	69,63
14	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	%	3,41	2,88	3,05	3,26
15	Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	%	58,85	5,37	6,11	6,76
16	Gini Rasio	Angka	0,362	0,356	0,349	0,342
17	Indeks Daya saing infrastruktur	Angka		88	90	92
18	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB	%	23,39	24,47	24,91	25,36
19	Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan dan Industri	%	12,23	11,08	10,84	10,63
20	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	55,11	56,6	58,38	59,94
21	Persentase Peningkatan Pemuda yang berperestasi	%	18	18	27	27
22	Indeks Desa Membangun	Angka	0,72	0,74	0,76	0,78
23	Persentase Desa Mandiri	%	5,5	1,83	2,75	4,59
24	Indeks Rasa Aman	Angka	14*	15	15	15
25	Persentase Angka Kriminalitas yang tertangani	%	83,13*	88,56	89,11	89,66

Sumber : Bappelitbanga Kab. Bulukumba 2021, diolah

6.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan indikator yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada masa jabatan pemerintah daerah. Indikator Kinerja Kunci disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintah provinsi. Penetapan target indikator kinerja kunci selanjutnya disa

Tabel VI-3

Capaian Indikator Kinerja Kunci Tahun 2021 dan Target Indikator Kinerja Kunci Tahun 2023-2024 Kabupaten Bulukumba

No	Aspek/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah		Satuan	Capaian Tahun 2021	Rencana Capaian (2022)	Target		
						2023	2024	
1			ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1	1		Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi					
1	1	1	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,76	3,85	4,25	4,83
1	1	2	PDRB ADHK	Rp, Miliar	9.013,58	8.944,66	9.065,34	9.171,79
1	1	3	Laju inflasi	%	2,16	2,62	2,55	2,48
1	1	4	PDRB Perkapita ADHB	Rp, Juta	36,06	39,15	40,92	42,83
1	1	5	Indeks Gini	%	0,362	0,367	0,368	0,369
1	1	6	Persentase Penduduk miskin	%	7,43	6,61	6,41	6,22
1	2		Kesejahteraan sosial					
1	2	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	69,62	70,11	70,61	71,17
1	2	2	Angka Usia Harapan Hidup	angka	68,1	68,71	69,15	69,63
1	2	3	Angka Harapan Lama Sekolah	angka	13,41	13,84	14,28	14,79
1	2	4	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	angka	7,82	7,84	7,89	7,92
1	2	5	Pengeluaran Per Kapita Riil	Rp	10.632	10.617	10.657	10.693
1	2	6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		65,46	70,16	71,5	72,84
1	2	7	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,14	3,47	3,49	3,52
1	2	8	Persentase Balita Gizi Buruk	%	0,03	0,03	0,03	0,03
1			Seni Budaya Dan Olahraga					
1	3	1	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya	kali	1	5	5	7
1	3	2	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	25,00	3,13	3,37	3,61
2			ASPEK PELAYANAN UMUM					
2			Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar					
2	1		Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan					
2	1	1	Angka Partisipasi Kasar (APK)					
			SD	%	106,38	114,15	114,54	114,89
			SMP	%	81,88	94,86	97,14	99,43
2	1	2	Angka Partisipasi Murni (APM)					
			SD	%	98,06	98,67	98,69	98,7

No	Aspek/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah		Satuan	Capaian Tahun 2021	Rencana Capaian (2022)	Target		
						2023	2024	
			SMP	%	74,01	84,47	84,85	85,19
2	1	3	Angka Partisipasi Sekolah (APS)					
			7-12 Tahun	%	106,38	98,87	98,87	98,87
			14-15 Tahun	%	81,88	92,27	92,24	92,22
			16-18 Tahun	%	99,68	75,58	75,85	76,09
2	1	4	Angka Putus Sekolah					
			SD	%	0,8	0	0	0
			SMP	%	1,2	0	0	0
2	1	5	Angka Kelulusan					
			SD	%	100	100	100	100
			SMP	%	100	100	100	100
2	1	6	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-Iv	%	7,59	100	100	100
2	1	7	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar	rasio	1 : 15	01:09	01:08	01:07
2	1	8	Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah	rasio	1 : 9	01:08	01:07	01:07
2	1	9	Angka Melek Huruf Berumur 15 Tahun Ke Atas	%	89,9	91,57	91,53	91,5
2	2		Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan					
2	2	1	Angka Kematian Bayi Kelahiran Hidup		0,29	5,24	4,57	4
2	2	2	Angka Kematian Balita Kelahiran Hidup		0,00	9,99	9,94	9,89
2	2	3	Angka Kematian Neonatal Kelahiran Hidup		7,29	0	0	0
2	2	4	Angka Kematian Ibu		145,88	52,32	46,71	41,09
2	2	5	Rasio Posyandu Per Satuan Balita		23,37	27,14	29,92	32,7
2	2	6	Rasio Puskesmas Dan Pustu		0,19	0,19	0,19	0,19
2	2	7	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk		0,005	0,002	0,002	0,002
2	2	8	Rasio Poliklinik Per Satuan Penduduk		0,04	0,04	0,04	0,04
2	2	9	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk		0,14	0,094	0,095	0,096
2	2	10	Rasio Tenaga Medis/Penduduk		0,256	0,234	0,242	0,25
2	2	11	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	%	87,46	85,45	86,3	87,35
2	2	12	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	63,97	100	100	100
2	2	13	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan	%	100	100	100	100

No	Aspek/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah			Satuan	Capaian Tahun 2021	Rencana Capaian (2022)	Target	
							2023	2024
2	2	14	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	%	71,3	44,2	41,3	38,5
2	2	15	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis	Per 1000 Pdk	121,16	101,325	93,82	86,315
2	2	16	Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis	Per 1000 Pdk	6,48	3,23	2,56	1,89
2	2	17	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	%	100	100	100	100
2	2	18	Angka Kejadian Malaria	Per 1000 Pdk	0,02	1,46	0,24	0
2	2	19	Prevalensi Hiv/Aids (Persen) Dari Total Populasi	%	0,340	0,009	0,005	0
2	2	20	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	%	35,36	8,27	10,4	12,96
2	2	21	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	%	54,71	73,55	73,17	72,83
2	2	22	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping Asi Pada Anak Usia 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin	%	71,31	52,65	50,43	48,46
2	2	23	Cakupan Pelayanan Dasar Masyarakat Miskin	%	60,40	85,68	89,19	92,4
2	3		Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang					
2	3	1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	%	86,02	0,639	0,699	0,779
2	3	2	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk		0,0052	0,0032	0,0031	0,003
2	3	3	Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 M)	%	Data Tidak Tersedia	98,93	100	100
2	3	4	Persentase Luas irigasi dalam kondisi baik	%	82,91	80,79	81,7	82,61
2	3	5	Rasio Jaringan Irigasi		0,93	0,21	0,19	0,17
2	4		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman					
2	4	1	Rasio Rumah Layak Huni		0,236	0,248	0,249	0,25
2	4	2	Persentase Pemukiman Yang Tertata	%	65	71,57	74,46	77,36
2	4	3	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	%	11,50	11,61	12,15	12,63
2	4	4	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	%	92,42	93,76	94,08	94,37
2	4	5	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	76,26	83,34	84,74	85,97
2	4	6	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%	84,26	84,89	84,96	85,02
2	4	7	Persentase Areal Kawasan Kumuh	%	0,11	0	0	0
2	4	8	Rasio Bangunan Ber IMB Per Satuan Bangunan		6,02	8,67	20,44	37,37
2	5		Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat					
2	5	1	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)		0,31	0,31	0,31	0,3

No	Aspek/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah			Satuan	Capaian Tahun 2021	Rencana Capaian (2022)	Target	
							2023	2024
2	5	2	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)		100	100	100	100
2	5	3	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota		0.002269	0,00303	0,00305	0,00307
2	5	4	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)		100	100	100	100
2	5	5	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	100	100
2	6		Urusan Pemerintahan Bidang Sosial					
2	6	1	Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo Dan Panti Rehabilitasi	unit	13	13	12	12
2	6	2	Perentase Jumlah Korban Bencana Yang Ditangani	%	100,00	100	100	100
2	6	3	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial	%	26.80	98,42	99,69	100
2	6	4	Persentase PMKS Yang Tertangani	%	26.80	70,8	65,25	59,7
2	6	5	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	%	100,00	91,66	91,82	91,96
2	6	6	Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial	%	93.90	82,73	81,32	80,08
2			Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar					
2	1		Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja					
2	1	1	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun		1.18	0	0	0
2	1	2	Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)		0.38	0,15	0,02	0
2	1	3	Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek		1	2,76	3,92	5,32
2	1	4	Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan		1	1,94	2,09	2,24
2	1	5	Besaran Pemeriksaan Perusahaan		20	0,24	0,23	0,22
2	1	6	Besaran Pengujian Peralatan Di Perusahaan		2.00	0,06	0,05	0,04
2	1	7	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi		0.53	0,75	0,79	0,83
2	1	8	Rasio Lulusan S1/S2/S3	Per 10,000	718.00	741,8	762,88	781,46
2	1	9	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja		46.86	78,34	86,22	93,18
2	1	10	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan		1	1,01	1,05	1,09
2	1	11	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat		0.53	0,47	0,47	0,48
2	2		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak					
2	2	1	Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah	%	3,70	4,4	4,3	4,3
2	2	2	Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan Di DPRD	%	20,00	24	26,36	29,07

No	Aspek/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah			Satuan	Capaian Tahun 2021	Rencana Capaian (2022)	Target	
							2023	2024
2	2	3	Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta	%	92,09	83,62	84,52	85,32
2	2	4	Rasio KDRT		0,000	0,002	0,002	0,001
2	2	5	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	97,77	96,91	97	97,1
2	2	6	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu		100	100	100	100
2	2	7	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Di Puskesmas Mampu Tatalaksana Ktp/A Dan Ppt/Pkt Di Rumah Sakit		100	77,2511	100	100
2	2	8	Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak		100	100	100	100
2	3		Urusan Pemerintahan Bidang Pangan					
2	3	1	Ketersediaan Pangan Utama	%	368,95	100	100	100
2	3	2	Ketersediaan Energi	Kkal/Kap/Hr	2.662,51	4.026,36	4.207,57	4.291,72
2	3	3	Ketersediaan Protein	Gram/Kap/Hr	69	98,71	100,69	102,7
2	3	4	Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	60	45	45	45
2	4		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan					
2	4	1	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	%	25,7	26,67	28,06	29,56
2	4	2	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	%	75	68,95	88,05	100
2	5		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup					
2	5	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		63,22	62,92	63,45	63,99
2	5	2	Indeks Kualitas Air		81,36	58,85	58,95	59,05
2	5	3	Indeks Kualitas Udara		84,64	84,74	84,84	84,94
2	5	4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan		23,56	23,75	31,64	24,05
2	5	5	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	%	95,93	100	100	100
2	5	6	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Kelompok	1	1	1	1
2	5	7	Terverifikasinya MHA Dan Kearifan Lokal Atau Pengetahuan Tradisional	Kelompok	1	1	1	1
2	5	8	Penetapan Hak MHA	Kelompok	1	1	1	1
2	5	9	Terfasilitasi Kegiatan Peningkatan Pengetahuan Dan Keterampilan	Kelompok	100	100	100	100

No	Aspek/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah			Satuan	Capaian Tahun 2021	Rencana Capaian (2022)	Target	
							2023	2024
2	5	10	Terfasilitasi Penyediaan Sarana/Prasarana	Kelompok	100	100	100	100
2	5	11	Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Masyarakat	Kelompok	1	1	1	1
2	5	12	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	Kelompok	2	Ada	Ada	Ada
2	5	13	Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin Pplh Dan PUU LH yang Di Terbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya Di Daerah Kabupaten/Kota,	sekolah	100	100	100	100
2	5	14	Timbulan Sampah Yang Ditangani	%	24,95	27,22	29,18	30,92
2	5	15	Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani	%	86,63	94,88	100	100
2	5	16	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota	%	26,24	25,2	24,3	23,51
2	5	17	Jumlah Limbah B3 Yang Terkelola Dan Proporsi Limbah B3 Yang Diolah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan (Sektor Industri)	Ton/Kg	35	38,36	41,28	43,85
2	5	18	Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan Sertifikasi SNI ISO 14001	Buah	1	1	1	2
2	5	19	Proporsi Tutupan Lahan Terhadap Luas Lahan Keseluruhan	%	29,86	32	33,85	35,49
2	5	20	Proporsi Luas Lahan Kritis Yang Direhabilitasi Terhadap Luas Lahan Keseluruhan	%	32,36	34,64	36,62	38,37
2	5	21	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	Dok	0	0	0	0
2	6		Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil					
2	6	1	Rasio Penduduk ber KTP per satuan penduduk,		1,64	1	1	1
2	6	2	Rasio bayi berakta kelahiran,		90,50	0,8	0,8	0,8
2	6	3	Rasio pasangan berakta nikah,		31,80	0,5	0,5	0,5
2	6	4	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK		100	100	100	100
2	6	5	Cakupan penerbitan KTP-el		102,72	100	100	100
2	6	6	Cakupan penerbitan akte kelahiran		98,89	80	80	80
2	7		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa					
2	7	1	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik	%	109	100	100	100
2	7	2	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Pkk		146	146	146	146
2	7	3	Persentase Lsm Aktif	%	0	100	100	100
2	7	4	Persentase Pkk Aktif	%	100	100	100	100
2	7	5	Persentase Posyandu Aktif	%	100	100	100	100
2	7	6	Jumlah Aparat Desa Yang Ditingkatkan Kapasitasnya		100	100	100	100

No			Aspek/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Capaian Tahun 2021	Rencana Capaian (2022)	Target	
							2023	2024
2	7	7	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)		93	93	93	93
2	8		Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana					
2	8	1	Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk (Lpp)	%	1,04	0,54	0,53	0,52
2	8	2	Total Fertility Rate (Tfr)	%	2,31	2,443	2,499	2,556
2	8	3	Persentase perangkat daerah(dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	%	27,7	73,59	78,58	82,98
2	8	4	Persentase Perangkat Daerah Dinas/ Badan Yang Menyusun Dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	11,11	14,99	26,42	42,62
2	8	5	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah) Yang Mengatur Tentang Pengendalian Kuantitas Dan Kualitas Penduduk	%	1	1	1	1
2	8	6	Jumlah Sektor Yang Menyepakati Dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter Dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan Program Pembangunan		1, Dinas DUK CAPIL 2, BAPPEDA 3, DIKNAS 4, DINKES 5, BPS 6, DPPKB	1.Dinas DUK CAPIL 2.BAPPEDA 3.DIKNAS 4.DINKES 5.BPS 6.DPPKB	1.Dinas DUK CAPIL 2.BAPPEDA 3.DIKNAS 4.DINKES 5.BPS 6.DPPKB	1.Dinas DUK CAPIL 2.BAPPEDA 3.DIKNAS 4.DINKES 5.BPS 6.DPPKB
2	8	7	Jumlah Kerja Sama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, Dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan,		1, Dinas Pendidikan 2, IBI 3, PKBM	1.Dinas Pendidikan 2.IBI 3.PKBM	1.Dinas Pendidikan 2.IBI 3.PKBM	1.Dinas Pendidikan 2.IBI 3.PKBM
2	8	8	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	%	20,25	18,19	16,85	15,37
2	8	9	Ratio Akseptor Kb	%	5,55	16,92	18,33	19,97
2	8	10	Angka Pemakaian Kontrasepsi/Cpr Bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49	%	74,05	75,16	74,86	74,59
2	8	11	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19)per 1,000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)		89,79	89,79	89,79	89,79
2	8	12	Cakupan Pasangan Usia Subur (Pus) Yang Istrinya Dibawah 20 Tahun	%	4,35	4,41	4,45	4,49
2	8	13	Cakupan Pus Yang Ingin Ber-Kb Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	10,78	12,48	11,84	11,21
2	8	14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	20,57	37,32	39,09	40,64
2	8	15	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	%	35,05	46,97	53,5	60,17

No	Aspek/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah			Satuan	Capaian Tahun 2021	Rencana Capaian (2022)	Target	
							2023	2024
2	8	16	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita	%	80,05	92,61	100	100
2	8	17	Cakupan Bina Keluarga Remaja Ber- KB	%	76,29	74,96	79,78	84,3
2	8	18	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia Ber- KB	%	75,31	81,76	91,16	100
2	8	19	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Di Setiap Kecamatan	%	10	10	10	10
2	8	20	Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa	%	4,3	1,39	1,03	0,79
2	8	21	Cakupan PKB/PLKB Yang Didaya Gunakan Perangkat Derah KB Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di B dang Pengendalian Penduduk	%	100	100	100	100
2	8	22	Cakupan Pus Peserta Kb Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (Uppks) Yang Ber-KB Mandiri	%	50,72	0,26	0,25	0,24
2	8	23	Rasio Petugas Pembantu Pembina Kb Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan	%	100	100	100	100
2	8	24	Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat	%	85,35	100	100	100
2	8	25	Persentase Faskes Dan Jejaringnya (Seluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerja Sama Dengan Bpjs Dan Memberikan Pelayanan KB/KR Yang Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan	%	100	38,85	65,05	100
2	8	26	Cakupan Penyediaan Informasi Data Makro Keluarga Di setiap Desa	%	100	100	100	100
2	8	27	Persentase Remaja Yang Terkena Infeksi Menular Sesual (IMS)	%	0,000	0	0	0
2	8	28	Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga	%	7,6	100	100	100
2	8	29	Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita Dan Anak Yng Memahami Dan Melaksanakan Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	%	20,59	38,38	38,87	39,3
2	8	30	Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita	%	22,00	22,64	22,79	22,93
2	8	31	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan , Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD Dan APD Des	%	0,618	0,0065	0,0078	0,0095
2	9		Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan					
2	9	1	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis		3	3	3	3
2	9	2	Jumlah arus penumpang angkutan Umum		17.500	14.100	12.911	11.862
2	9	3	Persentase Layanan Angkutan Darat	%	0	1,23	1,17	1,12
2	9	4	Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum	%	0,00	92,4	100	100
2	9	5	Pemasangan Rambu-Rambu	%	0,00	66,01	68,66	71,77

No	Aspek/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah			Satuan	Capaian Tahun 2021	Rencana Capaian (2022)	Target	
							2023	2024
2	9	6	Jumlah Orang/ Barang Yang Terangkut Angkutan Umum		12.000	26.480	28.134	29.417
2	9	7	Rasio Ijin Trayek		0,001	0,008	0,01	0,012
2	10		Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika					
2	10	1	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer	%	Tidak Ada Survey	87	91	95
2	10	2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	Tidak Ada Survey	0,76	0,79	0,81
2	10	3	Persentase Penduduk Yang Menggunakan Hp/Telepon	%	Tidak Ada Survey	83,9	84,6	85,3
2	10	4	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet	%	0	54,87	57,91	60,73
2	10	5	Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi	%	0	86,9	91,33	95,24
2	11		Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah					
2	11	1	Persentase koperasi aktif	%	73,01	74,73	75,21	75,63
2	11	2	Persentase Usaha Mikro Dan Kecil	%	98,29	98,43	98,97	99,5
2	12		Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal					
2	12	1	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	buah	117	66	69	72
2	12	2	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Rp (juta)	244.255	763.915	780.755	797.595
2	12	3	Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN	%	-79	10	25	30
2	13		Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga					
2	13	1	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	%	87,47	88,93	90,71	92,5
2	13	2	Persentase wirausaha muda	%	2,89	3,13	3,37	3,61
2	13	3	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	75	22,17	21,57	21,03
2	13	4	Cakupan Pelatih Yang Bersertifikat/Lisensi Kepelatihan	%	29,31	36,2	41,03	45,86
2	13	5	Cakupan pembinaan atlet muda	%	45	48,43	52,3	55,3
2	13	6	Jumlah atlet berprestasi		11	18	19	19
2	13	7	Jumlah prestasi olahraga		3	3	3	3
2	14		Urusan Pemerintahan Bidang Statistik					
2	14	1	Buku "Kabupaten Dalam Angka"		Ada	Ada	Ada	Ada
2	14	2	Buku "PDRB"		Ada	Ada	Ada	Ada
2	15		Urusan Pemerintahan Bidang Persandian					
2	15	1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah,	%	100	100	100	100

No	Aspek/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah		Satuan	Capaian Tahun 2021	Rencana Capaian (2022)	Target	
						2023	2024
2	16		Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan				
2	16	1	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya		1	3	3
2	16	2	Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	%	58	58	59
2	16	3	Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu		2	2	2
2	17		Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan				
2	17	1	Persentase Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	%	0,95	38,52	34,67
2	17	2	Persentase Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah	%	42,03	43,9	45,16
2	17	3	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk		0,95	1,43	1,79
2	17	4	Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun	Orang	3.107	63.322	69.007
2	17	5	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Judul	10.727	11.704	12.288
2	17	6	Persentase Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat	%	48.01	57,21	63,78
2	18		Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan				
2	18	1	Persentase Peningkatan SDM pengelola kearsipan	%	0	100.00	100.00
2	18	2	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	%	0	1,24	1,39
2			Urusan Pemerintahan Pilihan				
2	1		Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan				
2	1	1	Cakupan Produksi perikanan	%	118.6	129	130
2	1	2	Perikanan tangkap	ton	53.860.1	56.098,10	57.120,40
2	1	3	Perikanan Budidaya	ton	5.172	5176	5176
2	1	4	Cakupan Bina Kelompok Tani	%	69,5	70,6	72,2
2	2		Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata				
2	2	1	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	366.176	373.095	395.675
2	2	2	Lama Kunjungan Wisata	Hari	2-4	2-4	2-4
2	2	3	PAD Sektor Pariwisata	%	5.96	5,37	6,11
2	3		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian				
2	3	1	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan perkebunan terhadap PDRB		26.31	25,56	25,15
2	3	2	Cakupan bina kelompok tani	%	36.66	26,25	19
2	3	3	Jumlah Populasi Ternak				
			Sapi Potong	Ekor	77.658	78.729	79.324
			Ayam Ras Pedaging	Ekor	3.694	2.414.546	2.445.959

No	Aspek/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah		Satuan	Capaian Tahun 2021	Rencana Capaian (2022)	Target		
						2023	2024	
			Ayam Ras Petelur	Ekor	1.176,858	709.631	751.499	791.040
2	4		Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral					
2	4	1	Jumlah rumah tangga pengguna listrik	RT	15.204	100.890	101.663	102.436
2	5		Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan					
2	5	1	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal		0,0043	0,72	0,74	0,76
2	5	2	Jumlah Pasar	Unit		43	43	43
2	6		Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian					
2		1	Cakupan bina kelompok pengrajin		0,10	0,17	0,18	0,2
2			Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan					
2	1		Sekretariat Daerah					
2	1	1	Rasio tempat ibadah persatuan penduduk		2,87	2,72	2,76	2,81
2	2		Sekretariat DPRD					
2	2	1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten		Ada	Ada	Ada	Ada
2	2	2	Tersusun Dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, Dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)		Ada	Ada	Ada	Ada
2	2	3	Terintegrasi Program-Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda Dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD		Ada	Ada	Ada	Ada
2			Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan					
2	1		Perencanaan					
2	1	1	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda/Perkada		Ada	Ada	Ada	Ada
2	1	2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perkada		Ada	Ada	Ada	Ada
2	1	3	Tersedianya Dokumen RTRW Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda		Ada	Ada	Ada	Ada
2	1	4	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	%	100	100	100	100
2	1	5	Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD	%	100	100	100	100
2	1	6	Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan RTRW	%	100	100	100	100

No	Aspek/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah		Satuan	Capaian Tahun 2021	Rencana Capaian (2022)	Target		
						2023	2024	
2	2		Keuangan					
2	2	1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan		WTP	WTP	WTP	WTP
2	2	2	Persentase SILPA Terhadap APBD	%	3.50	0,57	0,49	0,43
2	2	3	Persentase Program/Kegiatan Yang Tidak Terlaksana	%	0	0	0	0
2	2	4	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	%	21.00	27,35	26,77	26,24
2	2	5	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	%	19.04	20,17	20,47	20,74
2	2	6	Penetapan APBD (Tepat Waktu/Tidak)		Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
2	2	7	Perbandingan antara Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung					
2	2	8	Bagi Hasil Kabupaten/Kota Dan Desa	%	0.22	12,06	12,22	12,39
2	2	9	Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	14,08	10,81	11,76	11,37
2	3		Kepegawaian					
2	3	1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan Pelatihan	bulan	3	3	3	3
2	3	2	Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal	%	74.19	89,03	89,35	89,67
2	3	3	Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural	%	14.71	77,92	84,94	91,14
2	4		Pendidikan Dan Pelatihan					
2	4	1	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah	Jabatan	40	29	29	29
2	4	2	Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah	Jabatan	2093	1.837	1.703	1.564
2	5		Penelitian Dan Pengembangan					
2	5	1	Persentase implementasi rencana Kelitbangan	%	85,71	8,53	9,56	10,86
2	5		Persentase pemanfaatan hasil Kelitbangan	%	100	11,29	12,06	12,93
2	5	2	Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	%	70.00	11,29	12,06	12,93
2	5	3	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	33,33	60,87	61,01	61,17
2			Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan					
2	6		Inspektorat Daerah					
2	6	1	Persentase tindak lanjut temuan	%	56,60	68,4	79,47	94,32
2	6	2	Persentase pelanggaran Pegawai	%	0,13	0,246	0,181	0,091
2	6	3	Jumlah temuan BPK	Temuan	14	7	6	5

No	Aspek/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah			Satuan	Capaian Tahun 2021	Rencana Capaian (2022)	Target	
							2023	2024
2			Unsur Pemerintahan Umum					
2	7		Kesatuan Bangsa dan Politik					
2	7	1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka		70	70,5	71
2	7	2	Persentase peningkatan penanganan konflik di daerah	%	100	100	100	100
2	7	3	Jumlah kegiatan pendidikan politik masyarakat	Kali	5	5	5	5
3			ASPEK DAYA SAING DAERAH					
3			Kemampuan Ekonomi Daerah					
3	1	1	Rata-rata Nilai Konsumsi Pengeluaran Per Rumah Tangga		849.060	938.435	985.837	1.033.239
3	2	2	Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita		385.798	443.080	472.763	502.446
3	3	3	Nilai Tukar Petani			104,02	104,83	105,9
3			Fasilitas Wilayah/Infrastruktur					
3	1	1	Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Peruntukan Tata Ruang	%	81	88	92	96
3			Iklim Berinvestasi					
3	1	1	Persentase Angka Kriminalitas yang tertangan		88,02	88,56	89,11	89,66
3			Sumberdaya Manusia					
3	1	1	Rasio Ketergantungan		41,80	39,05	37,22	35,39

6.4 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial

Penetapan target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel VI-4
Capaian Indikator SPM Tahun 2021 dan Target Indikator SPM Tahun 2023-2024
Kabupaten Bulukumba

No	Uraian	Satuan	Capaian Tahun 2021	Rencana Tahun 2022	Target Nasional	Target Kabupaten 2023-2024
1	PENDIDIKAN					
1.1	Pendidikan Dasar					
1	persentase Warga Negara Usia 7- 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	%	82,42	100	100	100
1.2	Pendidikan Kesetaraan					
2	Persentase Warga Negara Usia 7- 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	%	7,49	100	100	100
1.3	Pendidikan anak usia dini					
3	Persentase Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	84,76	100	100	100
2	KESEHATAN					
2.1	Pelayanan Kesehatan ibu hamil jumlah					
4	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Standar	%	72,51	100	100	100
2.2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin					
5	Persentas ibu hamil yang mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)	%	87,12	100	100	100
2.3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir					
6	Persentas bayi baru lahir umur 0 - 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	87,32	100	100	100
2.4	Pelayanan kesehatan balita					

No	Uraian	Satuan	Capaian Tahun 2021	Rencana Tahun 2022	Target Nasional	Target Kabupaten 2023-2024
7	Persentas Balita yang berumur 0 – 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	84,71	100	100	100
2.5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar					
8	Persentas anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	19,19	100	100	100
2.6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif					
9	Persentas orang berusia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	49,94	100	100	100
2.7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut					
10	Persentas orang berusia lebih dari 60 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	41,96	100	100	100
2.8	Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi					
11	Persentas orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	13,81	100	100	100
2.9	Pelayanan kesehatan pada penderita Diabetes Melitus					
12	Persentas orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	79,08	100	100	100
2.10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat					
13	Persentas orang dengan gangguan Jiwa (ODG) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	90,07	100	100	100
2.11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis					
14	Persentas orang terduga Tuberkulosis (TBC) yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	27,01	100	100	100
2.12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)					
15	Persentas orang terduga beresiko Terinfeksi virus HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	52,12	100	100	100
3	PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG					
3.1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari					
16	Persentase warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	84,26	100	100	100
3.2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic					
17	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	%	76,26	100	100	100
4	PERUMAHAN DA PEMUKIMAN					

No	Uraian	Satuan	Capaian Tahun 2021	Rencana Tahun 2022	Target Nasional	Target Kabupaten 2023-2024
4.1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;					
18	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.	%	100	100	100	100
4.2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota					
18	Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.	%	-	100	100	100
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
5.1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum					
20	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkadat	%	96,9	100	100	100
5.2	Pelayanan informasi rawan bencana					
21	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100
5.3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana					
22	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100
5.4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana					
23	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100
5.5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran					
24	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100
6	SOSIAL					
6.1	Rehabilitasi social dasar penyandang disabilitas telantardiluar panti					
25	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	54,55	100	100	100
6.2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti					
26	persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	90,91	100	100	100
6.3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti					
27	Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	67,57	100	100	100

No	Uraian	Satuan	Capaian Tahun 2021	Rencana Tahun 2022	Target Nasional	Target Kabupaten 2023-2024
6.4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti					
28	persentase Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	100	100	100	100
6.5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota					
29	persentase Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan social	%	100	100	100	100

Sumber : Sekretariat Daerah, Bappelitbangda Kab. Bulukumba 2021, diolah

6.5 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs)

Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global. TPB/SDGs bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan. Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat Kabupaten.

Penetapan target tahun 2023 indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals*(TPB/SDGs) disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel VI-5
Penetapan Target Indikator TPB/SDGs Kabupaten Bulukumba Tahun 2022

No	Uraian	Satuan	Capaian 2021	Target	
				2022	2023
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun				
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Persen	6,88	6,66	6,44
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Persen	86,44	89,97	93,51
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Persen	7,69	10,01	12,33
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Persen	92,90	100,00	100,00
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Rumah Tangga	13011,20	12326,40	11641,60
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Persen	87,31	88,21	89,12
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Persen	97,15	98,11	99,08
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Persen	64,95	65,28	65,60
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Persen	85,24	86,09	86,93
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Persen	50,18	63,47	76,75
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Persen	93,01	96,58	100,16
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	Persen	80,75	86,04	91,32
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Persen	64,58%	65,23%	65,87%
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Rumah Tangga	44102,15	38457,30	32812,45
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Orang	1,04	0,00	0,00
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Lokasi	15,00	20,00	25,00
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Orang	379,50	414,00	448,50
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Orang	395,38	445,76	496,14
1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB= Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)				
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Rp	375.000.000	250.000.000	125.000.000
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Dokumen	Ada	Ada	Ada

No	Uraian	Satuan	Capaian 2021	Target	
				2022	2023
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Persen	23,66	23,92	24,18
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Persen	26,22	26,99	27,75
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan				
2.1.1*	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Persen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Persen	9,27	7,63	6,00
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Persen	0,00	0,00	0,00
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Persen	0,00	0,00	0,00
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Persen	7,44	6,62	5,79
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Persen	2,60	2,14	1,68
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Persen	2,34	1,76	1,17
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Persen	14,81	13,17	11,52
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Persen	77,30	80,61	83,91
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Persen	76,96	79,92	82,88
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).		0,00	0,00	0,00
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia				
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Angka	3,48	2,96	2,43
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Persen	87,31	88,21	89,12
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Persen	86,44	89,97	93,51
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Angka	7,58	7,18	6,78
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Angka	6,32	5,99	5,65
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Angka	7,15	6,78	6,40
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Persen	98,21	98,70	99,19
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Persen	0,01	0,01	0,01
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Orang	121,31	120,09	118,86
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Orang	0,01	0,00	0,00
3.3.4.(a)	Persentase kecamatan yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Persen	100,00	100,00	100,00

No	Uraian	Satuan	Capaian 2021	Target	
				2022	2023
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Orang	124,20	110,40	96,60
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Persen	0,22	0,19	0,17
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Persen	7,25	7,04	6,83
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Persen	0,08	0,01	-0,07
3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.		0,00	0,00	0,00
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.		0,00	0,00	0,00
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.		0,00	0,00	0,00
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.		0,00	0,00	0,00
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Persen	77,69	80,42	83,14
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Persen	22,02	25,53	29,04
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).		0,00	0,00	0,00
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	TFR	2,09	1,85	1,62
3.8.1	Cakupan pelayanan kesehatan esensial (didefinisikan sebagai rata-rata cakupan intervensi yang dapat dilacak termasuk reproduksi, ibu, bayi baru lahir, dan kesehatan anak, penyakit menular, penyakit tidak menular, kapasitas layanan serta akses untuk penduduk secara umum dan penduduk kurang beruntung).	Persen	71,54	74,47	77,39
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	Persen	11,15	10,56	9,98
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Penduduk	365887,44	383007,88	400128,32
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Persen	76,14	80,45	84,76
3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.		0,00	0,00	0,00
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Persen	41,54	38,15	34,77
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Persen	100,00	100,00	100,00
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Persen	0,68	1,00	1,32
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua				
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Persen	91,80	93,60	95,40
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Persen	96,22	100,00	100,00
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Persen	75,72	80,00	84,29
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Persen	112,60	112,71	112,83

No	Uraian	Satuan	Capaian 2021	Target	
				2022	2023
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Persen	95,28	99,81	104,35
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Tahun	7,91	8,82	9,73
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Persen	43,11	54,28	65,46
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Persen	18,40	20,80	23,20
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Persen	106,91	109,00	111,10
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Persen	99,63	99,73	99,83
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Persen	93,00	93,10	93,20
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Persen	91,80	93,60	95,40
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Persen	50,54	54,29	58,03
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan				
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Kebijakan	4	5	5
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Persen	19,57	17,39	15,22
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Persen	63,90	56,80	49,70
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Persen	19,80	17,60	15,40
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Persen	61,60	67,20	72,80
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Persen	1,00	1,00	1,00
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.		0,00	0,00	0,00
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).		0,00	0,00	0,00
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Persen	20,68	21,36	22,04
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Persen	18,77	19,14	19,50
5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Persen	0,00	0,00	0,00
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Persen	11,15	10,56	9,98

No	Uraian	Satuan	Capaian 2021	Target	
				2022	2023
5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Persen	4,37	4,49	4,61
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Persen	93,91	95,37	96,82
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan				
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Persen	89,79	90,68	91,57
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.		0,00	0,00	0,00
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Persen	89,79	90,68	91,57
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.		0,00	0,00	0,00
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Persen	42,80	48,71	54,61
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Persen	139	141	144
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Desa	137	139	140
6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Desa	1,46	1,80	2,13
6.3.1	Proporsi limbah cair yang diolah secara aman	%	20,26	21,52	22,78
6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.		0,00	0,00	0,00
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Indeks	69,41	73,81	78,22
6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Sungai	3	4	5
6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.		0,00	0,00	0,00
6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.		Ada	Ada	Ada
7	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua				
7.2.1*	Bauran energi terbarukan.		0,00	0,00	0,00
7.3.1*	Intensitas energi primer.		0,00	0,00	0,00
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua				
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Persen	0,77	1,12	1,46
8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Juta	36,91	39,40	41,88
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Persen	8,43	8,76	9,09
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Persen	0,26	0,31	0,35
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	Persen	44,90	45,04	45,19
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Persen	35,66	36,06	36,46
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	Persen	12,75	14,83	16,90
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Rp	39605,88	45068,76	50531,64

No	Uraian	Satuan	Capaian 2021	Target	
				2022	2023
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Persen	0,03	0,03	0,03
8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	Persen	0,10	0,09	0,09
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Persen	41,90	45,71	49,52
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.		0,00	0,00	0,00
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Orang	424,85	556,70	688,55
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Orang	281113,30	283896,60	286679,90
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Rp	0,00	0,00	0,00
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.		0,00	0,00	0,00
8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	ATM	1,20	1,40	1,60
8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).		0,00	0,00	0,00
8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Persen	37,78	41,95	46,12
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi				
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	Dermaga	8	13	19
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Persen	7,63	7,80	7,96
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Persen	5,45	5,51	5,56
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.		0,00	0,00	0,00
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.		0,00	0,00	0,00
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.		0,00	0,00	0,00
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Persen	55,00	60,00	65,00
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Persen	95,40	96,35	97,29
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	Persen	43,43	43,86	44,29
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara				
10.1.1*	Koefisien Gini.	Koefisien	0,37	0,36	0,36
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Persen	6,86	6,62	6,38
10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	Desa	0,00	0,00	0,00
10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	Desa	8,80	6,60	4,40
10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.	Desa	113	117	121
10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.		0,00	0,00	0,00
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Persen	7,81	7,76	7,71
10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.		0,00	0,00	0,00

No	Uraian	Satuan	Capaian 2021	Target	
				2022	2023
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.		0,00	0,00	0,00
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Persen	7,69	10,01	12,33
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan				
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Persen	93,25	94,14	95,04
11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.		0,00	0,00	0,00
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Orang	2	0	0
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Persen	90,00	80,00	70,00
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.		Ada	Ada	Ada
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Rp	375.000.000	250.000.000	125.000.000
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Persen	75,03	76,50	77,97
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.		Ada	Ada	Ada
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan				
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Ton	37,70	50,26	62,83
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Ton	63,39	64,02	64,64
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Perusahaan	2	2	3
12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.		0,00	0,00	0,00
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya				
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.		Ada	Ada	Ada
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Orang	2	0	0
14	Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan				
14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.	Ton	54851,08	55842,07	56833,05
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	Persen	100,00	100,00	100,00
14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	Nelayan	910,35	953,70	997,05
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati				
15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.		0,00	0,00	0,00
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.		0,00	0,00	0,00
15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.		Ada	Ada	Ada
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan				
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.		7	6	6

No	Uraian	Satuan	Capaian 2021	Target	
				2022	2023
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.		0,00	0,00	0,00
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.		0,00	0,00	0,00
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.		0,00	0,00	0,00
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	RT	1,00	1,00	1,00
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Orang	102,40	76,80	51,20
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Orang	413,60	310,20	206,80
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).		0,00	0,00	0,00
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Persen	92,43	93,34	94,26
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).		WTP (100%)	WTP (100%)	WTP (100%)
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Persen	64,29	67,45	70,60
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Persen	97,65	98,13	98,62
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Persen	57,94	60,17	62,40
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).		0,00	0,00	0,00
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Persen	20,68	21,36	22,04
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Persen	25,65	36,30	46,95
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.		79,63	84,13	88,64
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.		0,00	0,00	0,00
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Persen	78,78	79,56	80,34
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	ASN	2	2	3
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.		Ada	Ada	Ada
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan				

No	Uraian	Satuan	Capaian 2021	Target	
				2022	2023
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Rp	131.361.523.360	132.662.132.503	133.962.741.645
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Persen	0,57	0,78	0,99
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Persen	0,97	0,98	0,99
17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.		0,00	0,00	0,00
17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Persen	55,00	60,00	65,00
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Persen	43,78	44,57	45,35
17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).		0,00	0,00	0,00
17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).		0,00	0,00	0,00
17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	Persen	100,00	100,00	100,00
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	Persen	73,34	80,00	86,67
17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).		8	10	12
17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.		0,00	0,00	0,00
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)		Ada	Ada	Ada
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	Orang	8591	9186	9782
17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	Persen	100,00	100,00	100,00

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bulukumba 2022, diolah

BAB VII

PENUTUP

Bab Penutup Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 terbagi menjadi 2 (dua) sub bab yaitu : Kaidah Pelaksanaan dan Kesimpulan.

7.1 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang merupakan penjabaran yang berpedoman pada RPJPD 2005-2025, RPJMD Kabupaten Bulukumba 2021-2026, serta memperhatikan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, dan RKP Tahun 2023.

Dokumen RKPD Kabupaten Bulukumba berfungsi sebagai landasan, pedoman dan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam bentuk nota kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif, yang mana nota kesepakatan KUA dan PPAS ini sebagai dasar penyusunan RAPBD. Adapun fungsi RKPD lainnya adalah sebagai bahan evaluasi RAPBD yang mana untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD dan juga sebagai acuan/pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan - penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya sadar dan terencana yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimasa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi sumberdaya yang dimiliki oleh daerah, upaya tersebut pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mempercepat capaian target pembangunan maka harus memperhatikan kunci sukses pembangunan Daerah.

Kunci sukses pembangunan daerah adalah perencanaan yang baik, berkualitas, akuntabel dan benar benar dijadikan dasar pelaksanaan. Kualitas suatu rencana pembangunan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasarat dokumen tersebut ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan dengan dilandasi oleh komitmen dan konsistensi kebijakan yang tinggi serta menjadi acuan proses selanjutnya. Selain hal tersebut diatas juga diperlukan adanya sikap, mental, tekad, semangat, kejujuran dan disiplin kerja yang tinggi bagi para pelaku pembangunan dan penyelenggara Pemerintah Daerah. RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, berisi tentang rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan/pagu indikatif dan prakiraan maju. Dalam rangka keterbukaan dan transparansi informasi publik, maka RKPD akan dipublikasikan dengan tujuan diketahui oleh semua pihak.

Untuk menjamin agar program dan kegiatan masing-masing OPD pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan dan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi alokasi sumberdaya serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan, maka diperlukan instrumen pengendalian dan evaluasi.

Adapun Instrumen pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat disajikan program dan kegiatan yang sudah direncanakan dengan target target tertentu dan bagaimana pelaksanaan program dan kegiatan tersebut oleh masing masing OPD dan yang dievaluasi tidak hanya kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan saja, akan tetapi mencakup juga tingkat capaian kinerja pada setiap tahapan pelaksanaannya. Pada tata cara pengendalian tersebut menempatkan OPD pada posisi strategis, dimana OPD mempunyai kewenangan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan sendiri dan diharapkan apabila terjadi ketidak sesuaian dapat segera diambil langkah tindak lanjut sebagai upaya preventif dan korektif sebelum pelaksanaan program dan kegiatan tersebut menyimpang, sehingga dalam hal ini kemandirian OPD dalam memahami setiap proses dan langkah pengendalian menjadi suatu hal yang penting.

Sehubungan dengan tata cara pengendalian tersebut di atas maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing OPD agar menyempurnakan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2023.
2. OPD dan masyarakat termasuk didalamnya dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang ada di RKPD Tahun 2023 dengan sebaik baiknya.
3. Masyarakat luas dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan.
4. Untuk menjaga efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program, setiap OPD wajib melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
5. Pada akhir tahun anggaran 2023, setiap OPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang sudah ditetapkan, kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, kesesuaian dengan target RPJPD dan RPJMD serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan peraturan lainnya.

7.2 Kesimpulan

1. RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 penyusunannya dilakukan secara partisipatif berdasarkan usulan masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah, DPRD melalui pokok-pokok pikiran dan pemangku pembangunan lainnya.
2. RKPD merupakan acuan/pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2023.
3. Pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai target sasaran sesuai dengan tema pembangunan yang dimuat dalam RKPD 2023 yaitu : ***“Pengembangan Daya Tahan Perekonomian Masyarakat Dengan Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah”*** sehingga program kegiatan di masing-masing OPD mengarah pada pencapaian tersebut dan untuk menjamin pelaksanaan program kegiatan tersebut dapat sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, maka harus dilakukan evaluasi dan analisis sebagai tahap dalam melakukan pengendalian.
4. RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2023, diupayakan pelaksanaannya dapat sinergis dengan prioritas-prioritas pembangunan Nasional. Dalam rangka sinergitas dan mengingat kemampuan keuangan daerah sangat terbatas, maka untuk

melaksanakan hal tersebut ditempuh dengan cara sharing pembiayaan pembangunan dengan Pemerintah Pusat berupa pendanaan dari APBN maupun sumber dana lainnya.

5. Kerja keras, semangat, komitmen, partisipasi, konsistensi dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sangat diperlukan dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah, sehingga masing-masing dapat berperan dan bertanggungjawab terhadap proses, hasil dan kinerja pembangunan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.

 **BUPATI BULUKUMBA,**

MUCHTAR ALI YUSUF



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA**

Jalan Kenari No.1 Bulukumba Telp. (0413) 81011 Kode Pos 92511

Email : bappelitbangdabulukumba@gmail.com